PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO

Peraturan Wali Kota Sawahlunto
Nomor 20 Tahun 2025
Tentang :

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Tahun 2026

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025

SALINAN

WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang diselanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS.

Pasal 3

Rancangan KUA serta rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Wali Kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
    c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
    e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
    f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
    g. bab VII memuat penutup.
(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026.
(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2026;
    b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026; dan
    c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2026.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) RKPD Tahun 2026 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Agustus 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA

28 AUG 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GRAFIK ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG ..... I- 1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ..... I- 4
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ..... I- 5
1.3.1 HUBUNGAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO DENGAN RKP TAHUN 2026 ..... II- 6
1.3.2 HUBUNGAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO DENGAN RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 ..... II- 7
1.3.3 HUBUNGAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026 DENGAN RPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026 ..... II- 7
1.3.4 HUBUNGAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026 DENGAN RTRW KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2012-2032..... II- 7
1.3.5 HUBUNGAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026 DENGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH ..... II- 7
1.3.6 HUBUNGAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026 DENGAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH .... II- 8
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN ..... I- 8
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026 ..... I- 8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II- 1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ..... II- 1
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ..... II- 12
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM ..... II- 56
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH II-180
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2025 ..... II-198
2.2.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN II-198
2.2.2 EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) II-247
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH II-249
2.3.1 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH II-249
2.3.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II-250
2.3.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH II-257

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ..... III- 1
3.1.1 KONDISI DAN PROYEKSI EKONOMI GLOBAL ..... III- 1
3.1.2 KONDISI DAN PROYEKSI EKONOMI NASIONAL ..... III- 1
3.1.3 KONDISI DAN PROYEKSI EKONOMI SUMATERA BARAT ..... III- 3
3.1.4 KONDISI DAN PROYEKSI EKONOMI KOTA SAWAHLUNTO ..... III- 5
3.1.5 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH ..... III- 9
3.1.6 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026 ..... III- 10
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ..... III- 12
3.2.1 KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022-2024 ..... III- 12
3.2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022-2024 ..... III- 21
3.2.3 PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA RKPD TAHUN 2026 ..... III- 24

3.2.4 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG AKAN DIPROYEKSIKAN ..... III- 25

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN..... IV- 1
4.1.1 TELAAHAN RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026..... IV- 1
4.1.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SAWAHLUNTO IV- 3
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-12
4.2.1 SINKRONISASI PRIORITAS KOTA SAWAHLUNTO DENGAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PRIORITAS PROVINSI..... IV-13
4.2.2 PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026..... IV-24
4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH MEMUAT POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN 2026..... IV-32
4.4 ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026 .... IV-35

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V- 1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO..... VI- 1
6.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA ..... VI- 2
6.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH..... VI- 4

BAB VII PENUTUP

7.1 KAIDAH PELAKSANAAN ..... VII- 1
7.2 MANAJEMEN RESIKO PEMBANGUNAN..... VII- 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah RT, RW Dan Dusun Per Kecamatan Kota Sawahlunto II-2
Tabel 2.2 Luas Administratif Per-Kecamatan Kota Sawahlunto II-2
Tabel 2.3 Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto II-3
Tabel 2.4 Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto II-4
Tabel 2.5 Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaan per Kecamatan Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... II-7
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-9
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... II-10
Tabel 2.8 Jumlah Kelahiran, Kematian dan Perpindahan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... II-11
Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-11
Tabel 2.10 Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... II-11
Tabel 2.11 Jenis Pekerjaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... II-12
Tabel 2.12 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha (Supply Side) Dan Jenis Pengeluaran (Demand Side) Tahun 2020 – 2024 ..... II-14
Tabel 2.13 Perkembangan Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-15
Tabel 2.14 Target Laju Inflasi Tahun 2022 – 2024 ..... II-16
Tabel 2.15 Laju Inflasi Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pengeluaran Tahun 2020 - 2024 ..... II-17
Tabel 2.16 Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (juta rupiah/jiwa) II-19
Tabel 2.17 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat (Juta Rupiah/Jiwa) Tahun 2020 – 2024 ..... II-20
Tabel 2.18 Perkembangan Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-21
Tabel 2.19 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-23
Tabel 2.20 Posisi Kota Sawahlunto Dalam 10 Kabupaten/Kota Dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-24
Tabel 2.21 Estimasi Kemiskinan Ekstrem Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023 ..... II-26
Tabel 2.22 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 .. II-27
Tabel 2.23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 . II-27
Tabel 2.24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-28
Tabel 2.25 Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2024 ..... II-28
Tabel 2.26 TPAK Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024 ..... II-29
Tabel 2.27 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 . II-30
Tabel 2.28 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-30
Tabel 2.29 TPT Kota Sawahlunto, TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-31
Tabel 2.30 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-31
Tabel 2.31 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-32
Tabel 2.32 Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 2021-2024 ..... II-32
Tabel 2.33 Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Dan Informal Berdasarkan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 . II-33
Tabel 2.34 Total Dana Pihak Ketiga di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-35
Tabel 2.35 Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-35
Tabel 2.36 Total Kredit Dan PDRB ADHB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-37
Tabel 2.37 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 . II-37
Tabel 2.38 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-38

Tabel 2.39 Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-38
Tabel 2.40 Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-39
Tabel 2.41 Opini BPK Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-40
Tabel 2.42 Pola Pangan Harapan Hasil Survei Tahun 2020 - 2024 ..... II-40
Tabel 2.43 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-42
Tabel 2.44 Produktivitas Padi Tahun 2020-2024 ..... II-43
Tabel 2.45 Luas Sawah Menurut Jenis Pengairan Tahun 2020-2024 ..... II-43
Tabel 2.46 Produktivitas Tanaman Perkebunan Karet Tahun 2020-2024 ..... II-43
Tabel 2.47 Produktivitas Tanaman Perkebunan Kakao Tahun 2020 – 2024 ..... II-44
Tabel 2.48 Perkembangan Populasi Dan Produksi Daging Tahun 2020-2024 ..... II-44
Tabel 2.49 Perkembangan Ternak Unggas Populasi Ternak Produksi Daging Tahun 2020-2024 ..... II-45
Tabel 2.50 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2020-2024 ..... II-46
Tabel 2.51 Pertumbuhan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-47
Tabel 2.52 Rasio Kewirausahaan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-48
Tabel 2.53 Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-49
Tabel 2.54 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-49
Tabel 2.55 Return On Asset (ROA) dari BUMD Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-50
Tabel 2.56 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024 ..... II-50
Tabel 2.57 Peringkat IPM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ..... II-51
Tabel 2.58 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ..... II-51
Tabel 2.59 Peringkat Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ..... II-52
Tabel 2.60 Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ..... II-52
Tabel 2.61 Peringkat Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2020 - 2024 ..... II-53
Tabel 2.62 Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ..... II-53
Tabel 2.63 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ..... II-54
Tabel 2.64 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ..... II-54
Tabel 2.65 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ..... II-54
Tabel 2.66 Group Kesenian Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-55
Tabel 2.67 Jumlah Gedung Kesenian di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-56
Tabel 2.68 Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Kota SawahluntoTahun 2020-2024 II-56
Tabel 2.69 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-57
Tabel 2.70 Tabel Inovasi Dinas Pendidikan Tahun 2024 ..... II-57
Tabel 2.71 Persentase Lulusan SD Yang Hafiz Alquran Juz 30 Tahun 2020 - 2024 . II-58
Tabel 2.72 Nilai Assesment Kompetensi (Numerasi dan Literasi Minimum) Tahun 2020 - 2024 ..... II-58
Tabel 2.73 Angka Partispasi Kasar (APK) Tingkat SD dan SMP Tahun 2020 – 2024 II-59
Tabel 2.74 Angka Partispasi Murni (APM) Tahun 2020 – 2024 (%) II-59
Tabel 2.75 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 .....II-59
Tabel 2.76 Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 .....II-60
Tabel 2.77 Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017 ..... II-60
Tabel 2.78 Persentase Sekolah Berakreditasi di Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-59

Tabel 2.79 Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-61
Tabel 2.80 Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 (%) II-61
Tabel 2.81 Angka Melanjutkan Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-62
Tabel 2.82 Data Jumlah Siswa Sekolah Nonformal (NF) / Kesetaraan II-62
Tabel 2.83 Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi baik II-63
Tabel 2.84 Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam kondisi baik (%) II-63
Tabel 2.85 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-63
Tabel 2.86 Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-64
Tabel 2.87 Guru yang Memenuhi Kualitas S1/ DIV Tahun 2020 – 2024 ..... II-65
Tabel 2.88 Persentase Kasus Stunting Balita di Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-65
Tabel 2.89 Perbandingan Prevalensi Stunting Kota Sawahlunto dengan Provinsi dan Indonesia II-65
Tabel 2.90 Jumlah kematian Balita Tahun 2020 – 2024 ..... II-66
Tabel 2.91 Indikator Kinerja Berhubungan dengan RSUD Tahun 2020 - 2024 ..... II-66
Tabel 2.92 Jumlah Kematian Bayi Tahun 2020 - 2024 ..... II-66
Tabel 2.93 Jumlah Kematian Ibu di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-67
Tabel 2.94 Angka Kematian Ibu di Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-67
Tabel 2.95 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-68
Tabel 2.96 Rasio Posyandu dan Balita Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-68
Tabel 2.97 Persentase Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-68
Tabel 2.98 Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-69
Tabel 2.99 Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-69
Tabel 2.100 Rasio Dokter Per satuan Penduduk Di Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-69
Tabel 2.101 Sarana Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-70
Tabel 2.102 Tenaga Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-70
Tabel 2.103 Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Covarage) (%) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-71
Tabel 2.104 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-71
Tabel 2.105 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah II-72
Tabel 2.106 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Sawahlunto Tahun 2020– 2024 ..... II-73
Tabel 2.107 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-73
Tabel 2.108 Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-74
Tabel 2.109 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-74
Tabel 2.110 Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-75
Tabel 2.111 Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-75
Tabel 2.112 Rasio Jaringan Irigasi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-75
Tabel 2.113 Persentase RT yang memiliki air akses terhadap layanan sumber air minum layak Tahun 2020- 2024 ..... II-76
Tabel 2.114 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2020 - 2024 ..... II-76
Tabel 2.115 Persentase Rumah Tangga Yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 - 2024 ..... II-77
Tabel 2.116 Persentase Rumah Tangga dengan SPAL yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 - 2024 ..... II-77
Tabel 2.117 Persentase Kapasitas Air Baku di Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-77
Tabel 2.118 Penerima Bantuan RTLH Tahun 2020 -2024 ..... II-78
Tabel 2.119 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah II-78
Tabel 2.120 Data Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020 – 2024 ..... II-79
Tabel 2.121 Empat Kriteria Pengukuran Indikator II-80
Tabel 2.122 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau Kota Sawahlunto Tahun 2020- 2024 ..... II-80
Tabel 2.123 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2020 - 2024 ..... II-80
Tabel 2.124 Rasio Permukiman Layak HunI Tahun 2020 - 2024 ..... II-81

Tabel 2.125 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2020- 2024 ..... II-81
Tabel 2.126 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau Tahun 2020- 2024 ..... II-81
Tabel 2.127 Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-82
Tabel 2.128 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2020- 2024 ..... II-82
Tabel 2.129 Persentase Luasan Permukiman Kumuh dikawasan Perkotaan Tahun 2020 - 2024 ..... II-83
Tabel 2.130 Indikator Urusan Ketentraman dan Ketertiban UmumTahun 2020 – 2024 ... II-83
Tabel 2.131 Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-84
Tabel 2.132 Indikator penanggulangan bencana daerah di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-85
Tabel 2.133 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Sawahlunto Tahun 2024 ... II-86
Tabel 2.134 Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK) di Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... II-87
Tabel 2.135 Jenis Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Kota Sawahlunto Tahun 2024 ... II-87
Tabel 2.136 Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Sosial Tahun 2020 – 2024 ..... II-87
Tabel 2.137 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-88
Tabel 2.138 Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan dan Capaian Indikator Perlindungan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 .. II-88
Tabel 2.139 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 .... II-89
Tabel 2.140 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi, Kewirausahaan Dan Masyarakat Tahun 2020-2024 ..... II-90
Tabel 2.141 Jumlah UMKM Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-91
Tabel 2.142 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-92
Tabel 2.143 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-93
Tabel 2.144 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-94
Tabel 2.145 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-95
Tabel 2.146 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-96
Tabel 2.147 Jumlah KDRT Di Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-97
Tabel 2.148 Data Kasus yang Masuk dan Diselesaikan oleh UPTD PPA Tahun 2024 ..... II-98
Tabel 2.149 Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembanguan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto Tahun 2021 - 2024 ..... II-99
Tabel 2.150 Persentase Keterlibatan Perempuan Di Lembaga Pemerintahan Tahun 2020 - 2024 ..... II-100
Tabel 2.151 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) Tahun 2021 - 2024 ..... II-101
Tabel 2.152 Predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-101
Tabel 2.153 Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA), Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-102
Tabel 2.154 Jumlah Forum Anak Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-103
Tabel 2.155 Prasarana Ramah Anak Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-103
Tabel 2.156 Predikat Kota Layak Anak Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-103
Tabel 2.157 Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024. II-104
Tabel 2.158 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Bidang Pangan Tahun 2020 - 2024 ..... II-105
Tabel 2.159 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2020-2024 ..... II-106
Tabel 2.160 Data Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Sawahlunto II-107
Tabel 2.161 IKLH Kota Sawahlunto II-107
Tabel 2.162 IKLH Kota Sawahlunto II-108

Tabel 2.163 Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-109
Tabel 2.164 Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-109
Tabel 2.165 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Tahun 2020 – 2024 ..... II-110
Tabel 2.166 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota Tahun 2020 – 2024 ..... II-111
Tabel 2.167 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024 ..... II-111
Tabel 2.168 Penyusunan Dokumen RPPLH Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-111
Tabel 2.169 Penyusunan Dokumen KLHS Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-112
Tabel 2.170 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020-2024 ..... II-112
Tabel 2.171 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2020-2024 ..... II-112
Tabel 2.172 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab dan atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH Kota Sawahlunto 2020-2024 ..... II-113
Tabel 2.173 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto 2020-2024 ..... II-113
Tabel 2.174 Timbulan Sampah yang ditangani Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-114
Tabel 2.175 Persentase Jumlah Sampah yang terkurangi melalui 3R II-114
Tabel 2.176 Cakupan area pelayanan sampah kota sawahlunto tahun 2020-2024 ..... II-114
Tabel 2.177 Persentase jumlah sampah yang tertangani II-115
Tabel 2.178 Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh/Kapita) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-115
Tabel 2.179 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun 2020 – 2024 II-116
Tabel 2.180 Inovasi Pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk II-116
Tabel 2.181 Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2020 - 2024 ..... II-116
Tabel 2.182 Data Kepemilikan KTP-Elektronik di Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 II-117
Tabel 2.183 Rekapitulasi Data Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun Kota Sawahlunto Tiap Kecamatan Per 31 Desember 2024 ..... II-117
Tabel 2.184 Rekapitulasi Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Sawahlunto Tiap Kecamatan Per 31 Desember 2024 ..... II-117
Tabel 2.185 Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020-2024 ..... II-117
Tabel 2.186 Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan Yang Telah Melakukan Perjanjian Kerjasama (IKD) II-118
Tabel 2.187 Rasio Kependudukan Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... II-119
Tabel 2.188 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan Tahun 2021 – 2024 ..... II-119
Tabel 2.189 Status Desa berdasar Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-120
Tabel 2.190 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 - 2024 ..... II-121
Tabel 2.191 Capaian Indikator Kinerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 – 2024 ..... II-121
Tabel 2.192 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Tahun 2020 – 2024 ..... II-122
Tabel 2.193 Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) Tahun 2020 - 2024 ..... II-122
Tabel 2.194 Angka Kelahiran Total (TFR) Kota Sawahlunto tahun 2020 - 2024 ..... II-123
Tabel 2.195 Persentase Perangkat Daerah Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-123
Tabel 2.196 Rata-rata Jumlah Anak per Rumah Tangga di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-123
Tabel 2.197 Rasio Akseptor KB di Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-124
Tabel 2.198 Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR di Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-124
Tabel 2.199 Jumlah petugas pembantu Pembina KB/Desa (PPKDB) setiap desa/kelurahan II-124
Tabel 2.200 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontreasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahun 2020 - 2024 ..... II-124
Tabel 2.201 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontreasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahun 2020 – 2024 ..... II-125
Tabel 2.202 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-125

Tabel 2.203 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) II-125
Tabel 2.204 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021 - 2024 ..... II-126
Tabel 2.205 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-126
Tabel 2.206 Sarana Perlengkapan Jalan di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-127
Tabel 2.207 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-128
Tabel 2.208 Persentase Koperasi Aktif Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-129
Tabel 2.209 Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-129
Tabel 2.210 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-129
Tabel 2.211 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Kota Sawahlunto (%) Tahun 2020-2024 ..... II-130
Tabel 2.212 Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 - 2024 ..... II-130
Tabel 2.213 Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro Tahun 2020 - 2024 ..... II-131
Tabel 2.214 Capaian Indikator Kinerja Usaha Kecil Tahun 2020 - 2024 ..... II-131
Tabel 2.215 Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-132
Tabel 2.216 Jumlah Perusahaan Yang Berinvestasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-132
Tabel 2.217 Jumlah Realisasi Investasi di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-133
Tabel 2.218 Jumlah Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-133
Tabel 2.219 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-134
Tabel 2.220 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-134
Tabel 2.221 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024 ..... II-136
Tabel 2.222 Pelatihan Kewirausahaan Untuk Pemuda Kota Sawahlunto Tahun 2024 ... II-136
Tabel 2.223 Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Kota SawahluntoTahun 2020-2024 .... II-136
Tabel 2.224 Jumlah Organisasi Kepemudaan Tahun 2020-2024 ..... II-137
Tabel 2.225 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2020–2024 ..... II-137
Tabel 2.226 Cakupan Pembinaan Olahraga Tahun 2020–2024 ..... II-137
Tabel 2.227 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat Kota Sawahluto Tahun 2020-2024 ..... II-137
Tabel 2.228 Cakupan Pembinaan Atlet Pelajar Kota Sawahluto Tahun 2020–2024 ..... II-137
Tabel 2.229 Prestasi Olahraga Menurut Cabang Tahun 2020–2024 ..... II-138
Tabel 2.230 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-139
Tabel 2.231 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-139
Tabel 2.232 Group Kesenian Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-140
Tabel 2.233 Jumlah Gedung Kesenian di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-140
Tabel 2.234 Komunitas Budaya yang ada di Kota Sawahlunto II-142
Tabel 2.235 Persentase Pelestarian Cagar Budaya Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024. II-144
Tabel 2.236 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (Tangible) Dan Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible) Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-144
Tabel 2.237 Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible) Tahun 2020 - 2024 ..... II-145
Tabel 2.238 Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible) Tahun 2020 – 2024 ..... II-145
Tabel 2.239 Jumlah Kunjungan Objek Wisata Museum Tahun 2020-2024 ..... II-146
Tabel 2.240 Rasio Perpustakaan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-146
Tabel 2.241 Perkembangan Koleksi Buku di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-146
Tabel 2.242 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto Tahun 2020- 2024 ..... II-147
Tabel 2.243 Perkembangan Arsip Statis yang Diakuisisi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-149
Tabel 2.244 Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Arsip secara Baku Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-149
Tabel 2.245 Persentase Kesediaan Arsip Sebagai Bahan AK, ABS dan PN Kota Sawahlunt Tahun 2020-2024 ..... II-149
Tabel 2.246 SDM Pengelola Kearsipan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-149

Tabel 2.247 Data Capaian Pembangunan Kota Sawahlunto Bidang Kearsipan Tahun 2023-2024 ..... II-150
Tabel 2.248 Produksi dan Konsumsi Ikan Tahun 2020 - 2024 ..... II-150
Tabel 2.249 Luas Areal Budidaya Perikanan Darat (Ha) Tahun 2020-2024 ..... II-150
Tabel 2.250 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata Tahun 2020-2024 ..... II-151
Tabel 2.251 Kontribusi Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB Tahun 2020-2024 ..... II-152
Tabel 2.252 Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-152
Tabel 2.253 Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kota Sawahlunto (Berdasarkan Tiket Masuk) Tahun 2020-2024 ..... II-152
Tabel 2.254 Jumlah Pengunjung Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Tahun 2020-2024 ..... II-153
Tabel 2.255 Data Pengembangan Potensi/Destinasi Wisata (Geosite) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-154
Tabel 2.256 Data Jenis Usaha Pariwisata di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-155
Tabel 2.257 Jumlah Kelembagaan Pariwisata Kota Sawahlunto Tahun 2020–2024 ..... II-155
Tabel 2.258 Daftar Kunjungan Hotel, Wisma, Homestay Dari Tahun 2020-2024 ..... II-157
Tabel 2.259 Capaian Indikator Bidang Pertanian Tahun 2020 – 2024 ..... II-159
Tabel 2.260 Capaian Indikator Bidang Perdagangan Realisasi Tahun 2020 -2024 ..... II-160
Tabel 2.261 Jumlah Pedagang Pasar Tetap Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-161
Tabel 2.262 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-161
Tabel 2.263 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-162
Tabel 2.264 Urusan Pemerintahan Sektor Perindustrian Realisasi Tahun 2020 -2024 ... II-163
Tabel 2.265 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesekretariatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-164
Tabel 2.266 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... II-165
Tabel 2.267 Jumlah kegiatan Sidang dan Rapat DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2020 -2024 ..... II-165
Tabel 2.268 Jumlah Keputusan DPRD menurut Jenis Keputusan di Kota Sawahlunto, Tahun 2020 - 2024 ..... II-166
Tabel 2.269 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perencanaan Urusan Pemerintahan Tahun 2020 – 2024 ..... II-166
Tabel 2.270 Realisasi APBD Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-167
Tabel 2.271 Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-167
Tabel 2.272 Jumlah Bank dan Asuransi Tahun 2020-2024 ..... II-168
Tabel 2.273 Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-169
Tabel 2.274 Persentase IKPAK Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-170
Tabel 2.275 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi Instansi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-170
Tabel 2.276 Jumlah ASN dengan Jabatan Fungsional Tertentu Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-170
Tabel 2.277 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-171
Tabel 2.278 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-171
Tabel 2.279 Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Kepegawaian Tahun 2020-2024 ..... II-171
Tabel 2.280 Inovasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia II-172
Tabel 2.281 Prediket Inovasi Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-173
Tabel 2.282 Kegiatan Inovasi yang Telah Dilaksanakan Tahun 2024 ..... II-174
Tabel 2.283 Sebaran Data Usulan Inovasi Daerah Dari Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... II-176
Tabel 2.284 Target Jumlah Inovasi Berdasarkan Inisiator II-177
Tabel 2.285 Target Inovasi Berdasarkan Perangkat Daerah II-178
Tabel 2.286 Jumlah Auditor dan P2UPD di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-179
Tabel 2.287 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2020-2024 ..... II-179
Tabel 2.288 Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2020-2024 ..... II-180
Tabel 2.289 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-181
Tabel 2.290 Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-183

Tabel 2.291 Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 ..... II-183
Tabel 2.292 Hasil Analisis Shift Share (SS) Kota Sawahlunt Tahun 2020-2024 ..... II-185
Tabel 2.293 Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kota Sawahlunto 2020-2024 ..... II-186
Tabel 2.294 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-187
Tabel 2.295 Perbandingan Hasil Analisis Shift Share, LQ dan Tipologi Klassen Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-187
Tabel 2.296 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-188
Tabel 2.297 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-189
Tabel 2.298 Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2020–2024 ..... II-189
Tabel 2.299 Realisasi Persentase Kesesuaian Pemanfatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2020–2024 ..... II-190
Tabel 2.300 Luas Wilayah Industri Tahun 2020-2024 ..... II-190
Tabel 2.301 Luas Wilayah Kota Sawahlunto II-191
Tabel 2.302 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun 2020 – 2024 ..... II-191
Tabel 2.303 Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-193
Tabel 2.304 Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPNaker Kota SawahluntoTahun 2020-2024 ..... II-193
Tabel 2.305 Target dan Realisasi PDRD Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-194
Tabel 2.306 Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 s.d 2024 ..... II-195
Tabel 2.307 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Sawahlunto yang Ditetapkan Tahun 2020 – 2024 ..... II-196
Tabel 2.308 Status Desa berdasar Profil Desa Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-197
Tabel 2.309 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-197
Tabel 2.310 Rasio Ketergantungan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-198
Tabel 2.311 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2025 ..... II-199
Tabel 2.312 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-247
Tabel 2.313 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Prioritas Tahun 2023 ..... II-249
Tabel 3.1 Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2025-2026 ..... III-10
Tabel 3.2 Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022- 2024 ..... III-13
Tabel 3.3 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022-2024 ..... III-14
Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022-2024 ..... III-14
Tabel 3.5 Perkembangan Realisasi PAD, Tingkat Capaian, Tingkat Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realiasi Tahun 2022-2024 ..... III-15
Tabel 3.6 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) III-16
Tabel 3.7 Perkembangan Capaian Realisasi Pendapatan Transfer Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024 ..... III-16
Tabel 3.8 Perkembangan Capaian Realisasi Dana Bagi Hasil Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024 ..... III-17
Tabel 3.9 Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024 ..... III-17
Tabel 3.10 Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024 ..... III-18
Tabel 3.11 Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi Tahun 2022-2024 ..... III-18
Tabel 3.12 Lain – lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022-2024 ..... III-18
Tabel 3.13 Perkembangan Capaian Realisasi, Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024 ..... III-19
Tabel 3.14 Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022-2024 ..... III-19
Tabel 3.15 Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022-2024 ..... III-20
Tabel 3.16 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2026 ..... III-28
Tabel 3.17 Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2026 ..... III-32
Tabel 3.18 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2026 ..... III-34
Tabel 4.1 Penjabaran Misi Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 ..... IV- 4

Tabel 4.2 Matriks keselarasan Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Sawahlunto IV-10
Tabel 4.3 Konsistensi Permasalahan/Isu Strategis Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto.....IV-12
Tabel 4.4 Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Program Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2026 Dalam Mendukung Program Prioritas/ Unggulan RKP Tahun 2026.....IV-15
Tabel 4.5 Program Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2026 Dalam Mendukung Program Prioritas/Unggulan Provinsi Sumatera Barat IV-21
Tabel 4.6 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2026.....IV-25
Tabel 4.7 Program Pemerintah Daerah Yang Memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-32
Tabel 4.8 Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026.....IV-35
Tabel 5.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Sawahlunto.....V- 2
Tabel 6.1 Target Indikator Kinerja Makro Kota SawahluntoTahun 2026 .....VI-1
Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota sawahluntoTahun 2026.....VI-2
Tabel 6.3 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota sawahlunto Tahun 2026..... VI-4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-10
Grafik 2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ..... II-13
Grafik 2.3 Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2024 (Dalam persen) II-14
Grafik 2.4 Kontribusi Jenis Pengeluaran Kota Sawahlunto Tahun 2024 (Dalam persen) . II-14
Grafik 2.5 Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-16
Grafik 2.6 Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Kota Padang Dan Kota Bukittinggi Tahun 2020 - 2024 ..... II-17
Grafik 2.7 Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020 - 2024 ..... II-17
Grafik 2.8 Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-19
Grafik 2.9 Perkembangan PDRB ADHK Per Kapita Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-20
Grafik 2.10 Gini Rasio Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ..... II-22
Grafik 2.11 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto (Rupiah/Kapita/Bulan) Tahun 2020–2024 ..... II-22
Grafik 2.12 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-23
Grafik 2.13 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-24
Grafik 2.14 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-32
Grafik 2.15 Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-34
Grafik 2.16 Perbandingan Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2024 ..... II-41
Grafik 2.17 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2020 – 2024 .. II-46
Grafik 2.18 Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2024 (Dalam Persen) II-47
Grafik 2.19 Pertumbuhan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-48
Grafik 2.20 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 (Dalam Rp)..... II-181
Grafik 2.21 Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-182
Grafik 2.22 Perkembangan Nilai Tukar Petani Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-184
Grafik 2.23 Perkembangan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB) Tahun 2020 – 2024 .. II-185
Grafik 3.1 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... III-6
Grafik 3.2 Capaian PDRB ADHB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... III-6
Grafik 3.3 Capaian PDRB ADHK Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024..... III-7
Grafik 3.4 Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... III-7
Grafik 3.5 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... III-8
Grafik 3.6 Capaian Gini Rasio Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024..... III-8
Grafik 3.7 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... III-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD	I- 2
Gambar 1.2	Keterkaitan Dokumen Perencanaan	I- 6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Sawahlunto	II- 3
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lereng Kota Sawahlunto	II- 4
Gambar 2.3	Peta Geologi Kota Sawahlunto	II- 5
Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Kota Sawahlunto	II- 6
Gambar 2.5	Peta Tutupan Lahan Kota Sawahlunto	II- 7
Gambar 2.6	Peta Daerah Rawan Pangan Kota Sawahlunto	II- 42
Gambar 2.7	Peran Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi	II-259

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa dokumen perencanaan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja perangkat daerah untuk jangka waktu satu tahun. RKPD Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memuat arah kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RKP Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 berperan penting dalam mensinergikan berbagai program dan kegiatan lintas sektor guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) seluruh perangkat daerah. Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan secara partisipatif melalui pelibatan para pemangku kepentingan, serta berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top-down-bottom-up, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyusun RKPD tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yaitu, pertama pendekatan teknokratis yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Ketiga pendekatan politis, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat pendekatan bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada substansi dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pertama pendekatan holistic-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kedua, pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dengan dilantiknya Riyanda Putra, S.IP sebagai Wali Kota Sawahlunto dan H.Jeffry Hibatullah sebagai Wakil Wali Kota Sawahlunto berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia, dengan dasar inilah disusun dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029. Sehingga penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan **simultan dan terkordinasi** dengan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD Tahun 2026 tidak berpedoman pada Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Namun, menjadi pedoman dalam penyusunan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 dan realisasi RPD Tahun 2024-2026 sebagai acuan perumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah tahun 2026 serta penetapan target kinerja pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2026.

RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 juga telah memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, mempedomani Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Kota Sawahlunto 2025-2029 Dengan memperhatikan keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, sehingga pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2026 mengangkat tema **"PERKUATAN PONDASI KEUNGGULAN PARIWISATA UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN"**

Dalam melaksanakan pembangunan sesuai tema tersebut maka, disusunlah RKPD melalui beberapa tahapan dan tata cara sebagaimana tersaji pada gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD

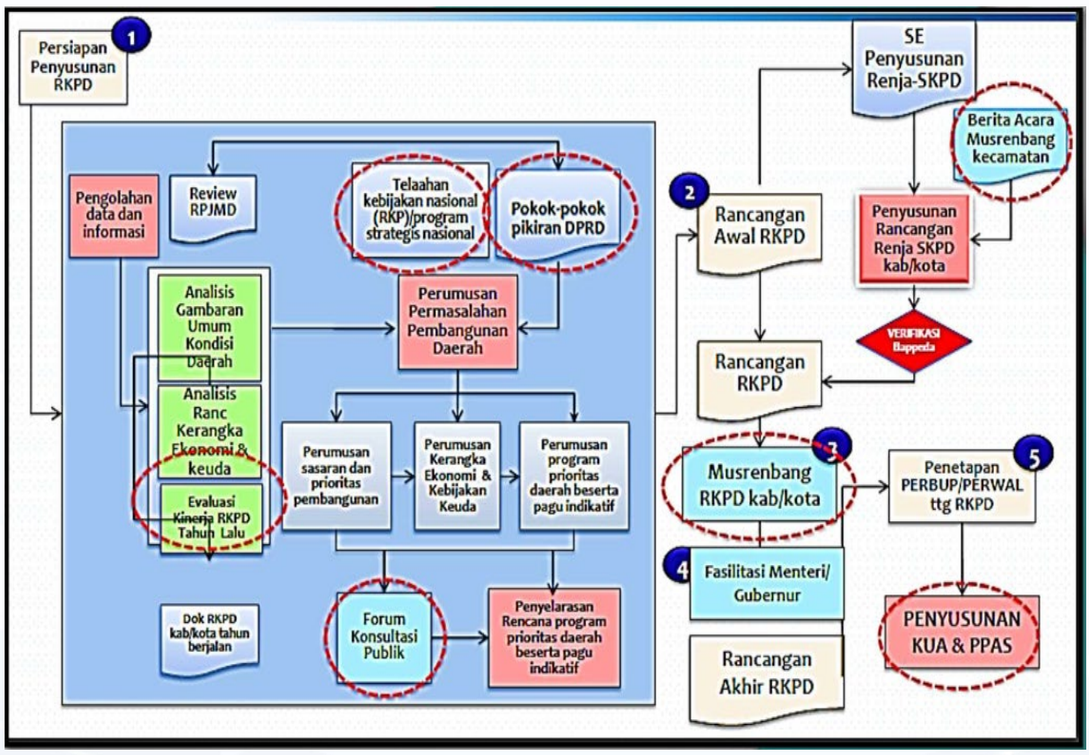

Sumber Data : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86, 2017

Dari gambar diatas dapat dijelaskan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026, yang terdiri dari beberapa proses yaitu :
   a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 melalui Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-34.2025 tentang Penetapan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2026 pada tanggal 2 Januari 2025;
   b. orientasi mengenai RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026;

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026, dengan melaksanakan rapat kerja tim dengan menghadirkan seluruh tim penyusun RKPD Tahun 2026;
d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 oleh tim pengumpul data pada SK Tim penyusun RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026;

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026, Penyusunan Rancangan awal RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 melalui beberapa tahapan dan rangkaian kegiatan yaitu:
   a. Tahap penyusunan Rancangan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026, mencakup:
      - analisis gambaran umum kondisi daerah;
      - analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
      - analisis kapasitas rill keuangan daerah;
      - penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
      - perumusan permasalahan pembangunan daerah;
      - penelaahan terhadap sasaran Rencana Pemerintah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;
      - penelaahan terhadap arah kebijakan Rencana Pemerintah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;
      - penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP Tahun 2026 dan program strategis nasional;
      - penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2026;
      - perumusan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026;dan
      - perumusan rencana kerja program dan pendanaan Tahun 2026.
   b. Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026, DPRD Kota Sawahlunto telah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Barenlitbangda dengan hasil Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pokok-pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2026 tanggal 9 April 2025 berdasarkan hasil reses/jaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;
   c. Rancangan Awal RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 dibahas bersama dengan kepala daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada Tanggal 12 Februari 2025, untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan untuk dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

3. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026, Penyusunan Rancangan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 adalah proses penyempurnaan Rancangan awal RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 berdasarkan:
   a. Rancangan awal Renja seluruh perangkat daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Maret 2025; dan
   b. Hasil penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD Provinsi Tahun 2026, RKP Tahun 2026 dan program strategis nasional Tahun 2026.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026, Musrenbang RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025, bertujuan untuk membahas Rancangan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 yang dilaksanakan dalam rangka:
   a. menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
   b. menyepakati prioritas pembangunan daerah;
   c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
   d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
   e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026, Perumusan rancangan akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 merupakan proses penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 menjadi rancangan akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026, Rancangan akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perwako RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026.
6. Penetapan Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026, Rancangan Peraturan Walikota tentang Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala Barenlitbangda kepada Walikota Sawahlunto melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan. Peraturan Walikota tentang Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 dijadikan sebagai :
   a. pedoman perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
   b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026;
   c. Pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2026.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan RKPD peraturan/perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 Tahun 2022);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 113)
26. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan RKPD Kota Sawahlunto 2026 telah berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu: RPJPD kota sawahlunto Tahun 2025-2045 Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2012-2032, Rancangan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029, RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.

Dokumen RKPD ini tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (dua puluh tahun), (2) Rencana Pemerintah Daerah (tiga tahun) dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (lima tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarki dengan RPJP Nasional 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045, RPJPD Kota Sawahlunto 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPD Kota Sawahlunto 2024-2026 serta Rancangan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Hubungan Dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Perencanaan

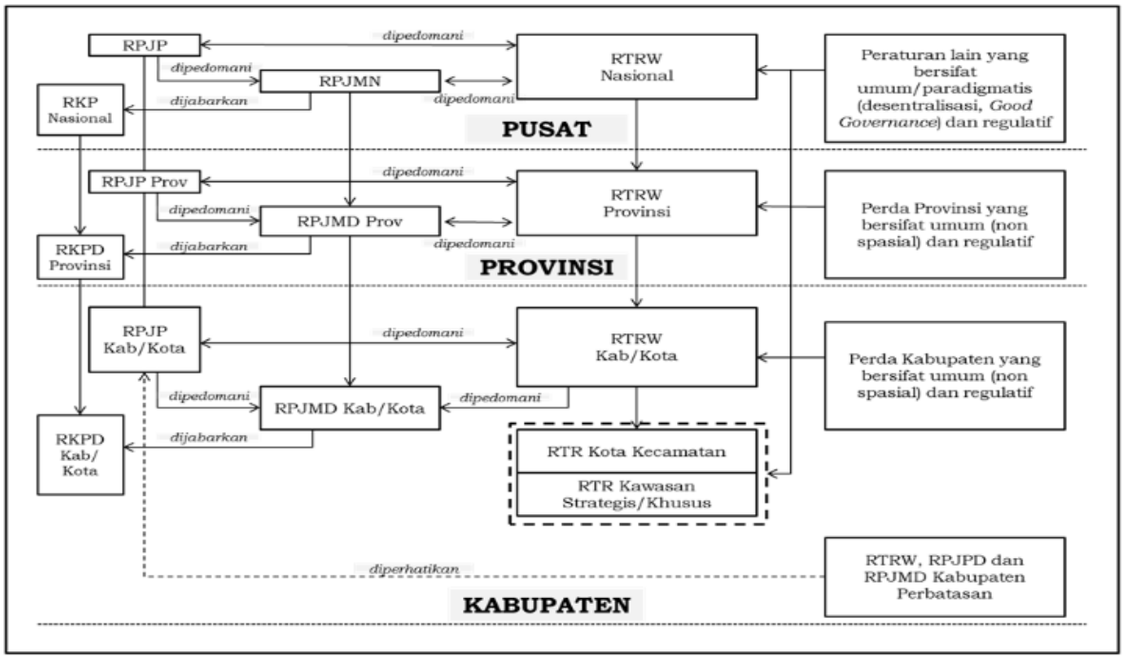

Sumber Data: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86, 2017

1.3.1 Hubungan RKPD Kota Sawahlunto dengan RKP Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan agenda RPJPN Tahun 2025-2045 serta RPJMN Tahun 2025-2029, maka sebagai bagian dari pencapaian Pembangunan nasional, dokumen RKPD Tahun 2026 juga diarahkan serta difokuskan pada pelaksanaan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi untuk tetap berada pada tren positif dan memastikan upaya pencapaian pembangunan dapat tetap berkesinambungan, terencana dengan baik sesuai dengan koridor target pembangunan jangka menengah agar dapat tercapai dengan tepat waktu. RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani RKP Tahun 2026 yang mempunyai tema **" Perkuatan Pondasi Keunggulan Pariwisata Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusifdan Berkelanjutan"**.

Berdasarkan tema RKP tersebut maka ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu :

1. Kebijakan kewilayahan
   - Pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi
   - Pengelolaan pusat pertumbuhan
2. Kebijakan Umum
   - Penguatan pondasi keuangan daerah
   - Percepatan reforma agraria
   - Penuntasan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
   - Optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris
   - Penyediaan data dan informa geopasial dasar dan tematik
3. Infrastruktur dan layanan dasar
   - Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun serta peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
   - Pengembangan konektivitas dasar
   - Peningkatan ketahanan Sumber Daya Alam berbasis alam

- Reformasi pengelolaan sampah
- Pemenuhan akses air minum dan sanitasi
- Peningkatan akses Rumah Tangga terhadap hunian layak
- Memperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana
- Pemerataan pelayanan ketenagalistrikan dan penuntasan konektivitas digital

1.3.2 Hubungan RKPD Kota Sawahlunto dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Tema pembangunan untuk RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 perlu menggambarkan potensi lokal, tantangan spesifik daerah, serta agenda prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan karakteristik geografis, budaya dan struktur ekonomi Sumatera Barat, tema yang diusulkan adalah "**Perkuatan Pondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yangInklusif dan Berkelanjutan**" Tema pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan sektor-sektor strategis melalui pembenahan mendasar (pondasi) agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka, tetapi juga merata (inklusif) dan berkesinambungan (berkelanjutan) dari aspek lingkungan,sosial,dan ekonomi.

RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 wajib mengacu pada Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dengan tema pembangunan Tahun 2026 **"Perkuatan Pondasi Keunggulan Pariwisata Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusifdan Berkelanjutan"**.

1.3.3 Hubungan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 dengan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 mengacu pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Rencana program serta kegiatan prioritas RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

1.3.4 Hubungan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 dengan RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032

Dalam penyusunan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 memperhatikan RTRW Kota Sawahlunto yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032. RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya meliputi: struktur ruang dalam susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional, distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya dan pemanfaatan ruang melalui program yang disusun untuk mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan secara terpadu.

1.3.5 Hubungan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Hubungan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah bersifat hierarkis dan sinergis: Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen 5-tahunan dan berpedoman pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029, menjadi landasan bagi RKPD 2026. RKPD 2026 kemudian akan memuat prioritas pembangunan tahunan, termasuk program dan kegiatan perangkat daerah yang dirumuskan berdasarkan Renstra tersebut, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. RKPD 2026 memastikan adanya kesinambungan pembangunan daerah dalam satu tahun, dengan implementasi program yang sesuai dengan arah strategi jangka panjang yang telah diatur dalam Renstra Perangkat Daerah.

1.3.6 Hubungan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam renja perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026. Perumusan Renja perangkat daerah Kota Sawahlunto Tahun 2026 merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Dokumen RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 adalah: sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mengarahkan program dan kegiatan pembangunan daerah yang spesifik, terukur, dan terkoordinasi dalam satu tahun anggaran.

Tujuan penyusunan Dokumen RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 adalah:

1. Untuk mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah terpilih dalam RPJMD;
2. Untuk menyelaraskan dan mensinkronkan program pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional dan provinsi;
3. Untuk memastikan alokasi sumber daya pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
4. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat dalam pembangunan daerah;
5. Untuk menjawab permasalahan nyata yang dihadapi daerah;
6. Untuk pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026;
7. Untuk bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2026.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mengatur sistematika penyusunan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026, dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2026, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan aspek kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi makro tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang dikuatifikasikan melalui indikator makro daerah serta sumber sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi; pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi yang berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2024 serta kedudukan RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Sawahlunto merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang dijuluki sebagai Kota Arang. Julukan tersebut tak lepas dari Tambang Batubara yang aktif semenjak zaman kolonial Belanda, tetapi telah berhenti beroperasi dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini Kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik dan menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Pada Tahun 2001 seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto bersepakat untuk merubah arah dan haluan pembangunan daerah dari Kota Tambang menjadi Kota Wisata Tambang.

Kerja keras Pemerintah Kota Sawahlunto perlahan menuai hasil. Pada tanggal 6 Juli 2019 *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* (OCMHS) atau yang disebut dengan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO dengan keputusan Komite Warisan Dunia. Ini merupakan langkah besar Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mewujudkan mimpi menjadi Kota Wisata. Kawasan WTBOS yang ditetapkan meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu: Kota Sawahlunto, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman.

Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) merupakan warisan budaya dunia ke-5 setelah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Situs Purba Sangiran, dan *Cultural Landscape* Subak Bali. Cikal bakal pengajuan ini dimulai sejak Tahun 2009, penggarapan secara intens untuk proses nominasi, evaluasi, hingga penetapan berlangsung cukup cepat, dimana hanya membutuhkan waktu 4 (empat) tahun sejak masuk dalam daftar sementara (*tentative list*) pada 30 Januari 2015. OCMHS ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 12.15 waktu Baku, Azerbaijan (https://whc.unesco.org/en/list/1610) yang dihadiri oleh 22 (dua puluh dua) orang delegasi Republik Indonesia dengan Ketua Delegasi Prof. Rosa Surya Putra selaku Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, dihadiri juga oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc dan Deri Asta, SH selaku Walikota Sawahlunto.

Selain wisata sejarah, Kota Sawahlunto juga fokus pada pengembangan wisata alam. Kota Sawahlunto telah mendapatkan status *Geopark* Nasional untuk Kawasan Wisata Batu Runcing di Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang. Pada tahun 2021, tengah menuju status UNESCO *Global Geopark*. *Geopark* atau Taman Bumi sendiri menjadi salah satu upaya Kota Sawahlunto untuk menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selain itu, Kota Sawahlunto juga berkomitmen untuk menjadi salah satu kota di Indonesia yang mendapatkan dukungan peningkatan kapasitas dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta energi melalui *Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM) Asia*.

Konsep pembangunan dan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan daerah Tahun 2024-2026. Melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, sehingga gambaran umum Kota Sawahlunto dapat memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kota Sawahlunto.

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 Aspek Geografi

1. Letak, Luas Dan Batas Wilayah

Secara geografis Kota Sawahlunto berada pada gugusan perbukitan bukit barisan dengan posisi koordinat antara 100˚41”00’ - 100˚49’60” Bujur Timur dan 00˚33”40’-00˚48”33’ Lintang Selatan sedangkan secara administrasi Kota Sawahlunto berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Kabupaten Solok
- Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung

Secara administrasi Kota Sawahlunto terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, 10 (sepuluh) Kelurahan dan 27 (dua puluh tujuh) Desa. Berikut jumlah RT, RW, dan Dusun per-Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.1
Jumlah RT, RW Dan Dusun Per Kecamatan
Kota Sawahlunto

No	Kecamatan Desa/Kelurahan	RT	RW	Dusun
(1) Kecamatan Barangin		**32**	**13**	**25**
01	Desa Lumindai	-	-	5
02	Desa Balai Batu Sandaran	-	-	3
03	Kel. Saringan	11	5	-
04	Kel. Lubang Panjang	7	2	-
05	Kel. Durian I	6	2	-
06	Kel. Durian II	8	4	-
07	Desa Talago Gunung	-	-	4
08	Desa Santur	-	-	5
09	Desa Kolok Mudiak	-	-	3
10	Desa Kolok Nan Tuo	-	-	5
(2) Kecamatan Lembah Segar		**32**	**14**	**22**
01	Desa Lunto Barat	-	-	4
02	Desa Lunto Timur	-	-	4
03	Desa Pasar Kubang	-	-	3
04	Desa Kubang Tangah	-	-	5
05	Desa Kubang Utara Sikabu	-	-	6
06	Kel. Pasar	6	3	-
07	Kel. Kubang Sirakuk Utara	8	2	-
08	Kel. Kubang Sirakuk Selatan	4	2	-
09	Kel. Aur Mulyo	6	3	-
10	Kel. Tanah Lapang	4	2	-
11	Kel. Air Dingin	4	2	-
(3) Kecamatan Silungkang		**-**	**-**	**21**
01	Desa Silungkang Oso	-	-	4
02	Desa Taratak Bancah	-	-	3
03	Desa Muaro Kalaban	-	-	6
04	Desa Silungkang Tigo	-	-	5
05	Desa Silungkang Duo	-	-	3
(4) Kecamatan Talawi			**-**	**39**
01	Desa Sikalang	-	-	4
02	Desa Rantih	-	-	2
03	Desa Salak	-	-	3
04	Desa Sijantang Koto	-	-	3
05	Desa Talawi Hilir	-	-	4
06	Desa Talawi Mudik	-	-	4
07	Desa Bukik Gadang	-	-	3
08	Desa Batu Tanjung	-	-	4
09	Desa Kumbayau	-	-	4
10	Desa Data Mansiang	-	-	2
11	Desa Tumpuak Tangah	-	-	6
	Jumlah	**64**	**27**	**107**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2024

Dari tabel di atas, diketahui bahwa Kota Sawahlunto mempunyai keunikan sebagai sebuah kota. Faktanya, Kota Sawahlunto didominasi oleh desa yang merupakan karakter sebuah Kabupaten. Kondisi tersebut mengakibatkan Kota Sawahlunto juga memperoleh dana pembangunan untuk pemerintah terendah yaitu Dana Desa. Hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi Sawahlunto untuk dapat membangun daerahnya, dengan anggaran dana Desa yang mendekatkan pelaku pembangunan dan objek pembangunan itu sendiri. Daerah yang mempunyai keragaman ini adalah Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah Segar.

Tabel 2.2
Luas Administratif Per-Kecamatan Kota Sawahlunto

Kecamatan	Luas	
	(Ha)	(%)
Barangin	7.849,19	33,84
Lembah Segar	2.404,83	10,37
Silungkang	3.873,91	16,70
Talawi	9.066,62	39,09
Total	**23.194,55**	**100,00**

Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

Berdasarkan grafik dan tabel di atas terlihat bahwa Kota Sawahlunto memiliki luas wilayah 231,94 km^2 atau 23.194,55 Ha yang sebelumnya seluas 273,45 km2. Perubahan luas wilayah ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, sesuai dengan Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 tanggal 03 Oktober 2022. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Lembah Segar yaitu 10,37% dari luas Kota Sawahlunto sedangkan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Talawi yaitu 39,09% dari luas Kota Sawahlunto.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Sawahlunto

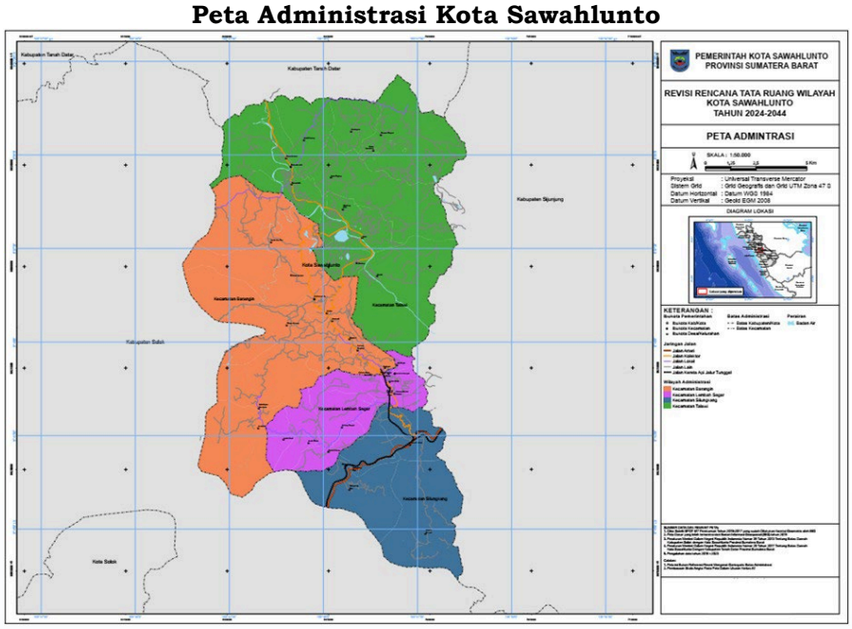

Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

2. Topografi

Kondisi topografi Kota Sawahlunto didominasi daerah perbukitan. Kota Sawahlunto memiliki kemiringan lereng dan morfologi yang begitu beragam, mulai dari dataran sampai dengan perbukitan terjal, dengan rentang lereng 0-8% sampai dengan lebih dari 40%. Namun sebagian besar berada pada kelerengan 25-40 % dengan area seluas 6.768,08 Ha, terletak di bagian selatan Kota Sawahlunto, meliputi Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Silungkang.

Tabel 2.3
Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto

Kecamatan	Tinggi Kecamatan (mdpl)	Ibu Kecamatan
Talawi	650	Talawi Mudik
Barangin	650	Santur
Lembah Segar	785	Aur Mulyo
Silungkang	548	Muaro Kalaban

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Ketinggian wilayah Kota Sawahlunto cukup bervariatif mulai dari 175 mdpl sampai dengan > 975 mdpl. Mayoritas terletak pada ketinggian 175–375 mdpl dengan luas sebesar 10.392,39 Ha yang terletak di Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi. Sedangkan untuk ketinggian lebih dari 975 meter di atas permukaan laut terletak di Kecamatan Barangin. Ketinggian pusat daerah kecamatan di Kota Sawahlunto lebih jelas terlihat pada tabel di atas.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kota Sawahlunto

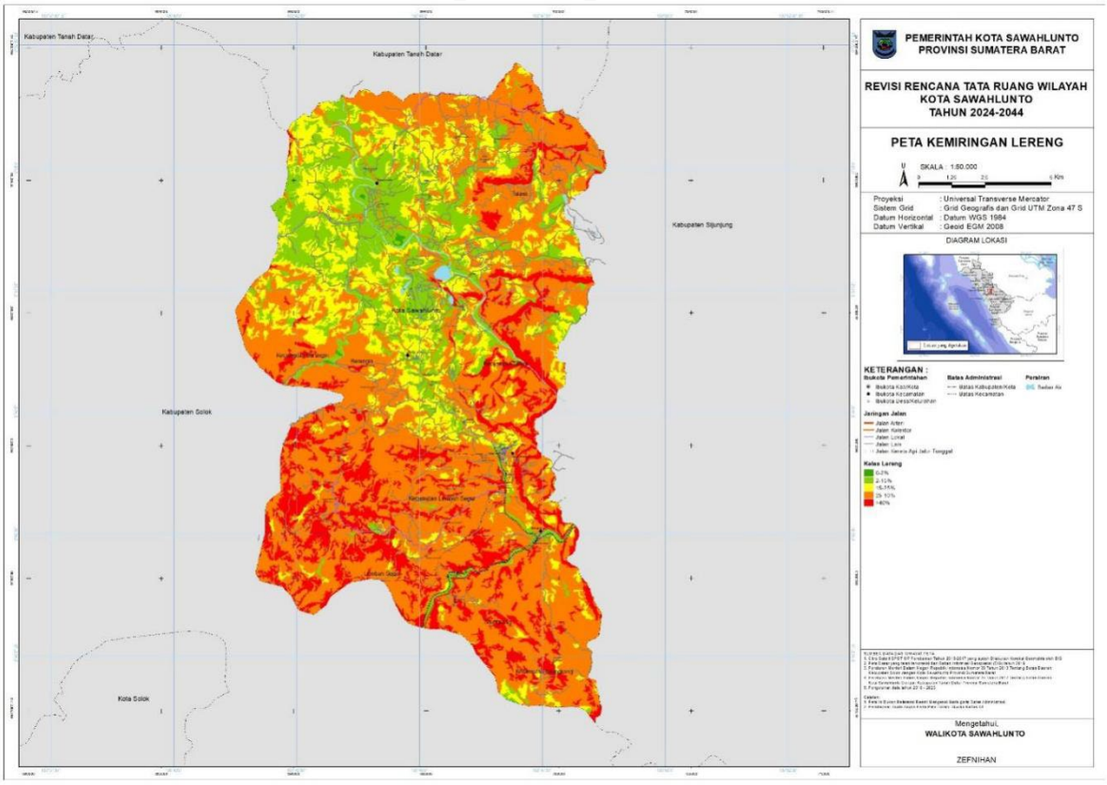

Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

Berdasarkan Peta Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto di atas terlihat bahwa kelas kemiringan lahan kategori datar (0 – 2 %) berada di Kecamatan Silungkang seluas 29 Ha dan di Kecamatan Talawi Seluas 991 Ha. Sementara kelas kemiringan lahan kategori Curam (> 40 %) berada di Kecamatan Silungkang. Kemiringan Lahan berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto

Kecamatan	Luas Lahan Dengan Kelerengan (Ha)				
	0 – 2%	2 – 15%	15 – 5%	25 –40%	> 40%
Talawi	991	1.420	2.680	3.195	1.653
Barangin	343	1.514	1.432	3.450	2.136
Lembah Segar	240	358	694	1.836	2.110
Silungkang	29	288	735	340	1.901

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2024

Pada tabel di atas terlihat kemiringan lahan di Kota Sawahlunto memiliki kemiringan yang beragam, dari mulai dataran sampai dengan perbukitan terjal. Bentang alam yang landai terletak hampir di tengah Kota Sawahlunto, tetapi umumnya merupakan jalur-jalur sempit sehingga sulit untuk dikembangkan menjadi permukiman perkotaan. Posisinya memanjang sepanjang Sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak di kedua sisinya. Dataran yang relatif landai sehingga dimungkinkan untuk pengembangan permukiman perkotaan hanya dijumpai di Kecamatan Talawi, Pusat Kota Lama dan sebagian wilayah di Kecamatan Barangin yang wilayahnya relatif datar sebesar 18 % dari luas wilayah.

3. Geologi

Kota Sawahlunto terletak pada cekungan pra-tersier Ombilin yang terbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 km dan panjang 47,00 km. Formasi ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman tersier atau berumur sekitar 2 juta tahun. Kota Sawahlunto terletak diatas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman Kala *Eocen* sekitar 40 - 60 juta tahun yang lalu. Berikut merupakan Peta Geologi Kota Sawahlunto :

Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Sawahlunto

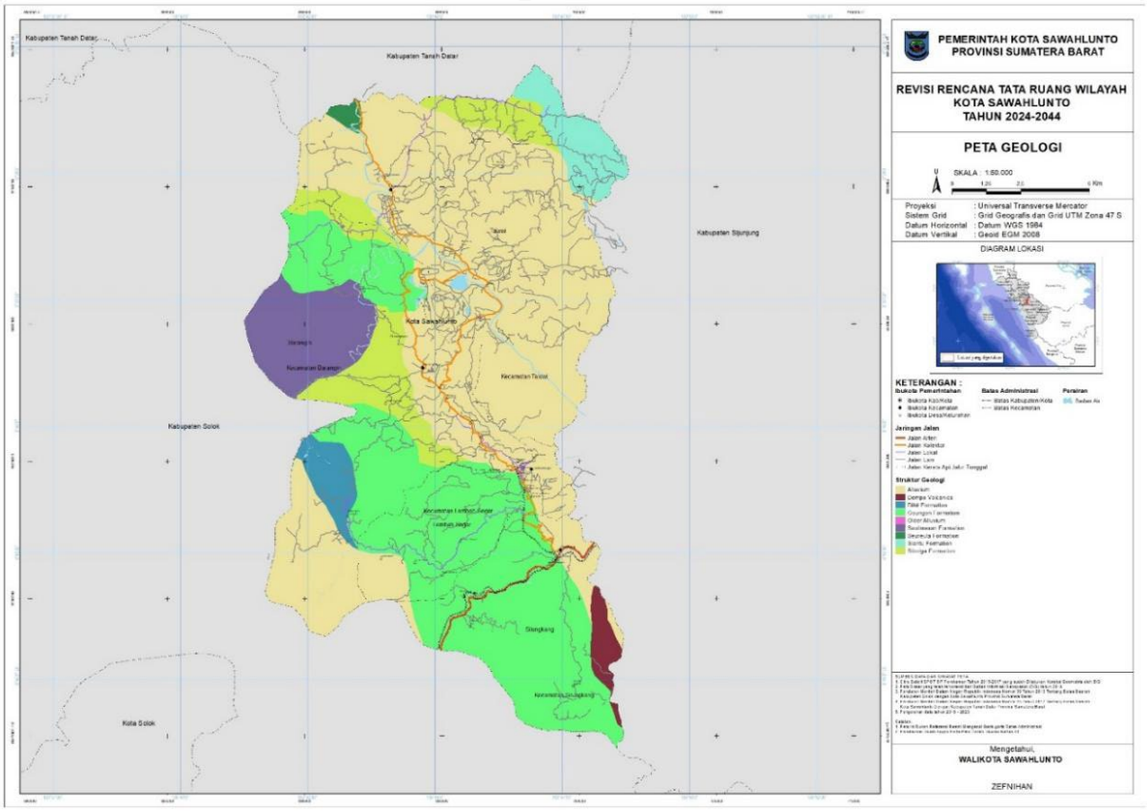

Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

Kota Sawahlunto memiliki dua buah sesar geser yaitu sesar geser Sawahlunto dan sesar geser Batu Tajam berarah Barat Laut sampai dengan Tenggara, mengikuti arah sesar besar Sumatera. Jalur kedua sesar tersebut berada di daerah perbukitan sebelah Barat Daya jalan raya Sawahlunto sampai dengan Santur. Secara regional, struktur geologi yang berkembang di cekungan ombilin berarah ke Barat Laut sampai dengan Tenggara dan Timur Laut sampai dengan Barat Daya, baik itu berupa sesar/patahan maupun lipatan. Cekungan Ombilin ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian oleh sesar normal Tanjung Ampalu/sesar Pamuatan yaitu bagian timur merupakan blok yang turun (mengarah kebawah) sedangkan bagian Barat yaitu daerah Sawahlunto dan sekitarnya merupakan blok yang relatif naik.

4. Hidrologi

Kota Sawahlunto dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri yang terdiri dari 5 (lima) buah sungai atau batang utama yaitu :

- **Batang Ombilin**
  Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar yang mengalir dari utara ke selatan, dari Desa Talawi ke Desa Rantih Kecamatan Talawi. Sungai ini berhulu dari Danau Singkarak dan bermuara di Batang Kuantan Riau, dengan debit sungai di daerah Sikalang-Rantih lebih dari 10 m^3/s.
- **Batang Malakutan**
  Sungai ini mengalir dari barat yang berhulu di Desa Siberambang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok ke timur melewati Desa Kolok Mudiak dan Desa Kolok Nan Tuo di Kecamatan Barangin yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin.
- **Batang Lunto**
  Sungai ini berhulu di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin dan mengalir dari arah barat menuju timur dan membelah kota dan bermuara di Batang Ombilin.
- **Batang Sumpahan**
  Sungai ini berhulu di Kubang Utara Sikabu di Kecamatan Lembah Segar kemudian bertemu dengan Batang Lunto di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Batang Ombilin.
- **Batang Lasi**
  Sungai ini berhulu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan Nasional Solok ke Sijunjung di Kecamatan Silungkang dan keluar di perbatasan kota Sawahlunto sampai dengan Sijunjung. Sungai ini kemudian bertemu juga dengan Batang Ombilin di Sungai Kuantan atau Indragiri.

Sumber daya air yang ada di Kota Sawahlunto ada 2 (dua), yaitu :

- **Air Tanah**
  Keberadaan air tanah terbatas pada kedalaman dibawah 400 meter sementara celahan batuan batu pasir penyusun Formasi Sawah Tambang dan Formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan adanya lapisan pembawa air sehingga potensi air tanah sangat kecil. Kecilnya potensi ini menyebabkan air tanah tidak dapat diandalkan sebagai salah satu sumber air baku di Kota Sawahlunto.
- **Mata Air**
  Mata air muncul pada lereng bukit, dimana debit kurang dari 2 liter/s yang terdapat di Sikalang, mengalir sepanjang tahun, sumber mata air ini umumnya jernih dan digunakan sebagai salah satu sumber air bersih penduduk setempat dan PDAM. Mata air lain dijumpai ke arah Tenggara Sawahlunto di Bukit Sibantar Desa Sikalang, sementara itu sumber mata air dengan debit cukup besar yaitu lebih dari 5 liter/s, mengalir sepanjang musim, terdapat di Desa Balai Batu Sandaran. Mata air tersebut muncul pada kontak antara batu gamping dan lapisan tufa yang ditampung pada kolam permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih di Kota Sawahlunto.

5. Klimatologi

Kota Sawahlunto memiliki suhu rata – rata 220C sampai dengan 28 0C, perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5 0C sampai dengan 7 0C. Curah hujan di Kota Sawahlunto berkisar antara 2.200 mm/tahun sampai dengan 2.400 mm/tahun mayoritas terletak di Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah Segar. Berikut merupakan pemetaan kondisi Curah Hujan Kota Sawahlunto :

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Kota Sawahlunto

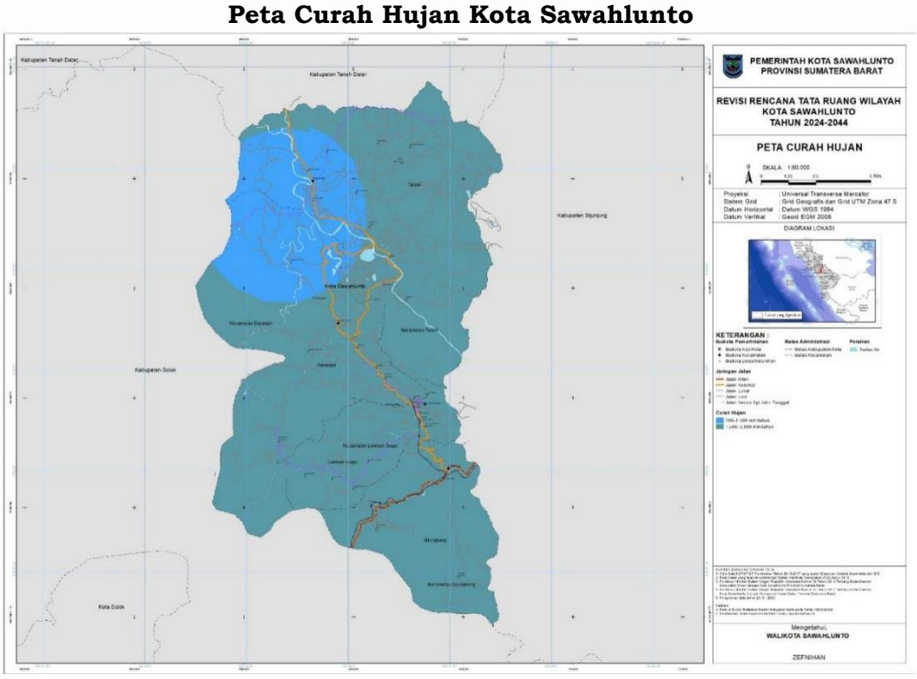

Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

Tingkat curah hujan di Kota Sawahlunto terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu kategori rendah dengan besaran 0-1000 mm/tahun dan kategori sedang dengan besaran 1000-3000 mm/tahun. Untuk daerah dengan kategori rendah ada di sebagian kecil Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi. Sedangkan untuk kategori sedang ada di Kecamatan Silungkang, Kecamatan Lembah Segar, sebagian besar Kecamatan Barangin dan sebagian besar Kecamatan Talawi.

6. Penggunaan Lahan

Luas Kota Sawahlunto adalah 231.94 km2. Berikut penjabaran penggunaan lahan per-kecamatan di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.5
Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaan Per Kecamatan
Kota Sawahlunto Tahun 2024

Penggunaan Lahan	Kecamatan			
	Silungkang	Lembah Segar	Barangin	Talawi
Tanah Tidak ada Bangunan	95,01	94,14	94,53	87,89
Tanah Permukiman	3,69	5,34	4,41	4,04
Perairan	0,44	-	0,39	1,39
Tanah Perkantoran dan Perdagangan	0,65	0,28	0,27	0,12
Tanah Industri dan Pergudangan	-	-	0,08	0,34
Tanah Jasa	0,03	0,14	0,09	0,18
Taman	-	-	0,03	0,00
Penggunaan Tanah lainnya	0,17	0,10	0,21	6,03
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2024

Berdasarkan penggunaan lahan, sebagian besar wilayah di Kecamatan Lembah Segar dan Barangin dimanfaatkan sebagai kebun campuran dengan persentase 36,24% dan 38%. Sedangkan di Kecamatan Talawi sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan dan di Kecamatan Silungkang masih berupa semak alang-alang. Berikut merupakan Pemetaan Penggunaan Lahan Kota Sawahlunto :

Gambar 2.5
Peta Tutupan Lahan Kota Sawahlunto

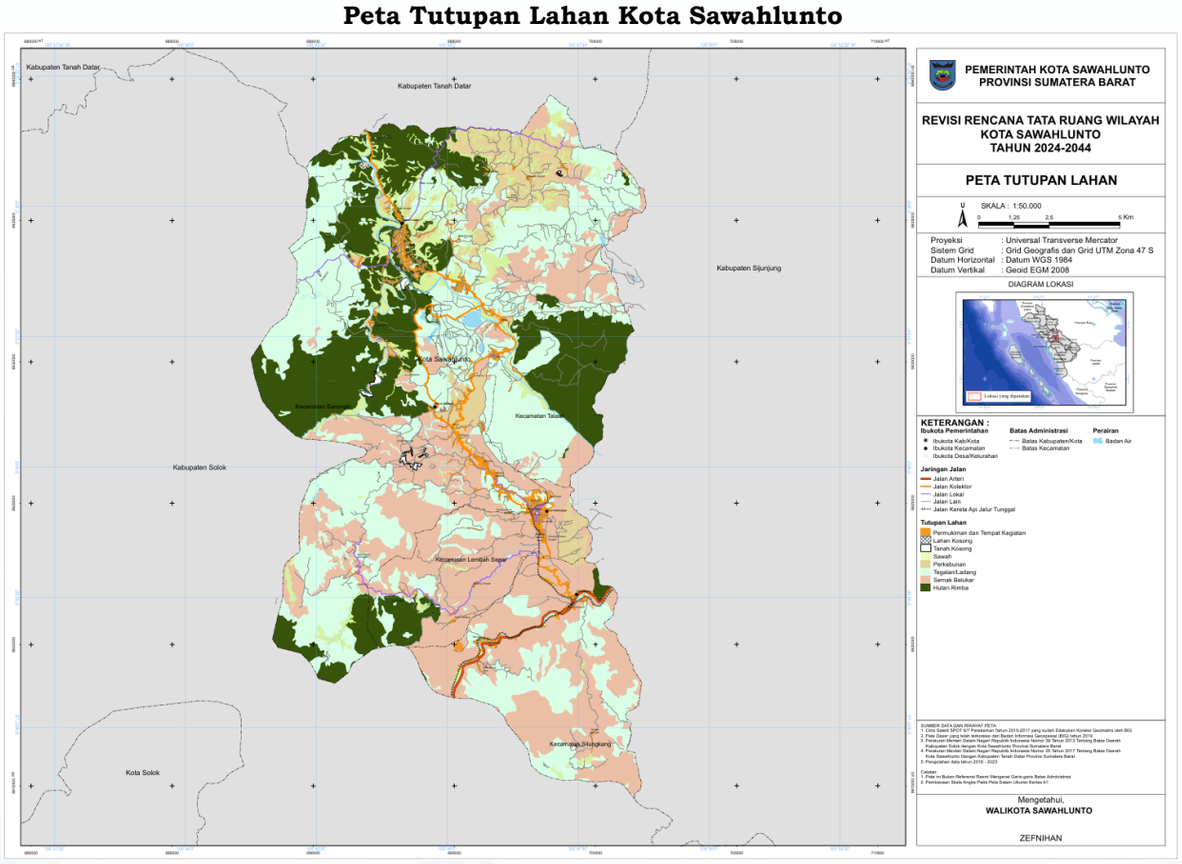

Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

7. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Sawahlunto di dalam rencana sistem pusat kegiatan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bersama dengan Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, dan Kota Siberut. Berdasarkan Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025–2045 direncanakan kawasan strategis yang merupakan bagian wilayah Kota Sawahlunto yang dijadikan prioritas dalam penataan ruang dan mempunyai pengaruh penting untuk pengembangan kota, yaitu dalam bidang ekonomi dan bidang sosial budaya :

- Kawasan Strategis Ekonomi
  1. Desa Kolok Mudiak, Desa Kolok Nan Tuo, Desa Santur Kecamatan Barangin;
  2. Desa Rantih, Desa Salak, Desa Sikalang, Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi;
  3. Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang.
- Kawasan Strategis Sosial dan Budaya
  1. Kelurahan Air Dingin, Kelurahan Aur Mulyo, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kelurahan Kubang Utara Sikabu, Kelurahan Pasar Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar;
  2. Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin

8. Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang terjadi, pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi, litologi, struktur geologi (patahan) kemiringan lereng, geomorfologi, air tanah dan daya dukung tanah. Berdasarkan data yang diperoleh, bencana yang sering terjadi berupa tanah longsor dan aktivitas sesar (patahan).

a. Gempa Bumi

Kota Sawahlunto memiliki potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi gempa bumi, sedangkan longsoran dan struktur patahan akan cenderung menjadi kendala dalam pembangunan wilayah. Berdasarkan data spasial kerawanan gempa bumi di Kota Sawahlunto dari mulai rendah, sedang dan tinggi, mayoritas kerawanan gempa bumi Kota Sawahlunto berada pada rawan gempa bumi tinggi, dipengaruhi oleh struktur geologi, lereng dan morfologi serta vegetasi yang ada.

b. Gerakan Tanah Atau Rawan Longsor

Kerawanan bencana gerakan tanah atau longsoran di Kota Sawahlunto cukup bervariatif dari mulai kerawanan rendah, sedang dan tinggi. Kerawanan bencana longsor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti aktivitas manusia, keberadaan vegetasi, jenis tanah dan kelerengan. Mayoritas kerawanan bencana longsor di Kota Sawahlunto yaitu sedang dengan luas 15.003,77 Ha.

2.1.1.2 Aspek Demografi

Secara administratif jumlah penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2024 berjumlah 68.730 jiwa, terdiri dari 34.570 jiwa penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sejumlah 34.150 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2023 yang berjumlah 67.760 jiwa, terdapat penambahan sejumlah 970 jiwa.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin 2020		Jml	Jenis Kelamin 2021		Jml	Jenis Kelamin 2022		Jml	Jenis Kelamin 2023		Jml	Jenis Kelamin 2024		Jml
	L	P		L	P		L	P		L	P		L	P	
0 – 4	3.011	2.809	5.820	3011	2810	5821	3019	2818	5837	3120	2950	6060	3.090	2.940	6.030
5 – 9	2.624	2.545	5.169	2598	2528	5126	2592	2526	5118	2750	2640	5400	2.870	2.720	5.590
10 – 14	2.837	2.608	5.445	2797	2581	5378	2751	2556	5307	2660	2590	5250	2.630	2.600	5.220
15 – 19	2.867	2.622	5.489	2860	2617	5477	2863	2621	5484	2840	2640	5480	2.810	2.640	5.450
20 – 24	2.721	2.597	5.318	2708	2582	5290	2701	2573	5274	2820	2590	5400	2.840	2.590	5.430
25 – 29	2.620	2.546	5.166	2640	2547	5187	2660	2553	5213	2710	2630	5340	2.740	2.640	5.370
30 – 34	2.422	2.337	4.759	2447	2361	4808	2479	2390	4869	2600	2530	5130	2.670	2.600	5.270
35 – 39	2.396	2.310	4.706	2430	2333	4763	2469	2364	4833	2420	2330	4750	2.450	2.340	4.790
40 – 44	2.260	2.217	4.477	2289	2242	4531	2323	2270	4593	2360	2270	4630	2.390	2.290	4.670
45 – 49	2.138	2.125	4.263	2179	2154	4333	2225	2194	4419	2190	2160	4360	2.210	2.180	4.390
50 – 54	1.907	1.950	3.857	1943	1982	3925	1984	2017	4001	2020	2030	4050	2.070	2.060	4.120
55 – 59	1.753	1.761	3.514	1800	1795	3595	1852	1836	3688	1820	1850	3670	1.830	1.870	3.710
60 – 64	1.246	1.367	2.613	1280	1403	2683	1319	1438	2757	1530	1580	3110	1.620	1.650	3.270
65 – 69	942	1.092	2.034	986	1140	2126	1030	1186	2216	1040	1200	2240	1.080	1.240	2.320
70 – 74	506	638	1.370	545	679	1224	588	726	1314	670	830	1500	730	900	1.630
75 +	517	847	1.138	542	878	1420	575	915	1490	540	860	1400	570	890	1.460
Jumlah	**32.767**	**32.371**	**65.138**	**33.055**	**32.632**	**65.687**	**33.430**	**32.983**	**66.413**	**34.090**	**33.670**	**67.760**	**34.570**	**34.150**	**68.730**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional dan daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terletak pada ketersediaan faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi, dengan demikian adanya perubahan pada faktor produksi, yang salah satunya adalah penduduk, akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Komposisi penduduk merupakan faktor penting dalam demografi. Karena, hampir semua pembahasan masalah kependudukan melibatkan komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Tabel di atas menunjukkan di Kota Sawahlunto menurut kelompok umur dan jenis kelamin, kelompok tertinggi adalah pada kelompok umur antara (0-4) tahun. Kelompok (0-4) Tahun ini merupakan fase dimana ada periode *Golden Age*, dimana membutuhkan dukungan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang maksimal. Sedangkan kelompok umur terendah adalah pada kelompok umur antara (75+). Kelompok umur ini produktivitasnya sudah berkurang atau menurun dan membutuhkan pelayanan kesehatan lebih besar.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin
Kota Sawahlunto Tahun 2024

Kecamatan	2024	
	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
Lembah Segar	13.860	101.15
Barangin	21.780	99.79
Silungkang	11.960	102.28
Talawi	21.130	102.20
Total	68.730	101.23

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan pertimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Sawahlunto sebesar 101,23. Kecamatan Barangin yang rasio jenis kelaminnya di bawah 100, yakni 99.79 yang berarti pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat kurang dari 100 penduduk laki-laki.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Dari grafik di atas terlihat laju pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto periode tahun 2020-2024 berfluktuatif. Penurunan laju pertumbuhan penduduk terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2024, sedangkan tahun 2022-2023 cenderung meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan memicu munculnya permasalahan kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar kebutuhan akan ketersediaan pangan, sarana dan prasarana atau fasilitas umum, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya. Oleh sebab itu data laju pertumbuhan penduduk sangat dibutuhkan untuk memprediksi jumlah penduduk suatu

wilayah di masa yang akan datang dan memprediksi kebutuhan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan

Dinamika pertumbuhan penduduk di pengaruhi oleh faktor pertumbuhan alami dan non alami. Faktor alami meliputi kelahiran dan kematian. Sedangkan faktor non alami meliputi perpindahan penduduk, baik penduduk yang datang maupun yang pindah. Tabel di bawah ini menunjukan pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2024.

Tabel 2.8
Jumlah Kelahiran, Kematian Dan Perpindahan Penduduk
Kota Sawahlunto Tahun 2024

Kecamatan	Kelahiran	Kematian	Penduduk Datang	Penduduk Pindah
Lembah Segar	156	100	162	300
Barangin	225	131	262	463
Silungkang	154	74	163	268
Talawi	304	122	382	374
Total	**839**	**427**	**969**	**1.405**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Jumlah Kelahiran tertinggi pada Tahun 2024 terjadi di Kecamatan Talawi sebanyak 304, sedangkan yang terendah terjadi di Kecamatan Silungkag sebanyak 154. Jumlah kematian tertinggi terjadi di Kecamatan Barangin dan terendah terjadi di Kecamatan Silungkang. Jumlah Penduduk yang datang ke Kota Sawahlunto tertinggi terjadi di Kecamatan Talawi dan terendah di Kecamatan Lembar Segar. Sedangkan jumlah Penduduk yang pindah dari Kota Sawahlunto tertinggi terjadi di Kecamatan Barangin dan terendah terjadi di Kecamatan Silungkang.

Tabel 2.9
Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Silungkang	346,46	348,80	352,08	358,61	363,10
Lembah Segar	253,94	255,04	256,83	260,97	263,62
Barangin	229,07	232,03	235,61	241,43	245,95
Talawi	202,16	203,69	205,78	209,76	212,58
Jumlah	**238,21**	**240,22**	**242,87**	**247,79**	**251,33**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa kepadatan penduduk di Kota Sawahlunto belum merata. Beberapa kecamatan dengan wilayah yang lebih luas, jumlah penduduknya lebih sedikit, seperti Kecamatan Talawi dan Kecamatan Barangin. Sebaliknya Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Lembah Segar dengan wilayah yang lebih sempit, jumlah penduduknya lebih banyak. Hal ini disebabkan Kecamatan Silungkang berada pada jalur lintas Sumatera dan Kecamatan Lembah Segar merupakan ibukota Sawahlunto dan merupakan pusat permukiman dan perekonomian.

Tingkat pendidikan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.10
Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (%)
		Laki-laki (%)	Perempuan (%)	
1	Tidak/Belum Sekolah	12,65	11,83	24,48
2	Belum Tamat SD/Sederajat	5,74	5,18	10,92
3	Tamat SD/Sederajat	8,02	6,81	14,83
4	SLTP/ Sederajat	6,94	6,53	13,47
5	SLTA/ Sederajat	12,84	11,98	24,81
6	Diploma I/II	0,27	0,50	0,77
7	Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	0,88	1,55	2,44
8	Diploma IV/Strata-I	2,74	5,02	7,76
9	Strata-II	0,24	0,28	0,52
10	Strata-III	0,00	0,00	0,01
	SAWAHLUNTO	**50,32**	**49,68**	**100,00**

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2024

Kota Sawahlunto pada tahun 2024 didominasi oleh penduduk yang sekolah pada tingkat SLTA/Sederajat yaitu sebanyak 24.81%. Hal ini bersesuaian dengan program Pemerintah Pusat yang menerapkan wajib belajar 13 tahun, sebagai bagian proses pembangunan SDM nasional yang lebih baik. Maka perlu dukungan semua pihak untuk menumbuhkan dan mendorong generasi muda agar semangat mengenyam pendidikan formal sampai tamat SLTA agar meningkatkan angka rata-rata lama sekolah (RLS). Jika penduduk yang menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA/Sederajat tinggi maka tingkat RLS juga tinggi.

Penduduk semakin hari semakin bertambah banyak, seiring dengan itu maka kebutuhan akan pekerjaan menjadi hal yang penting bagi penduduk untuk memperoleh pendapatan dan mempertahankan hidupnya. Berikut Jenis pekerjaan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2024.

Jenis pekerjaan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Jenis Pekerjaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto
Tahun 2024

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah (%)
		Laki-laki (%)	Perempuan (%)	
1	Belum/Tidak Bekerja	10.642	8.957	19.599
2	Aparatur/Pejabat Negara	2.035	2.580	4.615
3	Tenaga Pengajar	0.124	0.508	0.632
4	Wiraswasta	19.377	2.836	22.213
5	Pertanian/Peternakan	4.751	0.452	5.203
6	Nelayan	0.001	-	0.001
7	Agama dan kepercayaan	0.028	-	0.028
8	Pelajar/mahasiswa	11.822	11.610	23.432
9	Tenaga kesehatan	0.038	0.214	0.252
10	Pensiunan	1.498	.0875	2.373
11	Lainnya	0.006	21.646	21.651
Kota Sawahlunto		**50.322**	**49.678**	**100.000**

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2024

Pekerjaan dominan penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2024 adalah wiraswasta. Aparatur/Pejabat Negara hanya 4,615 %, tenaga pejangar 0,632 % dan tenaga kesehatan sebesar 0,252 %.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Untuk memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu perekonomian merupakan kontribusi dari setiap sektor atau lapangan usaha dalam perekonomian. Perkembangan perekonomian biasanya akan diikuti oleh perubahan struktur ekonomi. Dalam setiap periode kepemimpinan pemerintahan daerah, kebijakan pembangunan yang diambil akan mempengaruhi perkembangan setiap sektor atau lapangan usaha dalam perekonomian.

Perkembangan harga-harga kebutuhan masyarakat ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi suatu daerah tidak terlepas dari kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Namun demikian pemerintah daerah dapat mengintervensi melalui ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat serta distribusi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok di daerah. Tekanan inflasi di suatu daerah akan memperburuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan lebih jauh akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat jika pendapatan masyarakat di daerah tersebut tidak terdistribusi dengan merata. Oleh karena itu tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat ikut mempengaruhi capaian kesejahteraan masyarakat.

Kinerja beberapa indikator pembangunan yang mewakili gambaran kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto dengan dukungan data beberapa tahun terakhir disajikan pada sub bab ini.

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat memberikan gambaran atas dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. PDRB digunakan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi, digunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) cara penilaian atau pencatatan PDRB, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, PDRB juga digunakan untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

PDRB digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, untuk mengetahui struktur perekonomian; untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan perubahan harga produsen.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sawahlunto sebesar 4,02%, angka ini menurun sebesar 9,87% dari tahun 2023 yang mencapai 4,46%. Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2020-2024) disandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Grafik 2.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

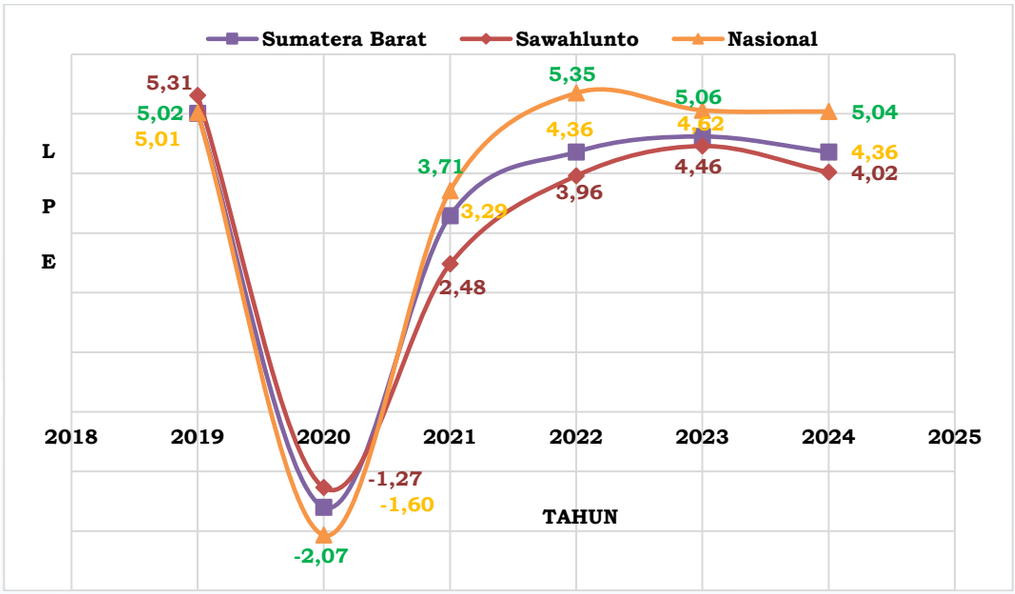

Sumber Data : BPS, 2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebelum pandemi covid-19 (tahun 2019) berada di angka 5,31 persen dan angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat pandemi covid-19 melanda pada awal Maret 2020, ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27 persen, angka ini juga lebih baik dari angka pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dan 1,62 persen. Namun saat perekonomian mulai menggeliat pada tahun 2021 sampai tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto didorong oleh pertumbuhan positif di sebagian besar lapangan usaha (*Supply Side*) dan sebagian jenis pengeluaran (*Demand Side*), terutama lapangan usaha atau jenis pengeluaran yang memberikan kontribusi yang cukup besar (dominan) pada struktur perekonomian Kota Sawahlunto. Berikut 5 lapangan usaha dominan dan jenis pengeluaran dominan Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada grafik-grafik berikut.

Grafik 2.3
Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto
Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2024 (Dalam persen)

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Grafik 2.4
Kontribusi Jenis Pengeluaran
Kota Sawahlunto Tahun 2024 (Dalam persen)

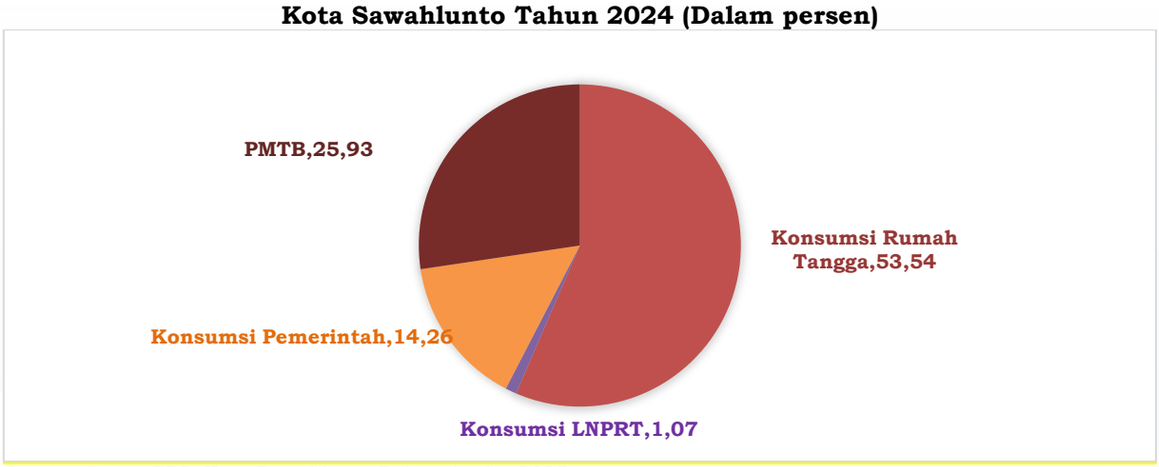

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Semakin tinggi pertumbuhan lapangan usaha (supply side) dominan dan jenis pengeluaran (demand side) dominan, semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2024, beberapa lapangan usaha (supply side) dominan dan jenis pengeluaran (demand side) dominan mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto melambat, seperti: *Lapangan usaha Industri Pengolahan pertumbuhannya turun dari 5,07% menjadi 3,13%; *Lapangan usaha Konstruksi pertumbuhannya turun dari 5,83% menjadi 3,59%; *Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi pertumbuhannya turun dari 7,69% menjadi 4,63%; Jenis Pengeluaran PMTB pertumbuhannya turun dari 7,22% menjadi 2,87%, disamping itu terdapat satu lapangan usaha yang terkontraksi sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto
Menurut Lapangan Usaha (*Supply Side*)
Dan Jenis Pengeluaran (*Demand Side*)
Tahun 2020 – 2024

No	Lapangan Usaha (*Supply Side*)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,71	7,07	4,93	2,47	1,53
2	Pertambangan dan Penggalian	8,89	-28,23	-3,04	-0,87	-6,13
3	Industri Pengolahan	-2,98	4,91	2,56	5,07	3,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-6,17	5,11	1,98	3,93	4,18
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,31	5,35	-0,70	3,61	2,14
6	Konstruksi	-5,21	3,18	3,19	5,83	3,59
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	-0,69	4,17	5,08	4,86	5,07
8	Transportasi dan Pergudangan	-10,96	4,35	3,53	5,60	5,37

No	Lapangan Usaha (*Supply Side*)	2020	2021	2022	2023	2024
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,10	9,38	11,63	5,92	6,44
10	Informasi dan Komunikasi	8,19	7,08	5,77	7,69	4,63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,91	9,49	5,55	3,63	4,58
12	Real Estat	0,13	4,94	5,94	6,27	4,95
13	Jasa Perusahaan	-3,16	3,43	5,14	5,10	5,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,62	2,09	2,05	1,01	5,54
15	Jasa Pendidikan	4,41	4,85	4,00	1,94	2,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,26	7,35	4,48	7,15	5,03
17	Jasa Lainnya	-9,28	6,83	9,32	7,48	8,80
No	**Jenis Pengeluaran (*Demand Side*)**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Konsumsi Rumah Tangga	-2,61	2,2	3,56	2,81	3,65
2	Konsumsi LNPRT	-4,25	2,12	-0,27	5,19	4,29
3	Konsumsi Pemerintah	-9,41	2,60	-3,07	0,01	1,86
4	PMTB	-3,59	2,11	4,40	7,22	2,87
PDRB ADHK Kota Sawahlunto		**-1,27**	**2,48**	**3,96**	**4,46**	**4,02**

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Pada tabel di atas terlihat selama empat tahun terakhir pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi (minus), lapangan usaha ini memberikan kontribusi sebesar 3,65% terhadap PDRB ADHB Kota Sawahlunto (posisi ke 9), hal ini menjadi penyebab utama rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.

2. Proporsi Kontribusi PDRB Kota

Proporsi Kontribusi PDRB Kota merupakan rasio Produk domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kota Sawahlunto terhadap PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat.

PDRB ADHB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Berikut perkembangan proporsi kontribusi PDRB Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.13
Perkembangan Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	1,92	1,91	1,91	1,89	1,88
Pesisir Selatan	5,82	5,90	5,82	5,76	5,77
Solok	5,59	5,60	5,53	5,54	5,54
Sijunjung	3,78	3,78	3,74	3,73	3,76
Tanah Datar	5,38	5,37	5,28	5,26	5,27
Padang Pariaman	7,41	7,29	7,78	8,02	8,07
Agam	8,42	8,47	8,38	8,36	8,42
Lima Puluh Kota	6,42	6,39	6,27	6,27	6,28
Pasaman	3,71	3,73	3,64	3,63	3,66
Solok Selatan	2,29	2,28	2,25	2,25	2,28
Dharmasraya	4,23	4,25	4,29	4,27	4,31
Pasaman Barat	6,30	6,30	6,26	6,25	6,36
Kota					
Padang	25,70	25,75	25,57	25,48	25,34
Solok	1,67	1,68	1,68	1,68	1,67
Sawahlunto	***1,51***	***1,52***	***1,54***	***1,54***	***1,52***
Padang Panjang	1,44	1,44	1,43	1,43	1,43
Bukittinggi	3,57	3,57	3,57	3,56	3,54
Payakumbuh	2,82	2,89	2,89	2,87	2,84
Pariaman	2,06	2,08	2,06	2,06	2,05
Provinsi Sumatera Barat	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Pada tabel di atas terlihat kabupaten/kota yang memberikan proporsi kontribusi PDRB terhadap Provinsi Sumatera Barat terbesar selama lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) adalah Kota Padang dengan kisaran 25,34%- 25,75% dan yang terendah adalah Kota Padang Panjang dengan kisaran 1,43%-1,44%. Sedangkan Proporsi Kontribusi PDRB Kota Sawahlunto terhadap Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir berkisar antara 1,51%-1,54% dan merupakan kabupaten/kota yang memiliki proporsi kontribusi PDRB kota terendah kedua setelah Kota Padang Panjang.

3. Laju Inflasi

Laju inflasi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2024 laju inflasi Kota Sawahlunto sebesar 0,77%, angka ini mengalami penurunan tajam dari tahun sebelum yang mencapai 5,23%. Grafik di bawah ini memperlihatkan laju inflasi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir:

Grafik 2.5
Laju Inflasi Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

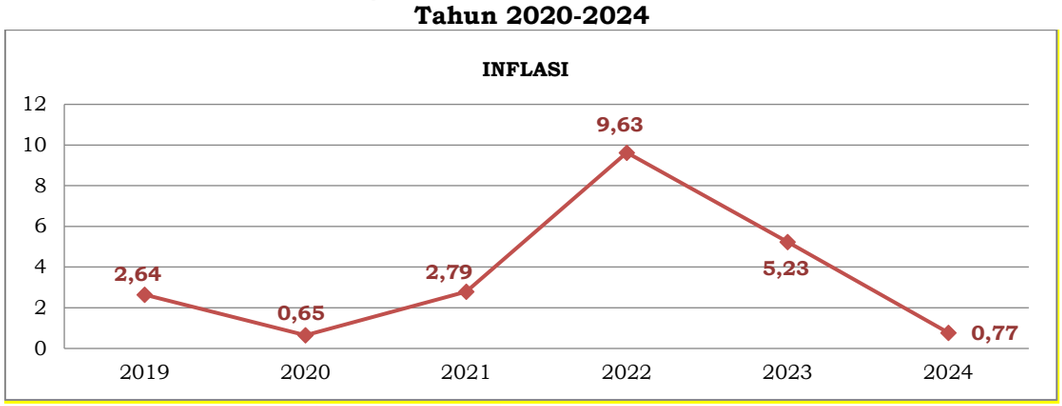

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2025

Pada grafik di atas terlihat laju inflasi tertinggi Kota Sawahlunto terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 9,63 % dan angka ini melampaui target inflasi yang telah ditetapkan Pemerintah melalui PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021, hal yang sama juga terjadi pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, angka inflasi Kota Sawahlunto sudah berhasil berada di bawah target Nasional.

Tabel di bawah ini memperlihatkan target laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun 2022-2024 :

Tabel 2.14
Target Laju Inflasi Tahun 2022 – 2024

Tahun	Target Inflasi
2022	3 % ± 1 %
2023	3 % ± 1 %
2024	2,5 % ± 1 %

Sumber Data : https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/target-inflasi.aspx

Tingginya laju inflasi di Kota Sawahlunto tahun 2022 dan 2023 tentu saja berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto, terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap. Sebagai ilustrasi, dengan tingginya inflasi atau naiknya harga-harga barang secara umum akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, dengan kata lain dengan tingginya harga-harga barang akan menyebabkan jumlah barang yang dapat dibeli oleh masyarakat menjadi lebih sedikit karena pendapatan mereka tidak naik. Akibatnya kesejahteraan masyarakat menurun. Dampak selanjutnya, masyarakat akan menurunkan minat menabungnya. Dengan turunnya tingkat tabungan masyarakat pada bank, tentunya berdampak pada berkurang jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank kepada investor. Akibatnya investasi akan berkurang dan berdampak pada berkurangnya jumlah produksi yang pada akhirnya akan menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Laju inflasi Kota Sawahlunto dihitung dengan menggunakan metode (GNP/PDB/PDRB) Deflator, dengan membandingkan PDRB ADHB Kota Sawahlunto dengan PDRB ADHK Kota Sawahlunto.

Grafik di bawah ini memperlihatkan laju inflasi Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.6
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Kota Padang Dan Kota Bukittinggi
Tahun 2020-2024

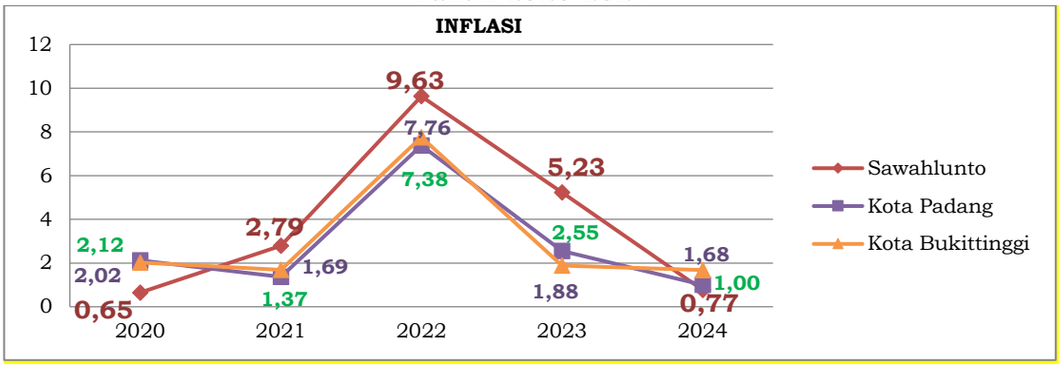

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024, Data Diolah 2025

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Deflator diperoleh data bahwa "laju inflasi Kota Sawahlunto lebih tinggi" dari Kota Padang dan Kota Bukittinggi selama kurun waktu 2021-2023, sedangkan tahun 2020 dan tahun 2024 laju inflasi Kota Sawahlunto lebih rendah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Sebagai informasi tambahan, pada dokumen "Kota Sawahlunto Dalam Angka", BPS hanya menghitung laju inflasi pada dua kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat sekaligus kota perdagangan, dan Kota Bukittinggi merupakan kota wisata yang sekaligus juga merupakan kota perdagangan.

Grafik di bawah ini memperlihatkan laju inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.7
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2020-2024

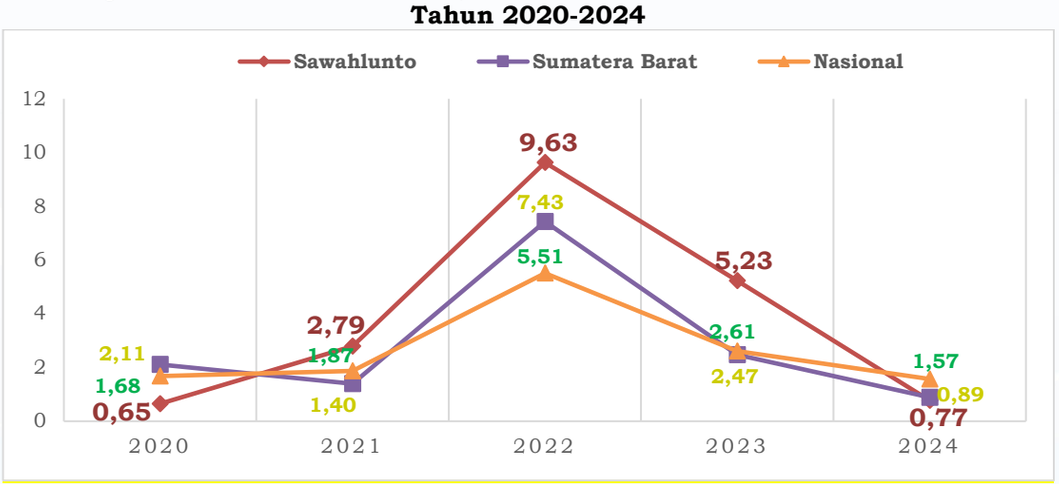

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Pada grafik di atas terlihat Pada tahun 2022 laju inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional sama-sama mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sedangkan pada tahun 2023-2024 sama-sama mengalami penurunan yang cukup signifikan. Laju inflasi Kota Sawahlunto jauh lebih tinggi dari laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan inflasi Nasional selama tiga tahun terakhir.

Tabel di bawah ini memperlihatkan laju inflasi Kota Sawahlunto menurut lapangan usaha dan pengeluaran selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.15
Laju Inflasi Kota Sawahlunto
Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pengeluaran
Tahun 2020 – 2024

Lapangan Usaha						
No	**Lapangan Usaha**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,44	-1,17	5,76	4,62	6,23
2	Pertambangan dan Penggalian	-18,65	15,52	64,07	10,85	-22,93
3	Industri Pengolahan	3,91	4,16	6,99	5,27	5,01

Lapangan Usaha						
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,12	0,63	1,49	1,83	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,20	1,12	5,59	3,41	3,99
6	Konstruksi	2,42	1,66	9,60	4,65	0,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,35	-0,99	10,38	5,65	2,56
8	Transportasi dan Pergudangan	3,28	1,83	8,57	4,43	-1,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,59	2,07	3,99	3,80	1,88
10	Informasi dan Komunikasi	-0,63	1,91	6,38	8,15	2,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	2,52	5,33	2,05	0,49
12	Real Estat	0,81	0,75	4,32	5,67	2,33
13	Jasa Perusahaan	0,84	0,98	2,86	5,42	0,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,12	3,07	7,61	4,59	-0,70
15	Jasa Pendidikan	0,52	0,16	7,23	4,40	1,77
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,42	2,60	4,95	4,96	2,73
17	Jasa Lainnya	2,06	1,74	6,25	5,10	2,37
Jenis Pengeluaran						
No	**Jenis Pengeluaran**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,34	2,20	7,06	4,25	2,20
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,08	1,69	5,67	5,14	2,18
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,45	2,25	2,02	0,28	3,78
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,98	4,06	5,09	3,42	2,48
Laju Inflasi Kota Sawahlunto		**0,65**	**2,79**	**9,63**	**5,23**	**0,77**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Pada tabel di atas, lapangan usaha dan jenis pengeluaran yang realisasinya melewati target inflasi nasional maksimal adalah yang berwarna (merah muda, coklat dan kuning), inilah yang mempunyai andil yang besar terhadap laju inflasi di Kota Sawahlunto. Target inflasi nasional maksimal pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 4%, dan target inflasi nasional maksimal tahun 2024 adalah sebesar 3,5%. Pada tahun 2024, hanya terdapat 3 lapangan usaha dan 1 jenis pengeluaran yang melampaui target inflasi maksimal yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar 3,5%, yaitu : lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan laju inflasi sebesar 6,23%; lapangan usaha Industri Pengolahan dengan laju inflasi sebesar 5,01%; lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan laju inflasi sebesar 3,99 %; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan laju inflasi sebesar 3,78%.

4. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk atau per jiwa atau satu orang penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB Per Kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB ADHB dan PDRB ADHK suatu daerah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun daerah bersangkutan. Oleh karena itu, meningkat atau menurunnya PDRB Per Kapita ditentukan oleh meningkat atau menurunnya PDRB dan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. PDRB Per Kapita biasanya dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), namun juga dapat dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Peningkatan PDRB Per Kapita biasanya dianggap sebagai tanda ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, PDRB Per Kapita tidak dapat mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.

Pada tahun 2024, PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto mencapai 73,597 juta/jiwa/tahun. Realisasi PDRB ADHB per kapita tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 2,38 juta/jiwa/tahun atau 3,35% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 71,21 juta/jiwa/tahun. Peningkatan PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto tahun 2024 lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,32%.

Berikut disajikan perkembangan PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto pada periode tahun 2020-2024 disandingkan dengan PDRB ADHB per kapita Provinsi Sumatera Barat dan PDB ADHB per kapita Nasional :

Grafik 2.8
Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

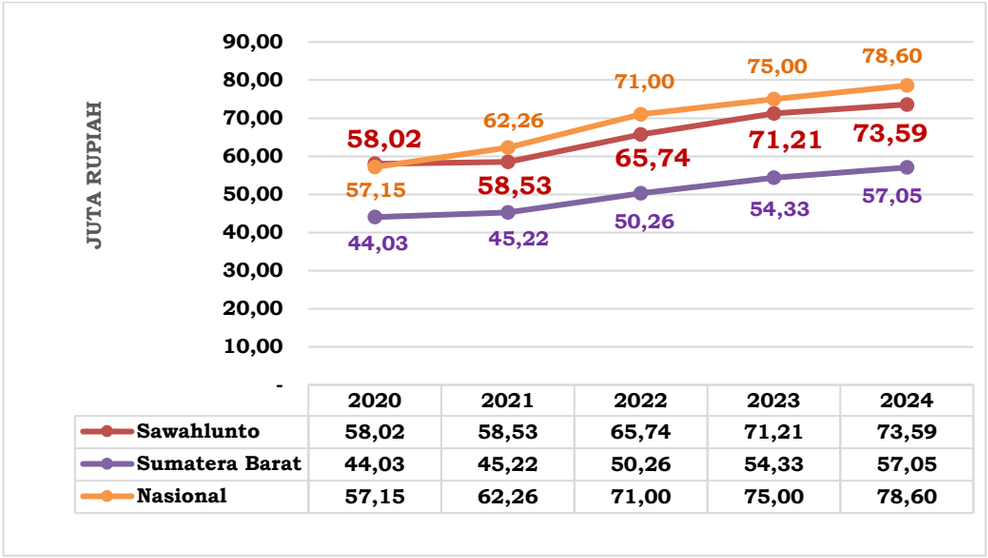

	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	58,02	58,53	65,74	71,21	73,59
Sumatera Barat	44,03	45,22	50,26	54,33	57,05
Nasional	57,15	62,26	71,00	75,00	78,60

Sumber Data : BPS 2025

Pada grafik di atas terlihat pada periode tahun 2020-2024 PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan PDRB ADHB per kapita Provinsi Sumatera Barat, namun lebih rendah dibandingkan PDB ADHB per kapita Nasional kecuali tahun 2020. Peningkatan PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2020–2024 sejalan dengan peningkatan PDRB ADHB per kapita Provinsi Sumatera Barat dan PDB ADHB per kapita Nasional.

Berikut perkembangan PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto tahun 2020-2024, disandingkan dengan PDRB ADHB per kapita kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.16
Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 – 2024 (juta rupiah/jiwa)

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	49,46	54,60	60,45	64,69	67,34
Pesisir Selatan	29,96	29,27	32,08	34,31	35,99
Solok	35,96	35,88	39,42	42,72	44,81
Sijunjung	37,87	40,29	44,34	47,91	50,61
Tanah Datar	37,34	36,29	39,72	42,89	45,07
Padang Pariaman	42,94	42,31	50,02	55,54	58,39
Agam	41,19	39,91	43,94	47,41	50,02
Lima Puluh Kota	40,24	41,81	45,69	49,45	51,98
Pasaman	31,32	31,09	33,70	36,27	38,25
Solok Selatan	31,81	31,31	34,19	36,78	38,91
Dharmasraya	40,41	46,45	51,88	55,63	58,71
Pasaman Barat	33,75	36,47	40,31	43,43	46,26
Kota					
Padang	64,67	70,88 (1)	78,36	84,53	88,23
Solok	56,05	57,01	62,88	67,59	69,99
Sawahlunto	***58,02***	***58,53***	***65,74***	***71,21***	***73,59***
Padang Panjang	63,82	64,12	70,73	76,31	80,01
Bukittinggi	65,00	74,00	82,85	89,74	93,97
Payakumbuh	49,63	51,81	57,73	62,02	64,21
Pariaman	55,86	55,41	61,23	66,20	69,17
Sumatera Barat	**44,03**	**45,22**	**50,26**	**54,33**	**57,05**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berada di posisi keempat tertinggi dibandingkan kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat, setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang.

Sebagai perbandingan, berikut disajikan perkembangan PDRB ADHK per kapita Kota Sawahlunto pada periode tahun 2020-2024 disandingkan dengan PDRB ADHK per kapita Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota :

Grafik 2.9
Perkembangan PDRB ADHK Per Kapita
Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

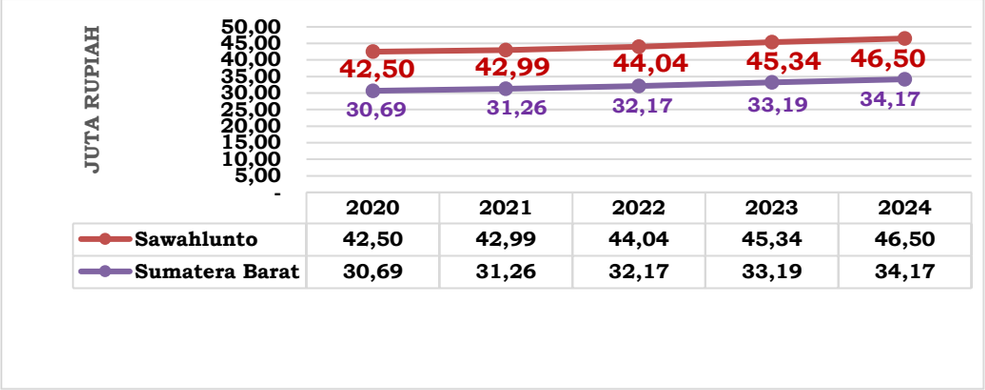

	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	42,50	42,99	44,04	45,34	46,50
Sumatera Barat	30,69	31,26	32,17	33,19	34,17

Sumber Data : BPS 2025

Dari grafik di atas terlihat bahwa PDRB ADHK per kapita Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari PDRB ADHK per kapita Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.17
PDRB ADHK Per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 – 2024 (juta rupiah/jiwa)

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	33,83	34,28	35,42	36,31	37,21
Pesisir Selatan	18,84	19,19	19,67	20,19	20,67
Solok	25,07	25,59	26,35	27,16	27,87
Sijunjung	28,52	29,03	29,77	30,65	31,44
Tanah Datar	25,81	26,40	27,17	28,04	28,78
Padang Pariaman	27,77	27,96	29,36	30,44	31,29
Agam	27,32	27,82	28,59	29,49	30,29
Lima Puluh Kota	28,89	29,53	30,35	31,36	32,24
Pasaman	20,49	20,86	21,36	21,95	22,47
Solok Selatan	21,69	21,99	22,45	23,05	23,56
Dharmasraya	32,74	33,28	34,09	34,96	35,69
Pasaman Barat	26,17	26,73	27,41	28,18	28,92
Kota					
Padang	48,07	49,18 (1)	50,65	52,30	54,09
Solok	38,79	39,37	40,29	41,35	42,36
Sawahlunto	***42,50***	***42,99***	***44,04***	***45,34***	***46,50***
Padang Panjang	45,34	46,21	47,54	49,12	50,63
Bukittinggi	50,02	51,34	53,28	55,38	57,43
Payakumbuh	31,75	32,44	33,44	34,54	35,64
Pariaman	37,76	38,66	39,92	41,34	42,71
Sumatera Barat	**30,69**	**31,26**	**32,17**	**33,19**	**34,17**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB ADHK per kapita Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berada di posisi keempat tertinggi dibandingkan kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat, setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang.

5. Indeks Gini (Gini Ratio)

Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran/pendapatan secara menyeluruh. Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, Gini Ratio yang semakin mendekati 0 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Gini Ratio yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pengeluaran/pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pengeluaran/pendapatan yang sama. Sedangkan, Gini Ratio yang bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pengeluaran/pendapatan antar penduduk (bps.go.id).

Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2024 berhasil turun sebesar 0,009 poin atau 2,92% dibandingkan tahun 2023. Realisasi Gini Ratio turun dari 0,308 pada tahun 2023 menjadi 0,299 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 0,289 pada RPD Kota Sawahlunto 2024-2026, maka capaian tahun 2024 ini hampir mendekati target dengan capaian sebesar 96,54% dengan predikat capaian "sangat tinggi". Penurunan Gini Ratio tahun 2024 ini disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian dan sosial masyarakat Kota Sawahlunto yang ditandai dengan meningkatnya PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto, meningkatnya IPM Kota Sawahlunto beserta semua komponen pembentuknya serta rendahnya laju inflasi. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah kota khususnya terkait pelayanan dasar, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, bantuan sosial dan subsidi yang diterapkan di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.18
Perkembangan Gini Ratio
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 – 2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	0,273	0,321	0,233	0,259	0,267
Pesisir Selatan	0,264	0,253	0,246	0,259	0,224
Solok	0,277	0,246	0,243	0,235	0,241
Sijunjung	0,269	0,270	0,243	0,263	0,239
Tanah Datar	0,273	0,250	0,251	0,260	0,258
Padang Pariaman	0,257	0,269	0,245	0,257	0,253
Agam	0,278	0,272	0,298	0,255	0,249
Lima Puluh Kota	0,222	0,244	0,208	0,194	0,220
Pasaman	0,310	0,248	0,230	0,243	0,217
Solok Selatan	0,307	0,277	0,253	0,271	0,313
Dharmasraya	0,280	0,268	0,287	0,291	0,233
Pasaman Barat	0,258	0,261	0,277	0,238	0,240
Kota					
Padang	0,312	0,343	0,354	0,312	0,324
Solok	0,286	0,277	0,288	0,256	0,251
Sawahlunto	***0,300***	***0,295***	***0,314***	***0,308***	***0,299***
Padang Panjang	0,394	0,306	0,296	0,273	0,266
Bukittinggi	0,265	0,286	0,317	0,255	0,272
Payakumbuh	0,325	0,316	0,311	0,316	0,313
Pariaman	0,310	0,301	0,272	0,289	0,281
Sumatera Barat	**0,305**	**0,306**	**0,300**	**0,280**	**0,283**

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat 2025

Meskipun capaian Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2024 mengalami penurunan, namun secara regional Provinsi Sumatera Barat, capaian Gini Ratio Kota Sawahlunto termasuk 4 (empat) tertinggi dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat di bawah Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Solok Selatan. Gini Ratio Kota Sawahlunto juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat.

Berikut perkembangan Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2020-2024, disandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional :

Grafik 2.10
Gini Ratio Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

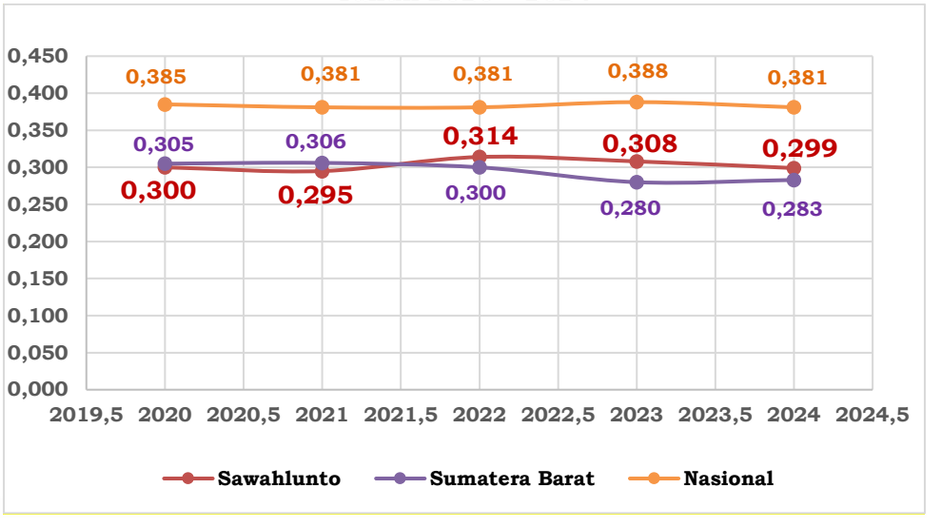

Sumber Data : BPS, 2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Gini Ratio Kota Sawahlunto pada tahun 2020-2021 lebih rendah dari Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, yang bermakna perbedaan pengeluaran/pendapatan antar penduduk di Kota Sawahlunto lebih merata dibandingkan perbedaan pengeluaran/pendapatan antar penduduk Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pada tahun 2022-2024, Gini Ratio Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat, namun masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio Nasional.

6. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan atau istilah lainnya Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Grafik 2.11
Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto
(Rupiah/Kapita/Bulan) Tahun 2020–2024

Sumber Data : BPS, 2025

Pada grafik di tas terlihat Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 7% seiring dengan laju inflasi yang terjadi. Pada tahun 2024, Angka kemiskinan Kota Sawahlunto sebesar 2,33 %, realisasi ini meningkat sebesar 0,06 poin atau 2,64% dari tahun sebelumnya. Berikut perkembangan Angka Kemiskinan Kota Sawahlunto disandingkan dengan Angka Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.12
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

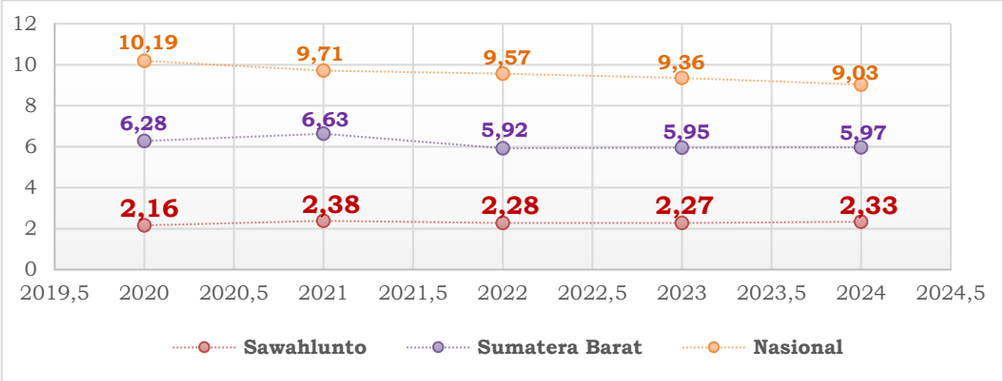

Sumber Data : BPS, 2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto jauh di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Berikutnya tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto disandingkan dengan tinggi kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 – 2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	14,35	14,84	13,97	13,72	13,89
Pesisir Selatan	7,61	7,92	7,11	7,34	7,49
Solok	7,81	8,01	7,12	7,13	7,31
Sijunjung	6,78	6,80	6,00	5,88	5,78
Tanah Datar	4,40	4,54	4,26	4,16	4,28
Padang Pariaman	6,95	7,22	6,25	6,34	6,27
Agam	6,75	6,85	6,22	6,60	6,83
Lima Puluh Kota	6,86	7,29	6,59	6,80	6,92
Pasaman	7,16	7,48	6,85	6,80	6,74
Solok Selatan	7,15	7,52	6,51	6,45	6,56
Dharmasraya	6,23	6,67	5,56	5,56	5,32
Pasaman Barat	7,04	7,51	6,93	6,92	7,00
Kota					
Padang	4,40	4,94	4,26	4,17	4,06
Solok	2,77	3,12	3,02	3,05	3,07
Sawahlunto	***2,16***	***2,38***	***2,28***	***2,27***	***2,33***
Padang Panjang	5,24	5,92	5,14	5,24	5,31
Bukittinggi	4,54	5,14	4,46	4,11	4,08
Payakumbuh	5,65	6,16	5,66	5,44	5,19
Pariaman	4,10	4,38	4,13	4,20	4,26
Sumatera Barat	**6,28**	**6,63**	**5,92**	**5,95**	**5.97**

Sumber Data : BPS, 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto adalah yang terendah di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir (2020-2024).

Tabel 2.20
Posisi Kota Sawahlunto Dalam 10 Kabupaten/Kota
Dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional
Tahun 2020-2024

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1. Kabupaten Badung	1. **Kota Sawahlunto 2,38**	1. **Kota Sawahlunto 2,28**	1. **Kota Sawahlunto 2,27**	1. Kota Balikpapan 2,23
2. Kota Denpasar	2. Kota Tangerang Selatan 2,57	2. Kota Balikpapan 2,45	2. Kota Balikpapan 2,31	2. Kabupaten Badung 2,23
3. **Kota Sawahlunto**	3. Kota Depok 2,58	3. Kabupaten Bangka Barat 2,46	3. Kota Depok 2,38	3. **Kota Sawahlunto 2,33**
4. Kota Tangerang Selatan	4. Kabupaten Badung 2,62	4. Kota Tangerang Selatan 2,50	4. Kota Tangerang Selatan 2,57	4. Kota Depok 2,34
5. Kota Depok	5. Kabupaten Bangka Barat 2,75	5. Kota Depok 2,53	5. Kota Denpasar 2,68	5. Kota Tangerang Selatan 2,36
6. Kabupaten Banjar	6. Kota Pekanbaru 2,83	6. Kabupaten Badung 2,53	6. Kota Sungai Penuh 3,00	6. Kota Denpasar 2,59
7. Kota Balikpapan	7. Kota Balikpapan 2,89	7. Kabupaten Banjar 2,79	7. Kota Solok 3,05	7. Kabupaten Bangka Barat 2,59
8. Kota Pekanbaru	8. Kota Denpasar 2,96	8. Kota Denpasar 2,97	8. Kota Jakarta Selatan 3,10	8. Kota Sungai Penuh 2,92
9. Kabupaten Bangka Barat	9. Kabupaten Banjar 3,04	9. Kota Sungai Penuh 2,97	9. Kota Pekanbaru 3,16	9. Kota Jakarta Selatan 3,03
10. Kota Kota Solok	10. Kota Solok 3,12	10. Kota Solok 3,02	10. Kota Dumai 3,21	10. Kota Batu 3,06

Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 masuk dalam 10 kabupaten/kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional. Bahkan selama tiga tahun (tahun 2021-2023), angka kemiskinan Kota Sawahlunto adalah yang terendah di Indonesia. Namun pada tahun 2024, Kota Sawahlunto berada pada posisi 3.

Selain Persentase penduduk miskin, kondisi kemiskinan suatu daerah juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS, https://www.bps.go.id). Berikut perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2020 – 2024) :

Grafik 2.13
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

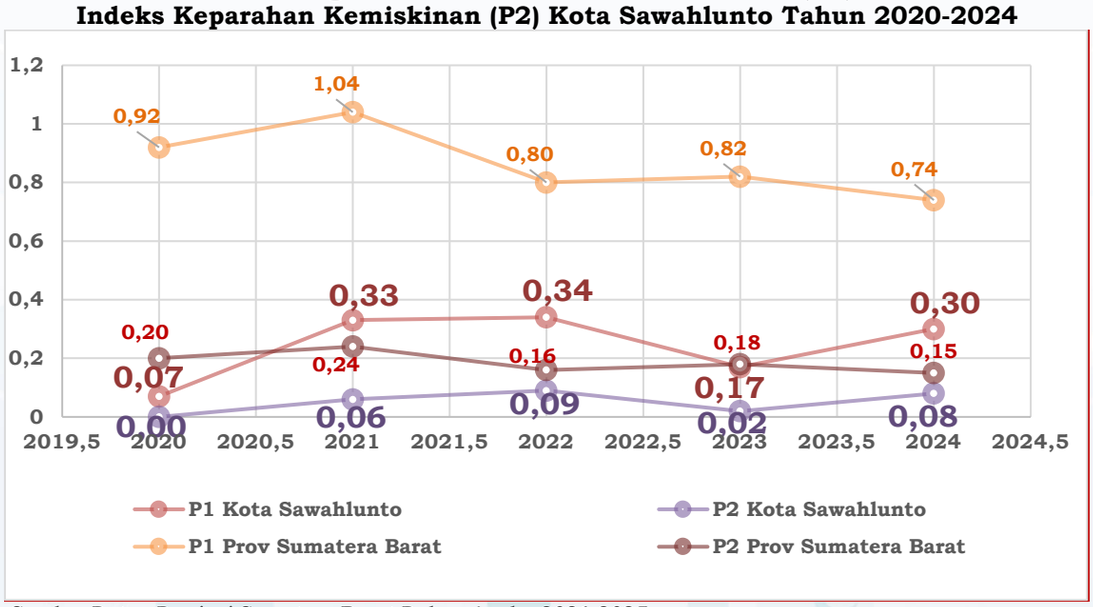

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021-2025

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berkisar antara 0,07-0,34 dan tergolong rendah, hal ini mengandung makna rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Sawahlunto berada dekat dengan garis kemiskinan atau berada di sekitar garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Indeks

Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sumatera Barat yang berada jauh di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto, mengandung makna bahwa rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Kota Sawahlunto lebih tinggi (lebih baik) dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2020-2024 berada pada kisaran 0,00 – 0,09 dan tergolong rendah. Jika dibandingkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat yang berada jauh di atas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto, mengandung makna penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Sawahlunto lebih merata dibandingkan dengan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat.

Meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Sawahlunto tahun 2024 sejalan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan. Meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Sawahlunto menjauh dari garis kemiskinan. Meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan meningkatnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Sawahlunto. Kondisi sebaliknya terjadi pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat yang mengalami penurunan meskipun tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat meningkat.

7. Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah telah menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tujuan 1 dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang harus dicapai pada tahun 2030. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan kebijakan baru yang disampaikan oleh Pemerintah pada awal tahun 2020. Tanggal 4 Maret tahun 2020, Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas telah memberikan arahan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem secara Nasional menjadi 0% di akhir RPJMN tahun 2024, sedangkan berdasarkan rilis BPS, kemiskinan ekstrem nasional pada tahun 2023 adalah 1,12%.

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran 1,9 USD PPP (*Purchasing Power Parity*), sebagai standar yang diacu bersama oleh bangsa-bangsa berdasarkan standar World Bank, berdasarkan hitungan World Bank persentase penduduk miskin ekstrem Nasional tahun 2023 adalah 1,12%, sedangkan jumlah penduduk miskin ekstrem Nasional adalah 3,1 juta jiwa. BPS Pusat melakukan perhitungan untuk standarisasi 1,9 USD PPP untuk di konversikan ke dalam rupiah, berdasarkan perhitungan BPS bahwa 1,9 USD PPP perkapita perhari pada tahun 2023 adalah Rp. 11.571,21 per kapita per hari (Rp.351.957,4 per kapita per bulan).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah memberikan amanat bagi seluruh lapis pemerintah sampai Pemerintahan Desa untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk dengan meraih dukungan dari unsur non pemerintah untuk terlibat dalam upaya intervensi.

Arahan Presiden tersebut diantaranya :

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
   a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat;
   c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ektsrem ini, dilaksanakan dengan prinsip Tepat sasaran : seluruh penduduk miskin ekstrem memperoleh program PPKE dengan menggunakan data sasaran yang terdapat status/tingkat kesejahteraan, akurat dan terkini. Pendekatan multidimensi : pelaksanaan program PPKE dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor, misalnya terkait kesetaraan gender, disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan,

Keterpaduan dan sinergi : penduduk miskin ekstrem dapat menerima berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBdes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang diberikan tersebut dapat diberikan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mencukupi kebutuhan kelompok miskin ekstrem.

Tersampaikannya dan dipahaminya informasi : penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hingga pemerintah desa/kelurahan dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak terkait program PPKE. Koordinasi dan kerjasama multipihak : pelaksanaan program PPKE memerlukan koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan unsur non pemerintah, serta Terpadu dan terkendali : pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program PPKE dilakukan secara berkala dengan menggunakan instrumen dan indikator yang relevan dan terukur.

Berdasarkan hasil estimasi BPS tahun 2023 dapat dilihat persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem menurut Kabupaten/Kota tahun 2020-2023 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.21
Estimasi Kemiskinan Ekstrem Provinsi Sumatera Barat
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (persen)				Estimasi Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
13	Sumatera Barat	1,53	0,91	0,77	0,41	83,933	50,842	43,671	23.45
1301	Kepulauan Mentawai	7,78	3,97	2,14	2,12	7,254	3,826	2,104	2.12
1302	Pesisir Selatan	1,32	0,37	0,46	0,17	6,143	1,731	2,171	0.80
1303	Solok	2,47	0,56	0,74	0,49	9,256	2,122	2,811	1.89
1304	Sijunjung	2,10	0,73	2,21	1,35	5,033	1,804	5,561	3.44
1305	Tanah Datar	0,81	0,76	0,53	0,00	2,824	2,646	1,867	0.00
1306	Padang Pariaman	1,14	0,95	0,27	0,34	4,740	3,996	1,139	1.46
1307	Agam	2,50	1,82	0,18	0,00	12,364	9,096	0,918	0.00
1308	Lima Puluh Kota	1,72	1,24	1,63	0,66	6,634	4,845	6,412	2.64
1309	Pasaman	1,33	0,74	0,24	0,17	3,775	2,137	0,710	0.49
1310	Solok Selatan	1,86	1,80	1,53	1,32	3,214	3,204	2,770	2.43
1311	Dharmasraya	1,94	0,16	1,47	0,69	4,892	0,429	3,980	1.93
1312	Pasaman Barat	0,86	1,32	0,76	0,70	3,847	6,159	3,588	3.41
1371	Kota Padang	0,93	0,45	0,64	0,15	8,964	4,383	6,338	1.49
1372	Kota Solok	0,40	0,26	0,89	0,00	0,287	0,194	0,672	0.00
1373	Kota Sawahlunto	0,00	0,39	0,82	0,00	0,000	0,250	0,525	0.00
1374	Kota Padang Panjang	0,88	1,03	0,00	1,07	0,479	0,572	0,000	0.61
1375	Kota Bukittinggi	1,07	1,52	1,21	0,54	1,418	2,065	1,675	0.76
1376	Kota Payakumbuh	1,55	0,77	0,10	0,00	2,124	1,078	0,148	0.00
1377	Kota Pariaman	0,77	0,34	0,31	0,00	0,685	0,305	0,282	0.00

Sumber Data : https://p3ke.kemenkopmk.go.id/ Surat Kemenko PMK Nomor : B-464/13/DI/KPS.01.00/02/2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase dan jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat selama 4 tahun terakhir (2020-2023) terdapat 17 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan, dan 2 Kab/Kota yang mengalami kenaikan. Persentase penduduk miskin ekstrem yang tertinggi di Provinsi Sumatera Barat ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 2,12%. Persentase dan jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2022 mengalami kenaikan dari 0 % pada tahun 2020, naik menjadi 0,39% (0,250 ribu jiwa) pada tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 0,82% (0,525 ribu jiwa) tahun 2022, namun pada tahun 2023 persentase penduduk miskin ekstrem Kota Sawahlunto sudah mencapai 0% kembali. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Sawahlunto tetap berupaya dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk mempertahankan kondisi kemiskinan ekstrem 0% ini. Untuk data tahun 2024, hingga bulan Juli tahun 2025 data belum tersedia dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

8. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan wilayah. Peranan individu dalam suatu daerah salah satunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian wilayah tersebut.

Perekonomian wilayah yang baik berdampak pada keberhasilan pembangunan wilayah tersebut dari aspek ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yang disebut sebagai angka partisipasi angkatan kerja. Angka partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja) dengan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Kedua komponen ini masing-masing mengalami perubahan seiring dinamika penduduk. Berikut disajikan angka partisipasi angkatan kerja Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

Indikator	2020			2021			2022			2023			2024		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Jumlah Angkatan Kerja 15 tahun ke atas yang bekerja (Jiwa)	17.410	12.900	30.310	17.589	12.597	30.186	18.280	13.995	32.275	19.480	14.538	34.018	20.413	15.721	36.134
Jumlah Penduduk Usia 15 tahun keatas (Jiwa)	24.295	24.409	48.704	25.204	25.287	50.491	25.068	25.083	50.151	25.560	25.500	51.060	25.990	25.890	51.880
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,66	52,85	62,23	69,79	49,82	59,78	72,92	55,79	64,36	76,21	57,01	66,62	78,54	60,72	69,65

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2024, Data Diolah 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama rentang tahun 2020-2024 angka partisipasi angkatan kerja Kota Sawahlunto menunjukkan peningkatan sebesar 7,42% yaitu dari 62,23% tahun 2020 menjadi 69,65% tahun 2024, dengan angka partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih besar dari angka partisipasi angkatan kerja perempuan. Kenaikan angka partisipasi angkatan kerja ini disebabkan oleh penduduk usia 15 tahun keatas banyak yang bekerja, ditambah dengan lulusan SMK dan Perguruan Tinggi yang masuk dunia kerja semakin meningkat.

9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Selain angka partisipasi angkatan kerja, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi juga dapat dihitung dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun). Berikut disajikan tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.23
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

Indikator	2020			2021			2022			2023			2024		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	18.948	14.071	33.019	18.951	13.292	32.243	19.353	14.620	33.973	20.626	15.174	35.800	21.807	16.449	38.256
Jumlah Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	23.138	23.648	46.786	23.450	23.930	47.380	23.748	24.205	47.953	25.641	25.572	51.213	26.055	25.967	52.022
TPAK (%)	81,89	59,50	70,57	80,81	55,55	68,05	81,49	60,40	70,85	80,44	59,34	69,90	83,70	63,35	73,54

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2024, Data Diolah 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa selama rentang tahun 2020-2024, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari 70,57% tahun 2020 meningkat menjadi 73,54 % tahun 2024, dengan TPAK laki-laki lebih besar dari TPAK perempuan. Dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut menunjukkan bahwa semakin

bertambah proporsi penduduk usia kerja yang sedang bekerja. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya lulusan SMK dan Perguruan Tinggi yang masuk dunia kerja.

10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk perempuan usia kerja yang aktif secara ekonomi. Rasio TPAK perempuan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk perempuan angkatan kerja dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja (15-64 tahun). Berikut disajikan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Perempuan Angkatan Kerja (Jiwa)	14.071	13.292	14.620	15.174	16.449
Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja (Jiwa)	23.648	23.930	24.205	25.572	25.967
TPAK Perempuan (%)	59,50	55,55	60,40	59,34	63,35

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data Diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2020-2024, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Sawahlunto mengalami kenaikan sebesar 3,85%. Dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tersebut menunjukkan bahwa semakin bertambah proporsi penduduk perempuan usia kerja yang sedang bekerja. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya perempuan lulusan SMK dan Perguruan Tinggi yang masuk dunia kerja. Sedangkan berdasarkan kelompok umur dan tingkat pendidikan, TPAK Perempuan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Perempuan Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur (Jiwa)					
15-19	537	283	-[1]	466	646
20-24	989	908	1.285	1.696	1.879
25-29	1.843	1.649	1.818	1.589	1.697
30-34	1.634	1.650	1.710	1.699	1.778
35-39	1.827	1.778	1.854	1.952	1.641
40-44	1.610	1.681	2.033	1.704	2.033
45-49	1.767	1.580	1.877	1.665	1.737
50-54	1.321	1.308	1.243	1.528	1.626
55-59	1.083	1.066	1.145	1.224	1.416
60-64	612	596	680	774	838[1]
65+	848	793	783	877	1.158
Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja Menurut Kelompok Umur (Jiwa)					
15-19	2.356	2.355	2.361	2.643	2.645
20-24	2.004	2.006	1.998	2.583	2.586
25-29	2.549	2.529	2.512	2.627	2.637
30-34	2.589	2.585	2.579	2.533	2.606
35-39	2.606	2.621	2.625	2.337	2.344
40-44	2.418	2.472	2.507	2.276	2.292
45-49	2.208	2.249	2.294	2.167	2.182
50-54	1.793	1.841	1.885	2.036	2.064
55-59	1.534	1.573	1.620	1.860	1.883
60-64	1.152	1.185	1.232	1.590	1.663
65+	2.439	2.513	2.592	2.920	3.065
TPAK Perempuan Menurut Kelompok Umur (%)					
15-19	22,79	12,02	0	17,63	24,42
20-24	49,35	45,26	64,31	65,66	72,66
25-29	72,30	65,20	72,37	60,49	64,35
30-34	63,11	63,83	66,30	67,07	68,23
35-39	70,11	67,84	70,63	83,53	70,01
40-44	66,58	68,00	81,09	74,87	88,70
45-49	80,03	70,25	81,82	76,83	79,61
50-54	73,68	71,05	65,94	75,05	78,78
55-59	70,60	67,77	70,68	65,81	75,20
60-64	53,13	50,30	55,19	48,68	42,22
65+	34,77	31,56	30,21	30,03	37,78

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data Diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa TPAK Perempuan Kota Sawahlunto berdasarkan kelompok umur selama rentang tahun 2020-2024 berfluktuasi. TPAK Perempuan yang paling tinggi tahun 2024 ada pada kelompok umur 40-44 tahun, disusul oleh kelompok umur 45-49 tahun, dan umur 50-54 tahun. TPAK Perempuan yang paling rendah ada pada kelompok umur 15-19 tahun, dan umur 65 tahun ke atas. Ini menunjukkan bahwa pada usia ini (15-19 tahun) mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun).

Berikut disajikan TPAK Perempuan Kota Sawahlunto berdasarkan pendidikan selama lima tahun terakhir pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
TPAK Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Perempuan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan (Jiwa)					
SD ke bawah	3.344	3.079	3.376	2.966	3.246
SLTP/Sederajat	1.994	1.967	2.061	1.949	2.049
SLTA/Sederajat	4.632	4.089	4.624	5.322	6.382
Perguruan Tinggi	4.101	4.157	4.559	4.937	4.772
Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan (Jiwa)					
SD ke bawah	6.245	6.225	6.022	5.729	6.278
SLTP/Sederajat	4.591	4.991	4.946	4.966	4.437
SLTA/Sederajat	7.853	7.982	7.717	8.518	9.412
Perguruan Tinggi	4.959	4.731	5.520	6.359	5.840
TPAK Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan (%)					
SD ke bawah	53,55	49,46	56,06	51,77	51,70
SLTP/Sederajat	43,43	39,41	41,67	39,25	46,18
SLTA/Sederajat	58,98	51,23	59,92	62,48	67,81
Perguruan Tinggi	82,70	87,87	82,59	77,64	81,71

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data Diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa TPAK Perempuan Kota Sawahlunto berdasarkan tingkat pendidikan selama rentang tahun 2020-2024 berfluktuasi. TPAK Perempuan yang paling tinggi ada pada tingkat pendidikan perguruan tinggi dan SLTA/Sederajat, sedangkan yang paling rendah ada pada tingkat pendidikan SLTP/Sederajat dan SD ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan Kota Sawahlunto yang memiliki pendidikan SMA ke atas merupakan kelompok terbanyak yang berpartisipasi menjadi tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan terakhir yang ditamatkan penduduk perempuan itu maka semakin besar peluang perempuan tersebut untuk bekerja dibanding perempuan yang memiliki pendidikan lebih rendah. Dengan perkataan lain, perempuan yang mempunyai pendidikan di bawah SMA memiliki peluang lebih kecil untuk dapat berpartisipasi menjadi tenaga kerja dibanding yang berpendidikan SMA ke atas. Artinya klasifikasi pendidikan perempuan mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan perempuan untuk bekerja. Semakin tinggi pendidikannya maka kecenderungan perempuan untuk bekerja akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika pendidikannya semakin rendah maka peluang perempuan tersebut akan semakin kecil untuk berpartisipasi. Pendidikan akan dapat merubah kualitas seseorang kearah yang lebih baik dengan kemungkinan memperoleh pekerjaan dengan mudah dan layak.

11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang ada. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidak bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.27
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	2020			2021			2022			2023			2024		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa)	1.538	1.171	2.709	1.362	695	2.057	1.073	625	1.698	1.146	636	1.782	1.394	728	2.122
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	18.948	14.071	33.019	18.951	13.292	32.243	19.353	14.620	33.973	20.626	15.174	35.800	21.807	16.449	38.256
3	**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**	**8,12**	**8,32**	**8,20**	**7,19**	**5,23**	**6,38**	**5,54**	**4,27**	**5,00**	**5.56**	**4.19**	**4.98**	**6,39**	**4,43**	**5,55**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir berfluktuatif dengan TPT Laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPT Perempuan. Pada tahun 2020 yaitu sebanyak 8,20%, turun menjadi 6,38% tahun 2021, pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 5%, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi menjadi 4,98%, sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 5,55%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pendidikan dan pelatihan kerja (kurangnya akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja), dan turunnya pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi peluang kerja baru.

Berikut disajikan perkembangan TPT kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.28
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	3,98	2,79	1,39	1,33	1,44
Pesisir Selatan	7,00	5,97	4,61	4,75	5,06
Solok	4,65	4,67	5,89	4,99	4,91
Sijunjung	5,30	3,57	4,87	4,71	4,73
Tanah Datar	4,79	4,63	5,91	5,35	5,30
Padang Pariaman	8,13	8,41	6,60	6,69	6,59
Agam	4,61	5,06	4,93	4,96	4,73
Lima Puluh Kota	3,03	2,25	3,72	3,95	3,68
Pasaman	5,04	4,92	5,38	5,09	5,25
Solok Selatan	5,62	4,84	3,71	2,57	2,30
Dharmasraya	5,31	5,00	6,23	6,22	6,02
Pasaman Barat	4,69	5,02	6,33	6,01	6,34
Kota					
Padang	13,64	13,37	11,69	10,86	9,88
Solok	8,35	5,15	3,90	3,72	3,62
Sawahlunto	***8,20***	***6,38***	***5,00***	***4,98***	***5,55***
Padang Panjang	7,22	4,90	4,84	5,49	4,94
Bukittinggi	7,51	6,09	4,90	4,99	4,72
Payakumbuh	6,68	6,47	5,16	4,84	4,87
Pariaman	5,73	6,09	5,19	5,68	5,32
Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2020 TPT Kota Sawahlunto adalah yang tertinggi ke-3 di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang dan Kota Solok. Kemudian tahun 2021 menjadi tertinggi ke-4 setelah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Payakumbuh. Pada tahun 2022 menjadi posisi terendah ke-10 tingkat kab/kota se-Provinsi Sumatera Barat. Namun pada tahun 2023, TPT Kota Sawahlunto berada pada posisi terendah ke-3 tingkat kota se-Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Solok dan Kota Payakumbuh, dan posisi terendah ke-9 tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan pada tahun 2024, TPT Kota Sawahlunto naik menjadi posisi ke-15 tingkat kabupaten/kota dan posisi tertinggi ke-2 tingkat kota se-Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang.

Berikut disajikan data perbandingan antara TPT Kota Sawahlunto, TPT Provinsi Sumatera Barat dan TPT Nasional selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.29
TPT Kota Sawahlunto, TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	TPT Kota Sawahlunto	8,20	6,38	5	4,98	5,55
2	TPT Provinsi Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75
3	TPT Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025, Statistik Indonesia 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa TPT Kota Sawahlunto, TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama tahun 2020-2024 berfluktuatif. Pada tahun 2020 TPT Kota Sawahlunto berada diatas TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, sedangkan pada tahun 2021-2023 TPT Kota Sawahlunto berada di bawah TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Sedangkan pada tahun 2024 TPT Kota Sawahlunto berada diatas TPT Nasional dan dibawah TPT Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tentunya merupakan buah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

12. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap penciptaan nilai tambah melalui proses produksi barang dan/jasa, menggambarkan *output* yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada tahun tertentu. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan, menandakan bahwa tenaga kerja semakin produktif. Produktivitas tenaga kerja dihitung berdasarkan perbandingan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dengan Tenaga Kerja/Angkatan Kerja yang bekerja. Berikut disajikan produktivitas tenaga kerja Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.30
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB ADHK (miliar rupiah)	2.760.92	2.829,35	2.941,27	3.072,35	3.195,86
2	Tenaga Kerja (orang)	30.310	30.186	32.275	34.018	36.134
3	*Produktivitas Tenaga Kerja (juta Rp/tenaga kerja/Tahun)*	*91,09*	*93,73*	*91,13*	*90,32*	*88,44*

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produktivitas tenaga kerja Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020 adalah sebesar 9,11 juta per tenaga kerja per tahun dan naik menjadi 9,37 juta per tenaga kerja tahun 2021, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 9,11 juta per tenaga kerja, pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 9,03 juta per tenaga kerja, dan tahun 2024 mengalami penurunan lagi menjadi 8,84 juta per tenaga kerja per tahun. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja adalah rendahnya kualitas SDM (41% angkatan kerja Kota Sawahlunto masih di dominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, informasi pasar kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Kota Sawahlunto belum mampu merespons perubahan cepat dari jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

13. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Tenaga kerja formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai.

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai proporsi penciptaan lapangan kerja formal, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.

Berikut disajikan tabel dan grafik proporsi penciptaan lapangan kerja formal Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.31
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Berusaha sendiri	7.842	8.385	8.408	9.109	9.367
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	3.659	2.699	2.974	3.025	3.268
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	558	893	868	1.148	1.589
4	Buruh/karyawan/pegawai	12.806	14.017	16.021	16.051	17.291
5	Pekerja bebas di pertanian	663	319	152	1.396	546
6	Pekerja bebas di non pertanian	1.810	1.532	1.130		862
7	Pekerja keluarga/tak dibayar	2.972	2.341	2.722	3.289	3211
8	**Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) = (3+4)/(1 s.d 7)**	**44,09**	**49,39**	**52,33**	**50,56**	**52,25**

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data Diolah

Grafik 2.14
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

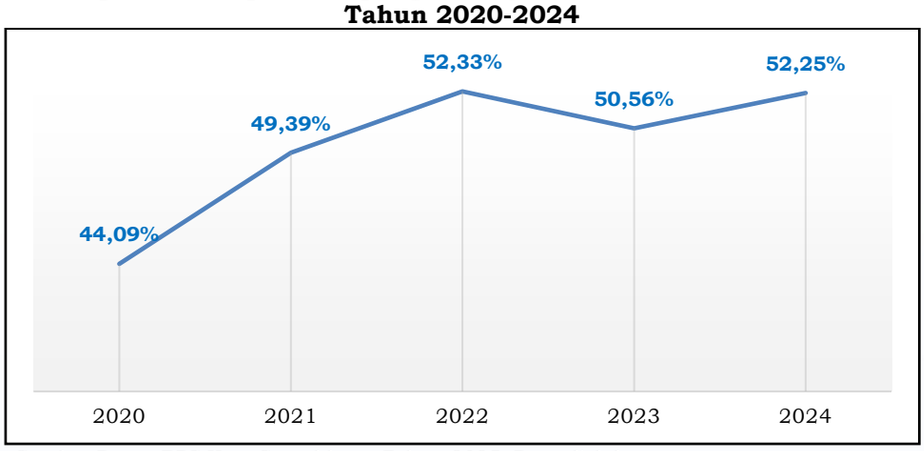

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data diolah

Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa proporsi penciptaan lapangan kerja formal Kota Sawahlunto selama rentang tahun 2020-2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat, dari 44,09% pada tahun 2020 menjadi 52,25% pada tahun 2024. Namun angka ini masih berada di bawah rata-rata persentase tenaga kerja formal perkotaan kecuali tahun 2024. Berikut disajikan persentase tenaga kerja formal menurut daerah tempat tinggal.

Tabel 2.32
Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Daerah Tempat Tinggal
Tahun 2020-2024

No	Daerah Tempat Tinggal	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perkotaan	50,51	51,12	52,38	51,34	51,76
2	Perdesaan	26,59	27,59	26,21	27,37	28,72
3	Perkotaan + Perdesaan	39,53	40,55	40,69	40,89	42,05

Sumber Data : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Penduduk usia kerja lebih menyukai bekerja di lapangan kerja formal karena sektor formal melindungi hak-hak pekerja dan memastikan gaji yang adil, menyediakan lebih banyak peluang untuk kemajuan karier dan pengembangan profesional, disertai dengan manfaat seperti asuransi kesehatan, rencana pensiun, dan waktu liburan berbayar. Di samping itu rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal lebih tinggi dari pekerja informal. Berikut perbandingan rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal dan informal berdasarkan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.33
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Dan Informal
Berdasarkan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

Kabupaten / Kota	Pekerja Formal	Pekerja Informal
Kabupaten		
Kepulauan Mentawai	2.429.633	1.003.415
Pesisir Selatan	2.381.367	1.682.574
Solok	2.314.010	1.514.266
Sijunjung	2.558.029	1.693.227
Tanah Datar	2.539.714	1.501.423
Padang Pariaman	2.411.883	1.587.876
Agam	2.627.037	1.737.969
Lima Puluh Kota	2.343.721	1.673.446
Pasaman	2.430.026	1.434.525
Solok Selatan	3.052.717	1.478.229
Dharmasraya	2.651.515	1.984.367
Pasaman Barat	2.609.232	1.943.819
Kota		
Padang	3.226.305	2.356.319
Solok	3.314.700	2.208.694
Sawahlunto	***2.741.492***	***1.394.212***
Padang Panjang	3.334.028	3.052.374
Bukittinggi	3.260.014	2.364.287
Payakumbuh	2.934.764	2.083.604
Pariaman	3.087.313	1.863.960
Sumatera Barat	**2.772.393**	**1.771.990**

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal jauh lebih tinggi dari pekerja informal di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat. Dan rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal di Kota Sawahlunto jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat yang ditetapkan sebesar Rp. 2.811.449,27 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor : 562-768-2023 Tanggal 20 November 2023 dan berada pada posisi ke-8 tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja informal Kota Sawahlunto berada pada posisi terendah ke-2 di tingkat kab/kota se-Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

14. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah dan semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PDRB adalah penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.

Berikut disajikan perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB selama lima tahun terakhir di Kota Sawahlunto.

Grafik 2.15
Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

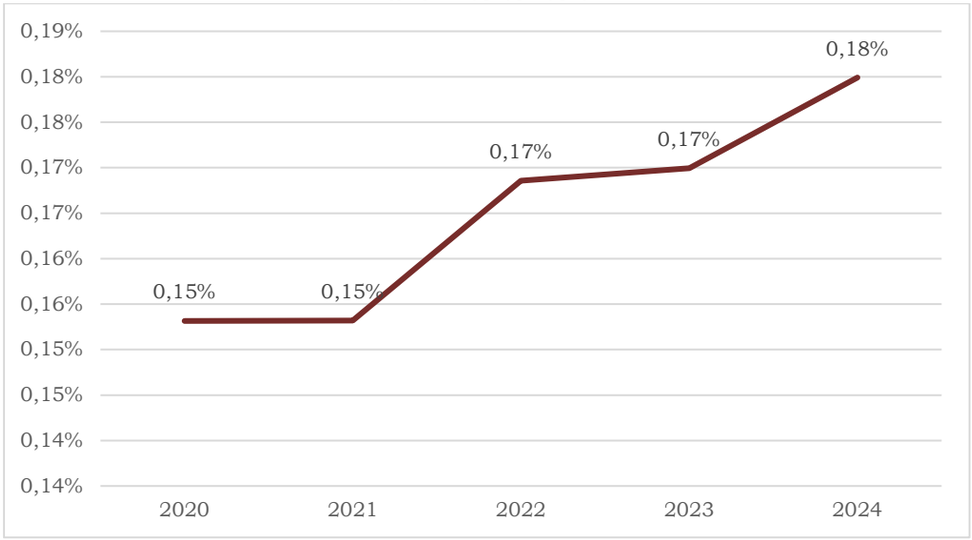

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2024, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Berdasarkan grafik di atas, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama rentang tahun 2020-2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat, dari 0,15% tahun 2020 meningkat menjadi 0,18% tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 0,18% APBD Kota Sawahlunto mampu membiayai pembangunan dari pajak daerah.

15. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Total dana pihak ketiga/PDRB (%) adalah rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu wilayah terhadap PDRB wilayah tersebut pada suatu waktu tertentu yang menggambarkan tingkat besaran perbandingan dana pihak ketiga perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Peningkatan Total dana pihak ketiga/PDRB menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh Bank. Produk simpanan yang ditawarkan bank kepada pihak ke tiga ini antara lain : simpanan giro, tabungan, deposito dan simpanan deposito. Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, saran perintah lainnya, atau pemindah bukuan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati dimana nasabah bertindak sebagai penitip dana dan bank sebagai penerima titipan dana. Deposito merupakan jenis simpanan uang yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah dijanjikan antara bank dan nasabah.

Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR–BPRS) yang ada di Kota Sawahlunto. Kota Sawahlunto saat ini memiliki 7 Bank Umum (BU) yang terdiri dari; 6 BU Konvensional dengan 2 Bank Kantor Cabang, 6 Kantor Cabang Pembantu, 7 Kantor Kas, dan 9 ATM, dan 1 Bank Syariah dengan 2 Kantor Cabang Pembantu dan 2 ATM. Kota Sawahlunto juga memiliki 4 Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/BPRS).

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambahan bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian Kota Sawahlunto. Nilai total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio total DPK/PDRB (%) menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan di Kota Sawahlunto.

Di bawah ini disajikan tabel total dana pihak ketiga di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.34
Total Dana Pihak Ketiga di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total Dana Pihak Ketiga (miliar rupiah)	246,61	335,97	391,86	379,31	378,48
PDRB ADHB (miliar rupiah)	3.656,60	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	6,74%	8,72%	8,93%	7,86%	7,48%

Sumber Data : Bank Indonesia Tahun 2025, BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa rasio Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir di Kota Sawahlunto menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif pada kisaran 6,74 % hingga 8,93 %. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2020. Penurunan rasio total dana pihak ketiga terhadap PDRB menunjukkan menurunnya tingkat simpanan masyarakat di Kota Sawahlunto dan tabungan merupakan produk simpanan yang mendongkrak kenaikan dana pihak ketiga, sementara Giro dan Deposito mengalami kenaikan yang lambat dan cenderung masih fluktuatif.

16. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)

Nilai transaksi saham per kapita per kabupaten/kota adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (Provinsi/Kabupaten/Kota) selama setahun dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut (Provinsi/Kabupaten/Kota). Total nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.

Semakin tinggi nilai transaksi saham per kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuiditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal.

Pasar modal atau saham adalah salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Hal-hal yang mempengaruhi perubahan terhadap harga saham adalah Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (PDB atau PDRB). Estimasi PDB atau PDRB memberikan pengaruh terhadap nilai harga saham atau transaksi saham. Meningkatnya PDB atau PDRB merupakan sinyal yang baik (positif) untuk investasi dan sebaliknya. meningkatkan PDB atau PDRB juga mempunyai pengaruh positif terhadap daya beli konsumen sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan.

Masyarakat Kota Sawahlunto pada saat ini cukup memiliki minat yang tinggi untuk menanamkan uang di pasar modal karena nilai transaksi saham terus meningkat. Hal ini didukung oleh adanya keberadaan 10 sekuritas dan 17 gerai BEI yang tersebar dari kampus hingga SMA (Kantor Perwakilan Sumatera Barat) yang mewilayahi semua kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat. Kendala yang dihadapkan calon investor saat hendak bertransaksi saham yaitu penilaian tentang mahal, rumit dan ragu akan kehalalan. Sementara menanggapi keraguan publik yang berpandangan transaksi saham di pasar modal hukumnya haram, BEI telah mengumumkan saham dengan kategori syariah sehingga umat Islam tidak perlu khawatir untuk berjual beli. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir, apalagi Kota Sawahlunto dikenal masyarakatnya cukup religius dan saham kategori syariah telah melalui seleksi ketat DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

Berikut disajikan nilai transaksi saham per kapita di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir :

Tabel 2.35
Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Transaksi Saham (Miliar Rupiah)	47,34	62,28	33,83	28,87	83,17
Jumlah Penduduk (Jiwa)	65.138	65.807	66.778	67.760	68.730
Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)	726.764,71	946.403,88	506.603,97	426.062,57	1.210.097,48

Sumber Data : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2024, BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai transaksi saham Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Penurunan nilai transaksi saham terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023 disebabkan lesunya ekonomi, serta kehati-hatian investor dalam melakukan transaksi. Meskipun terjadi peningkatan investor perorangan (SID) pada tahun tersebut, namun peningkatannya tidak berbanding lurus dengan peningkatan nilai transaksi saham karena kebanyakan investor perorangan yang masuk pasar modal merupakan anak-anak muda yang masih duduk di bangku kuliah yang baru mencoba menjadi investor dengan modal Rp. 100 ribu. Nilai transaksi saham Kota Sawahlunto pada tahun 2024 merupakan yang terendah kedua dari 6 kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten/kota dengan nilai transaksi saham tertinggi adalah Kota Padang dengan nilai transaksi sebesar Rp. 7.448,96 Miliar dan yang terendah adalah Kota Pariaman dengan nilai transaksi sebesar Rp. 65,48 Miliar.

17. Total Kredit/PDRB

Pada saat sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa dalam penyimpanan uang bagi masyarakat dengan aman dalam bentuk tabungan. Demikian juga untuk dunia usaha yang dapat meminjam atau kredit dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga keuangan yaitu bank. Dimana bank sebagai badan usaha yang dapat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan juga dapat menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Untuk pemberian kredit dimana bank hanya memperhatikan dua prinsip yaitu kepercayaan dan kehati-hatian, masyarakat dan bank mempunyai hubungan yang sangat erat dimana masyarakat memerlukan dana dari bank, begitu juga bank yang memerlukan dana dari masyarakat. Pinjaman atau kredit bank dapat disalurkan kepada siapa saja yang memerlukan baik untuk individu maupun bagi dunia usaha.

Perbankan dalam penyaluran kredit memiliki peran yang penting dalam pembiayaan perekonomian nasional sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga akan dapat membuka lapangan kerja baik melalui perluasan bagi produksi dan mendorong usaha-usaha yang baru. Dalam kredit perbankan yang berperan dalam meningkatkan konsumsi salah satunya. Adapun penggunaan kredit perbankan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Kredit Konsumtif
b. Kredit Produktif yang terdiri dari :
   - Kredit Investasi
   - Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja yang digunakan untuk menambah modal demi memperluas usaha bisnisnya yang digunakan untuk biaya operasional usaha bisnisnya. Dengan kredit modal kerja ini dapat membantu usaha bisnisnya baik usaha berskala besar, berskala menengah maupun yang berskala kecil terutama yang membutuhkan dana yang cukup besar. Berkenaan dengan meningkatnya permintaan kredit tersebut, muncullah masalah baru yang membuat bank kewalahan dalam menangani masalah kredit yang meningkat. Meningkatnya pengajuan kredit oleh masyarakat memiliki resiko yaitu kredit macet. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya.

Salah satu penyebab dari peningkatan kredit macet ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat atau nasabah tentang sistematika kredit itu sendiri. Masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan pembayaran melalui kartu kredit tanpa memahami secara keseluruhan aturan dan konsekuensi dari penggunaan kartu kredit tersebut. Penyebab lain dari permasalahan kredit macet ini yaitu ketidakseimbangan antara jumlah *customer service* dengan jumlah nasabah yang terus meningkat sehingga ada nasabah yang kurang dibekali pengetahuan yang cukup mengenai produk kartu kredit yang dimilikinya. Lalu, muncul pula berbagai keluhan masyarakat berkaitan dengan masalah kredit ini, yaitu seperti tagihan-tagihan yang tiba-tiba melonjak, suku bunga yang sangat tinggi, penagihan oleh *debt collector* yang dianggap kurang manusiawi, dan lain sebagainya.

Selain itu, dari sisi bank, pihak bank yang dianggap terlalu mengejar target penyaluran kredit menyebabkan pihak bank mengabaikan aspek analisis kredit, seperti pengelolaan informasi yang kurang baik, kurang efektifnya kebijakan dalam pemberian kredit, dan SOP analisis kredit yang buruk. Hal tersebut mengakibatkan kredit macet masih menjadi ancaman besar bagi bank yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Di samping itu, perlu adanya penekanan terhadap prinsip 5C yang dijalankan oleh bank. Prinsip 5C sendiri merupakan singkatan dari *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*. Prinsip-prinsip tersebut

merupakan wujud keselektifan bank dalam menentukan calon nasabah yang akan menerima kredit bank. Pada dasarnya, adanya prinsip 5C ini diadakan dengan harapan sebagai bahan referensi terutama bagi para analis kredit perbankan. Karena bank tentu tidak mau asal memberikan kredit mereka kepada nasabah. Oleh karena itu, pihak bank harus tetap berpegangan dalam prinsip ini meskipun jumlah nasabahnya terus meningkat.

Berikut disajikan total kredit terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.36
Total Kredit Dan PDRB ADHB Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Kredit (miliar rupiah)	451,10	488,08	515,46	549,44	590,15
Pertumbuhan Total Kredit	-	8,20%	5,61%	6,59%	7,41%
PDRB ADHB (miliar rupiah)	3.656,59	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
Pertumbuhan PDRB ADHB	-	5,34%	13,97%	9,92%	4,82%
Total Kredit/PDRB ADHB (%)	**12,34%**	**12,67%**	**11,74%**	**11,39%**	**11,67%**

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2024

Rasio Total Kredit terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama periode tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Penurunan Rasio Total Kredit terhadap PDRB Kota Sawahlunto terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023. Hal ini disebabkan pertumbuhan Total Kredit lebih rendah dari Pertumbuhan PDRB ADHB. Penurunan Rasio Total Kredit terhadap PDRB Kota Sawahlunto tersebut menunjukkan bahwa fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan berkurang dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun tersebut..

18. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)

Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan, merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana. Rasio PDRB sektor jasa keuangan (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi lapangan usaha jasa keuangan terhadap PDRB suatu daerah. Rasio PDRB sektor jasa keuangan menggambarkan sejauh mana sektor jasa keuangan mampu menjalankan fungsinya, baik sebagai motor penggerak maupun penopang pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah.

Berikut disajikan perkembangan rasio PDRB sektor jasa keuangan selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.37
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jasa Keuangan (miliar rupiah)	124,28	139,51	155,10	164,02	172,38
2	PDRB ADHB (miliar rupiah)	3.656,59	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
3	**Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)**	**3,40**	**3,62**	**3,53**	**3,40**	**3,41**

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio PDRB sektor jasa keuangan Kota Sawahlunto selama rentang tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Di samping itu kontribusi sektor jasa keuangan sangat rendah terhadap perekonomian Kota Sawahlunto dengan kisaran 3,40 % hingga 3,62 % sehingga belum mampu menjadi motor penggerak maupun penopang pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto..

19. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di suatu wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.38
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Penduduk yang bekerja :**	**30.310**	**30.186**	**32.275**	**34.018**	**36.134**
	- Laki-laki	17.410	17.589	18.280	19.480	20.413
	- Perempuan	12.900	12.597	13.995	14.538	15.721
2	**Angkatan Kerja :**	**33.019**	**32.243**	**33.973**	**35.800**	**38.256**
	- Laki-laki	18.948	18.951	19.353	20.626	21.807
	- Perempuan	14.071	13.292	14.620	15.174	16.449
3	***Rasio penduduk yang bekerja :***	***91,80***	***93,62***	***95,00***	***95,02***	***94,45***
	- Laki-laki	*91,88*	*92,81*	*94,46*	*94,44*	*93,61*
	- Perempuan	*91,68*	*94,77*	*95,73*	*95,81*	*95,57*

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk yang bekerja, jumlah angkatan kerja, maupun rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren fluktuasi dengan rasio perempuan lebih besar dari rasio laki-laki. Pada tahun 2020 rasio penduduk yang bekerja sebesar 91,80 naik menjadi 93,62 pada tahun 2021, pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 95,00, dan tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan menjadi 95,02, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 94,45. Hal tersebut berarti 94,45 % dari total angkatan kerja di Kota Sawahlunto telah memperoleh kesempatan untuk bekerja, sementara untuk 5,55% yang lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan atau menganggur.

20. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Rasio kesempatan kerja adalah persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja terhadap angkatan kerja yang digunakan untuk mengukur besarnya angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi tingkat kesempatan kerja maka kesempatan kerja juga akan semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.39
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (Orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (Orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1	2020	30.310	46.786	64,78
2	2021	30.186	47.380	63,71
3	2022	32.275	47.953	67,31
4	2023	34.018	51.213	66,42
5	2024	36.134	52.022	69,45

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data Diolah

Dilihat dari tabel di atas perkembangan rasio kesempatan kerja di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren fluktuasi. Pada tahun 2020 rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sebesar 64,78%, turun menjadi 63,71% pada tahun 2021, sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 67,31%, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 66,42%, pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 69,45%. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Rasio kesempatan kerja juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan/skill dan usia tenaga kerja serta investasi.

21. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan adalah mengukur seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam memenuhi belanja daerah. Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perkembangannya selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.40
Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	**PENDAPATAN DAERAH**	**576.857.864.031,56**	**598.040.864.187,45**	**619.181.974.790,86**	**605.315.736.275,64**	**642.232.605.170,77**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**59.537.385.897,66**	**51.475.336.271,45**	**65.779.505.807,86**	**59.943.839.179,64**	**65.743.716.580,77**
	Pendapatan Pajak Daerah	5.602.920.091,75	5.993.540.247	7.434.834.333	8.149.995.371	9.115.911.011
	Pendapatan Retribusi Daerah	2.788.116.593	2.731.559.922	3.550.241.052	2.691.622.325	35.499.893.370
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.026.462.819	10.806.423.680	13.477.268.009	15.663.529.464	17.143.203.404
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.119.886.393,91	31.943.812.422,45	41.317.162.413,86	33.438.692.019,64	3.984.708.795,77
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**468.737.786.340**	**538.147.448.116**	**550.785.091.283**	**545.371.897.096**	**576.368.888.590**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	*445.561.937.322*	*509.421.068.591*	*516.526.120.023*	*514.079.683.094*	*542.802.727.013*
	Dana Perimbangan	-	*442.021.996.681*	*491.383.273.023*	*492.740.370.094*	*507.357.029.013*
	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	-	28.949.393.592	35.571.241.367	34.188.263.466	33.087.277.000
	Dana Bagi Hasil Pajak	8.109.612.714	-	4.196.019.461	6.901.138.466	5.628.245.000
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)	6.705.943.539	-	21.259.996.181	27.287.125.000	150.573.000
	Dana Alokasi Umum (DAU)	347.498.276.000	341.393.550.000	340.799.183.261	357.769.014.914	396.423.949.217
	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)	83.248.105.069	71.679.053.089	115.012.848.395	100.783.091.714	77.845.802.796
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		*67.399.071.910*	*25.142.847.000*	*21.339.313.000*	
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	37.290.036.000	5.044.116.000	0	13.892.503.000
	Dana Desa	-	30.109.035.910	20.098.731.000	21.339.313.000	21.553.195.000
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	*23.175.849.018*	*28.726.379.525*	*34.258.971.260*	*31.292.214.002*	*33.566.161.577*
	Pendapatan Bagi Hasil	23.175.849.018	28.726.379.525	34.258.971.260	27.492.214.002	33.566.161.577
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.175.849.018	28.726.379.525	34.258.971.260	27.492.214.002	33.566.161.577
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	600.000.000	3.800.000.000	-
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**48.582.691.793,90**	**8.418.079.800**	**2.617.377.700**	**0**	**120.000.000**
	Pendapatan Hibah	8.148.061.693	-	-	-	120.000.000
	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	7.553.170.000	-	-	-
	Pendapatan Dana Darurat	11.503.247.000	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	28.931.383.100,90	-	-	-	-
	Dana Alokasi Desa	-	-	-	-	-
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	864.909.800	2.617.377.700	0	-
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	***10,32***	***8,61***	***10,62***	***9,90***	***10,24***
	Persentase Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah (%)	***81,26***	***89,99***	***88,95***	***90,10***	***89,74***

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2024, Data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren fluktuasi. Selama tahun 2020 - 2024 persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah berkisar antara 8,61 % hingga 10,62 %. Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata persentase Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah yang berkisar antara 81,26 % hingga 90,10 %, ini menunjukkan bahwa ketergantungan Kota Sawahlunto terhadap pendapatan transfer sangat tinggi. Pemerintah Kota Sawahlunto belum mampu mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya, sehingga masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat berupa dana transfer/dana perimbangan. Untuk itu perlu peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang ada di Kota Sawahlunto dengan cara menggali, mengembangkan dan mengolah potensi sumber daya yang tersedia agar menjadi kota mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.

22. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan penilaian profesional BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan suatu institusi yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK menggambarkan tingkat kedisiplinan keuangan suatu instansi berdasarkan empat kriteria tersebut diatas. Berikut disajikan Opini BPK terhadap penilaian Laporan Keuangan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.41
Opini BPK Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama rentang tahun 2020-2024, Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan. Hal ini menyatakan bahwa laporan keuangan Kota Sawahlunto telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAP/SPKN). Atas prestasi tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh reward dari pemerintah pusat berupa penambahan anggaran.

23. Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menggambarkan angka kesejahteraan dan pemerataan ekonomi berdasarkan kualitas konsumsi pangan, keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Untuk Kota Sawahlunto, skor pola pangan harapan berdasarkan hasil survei seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.42
Pola Pangan Harapan Hasil Survei
Tahun 2020 - 2024

No	Kelompok Pangan	Survei Analisis Konsumsi Pangan Tahun				
		Skor PPH				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi-padian	20,4	22,5	23,7	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	0,9	0,8	1,5	1,0	1,1
3.	Pangan hewani	22,7	22,5	23,6	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	1,0	0,9	0,8	1,0	0,9
6.	Kacang-kacangan	6,1	6,8	5,1	5,6	6,4
7.	Gula	0,8	0,5	0,6	1,3	1,5
8.	Sayur dan Buah	26,7	25,4	24,9	25,2	27,1
9.	Lain-lain	0	0	0,0	0,0	0,0
	Total	**83,7**	**84,5**	**85,1**	**88,2**	**91,1**

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan 2025

Dilihat dari tabel diatas berdasarkan hasil survei, skor PPH mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024 dengan tren positif. Namun proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masih relatif belum ideal. Untuk mencapai skor PPH yang ideal, masyarakat harus dapat melakukan diversifikasi konsumsi pangan caranya dengan meningkatkan konsumsi pangan khususnya umbi-umbian sumber protein, kacang-kacangan, sayur dan biji melalui penerapan pola konsumsi pangan yang beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Selain itu juga telah dilakukan pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk pengembangan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat non beras dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Untuk meningkatkan kesadaran dalam penerapan konsumsi pangan yang beragam dan seimbang berbasis pangan lokal secara rutin telah diselenggarakan lomba cipta menu berbasis bahan pangan lokal. Lomba cipta menu kedepannya lebih diarahkan pada olahan pangan lokal bernilai komersil sehingga produksinya dapat lebih dikembangkan. Melalui berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat merubah mindset masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang lebih beragam bergizi seimbang sesuai kebutuhan pangan dan aman.

Penilaian terhadap konsumsi pangan penduduk secara kuantitas dapat ditunjukkan melalui volume konsumsi pangan penduduk (gram/kap/hari dan kg/kap/hari), konsumsi energi penduduk (kkal/kap/hari) dan konsumsi protein penduduk (gram/kap/hari). Adapun perbandingan untuk penilaian terhadap konsumsi pangan secara kuantitas Kota Sawahlunto dengan skor idealnya adalah sebagai berikut :

Grafik 2.16
Perbandingan Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2024

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2024

Dilihat dari grafik di atas untuk kelompok pangan rata-rata berada di bawah kondisi ideal, kecuali pada kelompok Padi padian, pangan hewani, minyak/lemak yang mempunyai skor sama dengan idealnya. Ini berarti yang menjadi permasalahan pada konsumsi pangan di Kota Sawahlunto adalah kelompok-kelompok pangan yang di bawah skor idealnya, sehingga sangat perlu upaya meningkatkan konsumsi masing-masing kelompok pangan tersebut melalui program/kegiatan sosialisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan tersebut adalah jumlah anggota keluarga, pengetahuan tentang gizi, tingkat pendidikan, pengeluaran pangan rumah tangga, dan pantangan makan bahan tertentu.

24. Penguatan Cadangan Pangan

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan cadangan pangan Nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Keberadaan cadangan pangan pangan pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/permentan/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, perhitungan cadangan pangan pemerintah daerah pemerintah daerah menggunakan kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras perkapita per tahun dan proporsi terhadap cadangan beras nasional.

Untuk Kota Sawahlunto penggunaan cadangan pangan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan diturunkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 29 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto. Pengadaan cadangan pangan dalam bentuk penguatan cadangan pangan harus disediakan sebesar 26,48 ton, namun baru dilaksanakan yaitu sebanyak 2 Ton beras pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran. Adapun pada tahun-tahun selanjutnya tidak dilaksanakan penguatan Cadangan Pangan tersebut karena alokasi anggaran tidak mencukupi.

25. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Dalam penanganan dan pencegahan daerah rawan pangan perlu adanya sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Di Kota Sawahlunto daerah rawan pangan dapat diklasifikasikan berdasarkan peta di bawah ini :

Gambar 2.6
Peta Daerah Rawan Pangan Kota Sawahlunto

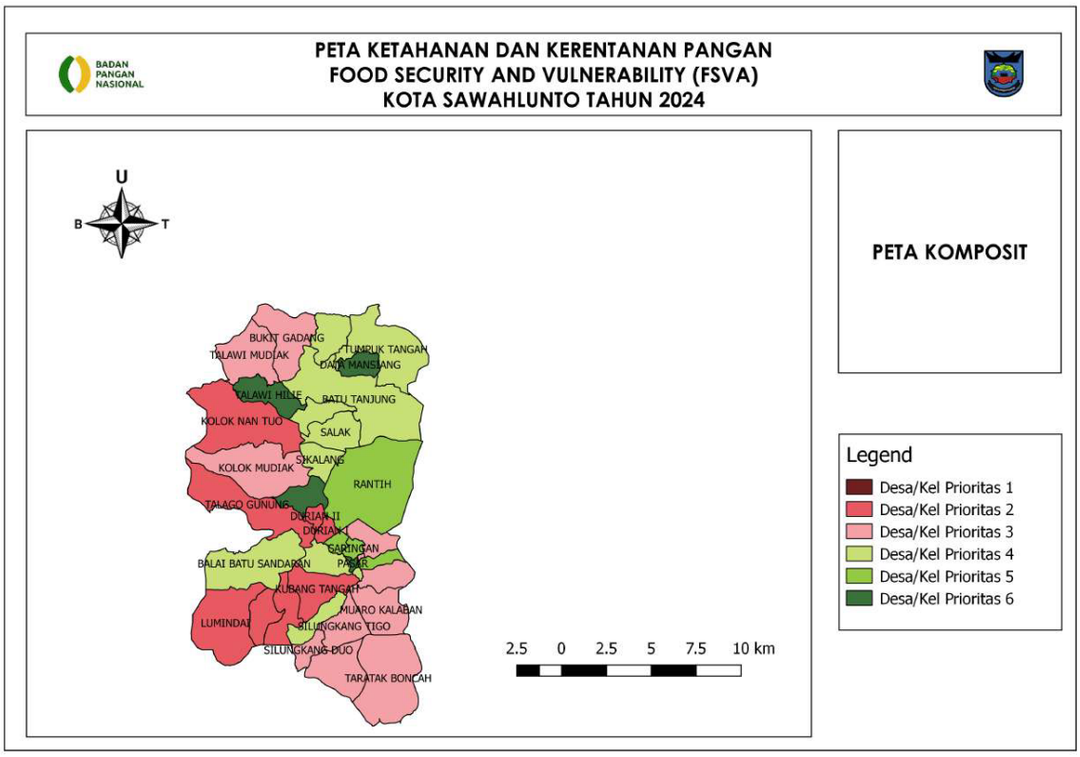

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2024

Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa di Kota Sawahlunto tidak terdapat daerah sangat rawan pangan (Prioritas 1). Namun berdasarkan prioritas penanganannya daerah-daerah rawan pangan adalah sebagai berikut :

1. Desa/Kel Prioritas 2 terdapat 8 desa /kelurahan: Desa Lunto Barat, Desa Lunto Timur, Desa Kubang Tanggah, Desa Lumindai, Kelurahan Durian I, Kelurahan Durian II, Desa Talago gunung dan Desa Kolok Nan Tuo;
2. Desa/Kel Prioritas 3: terdapat 11 desa/kelurahan antara lain : Desa Talawi Mudik, Desa Bukik Gadang, Desa Kolok Mudik, Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan, Kelurahan Air Dingin, Kelurahan Tanah Lapang, Desa Silungkang Oso, Desa Silungkang Tigo, Desa Muaro Kalaban, Desa Taratak Bancah dan Desa Silungkang Duo;
3. Desa/Kel Prioritas 4: terdapat 10 desa /kelurahan antara lain : Desa Pasar Kubang, Desa Kubang Utara Sikabu, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Desa Balai Batu Sandaran, Desa Salak, Desa Sikalang, Desa Sijantang Koto, Batu Tanjung, Desa Kumbayau, Desa Tumpuk Tengah;
4. Desa/Kel Prioritas 5: terdapat 4 desa/kelurahan antara lain : Desa Rantih, Kelurahan Lubang Panjang, Kelurahan Saringan, Kelurahan Aur Mulyo.
5. Desa/Kel Prioritas 6 terdapat 4 desa/kelurahan antara lain : Desa Datar Mansiang, Desa Talawi Hilir, Kelurahan Pasar, Desa Santur.

26. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Urusan pertanian meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan jasa pertanian. Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu wilayah terhadap sektor pertanian dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian. PDRB Sektor Pertanian ini menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah untuk lapangan usaha pertanian. Adapun perkembangan PDRB Sektor Pertanian dan kontribusinya terhadap PDRB Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.43
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar rupiah)	326,25	345,21	383,10	410,68	442,91
Total PDRB (miliar rupiah)	3.656,59	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
Kontribusi (%)	**8,92**	**8,96**	**8,73**	**8,51**	**8,76**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2025

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2020 hingga tahun 2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, terlihat dari kontribusi tahun 2020 sebesar 8,92 % menjadi 8,76 % pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan nilai PDRB Sektor Pertanian dari tahun ke tahun selama periode 2020-2024, namun kontribusinya terhadap PDRB Kota Sawahlunto cenderung menurun.

27. Produksi Sektor Pertanian

Tanaman padi sebagai salah satu produksi sektor pertanian yang merupakan bahan pangan utama Kota Sawahlunto. Berikut perkembangan tanaman padi selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.44
Produktivitas Padi Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi tanaman padi GKG (Ton)	17.874,45	16.691,71	17.733,35	18.175,11	18.006,23
Luas panen (ha)	3.461,84	3.002,50	2.979,85	3.051,24	3.068,76
Produktivitas (ton/ha)	5,16	5,56	5,95	5,96	5,87

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa perkembangan produktivitas tanaman padi di Kota Sawahlunto pada tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kisaran 5,16 ton/ha hingga 5,96 ton/ha. Hal ini seiring dengan berfluktuasinya luas panen dan produksi tanaman padi. Penurunan luas panen terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022, namun tidak mempengaruhi produktivitas karena diimbangi oleh meningkatnya produksi tanaman padi.

Selain luas panen, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tanaman padi adalah kuantitas dan kualitas benih, pemeliharaan (pupuk, pengendalian hama, dan lainnya), alsintan, sarana dan prasarana produksi. Berikut perkembangan luas sawah menurut jenis pengairan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 :

Tabel 2.45
Luas Sawah Menurut Jenis Pengairan
Tahun 2020-2024

No	Jenis Pengairan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sawah Irigasi sederhana (ha)	738,5	693	693	693	693
2	Sawah Tadah Hujan (ha)	941,5	878	878	878	878

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan 2024

Dari tabel terlihat bahwa sawah tadah hujan lebih luas dari sawah irigasi. Luas sawah tadah hujan dan sawah irigasi tidak mengalami penambahan dan pengurangan sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2021 dimulai penghitungan secara detail mengenai luas sawah yang ada di Kota Sawahlunto dalam dokumen LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Diharapkan ke depannya kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung peningkatan produktivitas padi baik sarana maupun prasarana lebih ditingkatkan.

28. Produksi Sektor Perkebunan

Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan. Tanaman perkebunan yang dominan di Kota Sawahlunto adalah tanaman karet dan kakao. Perkebunan karet dan kakao menjadi mata pencaharian utama masyarakat Kota Sawahlunto terutama pada daerah yang tidak mempunyai lahan persawahan yang tersebar di 4 Kecamatan di Kota Sawahlunto.

a. Perkebunan karet

Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat Sawahlunto. Perkembangan perkebunan karet di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.46
Produktivitas Tanaman Perkebunan Karet
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas areal tanam (ha)	2.420,23	2.389,23	2.393,03	2.393,03	2.384,44
Produksi (ton)	2.012,87	2.223,87	2.230,91	2.338,75	2.389.03
Produktivitas (ton/ha)	0,83	0,93	0,93	0,98	1,00

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2025

Luas perkebunan karet di Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan berkurang. Namun produksi karet meningkat pada periode yang sama, sehingga produktivitas juga meningkat. Dari luas areal tanam karet yang ada, perlu revitalisasi tanaman karet dalam upaya menambah luas area tanam, disamping perlu memperhatikan pemeliharaan

dan pengendalian hama penyakit. Pada pemeliharaan ini sangat diperlukan perhatian dari penyuluh pertanian dalam membimbing petani dalam rangka meningkatkan produksi tanaman karet. Selain itu secara teknis yang mempengaruhi produktivitas karet adalah mutu bahan tanam (benih), pemeliharaan tanaman, proses panen, pemeliharaan tanaman seperti Sanitasi Lahan dan Pemupukan Tanaman sesuai Anjuran Budidaya Tanaman Karet.

b. Perkebunan Kakao

Selain tanaman karet, tanaman kakao juga merupakan salah satu tanaman perkebunan utama di Kota Sawahlunto. Perkebunan kakao yang ada masih perkebunan rakyat. Berikut perkembangan perkebunan kakao sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.47
Produktivitas Tanaman Perkebunan Kakao
Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas areal tanam (ha)	550,46	523,15	540,31	540,31	540,91
Produksi (ton)	566,11	572,44	588,80	590,85	592,67
Produktivitas (ton/ha)	**1,14**	**1,09**	**1,08**	**1.09**	**1.09**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2025

Perkembangan tanaman kakao tahun 2020-2024 berfluktuasi dari luasnya areal tanam dan produktivitasnya. Sedangkan produksi kakao mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Peningkatan produksi kakao merupakan hasil upaya dari pemerintah melalui Gerakan Massal Pemangkasan dan Pemupukan Tanaman Kakao. Biaya pemupukan pada tahun 2024 murni dari petani kakao karena tidak ada bantuan pupuk kepada petani kakao sebagai dampak dari efisiensi karena keterbatasan anggaran, namun pemerintah membantu petani melalui petugas lapangan di setiap kecamatan dalam hal budidaya dan pemeliharaan kakao yang sesuai dengan aturan teknis. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas masih perlu dilakukan karena produktivitas kakao Sawahlunto masih jauh dari standar, karena idealnya produktivitas kakao antara 1,5 sampai dengan 2 ton per hektar.

29. Produksi Sektor Kehutanan

Kota Sawahlunto mempunyai Kawasan Hutan seluas 9.389,58 Ha atau 0,62 % dari total luas hutan Provinsi Sumatera Barat yang pengelolaannya menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan dengan PP No 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan serta diimplementasikan dalam Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa pemanfaatan hutan dapat dilakukan dengan pemungutan dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Pada tanggal 3 November 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencanangkan Kota Sawahlunto sebagai sentra madu Sumatera Barat. Kota Sawahlunto juga dijadikan *pilot project* untuk penelitian propolis berdasarkan penawaran kerjasama pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan sektor swasta yaitu PT. Nano Teknologi Jakarta. Selain itu Kota Sawahlunto juga pernah dilirik oleh eksportir swasta yang mempunyai jejaring luas hingga ke benua Amerika dalam mencari daerah yang mempunyai sumber produksi madu galo-galo dan produk sampingannya. PT. Bukit Asam sebagai bagian dari CSR BUMN juga telah mengembangkan Rumah BUMN, yang membina kelompok-kelompok tani Lebah dan memberikan pelatihan dan bantuan pengembangan usaha untuk pemasaran produk lebah beserta turunannya. Dengan adanya peluang-peluang tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto khususnya madu Kota Sawahlunto sebagai pemasok bahan baku produk madu.

Pengembangan lebah madu di Kota Sawahlunto dikelola oleh kelompok tani hutan (KTH) maupun perorangan yang tersebar di Kota Sawahlunto. Terdapat 12 Kelompok Tani Hutan yang terdaftar di bawah binaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 6 KTH diantaranya sudah membudidayakan lebah madu antara lain :

- KTH Kayu Gadang Desa Santur Kecamatan Barangin (Lebah Galo-galo/kelulut)
- KTH Dulur Sekapal Desa Santur Kecamatan Barangin (Lebah Galo-galo/kelulut)
- KTH Puncak Vila Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang (Lebah Galo-galo/kelulut)
- KTH Andesa Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin (Lebah Galo-galo/kelulut)
- Kelompok HKM Lurah Basuang Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi ((Lebah Galo-galo/kelulut)
- KTH Kampung Madu Zam Zam Desa Pasar Kubang Kecamatan Lembah Segar (Lebah Sengat)

Jumlah koloni lebah madu yang ada di Kota Sawahlunto baik yang kelompok maupun perorangan sampai tahun 2023 tercatat berjumlah 1.667 koloni, yang terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok lebah bersengat sebanyak 150 koloni, dan untuk kelompok Galo-galo (kelulut) sebanyak 1.517 koloni. Data produksi lebah bersengat menghasilkan 480 kg/bulan sedangkan untuk madu galo-galo menghasilkan produksi sebanyak 175,9 kg/bulan (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2023). Dan pada tahun 2024 terdapat bantuan untuk kelompok KTH tak bancah Batu Badaguak yaitu sebanyak 15 koloni.

Potensi produktivitas lebah madu yang dihasilkan peternak mempunyai peluang yang sangat besar dimasa yang akan datang dalam jangka panjang dengan telah dicanangkannya Kota Sawahlunto sebagai Sentra Madu di Provinsi Sumatera Barat. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah pengembangan kelompok-kelompok peternak yang bisa menghasilkan produksi secara konsisten bila ingin memasuki pasar yang lebih besar.

30. Produksi Sektor Peternakan

Pembangunan sub sektor peternakan menjadi salah satu prioritas dalam peningkatan nilai tambah bagi pendapatan petani ternak di Kota Sawahlunto. Adapun yang menjadi target dari sektor peternakan adalah produksi daging dan produksi telur. Berikut perkembangan produksi daging sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.48
Perkembangan Populasi Dan Produksi Daging
Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Kambing**					
	Populasi (ekor)	2.091	2.238	2.373	2.593	2.502
	Produksi Daging (kg)	12.500	2.750	14.450	12.050	10.250
2.	**Sapi**					
	Populasi (ekor)	5.679	5.427	4.866	4.953	4.981
	Produksi Daging (kg)	334.530	319.977	339.445	344.442	413.070
3.	**Kerbau**					
	Populasi (ekor)	1.033	968	958	940	995
	Produksi Daging (kg)	13.015,2	1.952,28	5.423,00	10.195,24	5.423

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Pada periode tahun 2020-2024, populasi ternak kambing berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, sedangkan populasi ternak sapi dan kerbau berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada periode yang sama produksi daging kambing dan daging kerbau berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, sedangkan produksi daging sapi berfluktuasi berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Sawahlunto memberikan bantuan ternak kambing pada 5 Kepala Keluarga (KK), masing-masing KK mendapat 3 ekor kambing. Di samping itu, untuk meningkatkan populasi ternak sapi telah dilaksanakan pengembangan Inseminasi Buatan (IB) dengan realisasi jumlah kelahiran sapi dari 1.380 ekor yang tersebar di empat kecamatan di Kota Sawahlunto.

Selain ternak sapi, kerbau dan kambing di Kota Sawahlunto juga ada produksi daging dan telur unggas yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Kota Sawahlunto. Adapun perkembangan populasi dan produksi daging ternak unggas dapat dilihat pada grafik berikut :

Tabel 2.49
Perkembangan Ternak Unggas Populasi Ternak Produksi Daging
Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Ayam Buras**					
	Populasi (ekor)	47.065	50.197	50.004	49.870	49.211
	Produksi Daging (kg)	50.789	51.479,74	53.077,75	54.538,78	52.877,75
2.	**Ayam Ras Pedaging**					
	Populasi (ekor)	155.386	186.000	164.465	150.548	126.594
	Produksi Daging (kg)	825.370	932.691,43	935.287,42	827.804,20	889.010,55
3.	**Daging Ayam Ras**					
	Populasi (ekor)	23.048	32.776	47.829	46.374	47.044
	Produksi Daging (kg)	9,414	12.734,38	17.512,59	19.301,49	18.918,71
4.	**Itik**					
	Populasi (ekor)	18.654	20.971	18.872	16.898	18.330
	Produksi Daging (kg)	5.780	8.279,60	6.958,48	7.204,43	7.122,97

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Perkembangan populasi ternak unggas di Kota Sawahlunto pada tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan memberikan bantuan

ternak ayam dan itik beserta makanan ternak untuk keluarga yang kurang mampu, ternak ayam untuk 5 Kelompok di Kecamatan Talawi dan Barangin sebanyak 2500 ekor, sedangkan itik dibagikan untuk 1 Kelompok di Kecamatan Talawi sebanyak 500 ekor. Dalam pemeliharaannya masyarakat mendapat bimbingan dari penyuluh peternakan yang ada di desa/kelurahan.

31. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Sawahlunto sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal dan mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Hal ini terlihat dari sektor perdagangan, besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Kota Sawahlunto. Berikut perkembangan kontribusi sektor perdagangan, besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.50
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor (juta rupiah)	547.822,20	564.985,93	655.300,60	725.979,26	782.30
Total PDRB (juta rupiah)	3.656.590,97	3.851.692,19	4.389.764,91	4.825.295,86	4.902,29
Kontribusi (%)	**14,98**	**14,67**	**14,93**	**15,05**	**15,47**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2020-2024 berkisar antara 14,67% hingga 15,47%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2024 dan terendah pada tahun 2021. Penurunan kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terjadi saat wabah covid 19 melanda yang disebabkan turunnya daya beli masyarakat dan adanya larangan aktivitas di luar rumah, sehingga pasar menjadi sepi sebagai akibat maraknya transaksi online.

32. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Industri Pengolahan merupakan salah satu lapangan usaha yang dominan dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Hal ini tercermin dari besarnya kontribusi yang diberikan lapangan usaha ini terhadap PDRB Kota Sawahlunto. Berikut perkembangan kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.17
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2020 – 2024

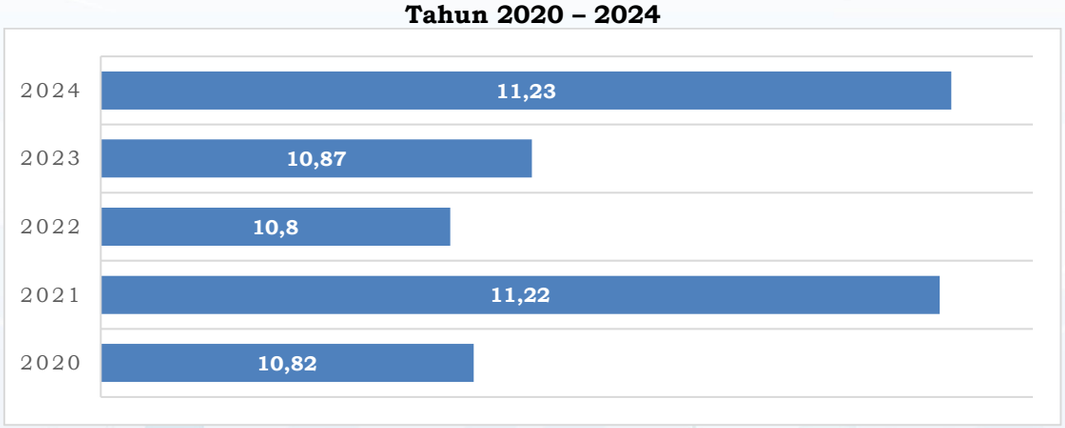

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2025

Pada grafik di atas terlihat bahwa kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 11,23% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 10,8 %. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kota Sawahlunto tahun 2024 adalah yang dominan ketiga setelah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,47 %), lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (12,07 %), dan lapangan usaha Industri Pengolahan (11,23 %)

Grafik 2.18
Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2024 (Dalam Persen)

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Sub sektor yang menjadi bagian dari sektor Industri Pengolahan ini di antaranya:

- Industri Makanan.
- Industri Minuman.
- Industri Pengolahan Tembakau.
- Industri Tekstil.
- Industri Pakan Jadi.
- Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

Dari rincian di atas, sektor Industri Pengolahan berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat Kota Sawahlunto karena Industri Pengolahan ini merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Industri tekstil berperan penting dalam memenuhi kebutuhan sandang, menyumbang devisa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Industri makanan merupakan industri manufaktur yang mengolah bahan pangan mentah menjadi produk siap konsumsi. Industri makanan memiliki target pasar yang sangat luas, mengingat makanan merupakan kebutuhan dasar manusia.

Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh suatu lapangan usaha terhadap PDRB suatu daerah, semakin besar pula peranannya dalam meningkatkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

33. Pertumbuhan Industri

Dalam upaya memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kota Sawahlunto, sektor Industri didukung oleh perkembangan jumlah unit usaha, nilai produksi dan bahan baku yang digunakan. Berikut perkembangan pertumbuhan industri yang ada di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.51
Pertumbuhan Industri Kecil Dan Menengah (IKM)
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah IKM (unit)	1.584	1.703	1.779	1.755	1.842
2	Pertumbuhan Industri (%)	10,61%	7,51%	4,46%	-1,35%	4,96%
3	Nilai produksi (miliar rupiah)	32,22	35, 17	50,29	73,02	79,14
4	Pertumbuhan Nilai Produksi (%)	-39,70%	9,16%	42,99%	45,20%	8,38%
5	Bahan Baku (miliar rupiah)	14,18	15,51	22,82	35,90	37,41
6	Pertumbuhan Bahan Baku (%)	-39,57%	9,38%	47,13%	57,32%	11,54%

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Grafik 2.19
Pertumbuhan Industri Kecil Dan Menengah (IKM)
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

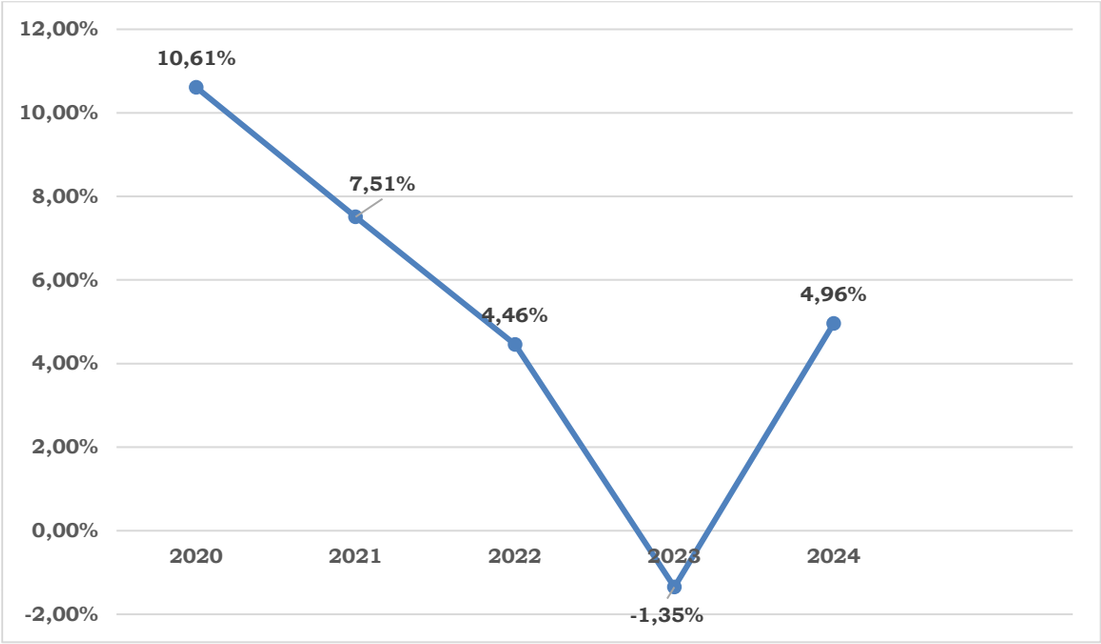

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 tumbuh berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada kisaran 4,46 % hingga 7,51 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan terendah terjadi tahun 2023 dengan pertumbuhan yang negatif (berkurang). Sejalan dengan meningkatnya jumlah IKM maka nilai produksi dan nilai bahan baku juga mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai Produksi IKM Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 tumbuh pada kisaran 8,38% hingga 45,20%, pertumbuhan nilai produksi tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan terendah terjadi pada tahun 2024. Nilai Bahan Baku IKM Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 tumbuh pada kisaran 9,38% hingga 57,32%, pertumbuhan nilai bahan baku tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan terendah terjadi pada tahun 2021. Terjadi fenomena pada IKM Kota Sawahlunto, saat jumlah IKM tumbuh negatif pada tahun 2023, nilai bahan baku dan nilai produksi justru tumbuh tinggi.

34. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja di daerah tersebut pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin banyak pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Rasio kewirausahaan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.52
Rasio Kewirausahaan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Berusaha Dibantu Buruh Tetap (Orang)	558	893	868	1148	1289
Total Angkatan Kerja (Orang)	33.019	32.243	33.973	35.800	36.134
Rasio Kewirausahaan	1,69	2,77	2,55	3,21	3,56

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, rasio kewirausahaan Kota sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada kisaran 1,69 % hingga 3,56 %. Rasio tertinggi terjadi tahun 2024 sebesar 3,56 % dan terendah tahun 2020 sebesar 1,69 %.

Meningkatnya rasio kewirausahaan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah UMKM di Kota sawahlunto dengan kebijakan Dana Bergulir dengan Bunga Rendah.

35. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat dilihat dari lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kontribusi PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum Kota Sawahlunto berfluktuatif selama kurun waktu tahun 2020-2024. Berikut perkembangan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kota Sawahlunto :

Tabel 2.53
Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum Terhadap PDRB
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tambah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (miliar rupiah)	75,26	84,02	97,53	107,22	116,28
Total PDRB (miliar rupiah)	3.656,59	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
Rasio (%)	2,06	2,18	2,22	2,22	2,30

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka 2025

Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2020-2024 selalu meningkat perlahan dalam rentang nilai 2,06 % hingga 2,30 %. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2024 dan terendah pada tahun 2020.

36. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata selama ini ditinjau dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sedangkan pendapatan ditinjau dari pajak hiburan pada tahun 2021 tidak ada tetapi ada penambahan pendapatan ditinjau dari Retribusi Tempat Khusus Parkir, sehingga Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.54
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	NAMA PENDAPATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Hotel	47.335.931	168.914.129	266.384.955	224.164.516	233.927.929
2	Pajak Restoran	477.464.758	617.303.460	993.108.403	899.703.543	1.115.973.975
3	Pajak Hiburan	1.650.000	-	61.170.000	66.241.500	17.842.000
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	516.801.000	436.895.000	847.974.000	726.647.000	661.939.000
5	PT.WWS	0				
6	Bagian Laba Hotel Parai	0				
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0	1.500.000	3.600.000	7.750.000	8.000.000
	PAD Sektor Pariwisata	1.043.251.689	1.224.612.589	2.172.237.359	1.924.506.559	2.037.682.904
	Total PAD	59.537.385.897,66	51.470.645.905,45	65.778.630.408,26	59.943.839.179,64	65.743.716.580,77
	Persentase PAD Sektor Pariwisata	**1,752**	**2,38**	**3,302**	**3,2**	**3,1**

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, 2025

PAD Sektor Pariwisata dan Total PAD Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, sehingga Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD juga berfluktuasi selama tahun 2020-2024 dengan kisaran 1,752 % hingga 3,302 %.

37. ROA BUMD

Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan

jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. ROA memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Namun, perlu dicatat bahwa ROA yang tinggi tidak selalu berarti sukses, karena ada faktor lain seperti tingkat utang dan risiko yang juga harus dipertimbangkan.

Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki 4 (empat) BUMD yang aktif yaitu :

a. PT Lembu Betina Subur (LBS)
b. PT. Wahana Wisata Sawahlunto (WWS)
c. PT. Bumi Sejahtera Mandiri (BSM)
d. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Adapun *Return On Asset* (ROA) dari Badan Usaha Milik Daerah Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.55
Return On *Asset* (ROA) dari BUMD Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	BUMD	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PT Lembu Betina Subur (LBS)	-	-	-	-	-
2	PT. Wahana Wisata Sawahlunto (WWS)	-	-	-	-	-
3	PT. Bumi Sejahtera Mandiri (BSM)	-	-	-	-	-
4	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1,09	(6,83)	(4,92)	(4,33)	(3,80)

Sumber Data : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto 2024

Dari empat BUMD yang ada di Kota Sawahlunto, PT Lembu Betina Subur (LBS), PT Wahana Wisata Sawahlunto (WWS), PT Bumi Sejahtera Mandiri (BSM) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), tiga diantaranya tidak dapat dihitung *Return On Asset* (ROA)nya, hanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dapat dihitung *Return On Asset* (ROA)nya. Hal ini disebabkan PT Lembu Betina Subur (LBS) berdasarkan laporan keuangannya disarankan untuk dilikuidasi, PT. Wahana Wisata Sawahlunto (WWS) tidak bisa dihitung ROAnya karena laporan keuangannya tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan PT. Bumi Sejahtera Mandiri (BSM) belum bisa dihitung ROAnya karena belum beroperasi dan dana penyertaan modal dari Pemda Kota Sawahlunto hanya cukup untuk pengurusan izin tambang dan *feasibility study*(FS)nya saja. Sedangkan negatifnya nilai ROA Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) disebabkan perusahaan mengalami kerugian dan tidak mampu menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, namun perusahaan ini harus tetap beroperasi karena PDAM memiliki fungsi sosial dan pelayanan publik sehingga Pemerintah Daerah terus memberikan dukungan dalam bentuk subsidi untuk menutupi kerugian operasional dan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar yang mempengaruhi kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 2.56
Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
IPM Kota Sawahlunto	73,97	74,35	75,21	75,91	76,68	0,90
IPM Provinsi Sumatera Barat	74,29	74,56	75,16	75,64	76,43	0.70
IPM Nasional	71.94	72.29	72.91	73.55	75,02	1,04

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2025

IPM Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan, dari 73,97 tahun 2020 menjadi 76,68 tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,90 %. Mulai tahun 2022 IPM Kota Sawahlunto sudah melampaui IPM Provinsi Sumatera Barat dan IPM Nasional. Berdasarkan kriteria dari Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kota Sawahlunto, IPM Provinsi Sumatera Barat dan IPM Nasional sudah tergolong tinggi karena berada pada rentang (70 ≤ IPM < 80). Hal ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan IPM Kota Sawahlunto disebabkan peningkatan semua indikator pembentuk IPM, yaitu Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran per Kapita yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Pada tabel di bawah ini disajikan IPM dari 19 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.57
Peringkat IPM Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Kabupaten/Kota	IPM	Peringkat
Kab. Kepulauan Mentawai	66,67	19
Kab. Pesisir Selatan	72,87	14
Kab. Solok	72,29	17
Kab. Sijunjung	72,88	13
Kab. Tanah Datar	76,49	8
Kab. Padang Pariaman	74,90	10
Kab. Agam	75,08	9
Kab. Lima Puluh Kota	72,51	16
Kab. Pasaman	70,61	18
Kab. Solok Selatan	73,17	12
Kab. Dharmasraya	74,82	11
Kab. Pasaman Barat	72,78	15
Kota Padang	84,38	1
Kota Solok	80,06	6
Kota Sawahlunto	***76,68***	***7***
Kota Padang Panjang	80,60	4
Kota Bukittinggi	82,61	2
Kota Payakumbuh	80,76	3
Kota Pariaman	80,49	5
Provinsi Sumatera Barat	76,43	
Nasional	75,02	

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2025

IPM Kota Sawahlunto pada tahun 2024 berada pada posisi ke-7 dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dan IPM Kota Sawahlunto adalah yang terendah dibandingkan 6 kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

2. Angka Rata Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Adapun perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.58
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
RLS Kota Sawahlunto	10.17	10.32	10.43	10.44	10.53	0,87
RLS Provinsi Sumatera Barat	8.99	9.07	9.18	9.28	9.44	1,23
RLS Nasional	8.48	8.54	8.69	8.77	8.85	1.07

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2025

Angka RLS Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahun dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,87%. RLS Kota Sawahlunto berada di atas RLS Provinsi dan RLS Nasional. Angka RLS Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 10.53 menunjukkan rata-rata pendidikan penduduk Kota Sawahlunto berada pada bangku kelas II SMA, dan telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun.

Tabel 2.59
Peringkat Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

Kabupaten/Kota	RLS (Tahun)	Peringkat
Kab. Kepulauan Mentawai	8,03	18
Kab. Pesisir Selatan	8,81	13
Kab. Solok	7.91	19
Kab. Sijunjung	8,62	14
Kab. Tanah Datar	9,29	8
Kab. Padang Pariaman	8,42	15
Kab. Agam	9,23	9
Kab. Lima Puluh Kota	8,13	17
Kab. Pasaman	8,14	16
Kab. Solok Selatan	8,85	12
Kab. Dharmasraya	8,98	11
Kab. Pasaman Barat	8,99	10
Kota Padang	11,63	3
Kota Solok	11,37	4
Kota Sawahlunto	10,53	7
Kota Padang Panjang	12,00	1
Kota Bukittinggi	11,65	2
Kota Payakumbuh	10,89	6
Kota Pariaman	11,06	5
Provinsi Sumbar	9,44	

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2025

Angka RLS Kota Sawahlunto tahun 2024 menduduki peringkat ke 7 dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Beberapa indikator yang mempengaruhi RLS adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan siswa, mutu tenaga pendidik, nilai ujian, sarana prasarana sekolah dan lainnya. Semua indikator ini perlu terus ditingkatkan tiap tahun untuk menaikan RLS dan IPM.

3. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya waktu sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas. Perkembangan HLS kota Sawahlunto pada lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.60
Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
HLS Kota Sawahlunto	13.17	13.18	13.42	13.69	13,86	1,28
HLS Provinsi Sumatera Barat	14.02	14.09	14.10	14.11	14,30	0,50
HLS Nasional	12.98	13.08	13.10	13.15	13,21	0,44

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2025

Selama periode 2020-2024, rata-rata pertumbuhan HLS Sawahlunto sebesar 1,28% per tahun. Meningkatnya nilai HLS setiap tahun menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2024, HLS di Kota Sawahlunto telah mencapai 13,86 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 13,69 tahun. Berarti, anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2024, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,86 tahun atau menyelesaikan pendidikan hingga level perguruan tinggi tahun kedua dengan asumsi kondisi aksesibilitas pendidikan yang stagnan/tidak ada perubahan berarti. HLS Kota Sawahlunto tahun 2024 lebih rendah dari HLS Provinsi Sumatera Barat, namun lebih tinggi dari HLS Nasional.

Tabel 2.61
Peringkat Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dan Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Kabupaten/Kota	HLS	Peringkat
Kab. Kepulauan Mentawai	12,91	17
Kab. Pesisir Selatan	13,37	15
Kab. Solok	13,56	12
Kab. Sijunjung	12,76	19
Kab. Tanah Datar	15,05	4
Kab. Padang Pariaman	14,20	8
Kab. Agam	14,16	9
Kab. Lima Puluh Kota	13,42	14
Kab. Pasaman	13,52	13
Kab. Solok Selatan	13,07	16
Kab. Dharmasraya	12,89	18
Kab. Pasaman Barat	13,72	11
Kota Padang	16,57	1
Kota Solok	14,37	7
Kota Sawahlunto	**13,86**	**10**
Kota Padang Panjang	15,47	2
Kota Bukittinggi	15,28	3
Kota Payakumbuh	14,57	6
Kota Pariaman	14,80	5
Kota Sawahlunto	14,30	

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Posisi angka HLS Kota Sawahlunto tahun 2024 berada pada peringkat ke-10 dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu perlu upaya maksimal seluruh pihak untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan di Sawahlunto.

4. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup saat lahir merupakan rata rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Adapun perkembangan Usia Harapan Hidup kota Sawahlunto selama 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.62
Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
UHH Kota Sawahlunto (Tahun)	72,81	73,20	73,50	73,79	74,12	0,45
UHH Provinsi Sumatera Barat (Tahun)	73,50	73,60	73,88	74,14	74,37	0,29
UHH Nasional (Tahun)	73,37	73,46	73,70	73,93	74,15	0,26

Sumber Data : Berita Resmi Statistik 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, Kota Sawahlunto telah berhasil meningkatkan Usia Harapan Hidup rata-rata tumbuh sebesar 0,45 persen per tahun. Pada tahun 2020, Usia Harapan Hidup saat lahir di Kota Sawahlunto sebesar 72,81 tahun, dan pada tahun 2024 telah mencapai 74,12 tahun. Usia Harapan Hidup ini menunjukkan bayi yang lahir tahun 2024 memiliki usia harapan hidup 74,12 tahun, lebih lama 0,33 tahun dibandingkan dari tahun sebelumnya yang hanya 73,79 tahun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Usia Harapan Hidup Kota Sawahlunto tahun 2020 - 2024 lebih rendah dari Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tabel 2.63
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Dan Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)	Peringkat
Kota Bukittinggi	75,62	1
Kota Padang	75,20	2
Kota Payakumbuh	75,08	3
Kota Solok	74,85	4
Kota Padang Panjang	74,48	5
Kab. Agam	74,39	6
Kota Pariaman	74,37	7
Kab. Tanah Datar	74,26	8
Kab. Dharmasraya	74,25	9
Kota Sawahlunto	74,12	10
Kab. Padang Pariaman	73,88	11
Kab. Pesisir Selatan	73,44	12
Kab. Lima Puluh Kota	73,42	13
Kab. Sijunjung	72,89	14
Kab. Pasaman Barat	72,75	15
Kab. Solok	72,52	16
Kab. Solok Selatan	72,50	17
Kab. Pasaman	72,36	18
Kab. Kepulauan Mentawai	71,21	19

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Sawahlunto pada tahun 2024 berada pada peringkat ke-10 (sepuluh) dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat.

5. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak, direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita masyarakat Kota Sawahlunto mencapai Rp.11.187 ribu per orang tahun. Berikut perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.64
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto (Ribu Rupiah)	10.182	10.195	10.537	10.829	11.187
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat (Ribu Rupiah)	10.733	10.790	11.130	11.380	11.718
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Nasional (Ribu Rupiah)	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 lebih rendah dari Pengeluaran per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Pengeluaran Per Kapita Nasional. Berikut Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto dibandingkan dengan delapan belas kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.65
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Dan Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Kabupaten / Kota	2024	Peringkat
Kabupaten		
Kepulauan Mentawai	7.192	19
Pesisir Selatan	10.211	16
Solok	10.988	13
Sijunjung	11.395	9
Tanah Datar	11.223	11
Padang Pariaman	11.756	8
Agam	10.686	14
Lima Puluh Kota	10.648	15

Kabupaten / Kota	2024	Peringkat
Pasaman	9.194	18
Solok Selatan	11.240	10
Dharmasraya	12.254	6
Pasaman Barat	9.888	17
Kota		
Padang	15.458	1
Solok	12.995	5
Sawahlunto	***11.187***	***12***
Padang Panjang	11.840	7
Bukit Tinggi	14.297	2
Payakumbuh	14.260	3
Pariaman	13.784	4
Sumatera Barat	**11.718**	

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat pengeluaran per kapita Kota Sawahlunto adalah yang terendah dibandingkan enam kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Namun jika dibandingkan dengan delapan belas kabupaten dan kota lain di Provinsi Sumatera Barat, pengeluaran per kapita Kota Sawahlunto berada posisi ke 12 (dua belas).

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

1. Jumlah Grup Kesenian

Kota Sawahlunto selama ini telah dikenal sebagai Kota Seni dan Budaya yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, karena masyarakatnya yang heterogen dan multikultural sehingga melahirkan berbagai karakter dan budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Kota Sawahlunto. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul dikalangan masyarakat dan Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal ini terbukti dengan dicanangkannya Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.

Perkembangan kesenian di Kota Sawahlunto dapat dilihat dari perkembangan jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian yang ada di Kota Sawahlunto setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.66
Grup Kesenian Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Grup Kesenian	Unit	38	38	35	38	50
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	6,51	6,57	6,64	6,78	6,87
3.	**Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk**	**Unit**	**5,84**	**5,78**	**5,27**	**5,60**	**7,28**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan grup kesenian dari lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) berfluktuasi, terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 35 grup kesenian tetapi tahun 2023 kembali terjadi kenaikan menjadi 38 grup Adapun penurunan ini terjadi disebabkan terjadinya penurunan anggaran pada seluruh OPD Pemerintah Kota sehingga kegiatan kegiatan yang menyangkut dengan penampilan serta aktivitas grup kesenian tidak berjalan, padahal grup kesenian ini sangat bergantung dengan kegiatan atau event event yang dilaksanakan kota.

2. Jumlah Gedung Kesenian

Untuk mewujudkan Visi Misi Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, sangat perlu melestarikan seni dan budaya yang ada dan berkembang di tengah masyarakat, maka keberadaan gedung kesenian merupakan hal yang sangat penting sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat anak bangsa, disisi lain pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat suatu daerah. Salah satu bentuk pembangunan bidang seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya gedung

kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah. Tabel berikut ini menunjukkan data jumlah gedung kesenian di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.67
Jumlah Gedung Kesenian di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	20	20	20	19	19
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	6,51	6,57	6,64	6,78	6,87
3.	**Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 penduduk**	**Unit**	**3,07**	**3,04**	**3,01**	**2,80**	**2,77**

Sumber Data: Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2024

Pemerintah Kota Sawahlunto belum memiliki gedung pertunjukan kesenian yang representatif dan memenuhi standar sebuah gedung pertunjukan kesenian. Sehingga pelaku-pelaku seni Kota Sawahlunto masih memanfaatkan aula/ruang pertemuan gedung perkantoran dan sekolah serta ruang-ruang terbuka yang sering digunakan masyarakat untuk berkumpul atau bersosialisasi dalam melakukan aktivitas seni. Adapun jumlah tempat pertunjukan kesenian yang sering digunakan oleh pelaku seni di Kota Sawahlunto tahun 2024 berjumlah 19 lokasi yang terdiri dari dalam ruangan (*indoor*) sebanyak 7 tempat dan luar ruangan (*outdoor*) 12 tempat.

Namun secara kenyataannya Kota Sawahlunto hanya memiliki 1 Gedung Kesenian yaitu Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) yang merupakan bangunan tua peninggalan Belanda yang dulunya merupakan Gedung Pertemuan Masyarakat, dan berfungsi sebagai tempat hiburan bagi para kolonial Belanda yang saat ini juga tidak bisa digunakan karena musibah kebakaran pada tanggal 03 November 2022 yang lalu. Penyelenggaraan pertunjukkan kesenian tidak harus diadakan didalam gedung kesenian, dapat juga di ruang terbuka publik yang digunakan sebagai tempat berekspresi bagi para seniman. Ruang terbuka publik yang sering digunakan bagi para seniman Kota Sawahlunto untuk menampilkan karya seni dan pertunjukan kesenian lainnya adalah Lapangan Segitiga atau lebih dikenal dengan LapSeg, dan panggung terminal di Kota Sawahlunto dan di terminal di Talawi. Hal ini menjadi penyebab selama lima tahun terakhir tidak terdapat penambahan jumlah gedung kesenian. Saat ini Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) dikelola oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

3. Jumlah Klub dan Gedung Olahraga

Perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Kota Sawahlunto dalam rangka mendukung prestasi olahraga di Kota Sawahlunto seperti salah satunya gedung olahraga, dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.68
Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Klub dan Gedung Olahraga	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Klub Olahraga	93	93	95	97	97
2.	Jumlah Gedung Olahraga	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas PariwisataPemuda dan Olahraga, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah gedung olahraga 0, ini disebabkan karena sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kota Sawahlunto tidak termasuk dalam kategori jenis gedung olahraga. Sedangkan untuk klub olahraga di Kota Sawahlunto terjadi peningkatan yang disebabkan banyaknya minat masyarakat dalam mengikuti setiap cabang olahraga yang ada.

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Tabel 2.69
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Indikator	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	Pendidikan						
1	Pendidikan anak usia dini (PAUD)	Jumlah warga Negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	93,27	100	100	100	97,15
2	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7- 15 tahun yang ber partisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	92,09	100	100	100	97,56
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	56,70	70,64	100	100	98,23

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

Pencapaian SPM urusan Pendidikan tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan data yang diambil dari Dapodik tidak sesuai dengan jumlah penduduk usia tertentu yang harus dilayani sesuai dengan SPM.

Dalam mendukung pencapaian SPM, Dinas Pendidikan telah melaksanakan inovasi, seperti tabel dibawah :

Tabel 2.70
Tabel Inovasi Dinas Pendidikan
Tahun 2024

No	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI
1	ELEARNING DISDIK (Refreshment Regulasi Pegawai Dan Ujian Sekolah)	Pelayan Publik
2	DASHDIK (Dashboard PTIK Disdik)	Pelayan Publik
3	PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) ONLINE	Pelayan Publik
4	KADIF (KomunitAs DesaIn Grafis)	Pelayan Publik
5	WEDIS (Web And Android SMA)	Pelayan Publik
6	SORTICS (Software Robotic Pelajar SMP)	Pelayan Publik
7	Disdik Innovation Award	Inovasi bentuk Lainnya
8	GURU INGGRIS (Translate Buku Karya Guru Ke Bahasa Inggris)	Pelayan Publik
9	SALJU ABADI (Sawahlunto Jurnal Dan Karya Ilmiah Pengabdian)	Pelayan Publik
10	SAWAHLUNTO POST (Majalah Digital Disdik Berbentuk PDF)	Pelayan Publik
11	Podcast Disdik	Pelayan Publik
12	PELAYAN (Pelatihan Layanan Receptionist Dan Unit Lainnya Sekali Seminggu Seusai Apel Pagi)	Inovasi bentuk Lainnya
13	PELURU (Penjualan Buku Karya Guru Online)	Inovasi bentuk Lainnya
14	UBI JALAR (UMKM Berbasis Sekolah Untuk Pelajar SD SMP)	Inovasi bentuk Lainnya
15	COCOCIP (Coding Kids Course Kecerdasan Ilmu Pemrograman SD di Sawahlunto)	Pelayan Publik
16	CLINIC DISDIK (Klinik Solusi Permasalahan IT Dinas Pendidikan)	Pelayan Publik
17	CHECKLIST CLEAN (Cekricek Sekali Seminggu Kebersihan Kantor)	Inovasi bentuk Lainnya
18	PERFECTO (Pendidikan Non Formal Edukasi Percontohan Di Lapas Kota Sawahlunto)	Pelayan Publik
19	GETUK (Gerakan Tukar Buku Antar Siswa Bisa Dengan Pinjam Pustaka Atau Pribadi Sekali Sebulan)	Inovasi bentuk Lainnya

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

2. Persentase Lulusan SD Hafidz Quran minimal Juz 30

Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas keagamaan murid SD adalah dengan meningkatkan jumlah lulusan SD Hafidz Quran minimal Juz 30. Adapun perkembangan siswa Sekolah Dasar yang lulus minimal Juz 30 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.71
Persentase Lulusan SD Yang Hafiz Alquran Juz 30
Tahun 2020 - 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Lulusan SD Yang Hafiz Alquran Juz 30 (%)	12	15	21,5	30	32

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2020-2024 terjadi peningkatan jumlah murid lulusan SD yang mampu hafal Juz 30 Alquran.

3. Persentase Siswa dengan Nilai Assesment Kompetensi (*Numerasi Literasi Minimum*)

Assesment Nasional adalah Program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Ini adalah alat ukur keberhasilan sekolah sebagai pengganti dari Ujian Nasional yang selama beberapa tahun kebelakang ini dilaksanakan. Adapun perkembangan dari Nilai Assesment Kompetensi di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.72
Nilai *Assesment* Kompetensi (Numerasi dan Literasi Minimum)
Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata nilai ujian UN SD	7,42	-	-	-	-
2	Rata rata nilai ujian UN SMP	5,55	-	-	-	-
3	Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (numerasi minimum) SD	-	56	44,97	68,80	75,29
4	Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (numerasi minimum) SMP	-	60,67	51,05	57,52	64,60
3	Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (Literasi minimum) SD	-	65,67	81,49	83,87	87,26
4	Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (Literasi minimum) SMP	-	68,67	80,28	80,10	73,78

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

Indikator rata-rata nilai ujian SD dan SMP hanya digunakan sampai tahun 2020. Mulai tahun 2021 hingga tahun 2024 kedua indikator tersebut tidak digunakan lagi karena ujian nasional pada tingkat SD dan SMP tidak dilaksanakan, sebagai gantinya digunakan indikator kinerja "persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (numerasi dan literasi minimum)" tingkat SD dan SMP dengan rentang nilai 1- 100. Selama rentang waktu tahun 2021 hingga tahun 2024 capaian Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (numerasi dan literasi minimum) SD dan SMP bervariasi. Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (numerasi minimum) SD cenderung meningkat, sedangkan Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (numerasi minimum) SMP berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Untuk Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (Literasi minimum) SD memiliki kecenderungan meningkat, sementara nilai Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (Literasi minimum) SMP berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Dalam upaya meningkatkan nilai literasi dilakukan peningkatan pembelajaran berbasis Assesment Kompetensi Minimum (AKM) melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dalam menyusun dan mengolah soal AKM.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Merupakan penilaian proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada suatu wilayah. Adapun nilai APK Kota Sawahlunto untuk jenjang pendidikan SD dan SMP adalah sebagai berikut :

Tabel 2.73
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD dan SMP
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD / MI	112,44	108,67	110,24	106,90	104,71
2	SMP / MTs	84,76	93,75	105,42	97,01	108,25

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2025

APK SD/MI dan SMP/MTs di Kota Sawahlunto tahun 2020 - 2024 mengalami fluktuasi setiap tahun. Bayak faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi ini, diantaranya seperti : motivasi siswa dan orang tua, jarak rumah siswa dengan sekolah, usia siswa, faktor ekonomi dan kesehatan siswa.

5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipas Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang Pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perkembangan APM di Kota Sawahlunto dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.74
Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2020 – 2024 (%)

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD / MI	99,38	99,44	99,03	90,17	94,28
2	SMP / MTs	81,46	82,87	82,94	80,29	83,55

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka Kota Sawahlunto, 2024

APM Kota Sawahlunto untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 2020 - 2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2024, nilai APM SD/MI berarti bahwa penduduk umur 7 - 12 tahun telah bersekolah SD/MI tepat waktu sebanyak 94,28%. Untuk APM jenjang SMP/MTs berarti bahwa penduduk Sawahlunto umur 13 - 15 tahun telah bersekolah SMP/MTs tepat waktu sebanyak 83,55%. Dengan belum tercapainya angka 100% berarti masih perlu upaya maksimal pemerintah Kota dan seluruh stake holder terkait mendorong tingginya minat masyarakat untuk sekolah sesuai tepat waktu.

6. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah ini memperlihatkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Pada tabel berikut dapat dilihat Perkembangan APS Kota Sawahlunto berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.75
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Kelompok Umur		
		7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun
1.	2020	99,73	97,44	82,64
2.	2021	99,94	97,67	82,99
3.	2022	99,03	98,03	95,98
4.	2023	99,22	97,08	96,51
5.	2024	98,49	96,50	96,5

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

Dilihat dari perkembangan Angka Partipasi Sekolah Kota Sawahlunto dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi pada setiap kelompok umur. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, tingkat kesejahteraan masyarakat dan jumlah sekolah. Dalam meningkatkan nilai APS ini, pemerintah telah mengupayakan pemberian bantuan beasiswa (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan & rehab sarana prasarana & utilitas sekolah.

7. Rasio Murid dan Kelas

Rasio Murid dan kelas sangat penting untuk menentukan ketersedian kelas terhadap murid yang ada. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan rasio murid terhadap kelas di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.76
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	TK / PAUD					
1.1	Jumlah Murid	1.335	1.335	898	942	1.881
1.2	Jumlah Kelas	89	71	63	77	77
1.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	18,80:1	18,80:1	14,25:1	12,23 : 1	24,42 :1
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Murid	7.247	7.064	6233	6848	6.769
2.2	Jumlah Kelas	400	386	396	412	410
2.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	17,45 : 1	18,30:1	15,74:1	16,62 : 1	16,50:1
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Murid	3.527	3.275	2355	3314	3.269
3.2	Jumlah Kelas	130	152	93	133	133
3.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	22,53:1	21,55:1	25,32:1	24,92 : 1	24,57:1

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

Dari tabel diatas, dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah murid per kelas tahun 2024 untuk jenjang TK/PAUD. Untuk jumlah siswa tingkat SD/MI dan SMP/MTs tidak mengalami penambahan jumlah murid per kelas selama dua tahun terakhir (2023-2024). Jumlah murid per kelas sudah mencapai posisi ideal menurut Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Hal ini disebabkan tersedianya ruang kelas yang cukup dalam mengimbangi jumlah murid di tiap tingkat pendidikan. Berikut adalah rasio jumlah murid terhadap kelas menurut Permendikbud nomor 17 tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.77
Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas
Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH MURID/ KELAS
1	SD	1 : 20 – 28
2	SMP	1 : 20 – 32

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

8. Persentase Sekolah yang Terakreditasi

Akreditasi adalah proses evaluasi serta penilaian kualitas sebuah institusi yang dilaksanakan oleh tim ahli yang disebut sebagai assessor berdasarkan pada standar mutu yang telah ditetapkan. Persentase sekolah terakreditasi di Kota Sawahlunto dapat dilihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.78
Persentase Sekolah Terakreditasi di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	TK/ PAUD					
1	Jumlah Lembaga PAUD Terakreditasi	70	70	102	104	114
2	Total Jumlah Lembaga PAUD	87	87	119	124	114
3	Persentase Lembaga PAUD Terakreditasi	80,46	80,46	80,71	83,87	100
	SD/ MI					

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah SD/MI Terakreditasi A	41	41	40	41	41
2	Total Jumlah SD/MI	67	67	67	67	67
3	Persentase SD/MI Terakreditasi A	61,19	61,19	59.70	61,19	61,19
	SMP / MTs					
1	Jumlah SMP/MTs Terakreditasi A	2	2	3	3	3
2	Total Jumlah SMP/MTs	15	15	15	15	15
3	Persentase SMP/MTs Terakreditasi A	13,33	13,33	20	20	20

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

Semua PAUD di Kota Sawahlunto pada tahun 2024 sudah memenuhi syarat yang sesuai dengan standar akreditasi, sehingga tercapai 100%. Namun untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs belum terdapat peningkatan persentase sekolah dengan akreditasi A, masih sama dengan kondisi tahun 2023. Untuk itu perlu upaya maksimal seluruh pihak dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas semua aspek pendidikan yang ada disekolah agar terjadi peningkatan nilai akreditasi sekolah di Sawahlunto.

9. Angka Kelulusan Siswa

Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun mencerminkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta kemampuan dalam menghadapi evaluasi belajar. Angka kelulusan siswa perjenjang pendidikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.79
Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**SD**					
	Ikut Ujian	1050	1065	1076	1065	1065
	Lulus Ujian	1050	1065	1076	1065	1065
	Persentase (%)	100	100	100	100	100
2.	**MI**					
	Ikut Ujian	323	90	90	106	110
	Lulus Ujian	323	90	90	106	110
	Persentase (%)	100	100	100	100	100
3.	**SMP**					
	Ikut Ujian	783	758	818	758	725
	Lulus Ujian	783	756	816	758	725
	Persentase (%)	100	99,73	99,75	100	100
4.	**MTs**					
	Ikut Ujian	252	258	258	258	247
	Lulus Ujian	252	258	258	258	247
	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari tahun 2023-2024 tingkat kelulusan siswa SD, MI, SMP dan MTs di Kota Sawahlunto mencapai 100%. Hal ini menggambarkan upaya maksimal bersama yang telah dilakukan oleh pihak sekolah, keseriusan siswa belajar dan dorongan orang tua dalam mendukung kesuksesan pendidikan anak.

10. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan.

Tabel 2.80
Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024 (%)

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah Putus Sekolah	0	0	0	0	0
1.2	Jumlah Murid	7.122	7.064	6233	6110	6769
1.3	Angka Putus sekolah	0	0	0	0	0
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah Putus Sekolah	38	0	0	0	0

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.2	Jumlah Murid	3.527	2.833	2355	2481	3269
2.3	Angka Putus sekolah	1,07	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

Angka putus sekolah hanya ada pada tahun 2020, mulai tahun 2021 hingga tahun 2024 sudah tidak ada lagi anak putus sekolah. Angka putus sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan putus sekolah kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga broken home, kurang perhatian dari orang tua, tidak adanya kemauan dari anak untuk ke sekolah karena adanya pengaruh dari orang lain. Jika kita lihat, faktor ekonomi bukanlah menjadi faktor utama alasan mereka putus sekolah. Karena untuk uang sekolah di sekolah negeri tidak dikenakan biaya. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh besar terhadap kemauan belajar mereka. Salah pergaulan adalah salah satu bentuk pengaruh lingkungan yang buruk yang dapat memicu kemauan anak untuk bersekolah.

11. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan dapat dilihat dari jumlah siswa yang melanjutkan sekolah ke tingkat atasnya, adapun perkembangan jumlah siswa yang melanjutkan sekolah setelah kelulusan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.81
Angka Melanjutkan Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Siswa baru Tingkat I pada jenjang SMP/MTs	1.373	1.137	786	879	700
2	Jumlah Lulusan pada jenjang SD tahun ajaran sebelumnya	1.126	1.115	1065	1064	1065
3	Angka Melanjutkan (%)	121,94	101,97	73,80	82,61	65,72

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

Angka melanjutkan pada tingkat SMP mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020-2021 angka melanjutkan melebihi 100%, sedangkan tahun 2022-2024 angka melanjutkan berada dibawah 100%, hal ini disebabkan banyaknya anak SD/MI Sawahlunto yang melanjutkan sekolah di luar Kota Sawahlunto.

12. Jumlah Murid Sekolah Non Formal (NF)/Kesetaraan

Salah satu upaya meningkat angka Rata-rata Lama Sekolah, Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat yang tidak dapat menempuh Pendidikan formal SD, SMP dan SMA melalui Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Berikut ditampilkan data jumlah siswa yang mengikuti sekolah Non Formal/Kesetaraan seperti tabel berikut :

Tabel 2.82
Data Jumlah Siswa Sekolah Nonformal (NF) / Kesetaraan

No	Jenis Paket	Jumlah Murid / tahun (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	A	-	-	-	-	-
2	B	34	42	55	89	90
3	C	99	119	115	92	100
	Jumlah Total	133	161	170	181	190

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

Berdasarkan tabel diatas, terdapat peningkatan jumlah siswa NF setiap tahunnya. Perlu upaya optimal semua pihak untuk mendorong warga yang tidak dapat bersekolah formal guna melanjutkan pendidikan melalui sekolah NF.

13. Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dalam Kondisi Baik

Sekolah dalam kondisi baik sangat menentukan kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Secara keseluruhan keadaan kondisi sekolah yang ada di Kota Sawahlunto seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.83
Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi baik

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)
1	Jumlah Kelas SD/ MI dalam Kondisi baik	91	23,7	92	23,83	91	23,7	92	23,83	390	95,12
2	Jumlah Kelas SD/ MI dalam kondisi rusak ringan	293	76,3	294	76,16	293	76,3	294	76,16	20	5,13
3	Jumlah Kelas SD/ MI dalam kondisi rusak sedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah Kelas SD/ MI dalam kondisi rusak berat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Total Jumlah Kelas SD/ MI	384	100	386	100	384	100	386	100	410	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

Terdapat penurunan kualitas kelas, dari kondisi baik sebanyak 99,8% tahun 2023, turun menjadi 95,12% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan terdapat beberapa ruang kelas rusak yang belum dapat diperbaiki semua di tahun 2024. Namun demikian Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas ruang kelas SD/MI ditahun berikutnya.

Berikutnya keadaan atau kondisi sekolah untuk jenjang SMP/MTs dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.84
Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam kondisi baik (%)

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)
1	Jumlah Kelas SMP/ MTS dalamKondisi baik	60	39,47	60	39,47	60	39,47	60	39,47	127	95,49
2	Jumlah Kelas SMP/MTS Dalamkondisi rusak ringan	92	60,53	92	60,53	92	60,53	92	60,53	6	4,72
3	Jumlah Kelas SMP/MTS dalam kondisi rusak sedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah Kelas SMP/MTS dalam kondisi rusak berat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Total Jumlah Kelas SMP/ MTS**	**152**	**100**	**152**	**100**	**152**	**100**	**136**	**100**	**133**	**100**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

Untuk ruang kelas SMP/MTs, juga terdapat penurunan kualitas kelas, dari kondisi baik sebanyak 97,79% tahun 2023, turun menjadi 95,49% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan terdapat beberapa ruang kelas rusak yang belum dapat diperbaiki semua di tahun 2024. Untuk perbaikannya diupayakan dengan memanfaatkan anggaran dari pusat dan daerah.

14. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Definisinya adalah Jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Interpretasinya adalah rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia dasar. Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah di Kota Sawahlunto seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.85
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	TK					
1.1	Jumlah Sekolah (jumlah TK,RA, Paud)	131	124	124	124	114
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-6	3.394	3.394	3.394	2.228	2138
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah	1:25,91	1:27,37	1:27,37	1 : 17,97	1 : 18,75

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-6					
2	SD/MI/SDLB					
1.1	Jumlah Sekolah	67	67	67	67	68
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	7.122	7083	7083	7013	6307
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	1:106,30	1:105,72	1:105,72	1 : 104,67	1 : 92,75
3	SMP/MTs/SMPLB					
2.1	Jumlah Sekolah	15	15	15	15	15
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	3.602	3.561	3.561	3.569	2930
2.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	1:240,13	1:237,4	1:237,4	1 : 237,93	1 : 195,34

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa rasio ketersediaan sekolah untuk tingkat TK/PAUD cenderung stabil untuk tahun 2023-2024, meski jumlah sekolah berkurang namun juga diiringi dengan berkurangnya jumlah penduduk usia 5-6 tahun. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah tahun 2024 pada tingkat SD/MI/SDLB dan tingkat SMP/MTs/SMPLB mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun.

15. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio Guru dan Murid di Kota Sawahlunto terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.86
Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	TK					
1.1	Jumlah Guru	400	399	399	399	403
1.2	Jumlah Murid	2.913	2.833	2.833	2.724	1881
1.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:7,28	1;7,10	1;7,10	1 : 6,83	1: 4,66
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Guru	579	600	539	910	1017
2.2	Jumlah Murid	7.122	7.064	6235	6.669	6769
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:12,30	1:11,77	1:11,56	1 : 7,33	1:6,67
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Guru	320	320	264	332	377
3.2	Jumlah Murid	3.527	3.275	2262	3.314	3269
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:11,02	1:10,23	1: 8,56	1 : 9,98	1 : 8,67

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

Selama kurun waktu tahun 2020–2024 rasio ketersediaan guru di berbagai tingkat pendidikan mengalami perubahan setiap tahun. Untuk tahun 2024, ketersediaan guru terhadap murid pada jenjang pendidikan TK adalah 1 guru melayani 5-6 murid TK. Tingkat SD/MI, 1 guru melayani 7-8 murid SD dan untuk SMP 1 guru melayani 8-9 murid SMP/MTs.

16. Guru yang Memenuhi Kualitas S1/D IV

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, maka melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mensyaratkan kualifikasi guru harus berpendidikan D-IV atau S1, sehingga mendorong peningkatan kualifikasi guru. Jumlah guru Kota Sawahlunto yang memenuhi Kualitas S1/D- IV sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.87
Guru yang Memenuhi Kualitas S1/ DIV
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Guru Yang memenuhi kualitas SI/D IV	1.020	971	971	1.366	1.497
2	Total Guru	1.299	1.319	1.202	1.641	1.797
3	Persentase Guru yang memenuhi Kualitas SI/D IV (%)	78,52	73,34	73,34	83,24	83,30

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2024

Jumlah guru yang memenuhi kualitas S1/DIV tahun 2024 mengalami peningkatan karena bertambahnya jumlah guru. Masih ada guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4 pada jenjang pendidikan TK/PAUD. Untuk meningkatkan strata pendidikan guru TK/PAUD telah diberikan bantuan beasiswa melanjutkan kuliah sampai S1/D4 oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Kasus Stunting Balita

Pencegahan stunting dilakukan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetisi ditingkat global. Pemerintah Kota Sawahlunto juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan stunting. Adanya aksi konvergensi yang dilaksanakan dalam percepatan penurunan stunting di Kota Sawahlunto. Berikut ini persentase kasus stunting di Kota Sawahlunto tahun 2020-2024.

Tabel 2.88
Persentase Kasus Stunting Balita di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

NO	PUSKESMAS	2020	2021	2022	2023	2024
1	Talawi	8,0	7,5	5,7	3,2	3,9
2	Kolok	13,3	7,3	8,6	9,0	10,9
3	Sungai Durian	3,3	1,7	1,7	1,7	2,0
4	Kampung Teleng	4,3	4,4	3,8	3,2	3,6
5	Lunto	11,8	12,2	11,9	12,7	14,0
6	Silungkang	10,3	5,6	5,6	5,7	4,7
	KOTA	8,0	6,1	5,6	4,6	5,2

Sumber Data : E-PPGBM, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

Pada tahun 2020 prevalensi stunting sebesar 8 persen, mengalami penurunan pada tahun 2023 ini menjadi 4,6 %. Akan tetapi pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan kembali menjadi 5,2 %. Hal ini disebabkan oleh oleh adanya penambahan jumlah bayi bblr dan adanya yang masuk dari wilayah lain.

Tabel 2.89
Perbandingan Prevalensi Stunting
Kota Sawahlunto dengan Provinsi dan Indonesia

No	*Prevalensi Stunting*	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Sawahlunto	-	21,1	13,7	19,5	20
2	Provinsi Sumatera Barat	-	23,3	25,2	23,6	24,9
3	Indonesia	-	24,4	21,6	21,5	19,8

Sumber Data : SSGI 2021 – 2022 dan SKI 2023, BKKBN 2024

Tahun 2020 SSGI/SKI/BKKBN tidak melakukan survei karena karena kendala covid 19, sehingga data Prevalensi Stunting tidak tersedia. Tahun 2021-2024 berdasarkan data survei status gizi Indonesia (SSGI) dan survei kesehatan Indonesia (SKI), *Prevalensi balita stunting* Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kisaran antara 13,7% hingga 21,1%. Pada tahun 2024. Angka prevalensi stunting Kota Sawahlunto berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan di atas angka prevalensi stunting nasional.

Upaya konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting yang dahulunya melalui 8 aksi konvergensi berubah menjadi Aksi Utama dan Aksi Pendukung. Aksi Utama yaitu melalui analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan dan penilaian hasil monitoring dan evaluasi. Aksi Pendukung meliputi regulasi yang mendukung upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting, dan publikasi pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan percepatan penurunan stunting.

2. Jumlah Kasus Kematian Balita

Jumlah kasus kematian balita adalah jumlah kasus kematian balita pada usia 0-59 bulan. Angka kematian balita dihitung dengan membandingkan jumlah balita yang mati dengan angka kelahiran hidup, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.90
Jumlah kematian Balita Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kasus Kematian Balita	21	16	23	16	16

Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto 2024

Jumlah kematian balita di Kota Sawahlunto setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian balita ada sebanyak 21 orang. Begitu juga pada tahun 2021 menurun lagi menjadi 16 orang. Pada pada tahun 2022 mengalami peningkatan lagi menjadi 23 orang. Pada tahun 2024 jumlah kematian balita menurun lagi menjadi 16 orang. Yang disebabkan Diare, pneumonia, dan lain-lain.

3. Indikator Kinerja yang Berhubungan dengan RSUD

Indikator kinerja daerah yang berhubungan dengan RSUD telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ini data indikator kinerja berhubungan dengan RSUD tahun 2020-2024.

Tabel 2.91
Indikator Kinerja Berhubungan dengan RSUD
Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100	100	95	100	100
2.	Rasio daya tampung rumah sakit per satuan penduduk	1,6	1,55	1,6	1,5	1,46
3.	Persentase Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	utama	Utama	utama	Paripurna	paripurna
4.	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

Persentase cakupan layanan rujukan di Kota Sawahlunto sudah berjalan dengan baik dengan capaian 100 persen setiap tahunnya, kecuali tahun 2022. Begitu pula dengan rasio daya tampung Rumah Sakit persatuan penduduk jumlahnya mengalami penurunan dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk. Pada tahun 2020 rasio daya tampung rumah sakit adalah 1,6 sedangkan pada tahun 2024 menjadi 1,46 hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk. Indikator Persentase Rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi maka nilainya pada tahun 2020 adalah utama pada tahun 2023 dan 2024 meningkat menjadi paripurna. Sedangkan indikator Rumah Sakit terakreditasi adalah 100 %. Apabila dilihat secara keseluruhan maka indikator kinerja daerah yang berhubungan dengan RSUD ini telah mencapai target yang ditetapkan.

4. Angka kematian Bayi

Angka Kematian Bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Berikut ini adalah jumlah kematian bayi Kota Sawahlunto tahun 2020-2024

Tabel 2.92
Jumlah Kematian Bayi Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kematian Bayi (bayi)	19	13	18	16	10

Sumber Data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

Jumlah kematian Bayi di Kota Sawahlunto tahun 2020 hingga tahun 2024 berfluktuasi. Pada tahun 2020 jumlah kematian bayi 19 orang menurun menjadi 13 orang pada tahun 2021. Dan naik lagi tahun 2022 menjadi 18 orang. Pada tahun 2023 telah menurun lagi menjadi 16 orang. Pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 10 orang. Adanya angka kematian bayi ini disebabkan estesia (kurang oksigen) 2 orang, kelainan bawaan 1 orang, diare 1 orang, dll sebanyak 6 orang. Hal ini disebabkan masih ada ibu hamil yang tidak mau memeriksakan kehamilan ke petugas kesehatan, sehingga resiko tinggi lainnya tidak terdeteksi secara dini.

5. Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan

Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan kecelakaan atau cidera. Perkembangan jumlah kematian ibu di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.93
Jumlah Kematian Ibu di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Puskesmas	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Talawi	0	1	1	0	2
2.	Kolok	1	0	0	0	0
3.	Sungai Durian	0	0	1	0	0
4	Lunto	0	0	0	0	0
5	Kap Teleng	0	0	0	0	0
6	Silungkang	1	0	0	0	0
	Jumlah Kematian Ibu	2	1	2	0	2

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

Dari tabel di atas jumlah kematian ibu di Kota Sawahlunto tahun 2020 sebanyak 2 Orang, 1 orang di Kolok dan 1 orang di Silungkang. Dan pada tahun 2021 jumlah kematian ibu sebanyak 1 orang yaitu di Talawi yang disebabkan karena pendarahan dan pada tahun 2022 angka kematian meningkat menjadi 2 orang yaitu 1 orang di Talawi dan 1 orang di Sungai Durian. Pada tahun 2023 tidak ada kasus kematian ibu. Pada tahun 2024 jumlah kematian ibu terjadi di Talawi sebanyak 2 orang yang disebabkan oleh yang disebabkan oleh hipertensi dan kematian lainnya pada masa nifas.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah indikator yang mengukur jumlah kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan, atau dalam periode 42 hari setelah persalinan, per 100.000 kelahiran hidup. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Sawahlunto pada tahun 2020-2024 :

Tabel 2.94
Angka Kematian Ibu di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kematian Ibu	2	1	2	0	2
2	Jumlah Kelahiran Hidup	973	970	894	861	1145
3.	Angka Kematian Ibu	205,55	103,09	233,71	0	174,67

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

Angka Kematian Ibu diperoleh dari jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran ibu dikali 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kelahiran hidup di Kota Sawahlunto tidak sampai 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu ini mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 103,09 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2022 naik kembali menjadi 233,71 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu menjadi nol Angka Kematian Ibu di Kota Sawahlunto. Pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 174,67.

Berbagai upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kemitraan bidan dengan dukun, meningkatkan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan program KIA dan Kespro, Pelaksanaan Review Maternal dan Parinatal (RMP) serta peningkatan sosialisasi tentang kelas ibu dan program P4K.

6. Persentase Balita Gizi Buruk

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs adalah status gizi balita. Masalah gizi pada hakekatnya adalah masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja karena penyebab timbulnya masalah gizi ini adalah multifaktor, oleh karena itu pendekatan penanggulangannya harus melibatkan berbagai sektor terkait. Kurang gizi dipengaruhi oleh rendahnya konsumsi karbohidrat dan protein dalam makanan sehari-hari, tidak mendapatkan makanan bergizi seimbang pada usia balita, adanya penyakit infeksi, rendahnya ketahanan pangan keluarga dan pola asuh anak yang tidak baik serta faktor lingkungan yang jelek. Pada masyarakat dan ditingkat rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga dalam menyediakan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup dan ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, dan perilaku. Oleh karena itu penanganannya harus terpadu yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kemampuan dan ketrampilan asuhan gizi

keluarga dan kualitas pelayanan kesehatan. Balita gizi buruk adalah balita usia 0 sampai dengan 59 bulan dengan tanda klinis gizi buruk atau indeks berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dengan nilai Z-score kurang dari -3 SD atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 sentimeter bagi balita 6 sampai dengan 59 bulan.

Tabel 2.95
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Pencapaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Balita Gizi Buruk	0,1	0,04	0,04	0,02	0,02

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto 2024

Berdasarkan data diatas persentase balita gizi buruk di Kota Sawahlunto mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlahnya 0,1 % menurun pada tahun 2022 menjadi 0,04 %. Pada tahun 2023-2024 menurun lagi menjadi 0,02%. Hal ini karena berbagai program dan kegiatan dengan cara tetap melacak kasus kasus yang muncul dilapangan, pemberian makanan tambahan pada balita ibu hamil dan menyusui, mengadakan konseling kedokter spesialis dan monitoring evaluasi dengan melakukan pemetaan dan kunjungan rumah.

7. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat. sehingga dalam pembangunan kesehatan peranan dan pemberdayaan masyarakat itu sangat penting guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.96
Rasio Posyandu dan Balita Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Posyandu	Unit	103	103	104	103	103
2.	Jumlah Balita	Anak	5.983	4.578	6.663	4461	4507
3.	Rasio Posyandu/Jml Balita	Per 1.000 balita	17,22	44,01	15,61	23,08	22,85

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto 2024

Jumlah Posyandu dari tahun 2020 hingga tahun 2024 stagnan kecuali tahun 2022 yang mengalami penambahan 1 unit, namun pada tahun 2023 berkurang lagi menjadi 103 posyandu. Rasio Posyandu per jumlah balita pada tahun 2020 sebesar 17,22 ini berarti bahwa setiap Posyandu pada Tahun 2020 rata-rata melayani 17 orang. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 22,85 yang berarti balita yang dilayani adalah sebanyak 22 orang.

Disamping itu hal yang penting untuk melihat keberhasilan kegiatan program Posyandu dan peran serta masyarakat adanya peningkatan N/D dan D/S. Diharapkan juga adanya peningkatan untuk mencapai strata di Posyandu mulai dari Posyandu Pratama (Merah), Madya (Kuning), Purnama (Hijau) dan Mandiri (Biru) oleh masyarakat sebagai pengelola dan pemilik posyandu yang didukung oleh Desa/Kelurahan, LPM, PKK dan OPD terkait. Berikut disajikan persentase D/S dan N/D di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.97
Persentase Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sasaran Balita dari PUSDATIN	5.983	5.716	5663	5619	5583
2	Jumlah D/S	3.751	4.239	4213	4144	4057
3	Persentase D/S	62,7	68,9	74,3	73,7	92,4
4	Jumlah N/D	3.751	2.476	2351	2430	2170
5	Persentase N/D	66,7	63,9	64,6	62,9	55,91

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto 2024

Kegiatan pemantauan dan pembinaan terhadap posyandu dilaksanakan secara berkala dengan mengunjungi posyandu pada hari buka posyandu. Kegiatan penimbangan Balita di Posyandu berkaitan dengan cakupan pelayanan Gizi pada Balita, cakupan pelayanan kesehatan dasar khususnya imunisasi serta penanganan prevalensi gizi kurang pada balita. Dengan cakupan D/S yang tinggi diharapkan semakin tinggi pula cakupan vitamin A, cakupan imunisasi dan semakin rendahnya prevalensi gizi kurang. Cakupan balita ditimbang di Kota Sawahlunto tahun 2020 adalah sebesar 62,7 % dan yang naik timbangannya 66,7 % dari jumlah

balita sasaran 5.983 orang. Pada tahun 2024 cakupan balita ditimbang sebesar 92,4% dan yang naik timbangannya adalah 55,91% dari jumlah balita sasaran sebanyak 5.583 orang. Ini menunjukan kegiatan Posyandu perlu lebih ditingkatkan melalui peran serta masyarakat dan OPD terkait serta pihak swasta lainnya.

8. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, meningkatkan keadaan status gizi masyarakat, PHBS dan sebagainya dilaksanakan melalui jumlah sarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jumlah penempatan tenaga medis dan paramedis dimasyarakat. Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan praktek dokter merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dimasyarakat, semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan tersebut.

Tabel 2.98
Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Puskesmas	Unit	6	6	6	6	6
2	Jumlah Praktek Dokter	Unit	48	48	23	23	23
3	Jumlah Pustu	Unit	26	26	26	26	26
4	Jumlah Total Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu	Unit	80	80	55	55	55
5	Jumlah Penduduk	Jiwa	65.138	65.687	66.413	67.760	68.730
6	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu persatuan Penduduk	1.000 jiwa	1,23	1,22	0,83	0,81	0,80

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2024 (data olahan)

Pada tabel di atas, terlihat rasio puskesmas, praktek dokter dan Pustu per satuan penduduk yang ada di Kota Sawahlunto memperlihatkan tren menurun. Hal ini sebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun yang tidak diiringi penambahan jumlah Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu di Kota Sawahlunto.

9. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Berikut ini disajikan rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.99
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	65.138	65.687	66.413	67.760	68.730
3	Rasio RSUD persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,0153	0,0152	0,0151	0,0147	0,0145

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2025 (data olahan)

Di Kota Sawahlunto, seperti yang terlihat pada tabel terdapat satu Rumah Sakit umum daerah. Rumah sakit dengan Tipe C ini merupakan milik Pemerintah Kota Sawahlunto. Apabila dilihat dari rasio perbandingan rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami penurunan dari tahun 2020 rasionya 0,0153 menurun menjadi 0,0145 dan pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun.

10. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk di Kota Sawahlunto pada tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 sebesar 0,868 dan menurun pada tahun 2024 menjadi 0,742.

Tabel 2.100
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokter umum	Jiwa	30	30	30	26	27
2	Jumlah Dokter Gigi	Jiwa	12	12	10	9	9
3	Jumlah Dokter Spesialis	Jiwa	13	13	14	14	12

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah Dokter Spesialis Gigi	Jiwa	2	2	3	3	3
5	Total Dokter	Jiwa	57	57	57	52	51
6	Jumlah Penduduk	Jiwa	65.138	65.687	66.413	67.760	68.730
	Rasio Dokter persatuan Penduduk	**1.000 jiwa**	**0,875**	**0,868**	**0,858**	**0,767**	**0,742**

Sumber Data : Dinkesdalduk KB, 2024

Berdasarkan peraturan Kepmenko Bidang Kesra No 54 Tahun 2013 Standart target Rasio Kebutuhan SDMK pada tahun 2013 target dokter per 100.000 penduduk adalah 45 orang. Pada tahun 2020 di Kota Sawahlunto jumlah dokter sebanyak 57 orang dengan jumlah penduduk yang tidak sampai 100.000 orang. Sehingga dengan kondisi ini sudah mencapai target standar rasio dokter per 100.000 penduduk. Pada tahun 2024 jumlah dokter berkurang jumlahnya menjadi 51 orang.

11. Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Untuk mendukung pelayanan kesehatan di Kota Sawahlunto, sudah dilengkapi dengan beberapa sarana penunjang seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.101
Sarana Kesehatan Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Nama Sarana	2020	2021	2022	2023	2024
1	Polindes	6	6	6	5	5
2	Poskesdes	1	2	1	2	3
3	Puskesmas	6	6	6	6	6
4	Pustu	26	25	26	26	26
5	Puskesmas Keliling	10	8	8	8	15
6	Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C)	1	1	1	1	1
7	Klinik/Praktek Dokter	48	48	12	12	16
8	Bidan Praktek	25	25	4	4	12
9	Klinik KB	7	7	7	7	7
10	Gudang Farmasi	1	1	1	1	1
	TOTAL	131	129	72	72	92

Sumber Data :Profil Kota Sawahlunto, 2024

Ketersediaan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama dalam pelayanan kesehatan. Pada tahun 2024, dari empat kecamatan yang ada sudah didukung dengan keberadaan 6 Puskesmas induk, 26 Puskesmas Pembantu, 5 Polindes dan 3 Poskesdes/Poskeskel serta 1 Rumah Sakit Umum Daerah. Sarana ini ditujukan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena terkendala jarak. Dari sisi kualitas, dilakukan perbaikan dan pengadaan sarana prasarana pendukung serta akreditasi guna menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sudah sesuai standar.

Tenaga kesehatan Kota Sawahlunto pada tahun 2020 hingga tahun 2024 meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah tenaga kesehatan Kota Sawahlunto adalah 601 orang. Pada tahun 2024 menurun menjadi jadi 730 orang.

Tabel 2.102
Tenaga Kesehatan Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

No	Tenaga Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokter umum	25	30	30	26	25
2	Dokter gigi	7	12	10	9	9
3	Dokter Spesialis	13	13	14	14	12
4	Dokter Gigi Spesialis	2	3	3	3	3
5	Perawat	231	234	249	246	259
6	Bidan	149	154	166	175	219
7	Sarjana Kesehatan Masyarakat	29	29	32	29	42
8	Ahli Gizi	20	22	27	25	23
9	Analisis Laboratorium	16	16	16	16	19
10	Perawat Gigi	10	10	8	8	10
11	Ahli Penyehatan Lingkungan	15	15	15	16	13
12	Tenaga Teknis Kefarmasian	49	49	32	34	36
13	Teknisi Elektromedis	1	1	1	1	3
14	Apoteker	7	7	6	9	8
15	Rekam Medis	7	7	8	8	21
16	Tenaga Keterapian Fisik	6	6	0	5	12
17	Refraksionis Optisien	0	0	0	0	2
18	Teknisi Transfusi Darah	5	5	0	5	5
19	Radiografer	9	9	9	9	9
	Jumlah	601	622	626	638	730

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, 2024

Tenaga kesehatan Kota Sawahlunto pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah tenaga kesehatan Kota Sawahlunto adalah 601 orang dan pada tahun 2024 meningkat menjadi jadi 730 orang.

12. Cakupan Penemuan Dan Pengobatan TBC (*Treatment Covarage*) (%)

Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis ini dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus yang ada dalam suatu wilayah pada periode tertentu.

Tabel 2.103
Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (*Treatment Covarage*) (%)
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC	14,8	15,22	22,05	28,95	31,2

Sumber : Dinkesdalduk KB, 2024

Cakupan penemuan dan pengobatan TBC di Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih berada pada level rendah. Pada tahun 2020 jumlahnya adalah 14,8 %, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 31,2 %. Peningkatan ini disebabkan adanya ACF (*Active Cash Finding*) yaitu kegiatan untuk menemukan kasus TB di masyarakat yang dilaksanakan oleh Kemenkumham pada tahun 2024 sehingga meningkatkan Penemuan dan Pengobatan TBC di Kota Sawahlunto.

13. Angka Keberhasilan Pengobatan Tubercolosis (*Treatmenth Succes Rate*) (%)

Angka Keberhasilan Pengobatan Tubercolosis adalah persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap. Angka ini membandingkan jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Angka ini memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. Berikut gambaran perkembangan angka keberhasilan TBC di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.104
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Keberhasilan pengobatan TBC	88,9	88,89	96,5	94,05	94

Sumber Data : Dinkesdalduk KB, 2024

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis Kota Sawahlunto tahun 2020 hingga tahun 2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 angka keberhasilan pengobatan TBC sebesar 88,9% dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 94 %. Pada tahun 2024 terjadi penurunan Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis dari tahun sebelumnya yang disebabkan adanya pasien TBC yang meninggal yang disebabkan penyakit lain yang diderita.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum merupakan urusan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan dengan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur sesuai kebutuhan daerah.

1. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.105
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	78,00	93,23	94,66	98.01	98.01
2	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	46,75	44,21	44,91	45,38	45,85
3	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	66,98	81,71	83,06	88,56	91,01
4	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	48,35	45,95	46,87	47,75	49,34
5	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	-	11,11	17,09	17,09	50,00
6	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%) (SDGs)	81,00	85,45	85,10	87.30	88.32
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	95,24	62,32	62,4	62,61	63,40
8	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota	66,5	69,43	70,23	72.09	57.41
9	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	62,34	66,90	69,40	70,36	68,21
10	Persentase luas sawah kewenangan kab/kota yang dilayani jaringan irigasi (%)	45,35	46,84	50,73	45,72	44,11
11	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	87,50	84,15	84,15	84,15	84,15
12	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	90,00	91,99	98,00	96.21	96,21

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2024

Sesuai tabel di atas realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sudah cukup baik.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Persentase luas sawah kewenangan kab/kota yang dilayani jaringan irigasi terjadi penurunan sebesar (1,61%), hal ini disebabkan banyaknya terjadi kerusakan akibat bencana dan umur konstruksi pada jaringan irigasi serta kurangnya perbaikan terhadap jaringan irigasi tersebut serta ketersediaan sumber air baku, maka perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan dengan alokasi anggaran yang memadai.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota mengalami penurunan sebesar 15,49 %. Hal ini disebabkan banyaknya terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur jalan pada tahun 2023 dan 2024. Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik mengalami penurunan sebesar 12,95 % dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota.

2. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Jalan dalam kondisi Baik merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana, karena ini berkaitan langsung dengan kelancaran akses masyarakat baik akses orang maupun barang. Salah satu unsur yang menjadi acuan adalah kinerja jaringan jalan ditinjau dari aspek kemantapan, yang mana ini merupakan gabungan kinerja dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tingkat pelayanan mantap atau tidak mantap.

Status jalan di Sawahlunto terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi yaitu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. Jalan nasional merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan panjang 12,37 kilometer. Jalan provinsi merupakan kewenangan pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. Ruas jalan provinsi yang ada di kota Sawahlunto yaitu Jalan Guguk Cino sampai dengan Sawahlunto (Lapangan Segitiga), Jalan Rawang - Talawi dan Jalan Simpang Napar – Bukit Bual dengan panjang 43,20 kilometer yang berbatasan dengan kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung sangat strategis untuk pengembangan integrasi wisata sejarah (Kota Sawahlunto) dengan wisata budaya (Istana Pagaruyung).

Status jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah jalan kota dengan panjang jalan 441,42 kilometer. Sesuai dengan Permen PU Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, disebutkan bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi baik adalah kondisi jalan baik di bagi

dengan panjang jalan kota. Indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap ini menggambarkan tingkat aksesibilitas pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota. Peningkatan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan sehingga dapat berkendaraan dengan selamat sampai tujuan. Berikut secara lengkap tabel proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Kota Sawahlunto selama periode 2020-2024 :

Tabel 2.106
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Sawahlunto
Tahun 2020– 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Kondisi Jalan baik (Km)	302,49	315,82	319,45	327.91	253.43
2	Panjang Jalan Kota (Km)	454,87	454,87	454,87	454,87	441,42
3	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota	66,5	69,43	70,23	72,09	57,41

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2024

Sesuai tabel di atas, pada tahun 2020 hingga tahun 2023, terjadi peningkatan proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 5,59 %, namun capaian pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Hal ini karena adanya perhitungan ulang survei kondisi jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang disebabkan banyaknya terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur jalan pada tahun 2023 dan 2024.

Upaya untuk meningkatkan/menjaga proporsi jalan dalam kondisi baik kedepannya adalah dengan pemeliharaan bangunan pelengkap seperti bahu jalan dan drainase karena salah satu penyebab kerusakan jalan adalah drainase dan bahu jalan yang tidak berfungsi dengan baik.

3. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Indikator rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk didefinisikan dengan jumlah panjang jalan dibagi jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.107
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Panjang Jalan Kota (Km)	454,87	454,87	454,87	454,87	441,42
2	Jumlah Panjang Jalan Provinsi (Km)	30,65	43,20	43,20	43,20	43,20
3	Jumlah Panjang Jalan Negara (Km)	11,35	12,37	12,37	12,37	12,37
4	Jumlah panjang jalan total (Km)	496,87	510,44	510,44	510,44	496,99
5	Jumlah Penduduk (orang)	63.500	65.687	66.413	67.760	68.730
6	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (Km/orang)	0.0078	0,0077	0,0077	0.0075	0.0072

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2024

Dilihat dari tabel d iatas rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 memiliki nilai yang cenderung menurun, Faktor yang mempengaruhinya adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk namun panjang jalan tetap atau tidak bertambah. Agar nilai indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk tidak menurun dapat diantisipasi dengan membuka jalan baru atau memperlebar jalan yang ada pada titik-titik tertentu.

Standar Pelayanan Minimal rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di kota Sawahlunto adalah 0,74 kilometer per 100 penduduk. Dari data rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk tahun 2024 adalah 0,0072 kilometer per orang atau 0,72 kilometer per 100 orang. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk sampai tahun 2024 di bawah SPM rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, untuk menyikapi hal tersebut dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk perlu adanya pembangunan jalan baru. Mengingat terdapat jalan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan nasional di Kota Sawahlunto, maka perlu adanya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan nasional.

4. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan

Keberadaan trotoar di sepanjang jalan terutama yang selalu dipergunakan pejalan kaki menjadi salah satu indikator kemudahan akses pejalan kaki di sepanjang jalan. Di samping itu, untuk menjamin usia jalan yang sudah dibangun seharusnya terdapat pembuangan air hujan di sepanjang jalan berupa adanya drainase yang akan menampung air dikala terjadinya hujan. Untuk itulah panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Sawahlunto menjadi indikator pembangunan ke-PU-an.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 menyebutkan bahwa indikator yang digunakan untuk menghitung panjang jalan yang memiliki trotoar dibagi dengan panjang jalan seluruh jalan kota dikalikan dengan 100. Data lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.108
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan Yang Ada Trotoar (Km)	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
2	Panjang Seluruh Jalan Kota (Km)	454,87	454,87	454,87	454,87	441,42
3	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar (%)	1,82	1,82	1,82	1,82	1,88

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2024

Jalan yang memiliki trotoar di Kota Sawahlunto masih terlalu sedikit dibanding panjang jalan yang ada, persentasenya hanya 1,88 persen dari panjang jalan. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 panjang trotoar di kota Sawahlunto tidak mengalami peningkatan, karena pada rentang tahun tersebut Perangkat daerah terkait lebih fokus pada pembangunan drainase dan bahu jalan. Untuk tahun berikutnya perlu difokuskan untuk pembangunan trotoar sehingga akan memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki terutama di daerah pusat kota daerah yang lalu lintas baik orang atau kendaraan yang cukup ramai.

5. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Drainase merupakan salah satu komponen pelengkap jalan yang sangat berguna untuk melancarkan aliran air sehingga mencegah terjadinya genangan maupun banjir. Sistem Drainase Skala Kota merupakan sistem drainase keseluruhan yang ada di jalan Kota.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tersedianya sistem drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Rincian drainase dalam kondisi baik Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.109
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik
Di Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (Km)	60,36	58,12	59,27	59,92	60,83
2	Panjang Seluruh Drainase (Km)	129,12	131,48	131,98	132.37	132.67
3	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat.(%)	46,75	44,21	44,91	45.27	45.85

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2024

Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 persentase drainase dalam kondisi baik terjadi peningkatan namun secara keseluruhan masih di bawah 50%, hal ini disebabkan karena tingkat kerusakan drainase tidak seimbang dengan pemeliharaannya. Langkah-langkah kedepan yang perlu dilakukan adalah lebih memprioritaskan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan drainase agar target drainase dalam kondisi baik semakin meningkat.

6. Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik

Indikator persentase jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jaringan irigasi keseluruhan dikali 100%. Irigasi di Kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.110
Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajang Irigasi Dalam Kondisi Baik (Km)	41,26	41,45	43,39	44,37	44,,52
2	Panjang Saluran Irigasi (Km)	92,39	92,59	92,59	92,93	92,93
3	Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	44,66	44,77	46,87	47,75	47,91

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2024

Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,25%, namun secara keseluruhan persentase saluran irigasi dalam kondisi baik masih dibawah 50%. Untuk meningkatkan Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik maka harus lebih memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan irigasi. Dampak dari saluran irigasi yang baik adalah meningkatnya hasil pertanian dari masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian.

7. Persentase Luas Lahan Yang Dilayani Jaringan Irigasi

Indikator persentase irigasi dalam kondisi baik adalah luas sawah yang dilayani jaringan irigasi dibagi jumlah luas sawah seluruhnya dikali 100 persen. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001, status irigasi di Kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sumber air baku irigasi produktif berasal dari sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 96 daerah irigasi dengan luas potensial 1.571 Ha. Persentase luas sawah yang dilayani jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.111
Persentase Luas Lahan Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi Di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Luas Lahan yang dilayani jaringan Irigasi (Ha)	762	787	797	718,25	693
2	Luas Lahan sawah (Ha)	1.680	1.571	1.571	1.571	1.571
3	Persentase Luas Lahan yang dilayani jaringan Irigasi	45,35	50,09	50,73	45,72	44,11

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2024

Perkembangan persentase luas sawah yang dilayani jaringan irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan, namun capaian pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan sebesar 1,61 %, hal ini disebabkan karena banyaknya terjadi kerusakan pada jaringan irigasi dan kurangnya perbaikan terhadap jaringan irigasi dan ketersediaan sumber air baku tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan dengan alokasi anggaran yang memadai.

8. Rasio Jaringan Irigasi

Indikator rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budi daya pertanian. Status irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sumber air baku irigasi produktif berasal dari sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 96 daerah irigasi dengan luas potensial 1.571 Ha. Berikut tabel rasio jaringan irigasi kota Sawahlunto pada tahun 2020 – 2024 :

Tabel 2.112
Rasio Jaringan Irigasi Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Panjang Saluran Irigasi (Km)	92,39	92,78	92,78	93,12	92,39
2	Luas Lahan Budi Daya Pertanian (Ha)	1.680	1.571	1.571	1.571	1.680
3	Rasio Jaringan Irigasi	0,0549	0,0590	0,0590	0,0592	0,0549

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2024

Rasio jaringan irigasi dari Tahun 2020 – 2024 mengalami peningkatan setiap tahun, namun tahun 2022 tidak ada peningkatan karena tidak ada pembangunan Saluran irigasi. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan rasio jaringan irigasi karena adanya penambahan panjang saluran irigasi.

9. Air Minum dan Sanitasi

Target 100% Universal Access SDGs untuk pemenuhan layanan air minum dan sanitasi layak pada tahun 2024 belum bisa diwujudkan. Capaian layanan air minum layak sebesar 96,21% sedangkan akses layanan sanitasi layak baru mencapai 88.32%.

Dalam memenuhi kebutuhan air minum, masyarakat memiliki keragaman akses terhadap sumber air sesuai dengan kemampuan aksesibilitasnya dan ketersediaan sarana dan prasarananya. Sistem penyediaan air minum yang digunakan rumah tangga dapat dibedakan menjadi sistem perpipaan (unit air baku, unit produksi, transmisi, dan distribusi) dan sistem non-perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air).

Akses layanan air minum layak berupa jaringan perpipaan baru mencapai 49,67%, sedangkan sisanya adalah berupa jaringan non perpipaan. Lebih rinci cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.113
Persentase RT yang memiliki air akses terhadap layanan sumber air minum layak
Tahun 2020- 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	16.542	16.542	16.603	16,940	16,940
2	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih (RT)	14.889	15.218	16.271	16.298	16.298
3	Persentase (%)	90,00	91,99	98,00	96,210	96,210

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2024

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2020-2022 terjadi peningkatan yang disebabkan oleh tersedianya sumber-sumber air bersih yang baru, baik yang disediakan oleh PDAM, maupun oleh program-program yang berbasis masyarakat, seperti Pamsimas yang bersumber dari dana DAK dan dana APBD. Namun tahun 2023 dan tahun 2024 terjadi penurunan karena pertambahan jumlah rumah tangga tidak sebanding dengan penambahan SR, untuk itu diperlukan kegiatan air minum yang menambah SR baik dari anggaran pusat maupun anggaran daerah atau kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM).

a. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase Penduduk Berakses Air Minum adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan, dalam satuan persen. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Akses terhadap air minum dapat melalui Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) atau Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP). Semakin tinggi persentase penduduk berakses air minum menunjukkan semakin mampu Pemerintah Kota Sawahlunto dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum sesuai standar kebutuhan minimal.

Tabel 2.114
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	63.500	65.687	66.413	67.760	68.730
2	Penduduk berakses air minum	59.556	60.872	65.084	65.192	65.252
3	Persentase (%)	93,79	92,67	98,00	96.21	94,85

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2024

Persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2020 sampai tahun 2023 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2024 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,36 %. Penurunan Persentase penduduk berakses air minum pada Tahun 2024 disebabkan bertambahnya jumlah penduduk tidak sebanding dengan penambahan sambungan rumah, untuk itu perlu adanya program penambahan sambungan rumah baik melalui anggaran APBN atau APBD.

b. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Jamban sehat adalah pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penular penyakit, sekurang kurangnya untuk mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan yang mana kotoran diletakan pada suatu tempat atau jamban. Untuk meningkatkan

derajat kesehatan dimasyarakat selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Kurangnya kesadaran, pengetahuan dan rasa memiliki jamban sehat akan menjadi masalah untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang bersih. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.115
Persentase Rumah Tangga Yang Memenuhi Syarat
Tahun 2020 - 2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah (unit)	14.257	14.314	14.371	14.404	14.847
2	Jumlah rumah yang diperiksa (unit)	14.257	14.245	13.362	13.763	14.847
3	Jumlah rumah dengan jamban (unit)	13.352	13.558	12.851	13.553	14.603
4	Jumlah rumah dengan jamban yang memenuhi syarat (unit)	11.752	11.801	11.256	12.415	13.820
5	Persentase yang memenuhi syarat (%)	88,00	87,00	87,60	91,6	93,08

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto, 2024

Dalam lima tahun terakhir ini Pemerintah Kota Sawahlunto telah memberikan bantuan bahan bangunan untuk pembuatan jamban keluarga bagi keluarga miskin sehingga rumah yang selama ini tidak sehat dikarenakan tidak mempunyai jamban sehat menjadi sehat, hal ini dibuktikan bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 6,08 %. Terjadinya peningkatan ini disebabkan keseriusan pemerintah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan rumah dengan jamban sehat melalui program dan kegiatan di OPD terkait. Penyuluhan harus terus menerus disampaikan kemasyarakat agar masyarakat sadar akan manfaat jamban serta menghindarkan diri dari penyakit diare, cacingan dan lainnya.

c. Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Air Limbah adalah air bekas dari kamar mandi, dapur atau cucian yang dapat mengotori sumur, sungai dan lainnya yang dapat mengganggu masyarakat berupa pemandangan yang tidak nyaman, menjadi sarang penyakit, bau busuk dan mencemari air bersih karena tidak meresap kedalam tanah atau tergenang dan tidak mengalir. Ada faktor ekonomi, kebiasaan dan kualitas pendidikan yang berpengaruh besar terhadap pola hidup masyarakat dalam memenuhi syarat kesehatannya. Penyuluhan harus terus dilakukan agar masyarakat dapat membuat pengelolaan air limbah yang sesuai dengan syarat kesehatan baik berupa septictank, sumur resapan, got dan lainnya. Persentase RT dengan SPAL yang memenuhi syarat sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.116
Persentase Rumah Tangga dengan SPAL yang Memenuhi Syarat
Tahun 2020 - 2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah (unit)	14.257	14.314	14.371	14.404	14.847
2	Jumlah rumah yang diperiksa (unit)	14.257	14.257	13.362	13.763	14.847
3	Jumlah rumah dengan SPAL (unit)	13.983	14.192	13.351	14.257	14.753
4	Jumlah rumah dengan SPAL yang memenuhi syarat (unit)	11.363	11.903	11.028	11.833	12.405
5	Persentase yang memenuhi syarat (%)	81,00	83,90	82,60	83,00	83,55

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto, 2024

Di Kota Sawahlunto sesuai dengan hasil capaian cakupan SPAL di rumah tangga dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terjadi peningkatan. Kenaikan persentase yang memenuhi syarat ini disebabkan banyak faktor salah satunya terkait perilaku penghuni rumah yang sudah mulai ada kesadaran terkait pentingnya SPAL dan sebagainya.

d. Kapasitas Air Baku

Air baku merupakan kebutuhan pokok di Kota Sawahlunto karena sampai saat ini Air adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Untuk konsumsi air minum menurut Departemen Kesehatan syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak mengandung logam berat.

Tabel 2.117
Persentase Kapasitas Air Baku di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas Air Baku M3/detik	0,101	0,104	0,142	0,144	0,110

Sumber Data : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota sawahlunto, 2024

Kapasitas air baku di Kota Sawahlunto secara umum mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan kapasitas air baku sebesar 0,034 M3/detik. Penurunan ini disebabkan terjadinya bencana alam pada IPA Lunto dan rusaknya pompa utama Rantih. Langkah -langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan sumber air baku adalah memperbaiki sarana dan prasaran serta mencari alternatif sumber air baku sebaik mungkin dengan sistem grafitisasi agar lebih efisien..

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan.

Adapun setiap tahun diberikan bantuan untuk Rumah Layak huni untuk peningkatan/rehab dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- bagi masing-masing rumah dengan rincian Rp.17.500.000,- untuk material dan Rp.2.500.000,- untuk upah. Sedangkan pembangunan rumah layak huni sebesar Rp.40.000.000,- dengan rincian Rp.35.000.000,- untuk material pembangunan rumah dan Rp.5.000.000,- untuk upah. Perkembangan jumlah penerima bantuan sebagai berikut :

Tabel 2.118
Penerima Bantuan RTLH Tahun 2020 -2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penerima bantuan RTLH	172	98	115	99	40

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

Tahun 2024 total penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 40 unit dengan rincian Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 10 unit, Perbaikan Rumah Tidak LayakHuni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sebanyak 30 unit.

Untuk capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman mempunyai capaian yang terlihat dari perkembangan indikator kinerja daerah (IKD) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.119
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyedian dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Fasilitasi Pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang di kabupaten/kota yang ditangani (%)	70,00	75,00	79	66,27	80,46
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (kumuh tidak layak huni)(%)	11,29	10,08	1,15	8,62	8,61
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) (%)	70,00	75,00	80	85	84.03
6	Persentase RTLH (%)	2,62	10,63	7,38	8,94	8,61
7	Luas Pengurangan kawasan kumuh (hektar) (Sdgs)	0	49,37	42.15	19,08	9,71

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

Sesuai dengan tabel diatas, realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto tahun 2024 sudah cukup baik. Kegiatan untuk pengurangan Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh tetap dilaksanakan setiap tahunnya, berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh yang ada di Kota Sawahlunto.

Pengertian perumahan sering dikaitkan dengan pembangunan sejumlah rumah oleh berbagai instansi baik pemerintah atau swasta dengan design unit-unit rumah yang sama atau hampir sama. Jumlah rumah dan kelompok perumahan ini tidak tertentu, dapat terdiri dari dua atau tiga rumah atau dapat juga sampai ratusan rumah. Bentuknya pun tidak terbatas hanya pada bangunan satu lantai saja, yang berderet secara horizontal, melainkan dapat juga merupakan bangunan bertingkat yaitu merupakan rumah susun. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya.

Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). (Badan Pusat Statistik, 2015). Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuninya dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berikut ini adalah data rumah tidak layak huni kota Sawahlunto dari tahun 2020 – 2024 :

Tabel 2.120
Data Rumah Tidak Layak Huni
Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kecamatan Silungkang	246	246	315	259	254
2	Kecamatan Barangin	571	571	726	534	523
3	Kecamatan Talawi	365	365	318	251	249
4	Kecamatan Lembah Segar	339	339	302	264	252
	Total	**1.521**	**1.521**	**1.661**	**1.308**	**1,278**

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 – 2022 terjadi peningkatan pada jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) di Kota Sawahlunto yang tersebar di 4 kecamatan, dengan jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) pada tahun 2022 sebesar 1.661 unit rumah. Peningkatan jumlah RTLH yang sangat besar ini disebabkan karena perubahan standar rumah. Tahun 2022 sampai dengan 2024 terjadi penurunan jumlah RTLH karena adanya intervensi dari pemerintah Kota sebesar 99 unit ditahun 2023 dan 30 unit ditahun 2024.

1. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau

Persentase rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau diperlukan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi syarat :

a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (persetujuan bangunan gedung) dan SLF (sertifikat laik fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.121
Empat Kriteria Pengukuran Indikator

NO	Kriteria
1.	Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
2.	Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m^2
3.	Memiliki akses air minum layak
4.	Memiliki akses sanitasi layak

Sumber Data : Data Baseline Kotaku 2020

Berikut persentase rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.122
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau Kota Sawahlunto
Tahun 2020- 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah yang layak huni dan terjangkau (unit)	13.884	12.793	12,742	13.322	13.569
2	Jumlah rumah (unit)	14.257	14.314	14.371	14.630	14.847
3	Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (Rasio Rumah Layak Huni)	97,38	89,37	88,66	91,06	91,39

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

Pada tabel di atas terlihat Persentase rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Jumlah rumah layak huni dan terjangkau di tahun 2024 bertambah 247 unit ini disebabkan adanya intervensi dari pemerintah Kota Sawahlunto berupa kegiatan RTLH sebanyak 30 unit dan 80asyarakat80 unit rumah baru oleh 80asyarakat sebanyak 217 unit, sehingga jumlah rumah juga bertambah menjadi 14.847 unit, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas DPKP2LH dan Dinas Kesehatan akhir tahun 2024.

2. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni atau RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah layak huni harus memiliki struktur konstruksi yang kuat, luas bangunan yang ideal, sanitasi yang baik, serta ketersediaan air bersih. Berikut ini tabel rasio rumah layak huni:

Tabel 2.123
Rasio Rumah Layak Huni
Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah yang layak huni (unit)	13.884	12.793	12,742	13.322	13.569
2	Jumlah rumah (unit)	14.257	14.314	14.371	14.630	14.847
3	Rasio rumah layak huni	0.9738	0,8937	0,8866	0,9106	0,9139

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

Sesuai tabel diatas, terjadi peningkatan rasio rumah layak huni di tahun 2024, disebabkan karena adanya intervensi dari pemerintah kota sawahlunto berupa kegiatan RTLH, sehingga rumah yang awalnya termasuk kategori tidak layak huni di tahun 2023, menjadi rumah layak huni di tahun 2024. Jumlah unit rumah tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi 14.847 unit, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas DPKP2LH dan Dinas Kesehatan akhir tahun 2024, hal ini dimungkinkan karena adanya pembangunan unit rumah baru.

3. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman yang layak huni didefinisikan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Hal ini menjadi urusan wajib pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman. Berikut ini tabel rasio permukiman layak huni :

Tabel 2.124
Rasio Permukiman Layak Huni
Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas permukiman yang layak huni (Ha)	1.426,42	1.475,79	1.515,79	1534,87	1.546,73
2	Luas permukiman (Ha)	1.561,63	1.561,63	1.561,63	1.561,63	1.561,63
3	Rasio permukiman layak huni	0,91354	0,9450	0,9706	0,9829	99,04

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

Berdasarkan tabel diatas, terjadi peningkatan rasio permukiman layak huni pada tahun 2024, meskipun dari tahun 2023 sampai dengan 2024 tidak ada intervensi kegiatan dari Program program penanganan permukiman kumuh. Peningkatan Rasio Permukiman Layak Huni ini dimungkinkan disebabkan oleh adanya intervensi kegiatan dari Pemerintah Kota tahun 2024 berupa kegiatan RTLH dan PSU.

4. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya;

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya

Tabel 2.125
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Tahun 2020- 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah yang layak huni (unit)	13.884	12.793	12,742	13.322	13.569
2	Jumlah rumah (unit)	14.257	14.314	14.371	14.630	14.847
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	97,38	89,37	88.66	91.06	91.39

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

Cakupan ketersediaan rumah layak huni mengacu pada perbandingan antara jumlah rumah yang memenuhi kriteria layak huni dengan jumlah total rumah yang ada, biasanya dinyatakan dalam persentase. Rumah layak huni sendiri memiliki beberapa kriteria, seperti ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses sanitasi yang layak, dan akses air minum yang memadai.

Program pemerintah seperti Program RTLH bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2024 ini terdapat peningkatan cakupan ketersediaan rumah tidak layak huni dari tahun sebelumnya yaitu 92,39 persen, dan peningkatan jumlah rumah dari 14.630 unit menjadi 14.847 unit.

5. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau

Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.126
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau
Tahun 2020- 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau	172	270	385	484	514
2	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	1360	1520	1470	1470	1520
3	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau	12,65	17,76	26,19	32,93	33,82

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengacu pada pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi standar keselamatan bangunan, kesehatan, dan kecukupan luas minimum untuk penghuninya. Program ini sering kali didukung oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan masyarakat memiliki akses ke hunian yang layak, berdasarkan tabel di atas terdapat kenaikan cakupan layanan rumah layak huni yang

terjangkau setiap tahunnya, dimana tahun 2024 sudah 33,82% cakupan Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau. Ini merupakan output dari kegiatan RTLH yang dilaksanakan oleh pemerintah kota melalui Dinas PKP2LH baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN.

6. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Permukiman kumuh atau *slum* merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemi yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan. Berdasarkan nota dinas dari Kementerian PUPR Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Nomor: 242/ND-CK/2019 tanggal 26 Desember 2019, seluruh kabupaten/kota harus melakukan verifikasi ulang terhadap luasan kumuh. Verifikasi luasan kumuh Kota Sawahlunto berdasarkan pada baseline program KOTAKU bulan Juni tahun 2020.

Pada tahun 2020 dikeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang, perubahan ketiga atas Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 189.2/WAKO-SWL/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sawahlunto pada tanggal 16 Juli 2019. Berikut Surat Keputusan Wali Kota Sawahlunto tahun 2020:

Tabel 2.127
Surat Keputusan Walikota Sawahlunto
Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020
Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS KUMUH (Ha)
1	Talawi	Bukik Gadang	16,58
2	Talawi	Kumbayau	14,90
3	Talawi	Tumpuak Tangah	13,06
4	Talawi	Sikalang	2,94
5	Talawi	Rantih	11,03
6	Barangin	Durian II	14,89
7	Barangin	Santur	13,03
8	Barangin	Balai Batu Sandaran	2,00
9	Barangin	Lumindai	6,38
10	Lembah Segar	Air Dingin	3,20
11	Lembah Segar	Kubang Tangah	10,99
12	Lembah Segar	Pasar Kubang	7,45
13	Silungkang	Silungkang Duo	7,01
14	Silungkang	Silungkang Tigo	2,35
15	Silungkang	Taratak Bancah	3,60
16	Silungkang	Silungkang Oso	5,80
	JUMLAH		**135,21**

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

Adapun perkembangan permukiman kumuh yang ada di Kota Sawahlunto dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.128
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
Tahun 2020- 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Permukiman Kumuh (Ha)	135,21	85,84	43,69	24,61	14,90
2	Luas Permukiman)(Ha)	1.561,63	1.561,63	1.561,63	1.561,63	1.561,63
3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	8,66	5,50	2,80	1,58	0,95

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

Berdasarkan tabel diatas Persentase Lingkungan permukiman kumuh kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 0,95 %, artinya sudah terjadi peningkatan kualitas permukiman Kumuh di Kota Sawahlunto, hal ini tidak lepas dari peran Pemerintah daerah dan intervensi berbagai program pemberdayaan seperti program KOTAKU, PAMSIMAS dan SANIMAS.

7. Persentase Luas Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan

Menurut UU No.1 tahun 2011, permukiman yang tidak layak huni terjadi karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepandatan bangunanan dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Beberapa faktor pendorong timbulnya permukiman kumuh diperkotaan adalah arus urbanisasi penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat. Berikut tabel persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan tahun 2020 – 2024 :

Tabel 2.129
Persentase Luasan Permukiman Kumuh dikawasan Perkotaan
Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas permukiman kumuh diperkotaan (Ha)	18,09	18,09	18,09	-	-
2	Luas permukiman kumuh (Ha)	135,21	85,84	43,69	24,61	14,9
3	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan (%)	13,38	21,07	41,40	-	-

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

Pada tahun 2020 diterbitkan SK Walikota Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru di Kota Sawahlunto dan teridentifikasi seluas 135,21 hektar lokasi kumuh yang tersebar di 16 desa/kelurahan. Berdasarkan hasil perhitungan pengurangan kumuh tahun 2024, Luas permukiman kumuh (Ha) kota Sawahlunto 0 Ha. Luas Permukiman kumuh yang tersisa adalah lokasi kumuh diluar kawasan perkotaan dan berdasarkan besaran luas kawasan ≥ 10 Ha dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (termasuk Penanggulangan Bencana dan Kebakaran)

Urusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Dalam penerapannya dibutuhkan peraturan sebagai norma yang berisi aturan dan mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan norma dan menjadi salah satu instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab urusan ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama-sama dengan memberdayakan PPNS yang berada di Perangkat Daerah untuk melakukan penegakan Perda. Keduanya bersinergi dalam mengupayakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Sawahlunto. Pencapaian keberhasilan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dari indikator berikut ini :

Tabel 2.130
Indikator Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM)	0	0	0	0	0
Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda (IKD)	-50	-3300	33,06	70,14	-13,54
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKD)	100	100	100	100	100
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (IKD)	100	100	100	100	100
Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan (IKD	100	100	100	100	100
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda (IKD)	100	100	100	100	100
Jumlah Linmas per desa/kelurahan (IKD)	10	10	10	10	10
Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (linmas)	1 : 21,53	1 : 22,96	1 : 22,98	1 : 22,91	1 : 22,91
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100
Persentase penegakan perda	100	100	100	100	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan evakuasi korban kebakaran	75	56	87	165	32
Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto (IKD)	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (IKD)	100	100	100	100	100

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (IKD)	33	33	33	33	35
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	100	100	100	100
Tingkat waktu tanggap (response time rute) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (menit) (WMK) (IKD)	15	15	15	15	15

Sumber Data: Satpol PP & Pemadam Kebakaran, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat indikator pencapaian keberhasilan urusan ketentraman dan ketertiban dari tahun 2020 sampai dengan 2024, secara keseluruhan pencapaiannya sudah 100 persen, Indikator tersebut merupakan SPM pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Petugas Satpol PP menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Pelanggaran perda dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Data tahun 2024 tercatat pelanggaran perda sebanyak 155 kasus, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 134 kasus.

Pada indikator persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi di tahun 2024 mengalami penambahan dari 62 orang petugas damkar sudah bersertifikasi sebanyak 35 orang. Pertambahan jumlah ini adalah dari penerimaan pegawai P3K yang mewajibkan persyaratan khusus petugas damkar harus bersertifikasi.

Petugas Satpol PP juga berperan dalam mengantisipasi tindak kejahatan di lingkungan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Sebagai bentuk pengawasan Satpol PP melaksanakan patroli keamanan dalam rangka mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan yang bersinergi dengan pihak kepolisian dalam upaya menekan angka kriminalitas. Berikut data kriminalitas di Kota Sawahlunto ;

Tabel 2.131
Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Jenis Kriminalitas	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Curat (pencurian dan pemberatan)	19	9	6	11	5
Penggelapan	3	1	3	11	8
KDRT	4	-	1	2	1
Penipuan	3	2	4	3	6
Pengerusakan	2	1	3	1	-
Pencurian Kendaraan Bermotor	8	5	4	3	3
Pembakaran	-	-	-	-	1
Anirat/Penganiayaan Pemberatan	1	1	1	1	-
Perkosaan	-	-	-	-	-
Pembunuhan	-	-	-	-	2
Jumlah kriminal	40	19	22	32	26
Jumlah penduduk	65.138	65.687	66.413	67.760	68.730
Angka kriminalitas	**6,14**	**2,89**	**3,31**	**4,72**	**3,78**

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah kriminalitas di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Untuk mengatasi permasalahan tindak kriminalitas di Kota Sawahlunto dan dalam upaya pembinaan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Sawahlunto bekerjasama dengan Kepolisian Resor Sawahlunto. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk pencegahan guna memberantas tindak kriminalitas dalam upaya menciptakan Kota Sawahlunto yang aman dan jauh dari kejahatan kriminalitas

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Kota Sawahlunto merupakan kota yang relatif rawan bencana. Tercatat dalam kurun lima tahun terakhir bencana longsor dan angin puting beliung adalah kejadian yang paling sering terjadi di Kota Sawahlunto. Kejadian bencana ini menimbulkan korban jiwa dan kerugian material lainnya. Hal ini disebabkan karena tekstur wilayahnya berada di perbukitan dan permukimannya banyak yang berada di lereng bukit. Sehingganya beberapa kawasan di Kota Sawahlunto menjadi daerah rawan bencana.

Nilai Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kota Sawahlunto pada tahun 2024 adalah 114,22 berada pada kategori sedang. Kerawanan bencana gerakan tanah atau longsoran di Kota Sawahlunto cukup bervariatif dari mulai kerawanan rendah, sedang dan tinggi. Kerawanan bencana longsor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti aktivitas manusia, keberadaan

vegetasi, jenis tanah dan kelerengan. Mayoritas kerawanan bencana longsor di Kota Sawahlunto yaitu sedang dengan luas 15.003,77 Ha.

Tabel 2.132
Indikator Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	113,20	113,20	109,56	108,94	114,22
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,44	0,56	0,50	0,46	0,43
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	395	330	450	350	250
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	147	290	450	350	250
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	599	339	525	305	250
6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (IKD)	100	100	100	100	100
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (IKD)	100	100	100	100	100
8	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (IKD)	100	100	100	100	100
9	Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana (IKD)	100	100	100	100	100
10	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
11	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100

Sumber Data: BPBD Kota Sawahlunto, 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Sawahlunto dari tahun 2020-2024 fluktuatif terjadinya peningkatan dan penurunan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi, yakni ancaman, kerentanan dan kapasitas yang mencakup dalam Indeks Ketahanan Daerah. Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kota Sawahlunto dari tahun 2020-2024 berada dalam kategori sedang. Dalam kondisi saat ini Ketahanan Daerah Kota Sawahlunto terhadap bencana dan risiko Kota Sawahlunto terhadap bencana sama dalam keadaan sedang. Artinya Indeks Ketahanan Daerah akan berbanding terbalik dengan Indeks Risiko Bencana, semakin tinggi nilai ketahanan daerah maka akan semakin kecil nilai risiko bencana daerah tersebut.

Penanggulangan bencana merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh setiap daerah. Karena menyangkut keselamatan dan kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pelaksanaanya pemerintah Kota Sawahlunto menyiapkan rangkaian kegiatan sosialisasi pencegahan bencana kepada masyarakat, menyampaikan informasi rawan bencana dan pembentukan desa tangguh bencana sebagai bentuk inovasi Kota Sawahlunto menghadapi bencana. Selain itu pemerintah Kota Sawahlunto juga menyiapkan sarana prasarana darurat kebencanaan. Dalam penganggarannya juga dibantu oleh Bantuan Tak Terduga (BTT) pada saat darurat bencana. Selain itu untuk penanganan fasilitas umum yang terdampak bencana Pemerintah Kota Sawahlunto juga bisa mengajukan proposal ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah membantu daerah dalam segi pembiayaan. Tercatat pada tahun 2024 Kota Sawahlunto mendapatkan anggaran sebesar tiga puluh tiga miliar untuk penanganan bencana daerah.

F. *Urusan Pemerintahan Bidang Sosial (Termasuk Penanganan Pasca Bencana Serta Taman Makam Pahlawan*)

Urusan Sosial merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara melindungi rakyatnya. Urusan sosial erat kaitannya dengan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kelompok masyarakat penerima layanan sosial antara lain merupakan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang terdiri dari 26 indikator serta masyarakat yang terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pelaksanaan urusan ini memiliki pengaruh dalam mendukung kemajuan pembangunan serta kesejahteraan manusia.

Adapun sarana dan prasarana Pelayanan Dasar yang telah tersedia dan dapat dimanfaatkan keberadaannya meliputi Panti/Yayasan sebagai sistem sumber dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di tingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan penerima pelayanan diantaranya :

1. Yayasan Penyantun Anak Yatim (YPAY)
2. Yayasan Penyantun Anak Cacat (YPAC)
3. SLB N 1 Sawahlunto
4. SLB N 2 Sawahlunto
5. SLB Rumah Tia
6. SLB YKB Talawi
7. SLB AL Kausar Kubang
8. SLB Tunas Harapan Silungkang

Dalam menunjang hal tersebut, dalam rangka melaksanakan pelayanan serta mendukung salah satu pencapaian SPM Urusan Sosial, maka DinsosPMDPPA sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas Urusan Sosial melahirkan inovasi DIMANJA (Disabilitas Mandiri dan Berjaya) yang digagas sejak tahun 2021. Inovasi DIMANJA merupakan wujud penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas yaitu melalui layanan rehabilitasi sosial dengan menyalurkan bantuan transportasi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ke sekolah, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bantuan kebutuhan dasar penyandang disabilitas, pelaksanaan kelas kemandirian bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Program ini melibatkan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Keluarga Spesial Indonesia (FORKESI) Kota Sawahlunto, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Di sisi lain, permasalahan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang cukup kompleks, perlu penanganan/partisipasi bersama antara pemerintah, tokoh agama/adat, masyarakat serta pihak ketiga lainnya. Program kegiatan harus lebih tajam, terpadu (lintas sektoral) dan berkelanjutan mengingat Urusan Sosial adalah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

Mayoritas program bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial dengan sasaran yang mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berikut adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Sawahlunto 2024 hasil pemutakhiran oleh Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai dasar pemberian bantuan-bantuan pemerintah.

Tabel 2.133
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kota Sawahlunto Tahun 2024

URAIAN	LEMBAH SEGAR	BARANGIN	SILUNGKANG	TALAWI	JUMLAH
Jumlah penduduk DTKS (jiwa)	3.649	5.855	3.500	3.840	16.844
Jumlah kepala keluarga DTKS (jiwa)	1.346	2.222	1.298	1.575	6.441

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2024

DTKS ini memuat data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS diverifikasi rutin secara berjenjang mulai dari Petugas Sosial Masyarakat (PSM) disetiap Desa/Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Dinas Teknis Tingkat Kota, Provinsi dan Pusat. Kriteria penduduk yang belum sejahtera ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan status kesejahteraan berkategori :

a. Desil 1, yaitu rumah tangga dalam kelompok 10 persen terendah (sangat miskin) yang berhak menerima bantuan : Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
b. Desil 2, yaitu rumah tangga dalam kelompok 10 persen terendah (miskin) yang berhak menerima bantuan : Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
c. Desil 3, yaitu rumah tangga dalam kelompok 20-30 persen terendah (hampir miskin) yang berhak menerima bantuan : Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).

d. Desil 4, yaitu rumah tangga dalam kelompok 30-40 persen terendah (rentan miskin) yang berhak menerima bantuan : Program Pemerintah Berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat).

Dalam hal pelayanan terhadap masyarakat yang masuk dalam DTKS tidak terlepas dari peran PSM di setiap desa/kelurahan dan TKSK di setiap kecamatan. Adapun jumlah serta persentase keaktifan tiap unsur tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.134
Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK) di Kota Sawahlunto Tahun 2024

Uraian	Jumlah	Persentase Keaktifan
Petugas Sosial Masyarakat (PSM)	37	100
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK)	4	100

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2024

Pada tahun 2024, Kota Sawahlunto mendapat banyak jenis bantuan yang diterima oleh masyarakat yang terdata dalam DTKS. Jenis bantuan ini digunakan untuk pengentasan kemiskinan maupun sebagai salah satu upaya penanganan stunting. Adapun jenis bantuan serta jumlah penerima manfaat bantuan yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial, APBD Kota melalui DinsosPMDPPA, serta APBDes melalui pemerintah desa, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.135
Jenis Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Kota Sawahlunto Tahun 2024

No	Jenis Bantuan	Penerima Manfaat (org)	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana
I	**Kegiatan APBD Kota Sawahlunto**			
1	Bantuan permakanan untuk lansia	380	184.119.500	APBD
2	Bantuan uang tunai untuk lansia	110	220.000.000	APBD
3	Penyediaan alat bantu untuk disabilitas	12	8.375.000	APBD
4	Bantuan transportasi sekolah anak berkebutuhan khusus	85	140.250.000	APBD
5	Bantuan permakanan untuk Korban Bencana	31	39.271.000	APBD
6	Bantuan permakanan untuk anak atau disabilitas terlantar	40	20.000.000	APBD
7	Bantuan Tidak Terencana (BTT)	23	60.000.000	APBD
8	Usaha ekonomi produktif (UEP)	2	29.887.900	APBD
9	Bantuan uang tunai untuk anak terlantar	238	190.400.000	APBD
II	**Prog/Kegiatan dari Kementerian**			
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	1.432	3.646.807.940	APBN
2	Program Sembako (BPNT)	1.435	3.444.000.000	APBN
3	Bantuan Alat Bantu			
4	Permakanan lansia	25	215.952.000	APBN
5	Permakanan Disabilitas	42	339.592.000	APBN
6	Bantuan Langsung Tunai Dampak El Nino			
7	Bantuan YAPI (Yayasan Piatu)	101	126.000.000	APBN
8	PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara)	48	115.093.567	APBN
III	**Prog/Kegiatan dari Desa**			
1	BLT 27 Desa	862	3.103.299.000	APBDes
	TOTAL KESELURUHAN	**4.866**	**11.883.047.907**	

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto 2024

Pada tahun 2024, masyarakat Kota Sawahlunto mendapat banyak jenis bantuan, baik dari APBDes, APBD Kota serta Pemerintah Pusat untuk masyarakat yang masuk ke dalam DTKS sebagai bentuk dukungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan serta perlindungan sosial. Namun jumlah bantuan ini secara kuantitatif masih rendah, karena hanya 4.866 orang yang mendapat bantuan dari total 16.844 peserta DTKS (28,9%).

Tabel 2.136
Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Sosial Tahun 2020 – 2024

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	53,28	89,52	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2024

Dari kedua indikator IKD urusan sosial, sudah mencapai realisasi 100%. Diharapkan upaya pemerintah dalam pelaksanaan SPM tetap konsisten untuk mengupayakan yang terbaik dan maksimal agar kesejahteraan, perlindungan serta jaminan kehidupan masyarakat semakin meningkat.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di Bidang Ketenagakerjaan yang menjadi urusan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja (15 sampai dengan 64 tahun). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Berikut ini dijelaskan tentang ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adalah karena adanya pengaduan terkait masalah hak, masalah jamsostek, masalah upah pekerja, sistem kontrak kerja waktu tertentu dan PHK. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.137
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sengketa Pekerja - Pengusaha	2	3	3	10	2
2	Jumlah Sengketa Selesai	2	3	3	10	2
3	Jumlah Perusahaan	80	66	58	65	65
4	*Rasio Sengketa*	*2,50*	*4,55*	*5,17*	*15,38*	*3,08*

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sengketa pekerja-pengusaha tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif. Sengketa pada tahun 2020-2024 dipicu oleh masalah jamsostek, dan adanya hak-hak pekerja yang belum terpenuhi sehingga menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sengketa pengusaha dengan pekerja selama tahun 2020-2024 ini diselesaikan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat dengan status 100% terselesaikan.

2. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja adalah menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Objek perlindungan tenaga kerja antara lain meliputi perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak dan penyandang cacat, perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja. Berikut disajikan jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja dan capaian indikator perlindungan tenaga kerja Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.138
Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan dan Capaian Indikator Perlindungan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perusahaan	80	66	58	65	65
2	Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan	3.070	2.922	2.705	2.604	2.308
3	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (Orang)	2.679	2.125	2.125	2.464	21.155
	Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (%)	87,26	72,72	78,56	94,62	62,19
4	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan (Peraturan Perusahaan)	7	11	16	7	3
	Persentase Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (%)	8,75	16,67	27,59	10,77	4,62

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
5	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan (PKB)	2	2	2	2	0
	Persentase Perusahaan yang memiliki PKB (%)	2,50	3,03	3,45	3,08	0
6	Jumlah Perusahaan yang memiliki LKS Bipartit (Perusahaan)	4	6	10	11	12
	Persentase Perusahaan yang memiliki LKS Bipartit (%)	5,00	9,09	17,24	16,92	18,46
7	Struktur Skala Upah	-	-	-	-	-
8	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 (Perusahaan)	12	18	16	14	22
	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3 (%)	15,00	27,27	27,59	21,54	33
9	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Perserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	71,25	77,27	86,21	89,23	91

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase tenaga kerja yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan menunjukkan tren yang fluktuatif yaitu pada tahun 2020 sebanyak 87,26%, turun menjadi 72,72% pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 78,56%, pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali menjadi 94,62%, dan tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 62,19%. Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan, PKB dan LKS Bipartit dari tahun 2020-2024 rendah yaitu kurang dari 30%. Sedangkan untuk struktur skala upah belum ada, selama tahun 2020-2024 Kota Sawahlunto memakai dan berpedoman kepada Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat. Untuk persentase perusahaan yang menerapkan K3 menunjukkan tren yang meningkat yaitu 15% tahun 2020 naik menjadi 33% tahun 2024, tapi persentase ini juga rendah karena tidak sampai 50% dari perusahaan yang ada. Dengan rendahnya capaian indikator perlindungan tenaga kerja ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsostek.

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari Kerja adalah individu yang berada dalam masa produktif yaitu umur 15-64 tahun dimana masih mencari pekerjaan. Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar/mengurus kartu AK-1. Berikut disajikan pencari kerja yang ditempatkan di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.139
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	2020			2021			2022			2023			2024		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	2	2	4	6	23	29	11	23	34	66	9	75	83	11	94
2	Jumlah Pencari kerja yang mendaftar/mengurus kartu AK-1 (Orang)	181	222	403	165	135	300	163	115	278	139	53	192	151	64	215
3	**Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)**	**1,10**	**0,90**	**0,99**	**3,64**	**17,04**	**9,67**	**6,75**	**20,00**	**12,23**	**47,48**	**16,98**	**39,06**	**54,96**	**17,18**	**43,72**

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2024, Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2020-2024, persentase pencari kerja yang ditempatkan berfluktuatif. Pada tahun 2020 jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebesar 0,99%, dan naik menjadi 9,67% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 12,23%, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 39,06%, pada tahun 2024 mengalami kenaikan lagi menjadi 43,32%. Tapi persentase ini masih rendah (<50%), masih rendahnya persentase pencari kerja yang ditempatkan ini disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, tidak adanya pencari kerja yang melapor/mengembalikan kartu pencari kerja (kartu AK-1) ke DPMPTSPNaker saat mereka sudah diterima bekerja.

Faktor lain yang menyebabkan pencari kerja sulit mendapatkan pekerjaan adalah sebagai berikut :

a. Persaingan dunia kerja
   Banyaknya persaingan dalam dunia kerja dapat menyulitkan pencari kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan impiannya.
b. Kemampuan, skill dan pendidikan
   Kemampuan, skill dan pendidikan seseorang juga termasuk faktor penyebab sulitnya mendapatkan pekerjaan.
c. Pengalaman
   Pengalaman juga menentukan apakah seseorang layak bekerja untuk perusahaan tersebut atau tidak. Orang yang berpengalaman adalah orang yang terbiasa dengan dunia kerja dan memahami kemampuan yang dimilikinya.
d. Minim informasi pekerjaan/networking dan lowongan kerja.

4. Pelatihan Tenaga Kerja

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan produktivitas serta meningkatkan skill tenaga kerja di Kota Sawahlunto maka Dinas yang membidangi tenaga kerja yaitu Dinas PMPTSPNaker telah melakukan berbagai upaya yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan berbasis kewirausahaan. Pada pertengahan tahun 2019 DPMPTSPNaker telah mendirikan/membentuk UPTD Balai Latihan Kerja (UPTD dari Dinas PMPTSPNaker), yang mana UPTD BLK ini khusus bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan dan keterampilan kerja berbasis kompetensi untuk mencetak tenaga kerja yang handal dan siap pakai. Pelatihan yang telah dilaksanakan di UPTD BLK antara lain adalah service hp, otomotif, menjahit, listrik, las, mebel, tata boga, bangunan, ac split dan lain-lain.

Berikut disajikan besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, kewirausahaan, dan berbasis masyarakat selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.140
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi, Kewirausahaan Dan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Kategori	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tenaga Kerja yang dilatih (orang)	Orang	86	160	128	240	224
2	Pendaftar Pelatihan berbasis Kompetensi (orang)	Orang	125	200	150	295	280
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi (%)**	**Persen**	**69**	**80**	**86**	**81**	**80**
No	**Kategori**	**Satuan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Tenaga Kerja yang dilatih (orang)	Orang	106	92	90	44	309
2	Pendaftar Pelatihan berbasis kewirausahaan (orang)	Orang	120	105	110	265	389
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%)**	**Persen**	**88**	**88**	**82**	**17**	**79**
No	**Kategori**	**Satuan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Tenaga kerja yang dilatih (orang)	Orang	-	115	-	64	48
2	Pendaftar Pelatihan berbasis masyarakat (orang)	Orang	-	170	-	80	60
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat (%)**	**Persen**	**-**	**68**	**-**	**80**	**80**

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa selama tahun 2020-2024 besaran tenaga kerja Kota Sawahlunto yang mendapat pelatihan menunjukkan tren fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya sarana dan prasarana pelatihan BLK, masih terbatasnya instruktur yang ada di BLK, masih terbatasnya daya tampung BLK dan paket-paket pelatihan yang ada di BLK, serta masih kurangnya minat pencari kerja Kota Sawahlunto untuk mengikuti pelatihan, baik pelatihan yang berbasis kompetensi, berbasis masyarakat maupun pelatihan berbasis kewirausahaan.

Untuk mendukung program unggulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Sawahlunto terpilih dalam menciptakan 5 entrepreneur muda disetiap Desa/Kelurahan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri maka Kota Sawahlunto melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pencari kerja dengan peserta pelatihan sebanyak 16 orang per paket untuk masing-masing jenis pelatihan, dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan dengan peserta pelatihan sebanyak 30 orang per angkatan. Yang mana dengan adanya pelatihan ini diharapkan agar para lulusan pelatihan bisa bekerja mandiri atau berwirausaha, dan membuka/menciptakan lapangan kerja baru. Berikut disajikan data UMKM Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.141
Jumlah UMKM Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
UMKM Kota Sawahlunto	3.708	4.114	4.328	4.677	4.730

Sumber Data : Dinas Koperindag Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini tentunya merupakan buah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upayanya untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha/UMKM karena UMKM adalah jaring pengaman dan penggerak perekonomian.

5. Lapangan Usaha Penduduk yang Bekerja

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Berikut disajikan data lapangan usaha selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.142
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha Tiga Kategori	2020			2021			2022			2023			2024		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Pertanian	3.710	1.936	5.646	3.628	1.919	5.547	2.881	1.765	4.646	3.729	1.571	5.300	3.689	1.231	4.920
2	Manufaktur	5.521	1.840	7.361	5.295	2.055	7.350	5.945	2.821	8.766	5.942	2.184	8.126	6.440	2.665	9.105
3	Jasa	8.179	9.124	17.303	8.666	8.623	17.289	9.454	9.409	18.863	9.809	10.783	20.592	10.284	11.825	22.109
Total		**17.410**	**12.900**	**30.310**	**17.589**	**12.597**	**30.186**	**18.280**	**13.995**	**32.275**	**19.480**	**14.538**	**34.018**	**20.413**	**15.721**	**36.134**

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa selama rentang tahun 2020-2024 penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di Kota Sawahlunto menunjukkan tren yang terus meningkat dan yang paling banyak bekerja pada lapangan usaha jasa. Pada tahun 2020 penduduk yang bekerja pada lapangan usaha jasa yaitu berjumlah 17.303 orang (laki-laki sebanyak 8.179 orang dan perempuan sebanyak 9.124 orang), dan pada tahun 2024 penduduk yang bekerja pada lapangan usaha jasa meningkat menjadi 22.109 orang (laki-laki sebanyak 10.284 orang dan perempuan sebanyak 11.825 orang). Secara keseluruhan penduduk Kota Sawahlunto yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja paling banyak pada sektor jasa seperti : Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan perusahaan dan jasa kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu perlu peningkatan pelaksanaan pelatihan bagi angkatan kerja untuk menambah skill agar dapat menciptakan lapangan usaha sendiri dalam meningkatkan wirausaha di Kota Sawahlunto.

6. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi adalah pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi mencakup Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan dan S3, sedangkan pendidikan menengah adalah SMA/MA/SMLB/Paket C, SMK dan MAK.

Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. Bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.

Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.

Perkembangan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.143
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi
Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja pada keahlian menengah atau tinggi (orang)	na	na	13.457	15.090	
Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja (orang)	na	na	19.192	20.595	
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	na	na	*70,12*	*73,27*	

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Data Diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Kota Sawahlunto selama rentang tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan (data 2019-2021 tidak tersedia). Meningkatnya

persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.

7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah jumlah pekerja yang memiliki program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap resiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.

Adapun perkembangan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

Tabel 2.144
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Orang)	13.604	19.379	24.687	27.416	21.155
2	Jumlah Semesta Penduduk Bekerja (Orang)	30.310	30.186	32.275	34.018	36.134
3	*Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)*	*44,88*	*64,20*	*76,49*	*80,59*	*58,55*

Sumber Data : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Sawahlunto selama rentang tahun 2020-2024 berfluktuasi. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 80,59% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 44,88%. Pada tahun 2024 turun menjadi 58,55 %. Penurunan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ini menunjukkan bahwa tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Sawahlunto semakin rendah.

8. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan/diselesaikan oleh seseorang yang ditandai dengan ijazah/sertifikat. Berikut disajikan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.145
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Kegiatan Utama	2020					2021					2022					2023					2024				
		Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan*				Jml	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan*				Jml	Pendidikan yang ditamatkan*				Jml	Pendidikan yang ditamatkan*				Jml	Pendidikan yang ditamatkan*				Jml
		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4	
1	Bekerja	8867	4841	9969	6633	30310	8299	4995	10275	6617	30186	8.612	4.471	12.040	7.152	32.275		13.423	12.868	7.727	34.018	9.344	5.187	14.824	6.779	36.134
2	Pengangguran Terbuka	476	286	1377	570	2709	170	368	981	538	2057	452	456	445	345	1.698		400	1.079	303	1.782	273	255	1.200	394	2.122

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2024

Catatan :

1. *≤ SD*
2. *SLTP/Sederajat*
3. *SLTA/Sederajat*
4. *Perguruan Tinggi*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuatif. Tahun 2020 pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang terbanyak adalah tamatan SLTA/Sederajat yaitu 34,36% atau sebanyak 11.346 orang, dan tahun 2024 pendidika tertinggi yang ditamatkan yang terbanyak juga tamatan SMA/Sederajat yaitu meningkat menjadi 41,89% (16.024 orang). Jumlah pengangguran terbuka di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir yang terbanyak juga adalah tamatan SLTA/Sederajat yaitu pada tahun 2020 sebesar 50,83% atau sebanyak 1.377 orang, dan pada tahun 2024 jumlah pengangguran terbuka yang tamat SLTA/Sederajat mengalami peningkatan menjadi 56,55% atau sebanyak 1.200 orang. Akan tetapi pengangguran pada tamatan perguruan tinggi mengalami penurunan dari 21,04% atau sebanyak 570 orang tahun 2020 turun menjadi 18,57% atau sebanyak 394 orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran di Kota Sawahlunto banyak dari pengangguran terdidik. Oleh karena itu dibutukan upaya dan kebijakan nyata dari pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran terdidik antara lain adalah :

1. Pengembangan Informasi Pasar Kerja

Kebijakan dalam membangun sistem informasi lapangan kerja dinilai cukup efektif untuk menanggulangi pesatnya pertumbuhan tenaga kerja terdidik. Pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah membangun sistem informasi pasar kerja karena dilatarbelakangi oleh minimnya akses informasi lowongan kerja bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja tersebut hingga kini belum mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya sistem informasi tersebut, diharapkan para pencari kerja mendapatkan akses lowongan kerja dengan cepat.

2. Reformasi Pelatihan Kerja

Reformasi pelatihan kerja merupakan sebuah kebijakan yang mereformasikan sistem pelatihan kerja yang sudah ada dengan lebih baik dan lebih inovatif. Reformasi tersebut merupakan suatu bentuk pembaharuan dari metode pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja sebelumnya. Dengan adanya reformasi sistem, BLK diperkuat peran dan fungsinya agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Terobosan yang digagas adalah Revitalisasi, Rebranding, dan Re-orientasi BLK (3R). Program tersebut bukan hanya mampu menciptakan tenaga kerja yang handal, tetapi juga fokus sesuai dengan kebutuhan industri. Selain diberikan pengetahuan akan skill dalam bekerja, mereka juga dibekali dengan pengetahuan manajemen pemasaran dan pengetahuan seputar perilaku organisasi serta hubungan perindustrian. Jadi, diharapkan tenaga kerja terdidik tersebut mampu memantapkan kemampuannya agar dapat bersaing di dunia kerja dan mempunyai sertifikat agar cepat diserap DUDI.

Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan angka pengangguran terdidik semakin menurun setiap tahunnya, berdasarkan kebijakan tersebut, diharapkan terdapat kebijakan yang lebih efektif lagi seperti pelatihan berwirausaha sejak dini. Dengan adanya pelatihan berwirausaha, tenaga kerja terdidik semakin tergerak untuk menciptakan lapangan kerja sehingga peningkatan jumlah lapangan kerja bisa berbanding lurus dengan peningkatan jumlah tenaga kerja.

Berikut disajikan capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Kota Sawahlunto secara keseluruhan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.146
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran (%)	8,20	6,38	5	4,98	5,55
2	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Orang)	4	29	34	75	94
3	Jumlah Tenaga Kerja yang Berwirausaha (Orang)	558	893	868	1.148	1.589
4	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu Rencana Tenaga Kerja (%)	64	100	67	69	100
5	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi (%)	10,9	65,63	76,56	55,80	64
6	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	9,11	9,37	9,11	9,03	8,84
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Perserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	71,25	77,27	86,21	89,23	91
8	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota) (%)	0,99	9,67	12,23	39,06	43,32
9	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0	0	0	0	0

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
10	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	0,99	9,67	12,23	39,06	43,32
11	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek (%)	87,26	72,72	78,56	94,62	62,19
12	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0
13	Rasio Lulusan S1/S2/S3	14,02	15,46	15,28	15,10	14,85

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa capain indikator kinerja urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 masih tergolong rendah, terutama pada tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dan masih rendahnya persentase tenaga kerja yang ditempatkan. Pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 5,55%, produktivitas tenaga kerja hanya 8,84 juta per tenaga kerja/tahun, dan persentase tenaga kerja yang ditempatkan hanya 43,32%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya skill pencari kerja, mismatch antara kualifikasi pendidikan dengan pekerjaan (DUDI), minimnya informasi lowongan kerja dan terbatasnya lapangan kerja yang ada di Kota Sawahlunto, kurangnya minat dan motivasi angkatan kerja Kota Sawahlunto untuk berwirausaha, serta kurangnya minat dan motivasi pencari kerja Kota Sawahlunto untuk bekerja di luar daerah/luar negeri. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama dan ditindaklanjuti melalui berbagai kegiatan seperti pelaksanaan Job Fair, pemagangan pencari kerja, pelatihan keterampilan dan vokasi bagi pencari kerja, penyuluhan kewirausahaan, penyediaan fasilitas informasi ketenagakerjaan, mengadakan MoU dengan perusahaan-perusahaan lokal tentang penginformasian lowongan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja lokal untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia di perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Kota Sawahlunto, meningkatkan koordinasi di dalam menguatkan fungsi-fungsi pelayanan penempatan tenaga kerja antara pemerintah provinsi, pemerintah kota serta DUDI dan perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Gambaran umum pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran di dalam kehidupan berumah tangga. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.147
Jumlah KDRT Di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah KDRT	5	3	3	6	5
2.	Jumlah Rumah Tangga/KK	20.330	20.658	21.258	21.718	22.007
3.	Rasio KDRT	0,000245	0,000145	0,000141	0,000276	0,000227
4.	Persentase bantuan penanganan KDRT (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA Tahun 2024, BPS 2024

Kasus kekerasan pada perempuan dan anak ibarat fenomena gunung es, di mana kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Dari data di atas, kasus KDRT yang dilaporkan pada UPTD PPA mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pemerintah kota Sawahlunto dituntut harus senantiasa tetap waspada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dan membuka akses bagi korban kekerasan untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat di antaranya adalah UPTD PPA Kota Sawahlunto ataupun PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Dengan hal tersebut, diharapkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat semakin ditekan.

Kepedulian Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan penelantaran.

Berikut data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Tabel 2.148
Data Kasus yang Masuk dan Diselesaikan oleh UPTD PPA
Tahun 2024

NO	Jenis Kasus	Tahun 2024		
		Jumlah Kasus Terlapor		Jumlah Kasus Terselesaikan
		Anak	Perempuan	
1	Kekerasan Seksual	11	0	11
2	Kekerasan Psikis	0	1	1
3	Kekerasan KDRT	0	5	5
4	Kekerasan Fisik	1	0	1
5	ABH	12	0	12
6	Kenakalan Anak	5	0	5
7	Hak Asuh Anak	5	2	7
8	Bully	5	0	5
9	Penelantaran	3	1	4
10	TPPO	0	1	1
11	Anak Korban Pencurian	1	0	1
12	Anak Saksi	1	0	1
13	Pendidikan	0	1	1
Total		**44**	**11**	**55**
Persentase Bantuan Penanganan Kasus				**100 %**

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2024

Terdapat kenaikan jumlah kasus terlapor di tahun 2024, di mana angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor di tahun 2023 yaitu sebanyak 31 kasus, namun di tahun 2024 naik menjadi 55 kasus. Dalam hal kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor di tahun 2024 sebanyak 24 kasus atau 77,4%, secara tidak langsung menandakan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penyelesaian kasus kekerasan yang tengah mereka alami semakin meningkat.

Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak adalah warga Negara yang rentan dikenai tindakan kekerasan atau menjadi pelampiasan orang terdekat ketika ada masalah dalam keluarga atau lingkungannya. Faktor penyebab seperti : ketimpangan ekonomi, mental & spiritual orang tua yang lemah, lingkungan yang tidak kondusif, serta belum bijaknya masyarakat dalam menggunakan teknologi serta menghadapi modernisasi, mengakibatkan perempuan dan anak-anak sering menjadi korban kekerasan. Hal ini adalah tugas besar bagi Pemerintah Kota serta seluruhstakeholder dan lapisan masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pemerintah Kota Sawahlunto telah memfasilitasi seluruh kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, bantuan hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, home visit, outreach, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan lainnya.

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis Hak Anak dan pembangunan yang Responsif Gender.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang Pengarusutamaan Gender, maka Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto dapat dijadikan sebagai gambaran kondisi Kesetaraan Gender, hal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.149
Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto
Tahun 2021 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,285	0,184	0,223	0,199	0,270
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,48	95,73	95,17	95,36	95,73
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,87	65,48	65,62	62,55	62,49

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2025

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IKG mengukur kesenjangan dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender, dan pasar tenaga kerja. Adapun indikator penyusun IKG yaitu (i) dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), (ii) dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta (iii) dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. Semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya.

Berbeda dengan IKG, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Permberdayaan Gender (IDG) memiliki cara ukur yang berbeda. Nilai IPG dan IDG yang semakin besar menandakan semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki- laki. IPM merupakan indikator komposit yang dihitung dari Usia Harapan Hidup Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita antara perempuan dan laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan kesempatan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Adapun indikator penyusunnya yaitu: Keterlibatan perempuan dalam parlemen, Perempuan sebagai tenaga profesional, Pengeluaran perkapita perempuan.

Adapun persentase keterlibatan perempuan dilembaga pemerintahan serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.150
Persentase Keterlibatan Perempuan Di Lembaga Pemerintahan
Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020			2021			2022			2023			2024		
	L	P	Persentase Perempuan	L	P	Persentase Perempuan	L	P	Persentase Perempuan	L	P	Persentase Perempuan	L	P	Persentase Perempuan
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi di Kota Sawahlunto	704	1348	65,69%	689	1395	66.94%	665	1375	67.40%	641	1314	67.21%	610	1266	67.48%
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	596	73,85%
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal di Kota Sawahlunto	111	131	54,13%	112	139	55.38%	127	147	53.65%	130	156	54.55%	132	156	54.16%
Jumlah	**815**	**1497**	**64,47 %**	**801**	**1534**	**65.70%**	**792**	**1522**	**65.77%**	**771**	**1470**	**65.60%**	**953**	**2018**	**67,92%**

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2021 - 2025

Tabel 2.151
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan)
Tahun 2020 - 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan)	59,50	55.55	60.40	59.34	63.35

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2024

Dari data di atas, bisa di tarik benang merah bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di instansi pemerintah lebih dominan dari laki-laki. Hal ini semestinya merupakan angka yang positif dan mampu menyempitkan angka ketimpangan gender.

Dalam hal ini, salah satu penghargaan Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka pengentasan ketimpangan gender dilakukan dengan pemberian Anugerahan Parahita Ekapraya yang sejak tahun 2024 diganti penamaannya dengan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE). Kegiatan Anugerahan Parahita Ekapraya atau Penganugerahan Parahita Ekapraya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali

Adapun perolehan predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya yang didapat oleh Kota Sawahlunto yaitu :

Tabel 2.152
Predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

URAIAN	2021	2023
Anugerahan Parahita Ekapraya	Utama	Utama

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2024

Selama Periode 2020-2024, Kota Sawahlunto mendapatkan Anugerahan Parahita Ekapraya atau Penganugerahan Parahita Ekapraya dengan predikat Utama sebanyak dua kali, selanjutnya kegiatan yang sama akan dilaksanakan pada tahun 2025. PPE merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PPPA sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran serta para pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang dilakukan.

Dalam hal perlindungan anak, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat yang tentunya harus ditindaklanjuti secara bersama. Sebagai salah satu upaya dari penguatan sistem perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun suatu indeks untuk mengukur capaian perlindungan anak di Indonesia. Alat ukur yang digunakan yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Adapun capaian IPA, IPHA dan IPKA Kota Sawahlunto yaitu :

Tabel 2.153
Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA), Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

	IPA					IPHA					IPKA				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Sawahlunto	-	65,70	67,61	65,47	-	-	62,90	63,78	62,56	-	-	79,71	82,73	78,66	-
Sumatera Barat	-	61,98	63,65	62,38	-	-	59,64	61,37	60,42	-	-	72,86	74,42	72,87	-

Sumber Data : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS Tahun 2024

Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) untuk Kota Sawahlunto pada tahun 2020 belum dihitung, sedangkan untuk tahun 2024 datanya belum dilaunching (diterbitkan) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) ataupun Badan Pusat Statistik (BPS).

Indeks Perlindungan Anak (IPA) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Sedangkan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan dalam upaya pemenuhan hak anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan khusus anak. Jadi IPA merupakan indikator komposit yang mencakup IPHA dan IPKA.

Di sisi lain, partisipasi Anak dalam Pembangunan dilakukan sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dengan menggunakan prinsip-prinsip pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana tercantum pada Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu: non-Diskriminasi, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan menghargai partisipasi anak. Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan dalam wadah Forum Anak.

Tabel 2.154
Jumlah Forum Anak Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Forum Anak Tk. Kota Sawahlunto	1	1	1	1	1
2	Forum Anak Tingkat Kecamatan	4	4	4	4	4
3	Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan	37	37	37	37	37

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2024

Forum Anak dibina oleh Pemerintah secara berjenjang dalam rangka memenuhi hak dan partisipasi anak dalam pembangunan. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Mendukung hal tersebut, adapun prasarana yang mendukung diataranya :

Tabel 2.155
Prasarana Ramah Anak Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Desa Ramah Anak	27	27	27	27	27
2	Kelurahan Ramah Anak	-	10	10	10	10
3	Sekolah Ramah Anak	181	181	181	181	181
4	Puskesmas Ramah Anak	6	6	6	6	6
5	Masjid Ramah Anak	2	2	2	4	4

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2024

Dalam perwujudan pemenuhan dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sementara di Kota Sawahlunto diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang perlindungan Perempuan dan Anak, maka dikembangkan Program Kota Layak Anak yang terdiri dari Kelembagaan dan 5 Klaster pemenuhan hak anak, yaitu : 1. Hak Sipil dan Kebebasan, 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya serta 5. Perlindungan Khusus. Dalam penilaian KLA terdiri dari predikat Pratama, Madya, Nindya dan Utama. Pemerintah Kota Sawahlunto akan berupaya untuk meningkatkan kriteria KLA. Adapun predikat pelaksanaan Kota Layak Anak yang diperoleh oleh Kota Sawahlunto dari tahun 2020-2024 yaitu :

Tabel 2.156
Predikat Kota Layak Anak Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2024

Adapun data realisasi pencapaian IKD pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.157
Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Tahun 2024

NO	INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2021	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pemberdayaan gender / IDG	65,87	65,48	65,62	62.55	62,49
2	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	20	20	20	20	20
3	Rasio KDRT	0,000245	0,000145	0,000141	0,000276	0,000227
4	Persentase Kelurahan ramah anak (%)	-	50	50	50	100
5	Persentase sekolah ramah anak (%)	100	100	100	100	100
6	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	5,3	3,4	4,4	16.2	8,49
7	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100
8	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-	17,85	18,02	34,83	49,47
9	Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%)	-	94.84	98.98	98.99	97

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2024

Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu dilakukan berbagai upaya untuk menekan angka Rasio KDRT, Rasio kekerasan terhadap perempuan, serta mendorong peningkatan nilai indikator lainnya. Untuk indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD menanjak naik di tahun 2023 dan mengalami penurunan di tahun 2024, hal ini dikarenakan tagging anggaran pendukung ARG lebih kompleks di tahun 2023 dibanding tahun 2024. Untuk capaian indikator rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, angka kekerasan pada perempuan yang terlapor sejumlah 4 kasus (dari 22.406 perempuan 18 tahun ke atas). Tahun 2022 tetappada 4 kasus terlapor (dari 22.187 perempuan 18 tahun ke atas(, pada tahun 2023 angka kekerasan pada perempuan yang terlapor naik menjadi 8 kasus (dari 22.964 perempuan 18 tahun ke atas) dan pada tahun 2024 terdapat 11 kasus yang terlapor (dari 22.234 perempuan 18 tahun ke atas). Indikator rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) merupakan perbandingan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan berusia 18 tahun ke atas yang terjadi pada suatu daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menjelaskan rumus Indikator rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yaitu jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100.000.

Untuk indikator persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan telah mendekati capaian 100%. Indikator tersebut diukur melalui jumlah peserta inovasi SILO (Sekolah Istri Teladan Sawahlunto) yang diwisuda per jumlah keseluruhan peserta SILO. Inovasi SILO merupakan salah satu inovasi yang diciptakan sebagai upaya pemberdayaan perempuan yang dirancang untuk mewujudkan ketahanan keluarga di Kota Sawahlunto. Inovasi SILO ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya angka perceraian, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta adanya persoalan sosial lainnya dalam pola asuh anak di keluarga. SILO pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021 di 8 (delapan) desa dan dilaunching pada tanggal 26 Juni 2021 oleh Walikota Sawahlunto. Tahun selanjutnya 2022 SILO dilaksanakan di seluruh Desa (27 Desa) dan tahun 2023 dilaksanakan di seluruh Desa dan Kelurahan se-Kota Sawahlunto (27 Desa 10 Kelurahan) dan tahun 2024 dilaksanakan pada 18 desa/kelurahan. Tahun 2021 dari 155 orang peserta ada sebanyak 147 orang yang diwisuda (94,8%), tahun 2022 dari 394 orang peserta ada sebanyak 390 orang yang diwisuda (98,9%), tahun 2023 dari 495 peserta 490 peserta (98.9%) diwisuda, dan tahun 2024 sebanyak 236 peserta diwisuda dari 243 peserta (97%). Artinya sudah ada 1.263 keluarga yang ditingkatkan kualitas keluarganya. Inovasi SILO merupakan salah satu inovasi unggulan di Kota Sawahlunto dalam penilaian Innovative Government Award (IGA) dan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) pada tahun 2023.

C. *Urusan Pemerintahan Bidang Pangan*

Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.

Adapun realisasi capaian kinerja bidang pangan Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.158
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Bidang Pangan
Tahun 2020 - 2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	67,36	68,91	73,85	84,38	83,45
Konsumsi keragaman pangan (kkal/kapita/hari)					
padi-padian	858,40	944	995,2	1050,08	1114
Umbi-umbian	38,60	32,2	62,6	43,91	48
Pangan Hewani	238,30	236,3	247,4	262,22	277
Minyak dan Lemak	310,50	343	314,3	298,91	322
Buah/Biji Berminyak	45,70	39,9	34,3	42,34	40
Kacang-kacangan	64,20	71,8	53,3	58,93	68
Gula	33,20	21,3	25,4	54,53	62
Sayur dan buah	112,30	106,7	104,4	106,03	114
lain-lain	10,60	9,5	11,3	33,62	41
Persentase keamanan pangan segar yang dikonsumsi (%)	96,33	95,14	95,20	98,00	93,6
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (%)	184	165	184,2	189,68	211,5
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	83,70	84,5	85,1	88,2	91,1
Ketersediaan Pangan Utama (Kal/hr)	1579	1618	1849	1757	1338,74
Ketersediaan Energi Protein Perkapita Kkal/Kap/hr)	3131	3133	3473	3447	3243
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan kali)	4	4	4	4	4

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Mulai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan Indeks Ketahanan Pangan ini menandakan bahwa kondisi terpenuhinya pangan Kota Sawahlunto tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, dengan peningkatan di lima tahun terakhir. Untuk konsumsi keragaman pangan seperti padi padian pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu sebesar 1114 kal/hr dan tahun 2023 sebesar 1050,08 kal/hr, umbi-umbian dan pangan hewani mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2024, minyak dan lemak mengalami kenaikan pada tahun 2024 ini. Untuk buah dan biji berminyak mengalami penurunan dari pada tahun 2023, sedangkan kacang- kacangan mengalami sedikit peningkatan. Komoditas gula juga mengalami peningkatan dari pada tahun 2023, demikian juga sayur dan buah mengalami peningkatan pada tahun 2023 ini dan lain-lain pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari pada tahun 2023. Persentase keamanan pangan segar yang dikonsumsi mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 98,00 % sedangkan tahun 2024 sebesar 93,6 %. Secara keseluruhan untuk konsumsi keragaman pangan yang paling besar konsumsi keragaman pangan kota Sawahlunto sampai 2024 adalah pada padi-padian, ini dikarenakan konsumsi keragaman pangan sangat berpengaruh dari pola konsumsi masyarakat, untuk Sumatera Barat umumnya dan Sawahlunto pada khususnya padi-padian/beras masih menjadi bahan utama yang di konsumsi. Dengan konsumsi keragaman pangan ini agar pola konsumsi tidak berfokus pada satu jenis bahan pangan saja, sehingga itu perlu adanya diversifikasi produk untuk makanan pokok di Kota Sawahlunto dengan menggiatkan sosialisasi terhadap aneka ragam konsumsi

untuk beberapa bahan pangan. Untuk Ketersediaan Pangan Utama mengalami penurunan yang pada tahun 2024 sebesar 1338,74 Kal/hr sedangkan tahun 2023 sebesar 1757 Kal/hr.

Konsumsi keragaman pangan padi-padian di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan di tahun 2024, namun secara ketersediaan pangan utama mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Ini berarti Kota Sawahlunto masih perlu meningkatkan ketersedian pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan. Ini terlihat dari persentase ketersediaan pangan terutama beras di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan di Tahun 2024, dimana jumlah ketersediaan protein yang tersedia mengalami penurunan di tahun 2024, begitu juga dengan Ketersediaan Energi Protein Perkapita juga mengalami Penurunan pada tahun 2024 meskipun tidak begitu signifikan. Dilihat dari keamanan pangan, pembinaan keamanan pangan dari tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 97,14 %. Ini ditandai dengan dilakukannya pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan setiap triwulannya sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Inovasi yang telah dilakukan dalam bidang pangan beberapa adalah inovasi Mamareso Kaladang (MAK ADANG) yaitu dengan pemeriksaan cemaran pestisida pada lahan lahan para petani terpilih untuk mendeteksi pencemaran pestisida. Adapun Inovasi di Bidang Ketahanan Pangan yaitu Informasi Via Billboard Running Teks (Info Barek) yaitu menyampaikan Info Harga Pasar Pangan hasil survei pada 2 Pasar Utama di Kota Sawahlunto melalui media running teks pada DInas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto setiap hari, sahan Informasi Harga Pangan dan Fluktuasi Harga yang dapat di ketahui langsung oleh masyarakat.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota lebih pada dukungan program Reformasi Agraria bekerjasama dengan kantor Pertanahan/BPN terutama dalam hal fasilitasi atau mediasi sengketa tanah yang terjadi di wilayahnya. Realisasi kinerja pada Urusan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.159
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbit kan (%)	-	-	-	-	-
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)	-	-	-	-	-
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)	56.25	-	-	-	-
5	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	-	-	-	-	-
6	Tersedianya tanah objek landreform9TOL yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	-	-	-	-	-
7	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-	-	-	-	-
8	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	-	-	18,64	18,64	18,64
9	Penyelesaian kasus tanah negara	-	-	-	-	-
10	Penyelesaian Izin Lokasi	-	-	-	-	-

Sumber Data: DPKP2LH Sawahlunto, 2024

Sesuai dengan tabel realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto tahun 2024, untuk persentase pemanfaatan tanah dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin diterbitkan (%), realisasinya tidak dapat didata, karena penerbitan izin dilaksanakan secara Online melalui aplikasi OSS yang langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%) realisasinya pada tahun 2024 tidak ada (0%).Program Kegiatan Pertanahan yang dilaksanakan disusun sebagai upaya yang strategis pemerintah Kota Sawahlunto dalam mengendalikan tata administrasi pertanahan dan tata batas wilayah dengan tetap memperhatikan prinsip yang efektif dan efisien serta tetap menjaga stabilitas dan kondisi yang aman dan nyaman dalam penguasaan status hak atas tanah dengan meminimalisir timbulnya konflik dan masalah pertanahan dan tapal batas wilayah Kota Sawahlunto.

Tabel 2.160
Data Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Sawahlunto

NO	Nama OPD	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Total Bidang Tanah
1	Dinas Pendidikan	51	30	81
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	11	22	33
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1	0	1
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	415	416
5	Dinas Sosial PMDes dan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	2
6	Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan perikanan	5	3	8
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	2	0	2
8	Dinas Perhubungan	0	1	1
9	Dinas Koperasi UKM perdagangan dan Perindustrian	3	4	7
10	Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga Kerja	1	0	1
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	2	2
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	0	3	3
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	0	1
14	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	1	0	1
15	Inspektorat	1	0	1
16	Sekretariat Daerah Kota	19	60	79
17	Sekretariat DPRD	2	0	2
18	PPKD	4	0	4
19	Badan Kesbang Politik dan PBD	1	0	1
20	Kecamatan Silungkang	2	1	3
21	Kecamatan Lembah Segar	6	8	14
22	Kecamatan Barangin	12	0	12
23	Kecamatan Talawi	1	0	1
	Total	126	550	676

Sumber Data : BPKAD Sawahlunto, 2024

Dari tabel diatas dilihat bahwa jumlah aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Sawahlunto sebanyak 23 Perangkat Daerah yang bersertifikat sebanyak 126 dan yang belum bersertifikat sebanyak 550 dengan total sebanyak 676 dengan persentase lahan bersertifikat 18,64%.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan. dan dinamika vegetasi.

Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :

- Sangat Baik : 90 ≤ IKLH ≤ 100
- Baik : 70 ≤ IKLH < 90
- Sedang : 50 ≤ IKLH < 70
- Kurang : 25 ≤ IKLH < 50
- Sangat Kurang : 0 ≤ IKLH < 25

Rumus yang digunakan untuk IKLH Kota adalah;

IKLH : (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Tabel 2.161
IKLH Kota Sawahlunto

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	62,74	62,39	62,89	63,10	60,89

Sumber Data : DPKP2LH 2024

Berdasarkan data pantauan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, IKLH Kota Sawahlunto berkisar antara 60 hingga 63 yang berada pada kategori “sedang” (50 ≤ x < 70). Nilai IKLH Kota sawahlunto tahun 2024 menurun kinerjanya, tahun 2024 sebesar 60,89 sedangkan IKLH pada tahun 2023 sebesar 63,10. Penurunan capaian ini disumbangkan oleh penurunan Indeks Kualitas Air (IKA). IKA ditahun 2024 sebesar 38,57 menurun jika dibandingkan tahun 2023

sebesar 48.89. IKA mengalami penurunan dikarenakan badan air sungai tercemar, dimana dari 14 titik pemantauan air Kota Sawahlunto Tahun 2024 hanya 1 titik yang memenuhi baku mutu air, 4 pencemaran sedang dan 9 titik pencemaran ringan. Hal ini mencerminkan limbah rumah tangga yang belum terkelola dengan baik.

2. Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan (*Land Cover Index*) adalah metrik yang menggambarkan distribusi dan karakteristik tutupan lahan di suatu wilayah. Ini biasanya digunakan dalam analisis spasial dan pemantauan lingkungan untuk memahami perubahan penggunaan lahan dan dampaknya terhadap ekosistem.

Indeks tutupan lahan memberikan informasi yang penting dalam pemetaan, perencanaan lingkungan, pemantauan perubahan iklim, dan analisis ekologi. Dengan memantau perubahan dalam distribusi tutupan lahan dari waktu ke waktu, kita dapat memahami dampak aktivitas manusia dan alam terhadap lingkungan, serta merencanakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Metode pemantauan indeks tutupan lahan meliputi penginderaan jauh, survei lapangan, dan analisis data spasial menggunakan teknologi GIS (Sistem Informasi Geografis). Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut:

a. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman;
b. Semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/ waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng > 25% (lebih besar dari dua puluh lima persen) dikalikan 0,6 (nol koma enam);
c. Ruang terbuka hijau seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati dikalikan 0,6 (nol koma enam);
d. Rehabilitasi hutan dan lahan, dikalikan 0,0 – 0,6 (nol koma nol sampai nol koma enam).

Kategori Indeks Tutupan Lahan adalah sebagai berikut :

- Sangat Baik : 90 – 100
- Baik : 70 - 89
- Sedang : 50 - 69
- Kurang : 25 - 49
- Sangat Kurang : 0 – 24

Tabel 2.162
IKLH Kota Sawahlunto

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Tutupan Lahan Kota Sawahlunto	%	38,76	36,95	37,01	38,12	39,73

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto 2024

Dari tabel di atas terlihat Indek Tutupan Lahan Kota Sawahlunto dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berkisar antara 36,95 hingga 39,73 dan berada pada kategori “kurang”. Hal ini dikarenakan perubahan tata guna lahan dari kawasan non terbangun menjadi terbangun, oleh karena itu perlu merencanakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

3. Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Informasi tentang timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah. Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan ;

a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti *biokonversi maggot* BSF, vermi *composting*, *biodigester*, dsb.
b. Daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan

sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.

Tabel 2.163
Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	6,852.82	6,843.52	6,882.56	6,925.99	6,988.44
2	Pengurangan Sampah Tahunan (Sampah Terolah) (Ton/Tahun)	1,472.73	1,407.80	1,701.03	1,743.90	1,829.74
3	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (% Pengurangan Sampah)	21.49	20.57	24.72	25.18	26.18

Sumber Data : Sumber Data SIPSN DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Kondisi tahun 2024, capaian Timbulan Sampah Terolah Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah dari timbulan sampah kota 6,988.44 Ton/Tahun, terolah sebesar 26.18%. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kota Sawahlunto semakin meningkat, walaupun peningkatannya belum begitu signifikan, hal ini disebabkan masih rendahnya SDM dimasyarakat serta terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan sampah.

Cakupan pelayanannya adalah:

- Sudah dilayani : 90% atau 34 desa/kelurahan
- Belum terlayani : 10% atau 3 desa/kelurahan

4. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah.

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah rumah tangga yang :

- Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah misal : fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau
- Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.

Tabel 2.164
Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga	14.257	14.314	14.371	14.630	14.847
2	Rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah	2.457	3093	3215	3097	2470
3	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Kota Sawahlunto	17,23	21,61	22,37	21,17	16,64

Sumber Data : DPKP2LH 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Kota Sawahlunto berfluktuasi, tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 16,64%, hal ini disebabkan karena perilaku masyarakat yang tidak taat terhadap kewajiban untuk membayar retribusi sampah, sehingga layanan sampah tidak bisa beroperasi diwilayah tersebut.

5. Terlaksananya Pengelolaan sampah di wilayah kab/kota

Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah adalah Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota memainkan peran penting dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Beberapa aspek yang relevan dalam pengelolaan ini meliputi :

a. Perencanaan dan Regulasi:
   - Pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun Rencana Strategis Pengelolaan Sampah (Renstra).
   - Kebijakan seperti pengurangan sampah plastik sering kali diterapkan di level lokal.

b. Fasilitas Infrastruktur:
   - Penyediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang strategis.
   - Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk meminimalkan sampah yang berakhir di TPA.

c. Pengelolaan oleh Masyarakat:
   - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik.
   - Program bank sampah di mana warga dapat menukar sampah dengan nilai ekonomi.

d. Kerjasama dengan Swasta:
   - Kolaborasi dengan perusahaan untuk pengelolaan limbah daur ulang.
   - Pemanfaatan teknologi modern melalui kemitraan dengan sektor swasta.

e. Pendidikan dan Kesadaran:
   - Edukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang efektif.
   - Kampanye pengurangan sampah dan daur ulang.

Tabel 2.165
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Vol sampah terkelola	Ton/Tahun	6,619.23	6,515.97	6,770.88	6,832.00	6,932.44
2	Total vol timbunan sampah kabupaten/kota	Ton/Tahun	6,852.82	6,843.52	6,882.56	6,925.99	6,988.44
3	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	96.59	95.21	98.38	98.64	99,20

Sumber Data : SIPSN DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Terlaksananya pengelolaan sampah wilayah kab/kota tahun 2024 turun menjadi 73,02%, hal ini dikarenakan kondisi sarana prasarana persampahan yang tidak optimal dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta kurangnya dukungan anggaran.

6. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan indikator penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, beberapa poin penting terkait hal tersebut antara lain;

a. Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan.
b. Persentase Ketaatan: Data menunjukkan bahwa tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dapat diukur dalam bentuk persentase, yang mencerminkan efektivitas pengawasan dan implementasi kebijakan.
c. Sanksi dan Penegakan Hukum: Pelanggaran terhadap izin PPLH dan PUU LH dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.
d. Kolaborasi dengan Instansi Terkait: Pemerintah daerah sering bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup untuk memastikan pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku.

Tabel 2.166
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan	18	18	18	18	18
2	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Penanggungjawab Usaha Dan atau Kegiatan	24	24	24	24	23
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin pplh dan puu lh yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Persen	75,00	75,00	75,00	75,00	78,26

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2024

Jumlah Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota dari tahun 2020-2024 stagnan yaitu 18 Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan dengan nilai Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota dari 2020-2023 sebesar 75 persen dan 2024 sebesar 78,26%, hal ini menggambarkan masih kurangnya kesadaran dari Penanggungjawab Usaha dan atau kegiatan terhadap pentingnya izin PPLH dan PUU LH.

7. Indek Kinerja Pengelolaan Sampah

Indeks Pengelolaan Persampahan (IKPS) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan sampah. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti pengurangan sampah, penanganan sampah, dan tingkat partisipasi masyarakat**.**

Pengelolaan persampahan adalah proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sistem pengolahan sampah yang digunakan di kota sawahlunto berupa sistem Sanitary landfill yaitu sistem pengelolaan sampah dimana sampah dibuang dan ditumpuk di lokasi yang cekung, kemudian dipadatkan dan ditimbun di dalam tanah.

Tabel 2.167
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sampah yang masuk ke TPA	Ton/Tahun	5,146.50	5,108.17	5,069.85	5,088.10	5,102.70
2	Jumlah timbulan sampah	Ton/Tahun	6,852.82	6,843.52	6,882.56	6,925.99	6,988.44
3	Indeks Pengelolaan Persampahan		75,10	74,64	73,66	73,46	73,02

Sumber Data : SIPSN DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Berdasarkan data tabel, nilai IKPS kota sawahlunto bervariasi, tahun 2024 nilai IKPS turun dari tahun sebelumnya menjadi 73,02, hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah timbulan sampah dan kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan belum menerapkan praktek 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

3. Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Kota

Tabel 2.168
Penyusunan Dokumen RPPLH Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto 2024

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrumen hukum bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH sebagai instrumen perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Kota Sawahlunto belum mempunyai dokumen RPPLH sampai dengan tahun

2024, akan tetapi di tahun 2026 RPPLH direncanakan untuk disusun dan sudah masuk dalam rencana kerja dinas terkait.

4. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.169
Penyusunan Dokumen KLHS Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	n/a	n/a	ada	ada

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto 2024

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilaksanakan bersamaan pada saat penyusunan suatu Kebijakan Rencana Program (K/R/P) atau setelah (K/R/P) ditetapkan (peninjauan kembali, revisi dan/atau evaluasi terhadap K/R/P yang bersangkutan). Oleh karena itu di Kota Sawahlunto penyusunan KLHS dilakukan di tahun 2023 dan 2024 bersamaan dengan penyusunan Revisi RTRW, RPJPD dan RPJMD.

5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air di lokasi dan waktu tertentu. Berikut ini tabel hasil pengukuran kualitas air (IKA) :

Tabel 2.170
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA) 37,6 %	%	50,00	50,00	52,00	48.89	38,57

Sumber Data : DKP2LH, 2024

Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Sawahlunto kembali mengalami penurunan dengan nilai 38,57 tahun 2024. Setelah sebelumnya tahun 2023 adalah 48,89. Nilai IKA diperoleh dengan cara melalui uji laboratorium terhadap sampel air sungai di Kota Sawahlunto. Capaian nilai IKA sebesar 38,57 berarti tercemar sedang, dimana kualitas Sungai di Kota sawahlunto mengindikasikan bahwa terjadi pencemaran air yang menyebabkan kualitas sungai jelek. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang terintegrasi dengan berbagai pihak terkait (stakeholder).

6. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)

Tabel 2.171
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	87,54	87,65	87,00	89.9	93,06

Sumber Data :DKP2LH, 2024

Indeks kualitas udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan perundang-undangan. Perhitungan indeks ini didasari dari pengambilan sampel di beberapa wilayah yang dianggap mewakili kualitas udara kab/ kota dalam waktu tertentu. Capaian IKU tahun 2024 ini adalah sebesar 93,06 dengan klasifikasi sangat baik sehingga perlu dipertahankan dan juga ditingkatkan.

7. Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.

Tabel 2.172
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab dan atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH Kota Sawahlunto 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan	18	18	18	18	18
2	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Penanggungjawab Usaha Dan atau Kegiatan	24	24	24	24	23
3	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan yang diawasi	Kali	18	18	18	18	18

Sumber Data : Dinas DPKP2LH, 2024

Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan yang diawasi. Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH Kota Sawahlunto 2020-2024 yang dilakukan oleh DPKP2LH stagnan yaitu sebanyak 18 kali.

8. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Penghargaan lingkungan hidup adalah wujud apresiasi terhadap kontribusi nyata dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

Tabel 2.173
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto 2020-2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan hidup	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data: Dinas DPKP2LH, 2024

Pada Tahun 2020 dan 2021 tidak ada terlaksana Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup karena covid, tahun 2023 Kota Sawahlunto memperoleh penghargaan Adipura dan 1 kampung iklim utama, tahun 2023 kota sawahlunto kembali mendapatkan adipura dan 3 kampung iklim madya, tahun 2024 kota Sawahlunto mendapatkan penghargaan 10 kampung iklim madya. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup menjadi momentum penting untuk mengapresiasi kontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan mendorong lebih banyak aksi nyata.

9. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampak di Kab/Kota

Pasca berlakunya undang-undang cipta kerja yang di dalamnya telah merubah ketentuan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada substansi perizinan lingkungan, serta mengambil alih kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang seharusnya kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. maka pemberian izin PPLH dan PPU LH serta pengelolaan pengaduan masyarakat menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat.

10. Timbulan Sampah yang Ditangani

Timbulan sampah adalah jumlah sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, baik di tingkat rumah tangga, komersial, maupun industri. Timbulan ini mencakup sampah organik (seperti sisa makanan atau daun) dan sampah anorganik (seperti plastik, logam, atau kaca).

Tabel 2.174
Timbulan Sampah yang ditangani Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan sampah tahunan	Ton/Tahun	6,852.82	6,843.52	6,882.56	6,925.99	6,988.44
2	Timbulan Sampah yang ditangani	Ton/tahun	5,146.50	5,108.17	5,069.85	5,088.10	5,102.70

Sumber Data : SIPSN DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Jumlah timbulan sampah Kota Sawahlunto dari 2020-2024 rata-rata terus meningkat dan jumlah timbulan sampah yang ditangani juga meningkat, tahun 2024 total timbulan sampah yang ditangani sebesar 5.102,70 ton/tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulan sampah meliputi: Jumlah penduduk, semakin banyak penduduk, semakin besar pula timbulan sampahnya, Kebiasaan konsumsi, Gaya hidup yang bergantung pada barang sekali pakai akan meningkatkan jumlah sampah serta Tingkat ekonomi, masyarakat dengan ekonomi lebih tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak sampah. Pengelolaan timbulan sampah yang baik sangat penting untuk melindungi lingkungan dan menciptakan keberlanjutan.

11. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan.

Tabel 2.175
Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan sampah tahunan	Ton/Tahun	6,852.82	6,843.52	6,882.56	6,925.99	6,988.44
2	Pengurangan Sampah	Ton/tahun	1,472.73	1,407.80	1,701.03	1,743.90	1,829.74
3	Persentase Jumlah Sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	21.49	20.57	24.72	25.18	26.18

Sumber Data SIPSN DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

12. Persentase cakupan area pelayanan

Mobilisasi sampah dari tingkat *user interface* menuju TPA Kayu Gadang, sepenuhnya di kelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH). Sedangkan sampah pasar Silungkang dan pasar Talawi pemungutan retribusinya dilakukan oleh KAN setempat sementara pengumpulan dan pembuangannya tetap oleh DPKP2LH.

Tabel 2.176
Cakupan area pelayanan sampah kota sawahlunto tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kel	37	37	37	37	37
2	Jumlah Desa/Kelurahan terlayani	Desa/Kel	32	32	34	34	34
3	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	86,49	86,49	91,89	91,89	91,89

Sumber Data SIPSN DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Cakupan area pelayanan sampah merujuk pada wilayah yang dilayani oleh sistem pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan. cakupan ini diatur oleh kebijakan pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Penetapan cakupan ini berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kapasitas layanan yang tersedia. Pada Tahun 2024 cakupan area pelayanan sampah kota sawahlunto sudah mencapai 91,89%, dimana dari 37 desa/kelurahan, 34 desa/kelurahan sudah terlayani dengan baik. 3 Desa/kelurahan yang belum terlayani disebabkan karena factor geografis lokasi desa/kel yang sulit untuk dilewati mobil pengangkutan sampah.

13. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Tabel 2.177
Persentase jumlah sampah yang tertangani

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan sampah tahunan	Ton/Tahun	6,852.82	6,843.52	6,882.56	6,925.99	6,988.44
2	Timbulan Sampah yang ditangani	Ton/tahun	5,146.50	5,108.17	5,069.85	5,088.10	5,102.70
3	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	75,10	74,64	73,66	73,46	73,02

Sumber Data SIPSN DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Jumlah sampah yang tertangani di Kota Sawahlunto pada tahun 2024 mencapai sekitar 73,03%, menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Dari total ini, 26,18 % berasal dari upaya pengurangan sampah (seperti daur ulang dan pengomposan), sedangkan 46,85% ditangani melalui kegiatan seperti pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan di TPA atau fasilitas terkait lainnya.

Masih terdapat tantangan besar karena sekitar 26,97% sampah belum terkelola dengan baik, yang sering kali menyebabkan pencemaran lingkungan. Peningkatan infrastruktur, kebijakan, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memperbaiki angka ini. Semakin banyak sampah terkurangi di sumber sampah maka semakin baik pengolahan sampah. Salah satu penyebab sampah tidak terkurangi disumber adalah prilaku dari masyarakat yang belum terbiasa memilah sampah dan kurangnya sarana pengurangan sampah seperti TPST, TPS3R dan Bank sampah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan membentuk Bank sampah di desa maupun Kelurahan serta memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah. Selain itu dilakukan inovasi untuk mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari rumah yaitu SISABER-RT (Sedekah Plastik Sampah Berjadwal di Rumah Tangga). Inovasi ini merupakan penjemputan sampah terpilah secara terjadwal langsung ke rumah masyarakat.

14. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kwh (*kilo watt hours*) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi oleh seluruh penduduk suatu wilayah. Konsumsi listrik per kapita juga dapat digunakan sebagai indikator taraf hidup masyarakat. Semakin tinggi taraf hidup masyarakat, semakin tinggi pula kecenderungan penggunaan peralatan listrik oleh masyarakat yang berdampak pada semakin tingginya pemakaian (konsumsi) listrik.

Tabel 2.178
Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh/Kapita)
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Konsumsi Listrik (MWh) Menurut Jenis Pelanggan di Kota Sawahlunto yang tercatat di PT PLN Ranting Silungkang	(KWh)	1.254.712	1.203,602	1.237,862	1.245,528	1.270,532
2	Jumlah Konsumsi Listrik (MWh) Menurut Jenis Pelanggan di Kota Sawahlunto yang tercatat di PT PLN ULP Kota Sawahlunto	(KWh)	1.339,263	1.351,463	1.355,532	1.394,636	1.416,714

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka 2025

Pada tabel di atas terlihat perkembangan konsumsi listrik per kapita di Kota Sawahlunto berfluktuasi selama lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) dengan kisaran 1.203,602 kwh/kapita hingga 1.416,714 kwh/kapita. pemakaian (konsumsi) listrik mengalami peningkatan di 2024 menjadi 1.270,532 di PT PLN Ranting Silungkang dan 1.416,714 di PT PLN ULP Kota Sawahlunto.

15. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Indikator yang digunakan untuk persentase rumah tangga yang menggunakan listrik adalah jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikali seratus persen. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pemakaian listrik setiap tahunnya seperti tabel berikut :

Tabel 2.179
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	14.257	14.314	14.371	14.630	14.847
2	Jumlah Rumah yang menggunakan listrik (RT)	13.058	13.471	13.848	14.144	14.396
3	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik (%)	91,59	94,11	96,36	96,68	96,96

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata untuk semua jenis pelanggan listrik mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang dikarenakan kebutuhan dasar akan pemenuhan daya listrik.

F. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.180
Inovasi Pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No	Inovasi	Latar Belakang Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1	HALO DA NAPI (Hasil Olah Data Narapidana)	Dilakukan untuk pengecekan Biometrik narapidana di Lapas Narkoba Sawahlunto dan bagi narapidana di Rumah Tahanan Sawahlunto, dan bagi yang telah memiliki NIK tetapi belum rekam, maka langsung dilakukan perekaman KTP –el nya walaupun mereka berasal dai luar daerah.	Dilakukan khusus bagi narapidana yang di Lapas Narkoba maupun di Rutan Sawahlunto, diaman bentuk layananyang diberikan adalah cek irish mata, agar mendapat informasi yang akan akurat terkait data narapidana darimana mereka berasal
2	JEMPOL NARSIS (Jemput Bola Menyasar Rekam KTP Siswa)	Bentuk kegiatan perekaman KTP-el bagi siswa disekolah SLTA Kota Sawahlunto	Memberikan kemudahan kepada siswa sekolah SLTA yang sudah cukup usia yaitu 16 tahun keatas belum melakukan perekaman KTP-el tidak perlu lagi datang ke Kantor Dukcapil pada jam sekolah
3	JEMPOL PAKDEKU (Layanan Jemput Bola Pada Desa Kelurahan)	Pelayanan yang diberikan untuk Desa dan Kelurahan dimana pelayanan yang diberikan adalah berupa perekaman KTP el bagi warga yang menjadi WKTP, melayani dokumen kependudukan bagi masyarakat yang tidak bisa datang mengurus ke Kantor Dinas Dukcapil	Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan keliling yang dilakukan khusus diberikan kemudahan ke Desa dan Kelurahan terkait perekaman KTP –el dan layanan dokumen administrasi kependudukan lainnya.
4 04	MAKAN KOLAK (Melayani Administrasi Kependudukan KIA Ke Sekolah Anak)	Khusus untuk melayani menerbitkan cetak KIA anak sekolah dari tingkat PAUD, Tk, SD sampai SMP dimana KIA setelah dicetak akan diantarkan ke sekolah tersebut.	Agar anak berusia 0-17 tahun kurang 1 hari mendapatkan haknya yaitu memperoleh KIA dengan mudah
5	PETA LINTAS (Pelayanan Mengutamakan Lansia dan Disabilitas)	Pelayanan yang diberikan untuk Masyarakat, melayani dokumen kependudukan bagi masyarakat yang termasuk Lansia dan Disabilitas	Memberikan kemudahan kepada Para Lansia dan Disabilitas dalam pengurusan Dokumen Kependudukan
6	TELEPATI (Tetap Melayani Pada Jam Istirahat)	Pelayanan yang diberikan untuk Masyarakat, melayani dokumen kependudukan bagi masyarakat yang dilayani meskipun jam istirahat	Tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat
7	TUDUNG SAJI (Satu Data Dukcapil Rampung dan Tersaji)	Data kependudukan yang dapat di akses semudah mungkin	Memberikan kemudahan dalam memperoleh data kependudukan

Upaya untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat, maka di ciptakan Inovasi Pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Di harapkan dapat Memberikan kemudahan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Hasil pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan Kota Sawahlunto pada kondisi lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.181
Data Kepemilikan Kartu Keluarga
Tahun 2020 - 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga					Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lembah segar	4.312	4.376	4.401	4.495	4.541	4.312	4.345	4.401	4.492	4.524
2	Barangin	6.345	6.463	6.540	6.793	6.858	6.345	6.429	6.540	6.790	6.840
3	Silungkang	3.530	3.547	3.627	3.759	3.791	3.530	3.522	3.627	3.753	3.778
4	Talawi	6.143	6.272	6.372	6.671	6.817	6.143	6.236	6.372	6.662	6.793
	Jumlah	**20.330**	**20.658**	**20.940**	**21.718**	**22.007**	**20.330**	**20.532**	**20.940**	**21.697**	**21.935**

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2024

Jumlah Kepala Keluarga yang sudah memiliki Kartu Keluarga pada Tahun 2024 di Kota Sawahlunto berdasarkan tabel di atas sudah mencapai target.Hampir semua Kepala Keluarga sudah memiliki Kartu Keluarga. Kegiatan JEMPOL PAKDEKU yang melakukan pelayanan keliling yang dilaksanakan ke Desa dan Kelurahan memberikan kemudahan bagi Masyarakat dalam pengurusan Kartu Keluarga.

Tabel 2.182
Data Kepemilikan KTP-Elektronik di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP					Jumlah Penduduk Memiliki KTP –El				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lembah segar	10.236	10.207	10.320	10.586	10.373	9.987	10.099	10.237	10.324	10.197
2	Barangin	14.776	14.884	15.087	15.306	15.450	14.380	14.643	14.922	15.306	15.224
3	Silungkang	8.307	8.306	8.446	8.774	8.633	8.049	8.188	8.343	8.538	8.466
4	Talawi	14.678	14.753	15.062	15.691	15.641	14.408	14.591	14.950	15.313	15.452
	Jumlah	47.654	47.997	4.815	50.750	**50.097**	46.824	47.521	48.452	49.481	**49.339**

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2024

Kegiatan JEMPOL NARSIS yang dilakukan ke Sekolah-sekolah SLTA memberikan kemudahan kepada pelajar SLTA sederajat untuk melakukan Perekaman KTP-el, tanpa harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan Ini berbuah manis, seperti gambaran dari tabel di atas yang menunjukan jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP-el pada Tahun 2024 sudah mencapai target.

Tabel 2.183
Rekapitulasi Data Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun Kota Sawahlunto
Tiap Kecamatan Per 31 Desember 2024

No	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)				
		Anak 0-18 Tahun	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	Belum Memiliki Akta Kelahiran	%
1	Lembah segar	3.837	3.823	99.64	14	0.36
2	Barangin	6.125	6.096	99.53	29	0.47
3	Silungkang	3.53	3.515	99.52	17	0.4
4	Talawi	6.211	6.179	99.48	32	0.52
	Jumlah	**19.705**	**19.613**	**99.53**	**92**	**0.47**

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2024

Tabel 2.184
Rekapitulasi Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Sawahlunto
Tiap Kecamatan Per 31 Desember 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)				
		Wajib KIA	Kepemilikan KIA	%	Belum Memiliki KIA	%
1	Lembah segar	3.564	2.750	77.16	814	22.84
2	Barangin	5.772	4.428	76.72	1344	23.28
3	Silungkang	3.311	2.236	67.53	1.075	32.47
4	Talawi	5.815	4.613	79.33	1.202	20.67
	Jumlah	**18.462**	**14.027**	**75.98**	**4.435**	**24.02**

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2024

Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Tahun 2024 di Kota Sawahlunto sudah sangat tinggi. Dari gambaran 2 Tabel di bawah bisa di lihat bahwa Kepemilikan Akta Kelahiran mencapai 99,53 % dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 75,98%. Hal ini menunjukan Kesadaran Penduduk Kota Sawahlunto dalampengurusan Dokumen Kependudukannya sudah tinggi.

Tabel 2.185
Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2020-2024

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Kependudukan dan Catatan Sipil					
1	Cakupan KTP (%)	97.49	97.65	98.29	98.46	98.48
2	Cakupan Akte kelahiran (%)	55.06	67.59	69.79	70.73	71.53
3	Cakupan KK (%)	100	100	100	100	99.67
4	Cakupan akte kematian (%)	100	100	100	100	100
5	Validitas database kependudukan (%)	100	100	100	100	100
6	Perekaman KTP elektronik (%)	96.42	98.31	97.55	97.49	99.34
7	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)	59.74	66.23	72.91	74.98	75.98

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
8	Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir) (%)	97.54	98.76	99.28	99.41	99.53
9	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari tahun 2020 sampai tahun 2024 rata-rata mengalami peningkatan, walaupun ada dua bidang urusan/indikator yang mengalami penurunan kinerja pada tahun 2024 yakni cakupan penerbitan akta kelahiran dan cakupan KK. Kesadaran masyarakat agar memiliki Dokumen Kependudukan harus terus di tingkatkan. Selain itu memotivasi OPD agar dapat memanfaatkan data kependudukan dalam melaksanakan program kegiatan.

Tabel 2.186
Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan
Yang Telah Melakukan Perjanjian Kerjasama (IKD)

No	PKS	OPD	Ket
1	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	
2	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Sekretariat Dprd Kota Sawahlunto	Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto	
3	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Inspektorat Kota Sawahlunto	Inspektorat Kota Sawahlunto	
4	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	
5	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman Kota Sawahlunto	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman Kota Sawahlunto	
6	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Sawahlunto	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Sawahlunto	
7	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	
8	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	
9	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Sawahlunto	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Sawahlunto	
10	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	
11	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	
12	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	
13	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Sawahlunto	
14	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	
15	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Sawahlunto	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Sawahlunto	

No	PKS	OPD	Ket
16	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto	
17	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	
18	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	
19	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto	
20	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto	
21	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto	Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto	
22	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto	Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto	
23	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto	Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto	
24	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto	Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto	

Sumber Data : Diolah Bidang PIAK Tahun 2024

Tabel 2.187
Rasio Kependudukan Kota Sawahlunto
Tahun 2024

No	INDIKATOR KEPENDUDUKAN	RASIO 2024
1	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	98.48
2	Rasio bayi berakte kelahiran	99.53
3	Rasio pasangan berakte nikah	95.12
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (sudah/belum)	sudah
5	Cakupan penerbitan KTP	98.48
6	Cakupan KK	99.67
7	Cakupan akte kematian	100%
8	Cakupan penerbitan akta kelahiran	71.53

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2024

Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan

G. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan maka keterlibatan masyarakat secara aktif sangat diperlukan. Masyarakat dengan berbagai latar belakang pekerjaan, pendidikan, ekonomi, sosial dan lainnya dapat berperan aktif melalui wadah/lembaga yang ada di Desa/Kelurahan. Aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pembangunan. Dalam satu cara untuk menuangkan aspirasi tersebut bisa melalui keikutsertaan dalam berbagai macam organisasi atau lembaga yang ada di tengah masyarakat. Lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa/ Kelurahan yang ada di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.188
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan
Tahun 2021 – 2024

No	Nama Lembaga	2020	2021	2022	2023	2024
1	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	23	23	23	23	23
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	37	37	37	37	37
3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	42	42	42	42	42
4	Posyandu Balita	103	103	103	103	103

No	Nama Lembaga	2020	2021	2022	2023	2024
5	Posyandu Lansia	55	55	55	55	58
6	Badan Permusyawarahan Desa (BPD)	27	27	27	27	27
7	Karang Taruna	37	37	37	37	37

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2024

Di Kota Sawahlunto telah terbentuk sebanyak 23 Bumdes dari sebanyak 27 desa yang ada (85,18%). Adapun desa yang belum membentuk/memiliki Bundes yaitu desa Batu Tanjung, Kolok Mudik, Lunto Barta dan Lunto Timur. Dari total 23 Bumdes yang telah terbentuk, pada tahun 2024 hanya sebanyak 10 Bumdes (43,5%). Adapun rincian 10 Bumdes tersebut yaitu :

a. BUMDes Menuju Kesejahteraan Bersama dari Desa Muaro Kalaban
b. BUMDes Gemilang Taratak Bancah Sejahtera dari Desa Taratak Bancah
c. BUMDes Luak Bumbuang dari Desa Pasa Kubang
d. BUMDes Kusuma dari Desa Kubang Utara Sikabu
e. BUMDes Talago Zamzam dari Desa Balai Batu Sandaran
f. BUMDes Citra Santur Mandiri dari Desa Santur
g. BUMDes Berkah Bersama dari Desa Rantih
h. BUMDes Karya Muda Mandiri dari Desa Salak
i. BUMDes ANDESKA dari Desa Sikalang
j. BUMDes Lumindai Saiyo dari Desa Lumindai

Terdapat 3 dari 10 Bumdes yang aktif yang telah memperoleh laba dari kegiatannya yaitu: BUMDes Lumindai Saiyo dari Desa Lumindai, BUMDes Karya Muda Mandiri dari Desa Salak, dan BUMDes Kusuma dari Desa Kubang Utara Sikabu.

Adapun mayoritas kendala yang menyebabkan 13 Bumdes lainnya tidak aktif yaitu kepengurusan yang pasif serta usaha yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Upaya yang harus dilakukan untuk mengaktifkan kembali 15 Bumdes yang telah ada salah satunya dengan memberikan peningkatan kapasitas serta perhatian yang intens pada masing-masing pengurus Bumdes.

Disamping itu, lembaga kemasyarakatan lainnya seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Permusyawarahan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta Karang Taruna yang telah terbentuk keseluruhan aktif pada masing-masing desa/kelurahan serta tetap eksis dalam melakukan tupoksi masing-masing.

Sejalan dengan hal tersebut, kemajuan suatu desa mempengaruhi iklim berinvestasi. Makin maju sebuah desa, maka akan makin menarik investasi untuk dapat berkembang diwilayahnya. Klasifikasi desa yang diharapkan untuk dapat menunjang iklim berinvestasi adalah dengan status desa maju dan mandiri. Adapun rincian klasifikasi status desa di tahun 2024 berdasarkan Indek Dea Membangun (IDM) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.189
Status Desa berdasar Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Klasifikasi Desa	2020		2021		2022		2023		2024	
		Jumlah (desa)	%	Jumlah (desa)	%	Jumlah (desa)	%	Jumlah (desa)	%	Jumlah (desa)	%
1	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Berkembang	17	62,96	14	51,85	10	37,03	6	22.22	1	3,7
4	Maju	9	33,33	12	44,44	14	51,85	17	62.96	19	70,3
5	Mandiri	1	3,7	1	3,7	3	11,11	4	14.81	7	25,92

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2024

IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari (i) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang mencakup dimensi modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukiman, (ii) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang mencakup dimensi ekonomi dan (iii) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dengan dimensi ekologi. Dalam pengukurannya, suatu desa dapat dikatakan Mandiri jika memiliki skor akhir lebih besar (>) 0.8155 dari total seluruh pengukuran dimensi.

Di Kota Sawahlunto, desa Talawi Mudik merupakan satu-satunya desa yang telah menyandang klasifikasi Desa Mandiri sejak tahun 2019. Pada tahun 2022 klasifikasi Desa Mandiri juga dicapai oleh Desa Muarokalaban dan Desa Santua. Dan di tahun berikutnya, Desa Silungkang Tigo pun berhasil meraih klasifikasi Desa Mandiri. Pada tahun 2024, desa Kolok Nan Tuo, Talawi Hilir dan Sikalang naik menjadi desa mandiri, sehingga total Desa Mandiri di Kota Sawahlunto sudah sebanyak 7 Desa pada tahun 2024.

Tabel 2.190
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengentasan Desa Tertinggal (%)	0	0	0	0	0
2	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	52,94	85,71	140	283	1.900

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2024

Pada indikator persentase pengentasan desa tertinggal dari tahun 2020 hingga tahun 2024 konsisten berada pada angka 0. Hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun seluruh desa pada kota Sawahlunto sudah tidak ada lagi yang berada pada klasifikasi desa tertinggal. Untuk indikator persentase peningkatan status desa mandiri pada tahun 2024 berada pada angka 1.900%. Hal ini dapat dijelaskan sesuai dengan rumus indikator tersebut yang tertuang pada Permendagri No 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu "Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri berdasar Indeks Desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa berkembang dikali 100%. Dalam hal ini di tahun 2024, jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri atau bisa disebut dengan desa maju sejumlah 19 desa, sedangkan untuk desa berkembang itu sendiri adalah hanya ada 1 desa yakni desa Rantih. Oleh sebab itu capaian indikator persentase peningkatan status desa mandiri tahun 2024 berdasar IDM berada pada angka 1.900%.

H. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dalam satu dekade terakhir keberhasilan pelayanan Keluarga Berencana di Indonesia mengalami suatu keadaan stagnan yang ditandai dengan kurangnya perbaikan beberapa indikator KB yaitu CPR, unmet need dan *Total Fertility Rate* (TFR), Negara ASEAN dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan KB serta kesehatan ibu dan bayi.

Tabel 2.191
Capaian Indikator Kinerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate/ mCPR)	63	58,3	61,5	63,1	63,2
2	Persentase Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	17,58	17,8	15,0	12,2	13,8
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	4,18	0,84	1,11	2.03	1,43
3	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,41	2,72	2,69	2,40	2,37
4	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui kampung KB	60	64	64	89,2	93,4
5	Rata – rata jumlah anak perumah Tangga	2,41	2,72	2,69	2,40	2,37
6	Rasio Akseptor KB	63	58,3	61,5	63,1	63,2
7	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia15-48	73,04	71,92	70,46	85	70,1
8	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan1	37	37	37	37	37
9	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	100
10.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	-	100	100	100
11.	Indek Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	54,05	57,77	64,28	63,88

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, 2024

1. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern

Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto pada ada beberapa indikator. Pada kinerja Persentase pemakaian Kontrasepsi modern mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 sebanyak 63 % meningkat menjadi 71,92% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 70,46%.Serta meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 71,3%. Pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 73,3%.

Tabel 2.192
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate/ mCPR)	64	63	71,92	70,46	96,53	73,3
2	Pertumbuhan		1,54	1,81	-2,03	26,07	

Sumber Data : SIGA Dinkesdalduk KB 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

Adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 hal ini disebabkan oleh adanya dukungan anggaran BOKB tahun 2024, akses pelayanan KB sudah terjangkau oleh PUS dan ketersediaan alkon yang sudah terlaksana dengan baik.

2. Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (*Unmeet Need*)

Unmet need menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah kebutuhan PUS untuk ber-KB tetapi tidak terpenuhi dengan kata lain PUS tidak menggunakan kontrasepsi. Hal ini juga dipengaruhi dengan kondisi PUS yang sedang Hamil, Ingin anak segera dan Ingin Anak ditunda, namun angka Unmet Need dikota Sawahlunto, sudah baik dan berada dibawah angka Nasional.

Indikator kinerja Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 angka unmet need ini adalah 17,58 % mengalami fluktuasi hingga tahun 2021 menjadi 10,87 % pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan lagi menjadi 12 %. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 12,2 persen. Akan tetapi pada tahun 2024 unmeet need ini menurun, hal ini disebabkan karena BOKB tahun 2024, akses pelayanan KB sudah terjangkau oleh PUS dan ketersediaan alkon yang sudah terlaksana dengan baik.

Tabel 2.193
Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)
Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	17,58	10,87	12	12,2	9,21
2	Pertumbuhan (%)		-38,17	0,10	1,67	-24,50

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024 (SIGA)

Berdasarkan pertumbuhannya mengalami pertumbuhan yang negative pada tahun 2020 yaitu -38,17 % meningkat pada tahun 2023 menjadi pertumbuhan yang positif yaitu 1,67%. Pada tahun 2024 menurun kembali menjadi 9,21 atau -24,50%. Selama ini unmet need menjadi penyumbang cukup besar terhadap belum berpartisipasinya PUS dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Fenomena *unmet need* KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan. Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping.

3. Angka Kelahiran Total (TFR)

Angka kelahiran Total (TFR) adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.Angka kelahiran Total (TFR) ini digunakan Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkatnya kelahiran.

Kondisi TFR tahun 2024 di Kota Sawahlunto sudah menuju perbaikan berada di angka 2,02, artinya Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun rata-rata sudah mempunyai anak 2 orang, sesuai juga dengan angka kemiskinan di Kota Sawahlunto mengalami penurunan secara signifikan. Mudah-mudahan kondisi ini menjadikan Kota Sawahlunto semakin maju dan berkembang serta terwujudnya visi dan misi kota Sawahlunto yang sudah ada.

Tabel 2.194
Angka Kelahiran Total (TFR) Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR KINERJA pad tahun	2020	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,33	2	2,02	2,02	2,02
2	Pertumbuhan (%)		-14,16	1,1	0	0

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto,2024 (Data PK)

4. Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Tabel 2.195
Persentase Perangkat Daerah Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	60	64	64	89,2	100
2	Pertumbuhan	7,14	6,66	0	85,8	

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

Hal ini dilihat dari Kampung KB (Kampung Keluarga Berencana) Kota Sawahlunto yang berada pada tingkatan berkelanjutan sudah 37 Kampung KB berkelanjutan.

5. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian pendudukan pembangunan keluarga adalah dengan penyelenggaraan keluarga berencana. Pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas merupakan langkah yang sangat penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu keberhasilan dalam mencapai program keluarga berencana ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB dan hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan KIE. Secara demografi program keluarga berencana adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

Tabel 2.196
Rata-rata Jumlah Anak per Rumah Tangga di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata – rata jumlah anak per keluarga	2,32	2,00	2,02	2,02	2,02
2	Pertumbuhan		-13,79	1	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto,2024

Dilihat dari data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga di Kota Sawahlunto mengalami penurunan. Tahun 2020-2024 jumlah anak dalam keluarga mengalami tren penurunan. Jika dibandingkan dengan target 2 orang anak setiap rumah tangga pada program Keluarga Berencana tingkat nasional, maka dapat dikatakan program Keluarga Berencana di Kota Sawahlunto sudah berjalan dengan baik. Pada tahun 2024 rata rata jumlah anak per keluarga adalah 2,02.

6. Rasio Akseptor KB

Program Keluarga Berencana dimaksudkan untuk menciptakan keluarga kecil yang berkualitas sekaligus menekan laju pertumbuhan penduduk disamping itu juga mengurangi resiko tingkat kematian anak serta kematian ibu. Dalam pola pemikiran dimasyarakat harus diubah dari pembatasan kelahiran saja tapi juga untuk meningkatkan kualitas manusia dan menyinergikan program keluarga berencana dengan sudut pandangan agama.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Rasio akseptor KB dari tahun ke tahun mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 menjadi 73,03 %. dan menurun pada tahun 2021 menjadi 71,92%. Pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 70,46%. Akan tetapi meningkat kembali pada tahun 2023 menjdi 71,3 % dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 73,3.

Tabel 2.197
Rasio Akseptor KB di Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Akseptor KB	73,03	71,92	70,46	71,3	73,3
2	Pertumbuhan		-1,52	-2,03	1,19	2,80

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto,2024

7. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49

Angka Pemakaian Kontrasepsi adalah cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Di Kota Sawahlunto CPR ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 nilai CPR nya adalah 73,04% dan menurun pada tahun 2021 menjadi 71,92%. Pada tahun 2022 menurun menjadi 70,46%. Pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 85%. Pada tahun 2024 menurun menjadi 70,1 %.

Tabel 2.198
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR di Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia15-48	73,04	71,92	70,46	85	70,1
2	Pertumbuhan		-1,53	-2,10	20,63	-17,53

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

Adanya penurunan angka CPR pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan oleh kecendrungan wanita menggunakan alat kontrasepsi mal dan kontrasepsi tradisional sekitar 2,1 %. Selain itu pada tahun 2024 ini jumlah usia pasangan subur muda juga lebih banyak belum ingin menggunakan alat kontrasepsi, artinya banyak pasangan usia subur dengan Ingin Anak Segera (IAT), Ingin Anak Tunda (IAT) dan tidak ingin anak lagi (TIAL) sekitar 21,4 %.

8. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB/Desa (PPKDB) Setiap Desa/Kelurahan

Petugas pembantu Pembina KB Desa Setiap Desa/Kelurahan berjumlah 37 orang. Hal ini sama dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Dimana di setiap desa ada satu orang petugas Pembina KB. Peran PPKDB ini adalah berperan aktif dalam mengelola program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/kelurahan.

Tabel 2.199
Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB/Desa (PPKDB) Setiap Desa/Kelurahan

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	37	37	37	37	37

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2025

9. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan oabt kontrasepsi di Kota Sawahlunto telah sangat baik. Karena telah mencapai 100%. Hal ini mendukung program KB di Kota Sawahlunto dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.200
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

10. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk. Kota Sawahlunto telah menyusun GDPK (Grand Design Pengendalian Kependudukan) yang disusun oleh Dinkesdalduk KB pada tahun 2022. OPD yang telah memanfaatkan GDPK ini sudah 100 %, karena dokumen GDPK ini telah disosialisasikan ke OPD yang ada di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.201
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan			100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2025

11. Angka Keberhasilan Pengobatan Tubercolosis (*Treatmenth Succes Rate*) (%)

Definisi dari Indikator ini adalah persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap. Untuk menghitung indikator ini dengan membandingkan jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Indikator ini sangat penting dalam mengevaluasi pengobatan tuberculosis. Angka ini memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.

Tabel 2.202
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Keberhasilan pengobatan TBC	88,9	88,89	96,5	94,05	94

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025, DinkesdaldukKB 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan berfluktuasi dengan kisaran 88% hingga 96,5 %

12. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPS Kesehatan dimana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan pemerintah. Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100%. Berikut ini cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2020-2024 di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.203
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	95,99	97,64	99,73	100,72	101,03
Pertumbuhan (%)	0,94	1,72	2,14	0,99	0,30

Sumber Data : Dinkesdalduk KB 2024, Data Diolah

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa JKN di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam kepesertaan JKN. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di Kota Sawahlunto ini mencerminkan beberapa hal penting, yaitu : 1). sebagian besar penduduk Kota Sawahlunto sudah memiliki akses ke pelayanan kesehatan; 2). tingkat kesadaran masyarakat Kota Sawahlunto tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sudah tinggi; 3). komitmen pemerintah daerah yang tinggi untuk mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional; 4). banyaknya masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

13. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga adalah Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang meliputi tiga dimensi yaitu Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan. Indeks ini berkolaborasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Bangga untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Indeks Pembangunan keluarga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang dan rentan.

- Nilai iBangga yang kurang baik (rentan) dengan nilai kurang dari 40
- Nilai iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70
- Nilai iBangga yang baik (Tangguh) apabila nilainya diatas 70

Tabel 2.204
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 - 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto	-	54,05	57,77	64,28	63,88
Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Sumatera Barat	-	53,54	56,12	60,99	61,2
Indeks Pembangunan Keluarga Nasional	-	54,01	56,07	61,43	62,4

Sumber: BKKBN

Perhitungan Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2020 tidak dilaksanakan karena adanya wabah covid 19. Pada tahun 2021-2023 nilai Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan, meskipun demikian Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto dari tahun 2020 hingga tahun 2024 berada di atas Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Sumatera Barat dan Indeks Pembangunan Keluarga Nasional. Hal ini menunjukkan Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Sawahlunto sudah semakin baik walaupun masih berada pada posisi berkembang.

I. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Dengan luas wilayah Kota Sawahlunto yang terbatas (seluas 231,94Km²), pelayanan urusan perhubungan di Kota Sawahlunto hanya melayani angkutan darat dan kereta api saja, sementara untuk angkutan kapal laut dan pesawat udara tidak ada di Kota Sawahlunto. Sedangkan perkeretaapian hanya merupakan sarana penunjang kepariwisataan kota tua Sawahlunto dan tidak lagi dijadikan sarana penghubung antar daerah, hal ini dikarenakan banyak sarana prasarana penunjang yang tidak memadai lagi. Disamping angkutan umum juga ada angkutan sewa pribadi berupa travel / carteran yang juga berkembang di Kota Sawahlunto.

Melihat kondisi wilayah Kota Sawahlunto terkait dengan urusan transportasi dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.205
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2023
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota (IKD)	0,44	0,56	0,58	0,25	0,23
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (IKD)	56	65	65	0,11	12
3	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas (IKD)	26	35	30	59,38	-18
4	Jumlah ketersediaan terminal angkutan penumpang (IKD)	2	2	2	2	2
5	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan (IKD)	25	40	60	73,32	74,60
6	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (IKD)	100	100	100	52,96	100
7	Jumlah arus penumpang angkutan umum	25.200	28.350	55.006	23.385	60,122
8	Jumlah uji KIR angkutan umum	382	24	727	1316	1410
9	Persentase layanan angkutan darat	55	75	75	0	0
10	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	30	65	70	73,32	73,32
11	Rasio Panjang jalan perjumlah kendaraan	0,1006944	0,09375	0,0972222	0,097	0,097
12	Persentase sarana prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)	-	-	-	100	100

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah perlengkapan jalan di Kota Sawahlunto. Pada tahun 2023 terdapat penambahan jumlah pada pengadaan kaca tikung dan rambu-rambu. Secara kebutuhan sampai tahun 2024 ketersediaan rambu dan sarana perlengkapan jalan sudah lebih 50%.

Dinas Perhubungan menetapkan arah kebijakan dalam hal meningkatkan manajemen transportasi, meningkatkan pelayanan moda transportasi dan mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api. Jalur kereta api di Kota Sawahlunto sudah dimulai sejak tahun 1892. Pada saat itu pembangunan dimulai sebagai

sarana pengangkutan batu bara Ombilin. Seiring waktu pengangkutan batu bara dengan kereta api semakin berkurang bahkan tidak ada lagi. Kereta api beroperasi sebagai kereta wisata dengan rute Sawahlunto - Muaro Kalaban - Padang Panjang. Namun pada saat ini kereta api memang tidak beroperasi sama sekali. Sesuai dengan adanya rencana Pemerintah Kota Sawahlunto dengan PT.KAI yang akan mengaktivasi kembali jalur kereta api dan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat untuk reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)- Solok-Muaro Kalaban (Sawahlunto).

Kota Sawahlunto mulai ingin menghidupkan kembali kereta api sebagai wisata sejarah. Panjang rel kereta api yang aktif pada saat ini adalah 4,2 Kilometer dari stasiun Sawahlunto ke Stasiun Muaro Kalaban dengan kondisi 2 stasiun aktif. Sawahlunto masih mempunyai 2 lokomotif dengan rincian 1 lokomotif diesel dan 1 lokomotif uap. Keinginan Pemerintah Kota Sawahlunto sangat kuat menjadikan kereta api sebagai salah satu moda transportasi yang pernah diandalkan seperti pada masanya tanpa menghilangkan nilai sejarahnya.

Kereta api wisata mak itam Kota Sawahlunto telah beroperasi kembali semenjak diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Tohir pada tanggal 20 Desember 2022. Pengoperasian kereta api kembali merupakan hasil dukungan dari 4 BUMN yaitu PT.Kereta Api Indonesia, PT.Semen Indonesia, PT. Pupuk Indonesia dan PT. Biofarma dibawah koordinasi Project Manajemen Office (PMO) BUMN untuk Pariwisata Sumatera Barat. Pemerintah Kota Sawahlunto akan memfasilitasi operasional kereta api yang menjadi icon Pariwisata di Kota Sawahlunto.

Sebagai bentuk inovasi Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto telah melakukan pencegahan dalam penyelamatan berlalu lintas, yaitu dengan menempatkan aparat perhubungan dalam zona selamat sekolah. Aparat bertugas pada jam masuk dan pulang sekolah dan bertugas di sekolah-sekolah yang berada di lokasi jalan utama. Inovasi ini sebagai bentuk pencegahan dan salah satu upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.206
Sarana Perlengkapan Jalan di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kaca Tikungan (unit)	82	82	89	104	104
2	Warningh Light (unit)	12	12	12	12	12
3	Traffic Light (unit)	1	1	1	1	1
4	Rambu-rambu (unit)	218	235	247	268	238
5	Guadril (unit)	147	147	147	148	100
6	Diliniatur (unit)	100	100	100	100	100
7	Trapikun (unit)	100	100	100	100	100
8	Marka Jalan (M')	113.885	113.885	113.885	113.885	113.885
9	Jembatan Penyebrangan (unit)	0	0	0	0	0
10	Papan Penunjuk Arah (unit)	46	46	46	46	46
11	Papan Informasi lalu Lintas	0	0	0	0	0
12	Zebra cross (unit)	724	724	724	725	725
13	Trotoar (M')	8.3	8.3	8,3	8,3	8,3
14	RPPJ (M')	10	10	10	10	12
15	Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum (PJU)	4.113	4.126	4.141	4.211	4.227

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah perlengkapan jalan di Kota Sawahlunto. Pada tahun 2023 terdapat penambahan jumlah pada pengadaan kaca tikung dan rambu-rambu. Secara kebutuhan sampai tahun 2024 ketersediaan rambu dan sarana perlengkapan jalan sudah lebih 50%.

Dinas Perhubungan menetapkan arah kebijakan dalam hal meningkatkan manajemen transportasi, meningkatkan pelayanan moda transportasi dan mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api. Jalur kereta api di Kota Sawahlunto sudah dimulai sejak tahun 1892. Pada saat itu pembangunan dimulai sebagai sarana pengangkutan batu bara Ombilin. Seiring waktu pengangkutan batu bara dengan kereta api semakin berkurang bahkan tidak ada lagi. Kereta api beroperasi sebagai kereta wisata dengan rute Sawahlunto - Muaro Kalaban - Padang Panjang. Namun pada saat ini kereta api memang tidak beroperasi sama sekali. Sesuai dengan adanya rencana Pemerintah Kota Sawahlunto dengan PT.KAI yang akan mengaktivasi kembali jalur kereta api dan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat untuk reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)- Solok-Muaro Kalaban (Sawahlunto).

Kota Sawahlunto ingin menghidupkan kembali kereta api sebagai wisata sejarah. Panjang rel kereta api yang aktif pada saat ini adalah 4,2 Kilometer dari stasiun Sawahlunto ke Stasiun Muaro Kalaban dengan kondisi 2 stasiun aktif. Sawahlunto masih mempunyai 2 lokomotif dengan rincian 1 lokomotif diesel dan 1 lokomotif uap. Keinginan Pemerintah Kota Sawahlunto sangat kuat menjadikan kereta api sebagai salah satu moda transportasi yang pernah diandalkan seperti pada masanya tanpa menghilangkan nilai sejarahnya.

Kereta api wisata mak itam Kota Sawahlunto telah beroperasi kembali semenjak diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Tohir pada tanggal 20 Desember 2022. Pengoperasian kereta api kembali merupakan hasil dukungan dari 4 BUMN yaitu PT.Kereta Api Indonesia, PT.Semen Indonesia, PT. Pupuk Indonesia dan PT. Biofarma dibawah koordinasi Project Manajemen Office (PMO) BUMN untuk Pariwisata Sumatera Barat. Pemerintah Kota Sawahlunto akan memfasilitasi operasional kereta api yang menjadi icon Pariwisata di Kota Sawahlunto.

Sebagai bentuk inovasi Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto telah melakukan pencegahan dalam penyelamatan berlalu lintas, yaitu dengan menempatkan aparat perhubungan dalam zona selamat sekolah. Aparat bertugas pada jam masuk dan pulang sekolah dan bertugas di sekolah-sekolah yang berada di lokasi jalan utama. Inovasi ini sebagai bentuk pencegahan dan salah satu upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Sawahlunto.

J. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto mulai bulan November tahun 2022, sedangkan sebelumnya dilaksanakan oleh Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto. Berikut capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sawahlunto pada tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 2.207
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK	%	70	60	65	95	100
Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota	%	75	50	60	100	100
Persentase organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	%	100	100	100	100	100
Persentase layanan publik yang telah dilaksanakan secara online dan terintegrasi (%)	%	100	100	100	100	100
Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota (%)	%	100	100	100	77	77

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto 2025

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa capaian beberapa indikator kinerja yang melekat pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sawahlunto ada yang telah terpenuhi 100 %. Namun masih ada capaian beberapa indikator kinerja yang masih di bawah 100 % dan berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, indikator kinerja yang dimaksud adalah: 1). Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK; 2). Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota.

Permasalahan yang dihadapi Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sawahlunto dalam pemenuhan kinerja adalah 1). terbatasnya Sumber daya manusia yang berlatar belakang keahlian Informasi dan teknologi (IT); 2). Sulitnya pembangunan jaringan internet yang disebabkan kondisi geografis Kota Sawahlunto yang berbukit-bukit; 4).Terbatasnya pembangunan dan pelayanan jaringan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi; 5). Belum optimalnya integrasi data.

K. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Upaya pemberdayaan Koperasi & UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan UKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan. Adapun perkembangan koperasi yang aktif dan tidak aktif di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.208
Persentase Koperasi Aktif Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi aktif (unit)	53	54	53	46	42
2	Jumlah koperasi (unit)	68	68	69	69	68
3	Persentase koperasi aktif	77,9	79,4	77	66.67	61.76

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Dari Tahun 2021-2024 persentase koperasi yang aktif mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena selain terkait transisi pasca pandemic, juga disebabkan oleh factor internal di koperasi itu sendiri seperti Modal Terbatas, Kurangnya kerjasama antara pengurus, pengawas dan anggotanya serta tidak memiliki jiwa koperasi, mereka hanya ikut-ikutan untuk menjadi bagian dari anggota koperasi. Dengan kondisi seperti ini dilakukan pembinaan-pembinaan terhadap koperasi yang ada. Pembinaan terhadap koperasi sangat menentukan perkembangan koperasi, untuk koperasi aktif yang menjadi indikator adalah koperasi yang melaksanakan RAT sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi, apabila koperasi tidak melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut, maka dianggap koperasi tersebut tidak aktif. Ini perlu kerja keras pemerintah daerah dalam mengaktifkan koperasi yang ada. Koperasi yang tidak RAT diupayakan pembenahan agar dapat menjalankan aktivitas usaha kembali namun apabila tidak bisa diaktifkan lagi akan dibubarkan oleh kementerian Koperasi. Pembinaan dan pendampingan sangat diperlukan oleh koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya. Secara modal dan keanggotaan koperasi dapat dlihat perkembangan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.209
Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi (unit)	68	68	69	69	68
2	Jumlah Koperasi Aktif	53	54	53	46	42
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	15	14	16	23	26
4	Jumlah Koperasi RAT	43	35	35	35	37
5	Jumlah Anggota orang)	8.775	8.221	8.162	8.096	7,939
6	Jumlah Tenaga Kerja	113	113	113	59	54
7	Volume Usaha (Rupiah)	57.792.083	38.657.300	32.069.047	41.426.853	34.943.237
8	Modal Sendiri (Rupiah)	48.055.094	46.707.152	47.806.369	49.765.884	48.741.306
9	Modal Luar (Rupiah)	33.169.494	29.679.215	28.845.420	29.713.793	26.643.184
10	Aset (Rupiah)	81.224.588	70.711.781	76.651.789	79.479.676	75,384.489
11	SHU (Rupiah)	4.427.901	2.921.196	2.075.983	2.524.182	1.913.801

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Dilihat dari tabel di atas volume usaha pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Ini dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya SHU. SHU pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan Volume Usaha mengalami penurunan. Selain permodalan yang tidak kalah penting adalah faktor sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengurus koperasi. Untuk itu fasilitasi Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan dunia usaha dinilai perlu ditempuh untuk mengoptimalkan potensi koperasi yang telah ada. Kementerian Koperasi Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap koperasi khususnya koperasi simpan pinjam sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 6/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Perkembangan koperasi sehat ini dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.210
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

No	Kriteria Koperasi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sehat (%)	14,71	9,37	14,50	26.08	18.84
2.	Cukup sehat (%)	32,35	39,06	31,89	34.78	26.09
3.	Kurang sehat (%)	10,29	4,69	2,90	4.35	5.8
4.	Belum dinilai (%)	5,88	0	27,54	34.78	11.59
5	Tidak dinilai (%)	36,77	46,87	23,19	33.33	37.68

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk koperasi sehat yang ada di kota Sawahlunto mengalami persentase penurunan yang signifikan. Pada Tahun 2024 Persentase koperasi sehat adalah 18.84 % turun signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 26.08 %. Penurunan ini disebabkan oleh Koperasi kesulitan membiayai kegiatannya karena kurangnya modal sendiri dan sulit menarik modal dari luar. Selain itu yang yang menyebabkan koperasi kurang sehat dikarenakan Koperasi kurang mampu beradaptasi dengan teknologi dan inovasi baru. Kondisi koperasi secara keseluruhan yang ada di Kota Sawahlunto dari tahun 2020-2024 rata-rata masih dalam kondisi kurang stabil, ini berarti sangat perlu peningkatan pengawasan terhadap koperasi. Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi bahwa yang melaksanakan pengawasan koperasi ini adalah Walikota.

1. Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB

Rasio volume koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB suatu wilayah. Semakin besar rasio volume koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu.

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU, biasanya dihitung berdasarkan andil.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

Berikut perkembangan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.211
Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Kota Sawahlunto (%)
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Volume Usaha Koperasi (Rp)	57.792.083	38.657.300	32.069.047	41.426.853	34.943.237
Total PDRB (miliar rupiah)	3.656,59	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
Rasio (%)	**0,0016**	**0,0010**	**0,0007**	**0,0009**	**0,0007**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Berdasarkan tabel di atas, rasio volume koperasi terhadap PDRB tahun 2024 mengalami pergerakan yang menurun, hal ini mengindikasikan semakin kecilnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian Kota Sawahlunto. Penurunan yang signifikan dari rasio volume koperasi terhadap PDRB disebabkan semakin berkurangnya jumlah koperasi di Kota Sawahlunto yang berakibat menurunnya volume usaha koperasi di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.212
Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	77,94	10,29	8,70	13.04	7,35
2.	Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Wira Usaha (%)	1,12	36,17	0,4	0.32	0.5
3.	Persentase UMKM yang meningkat Skala Usahanya (%)	1,12	0,40	0,3	0.32	0.5
4.	Presentase UMKM Non BPR	3.708	4.114	4.328	4.677	4.730
5.	Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian	15,79	16,86	17,99	18,96	19,10
6.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	99,78	100	99.80	99.81	99.93

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Tabel 2.213
Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro
Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	129	131	133	314	306
2.	Pertambangan danPengendalian	0	0	0	0	1
3.	Industri Pengolahan	1425	1439	1459	1573	1671
4.	Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0	0
5	Bangunan	0	0	0	0	0
6.	Perdagangan,Hotel dan Restoran	1450	1476	1487	1613	1596
7.	Pengangkutan / Komunikasi	0	0	0	0	33
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0
9.	Jasa Lainnya	202	207	211	267	342

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Dari Tabel Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro Kurang dari 60.000.000 dapat disebutkan bahwa capaian indikator tersebut setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Ini pertanda dukungan pemerintah daerah terhadap usaha mikro yang ada di Kota Sawahlunto positif, apakah itu dari regulasi maupun permodalan.

Tabel 2.214
Capaian Indikator Kinerja Usaha Kecil
Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	8	8	8	10	10
2.	Pertambangan danPengendalian	0	0	0	2	7
3.	Industri Pengolahan	125	125	125	182	176
4.	Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0	1
5	Bangunan	0	1	1	2	2
6.	Perdagangan,Hotel dan Restoran	580	586	594	550	484
7.	Pengangkutan / Komunikasi	0	0	0	0	11
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0	0	0	1	1
9.	Jasa Lainnya	82	86	90	134	89

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Dari Tabel Capaian Indikator Kinerja Usaha Kecil Lebih dari 60.000.000 dapat dijelaskan bahwa capaian indikator setiap tahunnya mengalami kenaikan yang positif. Dengan pertumbuhan yang positif ini akan berdampak pada PAD Pemerintah Daerah.

2. Proporsi Jumlah Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

UKM adalah ragam usaha yang dilakukan dengan skala kecil sampai dengan menengah. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 menjelaskan tentang usaha kecil, mikro, serta menengah sebagai berikut :

- Usaha kecil merupakan bisnis yang memiliki pendapatan dari 300 juta hingga 2,5 miliar setiap tahunnya.
- Usaha menengah merupakan usaha yang memiliki pendapatan 2,5 miliar hingga dengan 50 miliar setiap tahunnya, karyawan yang dimiliki oleh usaha menengah harus sekitar 30 hingga 100 pekerja.
- Usaha mikro merupakan bisnis yang mempunyai pendapatan 300 juta setiap tahunnya serta memiliki karyawan sekitar kurang dari 20 orang.

Adapun perkembangan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.215
Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah UKM Non Pertanian	563	670	720	825	903
2	Jumlah Unit Usaha	3565	3973	4003	4352	4728
3	Proporsi (%)	15.79	16.86	17.99	18.96	19.10

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah UKM non pertanian selama kurun waktu tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan turun, terutama tahun 2021 dimana terjadi penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan dampak dari wabah Covid 19. Namun mulai tahun 2024 jumlah UKM non pertanian meningkat kembali.

L. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di Bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Keberhasilan pembangunan bidang penanaman modal dapat ditunjukkan melalui capaian realisasi investasi di Kota Sawahlunto, melalui kebijakan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan peran kinerja dan daya saing BUMD dalam pengokohan ekonomi Kota Sawahlunto. Keberhasilan tersebut dapat ditunjukkan melalui capaian realisasi investasi dibawah ini.

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Berikut ini disajikan jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.216
Jumlah Perusahaan Yang Berinvestasi Di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perusahaan (PMDN/PMA) yang Berinvestasi	11	67	100	116	45

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan jumlah perusahaan yang berusaha/berinvestasi di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, pada tahun 2020 sebanyak 11 perusahaan, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 67 perusahaan, pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 100 perusahaan, pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi menjadi 116 perusahaan, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 45 perusahaan. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya bahkan tidak adanya perusahaan sektor konstruksi yang berinvestasi di Kota Sawahlunto Tahun 2024.

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi di Kota Sawahlunto sebagian besar adalah investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan nilai investasinya mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan oleh menurunnya usaha pertambangan di Kota Sawahlunto dan kebijakan kota yang merubah perencanaan pembangunan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berikut disajikan realisasi investasi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.217
Jumlah Realisasi Investasi di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Jenis	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PMDN	28.276	45.831	112.593	212.792	252,65
2	PMA	-	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi investasi selama rentang tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar Rp. 28.276 miliar naik menjadi 252,65 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha/perusahaan dalam pelaporan LKPM dan adanya ekspansi usaha dari sektor pertambangan ke sektor transportasi, gudang dan komunikasi. Meskipun nilai realisasi investasi ini meningkat, tapi nilai ini masih rendah (peringkat ke-9 dari 19 kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat).

Target Indikator Kinerja Daerah Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) tidak tercapai karena persoalan internal dan eksternal. Kendala eksternal antara lain adalah : 1) kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai, lahan di Kota Sawahlunto kebanyakan adalah tanah ulayat, 2) kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau bahan mentah yang harus diproduksi, dan 3) kesulitan dana atau pembiayaan proyek. Sedangkan kendala internal diantaranya, yaitu : 1) faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional ataupun secara global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah, masih rendahnya kualitas promosi dan informasi investasi tentang peluang investasi; dan 2) adanya peraturan yang tidak konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah, ataupun peraturan lainnya yang mendistorsi peraturan mengenai penanaman modal. Rekomendasi mendorong investasi di Kota Sawahlunto melalui pemberian insentif atau fasilitas investasi yang menarik, dan meningkatkan konsistensi peraturan tentang penanaman modal pada setiap jenjang pemerintahan perlu dilakukan.

1. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah pekerja pada seluruh proyek penanaman modal terhadap total jumlah proyek penanaman modal. Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi rasio daya serap tenaga kerja. Berikut disajikan rasio daya serap tenaga kerja Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.218
Jumlah Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan Rata-rata per Tahun (%)
1.	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN yang ada di Kota Sawahlunto	2.638	2.957	2.705	2.604	2.322	2,75
2.	Jumlah seluruh PMA/PMDN yang ada di Kota Sawahlunto	11	68	100	116	121	146,39
3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	240	43	27	22	19	37,80

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data Diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan rasio daya serap tenaga kerja PMDN dan PMA di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata 37,80 %, baik penyerapan tenaga kerja di perusahaan dalam negeri maupun penyerapan tenaga kerja di perusahaan asing.

2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak termasuk dalam PMTB, tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB merupakan komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut jenis pengeluaran, bersama-sama dengan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga,

pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran perubahan inventori, dan ekspor barang dan jasa.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share/kontribusi PMTB terhadap PDRB Kota Sawahlunto. Berikut disajikan perkembangan besaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.219
Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PMTB (Miliar Rupiah)	652,49	666,26	695,56	745,75	767,19
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	2.760,92	2.829,35	2.941,27	3.072,35	3.195,86
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	**23,63%**	**23,55%**	**23,65%**	**24,27%**	**24,01%**

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data Diolah

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan nilai PMTB dan PDRB ADHK di Kota Sawahlunto sebagai variabel yang menentukan nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) menunjukkan tren yang meningkat. Besaran PMTB (% PDRB) di Kota Sawahlunto sebesar 23,63% pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto ditentukan oleh PMTB sebesar 23,63%. Pada saat PMTB (% PDRB) naik menjadi 24,01% pada tahun 2024 ini menunjukkan bahwa peran PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto bertambah menjadi 24,01%. Dengan demikian, besaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) menunjukkan seberapa besar peranan atau kontribusi komponen PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.

Capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang penanaman modal Kota Sawahlunto secara keseluruhan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.220
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi Investasi (%)	-85,89	62,08	145,67	88,99	18,73
2	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)	28.276	45.831	112.593	212.792	252,65
3	Persentase Peningkatan Jumlah Investor (%)	-42,11	509,09	49,25	16	30,88
4	Persentase Penerbitan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP (%)	95	95	100	100	99,82
5	Persentase Peluang Investasi yang Telah Divalidasi (%)	NA	NA	NA	NA	42,22
6	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terakses Publik (%)	100	100	100	100	100
7	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai)	83,59	88,29	89,15	90,36	91,06
8	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)	-172	17	66	100	212
9	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Aplikasi (%)	75	85	100	100	100
10	Persentase Penurunan Pengaduan Masyarakat (%)	30	50	33,3	75	80

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 secara keseluruhan realisasi capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang penanaman modal sudah cukup baik. Investasi mulai meningkat, meningkatnya investasi ini berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi pada umumnya. Kemudahan-kemudahan investasi yang diberikan dan inovasi yang dilakukan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal serta kehadiran Mal Pelayanan Publik di Kota Sawahlunto sangat berpengaruh terhadap jumlah investasi yang ada di Kota Sawahlunto, ini terbukti pada tahun 2024 Dinas PMPTSPNaker mendapatkan penghargaan inovasi terhadap pelayanan perizinan di Kota Sawahlunto. Untuk itu peningkatan pelayanan perizinan menjadi hal penting dalam peningkatan investasi di Kota Sawahlunto.

Investasi perlu terus ditingkatkan karena investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi/ memacu pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja/menciptakan lapangan kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata/pembangunan ekonomi yang inklusif.

Agar dapat memacu pertumbuhan investasi yang diharapkan maka perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif. Untuk menarik minat bagi investor agar mau menanamkan modalnya maka diperlukan adanya kepastian akan keamanan dan menciptakan kondisi dan situasi perekonomian yang baik.
2. Melaksanakan promosi investasi dan menyediakan data yang tepat dan akurat mengenai sektor-sektor unggulan yang ada di Kota Sawahlunto.
3. Prosedur yang sederhana dan pelayanan yang lancar. Para investor diberikan kemudahan didalam mengakses dan menanamkan modalnya serta dalam memperoleh informasi/gambaran mengenai keadaan dari Kota Sawahlunto. Dengan kata lain didalam prosedur dan pelayanan harus benar-benar yang profesional dan tidak berbelit-belit.
4. Sarana dan Prasarana yang menunjang. Peraturan yang konsisten yang menjamin kepastian berusaha dan keamanan investasi yang dibuktikan dengan adanya kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dalam bidang penanaman modal (investasi) baik investor asing/domestik.
5. Aksesibilitas/infrastruktur.

J. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Perkembangan organisasi pemuda ini perlu ditingkatkan lagi sebagai salah satu antisipasi dalam mengurangi tingkat kriminalitas dan perilaku menyimpang pemuda di Kota Sawahlunto sehingga masalah sosial ini dapat dituntaskan. Perkembangan kepemudaan dan Olahraga yang ada di Kota Sawahlunto terlihat dari realisasi kinerja daerah setiap tahunnya, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.221
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	15	16	4,13	5,3	5,25
2	Peningkatan prestasi olahraga (medali)	82	162	177	382	385
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	1	1	0,008	2,77	3

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat Organisasi kepemudaan dan olahraga adalah hal penting yang ada dalam suatu daerah. Dalam Peningkatan prestasi olahraga pada tahun 2020 mendapat perolehan medali sebanyak 82 medali tetapi pada tahun 2021 terjadi kenaikan perolehan medali menjadi 162 medali yang disebabkan banyak atlet Kota Sawahlunto yang mengikuti kejuaraan dalam setiap event baik itu Kota, Provinsi dan Nasional dan tahun 2022 kembali naik menjadi 177 medali kemudian tahun 2023 kembali terjadi kenaikan yang sangat signifikan menjadi 382 medali karena banyaknya event event yang diikuti dan tahun 2024 perolehan medali Kembali meningkat menjadi 385 medali

Pada tabel diatas juga tergambar organisasi kepemudaan yang cukup aktif karena Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sangat memperhatikan dan sangat mendukung seluruh organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di Kota Sawahlunto, persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Sawahlunto pada tahun 2020 sebanyak 15% tetap tapi pada tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi 16% serta tahun 2022 kembali terjadi penurunan menjadi 4,13% kemudian tahun 2023 terjadi sedikit kenaikan menjadi 5,3 %, tahun 2024 kembali turun menjadi menjadi 5,25 % yang disebabkan tidak adanya event di Kota Sawahlunto. Tingkat partisipasi ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah Kota dilihat dari berbagai event event yang diikuti pemuda. Pada tahun 2020, Sawahlunto mengutus salah satu pemudanya menjadi perwakilan dalam ajang pemuda pelopor dan berhasil mendapatkan peringkat pertama ditingkat nasional sehingga setelah itu banyak pemuda pemudi Kota Sawahlunto yang mulai berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri seperti mengikuti pelatihan kewirausahaan pada tahun 2024 sebanyak 107 orang yang terbagi dalam :

Tabel 2.222
Pelatihan Kewirausahaan Untuk Pemuda Kota Sawahlunto
Tahun 2024

No	Jenis Pelatihan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki laki	Perempuan	
1.	Pembuatan Roti dan Kue	-	27	27
2.	Teknisi Sepeda Motor Konvensional	12	-	12
3.	Pengelasan SMAW Posisi 2F	44	-	44
4.	Refrigerator/AC	16	-	16
4.	Menjahit	8	-	8
Total				**107**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

1. Jumlah Klub dan Gedung Olahraga

Perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Kota Sawahlunto dalam mendukung prestasi olahraga di Kota Sawahlunto seperti salah satunya gedung olahraga, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Adapun Perkembangan Organisasi kepemudaan di Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.223
Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Kota SawahluntoTahun 2020-2024

No	Klub dan Gedung Olahraga	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Klub Olahraga	93	93	95	97	97
2.	Jumlah Gedung Olahraga	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas PariwisataPemuda dan Olahraga, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah gedung olahraga tidak ada, ini disebabkan karena sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kota Sawahlunto tidak termasuk dalam kategori jenis gedung olahraga. Sedangkan untuk klub olahraga di Kota Sawahlunto terjadi peningkatan dari tahun 2021 yang berjumlah 93 klub menjadi 95 pada tahun 2022 dan Kembali naik menjadi 97 klub pada tahun 2023 dan tahun 2024 yang disebabkan banyaknya minat masyarakat dalam mengikuti setiap cabang olahraga yang ada.

Adapun Perkembangan Organisasi kepemudaan di Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.224
Jumlah Organisasi Kepemudaan
Tahun 2020-2024

No	Nama Organisasi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	HIPMI	V	V	V	V	V
2.	AMPI	V	V		V	V
3.	Fatayat NU	V	V		V	V
4.	Pemuda Muhammadiyah	V	V	V	V	V
5.	BM PAN	V	V		V	V
6.	Gema Kosgoro	V	V			
7.	GM Kosgoro	V	V			
8.	GP Anshor	V	V			
9.	BKPRMI	V	V		V	V
10.	Garda Keadilan	V	V			
11.	Nasyatul Assiyah	V	V		V	V
12.	IPTI	V	V			
13.	KNPI Sawahlunto	V	V	V		V
14.	KNPI Kec. Talawi	V	V			V
15.	KNPI Kec. Barangin	V	V			V
16.	KNPI Kec. Lembah Segar	V	V			V
17.	KNPI Kec. Silungkang	V	V			V
18.	GM FKPPI	V	V			V
19.	Pemuda Pancasila	V	V	V	V	V
20.	Purna Paskibraka	V	V	V	V	V
21.	Organisasi Siswa Intern Sekolah					V

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

Tabel 2.225
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah organisasi Pemuda yang aktif (organisasi)	19	19	6	9	16
2	Jumlah Total organisasi Pemuda (organisasi)	19	19	21	21	21
3	**Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%)**	**100**	**100**	**28,6**	**42,9**	**76,2**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 terdapat 19 organisasi kepemudaan yang aktif tetapi tahun 2022 ada penambahan organisasi kepemudaan tetapi yang aktif menurun menjadi 6 organisasi tetapi pada tahun 2023 organisasi kepemudaan yang aktif naik menjadi 9 organisasi, pada tahun 2024 tidak ada yang berubah dari segi jumlah tetapi keaktifan naik menjadi 16 organisasi. Secara keseluruhan organisasi kepemudaan berbadan hukum serta masing masing organisasi mempunyai kegiatan yang selalu mendukung untuk visi misi dan arah pembangunan Kota Sawahlunto 5 tahun kedepan.

Tabel 2.226
Cakupan Pembinaan Olahraga
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina (cabor)	38	44	45	45	46
2	Jumlah Cabang Olahraga yang ada/terdaftar (cabor)	38	44	45	45	46
3	**Cakupan pembinaan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah cabang olahraga yang terdaftar di Kota Sawahlunto tahun 2020 sebanyak 38 cabor, tahun 2021 naik menjadi 44 cabor, tahun 2022 kembali naik menjadi 45 dan tahun 2023 tetap sebanyak 45 cabor sedangkan tahun 2024 kembali naik menjadi 46 cabor, dari tahun 2020 sampai tahun 2024 seluruh cabor tersebut dibina dengan baik melalui monitoring dan evaluasi ke cabor tersebut serta dukungan anggaran melalui wadah KONI Kota Sawahlunto.

Tabel 2.227
Cakupan Pelatih yang Bersertifikat Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelatih yang bersertifikat (orang)	12	22	25	27	30
2	Jumlah Seluruh Pelatih (orang)	76	88	90	92	95
3	**Cakupan pelatih yang bersertifikat (%)**	**15,8**	**25**	**27,8**	**29,3**	**31,57**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

Dari tabel diatas dapat terlihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 ada penambahan jumlah pelatih dari 76 orang menjadi 88 orang dengan penambahan pelatih bersertifikat dari 12 orang menjadi 22 orang kemudian pada tahun 2022 kembali ada penambahan pelatih menjadi 90 orang dan penambahan pelatih yang bersertifikat menjadi 25 orang, dan pada tahun 2023 terjadi penambahan lagi menjadi 92 orang dan penambahan untuk pelatih yang bersertifikat menjadi 27 orang kemudian pada tahun 2024 terjadi lagi peningkatan jumlah pelatih menjadi 95 orang dan pelatih yang mempunyai sertifikat menjadi 30 orang.

Tabel 2.228
Cakupan Pembinaan Atlet Pelajar Kota Sawahlunto
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Atlet Pelajar Yang dibina (orang)	110	113	163	193	193
2	Jumlah Seluruh Atlet Pelajar (orang)	188	200	250	250	250
3	**Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%)**	**58,5**	**56,5**	**65,2**	**77,2**	**77,2**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

Dari cakupan pembinaan atlet pelajar Kota Sawaahlunto terlihat terjadi peningkatan dari tahun 2020 sampai 2023, begitu juga dengan jumlah atlet pelajar yang dibina tetapi secara persentase perbandingan antara jumlah atlet pelajar dan atlet pelajar yang dibina terjadi penurunan karena banyaknya tambahan atlet pelajar sedangkan yang dibina tidak semua atlet pelajar yang ada, dan tidak ada yang berubah pada tahun 2024, Dari tingkat perolehan medali dalam setiap ajang turnamen olahraga juga terlihat fluktuatif dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.229
Prestasi Olahraga Menurut Cabang
Tahun 2020–2024

No	Cabang Olahraga	Perolehan Medali Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	KEMPO	-	19	19	27	28
2.	AERO SPORT	-	2	-		
3.	ANGKAT BESI	-	-	-		
4.	TARUNG DERAJAT	-	1	3	17	18
5.	BALAP MOTOR (IMI)	-	-	1		
6.	CRICKET	-	1	-		
7.	PANJAT TEBING	13	33	79	53	53
8.	TENIS MEJA	-	1	-	1	1
9.	KARATE	20	2	2	41	41
10.	TAEKWONDO	-	49	44	144	144
11.	BRIDGE	-	4	2	7	7
12.	ATLETIK	-	3	8	14	14
13.	CATUR	-	-	-	13	13
14.	TENIS LAPANGAN	1	9	-	54	54
15.	PERTINA	-	-	3		
16.	PANAHAN	-	18			
17.	GULAT	-	3	12		
18.	WUSHU	-	16	-		
19.	BILYARD (POBSI)	-	-	-		
20.	BOLA BASKET (PERBASI)	-	-	-		
21.	BOLA VOLLY (PBVSI)	-	-	-		
22.	BULU TANGKIS (PBSI)	-	-	-		
23.	MENEMBAK (PERBAKIN)	-	-	-		
24.	PENCAK SILAT (IPSI)	-	-	-		
25.	RENANG (PRSI)	-	-	-		
26.	SENAM (PERSANI)	-	-	-	9	9
27.	SEPAK BOLA (PSSI)	-	-	-		
28.	SEPAK TAKRAW (PSTI)	-	-	-		1
29.	BINARAGA FITNES (PBFI)	-	1	-		
30.	ANGKAT BERAT (PABERSI)	-	-	4		
31.	FUTSAL	-	-	-		
32.	MUAYTHAI (MI)	-	-	-		
33.	SEPATU RODA (PORSEROSI)	-	-	-		
34.	GATEBALL	-	-	-		
35.	ARUNG JERAM (FAJI)	-	-	-		
36.	BERKUDA (PORDASI)	-	-	-		
37.	YONG MOO DO	-	-	-		
38.	SOFT TENIS (PESTI)	-	-	-		
39.	BOLA TANGAN (ABTI)	-	-	-		
40.	DRUM BAND (PDBI)	-	-	-		
41.	IBA MMA	-	-	-		
42.	ESPORT	-	-	-		
43.	HOCKEY	-	-	-	2	2
44.	KICKBOXING	-	-	-		
45.	PETANQUE (FOPI)	-	-	-		
Total Medali		82	162	177	382	385

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

Dari tabel diatas juga dapat dilihat peningkatan perolehan medali pada tahun 2021 tidak lepas dari pengaruh pelatih pelatih yang sudah mempunyai sertifikat kepelatihan yang diperoleh Kota Sawahlunto sebanyak 22 orang yang tersebar dalam berbagai cabang olahraga. Begitu juga dengan tingkat pembinaan terhadap atlet muda yang selalu meningkat dari tahun 2020 sebanyak 188 orang dan pada tahun 2021 menjadi 200 orang kemudian tahun 2022 kembali ada peningkatan menjadi 250 orang dan tahun 2023, 2024 tidak peningkatan atau sama. Kemudian dari tabel diatas juga tergambar jumlah medali yang diperoleh atlet dari tahun 2020 sebanyak 82 medali, tahun 2021 meningkat menjadi 162 medali yang disebabkan telah berakhirnya covid-19 dan telah diadakan Kembali berbagai tournament, tahun 2022 perolehan medali kembali meningkat menjadi 177 medali, tahun 2023 kembali terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi 382 dan tahun 2024 kembali naik menjadi 385 medali.

K. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik merupakan Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota. Setiap urusan memiliki indikator yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kota Sawahlunto pada tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 2.230
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku Kota Sawahlunto Dalam Angka	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Kota Sawahlunto	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Dinas Kominfo Kota Sawahlunto, 2025

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa ketersediaan sistem data dan statistik terintegrasi serta data statistik berupa buku Kota Sawahlunto Dalam Angka beserta Buku PDRB Kota Sawahlunto dari tahun 2020-2024 telah terpenuhi, data tersebut merupakan dasar bagi perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah.

Meskipun indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik telah terpenuhi, namun masih terdapat permasalahan yang harus segera diatasi, yakni belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut : 1). Masih rendahnya pemahaman beberapa Perangkat Daerah yang telah menyampaikan data saat dilakukan verifikasi dan validasi; 2). Belum optimalnya forum satu data; 3).Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan portal satu data.

L. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Pengamanan informasi merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto melalui Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting dalam era teknologi informasi saat ini yang sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek, mulai dari administrasi perkantoran, perencanaan dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Berikut capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian di Kota Sawahlunto pada tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 2.231
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Pengamanan Informasi Pemda (bulan)	Bulan	12	12	12	12	12
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, penyelenggaraan pengamanan informasi daerah di Kota Sawahlunto terlihat berjalan dengan baik, tercermin dari terpenuhinya target setiap tahunnya sehingga tingkat capaian keamanan informasi pemerintah menunjukkan angka 100 % setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024. Untuk menjaga pencapaian keberhasilan pelaksanaan Urusan Bidang Persandian tersebut, dan untuk menyikapi tantangan ke depan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : (1). Peningkatan Sarana dan Prasarana Persandian. (2). Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola dan pelaksana bidang persandian.

M. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1. Jumlah Grup Kesenian

Kota Sawahlunto selama ini telah dikenal sebagai Kota Seni dan Budaya yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, karena masyarakatnya yang heterogen dan multikultural sehingga melahirkan berbagai karakter dan budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Kota Sawahlunto. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul dikalangan masyarakat dan Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal ini terbukti dengan dicanangkannya Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.

Perkembangan kesenian di Kota Sawahlunto dapat dilihat dari perkembangan jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian yang ada di Kota Sawahlunto setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.232
Grup Kesenian Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Grup Kesenian	Unit	38	38	35	38	50
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	65,14	65,69	65,69	67,76	68,73
3.	**Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk**	**Unit**	**0,58**	**0,58**	**0,53**	**0,56**	**0,73**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan grup kesenian dari tahun 2020 sampai tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 35 grup pada tahun 2023 kembali naik menjadi 38 grup, tetapi tahun 2024 kembali terjadi kenaikan yang signifikan menjadi 50 grup yang disebabkan telah diadakannya berbagai penampilan kesenian, Adapun penurunan ini terjadi disebabkan terjadinya penurunan anggaran pada seluruh OPD Pemerintah Kota sehingga kegiatan kegiatan yang menyangkut dengan penampilan serta aktivitas grup kesenian tidak berjalan, padahal grup kesenian ini sangat bergantung dengan kegiatan atau event event yang dilaksanakan kota.

2. Jumlah Gedung Kesenian

Untuk mewujudkan Visi Misi Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, sangat perlu melestarikan seni dan budaya yang ada dan berkembang di tengah masyarakat, maka keberadaan gedung kesenian merupakan hal yang sangat penting sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat anak bangsa, disisi lain pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat suatu daerah. Salah satu bentuk pembangunan bidang seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah, Tabel berikut ini menunjukkan data jumlah gedung kesenian di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.233
Jumlah Gedung Kesenian di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	20	20	20	19	19
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	65,14	65,69	66,41	67,76	68,73
3.	**Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 penduduk**	**Unit**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,28**	**0,28**

Sumber Data: Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2024

Pemerintah Kota Sawahlunto belum memiliki gedung pertunjukan kesenian yang representatif dan memenuhi standar sebuah gedung pertunjukan kesenian. Sehingga pelaku-pelaku seni Kota Sawahlunto masih memanfaatkan aula/ruang pertemuan gedung perkantoran dan sekolah serta ruang-ruang terbuka yang sering digunakan masyarakat untuk berkumpul atau bersosialisasi dalam melakukan aktivitas seni. Adapun jumlah tempat pertunjukan kesenian yang sering digunakan oleh pelaku seni di Kota Sawahlunto berjumlah 19 lokasi yang terdiri dari dalam ruangan (*indoor*) sebanyak 7 tempat dan luar ruangan (*outdoor*) 12 tempat.

Namun secara kenyataanya Kota Sawahlunto hanya memiliki 1 Gedung Kesenian yaitu Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) yang merupakan bangunan tua peninggalan Belanda yang dulunya merupakan Gedung Pertemuan Masyarakat, dan berfungsi sebagai tempat hiburan bagi para kolonial Belanda yang saat ini juga tidak bisa digunakan karena musibah kebakaran pada tanggal 03 November 2022 yang lalu. Penyelenggaraan pertunjukkan kesenian tidak hanya diadakan didalam gedung kesenian, dapat juga di ruang terbuka publik yang digunakan sebagai

tempat berekspresi bagi para seniman. Ruang terbuka publik yang sering digunakan bagi para seniman Kota Sawahlunto untuk menampilkan karya seni dan pertunjukan kesenian lainnya adalah Lapangan Segitiga atau lebih dikenal dengan Lapseg, dan panggung terminal di Kota Sawahlunto dan di terminal di Talawi.

Dalam periode kepemimpinan Riyanda Putra, S.IP, sebagai Walikota Sawahlunto periode 2025-2030, ditekankan pada Misi ke-empat yaitu *Pengembangan Komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan.* Hal ini menjadi perhatian khusus bagi budaya dan komunitas seni yang ada di Kota Sawahlunto untuk dapat merepresentasikan Kota Sawahlunto sebagai bagian Warisan Budaya Dunia UNESCO Ombilin Coal Mining Heritage.

3. Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya

Kota Sawahlunto adalah Kota kecil peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. Kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian besar telah ditetapkan sebagai cagar budaya dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi "Kota Wisata Tambang yang Berbudaya" dan terus melestarikan peninggalan hindia Belanda di Sawahlunto serta menjadikan Kota Sawahkunto sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat, ini terbukti pada tanggal 6 Juli 2019 Kota Sawahlunto ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Dunia yang lebih dikenal dengan istilah Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) atau yang disebut dengan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS), penetapan oleh UNESCO ditetapkan dengan keputusan Komite Warisan Dunia. Kawasan WTBOS meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yang meliputi : Kota Sawahlunto, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar dan Kab. Padang Pariaman. Penetapan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) sebagai Warisan Dunia UNESCO tanggal 6 Juli 2019 di Baku, Azerbaijan, 2019 Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto merupakan warisan budaya dunia ke-5 setelah Borobudur, Prambanan, Sangiran, dan Subak Bali.

Cikal bakal pengajuan ini sudah dimulai sejak Tahun 2009 yang lalu, namun penggarapan secara intens untuk proses nominasi, evaluasi, hingga penetapan berlangsung cukup cepat, dimana hanya membutuhkan waktu 4 (empat) tahun sejak masuk dalam daftar sementara (tentative list) pada 30 Januari 2015 dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tanggal 6 Juli 2019 (https://whc.unesco.org/en/list/1610) yang dihadiri sebanyak 22 (dua puluh dua) orang delegasi Republik Indonesia dengan Ketua delegasi Prof. Rosa Surya Putra (Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO) dan Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat) serta Deri Asta (Walikota Sawahlunto periode 2018-2023). Proses sidang dimulai dengan ICOMOS membacakan hasil misi evaluasi, tanggapan para anggota komite warisan dunia, hingga Pimpinan Sidang yang saat ini dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Republik Azerbaijan mengetok palu tanda pengakuan kekayaan budaya Ombilin Sawahlunto sebagai kekayaan budaya dunia. Tentunya penetapan ini tidak berjalan mulus dengan berbagai kondisi baik di daerah maupun di pusat, terutama peraturan perundangan pelestarian yang masih belum secara menyeluruh dapat dijadikan panduan dalam pengelolaan situs warisan dunia maupun cagar budaya.

Sawahlunto ditetapkan sebagai Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) atau yang disebut dengan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) adalah contoh representatif dan luar biasa dari kesatuan teknologi perintis yang direncanakan dan dibangun oleh insinyur Eropa di koloni mereka serta dirancang untuk mengekstraksi sumber daya batubara yang strategis. Properti ini tidak hanya memiliki nilai universal yang luar biasa karena menunjukkan perkembangan teknologi perintis, memadukan pengetahuan teknik Eropa dengan kearifan lingkungan lokal dan praktikpraktik tradisional dalam pengorganisasian tenaga kerja, tetapi juga mencerminkan dampak mendalam dan berkelanjutan dari perubahan hubungan sosial dalam konteks produksi yang diberlakukan oleh kekuatan kolonial Eropa di koloni mereka, dalam hal mensuplai material dan tenaga kerja guna menopang industrialisasi di seluruh dunia pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20

Merujuk pada dokumen rencana pengelolaan (management plan) situs Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto ini dikelola dengan 3 (tiga) tingkat, pertama tingkat kebijakan yang melibatkan 12 (dua belas) kementerian dibawah koordinasi sebagai Ketua Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Wakil Ketua Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Sumatera Barat, dan Bupati Solok, Bupati Tanah Datar, Bupati Padang Pariaman, Walikota Sawahlunto, Walikota Solok, Walikota Padang Panjang, dan Kota Padang. Kedua tingkat perencanaan dengan pengelola harian berada pada kantor pengelola situs, meskipun secara resmi belum terbentuk, dengan koordinasi dan konsultasi dengan unit

pengelola teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Sumatera Barat (Balai Pelestarian Cagar Budaya, dan Balai Pelestarian Nilai Budaya), pemilik aset objek signifikan, dan instansi terkait di provinsi, untuk dewan penasehat terdiri dari akademisi, ahli, dan komunitas, ketiga adalah tingkat operasional berada pada instansi teknis membidangi perencanaan, dan Kebudayaan di 7 (tujuh) kabupaten kota situs Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto.

Kota Sawahlunto sebagai Kota yang memiliki keragaman seni dan budaya serta memiliki banyak seniman-seniman yang berpotensi dibidangnya. Sebagai Kota yang telah mendeklarasikan sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, Kota Sawahlunto sering menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan event-event di bidang seni dan budaya. Budaya-budaya yang ada berkembang menjadi kelompok-kelompok seni dan komunitas budaya. Komunitas budaya adalah kesatuan sosial yang masih memegang tradisi budaya dan mempunyai ikatan geneologis, kesadaran wilayah sebagai kesatuan daerah teritorial, dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan dan adat istiadat serta memiliki berbagai aktivitas sosial menurut pola tertentu. Berikut ini data komunitas budaya yang ada dan berkembang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.234
Komunitas Budaya yang ada di Kota Sawahlunto

No	Nama Komunitas	Jumlah
1.	Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)	1
2.	Bundo Kandung Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau	1
3.	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	10
4.	Bundo Kandung Kerapat Adat nagari	10
5.	Paguyuban Jawa	1
6.	Paguyuban Batak	1
7.	Paguyuban Sunda	1
8.	Komunitas Kota Tua Sawahlunto	1
9.	Komunitas Anak Nagari Sawahlunto (KANS)	1
Total Komunitas Budaya		**27**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2024

Jumlah Komunitas Budaya yang ada dari tahun 2019 sampai tahun 2020 berjumlah 25 komunitas budaya sedangkan pada tahun 2021 bertambah 2 komunitas budaya sehingga menjadi 27 komunitas budaya, 5 komunitas budaya yang telah aktif melaksanakan kegiatan, baik berupa acara adat dan tradisi maupun pagelaran seni dengan persentase sebesar 18,5 persen, sementara masih ada 22 komunitas budaya lagi yang belum aktif atau sebesar 81,5 persen. dan tahun 2023 jumlah komunitas tidak ada penambahan dan pengurangan sama sekali tetapi ada 10 komunitas yang aktif pada tahun 2023 dan masih ada yang belum aktif sebanyak 17 komunitas artinya masih banyak komunitas budaya yang belum mampu menggali dan mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai dan seni budaya daerah yang akan menjadi karakter bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

4. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Kota Sawahlunto di samping memiliki kekayaan kesenian yang multietnis juga memiliki Warisan Budaya Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto atau disebut WBTBOS, yang merupakan bukti dampak revolusi industri dunia Barat di wilayah Hindia Belanda. Walaupun operasi penambangan batu bara telah berhenti, namun jejak-jejak Kota tambang dengan segala tinggalannya masih terjaga dengan asri dan menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki Kota Sawahlunto. Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan, sekaligus sebagai salah satu aset pusaka yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai kota yang telah eksis sejak zaman Belanda, Sawahlunto memiliki banyak benda cagar budaya yang perlu dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai salah satu keunggulan lokal yang dimiliki.

Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Sawahlunto belum tersedia sampai saat ini. Dalam rangka memberikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintahan Bidang Kebudayaan digunakan Pelestarian Cagara Budaya yang merupakan indikator kinerja kunci Outcome. Pelestarian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah Upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk :

a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia
b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya
c. Memperkuat kepribadian bangsa
d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada Masyarakat

Pelestarian cagar budaya sangat penting untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai historis, budaya, dan artistik yang ada di dalamnya. Pelestarian cagar budaya tidak hanya memberikan manfaat budaya tetapi juga dapat berdampak positif pada ekonomi lokal melalui pariwisata. Situs bersejarah yang terawat dengan baik dapat menarik pengunjung dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi komunitas setempat.

Cagar budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto (OCMHS) adalah salah satu cagar budaya Kota Sawahlunto. OCMHS merupakan kawasan kota tua bekas peninggalan penjajahan Belanda yang terletak di tengah-tengah Kota Sawahlunto. OCMHS merupakan warisan dunia yang telah diakui oleh UNESCO pada sidang sesi ke–43 pertemuan Komite Warisan Dunia di Kota Baku Azerbaijan pada tanggal 6 Juli 2019.

Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto (OCMHS) melewati 7 kabupaten/kota dengan tiga zona :

1. Zona A : Situs dan Kota Tambang Sawahlunto, meliputi Kota Sawahlunto dengan tambang terbuka dan jaringan tambang yang disokong dengan fasilitas pengolahan batu bara dan berbagai fasilitas kota tambang yang lengkap;
2. Zona B : Jaringan infrastruktur perkeretaapian, meliputi Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang dengan jaringan kereta api teknik tingkat tinggi terdiri dari rel gigi, jembatan dan terowongan yang menghubungkan lokasi tambang hingga pelabuhan Emmahaven (Teluk Bayur) sepanjang 155 kilometer di medan pegunungan yang sulit;
3. Zona C : Fasilitas gudang batu bara di pelabuhan Teluk Bayur atau Emmahaven (Coal Storage Facilities at Emmahaven Port) di Kota Padang di pantai samudera hindia sebagai tempat memuat batu bara yang akan dikapalkan ke seluruh wilayah Belanda dan wilayah eropa lainya.

OCMHS merupakan bukti sejarah Kota Sawahlunto yang berawal dengan penemuan deposit batu bara serta dampak revolusi barat di Hindia Belanda. Lebih satu abad hasil batu bara Sawahlunto berkontribusi bagi penggerak pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia dan Sumatera Barat khususnya. Meskipun aktivitas tambang sudah tidak beroperasi lagi namun dampak pembangunan berupa tinggalan bersejarah dan pengalaman (wujud budaya) yang diperoleh masih dapat dirasakan masyarakat hingga saat ini. Sehingga besarnya nilai sejarah pencapaian di bidang industri tambang berskala global yang dimiliki Warisan Budaya Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto (WBTBOS)/Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto (OCMHS) menjadikan penting untuk dilindungi, dilestarikan dan dipromosikan bagi generasi masa kini dan masa depan sebagai bagian dari Warisan Dunia umat manusia.

Warisan budaya adalah peninggalan yang merepresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus menerus diwariskan dari masa lalu hingga sekarang. Warisan budaya terdiri dari dua jenis, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya berupa benda-benda material atau fisik yang dapat dilihat dan juga diraba, seperti candi, keris, batik, dan lain-lain.

Warisan Budaya Tak Benda adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya tak benda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia, Warisan budaya takbenda Indonesia terdiri atas: a).tradisi dan ekspresi lisan; b).seni pertunjukan; c).adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; d).pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau e).keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Pemerintah Kota Sawahlunto berkewajiban menjaga dan mempertahankan serta melestarikannya sebagai warisan budaya tak benda agar dapat dilihat dan dirasakan oleh generasi yang akan datang dengan melaksanakan sosialisasi tentang tingginya nilai budaya dan sejarah di kawasan sehingga menjadi potensi pariwisata berkelas internasional serta peningkatan inovasi dan kreatifitas masyarakat berbasis media desain iptek dan berbasis seni budaya dan telah melakukan berbagai upaya agar bukti-bukti peninggalan tersebut tetap terawat dengan baik dan dilestarikan. Sebagai komitmen, Pemerintah Daerah telah menetapkan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs peninggalan tersebut sebagai Cagar Budaya. Adapun Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.235
Persentase Pelestarian Cagar Budaya Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (tangible) yang di lestarikan (objek)	83	85	88	92	94
2.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible) yang dilestarikan (objek)	13	35	43	45	49
3.	Jumlah Cagar Budaya (tangible dan Intangible) yang dilestarikan (objek)	96	120	131	137	143
4.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (tangible) Daerah (objek)	144	153	164	163	163
5.	Jumlah Total Warisan Budaya Tak Benda (Intangible) Daerah (objek)	225	215	215	215	215
6.	Jumlah Total Cagar Budaya (tangible dan Intangible) Daerah (objek)	369	368	379	378	378
7.	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	26,02	32,61	34,56	36,24	37,8

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pemerintah Kota Sawahlunto konsisten dari tahun ke tahun melakukan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada, baik yang berupa benda, situs dan kawasan cagar budaya (tangible) maupun yang berupa warisan budaya tak benda (intangible) yang dilestarikan (objek). Jumlah cagar budaya (tangible dan intangible) yang dilestarikan sampai tahun 2023 sudah berjumlah 143 objek atau 37,8 %.

Tabel 2.236
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (Tangible) Dan
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible) Di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (tangible)						
1.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan (unit)	83	85	88	92	94
2.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah (unit)	144	153	164	163	163
3.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola (unit)	21	94	102	137	143
Warisan Budaya Tak Benda (Intangible)						
1.	Manuskrip	5	5	5	5	5

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	Tradisi Lisan	46	43	43	43	43
3.	Adat Istiadat	40	40	40	40	40
4.	Ritus	12	13	13	13	13
5.	Pengetahuan Tradisional	18	18	18	18	18
6.	Teknologi Tradisional	27	19	19	19	19
7.	Seni	38	38	38	38	38
8.	Bahasa	2	2	2	2	2
9.	Permainan Rakyat	35	35	35	35	35
10.	Olahraga Tradisional	2	2	2	2	2
11.	Jumlah Total Warisan Budaya Tak Benda (Intangible)	225	215	215	215	215
12.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	13	35	43	45	49

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga mencapai 163 unit pada tahun 2023 dan tidak ada penambahan pada tahun 2024, 143 unit dikelola Pemerintah Kota Sawahlunto dan 94 unit diantaranya sudah dilestarikan.

Tabel 2.237
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible)
Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Manuskrip	5	5	5	5	5
2.	Tradisi Lisan	46	43	43	43	43
3.	Adat Istiadat	40	40	40	40	40
4.	Ritus	12	13	13	13	13
5.	Pengetahuan Tradisional	18	18	18	18	18
6.	Teknologi Tradisional	27	19	19	19	19
7.	Seni	38	38	38	38	38
8.	Bahasa	2	2	2	2	2
9.	Permainan Rakyat	35	35	35	35	35
10.	Olahraga Tradisional	2	2	2	2	2
	Total	**225**	**215**	**215**	**215**	**215**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2024

Kota Sawahlunto tidak hanya melestarikan benda cagar budaya (*tangible*), tetapi juga melestarikan budaya tak benda (*intangible*). Ini terlihat pada tabel diatas. Pada tahun 2020, warisan budaya tak benda berjumlah 225 objek pemajuan kebudayaan (OPK), namun pada tahun 2023 berkurang menjadi 215 OPK dan tahun 2024 jumlah OPK tetap 215. Hal ini disebabkan setelah dilakukan registrasi/penelitian ulang yang dilakukan pada tahun 2020 ada beberapa kriteria yang tidak termasuk ke dalam OPK, seperti Tradisi Lisan yang awalnya berjumlah 46 menjadi 43, begitu juga dengan Teknologi Tradisional yang awalnya 27 menjadi 19 sedangkan pada Ritus terjadi penambahan 1 buah. Empat warisan budaya tak benda (*intangible*) yang sudah masuk ke dalam Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI) adalah Songket Silungkang (pengetahuan tradisional), Bahasa Tangsi (bahasa), Talempong Batuang (permainan rakyat), Lamang Tungkek (pengetahuan tradisional), Pemerintah Kota Sawahlunto berkewajiban menjaga dan mempertahankan serta melestarikannya sebagai warisan budaya tak benda agar dapat dilihat dan dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Tabel 2.238
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible)
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya	62,50	69,44	88,70	53,85	53,57
2	Persentase Penampilan kelompok seni budaya	37,50	55,56	64,51	38,46	71,43
3	Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari	26,7	20	25,05	20,93	22,79
4	Persentase Budaya Benda yang Lestari	68,46	57,1	60,5	70,54	57,67
5	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	20,458	15.937	34.658	38.339	27.986

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2024

5. Jumlah Kunjungan Museum

Jumlah kunjungan objek wisata museum, kunjungan museum goedang ransoem dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi penurunan kunjungan yang disebabkan wabah pandemi covid-19 yang membuat seluruh tempat wisata atau tempat keramaian ditutup semua, tetapi pada tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan kunjungan dan kembali turun pada tahun 2024, namun kalau di lihat pada objek museum kereta api terjadi fluktuasi, hal ini merupakan tugas pemerintah daerah bagaimana meningkatkan jumlah kunjungan pada objek Museum Kereta Api dengan Iconnya "Mak Itam". Yang saat ini kondisi lokomotif Mak Itam sudah berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga para pengunjung dapat merasakan berwisata dengan suasana seperti zaman dahulu. Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.239
Jumlah Kunjungan Objek Wisata Museum
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Museum Goedang Ransoem	5.980	5.605	8797	12.451	11.262
2	Lubang Tambang Mbah Soero	3.957	3.884	6373	10.018	7.798
3	Museum Kereta Api	3.250	2.869	6159	9.275	8.926
	Jumlah	**13.187**	**12.358**	**21.329**	**31.744**	**27.986**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2024

N. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat Kota Sawahlunto. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan senantiasa terus dilakukan dengan menambah jumlah perpustakaan di lokasi yang mendekati permukiman masyarakat. Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 – khususnya urusan pemerintahan wajib bidang perpustakaan – menjadi fenomena baru bagi perkembangan perpustakaan di daerah terutama dalam hal sinkronisasi program antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan adanya sinkronisasi program kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan pencapaian program pembangunan di bidang perpustakaan dapat lebih realistis dan terukur. Untuk perkembangan urusan perpustakaan di Kota Sawahlunto sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.240
Rasio Perpustakaan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun (orang)	52.530	86.936	158.045	210.971	211.674
	Perpustakaan Daerah	26.860	27.089	55.948	65.009	60.879
	Perpustakaan SD/MI	9.627	34.385	36.146	53.247	55.152
	Perpustakaan SMP/MTs	5.399	7.878	43.032	69.868	69.868
	Perpustakaan SMA/SMK/MA	7.201	11.496	16.783	16.256	16.256
	Perpustakaan Desa/Kelurahan	613	1.229	1.233	1.688	2690
	Taman Bacaan Masyarakat	2.830	4.859	4.903	4.903	5406
	Perpustakaan Khusus	-	-	-	-	1423
2	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan (%)	-69.71	65.50	84,57	1,33	0,5
	Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto	65.138	65.807	66.778	67.758	68.516
3	Rasio Perpustakaan Per satuan Penduduk	0.83	1.32	2.40	3,18	0.21

Sumber Data : Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2024

Untuk perkembangan koleksi buku pada Perpustakaan Kota Sawahlunto dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.241
Perkembangan Koleksi Buku di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan (buku)	183.204	200.907	174.361	191.883	221.408
	Perpustakaan Daerah	14.819	15.249	15.461	16.863	17.144
	Perpustakaan SD/MI	138.602	131.692	117.252	131.605	149.695
	Perpustakaan SMP/MTs	18.954	34.956	25.057	25.520	26.360
	Perpustakaan SMA/SMK/MA	6.354	6.373	6.631	6.860	7.935
	Perpustakaan Desa/Kelurahan	2.069	8.391	6.637	7.712	8712

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Taman Bacaan Masyarakat	2.406	4.246	3323	3.323	5323
	Perpustakaan Khusus	-	-	-	-	6239
2	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Memiliki Sertifikat (orang)	12	14	14	9	19
3	Koleksi Buku yang tersedia Per satuan Penduduk (%)	2.78	3.05	2.65	2.89	13,12

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa koleksi buku yang ada di perpustakaan di Kota Sawahlunto berfluktuasi setiap tahunnya dengan kecenderungan meningkat. Hal ini disebabkan adanya komitmen kepala daerah dalam meningkatkan minat baca masyarakat Kota Sawahlunto dengan menganggarkan membeli buku buku terbaru setiap tahunnya.

Tabel 2.242
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto
Tahun 2020- 2024

NO	URAIAN	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Layanan Perpustakaan (layanan)					
	Pustaka : Umum	3	3	3	2	2
	Pustaka : Keliling	-	-	-	2	2
	Pustaka : Khusus	-	-	-	6	11
	Pustaka : Desa/Kelurahan	27	27	27	27	27
	Pustaka : Sekolah	92	92	92	92	92
	Pustaka : Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	-	-	-	5	5
	TOTAL	**122**	**122**	**122**	**134**	**139**
2.	Jumlah Koleksi (koleksi)					
	Pustaka : Daerah	33,674	34,450	34.956	36.912	37.438
	Pustaka : SD/MI	138,602	131,692	345.676	374.088	374.088
	Pustaka : SMP/MTs	18,954	34,956	185.058	189.706	189.706
	Pustaka : SMA/SMK/MA	6,354	6,373	257.940	272.085	272.086
	Pustaka : Desa/Kelurahan	2,069	8,391	13.260	13.260	13.260
	Pustaka Khusus	-	-	-	8.936	7.470
	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	-	-	-	5.558	5.558
	TOTAL	**199,653**	**215,862**	**836.890**	**900.545**	**937.044**
3.	Jumlah Tenaga Perpustakaan (orang)					
	Pustaka : Umum	12	14	14	19	19
	Pustaka : Desa/Kelurahan	27	27	27	28	28
	Pustaka : Sekolah	92	92	92	115	116
	Pustaka : Perguruan Tinggi	-	-	-	-	
	Pustaka Khusus	-	-	-	6	11
	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	-	-	-	5	5
	TOTAL	**131**	**133**	**133**	**173**	**179**
4.	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan (orang)					
	Pustaka : Daerah	26,860	27,089	55.948	65.009	60.879
	Pustaka : SD/MI	9,627	34,385	36.146	53.247	55.152
	Pustaka : SMP/MTs	5,399	7,878	43.032	69.868	69.868
	Pustaka : SMA/SMK/MA	7,201	11,496	16.783	16.256	16.256
	Pustaka : Desa/Kelurahan	613	1,229	1.233	1,688	2.690
	Pustaka Khusus	-	-	-	1.433	1.423

NO	URAIAN	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	-	-	-	4.903	5.406
	TOTAL	**49,700**	**82,077**	**153.142**	**212.404**	**211.674**
5.	Jumlah Perpustakaan Terakreditasi (pustaka)					
	Pustaka : Daerah	0	2	2	2	2
	Pustaka : SD/MI	0	1	9	9	59
	Pustaka : SMP/MTs	0	2	5	5	10
	Pustaka : SMA/SMK/MA	0	1	3	3	6
	Pustaka : Desa/Kelurahan	0	0	0	0	15
	Perpustakaan Khusus					6
	TOTAL	0	**6**	**19**	**19**	**98**
6.	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (taman baca)	5	5	5	5	5
7.	Jumlah Pustaka Khusus	-	-	-	6	11
8.	Jumlah Anggota Perpustakaan (anggota)	4.862	5.137	5.671	6.105	6.682
9.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (%)	72.13	72.45	74.14	88,33	94.81
10.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (%)	50.2	50.4	60,1	64,13	67.45
11.	Kerjasama Perpustakaan	1. Rumah Tahfiz Qur'an Ar-Rasyiid 2. SDN 13 Sungai Durian 3. MIS Lunto 4. MIN 3 Kota Sawahlunto 5. SDN 02 Lunto Timur 6. SDN 03 Aur Tanjungkang 7. Bawaslu Kota Sawahlunto 8. SDN 06 Kubang Tangah 9. SDN 12 Kubang Barat 10. SDN 03 Lubang Panjang 11. Yayasan Penyantun Anak Yatim, Panti Asuhan (YPAP) Mudik Air 12. TK Aisyiyahh III Sawahlunto 13. TK AL irsyad Sawahlunto 14. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja 15. Lapas Narkotika III Kota Sawahlunto 16. SDS Santa Lucia 17. Rutan Kelas III/b Kota Sawahlunto 18. SD Muhammadiyah 19. SDN 10 Taratak Bancah				20

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasarkan Uraian diatas dari 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, setiap unsurnya memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dengan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana, akan berdampak pada indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun berikutnya.

O. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan daerah. Karena akuisisi arsip statis merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring keberadaan arsip yang memiliki potensi arsip statis di lingkungannya.

Tabel 2.243
Perkembangan Arsip Statis yang Diakuisisi Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Peningkatan Arsip Statis yang diakuisisi	Arsip	3.532	2.147	5.284	2.419	5.000

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa Peningkatan Arsip Statis yang diakuisisi di Kota Sawahlunto dari Tahun 2020 - 2024 mengalami fluktuatif antara 2.147 arsip hingga 5,284 arsip. Jumlah Peningkatan Arsip Statis yang diakuisisi tertinggi terjadi tahun 2022, kemudian turun menjadi 2.419 pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan beberapa hal antara lain : 1. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tertib arsip yang ditandai dengan tidak adanya ruangan arsip yang memadai 2. Rendahnya Minat ASN untuk menjadi Pengelola Arsip. 3. Kurangnya kesadaran/kepedulian para pegawai terutama unsur pimpinan tentang arti pentingnya arsip dan kearsipan.

Tabel 2.244
Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Arsip secara Baku Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	7.7	11.5	11.5	9,3	3.6

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Kondisi ini terjadi karena kurangnya pemahaman aparatur pengelola arsip tentang Kearsipan. Pola pembinaan pengelolaan arsip selama ini hanya berupa bimtek dan monitoring saja, untuk itu di masa yang akan datang perlu dilakukan pendampingan langsung kepada pengelola arsip di lapangan secara intensif dan berkelanjutan sampai perangkat daerah mampu mengelola arsip secara mandiri sesuai standar baku kearsipan.

Tabel 2.245
Persentase Kesediaan Arsip Sebagai Bahan AK, ABS dan PN Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Kesediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang sah dan Pertanggungjawaban Nasional	%	25	25	100	44,5	79

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2024

Pada tabel di atas terlihat Tingkat Kesediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang sah dan Pertanggungjawaban Nasional masih minim. Hal ini disebabkan sarana prasarana, kompetensi SDM, manajemen sistem kearsipan dan komitmen pimpinan belum memadai. Oleh sebab itu pada masa yang akan datang perlu dilakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah. Pada Tahun 2022, perangkat daerah sudah melakukan kebijakan dan Inovasi terhadap perencanaan sehingga perencanaan pembangunan maupun perencanaan teknis berjalan efektif dan efisien.

Tabel 2.246
SDM Pengelola Kearsipan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	10	10	10	10	28

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2024

Pada tabel di atas terlihat jumlah pegawai yang mengelola kearsipan tahun 2024 meningkat, sedangkan dari tahun 2020-2023 stagnan.

Tabel 2.247
Data Capaian Pembangunan Kota Sawahlunto Bidang Kearsipan
Tahun 2023-2024

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
1	Arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	31%	100%
2	Arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	46%	100%
3	arsip statis yang telah dibuatkan sarana Bantu temu balik	100%	100%
4	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	1%	16%
5	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban	39,64 %	40%
6	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip NSPK	100%	-
7	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana NSPK	-	90%
8	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau di bubarkan dan pemekaran Daerah kota dengan NSPK	50,30 %	_
9	Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	80,66%	75%
10	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	5,90%	70%
11	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	1%	-

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2024

Dari beberapa Indikator Kinerja Daerah (Data Capaian Pembangunan Kota Sawahlunto Bidang Kearsipan Tahun 20230, hanya terdapat dua indikator yang sudah mencapai 100%, tujuh indikator capaiannya masih berada di bawah 50%.

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan kota Sawahlunto bersumber dari bidang perikanan tangkap dan bidang perikanan budi daya, karena kondisi geografis Kota Sawahlunto yang berada 250 – 785 meter ketinggian dari laut. Untuk produksi ikan darat dan konsumsi ikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.248
Produksi dan Konsumsi Ikan
Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Ikan (Ton)	206,27	189,79	235,55	238,88	229,69
Konsumsi ikan (kg)	2.456.822	2.472.273	2.072.506	2.982.807	3.074.292
Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	36,66	36,43	41,49	43,83	44,73

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2024

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan dari tahun 2020 sampai 2023 untuk produksi mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan pada tahun 2024 ini produksi ikan mengalami sedikit penurunan walaupun tidak begitu signifikan. Pada tahun 2024 produksi ikan menurun menjadi 229,69 ton. Namun dilihat dari jumlah konsumsi ikan tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana tahun 2021 konsumsi ikan Kota Sawahlunto adalah 36,43 kg perkapita per tahun dan pada tahun 2022 jumlah konsumsi ikan Kota Sawahlunto kembali mengalami peningkatan menjadi 41,49 kg dan pada tahun 2023 sebesar 43,83 kg serta pada tahun 2024 ini jumlah konsumsi ikan naik menjadi 44,73 kg. Adapun yang mempengaruhi produksi dari perikanan ini adalah kualitas dan kuantitas benih, luas lahan budidaya ikan serta kualitas dan kuantitas makanan ikan. Dalam memproduksi ikan di Kota Sawahlunto mempunyai budidaya perikanan darat kolam dan perikanan perairan umum (rawa, danau dan sungai), adapun perkembangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.249
Luas Areal Budidaya Perikanan Darat (Ha)
Tahun 2020-2024

Jenis	2020	2021	2022	2023	2024
Kolam	39,02	39,02	39,02	39,02	39,02
Sawah	-	-	-	-	-
Total	**234,99**	**234,99**	**234,99**	**234,99**	**234,99**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa luas area budidaya perikanan di tahun 2024 (luas Perairan Umum) 234,99 hektar. Dilihat dari jenis areal budidaya perikanan tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan areal kolam tetap 39,02 hektar. Tidak adanya kenaikan budidaya ini sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi ikan yang dihasilkan, untuk tahun 2024 untuk produksi ikan budidaya sungai/peraian umum adalah 229.699 ton dan untuk budidaya kolam menghasilkan 201.350 ton. Untuk itu sangat perlu di lakukan perluasan untuk budidaya perikanan di Kota Sawahlunto dalam meningkatkan produksi ikan. Upaya peningkatan luas areal budidaya perikanan darat diantaranya melalui salah satunya pelaksanaan fasilitasi pada kelompok tani untuk pembangunan kolam terpal dan permanen beserta bibit ikan yang diiringi pembinaan langsung dari penyuluh, selain itu juga memanfaatkan aliran sungai untuk budidaya ikan. Dengan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu usaha masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Kegiatan-kegiatan seperti ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mencukupi konsumsi masyarakat akan ikan.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Untuk mendukung Brand Image Pariwisata Halal, Pemko Sawahlunto telah menindaklanjuti Perda Nomor 1 Tahun 2020 pada Program/Kegiatan dan beberapa Subkegiatan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga antara lain: Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata dan subkegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif. Pariwisata Kota Sawahlunto memiliki spesifik dibandingkan dengan pariwisata di kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Pariwisata Kota Sawahlunto selain memiliki wisata alam, wisata buatan dan wisata religius, juga memiliki wisata sejarah dengan icon Kawasan Kota Lama dengan gedung-gedung dan bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Berikut adalah capaian indikator kinerja daerah Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata tahun 2020-2024.

Tabel 2.250
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
Tahun 2020-2024

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB sektor Pariwisata (Juta rupiah)	75.255,42	84.016,91	97.528,6	107.222,77	116.000,28
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	2,06	2,18	2,22	2,22	2,30
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	1,75	1,86	3,302	3,21	3,10
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaaan (%)	-0,98	2	385,7	20,58	385,37
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	-59	14,59	59,8	60,13	-31,53
6	Tingkat hunian akomodasi (%)	15,84	19,27	10,52	4,830	16,79
7	Persentase pengunjung yang menga takan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	65	75	80	1.147,18	67,21
8	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	38,24	50	50	60	60
9	Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (%)	60,55	64,26	34	67,60	3,70
10	Jumlah Wisatawan (orang)	95.995	88.248	141.020	225.805	193.024
11	Persentase kelembagaan kepariwisataan yang profesional (%)	13,22	15,30	51	25,34	4,14

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat dilihat dari lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, adapun perkembangan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.251
Kontribusi Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB Tahun 2020-2024

KONTRIBUSI	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (juta rupiah)	75.255,42	84.016,91	97.528,6	107.222,77	116.000,28
Total PDRB (juta rupiah)	3.656.590,97	3.850.697,74	4.389.916,49	4.825.295,86	5.058.000,00
Kontribusi (%)	2,06	2,18	2,22	2,22	2,30

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2024 (data olahan)

2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata selama ini ditinjau dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sedangkan pendapatan ditinjau dari pajak hiburan pada tahun 2021 tidak ada tetapi ada penambahan pendapatan ditinjau dari Retribusi Tempat Khusus Parkir, sehingga Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.252
Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	NAMA PENDAPATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Hotel	47.335.931	168.914.129	266.384.955	224.164.516	233.927.929
2	Pajak Restoran	477.464.758	617.303.460	993.108.403	899.703.543	1.115.973.975
3	Pajak Hiburan	1.650.000		61.170.000	66.241.500	17.842.000
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	516.801.000	436.895.000	847.974.000	726.647.000	661.939.000
5	PT.WWS	0	0	0	0	0
6	Bagian Laba Hotel Parai	0	0	0	0	0
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0	1.500.000	3.600.000	7.750.000	8.000.000
	PAD Sektor Pariwisata	1.043.251.689	1.224.612.589	2.172.237.359	1.924.506.559	2.037.682.904
	Total PAD	59.537.385.897,66	51.470.645.905,45	65.778.630.408,26	59.943.839.179,64	65.743.716.580,77
	Persentase PAD Sektor Pariwisata	**1,752**	**2,38**	**3.302**	**3,2**	**3,1**

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, 2024

Data kunjungan objek pariwisata di Kota Sawahlunto dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.253
Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kota Sawahlunto (Berdasarkan Tiket Masuk) Tahun 2020-2024

Objek Wisata	2020	2021	2022	2023	2024
Museum Gudang Ransoem	5.959	5.574	9.568	12.451	11.262
Museum Kereta Api	3.246	2.867	6.030	9.275	8.926
Water Boom	23.024	31.150	38.692	34.137	31.657
Taman Satwa Kandi	15.894	14.890	34.507	25.445	18.391
Lubang Tambang Mbah Soero	3.932	3.704	6.745	10.018	7.798
Desa Wisata Rantih	2.822	2.406	1.082	200	-
Kelok 16	-	-	-		
Puncak Cemara	21.682	17.812	20.990	16.563	9.449
Taman Buah	3.363	6.556	2.943	6.650	5.326
Camping Ground Kandi	9.627	3.289	3.025	346	4.956
Sinema 4 Dimensi	-	-	2.795	-	-
Museum Tari	-	-	184	-	-
Museum Musik	-	-	510	524	-
Museum Lukis	-	-	314	277	-
Iptek Center	-	-	5.385	5.794	-
Kampung Lebah Zam Zam	-	-	94	-	-
Puncak Sati	-	-	81	-	-
Kolam Pemandian Mudiak Lugha	-	-	8.075	20.214	13.882
Mervoon Kandih	-	-	-	-	59.651
Batu Runciang	-	-	-	-	21.726
Total	**95.995**	**88.248**	**141.020**	**141.894**	**193.024**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto 2024
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2024

Kalau di lihat dari tabel di atas, jumlah pengunjung pada objek wisata berdasarkan tiket masuk tahun 2020 dan 2021 pada masing-masing objek terjadi penurunan ini disebabkan karena Kota Sawahlunto juga terdampak wabah covid-19 sehingga membuat objek objek tersebut ditutup dan bagi yang masih dibuka harus diterapkan protokol kesehatan yang ketat

serta turunnya minat masyarakat untuk berkunjung ketempat wisata yang disebabkan ikut turunnya pendapatan atau perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Tetapi pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan kunjungan yang signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 karena wabah covid-19 sudah tidak ada lagi dan seluruh kegiatan Masyarakat sudah Kembali normal, pada tahun 2023 ada sedikit kenaikan tetapi tahun 2024 terjadi kenaikan yang cukup tinggi sehingga secara keseluruhan akan berdampak terhadap jumlah pengunjung wisata di Kota Sawahlunto yang tentunya akan memiliki dampak positif terhadap ekonomi masyarakat di Kota Sawahlunto, baik dari sisi industri pariwisata maupun kelembagaan pariwisata, adapun rincian kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.254
Jumlah Pengunjung Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara
Tahun 2020-2024

Pengunjung	2020	2021	2022	2023	2024
Wisatawan Mancanegara	7	7	34	41	199
Wisatawan Nusantara	95.988	88.241	140.986	225.764	192.825
Total	**95.995**	**88.248**	**141.020**	**225.805**	**193.024**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

Kalau di lihat dari tabel di atas, jumlah pengunjung Wisatawan Mancanegara pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 7 orang, penurunan ini disebabkan karena Kota Sawahlunto juga terdampak wabah covid-19 sehingga membuat objek objek tersebut ditutup dan kurangnya minat masyarakat untuk mengunjungi objek wisata yang disebabkan juga karena perekonomian masyarakat yang juga ikut terdampak karena wabah covid-19 begitu juga dengan tahun 2021 kunjungan wisatawan mancanegara tetap 7 orang tetapi pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan menjadi 34 orang, kunjungan wisatawan nusantara terjadi kenaikan dari 88.241 orang menjadi 140.986 orang yang disebabkan mulai hilangnya dampak wabah covid-19 sehingga seluruh masyarakat sudah kembali bebas melakukan aktivitas diluar rumah dan tahun 2023 kembali ada kenaikan yang sangat signifikan tetapi tahun 2024 kembali terjadi kenaikan pada pengunjung wisatawan mancanegara tetapi terjadi penurunan pada wisatawan nusantara.

Ditetapkannya Geopark Sawahlunto sebagai Geopark Nasional karena sudah memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sebagai Geopark Nasional Indonesia dan berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Geopark berdasarkan prinsip Konservasi, Edukasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang diberikan di Jakarta tanggal 29 November 2018 dan berlaku sampai bulan November 2022. Potensi objek wisata yang terdata sampai 2022 tercatat sebanyak 30 Geosite yang sudah termasuk kedalam Geopark Nasional. Pada tahun 2023 dibuat Dokumen Rencana Induk Pengembangan Geopark Nasional Sawahlunto yang membuat jumlah geosite dikerucutkan menjadi 22 geosite yang termasuk kedalam Geopark Nasional Sawahlunto serta penyebarannya yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.255
Data Pengembangan Potensi/Destinasi Wisata (Geosite) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Destinasi	Alamat/ Lokasi	Potensi Wisata		Objek Wisata Unggulan				
			Sudah Dikembangkan	Belum Dikembangkan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Batugamping berlapis bukit Tankoliang (Formasi Kuantan)	Kec. Barangin Desa Talago Gunung		√	√	√	√	√	√
2	Ngalau Janjian	Kec. Barangin Desa Talago Gunung	√		√	√	√	√	√
3	Bukit Inyiak Suntiang	Kec. Silungkang Desa Taratak Bancah		√	√	√	√	√	√
4	Hutan batu	Kec. Barangin Desa Lumindai	√		√	√	√	√	√
5	Batuan Andesit -basalt Silungkang (Aie Tajun Batingkek)	Kec. Silungkang Desa Silungkang Tigo		√	√	√	√	√	√
6	Tabiang tajam	Kec. Silungkang Desa Kubang Tangah		√					
7	Batu Runcing	Kec. Silungkang Desa Silungkang Oso	√		√	√	√	√	√
8	Ngalau Lakuak	Kec. Silungkang Desa Muaro Kalaban		√	√	√	√	√	√
9	Sesar Minor Brani	Kec. Barangin Desa Talago Gunung		√					
10	Stratigrafi Sawah Tambang	Kec. Silungkang Desa Muaro Kalaban		√					
11	Alam Desa Rantih	Kec. Talawi Desa Rantih	√		√	√	√	√	√
12	Air Terjun Landu	Kec. Talawi Desa Rantih		√					
13	Air Terjun Lurah Loba	Kec. Talawi Desa Rantih		√					
14	Air Terjun Tinongan	Kec. Talawi Desa Rantih		√					
15	Interfingering (Geosite Talawi Mudiak)	Kec. Talawi Desa Talawi Mudiak	√						
16	Formasi Sangkarewang	Kec. Barangin Desa Kolok Nan Tuo	√		√	√	√	√	√
17	Fosil Gurami	Kec. Talawi Desa Tumpuak Tangah	√		√	√	√	√	√
18	Bukit Savana	Kec. Berangin Desa Kolok Nan Tuo	√		√	√	√	√	√
19	Lubang Tambang Soero	Kec. Lembah Segar Kelurahan Pasar	√		√	√	√	√	√
20	Puncak Polan	Kec. Lembah Segar Kelurahan Aur Mulyo	√		√	√	√	√	√
21	Puncak Cemara	Kec. Barangin Kelurahan Saringan	√		√	√	√	√	√
22	Fosil Trias	Kec. Silungkang Desa Muaro Kalaban	√		√	√	√	√	√
	JUMLAH				**17**	**17**	**17**	**17**	**17**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah objek wisata yang sudah dikembangkan sebanyak 12 objek, dan 9 objek wisata yang belum dikembangkan dan 1 objek wisata dalam tahap rencana pengembangan. Untuk objek wisata yang sudah dikembangkan ada peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2020 sampai tahun 2024.

Tabel 2.256
Data Jenis Usaha Pariwisata di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	SEKTOR USAHA	JUMLAH				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Usaha Hotel					
	-Bintang 1	1	1	1	0	0
	-Bintang 2	1	1	1	0	0
	-Bintang 3				2	2
	-Non Bintang/Melati	9	54	54	51	1
2	Usaha Perjalanan Wisata					
	-Agen Perjalanan Wisata	8	6	6	5	4
3	Jasa Transportasi (termasuk penyewaan kendaraan)	3	3	3	4	5
4	Usaha Pondok Wisata	50	50	48	48	43
5	Usaha Cafe	12	12	14	8	10
6	Rumah Makan	56	56	56	50	59
7	Toilet Umum Berfungsi dan Bersih	6	6	6	6	6
8	Usaha Karaoke	4	4	1	1	0
9	Usaha Kawasan Pariwisata	7	7	7	16	16
10	Usaha Jasa Informasi Pariwisata	1	1	3	3	0
11	Usaha Taman Rekreasi	3	3	3	3	4
12	Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif dan Pameran/Fasilitas Meeting (termasuk dalam hotel)	4	4	4	4	4
13	Usaha Pentas Pertunjukan Seni Terbuka	2	2	-		3
14	Usaha Lapangan Tenis	4	4	-		3
15	Usaha Sanggar Seni	43	43	-	40	43
16	Usaha Bumi Perkemahan	2	2	2	2	1
17	Usaha Pusat Penjualan Makan/Cinderamata	6	6	6	53	53

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa jenis usaha pariwisata dari tahun 2020-2024 tidak berkembang, hanya ada beberapa jenis usaha yang ada peningkatan namun tidak signifikan. Tapi Hal ini disebabkan karena terjadi fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Di samping itu Kota Sawahlunto merupakan kota wisata minat khusus, karena objek-objek wisata yang berada di kawasan kota lama merupakan bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda, sehingga pengunjung umumnya memiliki minat khusus untuk melihat objek-objek bekas tambang tersebut.

Sementara itu, agar masyarakat ikut menjaga dan memelihara objek-objek wisata yang berada di lokasi tempat tinggalnya, Pemerintah Kota Sawahlunto mendorong pemberdayaan masyarakat, sehingga muncul berbagai lembaga seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pada masing-masing objek wisata yang berkembang. Adapun data kelembagaan pariwisata Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.257
Jumlah Kelembagaan Pariwisata Kota Sawahlunto
Tahun 2020–2024

No	Nama Pokdarwis/Lembaga Desa/Asosiasi Homestay	Tahun					Ket.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Ojek Wisata Muaro Kalaban			V	V	-	Tidak Aktif
2.	Pokdarwis Meranti			V	V	V	Aktif
3.	Muaro Kalaban			V	V	V	Aktif
4.	Bukik Batu			V	V	V	Aktif
5.	Pokdarwis Desa Silungkang Tigo			V	V	V	Aktif
6.	Podarwis Kampung Hijau dan Seni			V	V	V	Aktif
7.	Batu Ponjong Dusun Sionsek			V	V	-	Tidak Aktif
8.	Objek Wisata Batu Runcing (Pokdarwis Batu Runciang			V	V	V	Aktif
9.	Pokdarwis Panorama					V	Aktif
10.	Pokdarwis Lembah Sajonang			V	V	-	Tidak Aktif
11.	Silungkang Oso	V		V	V	-	Tidak Aktif
12.	Pokdarwis Puncak Sati			V	V	V	Aktif
13.	Lunto Barat (Pokdarwis Alam Nan Sajuak)			V	V	V	Aktif

No	Nama Pokdarwis/Lembaga Desa/Asosiasi Homestay	Tahun					Ket.
		2020	2021	2022	2023	2024	
14.	Gudang Ransoem			V	V	V	Aktif
15.	Pokdarwis Lunto Timur			V	V	V	Aktif
16.	Lembaga Desa Wisata Rantih			V	V	V	Aktif
17.	Pokdarwis Desa Kolok Nan Tuo		V	V	V	V	Aktif
18.	Asosiasi Homestay			V	V	V	Aktif
19.	Pokdarwis Talawi Mudiak					V	Aktif
20.	Pokdarwis Sikalang					V	Aktif
21.	Pokdarwis Bukik Sula					V	Aktif
22.	Pokdarwis Janjang Rantai					V	Aktif
23	Pokdarwis Ayu Bontan					V	Aktif
24.	Pokdarwis Agrowisata Atsiri					V	Aktif

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

Pada tahun 2020, jumlah kelembagaan yang ada dan berkembang di Kota Sawahlunto hanya 1 (satu) lembaga yang aktif, namun tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kelembagaan pariwisata atau kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di masing-masing desa dan tahun 2024 semua kelembagaan pariwisata mulai aktif, karena masyarakat mengakui dengan adanya objek wisata yang berada di lokasi desanya, yang dikembangkan menjadi objek wisata yang nantinya akan mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut, tentu akan berdampak terhadap pendapatan bagi masyarakat sekitar objek wisata. Sehingga banyak bermunculan penginapan penginapan rumahan seperti Homestay dan juga ada beberapa hotel dan wisma yang telah terlebih dahulu berdiri seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.258
Daftar Kunjungan Hotel, Wisma, Homestay Dari Tahun 2020-2024

No	Nama Hotel/Wisma/Homestay	Tahun										Ket.
		2020		2021		2022		2023		2024		
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	
1.	HOTEL OMBILIN	0	0	0	0	0	0	4604	19	7639	80	
2.	WISMA W 39	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	WISMA MUTIARA	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	WISMA CAHAYA	53	0	0	0	24	0	26	0	0	0	
5.	HOTEL PARAI	0	0	0	0	0	0	4415	363	3529	9	
6.	WISMA ANUGRAH	110	0	0	0	88	0	0	0	0	0	
7.	WISMA AGRA II	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	HOTEL LAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	WISMA BDBT	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	HOMESTAY OMA	1.539	26	366	0	1.051	0	1.875	40	0	0	
11.	HOMESTAY BUNGA	265	0	0	0	65	0	289	0	262	0	
12.	DARA KEMBAR	9	1	10	0	0	0	62	0	49	0	
13.	HOMESTAY AILA	290	0	13	0	195	0	373	0	401	0	
14.	HOMESTAY BALQIS	0	0	14	0	109	0	63	0	190	1	
15.	HOMESTAY KATE	0	0	0	0	142	11	90	0	114	0	
16.	HILLSIDE HOMESTAY	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
17.	CENDANA HOMESTAY	0	0	108	0	303	15	249	0	397	1	
18.	TERATAI HOMESTAY	0	0	0	0	9	0	0	0	6	0	
19.	ALIYAR HOMESTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	IKHSAN HOMESTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	AYAH SAKI HOMESTAY	0	0	0	0	38	0	28	0	51	0	
22.	KASIH IBU	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	BUNDA HOMESTAY	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
24.	VYRA HOMESTAY	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	
25.	UKHTY HOMESTAY	3	0	0	0	42	0	7	0	12	0	
26.	HARISHA HOMESTAAY	130	0	164	0	11	0	0	0	475	0	
27.	MAIMUN HOMESTAY	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	
28.	MEUTYA HOMESTAY	39	0	248	0	674	0	335	0	358	0	
29.	DWI TANIYA HOMESTAY	9	0	0	0	18	0	48	0	22	0	
30.	ALIMAR HOMESTAY	0	0	0	0	6	0	2	0	2	0	
31.	PAUSIL HOMESTAY (HADIFA HOMESTAY)	19	0	0	0	11	0	0	0	0	0	
32.	J- CHI HOMESTAY	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
33.	TAPIAN TITI HOMESTAY	0	0	0	0	20	0	30	0	44	0	
34.	ELVI SUMANTI HOMESTAY	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.	ASMILDA HOMESTAY (KANDI HOMESTAY)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	GUSPRIADI HOMESTAY (AMANDA HOMESTAY)	11	0	0	0	8	0	0	0	0	0	
37.	IDA LENI HOMESTAY (NAYA HOMESTAY)	30	0	0	0	8	0	0	0	6	0	

No	Nama Hotel/Wisma/Homestay	Tahun										Ket.
		2020		2021		2022		2023		2024		
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	
38.	SANUSI RASYID HOMESTAY (ROSITA HOMESTAY)	13	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
39.	KITO HOMESTAY	0	0	0	0	0	0	19	0	32	0	
40.	ERWATI SAID HOMESTAY (TOCYA HOMESTAY)	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	
41.	SURAU LAKUAK HOMESTAY	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
42.	RAMLI HOMESTAY (CITRA HOMESTAY)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.	ERITA HOMESTAY (AYU HOMESTAY)	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	
44.	YUNIWARI HOMESTAY (SISKA HOMESTAY)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
45.	HASNIL MISBAH HOMESTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
46.	TIBARAU HOMESTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47.	KAJATAN (BIKAN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48.	SAWAH PULAU HOMESTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.	ARITA HOMESTAY	28	0	0	0	22	0	2	0	14	0	
50.	IDA MANCA HOMESTAY	38	0	0	0	153	0	126	0	141	0	
51	Savanah Guest House			438	0	1143	0	278	0	139	0	
52.	ANDRIKA HOMESTAY									0	0	
53.	SHANIA HOMESTAY									0	0	
54.	SAGE HOMESTAY									0	0	
55.	LEMBAH SANTUR HOMESTAY									35	0	
56.	D'DAFFA HOMESTAY									0	0	
57.	TEGUH HOMESTAY									31	0	
58.	LUBUK SIMAUANG									0	0	
JUMLAH		**840**	**0**	**2.395**	**0**	**12.411**	**76**	**10.477**	**50**	**13951**	**91**	
TOTAL		**840**		**2.395**		**12.487**		**10.527**		**14.042**		

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 2024

Dari 58 penginapan yang ada di Kota Sawahlunto tersebut secara keseluruhan aktif dan mempunyai tingkat kunjungan yang bagus tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat tinggi, ini diakibatkan oleh rendahnya minat wisatawan karena dampak wabah covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat menjadi melemah. Dan pembatasan pembatasan masyarakat yang membuat pergerakan masyarakat menjadi tidak leluasa seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membuat masyarakat lebih cenderung tidak keluar rumah tetapi pada tahun 2021 kembali ada peningkatan kunjungan meskipun itu hanya pengunjung domestik kemudian tahun 2022 sampai tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup tinggi karena seluruh objek wisata di Kota Sawahlunto mulai menggeliat kembali setelah hilangnya wabah virus covid-19.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Pemerintah Kota Sawahlunto menetapkan beberapa indikator kinerja daerah yang menjadi target pencapaian pemerintah daerah di urusan bidang pertanian, adapun indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.259
Capaian Indikator Bidang Pertanian
Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Sektor Pertanian	326,25	345,21	383,10	410,68	422,91
Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	8,92	8,96	8,73	8,51	8,76
Produksi Padi	17.874,45	16.691,72	17.733,35	18.175,13	18.006,23
Produksi Kakau(ton)	566,11	572,44	588,80	590,85	592,67
Produksi Karet (ton)	2012,87	2223,86	2230,91	2.338,76	2.389,03
Jumlah Produksi ikan konsumsi (ton)	206,27	215,92	235,55	238,88	229,69
Produktivitas Pertanian Per hektar/Tahun (padi sawah)(%)	5,16	5,56	5,95	5,96	5,87
Persentase Penurunan Kejadian danJumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	20,00	0	100	0	100
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi (%)	-0,29	-6,61	6,24	2,49	-0,94
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kakao (%)	0,06	1,11	2,86	0,35	0,31
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Karet(%)	30,69	10,48	0,32	4,83	2,10
Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi (%)	-0,73	-4,45	6,09	4,78	16,61
Persentase Peningkatan Produksi Daging Ayam (%)	-2,59	33,30	13,47	-10,35	-3,14
Indek Penanaman (IP)	2,07	2,12	2	2,05	2,02

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2024

Dari tabel diatas PDRB Sektor Pertanian dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami Peningkatan setiap tahunnya, untuk kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan pada tahun 2020 sebesar 8,92 dan pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan kembali walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu 8,96 sedangkan ditahun 2023 mengalami sedikit penurunan, dan pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan yaitu 8,76. Untuk Produksi Padi pada Tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 hal ini disebabkan karena produktivitas meningkat dan pendampingan di lapangan terutama di lokasi kerangka sampling area (KSA) BPS, luas baku lahan sawah dari 1.860 hektar menjadi 1.571 hektar dan untuk Produksi Tanaman Kakao dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya pelatihan bagi Petani tentang pemeliharaan tanaman kakao dan diberikan bantuan pupuk NPK, dan bantuan gunting pangkas.

Produksi Tanaman Karet tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 ini produksi tanaman karet meningkat menjadi 2.389,03 ton, disebabkan karena adanya pemeliharaan tanaman yang baik oleh petani dan pembinaan oleh penyuluh tentang pemeliharaan tanaman dan tentang pengendalian hama penyakit. Untuk produksi tanaman Kakao juga sama dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 juga mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena harga kakao naik maka menambah minat petani untuk bertani kakao. Jumlah Produksi Ikan Konsumsi pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan yaitu 238,88 ton. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pembudidayaan yang mengisi ulang kolam tersebut, meskipun begitu tahun 2024 ini sedikit mengalami penurunan menjadi 229,69 ton. Untuk produktivitas pertanian perhektar juga mengalami peningkatan pada tahun

2023 sebesar 5,96 % (padi sawah) disebabkan karena adanya peningkatan pemakaian benih unggul berlabel sebanyak 3.000 kg benih gadang rumpun kumbayau, disamping itu juga ada bantuan pupuk NPK phonska plus sebanyak 22.500 kilogram. Sementara produktivitas padi untuk tahun 2024 turun menjadi 5,78%. Selanjutnya persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular pada tahun 2022 sebesar 100 % sedangkan tahun 2023 sebesar 0% dan pada tahun 2024 juga mencapai 100%. Untuk persentase peningkatan tanaman padi pada tahun 2023 mengalami peningkatan, tahun 2022 sebesar 6,24 dan pada tahun 2024 persentase peningkatan tanaman padi ini terealisasikan sebesar -0,94%. Dan untuk persentase peningkatan tanaman kakao mengalami penurunan pada tahun 2023 ini yaitu sebesar 0,35 % dan pada tahun 2024 juga mengalami sedikit penurunan yakni 0,31%.

Persentase peningkatan persentase produksi tanaman karet mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,83% hal ini disebabkan antara lain karena harga murah biasanya petani enggan untuk memanen dan tahun 2024. Persentase peningkatan produksi tanaman karet sebesar 2,10% dan untuk persentase peningkatan produksi daging sapi pada tahun 2023 sebesar 4,78% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 16,61 %. Untuk persentase peningkatan produksi daging ayam pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu -10,35% sedangkan pada tahun 2024 sebesar -3,14%. Indeks penanaman juga mengalami sedikit kenaikan menjadi 2,05% pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 juga mengalami sedikit penurunan menjadi 2,02%. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan jaringan irigasi baik melalui dana APBD maupun APBN.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat berpengaruh terhadap, aktivitas perekonomian di Kota Sawahlunto. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Sawahlunto sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal dan mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Adapun perkembangannya Sektor Perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.260
Capaian Indikator Bidang Perdagangan Realisasi
Tahun 2020 -2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB sektor perdagangan	Juta Rupiah	547.82	564.87	560.86	725.97	782.3
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB(2010=100)	%	14.98	14.67	14.86	15.05	15.47
Persentase Stabilitas Harga dan Jumlah Ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	9,09	8,05	7,79	10,42	11
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)	%	10	10	42.7	46	38.8
Persentase kinerja realisasi pupuk	%	80	98	67	49.1	56.77
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	0	37.7	0	11.2	1.9
Ekspor bersih Perdagangan	%	-72.85	-58.77	146.11	278.54	256.22
jumlah omset dipasar pasar tradisional Sawahlunto	rupiah	22,88	25,05	25,56	26,49	27,30

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Dari Tabel Urusan bidang Perdagangan di atas terlihat PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2024 mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya, dari 725.97 tahun 2023 menjadi 782.30 pada tahun 2024. Untuk Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 15.47 dari Tahun 2023.

Untuk Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko dan Swalayan dari tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan dikarenakan Kondisi Keuangan Daerah Kota Sawahlunto. Untuk Persentase Penilaian Realisasi Pupuk tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif kecenderungan naik. Pada Tahun 2024mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan karena indicator ini tidak mengalami recofusing yang mana untuk mendukung ketahanan pangan.

Dan untuk Jumlah Omset Pasar Tradisional Sawahlunto juga menunjukkan kenaikan setiap Tahunnya. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Daya Beli Masyarakat. Daya beli di pasar-pasar tradisional di Kota Sawahlunto ini didukung oleh penataan (delapan) pasar tradisional dan pembangunan pasar songket Silungkang yang dapat meningkatkan pangsa pasar sehingga memberikan kontribusi terhadap sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yang mana pasar merupakan tempat aktivitas perekonomian di kota Sawahlunto. Selain itu Kota Sawahlunto juga mempunyai 12 mini market dan 1.523 toko/warung/kios yang juga mempengaruhi proses perdagangan di Kota Sawahlunto. Untuk itu dapat dilihat perkembangan jumlah pedagang pasar yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.261
Jumlah Pedagang Pasar Tetap Di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Nama Pasar	Pedagang Yang Menempati Kedai (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pasar Sawahlunto	779	779	779	779	468
2.	Pasar Silungkang	72	72	72	72	119
3.	Pasar Talawi	140	140	140	140	107
4.	Pasar Sapan	50	50	50	50	76
5.	Pasar Tak Bancah	3	3	3	3	3
6.	Pasar Tumpuak Tangah	0	0	0	0	0
7.	Pasar Lumindai	30	30	30	30	30
8.	Pasar Kolok Mudik	10	10	10	10	10
9.	Pasar Songket	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Dilihat dari tabel diatas jumlah pedagang tetap yang ada di setiap pasar yang ada di Kota Sawahlunto mengalami kenaikan dan ada pula mengalami penurunan yang significant. Penurunan ini disebabkan karena biaya sewa yang naik tidak sebanding dengan hasil penjualan, sehingga pedagang ini tidak menyewa Kedai atau Toko. Pedagang ini melakukan inovasi dengan cara berjualan di rumah secara online. Selain pedagang tetap, yang berpengaruh terhadap jual beli di pasar adalah pedagang kaki lima, untuk itu dapat dilihat perkembangan pedagang kaki lima di masing-masing pasar sebagai berikut :

Tabel 2.262
Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Nama Pasar	Pedagang Kaki Lima									
		Asli Sawahlunto					Luar Sawahlunto				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasar Sawahlunto	160	160	160	166	166	213	213	213	154	313
2	Pasar Silungkang	105	105	105	105	105	32	32	32	32	45
3	Pasar Talawi	98	98	98	98	98	221	221	221	221	327
4	Pasar Sapan	41	41	41	51	51	18	18	18	12	25
5	Pasar Tak Bancah	10	10	10	10	10	3	3	3	3	3
6	Pasar Tumpuak Tangah	3	3	3	3	3	1	1	1	1	4
7	Pasar Lumindai	12	12	12	12	12	5	5	5	5	5
8	Pasar Kolok Mudik	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2
9	Pasar Songket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	420	434	434	450	450	495	495	495	430	724

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Dilihat dari tabel diatas secara keseluruhan terhadap jumlah pedagang kaki lima yang berasal dari luar Sawahlunto mengalami kenaikan signifikan, terutama di Pasar Talawi dan Pasar Sawahlunto. Kedua pasar tersebut mudah untuk diakses, transportasi lancar dan mempunyai konsumen yang banyak dari pasar lainnya, terutama pasar Sawahlunto yang merupakan pusat dari seluruh pasar yang ada di Kota Sawahlunto.Kedua pasar diatas berjalan 2 kali dalam seminggu, untuk pasar sawahlunto pada hari rabu dan sabtu dan untuk Pasar Talawi pada hari selasa dan jumat.namun untuk kebutuhan pokok masih tetap ada setiap harinya. Pedagang yang berasal dari luar Sawahlunto ini pada umumnya menjual sayur sayuran, ikan dan bahan lainnya yang mana produksi dari Kota Sawahlunto sendiri tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Sawahlunto seperti, ikan air tawar masih ada pedagang dari tanah datar begitu juga dengan pedagang cabe merah, sayuran, daun bawang dan lainnya juga masih ada yang berasal luar Sawahlunto, seperti tanah datar dan solok.

Adanya pedagang luar ini sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan akan sayuran, ikan dan lainnya di Kota Sawahlunto. Sebenarnya apabila pedagang kaki lima ini dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi kekuatan ekonomi rakyat jika semakin banyaknya jumlah pedagang kaki lima dari luar Kota akan berpengaruh terhadap lapangan usaha bagi masyarakat kota, untuk itu perlu adanya peran pemerintah daerah dalam mengorganisir pedagang kaki lima dalam kota sehingga menjadi sumber daya baru bagi peningkatan ekonomi kota, sebagai katup pengaman dari pengangguran dan sarana pemenuhan kebutuhan konsumen dari golongan ekonomi lemah.

Untuk melindungi konsumen di pasar maka diwajibkan untuk setiap pasar untuk melaksanakan tera ulang. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan daerah, kegiatan Tera Ulang UTTP ini merupakan kewenangan daerah, dimana tahun tahun sebelumnya daerah hanya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini dan yang melakukan tera ulang di datangkan dari provinsi. Dengan telah diberlakukanya UU ini pada tahun 2017,2018 dan 2019 Dinas Koperindag tidak melakukan kegiatan Tera Ulang UTTP Karena sarana dan prasarana serta tenaga tera ulang di Kota Sawahlunto belum ada. Pada akhir tahun 2019 Kota Sawahlunto mendapatkan bantuan dari Kementerian Perdagangan untuk kegiatan Tera Ulang UTTP berupa sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Tera Ulang UTTP, Tahun 2020 tidak melakukan tera ulang sehingga tahun 2021 tera ulang sebanyak 1650 buah timbangan yang ditera dengan kenaikan 80% dan Pada Tahun 2022 ini telah dilakukan Tera Ulang sebanyak 377 buah timbangan. Dan pada tahun 2024 ini mengalami penurunan significant dikarenakan kondisi keuangan daerah kota sawahlunto

Ekspor Barang Dan Jasa (% PDRB)

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen (penduduk) suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.

Ekspor barang dan jasa menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan.

Ekspor barang dan jasa merupakan komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut jenis pengeluaran bersama-sama dengan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan pengeluaran perubahan inventori.

Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share/kontribusi Ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kota Sawahlunto. Berikut perkembangan besaran ekspor barang dan jasa (% PDRB) Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.263
Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor Barang dan Jasa (Miliar Rupiah)	315,78	332,62	375,08	414,23	456,88
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	2.760,92	2.829,35	2.941,27	3.072,35	3.195,86
Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	**11,44**	**11,76**	**12,75**	**13,48**	**14.30**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

Pada tabel di atas terlihat perkembangan nilai ekspor barang dan jasa Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir (tahun 2020-2024). Demikian juga dengan nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020 saat terjadi wabah covid 19. Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berkisar antara 11.44% - 13,48%, angka ini menunjukkan besarnya peranan atau kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Capaian indikator kinerja bidang perindustrian sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.264
Urusan Pemerintahan Sektor Perindustrian Realisasi
Tahun 2020 -2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB sektor Industri	Juta Rupiah	395,50	432,17	474,21	524.47	568.04
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB(2010=100)	%	10.82	11.22	10.8	10.87	11.23
Proporsi Jumlah IKM	%	3.15	3.26	3.78	3.84	3.92
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah diKabupaten/Kota	%	10.62	10.62	4.46	0.013	0.050
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	0	78	RPIK Belum ditetapkan	RPIK Belum ditetapkan
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	%	100	100	100	100	100
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansiterkait	%	100	100	0	0 (Koperindag tidak memiliki kewenagan untuk mengeluarkan izin))	0 (Koperindag tidak memiliki kewenagan untuk mengeluarkan izin))
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	0 (Belum ada penetapan kawasan Industri)	0 (Belum ada penetapan kawasan Industri)
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	Kegiatan penyediaan informasi industri baru akan dijalankan tahun 2025, hasil outputnya baru bisa dilihat tahun 2026
Persentase Produk IKM yang mempunyai standar Mutu	%	0	0.004	0.007	0.061	0.023
Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri	%	0	0.007	0.026	0.029	0.018

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Dari tabel Urusan Pemerintahan Sektor Perindustrian dapat disebutkan antara lain yaitu untuk Nilai PDRB Sektor Industri pada Tahun 2024 mengalami Kenaikan dari Tahun 2023. Pada Tahun 2023 sebesar Rp. 524.47 dan tahun 2024 sebesar 568.04. Dan untuk Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (2010=100) dari Tahun 2020-2024 mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Tenaga Kerja dan Teknologi.

Untuk Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Tahun 2020 sampai Tahun 2024 mencapai 100 %. Dan Untuk Persentase Produk IKM yang mempunyai standar Mutu Tahun 2024 sebesar 0,023 % ada pergerakan sedikit di bandingkan Tahun tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya penerimaan standar mutu Produksi. Dan Untuk Persentase IKM yang memanfaatkan Teknologi Industri untuk tahun 2024 sebesar 0,018 % dan ini disebabkan karena IKM pada Tahun 2023 ada menerima alat produksi seperti Komputer, Printer, Alat Pencacah Plastik, Spiner.

2.1.3.2 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi kesekretariatan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Secara rinci capaian kinerja urusan kesekretariatan daerah tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.265
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesekretariatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B (80)	B (81,21)	B (83,40)	B (86,59)	B (86,43)
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B (61,03)	B (61,61)	B (61,92)	B (62,84)	B (64)
LPPD	Skor	na	na	na	na	na
Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota Sawahlunto	%	-1.99	54.67	25.05	4.63	-0.42
Persentase Jumlah Total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0
Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	-	-	38.14	65.33	37.14
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	-	-	62.4	50.1	44.15
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)		-	62.56	61.01	85.96	82.54

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 80 pada tahun 2020 menjadi 86,43 pada tahun 2024 dengan kategori B. Indeks Kepuasan Masyarakat ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan realita. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat Kota Sawahlunto mulai terlaksana pada tahun 2020 bekerja sama dengan Lembaga Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Sumatera Barat dengan sampel 10 Organisasi Perangkat Daerah. Sebelum tahun 2020, penilaian IKM dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Kinerja Kesekretariatan Daerah berikutnya adalah Nilai SAKIP. Nilai SAKIP Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 memiliki predikat SAKIP B dengan skor yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari skor 61.03 pada tahun 2020 menjadi 64 pada tahun 2024. Masih rendahnya Nilai SAKIP Kota Sawahlunto disebabkan beberapa hal sebagai berikut : 1).Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan dan cukup; 2).Cascading kinerja belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional; 3).sebagian besar dokumen penjenjangan kinerja Perangkat Daerah belum memiliki kualitas yang cukup baik karena masih cenderung berdasarkan hierarki organisasi belum berdasarkan logical framework; 4).belum dilakukan perbaikan terhadap dokumen IKU beserta formulasi perhitungan pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah;

Peningkatan zakat di Kota Sawahlunto adalah Kinerja Kesekretariatan Daerah lainnya. Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa peningkatan zakat di Kota Sawahlunto berfluktuasi dari tahun ke tahun, dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 54,67 % dari Rp.2.856.875.200 pada tahun 2020 menjadi Rp. 4.418.653.451 pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi Rp.5.525.690.987 atau terjadi peningkatan sebesar 25,05%. Pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi Rp.5.915.087.137.

Peningkatan zakat ini sangat tergantung pada jumlah muzaki. Dan untuk mengetahui seberapa besar potensi zakat yang mungkin diperoleh setiap tahun di Kota Sawahlunto adalah dengan mengetahui seberapa banyak potensi jumlah muzaki yang ada di Kota Sawahlunto. Saat ini terdapat kendala untuk mengetahui jumlah muzaki, karena penyerahan zakat yang dilakukan oleh instansi/lembaga/perangkat daerah tanpa melaporkan jumlah konkrit muzaki yang ada pada instansi/lembaga/perangkat daerah tersebut, sehingga tidak diketahui perkembangan jumlah muzaki di Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun. Namun Baznas Kota Sawahlunto rencananya akan melakukan pendataan muzaki berdasarkan nama, instansi dan alamat.

Dan indikator kinerja urusan kesekretariatan daerah Kota Sawahlunto berikutnya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Nilai LPPD Kota Sawahlunto yang tersedia hanya pada tahun 2018 dengan skor 3,0965. Sedangkan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2020-2024 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum ada diumumkan.

B. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki fungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta mengelola administrasi kesekretariatan dan keuangan. Dalam pengelolaannya yakni;

a. Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap kelengkapan alat-alat DPRD Kota
b. Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen kerja Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Tahunan (RKPD)
c. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto untuk periode 2024 – 2029 adalah 20 orang, dengan 4 fraksi, yaitu:

- Fraksi Nasdem. Demokrat
- Fraksi PAN, PKB
- Fraksi Golkar
- Fraksi P3
- Fraksi PKS, Gerindra

Tabel 2.266
Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin
Kota Sawahlunto Tahun 2024

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golkar	2	1	3
PPP	3	1	4
PKPI	-	-	-
PKS	2	-	2
PAN	3	1	4
Perindo	-	-	-
Demokrat	1	1	2
PDIP	-	-	-
Gerindra	1	-	1
Nasdem	2	-	2
PKB	2	-	2
Jumlah/total	16	4	20

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2025

Komposisi anggota DPRD Kota Sawahlunto terdiri dari 80 % laki-laki dan 20% perempuan. Komposisi ini belum memenuhi Undang-Undang Pemilu yang mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan representasi perempuan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan.

Tabel 2.267
Jumlah kegiatan Sidang dan Rapat DPRD Kota Sawahlunto
Tahun 2020 -2024

No.	Rapat	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rapat Paripurna/Istimewa	18	20	27	27	34
2	Rapat Pimpinan/Gab. Pimpinan	43	42	5	12	20
3	Rapat Badan Musyawarah (Bamus)	18	20	16	16	17
4	Rapat Badan Anggaran (Banggar)	14	16	13	14	18

No.	Rapat	2020	2021	2022	2023	2024
5	Rapat Panitia Khusus (Pansus)	8	10	-	2	2
6	Rapat Konsultasi	12	10	14	14	20
7	Rapat Fraksi	18	18	-	-	2
8	Rapat Kerja/Dengar Pendapat/gabungan Komisi	38	36	3	12	36
9	Rapat Badan Kehormatan (BK)	-	3	3	3	12
10	Rapat Badan Legislatif Daerah	64	60	2	3	16
11	Rapat Komisi	36	36	24	36	36
	Jumlah/total	269	271	107	139	213

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka, 2025

Tabel 2.268
Jumlah Keputusan DPRD menurut Jenis Keputusan di Kota Sawahlunto, Tahun 2020 - 2024

	Jenis Keputusan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Keputusan DPRD	8	30	12	12	20
2	Keputusan Sekwan	48	13	15	32	8
	Jumlah/total	**56**	**43**	**27**	**44**	**28**

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka, 2025

2.1.3.3 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Unsur Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan daerah Kota Sawahlunto terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang akan ditetapkan selanjutnya RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045. Pada masa periode transisi saat ini, Kota Sawahlunto mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2024-2026, serta Dokumen Tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Adapun realisasi capaian indikator kinerja Kota Sawahlunto pada urusan perencanaan untuk lima tahun terakhir dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.269
Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perencanaan Urusan Pemerintahan Tahun 2020 – 2024

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	6	7	8	9	10
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
I	**PERENCANAAN**						
	Perubahan RPJMD 2018-2023						
1	Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD tingkat Provinsi)	Peringkat	4	4	4	3	-
2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	92	99	98,3	98,3	-
3	Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	%	100	99	83,3	88,9	-
4	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	%	26,55	28,3	4,09	5,2	-
5	Persentase kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	%	100	100	100	100	-
	RPD 2024-2026						
1	Indek Perencanaan Pembangunan	Indeks	-	-	-	-	94,89
2	Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD kedalam RKPD	%	-	-	-	-	100
3	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	98,73
4	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Mitra	%	-	-	-	-	94,89

Sumber Data : Barenlitbangda Kota Sawahlunto 2025

Dari Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perencanaan telah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

B. Unsur Keuangan

Di dalam Undang-undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untukmemperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Realisasi keuangan Kota Sawahlunto yang terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan dan silpa selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.270
Realisasi APBD Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan	576.857.864.031,56	598.040.864.187,45	620.647.226.213,62	605.315.736.275,64	641.838.986.100,93
Belanja	544.263.658.204,79	599.185.054.472,27	643.653.414.741,00	607.064.912.961,00	623.136.545.030,99
Pembiayaan	11.474.898.868,81	39.863.898.029,58	35.121.134.786,76	10.746.689.591,38	7.848.916.148,02
SILPA	44.069.104.695,58	38.719.707.744,76	12.114.946.259,38	8.997.512.906,02	26.551.357.217,96

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi APBD Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuatif. Realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 576.857.864.031,56 mengalami peningkatan menjadi Rp. 641.838.986.100,93 tahun 2024. Realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp. 544.263.658.204,79 mengalami peningkatan menjadi Rp. 623.136.545.030,99 tahun 2024. Realisasi pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp. 11.474.898.868,81 mengalami penurunan menjadi Rp. 7.848.916.148,02 tahun 2024. Realisasi SILPA tahun 2020 sebesar Rp. 44.069.104.695,58 mengalami penurunan menjadi Rp. 26.551.357.217,96 tahun 2024.

Capaian indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan Kota Sawahlunto secara keseluruhan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.271
Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	26,775	39,307	58,225	77,005	70,785
2	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,32	8,44	10,62	9,90	10,24
4	Persentase Peningkatan PAD (%)	0,04	-0,14	0,28	-0,10	0,10
5	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya (%)	6,30	6,37	0,71	1,40	1,34
6	Penetapan Perda APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
7	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja (%)	89,58	92,11	94,47	90,71	94,22
8	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja (%)	50,50	96,21	40,19	40,67	41,69
9	Persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja (%)	11,70	13,16	18,07	13,90	11,05
10	Laporan Keuangan Berbasis Akrual (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (%)	98,88	97,71	101,80	103,05	100,28

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
12	Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (%)	89,70	83,54	76,35	65,12	100,38
13	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah (buah)	19	20	20	21	20
14	Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan (%)	20,55	20,55	20,55	29,68	30,85
15	Rasio PAD (%)	1,74	1,95	1,95	1,95	10,24
16	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (%)	60,02	10,15	10,15	10,15	79,12
17	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD (%)	89,58	91,10	91,10	91,10	-0,11
18	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD (%)	98,19	100,94	96	96	-99,12
19	Manajemen Aset : - Apakah ada Daftar Aset Tetap (Ada/Tidak Ada) - Apakah Ada Manual untuk Menyusun Daftar Aset Tetap (Ada/Tidak Ada) - Apakah Ada Proses Inventarisasi Aset Tahunan (Ada/Tidak Ada) - Apakah Nilai Aset Tercantum Dalam Laporan Anggaran (Ada/Tidak Ada)	 Ada Ada Ada Ada	 Ada Ada Ada Ada	 Ada Ada Ada Ada	 Ada Ada Ada Ada	 Ada Ada Ada Ada
20	Persentase SILPA (%)	2,19	6,72	0,66	1,34	1,35
21	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	2,19	6,72	0,66	1,34	1,35
22	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana (%)	0	0	0	0	0
23	Persentase Belanja Pendidikan (20 %)	20	20	20	20	20,53
24	Persentase Belanja Kesehatan (10 %)	23	24	24	24	26,54
25	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung (%), Perbandingan antara Belanja Langsung dengan APBD	46	62	62	62	72,84
	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung (%), Perbandingan antara Belanja Tidak Langsung dengan APBD	54	38	38	38	41,52
26	Bagi Hasil Kabupatan/Kota dan Desa	0,14	0,14	0,14	0,14	0,18
27	Persentase OPD Dengan Laporan BMD Yang Akurat dan Akuntabel (%)	80	80	81	82	82,14

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 tergolong cukup baik. Namun ada 3 indikator yang realisasinya rendah dan di bawah target yang telah ditetapkan yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), persentase peningkatan PAD, dan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Rendahnya capaian ketiga indikator tersebut disebabkan oleh rendahnya potensi PAD, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya, belum optimalnya pelayanan-pelayanan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, masih belum optimalnya penerimaan oleh pos-pos retribusi daerah, belum optimalnya pembukaan tempat wisata sehingga retribusi daerah yang berasal dari tempat rekreasi dan olahraga masih rendah, belum maksimalnya penerimaan retribusi dari pelayanan kesehatan karena masih belum optimalnya pelayanan yang ada di rumah sakit dan puskesmas, rendahnya penerimaan retribusi dari pengujian kendaraan bermotor karena jumlah kendaraan yang melakukan pengujian menurun yang dipengaruhi oleh adanya sistem pengujian kendaraan online. Untuk itu pada tahun berikutnya perlu menjaga konsistensi nomenklatur program dan pagu antara dokumen perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kemandirian keuangan dan PAD, mengoptimalkan kembali pelayanan-pelayanan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan sarana dan prasarana.

Jenis, Jumlah Bank Dan Cabang Serta Asuransi

Bank dan asuransi merupakan lembaga intermediasi keuangan untuk menampung surplus pendapatan rumah tangga setelah konsumsi. Lembaga ini (terutama Bank) berperan dalam penciptaan modal yang akan digunakan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja pihak swasta dan pada gilirannya akan ikut membantu proses pembangunan ekonomi sebuah daerah.

Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko nasabah dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak perusahaan asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Berikut adalah data jumlah bank dan asuransi yang ada di Kota Sawahlunto:

Tabel 2.272
Jumlah Bank dan Asuransi Tahun 2020-2024

No	Bank dan Asuransi	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Bank (unit)	15	15	15	15	15
2.	Jumlah Perusahaan Asuransi (unit)	2	2	2	2	2

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2024

Daftar nama Bank yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2024 :

1. Bank BRI KCP Unit Sawahlunto
2. Bank BRI KCP Unit Talawi
3. Bank BRI KCP Unit Santur
4. Bank BRI KCP Unit Silungkang
5. Bank Nagari Cabang Sawahlunto
6. Bank Nagari KCP Pembantu Talawi
7. Bank Mandiri KCP Sawahlunto
8. Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto
9. Bank BNI KCP Sawahlunto
10. Bank BTPN KCP Sawahlunto
11. Bank BTN Kantor Kas Sawahlunto
12. BPR LPN Talawi Sakato
13. BPR LPN Pasar Baru Durian
14. BPR LPN Kubang
15. BPR Gajahtongga Kotopiliang

Daftar nama Asuransi yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2024 :

1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan

C. Unsur Kepegawaian

Pemerintahan Daerah akan dapat diselenggarakan dengan baik, efektif dan efisien jika didukung dengan ASN yang senantiasa menerapkan nilai-nilai dasar ASN atau Core Values ASN yaitu BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Core Values ini merupakan inti dari nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Berangkat dari uraian tersebut, adapun gambaran penanganan kasus kepegawaian di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.273
Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian	%	120	80	130	100	160

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2024

Berdasarkan tabel dan data di atas dapat diketahui bahwa ASN di Kota Sawahlunto dalam segi penanganan disiplin maupun penanganan administrasi lainnya relatif baik dengan realisasi rata-rata sudah mencapai 100%. Untuk menekan angka kasus kepegawaian agar semakin kecil demi mewujudkan prinsip tata pemerintahan yang lebih baik dari tahun ke tahun, diperlukannya pemupukan core values ASN agar menjadi karakter pada setiap ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Upaya pembinaan internal secara preventif juga harus dilakukan secara rutin agar Pemerintah Kota Sawahlunto terbebas dari munculnya kasus kepegawaian baik dari segi penanganan disiplin maupun penanganan kasus administrasi lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konteks ini, adapun Indeks Kepuasan Pelayanan Administratif Kepegawaian pada Pemerintah Kota Sawahlunto urusan Kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.274
Persentase IKPAK Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Indeks Kepuasaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2025

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah bagian kepegawaian saat ini sudah memenuhi harapan penerima layanan. Hal ini dapat diketahui dari tingginya persentase indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian dari tahun ke tahun bertahan di angka 100%. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dihitung berdasarkan pelayanan administrasi kepegawaian yang masuk dan yang dilayani. Hal ini merupakan wujud dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki citra pemerintah, misalnya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui kebijakan-kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya diantaranya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

Dalam rangka menggerakkan roda pemerintahan Kota Sawahlunto, terdapat perubahan jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi serta Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintahan Kota Sawahlunto dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yang diurai pada tabel berikut :

Tabel 2.275
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi Instansi Pemerintah
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	26	26	26	28	28
2	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	99	99	105	100	106

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2025

Berdasarkan uraian data di atas dapat dijelaskan bahwasanya Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi sebelum dan setelah dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/2603/OTDA tanggal 22 April 2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi tidak mengalami kenaikan hingga tahun 2021. Namun di tahun 2022 s/d tahun 2024 tidak terdapat penambahan Jabatan Pimpinan Tinggi dan pada tahun 2023 s/d 2024 naik enam Jabatan Administrasi, hal ini dikarenakan lahirnya Organisasi Perangkat Daerah baru yang merupakan hasil dari pemisahan Organisasi Perangkat Daerah yang sebelumnya masih dalam satu payung organisasi, sehingga pada tahun 2024 terdapat 28 Jabatan Pimpinan Tinggi dan 106 Jabatan Administrasi.

Dilain sisi, Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Sawahlunto dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami penambahan yang cukup signifikan. Jumlah penambahan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu ini tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.276
Jumlah ASN dengan Jabatan Fungsional Tertentu
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1125	1279	1314	1687	1981

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2025

Berdasarkan tabel di atas, kenaikan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu dari tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 856 orang atau terjadi peningkatan sebesar 76 % selama lima tahun terakhir. Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) PNS merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS. Diklat mengandung dua fungsi yaitu untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan pengembangan karier PNS. Adapun persentase ASN Kota Sawahlunto yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.277
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	n/a	n/a	7.22	9,02	8,7

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2025

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan baru dianggarkan khusus pada Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto pada tahun 2022. Di tahun-tahun sebelumnya, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan kebijakan Perangkat Daerah masing- masing. Adapun realisasi persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini cukup menjadi perhatian mengingat pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan demi pengembangan kompetensi ASN. Oleh karena itu diperlukan peningkatan peruntukan anggaran penyelenggaraan ataupun anggaran untuk mendukung ASN dalam mengikuti kegiatan pendidikan serta pelatihan formal.

Tabel 2.278
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Orang	n/a	n/a	7.22	7,3	12,99

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2025

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 adalah peraturan tentang pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pendidikan dan Pelatihan Struktural dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural. Adapun persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh faktor ketersediaan anggaran pada Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto.

Tabel 2.279
Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Urusan Kepegawaian Tahun 2020-2024

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Realisasi Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
32	**KEPEGAWAIAN**						
32.1	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi (%)	(Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Ijazah/Sertifikat Terakhir/Jumlah Jabatan) x 100 %	92	93	94	95	95
32.2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi (%)	(Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi/Jumlah Pegawai yang membutuhkan sertifikat diklat teknis kompetensi) x 100 %	80	85	85	85	85
32.3	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat struktural peningkatan kompetensi (%)	(Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Struktural Peningkatan kompetensi/Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural) x 100 %	100	76	80	80	80
32.4	Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi (%)	(Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi/Jumlah Pegawai yang mengikti Tugas dan Izin Belajar) x 100 %	90	100	100	100	100
32.5	Persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik (%)	Jumlah aparatur dg nilai SKP min baik/jumlah aparatur yg memiliki nilai SKP	99,99	100	99.95	97	98,45
32.6	Persentase penanganan kasus kepegawaian (%)	Jumlah kasus yg ditangani/ jumlah kasusx 100%	120	80	130	100	160

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Realisasi Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
32.7	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	Ukuran Kepuasan terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	100	100
32.8	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	61	63	63	60,15	75,97
32.9	Indeks Merit Sistem ASN	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintahan	-	103,5	157	220	220
32.10	Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas : jumlah pegawai dg pendidikan SMA kebawah	2,29	2,55	2,95	4,26	4,17
32.11	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru & tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,09	0,19	0,25	0,33	0,24
32.12	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yg memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,64	0,34	0,39	0,14	0,57

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2025

Dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance perlu dilakukan inovasi dalam peningkatan layanan, salah satunya adalah berupa Layanan konsultasi terkait kepegawaian. Dalam melakukan konsultasi tersebut kerap kali terkendala dan memakan waktu / kurang efektif dikarenakan konsultasi ASN dilakukan secara manual dengan tatap muka antara ASN dengan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga kinerja ASN menurun disebabkan harus meninggalkan pekerjaannnya sehingga berdampak terhadap kepuasan kualitas.

Tabel 2.280
Inovasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi
1	Layanan Konsultasi Kepegawaian Online (LakonpegOnline)	Inovasi pelayanan publik	Digital

Berdasarkan hasil pengamatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto terdapat beberapa isu sebagai berikut. Belum adanya media layanan konsultasi ASN berbasis Online terkait informasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto. Saat ini pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto belum tersedianya wadah bagi ASN untuk berkonsultasi secara Online untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dalam proses konsultasi. Belum optimalnya pengarsipan digital pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto. Belum optimalnya penggunaan aplikasi penunjang untuk arsip digital sehingga menimbulkan berbagai masalah, seperti Seringnya arsip para pegawai hilang dan kesulitan dalam menyediakan arsip/dokumen pegawai apabila diminta dalam waktu cepat. Rendahnya kesadaran ASN akan pembaharuan data pribadi pada Aplikasi Simpeg menjadikan data tidak update sehingga apabila pimpinan membutuhkan data untuk kepentingan mutasi dan promosi jabatan akan sulit didapatkan.

Dengan adanya inovasi Penggunaan Media Quick Response Code (QR_CODE) berbasis online pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto maka mempermudah ASN melakukan konsultasi terkait kepegawaian berupa konsultasi naik pangkat, mutase, pension, pendataan Non ASN, rekrutmen ASN, . Karis/Karsu/Karpeg, izin belajar, disiplin kepegawaian, Kopri, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), cuti, Satya Lencana, pendidikan dan pelatihan dan sistem informasi kepegawaian /Absen Online.

D. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) merupakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dapat dikelola oleh pusat dan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan penelitian dan pengembangan berperan dalam mendukung pengambilan kebijakan melalui Penelitian dan Kajian Strategis untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah, rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data, serta mengembangkan model dan metode pembangunan daerah yang inovatif pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta pengembangan teknologi, produk inovatif yang mendukung pembangunan daerah dengan menjalankan uji coba dan implementasi inovasi pada sektor strategis seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur, oleh karena itu penguatan kelitbangan pemerintah daerah akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif serta mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto urusan kelitbangan menjadi bagian tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, pada saat ini kelitbangan Kota Sawahlunto masih memfokuskan pada kajian-kajian terhadap uji coba dan penerapan inovasi pada seluruh Perangkat Daerah yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Hal ini tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”.

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya diseminasi praktik-praktik inovasi yang baik secara berkelanjutan perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Untuk itu, langkah yang telah dilakukan adalah implementasi *reward dan punishment* terhadap pelaksanaan inovasi di seluruh Perangkat Daerah sehingga memberikan dampak positif terhadap penerapan dan pelaksanaan Inovasi.

Sebagai gambaran umum, jumlah inovasi daerah yang dilaporkan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2024 adalah sebanyak 118 Inovasi dengan mendapatkan predikat Kota Sangat Inovatif dan menjadikan Kota Sawahlunto salah satu Kota terbaik dalam penerapan inovasi daerah. Praktik-praktik inovasi ini perlu untuk didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Bagi Perangkat Daerah yang unggul dalam pelaporan inovasi perlu diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi terhadap pelaksanaan inovasi di Perangkat Daerah tersebut. Adapun capaian predikat inovasi yang telah diraih Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.281
Predikat Inovasi Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Indeks Inovasi Daerah	1264	44,64	58,98	70,39	72,87
Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber Data : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian skor Indeks Inovasi Daerah Kota Sawahlunto tahun 2020 berbeda jauh dengan tahun 2021-2024, yang disebabkan perbedaan metode penilaian. Dan pada periode tahun 2021 hingga tahun 2024 Skor Indeks Inovasi Daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 Kota Sawahlunto berhasil mendapatkan penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) terbaik 5 (lima) tingkat nasional dan terbaik 1 (satu) tingkat kota Provinsi Sumatera Barat dengan predikat kota sangat inovatif. Pada Tahun 2024 Kota Sawahlunto berhasil mendapatkan penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) dengan predikat kota sangat inovatif. Untuk peningkatan pencapaian skor Indeks Inovasi Daerah Kota Sawahlunto lebih aktif melakukan sosialisasi terkait inovasi daerah dengan

tujuan munculnya pelaksanaan inovasi baru pada setiap perangkat daerah. Bahkan kedepannya Kota Sawahlunto melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto mendorong adanya inovasi sampai tingkat Desa dan Kelurahan melalui lomba inovasi tingkat Desa dan Kelurahan, sehingga peningkatan daya saing daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih prima.

Tabel 2.282
Kegiatan Inovasi yang Telah Dilaksanakan
Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Judul Inovasi	
1	Dinas Pendidikan	1	CLINIC DISDIK - Klinik Solusi Permasalahan It Dinas Pendidikan
		2	COCOCIP - Coding Kids Course Kecerdasan Ilmu Pemrograman SD di Sawahlunto
		3	UBI JALAR (UMKM Berbasis Sekolah Untuk Pelajar SD SMP)
		4	PELURU (Penjualan Buku Karya Guru Online)
		5	PELAYAN (Pelatihan Layanan Receptionist Dan Unit Lainnya Sekali Seminggu Seusai Apel Pagi)
		6	PODCAST DISDIK
		7	SAWAHLUNTO POST (Majalah Digital Disdik Berbentuk PDF)
		8	SALJU ABADI (Sawahlunto Jurnal Dan Karya Ilmiah Pengabdian)
		9	GURU INGGRIS (Translate Buku Karya Guru Ke Bahasa Inggris)
		10	DISDIK INNOVATION AWARD (Diikuti 63 SD dan 12 SMP se Kota Sawahlunto)
		11	SORTICS - Software Robotic Pelajar SMP
		12	WEDIS - Web And Android SMA
		13	KADIF (KomunitAs DesaIn graFis)
		14	PPDB ONLINE
		15	DASHDIK - Dashboard PTK Dinas Pendidikan
		16	ELEARNING DISDIK - Refreshment Regulasi Pegawai dan Ujian Sekolah
		17	GETUK (Gerakan Tukar Buku Antar Siswa)
		18	RENI - Reward Nilai 3.1 Keatas Untuk Mahasiswa
		19	PENDEKAR (Pendidikan Karakter)
		20	MERPATI (Memberikan Reward Masuk Perguruan Tinggi)
		21	BASEKOLAH (Bantuan Seragam Sekolah)
		22	KELOK ES (Kelompok Sepuluh Startup)
		23	DISDIK TV
		24	KAHFI (Kegiatan Pengujian Tahfidz)
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1	ANDA BAPERAN (Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja Online)
		2	ANTUM SADIS (Antar Jemput dengan Sasaran Disabilitas)
		3	CATAT JANJI KETEMUAN (Pencatatan Kerja Waktu Tertentu Melalui Online)
		4	OLAHAN PERASAAN (Online Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan)
		5	“NAN PARALU” (Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Sawahlunto) terkait ketenagakerjaan
		6	PEDATI (Pelayanan Data Hubungan Industrial Online)
		7	SASIKEK (SAWAHLUNTO SIAP KERJA)
		8	Klinik LKPM (Klinik Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
		9	SISTER (SAWAHLUNTO INVESTMENT SERVICE CENTER)
		10	Laris (Layanan Perizinan dengan SMS)
		11	USUS BUNTU (Urus Izin Susah, Kami Bantu)
		12	SUPER ONLINE (Surat Pengantar Online)
		13	Mas Lapor (Media Sosial Untuk Layanan Perizinan Online)
		14	Sabit (Satu Hari Izin Terbit)
		15	LECI (Legalitas Clinic)
		16	Sultan Perizinan (Konsultasi Perizinan Online)
		17	JEBOL GILA (Jemput Bola Tagihan LKPM)
		18	JASO PEJANTAN KUMIS (Jaminan Sosial bagi pekerja rentan untuk kurangi kemiskinan)
		19	PELO SITI (Pelayanan Optimal Satu Pintu inklusif)
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	IKD ON CALL (Identitas Kependudukan Digital On Call)
		2	KADO ANANDAKU (Kartu Keluarga, Dokumen Akta Kelahiran Dapat Kubawa Pulang)
		3	DI KECAP MANIS (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cepat Tanggap Menghentikan Tangis)
		4	IKD (Identitas Kependudukan Digital) Goes To School
		5	DI PUNCAK CEMARA (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Rancak Bercerita Dan Menyapa Di Udara
		6	NIKMAD SEKALI (NIKAH MANTAP DOKUMEN KEPENDUDUKAN SEKALIGUS JADI)

No	Perangkat Daerah		Judul Inovasi
		7	TUDUNG SAJI (Satu Data Dukcapil Rampung dan Tersaji)
		8	JEMPOL NARSIS (Jemput Bola Nyasarin Rekam KTP Siswa)
		9	MAKAN KOLAK (Melayani Administrasi Kependudukan KIA Ke Sekolah Anak)
		10	JEMPOL PAKDEKU (Jemput Bola pada Desa/ Kelurahan)
		11	HALO DANAPI (Hasil Olah Data Narapidana)
		12	TELEPATI (Tetap Melayani pada Jam Istirahat)
		13	PETA LINTAS (Pelayanan Mengutamakan Lansia dan Disabilitas)
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	PARASO (Pemberian Reward Atlet Sawahlunto)
		2	BAFOTO (LomBA FOTO)
		3	SIMFes (Sawahlunto International Musif Festival)
		4	LAKON KANDIH (Lembaga Konservasi Kandih)
		5	LINCAH (Layanan INformasi Center sawAHlunto)
		6	SPORT (Sponsor Olahraga Kota)
		7	SaTo (Sawahlunto Tourism)
		8	SGP Run (Sawahlunto GeoPark Run)
		9	PEGAS (Pengelolaan Geopark Sawahlunto)
		10	LEVI'S (Lomba Video dan Sinematografi)
		11	Produktif (Produksi Konten Kreatif)
		12	PUTAR (Pemandu Ulung Dan Pintar)
		13	PENTAS (Pendampingan Atlet Disabilitas)
		14	IKON SABU (hIbah KONi SAwahlunto BUgar)
		15	SISSCa (Sawahlunto International Songket Silungkang Carnival)
		16	LAGA CETAR (Layanan Pegawai Cepat Tepat Akurat)
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1	INFO BAREK (Informasi via Billboard Running Text)
		2	PENAWAMEN (PETERNAK BERTANYA PUSKESWAN MENYILAU)
		3	MAK ADANG (MEMERIKSA SAMPLE KE LADANG)
		4	LAKEH SATO (Layanan Gratis Kesehatan Hewan Kota Sawahlunto)
		5	BIORAP AsCa (Biorap Asap Cair)
		6	Call POPT (Call Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan)
		7	BUHAI (BURUH HAMA WISATA)
		8	LAMBANG MATA (Agroeduwisata di Lahan Bekas Tambang Batubara)
		9	PELESTARIAN PADI GADANG RUMPUN KUMBAYAU
		10	MONSTER (Monitoring dan Evaluasi Ternak)
		11	PITIS SINTA SAOTO (Pinjam Gratis Alat dan Mesin Pertanian Kota Sawahlunto)
6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	PeErKu SIAP (Pelayanan Herbal dan Akupresur Sehat Insyaallah Aman dari Zat Kimia)
		2	KARI PINDANG GURAMI (KARTU DIGITAL FISIOTERAPI PENYANDANG DISABILITAS BERGUNA DI ERA PANDEMI DAN PASCA PANDEMI)
		3	SONGKET jo ALAT TENUN (Songsong Keluarga Bebas Tuberkulosis Jo Ajak Lintas Sektor Temukan Minum Obat Sampai Tuntas)
		4	MAS LITA (MASyarakat peduLI gizi baliTA)
		5	SINGKOK TUDUANG (menyingkap atau membuka tudung saji sasaran yang memiliki masalah gizi)
		6	GELORA CINTA KASIH (Gerakan Kelola Limbah Rumah Tangga Dengan Menciptakan Sarana Penyaringan Air Bersih)
		7	JEMPOL SAKTI (Jemput Bola Sasaran Dengan Hipertensi)
		8	POSE MENARI (Podcast Kesehatan Menuju Masyarakat Sehat Mandiri)
		9	MAWAS DIRI (peMAntauan dan pengWASan DIabetes dan HipeRtensI)
		10	Bertabur Sampah Jadi Emas
		11	AKRILING (Aksi Terintegrasi Pengendalian Stunting)
7	Dinas Perhubungan	1	JALAH SELALIN (Jaga Sekolah Selamat Berlalu lintas)
		2	SIPATWAL PAMPIMPUM (sistem pengawalan ,pengamanan pimpinan pemerintah dan masyarakat umum)
		3	SIFALAN (Sistem Fasilitas Keselamatan Jalan)
		4	REL MAK ITAM (REAKTIVASI LOKOMOTIF MAK ITAM)
		5	Sawahlunto Terang
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Tim Sultan (Konsultasi Desa Bertanya) Kota Sawahlunto
		2	DIMANJA (Disabilitas Mandiri dan Berjaya)
		3	PESAN (Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan)
		4	SILO (Sekolah Istri Teladan Sawahlunto)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Guwebisa (Gabungan Website Integrasi Sawahlunto)
		2	T-tanik (Tanda Tangan Elektonik)
		3	Sawahlunto-CSIRT (Computer Security Incident Response Team)
		4	Go TTE (Tanda Tangan Elektonik)
		5	WIT (Website Terintegrasi Kota Sawahlunto)
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	LIB TOUR

No	Perangkat Daerah		Judul Inovasi
		2	GENG PUSKEL
		3	KEJAR LITERASI (Kelompok Belajar Literasi)
		4	DOKTER ONLINE (Dokumen Terdigitalisasi secara Online)
11	Dinas Kebudayaan	1	DADA WARSINA (Digitalisasi Data Warisan Budaya Dunia)
		2	MARINA SELINGKU (Mengenalkan Warisan Dunia lewat Museum Keliling dan Sekolah masuk museum)
12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	Baselo (Bersama Tertibkan Sekolah)
		2	GETUK (Gerakan Sukarela Membantu Pemadam Kebakaran)
13	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	JEBOL SIPERA (Jemput Bola Inovasi Perangkat Daerah)
		2	SABESTI (Sawahlunto Bebas Stunting)
		3	SI HAKIM RAJA (Sinergi Hapus Kemiskinan Ekstrem, Masyarakat Sejahtera)
		4	SAWAHLUNTO CERIA
		5	SIMONEV (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi)
		6	SIA (Sawahlunto Inovation Award)
14	RSUD	1	SALAMAIK NAN SEHAT - Sistem Layanan Monitoring Evaluasi Dan Edukasi Diit Pada Terapi Gizi Berkelanjutan Untuk Kesehatan Optimal
		2	SISTER K-POP (Sistem Terintegrasi Kefarmasian Pengantaran Obat Pasien)
		3	MITRA DENTS (MonItoring kepatuhan konTrol ulang pasien jantung post Rawat An Dan Edukasi uNtuk keSehatan optimal)
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Sistem Monitoring Kegiatan (SEMOGA)
		2	SI PETARUNG (Sitem Informasi Penataan Ruang)
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Layanan Konsultasi Kepegawaian Online (Lakonpeg Online)
17	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1	Smart Program Kampung Iklim (Smart-Klim)
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1	KAMPUNG DIGITAL MARKETING
19	KECAMATAN BARANGIN	1	Serai Wangi
		2	GUSREN LUMINDAI
		3	E-SIPASAN
		4	JUMPA BERLIAN (Jum'at Pagi Bersihkan Lingkungan)
20	KECAMATAN TALAWI	1	PROGRAM SINIAR BISA " Bincang-Bincang Desa"
21	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	1	SEKOLAH LAPANG
22	KECAMATAN SILUNGKANG	1	TAS BERCORAK (KECAMATAN SILUNGKANG BERCOCOK TANAM DAN BERKEBUN)

Sumber Data : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2024

Berdasarkan data dari tabulasi diatas dapat disajikan sebaran data Laporan Inovasi Daerah Kota Sawahlunto tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.283
Sebaran Data Usulan Inovasi Daerah Dari Perangkat Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan	24	17,52
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	19	13,87
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	16	11,68
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13	9,49
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	11	8,03
6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	8,03
7	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	6	5,08
8	Dinas Perhubungan	5	3,65
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	3,65
10	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	4	2,92
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	2,92
12	Kecamatan Barangin	4	2,92
13	RSUD	3	2,54
14	Dinas Kebudayaan	2	1,46
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2	1,46
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	1,46
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	0,73
18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1	0,73
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1	0,73
20	Kecamatan Talawi	1	0,73
21	Kecamatan Lembah Segar	1	0,73
22	Kecamatan Silungkang	1	0,73
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0,00

No	Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Persentase (%)
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0,00
26	Sekretariat Daerah	0	0,00
27	Sekretariat DPRD	0	0,00
28	Inspektorat	0	0,00

Sumber Data : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 22 dari 28 Perangkat Daerah yang ada di Kota Sawahlunto atau 78,57 % Perangkat Daerah yang melaporkan inovasi pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 s/d 2023 dimana target kedepannya 95% lebih Perangkat Daerah sudah berinovasi serta berasal dari Desa dan Kelurahan.

***Roadmap* Inovasi Tahun 2024-2026 :**

Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan yang menjadi kewenangannya berdasarkan urusan pemerintahan konkuren dengan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
3. Urusan Pemerintahan Pilihan;
4. Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam rencana implementasi inovasi daerah diarahkan dengan beberapa tematik pengelompokan terhadap jenis-jenis inovasi terkait dengan tema-tema tertentu. Kategorisasi inovasi tematik telah disesuaikan dengan isu-isu strategis delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita yang menjadi sasaran diantaranya adalah :

Asta Cita 1	:	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
Asta Cita 2	:	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Asta Cita 3	:	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
Asta Cita 4	:	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
Asta Cita 5	:	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
Asta Cita 6	:	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Asta Cita 7	:	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
Asta Cita 8	:	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Tabel 2.284
Target Jumlah Inovasi Berdasarkan Inisiator

NO.	INISIATOR INOVASI	TARGET INOVASI PER INISIATOR	TARGET MINIMAL INOVASI
1	Kepala Daerah	5	200
2	Anggota DPRD		
3	ASN	140	
4	Perangkat Daerah		
5	Masyarakat (Desa/Kelurahan)	50	

Dari tabel diatas target jumlah minimal inovasi yang dilaporkan pada Kemendagri melalui penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sebanyak 200 inovasi yang berasal dari inisiator Kepala Daerah, Anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah dan Masyarakat melalui Desa/Kelurahan

Tabel 2.285
Target Inovasi Berdasarkan Perangkat Daerah

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BIDANG	TARGET MINIMAL INOVASI
1	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	6
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	7
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	3
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	3
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	3
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2	3
7	Dinas Pendidikan	2	3
8	RSUD	3	6
9	Sekretariat Daerah	9	13
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	3
11	Dinas Kebudayaan	2	3
12	Dinas Perhubungan	2	3
13	Sekretariat DPRD	3	4
14	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	20
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	6
16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4	6
17	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	4	6
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3	8
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3	4
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2	3
21	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	5	8
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	4
23	Inspektorat Daerah	2	3
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	8
25	Kecamatan Talawi	5	2
26	Kecamatan Silungkang	5	2
27	Kecamatan Lembah Segar	5	2
28	Kecamatan Barangin	5	2
JUMLAH		**100**	**140**

Dari tabel diatas dijabarkan analisis jumlah target inovasi Perangkat Daerah berdasarkan jumlah bidang masing-masing, terdapat 4 Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik dan 1 Perangkat Daerah Teknis dengan target lebih dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya yaitu :

- RSUD
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

hal ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik sehingga berdampak langsung terhadap masyarakat, selain itu juga untuk peningkatan daya saing daerah yang menjadi salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan.

2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat

Dalam pelaksanaan pemerintah aspek pengawasan harus diimplementasikan secara komprehensif sebagai alat evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan secara prioritas. Perkembangan indikator pembangunan Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.286
Jumlah Auditor dan P2UPD di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian Jabatan Fungsional	2020	2021	2022	2023	2024	Ket
1	**Auditor**	**10**	**13**	**12**	**11**	**11**	
	Utama	-	-	-	-	-	
	Madya	7	7	7	6	6	
	Muda	1	2	1	2	2	
	Pertama	1	2	2	1	1	
	Penyelia	-	-	1	1	1	
	Pelaksana Lanjutan	-	1	1	1	1	
2	**P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Perangkat Daerah)**	**10**	**17**	**17**	**13**	**13**	
	Utama	-	-	-	-	-	
	Madya	3	6	5	6	6	
	Muda	3	5	6	5	5	
	Pertama	4	6	6	2	2	
3	**Auditor Kepegawaian**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Total	**19**	**20**	**29**	**24**	**24**	

Sumber Data : Inspektorat Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa SDM Inspektorat kota Sawahlunto setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pada tahun 2024 tidak ada perubahan pada AUDITOR dan P2UPD. Inspektorat kota sawahlunto untuk kedepannya akan dapat meningkatkan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto ke Perangkat Daerah serta desa-desa di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto. Inspektorat Kota Sawahlunto akan melakukan pengawasan yang2lebih efektif dan efisien sehingga terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang berkualitas.

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

A. Kecamatan

Indikator kinerja daerah (IKD) adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.287
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	%	100	100	100	100	100

Sesuai dengan tabel realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) persentase lembaga kemasyarakatan di Kota Sawahlunto dari tahun 2020 sampai 2024 sudah cukup baik. Tahun 2022 hingga 2024 pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan lebih difokuskan pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Kawasan Strategis Wilayah

Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah, berikut ditetapkan kawasan strategis di Kota Sawahlunto:

a. Kawasan Strategis Ekonomi
   1. Desa Kolok Mudiak, Desa Kolok Nan Tuo, Desa Santur Kecamatan Barangin;
   2. Desa Rantih, Desa Salak, Desa Sikalang, Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi;
   3. Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang.

b. Kawasan Strategis Sosial dan Budaya
   1. Kelurahan Air Dingin, Kelurahan Aur Mulyo, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kelurahan Kubang Utara Sikabu, Kelurahan Pasar Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar;
   2. Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin

2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

A. Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan umum meliput Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada,Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

Tabel 2.288
Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Tahun 2024

No	Indikator	Tahun
		2024
1	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	CC (53,58)
2	Persentase penyelesaian potensi konflik Politik	100%
3	Persentase penyelesaian potensi konflik Sosial	100%
4	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan KarakterKebangsaan	57%
5	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Terdaftar dan Aktif di Kota Sawahlunto	100%
6	Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	100%
7	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Terpadu Melalui Forum Strategis	100%
8	Desa Bersinar Yang Terbentuk	2 Desa
9	Persentase Gejala Konflik Sosial Yang Dapat di Selesaikan	100%
10	Persentase Potensi Konflik Yang Dapat Teredam	100

Indikator Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik rata-rata sudah mencapai target. Kesbangpol Kota Sawahlunto juga melakukan antisipasi terjadinya konflik dengan melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam pencegahan terjadinya konflik sosial. Kesbangpol juga melakukan pemantauan kondisi politik pra dan pasca Pemilu/Pilkada serta mengantisipasi terjadinya demonstrasi. Dari tahun 2019 sampai dengan 2023 belum ada terjadi demonstrasi di Kota Sawahlunto.

Sebagai bentuk inovasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto menggaet perwakilan masyarakat di masing-masing Kecamatan dan anggota kepolisian sebagai pemantau dalam rangka mencegah konflik sosial dan mengamati gejala-gejala konflik yang ada di masyarakat.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek Daya Saing Daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing (competitiveness) merupakan satu diantara faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

Gambaran umum kondisi daerah yang berhubungan dengan aspek daya saing daerah meliputi capaian pembangunan daerah yang dapat dilihat dari capaian pemerintah daerah terhadap aspek-aspek antara lain ; Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi dan Sumber Daya Manusia yang dijelaskan lebih detail sebagaimana berikut :

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah, dimana kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada, dan akan masuk ke suatu daerah. Daya tarik investasi yang tinggi dan bergerak secara cepat aktivitas ekonomi daerah akan menciptakan terjadinya efek ganda (multiflier effect) dan efek menjalar (contagious effect) bagi peningkatan daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah terkait aspek daya saing khususnya kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita, Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita, Nilai Tukar Petani dan Produktivitas Total Daerah.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan salah satu dari enam komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran (demand side). Rumah Tangga melakukan pengeluaran konsumsi untuk mempertahankan taraf hidup. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Berikut disajikan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kota Sawahlunto beserta variabel pembentuknya selama kurun waktu 2020-2024 :

Tabel 2.289
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi RT ADHB Kota Sawahlunto	Miliar Rupiah	2.059,43	2.151,13	2.385,07	2.556,27	2.707,83
Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto	Jiwa	65,138	65,687	66,413	67,760	68,730
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto	**Juta Rp/jiwa**	**31,62**	**32,75**	**35,91**	**37,72**	**39,39**
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto	%	-	3,57%	9,65%	5,04%	4,43%

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan capaian mendekati 10%.

2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan (pangan) dan bukan makanan (non pangan). Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap pergeseran pola pengeluaran. “Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan (non pangan)”. Atau dengan kata lain, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, “semakin rendah persentase pengeluaran konsumsi untuk makanan (pangan) terhadap total pengeluaran, semakin baik tingkat kesejahteraan”

Pengeluaran konsumsi untuk makanan (pangan) digunakan untuk membeli padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telor dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan kelapa, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi, dan rokok.

Sedangkan “pengeluaran konsumsi untuk bukan makanan (non pangan)” digunakan untuk membiayai perumahan dan fasilitas rumah tangga; aneka komoditas dan jasa; pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; komoditas tahan lama; pajak, pungutan, dan asuransi; keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Berikut disajikan perkembangan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan makanan (pangan) dan bukan makanan (non pangan) Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 :

Grafik 2.20
Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan
Kelompok Makanan dan Bukan Makanan
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 (Dalam Rp)

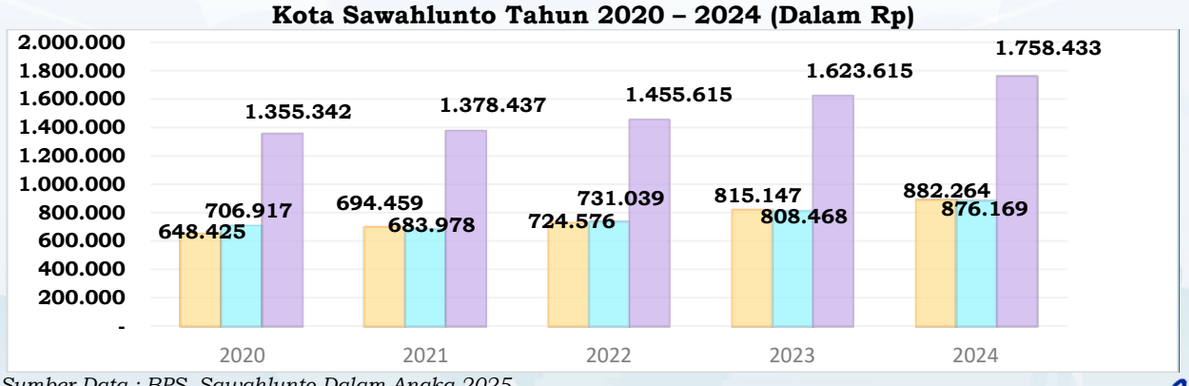

Sumber Data : BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa selama kurun waktu 2020-2024, pengeluaran konsumsi kelompok makanan (pangan) mendominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Sawahlunto, kecuali tahun 2020 dan 2022, dimana kondisi pada kedua tahun ini pengeluaran konsumsi kelompok bukan makanan (non pangan) lebih tinggi dari pengeluaran konsumsi kelompok makanan (pangan).

Untuk melihat komposisi pengeluaran konsumsi kelompok makanan (pangan) dan bukan makanan (non pangan) dapat dilihat pada besarnya persentase pengeluaran konsumsi per kapita sebulan kelompok makanan (pangan) dan bukan makanan (non pangan), sebagai berikut :

Grafik 2.21
Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan
Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

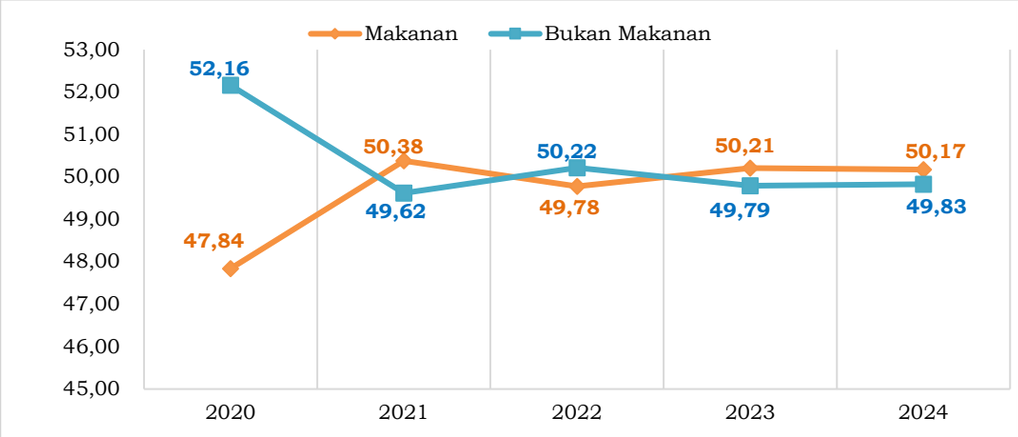

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa persentase pengeluaran konsumsi per kapita sebulan kelompok makanan (pangan) di Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2020-2024 di atas 50% kecuali tahun 2020 dan 2022. Hal ini berartinya pembiayaan rumah tangga di Kota Sawahlunto lebih dari separohnya digunakan untuk membeli kebutuhan kelompok makanan (pangan).

Pada tahun 2020 dan 2022, kondisi ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto lebih baik atau lebih sejahtera, hal ini terindikasi dari proporsi pengeluaran konsumsi bukan makanan (non pangan) lebih besar dari pengeluaran konsumsi untuk makanan (pangan). Hal ini sejalan dengan teori ekonomi modern (Walt Whitman Rostow), salah satu ciri perekonomian yang paling modern adalah jika tujuan utama konsumsi masyarakatnya adalah untuk meningkatkan arti hidup, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibanding kebutuhan primer dan sekunder. Atau dengan kata lain, “semakin tinggi perekonomian suatu masyarakat, konsumsi untuk kebutuhan bukan makanan (non pangan) semakin tinggi”.

Penyebab kondisi ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto pada tahun 2020 lebih baik atau lebih sejahtera dari pada tahun-tahun karena turunnya laju inflasi pada kelompok bahan makanan akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan pasar sepi sehingga harga-harga menjadi turun. Disamping itu, penyelenggaraan sekolah dan aktivitas lainnya dilakukan secara daring sehingga memerlukan tambahan biaya untuk kuota internet (pengeluaran kelompok bukan makanan).

Sedangkan pada “tahun 2022, inflasi pada kelompok bukan makan lebih tinggi” dari pada kelompok makanan yang dipicu oleh naiknya harga pertalite, pertamax dan solar bersubsidi pada bulan September 2022. Disamping kenaikan harga bahan bakar minyak, juga terjadi kenaikan tarif air dan listrik, harga bahan bakar rumah tangga (gas elpiji), harga barang perlengkapan/peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, harga alat kesehatan, dan biaya transportasi.

3. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas adalah perbandingan antara jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut (Husein Umar, dkk). Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli dimaksud maka dianalogikan output daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK) suatu daerah dan input adalah jumlah tenaga kerja yang ada pada daerah tersebut. Produktivitas Total Daerah menggambarkan

efektivitas tenaga kerja dalam menambah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah, dengan kata lain indikator ini menggambarkan besaran produktivitas tenaga kerja.

Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.290
Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK (Rp. Miliar)	2760,92	2829,35	2941,27	3072,35	3195,86
Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	-1,27	2,48	3,96	4,46	4,02
Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)	30310	30186	32275	34018	36134
Pertumbuhan Tenaga Kerja %)	4,10	-0,41	6,92	5,40	6,22
Produktivitas Total Daerah (Juta/Jiwa)	**9,11%**	**9,37%**	**9,11%**	**9,03%**	**8,84%**

Sumber :BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tiga tahun terakhir Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto terus menerus mengalami penurunan, hal ini disebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja (input) lebih besar dari peningkatan produksi (output), dimana jumlah tenaga kerja meningkat pada kisaran 4,10% - 6,92%, sementara produksi meningkat pada kisaran 2,48% - 4,46%.

Untuk melihat Lapangan usaha mana yang paling produktif, maka Produktivitas Total Daerah dirinci berdasarkan output (produksi) dan input dari masing-masing lapangan usaha yang ada. Output diwakili oleh PDRB ADHK menurut lapangan usaha dan input diwakili oleh jumlah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha.

Lapangan usaha terdiri dari tiga kategori, yakni pertanian, manufaktur dan jasa. Lapangan usaha manufaktur terdiri dari pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan lapangan usaha Jasa terdiri dari perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum; pergudangan dan transportasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa-jasa lainnya.

Tabel 2.291
Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 – 2024

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Miliar Rupiah)					
Lapangan Usaha	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pertanian	219,53	235,05	246.63	252.708,32	252.708,32
Manufaktur	872,14	829,59	843,74	879,54	895,97
Jasa	1.706,40	1.764,73	1.850,90	1.940,10	2.043,32
Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Jiwa)					
Lapangan Usaha	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pertanian	5.646	5.547	4.646	5.300	4.920
Manufaktur	7.361	7.350	8.766	8.126	9.105
Jasa	17.303	17.289	18.863	20.592	22.109
Produktivitas Total Daerah (Juta Rupiah / Jiwa)					
Lapangan Usaha	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pertanian	38,88	42,37	53,08	47,68	52,15
Manufaktur	118,48	112,87	96,25	108,24	98,40
Jasa	98,62	102,07	98,12	94,22	92,42

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa lapangan usaha yang paling produktif adalah manufaktur, kecuali pada tahun 2022 lapangan usaha Jasa lebih produktif. Sedangkan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Jasa.

4. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani merupakan rasio Indeks harga yang diterima petani (IT) terhadap Indeks harga yang dibayar petani (IB).

Berikut disajikan grafik perkembangan Nilai Tukar Petani Sumatera Barat dari tahun 2020-2024 :

Grafik 2.22
Perkembangan Nilai Tukar Petani Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 – 2024

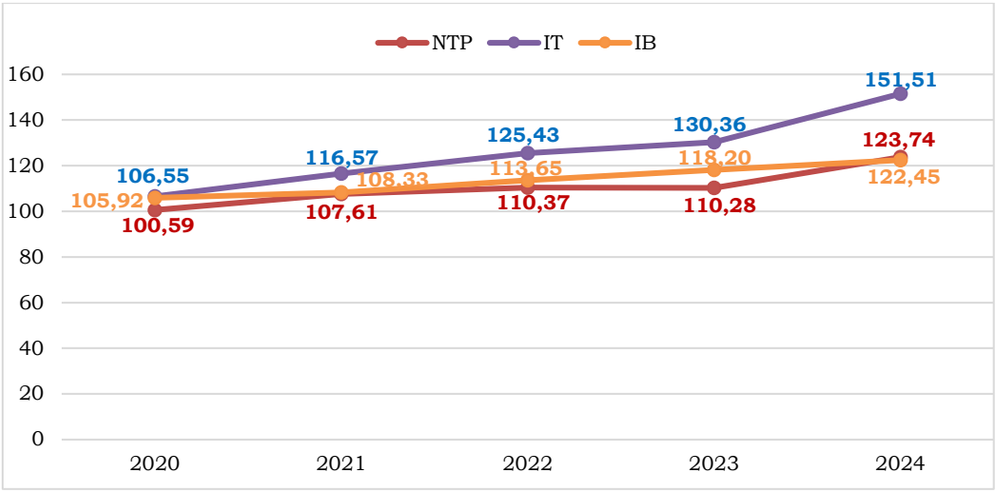

Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Nilai Tukar Petani tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan NTP >100 yang berarti petani mengalami surplus, karena nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani (IT) lebih besar dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani (IB).

Indeks harga yang dibayar petani (IB) meliputi indeks harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga (Indeks Konsumsi Rumah Tangga/IKRT) maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian (Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal/IBP). Berikut disajikan perkembangan Indeks harga yang dibayar petani (IB) periode 2020 – 2024.

Grafik 2.23
Perkembangan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB)
Tahun 2020 – 2024

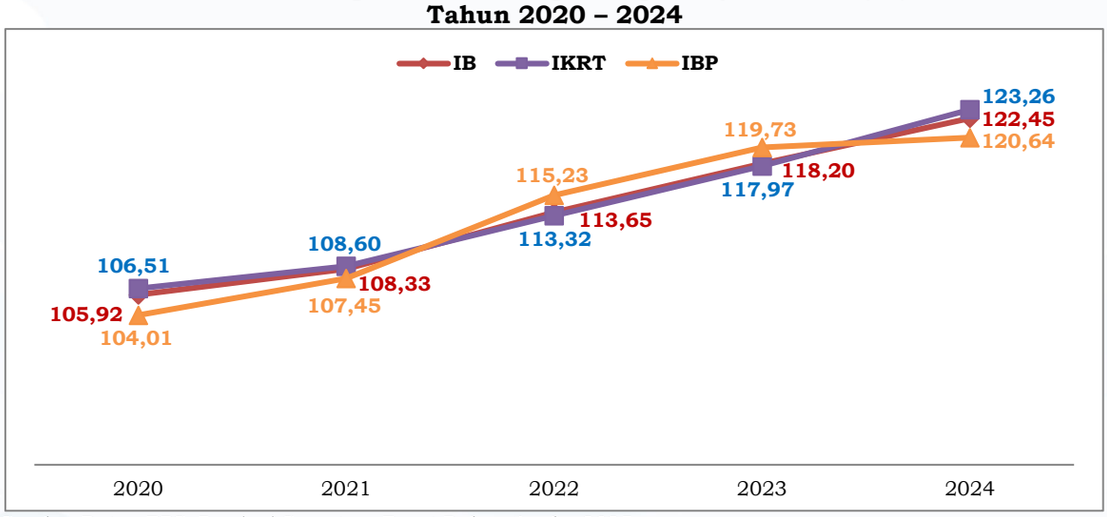

Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2020, 2021 dan 2024, "Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) lebih dominan" dari pada Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBP). Ini berarti para petani menggunakan sebagian besar pendapatan yang diterimanya untuk membeli kebutuhan rumah tangganya dari pada digunakan untuk Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal. Namun pada tahun 2022 dan 2023, Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBP) lebih besar dari Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT). Ini menunjukkan para petani sudah menggunakan sebagian besar pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal. Meskipun demikian, campur tangan pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pelatihan agar produktivitas hasil pertanian meningkat dan nilai tambah hasil pertanian juga meningkatkan melalui pengendalian harga hasil pertanian. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa harga barang-barang pertanian cenderung rendah dan tergantung pada harga yang ditetapkan oleh pedagang pengumpul hasil pertanian.

5. Analisis Lapangan Usaha Unggulan Kota Sawahlunto

A. Metode *Shift Share*

Metode ini digunakan untuk membandingkan perbedaan laju pertumbuhan lapangan usaha/sektor/industri di wilayah yang sempit (daerah/kabupaten/kota) dengan wilayah yang lebih luas (nasional/Provinsi) (Tarigan, 2005). Dengan kata lain metode shift share menganalisis pergeseran struktur perekonomian daerah (kecamatan/kabupaten/kota/provinsi) terkait dengan peningkatan perekonomian daerah di atasnya (kabupaten/kota/ provinsi/nasional).

Pada analisis ini akan dilihat pertumbuhan lapangan usaha di Kota Sawahlunto dengan lapangan usaha yang sama pada tingkat Provinsi Sumatera Barat. Tabel di bawah ini memperlihatkan hasil perhitungan Metode Shift Share untuk mengetahui kondisi lapangan usaha di Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 pada tabel berikut :

Tabel 2.292
Hasil Analisis *Shift Share* (SS) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN		KOMPONEN				KATEGORI
		Provinsi (Rip)	SWL (Rij)	NSij	DSij	PSij	SSij	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,03	0,04	10,07	-3,23	2,84	9,67	Basis/ Potensial
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	-0,08	6,27	-2,96	-15,33	(12,02)	Non Basis
3	Industri Pengolahan	0,03	0,03	13,78	-4,54	1,15	10,39	Basis/ Potensial
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,02	2,47	-0,26	-0,92	1,30	Non Basis
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,03	0,45	-0,02	-0,16	0,27	Non Basis
6	Konstruksi	0,04	0,03	12,97	-1,17	-3,67	8,12	Non Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,05	0,05	20,12	4,37	-2,17	22,32	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,05	0,02	10,87	1,95	-7,97	4,84	Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,06	2,32	2,49	-1,70	3,11	Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0,07	0,08	12,26	7,29	5,46	25,01	Basis/ Potensial
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05	0,06	4,10	1,28	0,60	5,98	Basis/ Potensial
12	Real Estat	0,05	0,06	2,20	0,49	0,25	2,94	Basis/ Potensial
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,04	0,16	0,03	-0,04	0,15	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,03	0,03	14,12	-3,47	-2,11	8,53	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	0,03	0,05	3,75	-1,04	1,42	4,13	Basis/ Potensial
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,06	0,08	1,54	0,62	0,69	2,85	Basis/ Potensial
17	Jasa Lainnya	0,09	0,06	5,96	6,34	-4,23	8,07	Non Basis

Berdasarkan tabel di atas diketahui lapangan usaha unggulan berdasarkan Analisa Shift Share adalah yang nilai Proportional Shift (PSij) positif, yang bermakna lapangan usaha tersebut pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi, yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Industri Pengolahan;
3. Informasi dan Komunikasi;
4. Jasa Keuangan dan Asuransi;
5. Real Estat;
6. Jasa Pendidikan;
7. Jasa Pendidikan

B. Metode Location Quotient

Metode Location Quotient adalah perbandingan peran sektor/lapangan usaha suatu daerah (kabupaten/kota) terhadap besarnya peran sektor/lapangan usaha tersebut pada daerah di atasnya (Provinsi) (Tarigan, 2014). Nilai dari Location Quotient (LQ) adalah :

LQ > 1 artinya peranan lapangan usaha/sektor tersebut lebih besar di daerah dari pada nasional, yang mengindikasikan dimungkinkan ekspor pada lapangan usaha/sektor tersebut (sektor basis/potensial)

LQ < 1 artinya peranan lapangan usaha/sektor tersebut lebih kecil di daerah dari pada nasional, yang mengindikasikan perlunya dilakukan impor pada lapangan

usaha/sektor tersebut karena belum mampu memenuhi kebutuhan daerah tersebut (sektor non basis)

LQ = 1 artinya peranan lapangan usaha/sektor tersebut di daerah sama dengan nasional

Berikut disajikan hasil perhitungan Metode Location Quotient untuk mengetahui sektor-sektor unggulan di Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 pada tabel berikut :

Tabel 2.293
Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kota Sawahlunto 2020-2024

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					LQ	KATEGORI
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,35	0,37	0,38	0,38	0,38	0,37	Non Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	1,62	1,32	1,26	1,20	1,08	**1,30**	Basis/Potensial
3	Industri Pengolahan	1,18	1,19	1,20	1,22	1,24	**1,21**	Basis/Potensial
4	Pengadaan Listrik dan Gas	20,64	20,16	20,00	19,99	20,01	**20,16**	Basis/Potensial
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,72	3,78	3,62	3,66	3,62	**3,68**	Basis/Potensial
6	Konstruksi	1,15	1,13	1,14	1,14	1,13	**1,14**	Basis/Potensial
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,97	0,98	0,98	0,98	0,99	0,98	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,91	0,84	0,82	0,82	0,83	0,84	Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,85	1,76	1,70	1,68	1,70	**1,74**	Basis/Potensial
10	Informasi dan Komunikasi	1,05	1,17	1,16	1,16	1,16	**1,14**	Basis/Potensial
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,08	1,12	1,13	1,15	1,13	**1,12**	Basis/Potensial
12	Real Estat	0,84	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	0,30	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,03	2,08	2,11	2,10	2,04	**2,07**	Basis/Potensial
15	Jasa Pendidikan	0,68	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	Non Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,70	0,77	0,77	0,77	0,77	0,75	Non Basis
17	Jasa Lainnya	2,88	2,66	2,61	2,60	2,65	**2,68**	Basis/Potensial

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient, di Kota Sawahlunto terdapat sepuluh (10) Lapangan Usaha yang Potensial/Basis selama lima tahun terakhir (tahun 2020-2024), yakni :

1. Pertambangan dan Penggalian;
2. Industri Pengolahan;
3. Pengadaan Listrik dan Gas;
4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
5. Konstruksi;
6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
7. Informasi dan Komunikasi;
8. Jasa Keuangan dan Asuransi;
9. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
10. Jasa Lainnya.

C. Metode Tipologi Klassen

Metode Tipologi Klassen merupakan salah satu instrument analisa ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi lapangan usaha yang ada di Kota Sawahlunto.

Metode ini akan menghasilkan empat klasifikasi lapangan usaha dengan karakteristik yang berbeda (Sjafrizal, 2008), yaitu :

1. Lapangan usaha maju dan tumbuh pesat (warna biru)
   Lapangan usaha dengan kondisi (**Ski ≥ Sk, Si ≥ S)**
2. Lapangan usaha maju tapi tertekan (coklat)
   Lapangan usaha dengan kondisi (**Ski ≥ Sk, Si < S)**
3. Lapangan usaha potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (hijau)
   Lapangan usaha dengan kondisi (**Ski < Sk, Si ≥ S)**
4. Lapangan usaha relatif tertinggal (kuning)
   Lapangan usaha dengan kondisi (**Ski < Sk, Si < S)**

Tabel di bawah ini memperlihatkan hasil perhitungan *Metode Tipologi Klassen* lapangan usaha yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 :

Tabel 2.294
Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN		KONTRIBUSI		KATEGORI
		S	Si	Sk	Ski	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,03	0,04	0,22	0,08	potensial
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	-0,08	0,04	0,05	maju tapi tertekan
3	Industri Pengolahan	0,03	0,03	0,09	0,11	maju dan tumbuh pesat
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,02	0,00	0,02	maju tapi tertekan
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,03	0,00	0,00	maju tapi tertekan
6	Konstruksi	0,04	0,03	0,09	0,11	maju tapi tertekan
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,05	0,05	0,17	0,16	potensial
8	Transportasi dan Pergudangan	0,05	0,02	0,10	0,09	relatif tertinggal
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,06	0,01	0,02	maju tapi tertekan
10	Informasi dan Komunikasi	0,07	0,08	0,09	0,10	maju dan tumbuh pesat
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05	0,06	0,03	0,03	maju dan tumbuh pesat
12	Real Estat	0,05	0,06	0,02	0,02	maju dan tumbuh pesat
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,04	0,00	0,00	maju tapi tertekan
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,03	0,03	0,06	0,11	maju dan tumbuh pesat
15	Jasa Pendidikan	0,03	0,05	0,04	0,03	potensial
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,06	0,08	0,02	0,01	potensial
17	Jasa Lainnya	0,09	0,06	0,02	0,05	maju tapi tertekan

Berdasarkan hasil Analisis Tipologi Klassen, di Kota Sawahlunto tahun 2020-2024, terdapat sembilan (9) lapangan usaha maju dan tumbuh pesat, yakni :

1. Industri Pengolahan;
2. Informasi dan Komunikasi;
3. Jasa Keuangan dan Asuransi;
4. Real Estat;
5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Dalam upaya untuk melihat lapangan usaha mana yang unggul secara ekonomi di Kota Sawahlunto, dilakukan perbandingan hasil analisis ketiga metode dimaksud sebagai berikut.

Tabel 2.295
Perbandingan Hasil Analisis Shift Share, LQ dan Tipologi Klassen
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

NO	LAPANGAN USAHA	KATEGORI		
		Shift Share (PSij)	LQ	Klassen
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Basis/Potensial	Non Basis	potensial/ masih dapat berkembang dengan pesat
2	Pertambangan dan Penggalian	Non Basis	Basis/Potensial	maju tapi tertekan
3	Industri Pengolahan	Basis/Potensial	Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Non Basis	Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Non Basis	Basis/Potensial	maju tapi tertekan
6	Konstruksi	Non Basis	Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Non Basis	Non Basis	maju tapi tertekan
8	Transportasi dan Pergudangan	Non Basis	Non Basis	potensial/ masih dapat berkembang dengan pesat

NO	LAPANGAN USAHA	KATEGORI		
		Shift Share (PSij)	LQ	Klassen
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Non Basis	Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
10	Informasi dan Komunikasi	Basis/Potensial	Basis/Potensial	maju tapi tertekan
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Basis/Potensial	Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
12	Real Estat	Basis/Potensial	Non Basis	maju dan tumbuh pesat
13	Jasa Perusahaan	Non Basis	Non Basis	maju dan tumbuh pesat
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	Non Basis	Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
15	Jasa Pendidikan	Basis/Potensial	Non Basis	potensial/masih dapat berkembang dengan pesat
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Basis/Potensial	Non Basis	relatif tertinggal
17	Jasa Lainnya	Non Basis	Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat

Pada tabel di atas terlihat perbandingan hasil analisis ketiga metode (Shift Share, Location Quotient dan Tipologi Klassen) yang digunakan untuk melihat sektor unggulan yang ada di Kota Sawahlunto, terdapat dua (2) Lapangan Usaha Unggulan yang beririsan/bersesuaian dengan ketiga metode tersebut, yakni :

1. Industri Pengolahan
2. Jasa Keuangan dan Asuransi.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi topografi dan terjadinya pergerakan tanah dibeberapa daerah di Kota Sawahlunto sangat mempengaruhi kondisi fasilitas wilayah dan infrastruktur yang telah terbangun di Kota Sawahlunto. Hal tersebut membutuhkan penanganan dengan perlakuan khusus terhadap infrasturktur yang dibangun agar dapat bertahan lebih lama. Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi fasilitas wilayah/infrastruktur tersebut, yaitu : rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

1. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan

Nilai rasio panjang jalan terhadap kendaraan bermotor menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (kilometer). Nilai ini berarti 1 kilometer jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Untuk Panjang jalan, dihitung baik itu jalan kota, jalan provinsi maupun jalan nasional. Sementara untuk jumlah kendaraan, mengacu pada data jumlah kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Indikator ini untuk melihat kelayakan jalan di Kota Sawahlunto dalam menampung jumlah kendaraan di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.296
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

NO	JENIS DATA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Panjang Jalan Kota	Km	454,87	454,87	454,87	454,87	441,42
2	Jumlah Panjang Jalan Provinsi	Km	30,65	43,20	43,20	43,20	43,20
3	Jumlah Panjang Jalan Negara	Km	11,35	12,37	12,37	12,37	12,37
4	Jumlah panjang jalan total	Km	496,87	510,44	510,44	510,44	496,99
5	Jumlah Kendaraan	unit	20.389	21.567	22.155	22.155	22.112
6	**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**		**0.024**	**0.023**	**0,023**	**0,023**	**0,022**

Sumber Data: Pengolahan Pata Dinas PUPR Dan Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dilihat dari tabel di atas rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 memiliki penurunan setiap tahunnya. Dalam artian terjadinya peningkatan kepadatan jalan atas jumlah kendaraan yang ada. Pada

setiap tahunnya terjadinya peningkatan jumlah kendaraan dengan panjang jalan yang masih sama dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel Kota Sawahlunto mempunyai panjang jalan total sepanjang 496,99 kilometer. Jalan di Kota Sawahlunto masih memenuhi untuk menampung jumlah kendaraan dan tidak terjadi kemacetan di Kota Sawahlunto.

2. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang (penumpang) atau barang yang terangkut angkutan umum (angkutan umum, bus, kereta api) adalah banyaknya orang yang menggunakan angkutan umum. Semakin banyak jumlah orang terangkut angkutan umum, semakin tinggi penggunaan angkutan umum, semakin sedikit kendaraan yang berada di jalan (penggunaan kendaraan pribadi berkurang), kemacetan dapat berkurang

Berikut perkembangan jumlah arus penumpang angkutan umum selama lima tahun terakhir di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.297
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	25.200	28.350	23.385	55.006	60.122

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2024 sudah mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan 2021. Hal ini dikarenakan masa pemulihan pasca Covid masyarakat sudah beraktivitas seperti biasanya. Tidak ada pembatasan arus penumpang dan mobilitas keluar masuk Kota Sawahlunto.

3. Ketaatan terhadap RTRW

Dalam hal pemanfaatan ruang, berdasarkan indikator pemanfaatan ruang yang tertib berdasarkan dokumen perencanaan tata ruang yang telah tersedia berupa Peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032. Rasio realisasi rencana tata ruang wilayah dibandingkan dengan rencana peruntukan rencana tata ruang wilayah dari tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena mulai adanya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi penataan ruang dan meningkatnya pengawasan peruntukan lahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel.

Peningkatan kebutuhan ruang semakin bertambah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk dan aktivitas penduduk, sementara itu keberadaan lahan di Kota Sawahlunto tetap dan terbatas. Akibatnya terdapat konflik kepentingan lahan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan ruang penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan pada ruang yang tetap dan terbatas agar dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang ada secara serasi antara untuk kepentingan kawasan lindung dan kawasan budidaya serta efisiensi dalam alokasi investasi.

Disamping itu, penataan ruang merupakan isu strategis dalam pembangunan wilayah dikarenakan semua kegiatan pembangunan khususnya yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang dan menjadi salah satu jawaban dari persoalan wilayah kota yang semakin kompleks baik ekonomi maupun lingkungan. Melalui penataan ruang pembangunan di daerah diharapkan dapat diselenggarakan secara terpadu baik lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas pemangku kepentingan agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penataan ruang ini merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Urusan penataan ruang daerah menjadi salah satu urusan wajib dan penting dilakukan Pemerintah daerah untuk menata ruang-ruang yang ada secara cerdas dan peduli terhadap penataan ruang. Adapun persentase ketaatan ruang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.298
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kota Sawahlunto
Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi RTRW	17	17	17	17	17
2	Rencana Peruntukan RTRW	20	20	20	20	20
3	Persentase	85	85	85	85	85

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2024

Berdasarkan RTRW Kota Sawahlunto 2012 sampai dengan 2032 untuk tahun 2020 sampai dengan 2024 terdapat 20 komponen rencana pola ruang dan rencana struktur ruang. Untuk realisasi hingga tahun 2022 baru 17 dokumen rencana yang terealisasi sehingga baru 85 persen dari rencana pada tahap I RTRW.

Dokumen RTRW Kota Sawahlunto 2012 - 2032 dalam proses revisi dan dilegalkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Perubahan kebijakan dan perubahan isu akan menjadi dasar dalam revisi RTRW Kota Sawahlunto, sehingga menyebabkan persentase ketaatan terhadap RTRW sampai tahun 2024 tidak mengalami perubahan.

Berikut data persentase realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang Kota Sawahlunto :

Tabel 2.299
Realisasi Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	87,50	84,15	84,15	84,15	84,15

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Berdasarkan tabel diatas realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang Kota Sawahlunto dari tahun 2021 sampai dengan 2024 capaian realisasi Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, hal ini disebabkan masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengendalian dan pemanfaatan ruang dan belum adanya sistem informasi tata ruang secara digital serta masih kurangnya pengawasan terhadap pengendalian dan pemanfaatan ruang.

4. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif di Kota Sawahlunto tahun 2024 seluas 10.165 hektar. Dari tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5.242,9 hektar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kemauan dan keseriusan dari masyarakat untuk mengolah lahan serta dukungan yang cukup baik dari Pemerintah.

5. Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri di kota Sawahlunto sejak tahun 2020 tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2024, seperti tabel berikut :

Tabel 2.300
Luas Wilayah Industri Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Wilayah Industri (ha)	39.84	39.84	39.84	39.84	39.84

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2024

6. Luas Wilayah Kebanjiran

Topografi wilayah kota yang ada dengan tingkat kemiringan rata-rata diatas 15 persen, tidak memungkinkan terjadi kebanjiran di suatu kawasan karena kecepatan aliran air sangat tinggi sampai ke muara. Hanya saja terdapat beberapa kawasan yang tergenang disebabkan luapan sungai yang ada disekitar kawasan antara lain seperti sepanjang aliran sungai Batang Lasi di Silungkang Duo dan Silungkang Tigo, sepanjang aliran batang Malakutan kenagarian

Kolok, sepanjang aliran batang Ombilin di TaLawi Hilir dan Sijantang, dengan tinggi genangan antara 0,10 sampai dengan 050 meter yang berlangsung selama 1 sampai dengan 3 jam.

7. Luas Wilayah Kekeringan

Wilayah kekeringan umumnya terdapat di daerah perbukitan Kecamatan Silungkang (Silungkang Oso), Kecamatan Barangin (Talago Gunung) serta di daerah yang tidak memiliki sumber air permukaan di Kecamatan Talawi seperti di Bukit Gadang, Batu Tanjung, Tumpuk Tangah, Datar Mansiang dan Kumbayau.

8. Luas Wilayah Perkotaan

Walaupun disebut sebuah “Kota”, Wilayah Kota Sawahlunto secara administrasi terdiri dari 4 wilayah kecamatan, 27 desa dan 10 Kelurahan, dengan luas 231,94Km². Dalam mengkategorikan wilayah perkotaan, yang dijadikan acuan perhitungan luas wilayah perkotaan adalah luas wilayah kelurahan.

Tabel 2.301
Luas Wilayah Kota Sawahlunto

No	Kecamatan /Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	**Kecamatan Barangin**	
03	Kel. Saringan	0,81
04	Kel. Lubang Panjang	1,00
05	Kel. Durian I	1,17
06	Kel. Durian II	1,25
2	**Kecamatan Lembah Segar**	
06	Kel. Pasar	0,50
07	Kel. Kubang Sirakuk Utara	0,28
08	Kel. Kubang Sirakuk Selatan	0,27
09	Kel. Aur Mulyo	0,20
10	Kel. Tanah Lapang	0,16
11	Kel. Air Dingin	0,14
Jumlah		**5,78**

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2024

9. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Indikator yang digunakan untuk persentase rumah tangga yang menggunakan listrik adalah jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikali seratus persen. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pemakaian listrik setiap tahunnya seperti tabel berikut :

Tabel 2.302
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	14.257	14.314	14.371	14.630	14.847
2	Jumlah Rumah yang menggunakan listrik (RT)	13.058	13.471	13.848	14.144	14.396
3	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik (%)	91,59	94,11	96,36	96,68	96,96

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata untuk semua jenis pelanggan listrik mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang dikarenakan kebutuhan dasar akan pemenuhan daya listrik. Jika dilihat dari pelanggan rumah tangga, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. namun belum 100%, masih ada ±3,5% masyarakat sawahlunto yang belum terlayani dan menikmati energi listrik yang ada, dan ini harusnya menjadi perhatian pemerintah Kota Sawahlunto bagaimana agar semua masyarakat Kota Sawahlunto dapat terlayani dan menikmati energi listrik yang ada.

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

Fokus iklim investasi adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendorong investasi masuk dan menyerap tenaga kerja. Iklim investasi yang baik dapat meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Iklim investasi dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain stabilitas politik dan sosial, kondisi infrastuktur, sektor pembiayaan, pasar tenaga kerja, regulasi, perpajakan, birokrasi, korupsi, konsistensi dan kepastian hukum.

1. Lama Proses Perizinan

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Selain prosedur perizinan yang mudah, ketersediaan informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada sudah dipermudah dengan adanya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah.

Proses pelayanan perizinan dan non perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker). Penerbitan dokumen izin dan non izin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Investasi yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan. Kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan suatu wilayah/daerah sangat

menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi. Lamanya proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan berdasarkan Perwako Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

Berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perwako Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto terdapat 138 jenis perizinan dan non perizinan. Dan berdasarkan Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017 dan Perpres RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik maka Pemerintah Kota Sawahlunto melalui DPMPTSPNaker telah membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP), yang pada saat ini sudah aktif/sudah beroperasi, sudah selesai penandatanganan naskah kerjasama atau MoU dengan beberapa lembaga terkait perizinan dan non perizinan (Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Organisasi Perangkat Daerah, Swasta, dan Lembaga sebanyak 25 gerai) dan sudah diresmikan oleh Menteri PANRB pada tanggal 26 September 2022. Yang mana MPP ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi, efektif dan efisien (pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal di DPMPTSNaker juga telah dilaksanakan beberapa inovasi antara lain :

- PPTK (Pelayanan Perizinan dengan Tanda Tangan Elektronik) yaitu penyelenggaraan pelayanan penerbitan izin melalui aplikasi SiCANTIK CLOUD dan menggunakan fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE) dilakukan secara online, darimana saja dan kapan saja, cukup melalui aplikasi ini;
- Super Online (Surat Pengantar Online) yaitu pengiriman data/dokumen perizinan ke OPD Teknis secara online sehingga diharapkan petugas teknis dapat melakukan respon yang cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi teknis yang diminta;
- SIMas Publish (Sistem Informasi Pelayanan Publik Sawahlunto) yaitu media informasi pelayanan publik teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan sebagai media informasi pelayanan kepada publik, menampung dan mengolah pengaduan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik dengan mengusung prinsip mudah, terpadu dan tuntas dalam menyalurkan aspirasi dan aduan masyarakat, yang dapat diakses secara online;
- SIAP BOS (Sistem Antrian Pelayanan Publik Berbasis Online) yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebagai media dalam memanagement antrian pelayanan kepada publik yang berbasis online atau web;
- Mas Lapor (Media Sosial untuk Layanan Perizinan Online) yaitu penggunaan Smartphone berbasis android untuk memberikan layanan informasi yang efektif dan efisien/menghubungkan layanan informasi perizinan, layanan pengaduan dan potensi kepesertaan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan melalui WhatsApp;
- LARIS (Layanan Perizinan dengan SMS) yaitu dengan sistem SMS gateway yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan sicantik cloud, dimana front office dan back office mendapat notifikasi sms ketika ada perizinan yang harus diproses;
- Usus Buntu (Urus Izin Susah, Kami Bantu) yaitu dengan layanan OSS Mandiri, masyarakat yang mengurus izin berusaha melalui aplikasi OSS akan diarahkan langsung tentang bagaimana mengoperasikan Aplikasi OSS untuk mendapatkan perizinan berusaha sehingga masyarakat mendapat kemudahan dalam mengurus perizinan secara terintegrasi yang berbasis online;
- KIPER (Klinik Perizinan) yaitu merupakan program pelayanan konsultasi dan bimbingan pelayanan untuk seluruh jenis perizinan yang ada pada DPMPTSPNaker. KIPER ini juga diperuntukkan bagi para investor yang membutuhkan segala macam perizinan untuk dapat memulai usaha ataupun mengoperasikan usahanya agar proses perizinan dapat menjadi lebih cepat, hemat biaya dan tidak melanggar aturan;
- LIPAN (Layanan Informasi PPAT dan Notaris) yaitu membantu memberikan informasi praktis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan service Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- JEBOL GILA (Jemput Bola Tagih Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yaitu pelayanan publik kepada perusahaan yang wajib melaporkan laporan kegiatan penanaman modal melalui metode pendekatan persuasif kepada perusahaan untuk memudahkan pelaku

usaha/perusahaan dalam melaporkan LKPM nya dengan pendampingan langsung oleh petugas dari DPMPTSPNaker.

Realisasi pelayanan perizinan dan non perizinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.303
Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan		Jumlah Total
		Jumlah Perizinan	Jumlah Non Perizinan	
1	2020	272	680	952
2	2021	411	428	839
3	2022	411	456	867
4	2023	2.571	339	2.910
5	2024	2.485	406	2.891

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas selama 5 tahun terakhir terlihat bahwa jumlah izin dan non izin yang diterbitkan berfluktuatif setiap tahunnya. Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan tahun 2020 adalah 952, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 839, sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 867, tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 2.910, dan tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 2.891. Kenaikan realisasi perizinan dan non perizinan dua tahun terakhir disebabkan oleh kemudahan pengurusan perizinan melalui Sistem Online Single Submission (OSS), yang mana berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 KBLI yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Kenaikan perizinan ini juga disebabkan oleh telah beroperasinya Mal Pelayanan Publik (MPP) mulai dari bulan Maret tahun 2022. Yang mana di MPP ini terdapat 134 jenis layanan yang terintegrasi pada satu tempat dan terdapat 25 gerai yang sudah bergabung dan menandatangani PKS.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan serta ketenagakerjaan yang dilaksanakan dapat secara maksimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut disajikan jumlah SDM dalam pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.304
Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	OPD	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dinas PMPTSPNaker	9 orang	10 orang	10 orang	10 orang	11 Orang
2	Dinas Teknis	43 orang	43 orang	41 orang	41 orang	43 Orang
	Jumlah	**52 orang**	**53 orang**	**51 orang**	**51 orang**	**54 Orang**

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SDM yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Sawahlunto sebagian besar adalah pegawai yang berada diluar DPMPTSPNaker, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung kepada Dinas Teknis.

2. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.305
Target dan Realisasi PDRD Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
I	**Pajak Daerah**	**5.666.500.000**	**5.602.920.091.75**	**6.134.000.000**	**5.993.540.247**	**7.303.500.000**	**7.434.834.333,40**	**7.909.000.000**	**8.149.995.371**	**9.088.000.000**	**9.115.911.011**
1	Pajak Hotel	22.500.000	47.335.931	148.000.000	168.914.129	170.000.000	266.384.955,80	300.000.000	224.164.516	300.000.000	233.927.929
2	Pajak Restoran	399.700.000	477.464.758.75	704.500.000	617.303.460	837.000.000	993.108.403,60	922.000.000	899.703.543	972.000.000	1.115.773.975
3	Pajak Hiburan	5.300.000	1.650.000	107.000.000	-	156.000.000	61.170.000	133.500.000	66.241.500	81.500.000	17.842.000
4	Pajak Reklame	38.000.000	48.692.318	39.500.000	42.613.818	39.500.000	45.912.393	45.000.000	51.533.668	45.000.000	48.055.093
5	Pajak Penerangan Jalan	3.500.000.000	3.344.827.881	3.300.000.000	3.434.721.546	3.700.000.000	3.735.969.454	4.057.000.000	4.163.723.869	5.398.000.000	5.181.702.050
6	Pajak Parkir	-	-	-	-	1.000.000	511.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.680.000
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000	769.600	23.000.000	10.651.360	100.000.000	74.030.951	100.000.000	46.408.921	90.000.000	236.735.494
8	PBB-P2	1.100.000.000	963.603.643	1.112.000.000	1.057.891.430	1.500.000.000	1.661.104.059	1.600.000.000	1.668.008.854	1.600.000.000	1.635.284.760
9	BPHTB	600.000.000	718.575.960	700.000.000	661.444.504	800.000.000	596.643.117	750.000.000	1.029.210.500	600.000.000	644.909.710
II	**Retribusi Daerah**	**3.108.095.850**	**2.787.376.593**	**3.108.095.850**	**2.724.639.922**	**4.649.762.464**	**3.550.241.052**	**4.133.470.000**	**2.691.622.325**	**35.364.100.262**	**35.499.893.370**
A.	**Retribusi Jasa Umum**										
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	582.406.850	483.055.400	582.406.850	293.176.700	352.072.464	362.942.700	0	0	32.581.923.762	33.164.514.897
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	92.000.000	114.030.000	92.000.000	132.276.000	138.500.000	124.303.000	138.500.000	112.105.500	139.024.000	141.875.000
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	78.200.000	78.200.000	78.200.000	169.400.000	181.200.000	176.200.000	133.100.000	133.200.000	144.210.000	144.210.000
4	Retribusi Pelayanan Pasar	419.034.000	428.224.000	419.034.000	363.876.000	589.840.000	537.933.500	564.840.000	343.024.000	538.760.000	297.141.000
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	32.000.000	33.630.580	32.000.000	1.035.000	150.000.000	52.522.500	100.000.000	84.340.000	0	0
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	28.700.000	29.900.000	28.700.000	30.100.000	48.200.000	42.400.000	48.200.000	35.100.000	48.200.000	38.450.000
B	**Retribusi Jasa Usaha**										
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.039.855.000	966.718.013	1.039.855.000	1.173.842.422	1.304.950.000	1.322.331.070	1.120.500.000	1.141.724.017	932.827.500	907.539.367
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	13.200.000	-	13.200.000	1.800.000	23.000.000	3.600.000	23.000.000	7.750.000	7.000.000	8.000.000
3	Retribusi Termpat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	-	-	-	-	-	-	100.000.000	37.150.000	100.000.000	42.700.000
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	53.500.000	60.745.000	53.500.000	57.182.500	65.000.000	55.862.000	58.655.000	53.600.000	56.640.000	62.170.000
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	698.800.000	516.801.000	698.800.000	436.595.000	1.746.600.000	847.974.000	1.766.875.000	726.647.000	775.515.000	661.939.000
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**										
1	Retribusi IMB	70.000.000	75.992.600	70.000.000	65.196.300	-	-	-	-	-	-
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung					50.000.000	24.172.282	79.800.000	16.981.808	40.000.000	31.354.106
3	Retribusi Izin Trayek	400.000	80.000	400.000	160.000	400.000	-	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	**8.774.595.850**	**8.390.296.684.75**	**9.242.095.850**	**8.718.180.169**	**11.953.262.464**	**10.985.075.385,40**	**12.042.470.000**	**10.841.617.696**	**44.452.100.262**	**44.615.804.381**

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2024

Mulai tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Pajak dan Retribusi yang dipungut oleh Kabupatan/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.306
Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 s.d 2024

No	Uraian	Realisasi	
		2023	2024
I	**Pajak Daerah**		
1	PBB-P2	1.668.008.854	1.635.284.760
2	BPHTB	1.029.210.500	644.909.710
3	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.354.833.428	6.550.925.954
4	Pajak Reklame	51.533.668	48.055.093
5	PAT		
6	Pajak MBLB	46.408.921	236.735.494
7	Pajak Sarang Burung Walet	-	-
8	Opsen PKB	-	-
9	Opsen BBNKB	-	-
II	**Retribusi Daerah**		
1	**Retribusi Jasa Umum**		
a.	Pelayanan Kesehatan	0	33.164.514.897
b.	Pelayanan Kebersihan	112.105.500	141.875.000
c.	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	133.200.000	144.210.000
d.	Pelayanan Pasar	343.024.000	297.141.000
e.	Pengendalian Lalu Lintas	84.340.000	
2	**Retribusi Jasa Uasaha**		
a.	Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya	-	-
b.	Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan	-	-
c.	Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan	7.750.000	8.000.000
d.	Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila	37.150.000	42.700.000
e.	Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak	53.600.000	62.170.000
f.	Pelayanan jasa kepelabuhanan		
g.	Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga	726.647.000	661.939.000
h.	Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air	-	-
i.	Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah	-	-
j.	Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.141.724.017	907.539.367
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**		
a.	Persetujuan bangunan gedung	16.981.808	31.354.106
b.	Penggunaan tenaga kerja asing	-	-
c.	Pengelolaan pertambangan rakyat	-	-

Sumber Data : Undang-Undang No. 1 Tahun 2022
BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2024

Berdasarkan tabel target dan realisasi PDRD diatas dapat dilihat bahwa target dan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir berfluktuatif. Target dan realisasi Pajak Daerah dari tahun 2020-2024 selalu menunjukkan tren positif, yaitu meningkat dengan target dari Rp. 5.666.500.000 pada tahun 2020 menjadi Rp. 9.088.000.000 pada tahun 2024 dengan realisasi Rp. 5.602.920.091.75 pada tahun 2020 naik menjadi Rp. 9.115.911.011 pada tahun 2024. Pajak daerah yang menjadi kontributor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto yang terbesar adalah Pajak Penerangan Jalan, disusul oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan Pajak Restoran. Sedangkan pajak daerah yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD Kota Sawahlunto adalah pajak parkir, bahkan pada tahun 2019-2021 pajak parkir tidak ada memberikan kontribusi sama sekali alias nihil. Pajak parkir ini mulai tahun 2019 tidak lagi dikelola oleh Wahana Wisata Sawahlunto (WWS) tapi dikelola oleh Pemda/diselenggarakan oleh pemerintah daerah sehingga tidak termasuk objek pajak.

Target dan realisasi Retribusi Daerah dari tahun 2020-2024 menunjukkan tren positif, yaitu meningkat dengan target dari Rp. 3.108.095.850 pada tahun 2020 menjadi Rp. 35.364.100.262 pada tahun 2024 dengan realisasi Rp. 2.787.376.593 pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 35.499.893.370 pada tahun 2024. Pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Daerah dari tahun 2020-2024 berfluktuatif. Retribusi yang memberikan kontribusi paling besar untuk PAD Kota Sawahlunto adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, sedangkan retribusi yang memberikan kontribusi paling rendah adalah retribusi tempat

khusus parkir, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, bahkan pada tahun 2024 retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak ada memberikan kontribusi sama sekali.

Belum tercapainya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari yang ditargetkan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak/masyarakat dalam membayar kewajibannya, kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, dan belum optimalnya pelayanan-pelayanan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

3. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *goodwill* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam Perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan. Berikut ini disajikan jumlah perda yang mendukung iklim usaha di Kota Sawahlunto yang ditetapkan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.307
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Sawahlunto yang Ditetapkan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perda terkait Perizinan	Buah	0	0	0	0	0
2	Perda terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa	Buah	0	0	0	0	0
3	Perda terkait Ketenagakerjaan	Buah	0	0	0	0	0

Sumber Data : Bagian Hukum Setdako Sawahlunto Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah perda yang mendukung iklim usaha yang ditetapkan dari tahun 2020-2024 tidak ada alias nihil. Peraturan Daerah ini diperlukan untuk mendukung iklim usaha di Kota Sawahlunto. Dengan adanya perda maka dapat meningkatkan usaha di Kota Sawahlunto yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memajukan iklim investasi, Pemda dan masyarakat harus berkomitmen, dengan memberikan rasa aman bagi investor, kemudahan dalam mengurus administrasi perizinan, serta daya dukung anggaran pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi mutakhir. Majunya iklim investasi akan berdampak positif terhadap kemajuan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila hal ini bisa terlaksana dengan baik maka iklim investasi akan terus berkembang dan angka pengangguran akan berkurang, karena terbukanya lapangan kerja baru.

Pemerintah Kota Sawahlunto diharapkan terus memberikan pelayanan terbaik, serta masyarakat terus menjaga keamanan yang kondusif demi mendukung perkembangan iklim investasi demi kemajuan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu berupaya mengevaluasi seluruh bidang pembangunan di Kota Sawahlunto yang dapat dijadikan peluang bagi investor untuk berinvestasi di Kota Sawahlunto. Sehingga, dapat diketahui bidang mana yang memerlukan investasi yang lebih baik di Kota Sawahlunto.

4. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) merupakan informasi penting yang meliputi data di desa dan kelurahan seperti kependudukan dan beberapa peranan keberadaan suatu sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Hal ini juga berkaitan untuk meningkatkan sumberdaya yang ada di lingkup pemerintahan desa sehingga menjadi motivasi bagi kelanjutan investasi desa serta pengembangan sumber daya alam yang ada dan ditingkatkan lebih maksimal untuk tercapainya pembangunan yang berkesinambungan dengan didukung oleh semua pihak.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, disebutkan susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangannya. maka klasifikasi desa di Indonesia dapat dibagi dalam 3 jenis desa, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan yang tertinggi adalah desa swasembada. Desa Swasembada adalah desa yang lebih maju dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal tersebut selaras dengan prinsip resolusi desa yakni adil dan merata, efektif , efisien,

akuntabel dan mandiri. Untuk Kota Sawahlunto, status desa berdasar inputan aplikasi Profil Desa/Kelurahan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.308
Status Desa Berdasar Profil Desa Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Status Desa	2020		2021		2022		2023		2024	
		Jumlah (desa)	%	Jumlah (desa)	%	Jumlah (desa)	%	Jumlah (desa)	%	Jumlah (desa)	%
1	Swasembada	5	18,52	8	21,62	6	16,22	4	14.81	5	18.51
2	Swakarya	21	77,78	9	51,35	17	45,94	17	62.96	19	70.37
3	Swadaya	1	3,70	10	27,82	4	14,81	6	22.22	3	11.11

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2024

Kemajuan suatu desa mempengaruhi iklim berinvestasi. Makin maju sebuah desa, maka akan makin menarik investasi untuk dapat berkembang diwilayahnya. Klasifikasi desa yang diharapkan untuk dapat menunjang iklim berinvestasi adalah dengan kategori Swasembada. Dimana pada kondisi ini daya dukung masyarakat/Sumber Daya Manusia, potensi Sumber Daya Alam, kelembagaan, prasarana dan sarana memberikan efek positif bagi pengembangan investasi di wilayahnya.

Pengukuran indeks profil desa dilakukan dengan cara menginput data-data yang dibutuhkan seperti pengukuran ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, keamanan dan ketertiban, politik serta peran serta masyarakat dalam pembangunan. Terdapat lima desa yang meraih kategori swasembada pada tahun 2024 yaitu desa Pasa Kubang, Kubang Tangah, Balai Batu Sandaran, Talago Gunung, dan Rantih. Untuk tiga desa yang masih memperoleh status swadaya yaitu desa Sijantang Koto, Lunto Barat dan Taratak Bancah dikarenakan ketiga desa tersebut memang sama sekali belum menginput data-data pada sistem Prodeskel yang ditutup per 31 Desember 2024. Keterlambatan dalam menginventarisir dan menginput data serta kendala beberapa daerah yang masih sulit dalam mengakses internet menjadi penyebab utama dalam hal ini.

Masih banyak desa yang belum konsisten terhadap data dan masih terdapat desa yang kesulitan dalam mengakses internet menyebabkan kurang maksimalnya poin yang diperoleh dalam pengukuran pada sistem Prodeskel sehingga menyebabkan belum maksimalnya point yang berdampak pada status desa yang diperoleh oleh beberapa desa.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu aset yang penting dalam pembangunan daerah. Berikut analisis kinerja atau sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio lulusan S1/S2/S3 dan rasio ketergantungan.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Dengan manusia dan generasi yang berkualitas maka pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam menciptakan manusia dan generasi yang berkualitas, dilakukan melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang tinggi dan berkualitas, maka akan tercipta generasi yang kuat, tangguh, dan berkualitas. Data rasio lulusan S1/S2/S3 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.309
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lulusan S1	4.358	4.692	4.873	5.071	5.319
2	Jumlah lulusan S2	270	289	315	331	355
3	Jumlah lulusan S3	2	3	3	5	6
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	4.630	4.984	5.191	5.407	5.680
5	Jumlah penduduk Angkatan Kerja	22.010	22.331	23.249	23.723	23.858
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	21.03	22.31	22.32	22.79	23.80

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024, Data diolah

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan merupakan indikator demografi yang memberikan wawasan tentang jumlah orang yang berada pada usia tidak bekerja, dibandingkan dengan jumlah orang yang berada pada usia kerja. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar beban yang

harus ditanggung penduduk produktif . Semakin kecil rasio ketergantungan, semakin kecil beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif.

Tabel 2.310
Rasio Ketergantungan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	16.434	16.325	16.262	16.710	16.840
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	4.542	4.770	5.020	5.140	5.410
3	Jumlah penduduk usia non produktif (1) & (2)	20.976	21.095	21.282	21.850	22.250
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	44.162	44.592	45.131	45.920	46.470
5	Rasio ketergantungan (3)/(4)	47,50	47,31	47,16	47,58	47,88

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024, Data Diolah 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa angka ketergantungan Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, pada kisaran angka 47,16 hingga 47,88. Angka ketergantungan di bawah 50 berarti bahwa satu orang penduduk tidak produktif ditanggung oleh 1 - 2 orang penduduk produktif. Pada tahun 2024, angka ketergantungan Kota Sawahlunto sebesar 47,88 yang berarti tiap 100 orang penduduk yang berusia produktif (15-64) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang penduduk non produktif.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2025

2.2.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2025. Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, berikut disajikan capaian kinerja program, dan kegiatan tahun 2025 :

Tabel 2.311
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2025
Kota Sawahlunto

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**DINAS PENDIDIKAN**					119.458.602.708		117.095.218.139		84.673.769.254		22.822.251.126		26,95		139.917.469.265		117,13	DINAS PENDIDIKAN	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				119.458.602.708		117.095.218.139		84.673.769.254		22.822.251.126		26,95		139.917.469.265		117,13	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				119.458.602.708		117.095.218.139		84.673.769.254		22.822.251.126		26,95		139.917.469.265		117,13	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Pendidikan)	%	100	98.984.725.559	100	94.812.050.636	100	78.977.058.450	25	22.435.754.725	25	28,41	125	117.247.805.361	125	118,45	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	persen	100	19.024.000	100	15.678.639	100	40.000.000	25	5.197.500	25	12,99	125	20.876.139	125	109,74	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	93.973.030.573	100	89.949.849.004	100	72.680.308.904	25	21.454.503.354	25	29,52	125	111.404.352.358	125	118,55	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	104.608.000	100	80.774.200	100	265.000.000	0	0	0	0	100	80.774.200	100	77,22	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	743.052.858	100	677.548.869	100	868.899.750	9	104.613.301	9	12,04	109	782.162.170	109	105,26	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	0	100	0	100	100.000.000	0	0	0	0	100	0	100	nan	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	3.945.612.128	100	3.911.464.649	100	4.745.624.796	12	849.778.070	12	17,91	112	4.761.242.719	112	120,67	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	persen	100	199.398.000	100	176.735.275	100	277.225.000	44	21.662.500	44	7,81	144	198.397.775	144	99,5	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	%	90.1	20.428.085.049	94.17	22.240.949.703	90.1	5.396.710.804	85.56	386.496.401	94,96	7,16	179.73	22.627.446.104	199,48	110,77	DINAS PENDIDIKAN	
			APK SD/MI/Paket A	%	110.25		104.71		110,25		104.71		95,19		209.42		189,95		DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMP/ MTs/ Paket B (%)	%	78.65		83.55		78.65		83.55		106,23		167.1		212,46		DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar/ Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 Juz	%	30.55		30.5		30.55		32		104,75		62.5		204,58		DINAS PENDIDIKAN	
			Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional	%	2.19		73.78		2.19		2.15		98,17		75.93		3.467,12		DINAS PENDIDIKAN	
			Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	%	2.07		87.26		2.07		2.8		135,27		90.06		4.350,72		DINAS PENDIDIKAN	
			Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional	%	1.94		64.6		1.94		2.01		103,61		66.61		3.433,51		DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Rata-rata kemampuan numerisasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	%	1.84		75.29		1.84		2.5		135,87		77.79		4.227,72		DINAS PENDIDIKAN	
			APK SMP/ MTs/ Paket B (%)	%	93.55		108.25		93.55		108.25		115,71		216.5		231,43		DINAS PENDIDIKAN	
			APM SD/MI/Paket A %	%	94.1		104.71		94.10		94.59		100,52		199.3		211,8		DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	APK SD/ MI/ Paket A (%)	%	110.25	10.284.919.000	104.71	12.489.226.658	96	1.760.327.360	104.71	115.771.800	109,07	6,58	209.42	12.604.998.458	189,95	122,56	DINAS PENDIDIKAN	
			APM SD/ MI/ Paket A (%)	%	94.1		94.28		94.1		94.59		100,52		188.87		200,71		DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar/ Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 Juz	%	30.55		30.5		30.5		32		104,92		62.5		204,58		DINAS PENDIDIKAN	
			Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	%	2.07		87.26		2.07		2.8		135,27		90.06		4.350,72		DINAS PENDIDIKAN	
			Rata-rata kemampuan numerisasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	%	1.84		75.29		1.84		2.5		135,87		77.79		4.227,72		DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	APK SMP/ MTs/ Paket B (%)	%	93.55	6.509.208.890	108.25	6.105.678.872	93.55	1.078.621.720	108.25	148.386.471	115,71	13,76	216.5	6.254.065.343	231,43	96,08	DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMP/ MTs/ Paket B (%)	%	78.65		83.55		78.65		83.55		106,23		167.1		212,46		DINAS PENDIDIKAN	
			Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional	%	2.19		73.78		2.19		2.15		98,17		75.93		3.467,12		DINAS PENDIDIKAN	
			Rata-rata kemampuan numerisasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional	%	1.94		64.6		1.94		2.01		103,61		66.61		3.433,51		DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	APK PAUD	%	90.1	3.103.800.016	94.5	3.020.731.352	90.1	2.003.151.166	10	99.594.111	11,1	4,97	104.5	3.120.325.463	115,98	100,53	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Dikelola	%	100	530.157.143	100	625.312.821	100	554.610.558	16	22.744.019	16	4,1	116	648.056.840	116	122,24	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Yang Dikembangkan	%	73	16.092.000	18.58	14.926.000	73.00	50.000.000	0	0	0	0	18.58	14.926.000	25,45	92,75	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Persentase Satuan Pendidik yang Menetapkan Kurikulum	%	73	16.092.000	18.58	14.926.000	100	50.000.000	0	0	0	0	18.58	14.926.000	25,45	92,75	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	%	100	29.700.100	100	27.291.800	100	250.000.000	0	0	0	0	100	27.291.800	100	91,89	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Rasio pendidik di Non Formal/ Kesetaraan per jumlah rombongan belajar	Rasio	0.06	29.700.100	0.05	27.291.800	1	250.000.000	0	0	0	0	0.05	27.291.800	83,33	91,89	DINAS PENDIDIKAN	
			Rasio pendidik di PAUD per jumlah rombongan belajar	Rasio	0.06		0.05		1		0		0		0.05		83,33		DINAS PENDIDIKAN	
			Rasio pendidik di SD per jumlah rombongan belajar	Rasio	0		0		2		0		0		0		nan		DINAS PENDIDIKAN	
			Rasio pendidik di SMP per jumlah rombongan belajar	Rasio	0		0		3		0		0		0		nan		DINAS PENDIDIKAN	
2	**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					**146.459.237.353**		**151.425.717.561**		**128.455.735.452**		**25.053.229.215**		**19,5**		**176.478.946.776**		**120,5**	**DINKESDAL DUK KB**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**145.219.384.385**		**151.207.838.234**		**128.132.494.439**		**24.983.119.215**		**19,5**		**176.190.957.449**		**121,33**	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**145.219.384.385**		**151.207.838.234**		**128.132.494.439**		**24.983.119.215**		**19,5**		**176.190.957.449**		**121,33**	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Kesehatan)	%	100	100.069.686.471	100	111.314.032.112	100	111.597.497.242	25	24.727.714.853	25	22,16	125	136.041.746.965	125	135,95	**DINKESDAL DUK KB**	
			Urusan Pemerintah Daerah Yang berjalan lancar dan tertib	Bulan	12		49		36		9		25		58		483,33		**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan administrasi keuangan	Dokumen	12	76.387.110.898	42	69.648.646.989	22	77.073.240.310	6	17.352.947.550	27,27	22,51	48	87.001.594.539	400	113,9	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	491.637.044	19	255.368.607	26	135.215.600	7	16.356.075	26,92	12,1	26	271.724.682	216,67	55,27	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Dokumen hasil Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12	423.412.829	3	128.124.000	3	75.389.999	0	0	0	0	3	128.124.000	25	30,26	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Dokumen	12	8.568.811.241	4	2.752.422.597	4	3.307.861.384	1	572.807.160	25	17,32	5	3.325.229.757	41,67	38,81	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	3.760.138.330	4	1.140.548.332	4	1.171.790.000	1	262.617.077	25	22,41	5	1.403.165.409	41,67	37,32	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah berstatus BLUD	Unit Kerja	7	10.438.576.129	28	37.388.921.587	6	29.833.999.949	7	6.522.986.991	116,67	21,86	35	43.911.908.578	500	420,67	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang terakreditasi	%	100	40.095.035.914	100	37.742.305.133	100	14.904.557.397	100	20.266.572	100	0,14	200	37.762.571.705	200	94,18	**DINKESDAL DUK KB**	
			Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	%	100		100		100		100		100		200		200		**DINKESDAL DUK KB**	
			Persentase Puskesmas terakreditas	%	100		100		100		100		100		200		200		**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kab/Kota	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12	10.576.075.000	7	22.881.773.095	7	902.469.876	7	0	100	0	14	22.881.773.095	116,67	216,35	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	29.212.710.914	6	14.829.600.938	2	13.978.633.341	0.5	14.578.282	25	0,1	6.5	14.844.179.220	54,17	50,81	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Jumlah dokumen Hasil penyelenggaraan sistem informasi kesehatan	Dokumen	9	255.000.000	6	28.563.600	6	19.632.080	2	5.548.290	33,33	28,26	8	34.111.890	88,89	13,38	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Dokumen	7	51.250.000	20	2.367.500	20	3.822.100	5	140.000	25	3,66	25	2.507.500	357,14	4,89	**DINKESDAL DUK KB**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk	%	0.39	3.705.000.000	0.4	1.760.137.850	0.40	1.601.929.000	0	221.000.000	0	13,8	0.4	1.981.137.850	102,56	53,47	**DINKESDAL DUK KB**	
			Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya	%					100		0		0		0		nan		**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	75.000.000	300	271.750	300	3.041.200	0	0	0	0	300	271.750	2.500,00	0,36	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	2.280.000.000	9	1.448.556.950	9	1.578.033.800	0	221.000.000	0	14	9	1.669.556.950	75	73,23	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	1.350.000.000	2	311.309.150	2	20.854.000	0	0	0	0	2	311.309.150	16,67	23,06	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan	%	90	374.662.000	80	338.705.139	85	17.289.800	21	11.471.500	24,71	66,35	101	350.176.639	112,22	93,46	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Jumlah Dokumen hasil Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	12	102.554.500	63	43.833.550	66	1.000.000	16	2.270.000	24,24	227	79	46.103.550	658,33	44,96	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	12	73.500.000	1	120.161.565	1	1.720.000	0.25	1.334.400	25	77,58	1.25	121.495.965	10,42	165,3	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	12	75.660.000	0	0	1	3.009.800	0.25	0	25	0	0.25	0	2,08	0	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	-	-	0	0	0	0	0	9.440.000	0	1.451.650	nan	15,38	0	1.451.650	nan	inf	**DINKESDAL DUK KB**	
	1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dokumen	3	122.947.500	11	174.710.024	11	2.120.000	3	6.415.450	27,27	302,62	14	181.125.474	466,67	147,32	**DINKESDAL DUK KB**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan	%	100	975.000.000	70	52.658.000	75	11.221.000	0	2.666.290	0	23,76	70	55.324.290	70	5,67	DINKESDAL DUK KB	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	450.000.000	0	0	4	3.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINKESDAL DUK KB	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	480.000.000	0	0	4	3.641.000	1	1.166.290	25	32,03	1	1.166.290	8,33	0,24	DINKESDAL DUK KB	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	18	45.000.000	6	52.658.000	6	3.970.000	1	1.500.000	16,67	37,78	7	54.158.000	38,89	120,35	DINKESDAL DUK KB	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				73.420.001		15.600.000		45.382.180		0		0		15.600.000		21,25	DINKESDAL DUK KB	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				73.420.001		15.600.000		45.382.180		0		0		15.600.000		21,25	DINKESDAL DUK KB	
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga	%	88	73.420.001	86	15.600.000	87	45.382.180	0	0	0	0	86	15.600.000	97,73	21,25	DINKESDAL DUK KB	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	0	73.420.001	0	15.600.000	0	45.382.180	0	0	nan	0	0	15.600.000	nan	21,25	DINKESDAL DUK KB	
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.166.432.967		202.279.327		277.858.833		70.110.000		25,23		272.389.327		23,35	DINKESDAL DUK KB	
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				1.166.432.967		202.279.327		277.858.833		70.110.000		25,23		272.389.327		23,35	DINKESDAL DUK KB	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	100	1.166.432.967	100	202.279.327	-	277.858.833	25	70.110.000	inf	25,23	125	272.389.327	125	23,35	DINKESDAL DUK KB	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	4	1.166.432.967	4	202.279.327	4	277.858.833	1	70.110.000	25	25,23	5	272.389.327	125	23,35	DINKESDAL DUK KB	
3		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				226.479.806.673		42.999.107.755		26.858.143.776		3.135.827.557		11,68		46.134.935.312		20,37	PUPR	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				226.479.806.673		42.999.107.755		26.858.143.776		3.135.827.557		11,68		46.134.935.312		20,37	PUPR	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				226.479.806.673		42.999.107.755		26.858.143.776		3.135.827.557		11,68		46.134.935.312		20,37	PUPR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	%	52.45	12.680.000.000	49.34	3.030.263.000	50.55	1.823.000.000	49.34	3.395.000	97,61	0,19	98.68	3.033.658.000	188,14	23,92	**PUPR**	
	1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Air yang dikelola	Unit	18	2.180.000.000	19	2.401.110.000	5	1.103.000.000	0	1.460.000	0	0,13	19	2.402.570.000	105,56	110,21	**PUPR**	
	1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	meter	1.38	10.500.000.000	153.75	629.153.000	430	720.000.000	0	1.935.000	0	0,27	153.75	631.088.000	11.141,30	6,01	**PUPR**	
	1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	%	100	5.250.000.000	96.21	291.630.000	99.00	834.520.000	96.21	0	97,18	0	192.42	291.630.000	192,42	5,55	**PUPR**	
	1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat air bersih	125RT	169	5.250.000.000	60	291.630.000	0	834.520.000	0	0	nan	0	60	291.630.000	35,5	5,55	**PUPR**	
	1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%	%	92.97	4.675.000.000	92.97	579.706.500	92	740.480.000	92.97	28.500.000	101,05	3,85	185.94	608.206.500	200	13,01	**PUPR**	
	1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi	Unit	607	4.675.000.000	81	579.706.500	200	740.480.000	0	28.500.000	0	3,85	81	608.206.500	13,34	13,01	**PUPR**	
			Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi	Unit	0		60		200		0		0		60		inf		**PUPR**	
	1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	%	49.26	8.000.000.000	46.22	1.885.764.850	47.78	1.573.000.000	46.22	0	96,74	0	92.44	1.885.764.850	187,66	23,57	**PUPR**	
	1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun dan dipelihara	M	54	8.000.000.000	913.75	1.885.764.850	1200	1.573.000.000	0	0	0	0	913.75	1.885.764.850	1.692,13	23,57	**PUPR**	
	1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi	%	88.35	37.500.000.000	91.01	4.610.555.842	64.56	1.309.000.000	91.01	0	140,97	0	182.02	4.610.555.842	206,02	12,29	**PUPR**	
			Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	%	90.14		91.01		85.12		0		0		91.01		100,97		**PUPR**	
	1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin**	Jumlah Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	Unit	98	37.500.000.000	3	4.610.555.842	92	1.309.000.000	0	0	0	0	3	4.610.555.842	3,06	12,29	**PUPR**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																		
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata	%	82.52	20.070.000.000	80.13	6.277.252.000	80.13	1.947.000.000	80.13	0	100	0	160.26	6.277.252.000	194,21	31,28	PUPR	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang di tata	Unit	12	20.070.000.000	46	6.277.252.000	4	1.947.000.000	0	0	0	0	46	6.277.252.000	383,33	31,28	PUPR	
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	%	95.94	112.027.806.673	98.01	16.455.330.845	95.03	6.409.056.000	98.01	575.463.008	103,14	8,98	196.02	17.030.793.853	204,32	15,2	PUPR	
			Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	%	74.27		57.41		75.13		57.45		76,47		114.86		154,65		PUPR	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dan dipelihara	KM	33	112.027.806.673	7.92	16.455.330.845	105	6.409.056.000	0	575.463.008	0	8,98	7.92	17.030.793.853	24	15,2	PUPR	
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	0	0	0	0	-	149.891.000	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	PUPR	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	PUPR	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	0	0	0	0	99.891.000	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	PUPR	
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	%	100	150.000.000	50	20.602.450	100	165.987.220	50	0	50	0	100	20.602.450	100	13,73	PUPR	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun	Dokumen	6	150.000.000	1	20.602.450	2	85.663.100	0	0	0	0	1	20.602.450	16,67	13,73	PUPR	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	Kali	4	0	0	0	2	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	PUPR	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	Kali	93	0	0	0	31	13.969.450	0	0	0	0	0	0	0	nan	PUPR	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Kali	3	0	0	0	1	66.354.670	0	0	0	0	0	0	0	nan	PUPR	
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	%	100	26.127.000.000	303	9.848.002.268	100	11.906.209.556	25	2.528.469.549	25	21,24	328	12.376.471.817	328	47,37	PUPR	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan (Dok)	Dokumen	3	30.000.000	2	6.420.000	1	7.000.000	0	0	0	0	2	6.420.000	66,67	21,4	PUPR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan)	Bulan	42	19.000.000.000	13	7.043.211.197	12	9.115.618.076	87	2.188.915.805	725	24,01	100	9.232.127.002	238,1	48,59	PUPR	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya	Orang	150	210.000.000	15	50.845.135	48	37.600.000	0	0	0	0	15	50.845.135	10	24,21	PUPR	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	Bulan	36	1.315.000.000	9	467.582.350	12	276.215.810	3	25.388.580	25	9,19	12	492.970.930	33,33	37,49	PUPR	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan (bln)	Bulan	36	1.050.000.000	0	0	12	24.676.875	0	0	0	0	0	0	0	0	PUPR	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasiitasinya pelayanan administrasi umum	Bulan	36	1.242.000.000	12	1.294.203.814	12	1.455.334.692	3	237.370.924	25	16,31	15	1.531.574.738	41,67	123,32	PUPR	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	Bulan	36	3.280.000.000	12	985.739.772	12	989.764.103	3	76.794.240	25	7,76	15	1.062.534.012	41,67	32,39	PUPR	
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					44.994.227.906		13.411.716.801		13.850.660.668		3.204.864.384		23,14		16.616.581.185		36,93	DPKP2LH	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.855.537.604		1.955.415.988		2.279.203.551		541.893.035		23,78		2.497.309.023		42,65	DPKP2LH	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				160.018.382		3.390.150		50.399.200		4.150.000		8,23		7.540.150		4,71	DPKP2LH	
	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	persentae redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan	%	100	145.933.230	0	3.390.150	100	36.716.900	0	3.756.000	0	10,23	0	7.146.150	0	4,9	DPKP2LH	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 daerah	Dokumen	1	145.933.230	0	3.390.150	1	36.716.900	0	3.756.000	0	10,23	0	7.146.150	0	4,9	DPKP2LH	
	2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam daerah kota	%	100	14.085.152	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0	0	DPKP2LH	
	2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah segmen batas tanah ulayat nagari yang akan dikeluarkan surat penetapannya dalam satu tahun anggaran	%	1	14.085.152	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0	0	DPKP2LH	
	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong yang dikelola	%	0	0	0	0	30	13.682.300	0	394.000	0	2,88	0	394.000	nan	inf	DPKP2LH	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Laporan Kegiatan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	Laporan	0	0	0	0	1	13.682.300	0	394.000	0	2,88	0	394.000	nan	inf	DPKP2LH	
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase tanah budidaya yang memiliki aspek hukum	%	1	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0	nan	DPKP2LH	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 daerah kab/kota	%	1	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0	nan	DPKP2LH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.855.537.604		1.955.415.988		2.279.203.551		541.893.035		23,78		2.497.309.023		42,65	DPKP2LH	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				5.695.519.222		1.952.025.838		2.228.804.351		537.743.035		24,13		2.489.768.873		43,71	DPKP2LH	
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen perencanaan yang memiliki dokumen kajian lingkungan hidup	%	63.64	190.719.600	22.73	107.903.000	0	0	0	0	nan	nan	22.73	107.903.000	35,72	56,58	DPKP2LH	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/ Kota yang disusun	dokumen	4	220.000	0	1.749.000	0	0	0	0	nan	nan	0	1.749.000	0	795	DPKP2LH	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	dokumen	1	190.499.600	2	106.154.000	0	0	0	0	nan	nan	2	106.154.000	200	55,72	DPKP2LH	
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	%	75	946.660.305	78	0	79	110.104.686	15	7.173.960	18,99	6,52	93	7.173.960	124	0,76	DPKP2LH	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencemaran kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan	3	913.660.305	2	0	2	110.104.686	0	7.173.960	0	6,52	2	7.173.960	66,67	0,79	DPKP2LH	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemulihan lingkungan hidup	Laporan	3	33.000.000	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0	0	DPKP2LH	
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%)	%	100	1.303.033.490	100	286.728.736	100	759.009.165	25	205.334.905	25	27,05	125	492.063.641	125	37,76	DPKP2LH	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas taman yang terkelola	%	100	1.303.033.490	100	286.728.736	100	759.009.165	25	205.334.905	25	27,05	125	492.063.641	125	37,76	DPKP2LH	
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan/usaha yang memiliki izin PLB3	%	75	23.352.395	0	0	77	0	0	0	0	nan	0	0	0	0	DPKP2LH	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan keg. verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyim panan sementara dan pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	Laporan	3	23.352.395	0	0	9	0	0	0	0	nan	0	0	0	0	DPKP2LH	
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usahadan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin pplh dan puulh yang diterbitkan oleh pemerintah kota	%	75	105.790.663	0	0	78	5.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DPKP2LH	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan	Jumlah usaha berizin yang dibina dan diawasi	Laporan	75	105.790.663	0	0	50	5.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DPKP2LH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase masyarakat yang mendapat akses Diklat/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup(%)	%	100	121.000.000	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0	0	DPKP2LH	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga kemasyarakatan yang mengikuti diklat lingkungan	Lembaga kemasyarakatan	70	121.000.000	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0	0	DPKP2LH	
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan bidang LH yang diperoleh	%	1	110.000.000	100	6.600.000	100	17.749.400	0	0	0	0	100	6.600.000	10.000,00	6	DPKP2LH	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan LH yang diberikan	Penghargaan	5	110.000.000	4	6.600.000	5	17.749.400	0	0	0	0	4	6.600.000	80	6	DPKP2LH	
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan (%)	%	100	16.500.000	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0	0	DPKP2LH	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan LH yang diselesaikan	Kasus	22	16.500.000	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0	0	DPKP2LH	
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang terkelola (%)	%	99	2.878.462.769	99	1.550.794.102	98	1.336.901.100	25	325.234.170	25,51	24,33	124	1.876.028.272	125,25	65,17	DPKP2LH	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	Ton	6950	2.878.462.769	6950	1.550.794.102	6950	1.336.901.100	1745.94	325.234.170	25,12	24,33	8695.94	1.876.028.272	125,12	65,17	DPKP2LH	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**39.138.690.302**		**11.456.300.813**		**11.571.457.117**		**2.662.971.349**		**23,01**		**14.119.272.162**		**36,07**	DPKP2LH	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**39.138.690.302**		**11.456.300.813**		**11.571.457.117**		**2.662.971.349**		**23,01**		**14.119.272.162**		**36,07**	DPKP2LH	
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib	%	100	24.312.792.585	100	9.889.041.728	100	10.292.321.452	25	2.603.452.741	25	25,3	125	12.492.494.469	125	51,38	DPKP2LH	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	6	15.000.000	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0	0	DPKP2LH	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	orang/bulan	42	17.249.527.268	49	4.538.292.600	40	5.489.853.380	43	1.341.886.876	107,5	24,44	92	5.880.179.476	219,05	34,09	DPKP2LH	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan admnistrasi umum	Bulan	36	540.375.703	12	364.195.876	12	208.066.820	3	2.216.000	25	1,07	15	366.411.876	41,67	67,81	DPKP2LH	
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	36	5.520.697.501	36	4.534.944.205	12	3.888.161.252	3	1.147.059.862	25	29,5	39	5.682.004.067	108,33	102,92	DPKP2LH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah	Bulan	36	987.192.113	33.33	451.609.047	12	706.240.000	100	112.290.003	833,33	15,9	133.33	563.899.050	370,36	57,12	DPKP2LH	
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Rumah Yang Direhabilitasi	%	94	2.412.801.087	92	506.834.145	93	498.760.665	0	59.518.608	0	11,93	92	566.352.753	97,87	23,47	DPKP2LH	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang didata	Unit	30	221.700.000	24	14.592.150	10	11.308.520	0	0	0	0	24	14.592.150	80	6,58	DPKP2LH	
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	Kali	6	84.200.000	6	12.677.500	1	10.080.000	0	0	0	0	6	12.677.500	100	15,06	DPKP2LH	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban	unit	30	728.000.000	10	203.978.250	10	202.895.300	0	0	0	0	10	203.978.250	33,33	28,02	DPKP2LH	
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pendistribusian dan serah terima rumah korban bencana	Unit	30	32.000.000	10	0	10	363.000	0	0	0	0	10	0	33,33	0	DPKP2LH	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terkelolanya rumah susun	bulan	36	1.346.901.087	12	275.586.245	12	274.113.845	3	59.518.608	25	21,71	15	335.104.853	41,67	24,88	DPKP2LH	
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan permukiman (%)	%	0	3.595.000.000	0	775.140.320	84	600.375.000	0	0	0	0	0	775.140.320	nan	21,56	DPKP2LH	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Yang ditata	Kawasan	1	250.000.000	1	74.730.750	0	0	0	0	nan	nan	1	74.730.750	100	29,89	DPKP2LH	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	persentase kualitas permukiman kumuh yang ditingkatkan	%	91.05	3.345.000.000	80.52	700.409.570	86	600.375.000	0	0	0	0	80.52	700.409.570	88,43	20,94	DPKP2LH	
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sesuai SK Walikota (Ha)	Ha	19.08	1.200.000.000	0	25.075.720	19.08	50.000.000	0	0	0	0	0	25.075.720	0	2,09	DPKP2LH	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yg diperbaiki diluar kawasan kumuh	Unit	60	1.200.000.000	19	25.075.720	60	50.000.000	0	0	0	0	19	25.075.720	31,67	2,09	DPKP2LH	
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	85	7.618.096.630	99.85	260.208.900	85	130.000.000	0	0	0	0	99.85	260.208.900	117,47	3,42	DPKP2LH	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang tertata	Paket	86	7.618.096.630	86	260.208.900	85	130.000.000	0	0	0	0	86	260.208.900	100	3,42	DPKP2LH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**					**36.758.191.565**		**9.530.566.389**		**11.514.208.129**		**2.938.556.069**		**25,52**		**12.469.122.458**		**33,92**	**SATPOLPP DAMKAR**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**36.758.191.565**		**9.530.566.389**		**11.514.208.129**		**2.938.556.069**		**25,52**		**12.469.122.458**		**33,92**	**SATPOLPP DAMKAR**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**36.758.191.565**		**9.530.566.389**		**11.514.208.129**		**2.938.556.069**		**25,52**		**12.469.122.458**		**33,92**	**SATPOLPP DAMKAR**	
	1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintah Daerah berjalan lancar dan tertib	bulan	14	33.588.791.565	14	9.300.799.520	12	11.035.784.129	3	2.618.190.929	25	23,72	17	11.918.990.449	121,43	35,49	**SATPOLPP DAMKAR**	
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	14	21.208.403.565	14	7.289.271.973	0	9.247.755.002	3	2.282.800.284	inf	24,68	17	9.572.072.257	121,43	45,13	**SATPOLPP DAMKAR**	
	1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	0	869.700.000	0	138.107.000	0	0	0	0	nan	nan	0	138.107.000	nan	15,88	**SATPOLPP DAMKAR**	
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	12	1.513.488.000	12	221.324.154	0	162.647.995	3	46.820.140	inf	28,79	15	268.144.294	125	17,72	**SATPOLPP DAMKAR**	
	1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	380.000.000	12	7.068.000	12	15.900.000	0	0	0	0	12	7.068.000	100	1,86	**SATPOLPP DAMKAR**	
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	8.161.700.000	12	1.337.545.887	12	1.319.439.132	0	238.443.005	0	18,07	12	1.575.988.892	100	19,31	**SATPOLPP DAMKAR**	
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	1.455.500.000	12	307.482.506	12	290.042.000	12	50.127.500	100	17,28	24	357.610.006	200	24,57	**SATPOLPP DAMKAR**	
	1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penegakan Perda	%	100	1.443.920.000	100	48.415.000	100	177.146.000	8	19.263.000	8	10,87	108	67.678.000	108	4,69	**SATPOLPP DAMKAR**	
	1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	%	100	725.070.000	100	32.760.000	100	73.280.000	100	3.100.000	100	4,23	200	35.860.000	200	4,95	**SATPOLPP DAMKAR**	
			Persentase penurunan Penyakit Masyarakat	%	0		0		55		0		0		0		nan		**SATPOLPP DAMKAR**	
	1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda	25	448.850.000	25	15.655.000	25	24.638.000	25	16.163.000	100	65,6	50	31.818.000	200	7,09	**SATPOLPP DAMKAR**	
	1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Terpenuhinya aparatur yang mengikuti Pembinaan PPNS	orang	6	270.000.000	0	0	2	79.228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	**SATPOLPP DAMKAR**	
	1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Penanganan Kebakaran	%	100	1.725.480.000	100	181.351.869	100	301.278.000	100	301.102.140	100	99,94	200	482.454.009	200	27,96	**SATPOLPP DAMKAR**	
			Persentase Kerjasama Penanganan Pencegahan Kebakaran	%	100		100		100		100		100		200		200		**SATPOLPP DAMKAR**	
	1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian,**	Tersedianya SOP penanganan bahaya kebakaran	laporan	133	1.507.980.000	32	157.081.000	100	274.013.000	0	287.142.140	0	104,79	32	444.223.140	24,06	29,46	**SATPOLPP DAMKAR**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah laporan investigasi kebakaran	laporan	13	75.000.000	15	1.316.000	17	3.000.000	3	340.000	17,65	11,33	18	1.656.000	138,46	2,21	SATPOLPP DAMKAR	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah relawan damkar per desa/kelurahan	orang	111	105.000.000	111	22.954.869	111	11.088.000	111	280.000	100	2,53	222	23.234.869	200	22,13	SATPOLPP DAMKAR	
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan pertolongan yang membahayakan manusia	%	100	37.500.000	0	0	100	13.177.000	100	13.340.000	100	101,24	100	13.340.000	100	35,57	SATPOLPP DAMKAR	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					22.456.837.112		4.605.433.481		4.780.216.221		1.088.872.848		22,78		5.694.306.329		25,36	BPBD	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.456.837.112		4.605.433.481		4.780.216.221		1.088.872.848		22,78		5.694.306.329		25,36	BPBD	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				22.456.837.112		4.605.433.481		4.780.216.221		1.088.872.848		22,78		5.694.306.329		25,36	BPBD	
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	%	100	16.834.155.712	100	3.946.699.781	100	3.957.189.571	100	1.008.639.468	100	25,49	200	4.955.339.249	200	29,44	BPBD	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Disusun	Dokumen	3	6.000.000	1	2.433.900	1	15.066.540	0.1	2.089.000	10	13,87	1.1	4.522.900	36,67	75,38	BPBD	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	bulan	42	12.244.127.962	14	2.732.736.723	14	2.763.497.255	4	810.755.376	28,57	29,34	18	3.543.492.099	42,86	28,94	BPBD	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi kepegawaian	bulan	36	335.750.000	12	3.210.000	12	10.660.000	3	0	25	0	15	3.210.000	41,67	0,96	BPBD	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	bulan	36	1.066.391.250	12	232.914.259	12	139.230.700	3	24.281.040	25	17,44	15	257.195.299	41,67	24,12	BPBD	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjanga Urusan Pemerintah Daerah	bulan	12	25.000.000	12	5.383.500	12	38.706.120	3	0	25	0	15	5.383.500	125	21,53	BPBD	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	12	36	2.377.911.500	12	740.828.593	12	820.190.956	12	150.127.552	100	18,3	24	890.956.145	66,67	37,47	BPBD	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	36	778.975.000	12	229.192.806	12	169.838.000	3	21.386.500	25	12,59	15	250.579.306	41,67	32,17	BPBD	
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Bencana yang Tertangani	%	100	5.622.681.400	100	658.733.700	100	823.026.650	100	80.233.380	100	9,75	200	738.967.080	200	13,14	BPBD	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk yang mendapat Informasi Layanan Kebencanaan	%	100	450.000.000	100	44.590.500	100	50.037.800	100	29.525.000	100	59,01	200	74.115.500	200	16,47	BPBD	
					100		100		0		100		inf		200		200		BPBD	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan	%	100	3.408.375.000	100	61.649.200	1	409.512.200	100	0	10.000,00	0	200	61.649.200	200	1,81	BPBD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana																	
			Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana	%	100		100		75		100		133,33		200		200		BPBD	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	1.264.306.400	100	148.506.000	100	284.785.000	100	50.708.380	100	17,81	200	199.214.380	200	15,76	BPBD	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Fasilitasi Pembuatan Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100	500.000.000	100	403.988.000	100	78.691.650	0	0	0	0	100	403.988.000	100	80,8	BPBD	
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					28.438.054.168		8.399.549.548		8.201.507.176		1.861.329.098		22,69		10.260.878.646		36,08	DINSOS PMDPPA	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20.588.048.000		6.471.295.247		6.854.654.299		1.543.672.087		22,52		8.014.967.334		38,93	DINSOS PMDPPA	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				20.588.048.000		6.471.295.247		6.854.654.299		1.543.672.087		22,52		8.014.967.334		38,93	DINSOS PMDPPA	
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (%)	persen	100	14.518.220.000	100	5.410.722.884	100	5.688.078.999	25	1.421.005.837	25	24,98	125	6.831.728.721	125	47,06	DINSOS PMDPPA	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor	persen	100	12.315.000.000	100	3.897.430.162	100	4.221.696.317	100	1.169.172.745	100	27,69	200	5.066.602.907	200	41,14	DINSOS PMDPPA	
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Kantor	persen	100	135.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	25	0	25	0	125	20.000.000	125	14,81	DINSOS PMDPPA	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Umum Kantor	persen	100	1.162.000.000	100	488.366.506	100	407.828.314	24	68.522.945	24	16,8	124	556.889.451	124	47,93	DINSOS PMDPPA	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"""Tersedianya Jasa Penunjang Kantor"	persen	100	246.220.000	91.87	742.670.389	100	733.916.368	21	150.784.747	21	20,55	112.87	893.455.136	112,87	362,87	DINSOS PMDPPA	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Kantor	persen	100	660.000.000	100	262.255.827	100	304.638.000	15	32.525.400	15	10,68	115	294.781.227	115	44,66	DINSOS PMDPPA	
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase TKSK yang berpatispasi dalam penanganan PPKS (%)	persen	100	961.410.000	100	43.028.000	100	61.980.000	100	4.680.000	100	7,55	200	47.708.000	200	4,96	DINSOS PMDPPA	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSM dan TKSK yang dikembangkan (orang)	Orang	41	961.410.000	41	43.028.000	41	61.980.000	10	4.680.000	24,39	7,55	51	47.708.000	124,39	4,96	DINSOS PMDPPA	
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	persen	100	4.010.340.000	100	906.385.738	100	971.404.660	10	102.868.000	10	10,59	110	1.009.253.738	110	25,17	DINSOS PMDPPA	
			Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang terfasilitas	persen	100		100		100		10		10		110		110		DINSOS PMDPPA	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang terfasilitasi (orang)	Orang	315	3.826.340.000	315	886.625.738	315	951.404.660	315	102.868.000	100	10,81	630	989.493.738	200	25,86	DINSOS PMDPPA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengemis di Luar Panti Sosial																		
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya yang tertangani (Orang)	Orang	240	184.000.000	225	19.760.000	225	20.000.000	0	0	0	0	225	19.760.000	93,75	10,74	DINSOS PMDPPA	
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persen	100	234.230.000	100	24.680.000	100	28.225.600	20	532.000	20	1,88	120	25.212.000	120	10,76	DINSOS PMDPPA	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	Orang	3071	234.230.000	3071	24.680.000	3071	28.225.600	20	532.000	0,65	1,88	3091	25.212.000	100,65	10,76	DINSOS PMDPPA	
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi (%)	persen	100	397.800.000	100	38.972.500	100	69.606.900	18	12.406.750	18	17,82	118	51.379.250	118	12,92	DINSOS PMDPPA	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam yang difasilitasi (%)	persen	100	135.000.000	100	11.154.500	100	29.966.900	18	0	18	0	118	11.154.500	118	8,26	DINSOS PMDPPA	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang aktif	persen	100	262.800.000	100	27.818.000	100	39.640.000	30	12.406.750	30	31,3	130	40.224.750	130	15,31	DINSOS PMDPPA	
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makan Pahlawan (TMP) yang terfasilitasi	persen	100	466.048.000	96.29	47.506.125	100	35.358.140	25	2.179.500	25	6,16	121.29	49.685.625	121,29	10,66	DINSOS PMDPPA	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Makam	4	466.048.000	4	47.506.125	4	35.358.140	1	2.179.500	25	6,16	5	49.685.625	125	10,66	DINSOS PMDPPA	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7.850.006.168**		**1.928.254.301**		**1.346.852.877**		**317.657.011**		**23,59**		**2.245.911.312**		**28,61**	**DINSOS PMDPPA**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**3.368.000.000**		**1.101.159.340**		**434.631.400**		**167.986.154**		**38,65**		**1.269.145.494**		**37,68**	**DINSOS PMDPPA**	
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	persen	20	945.000.000	20	623.381.590	20	127.112.600	20	164.966.154	100	129,78	40	788.347.744	200	83,42	DINSOS PMDPPA	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga PUG pada lembaga pemerintahan (lembaga)	Lembaga	3	165.000.000	3	11.404.000	3	39.465.000	1	29.618.569	33,33	75,05	4	41.022.569	133,33	24,86	DINSOS PMDPPA	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Masyarakat yang begerak dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (organisasi)	persen	100	315.000.000	100	156.149.000	100	35.457.600	68	135.347.585	68	381,72	168	291.496.585	168	92,54	DINSOS PMDPPA	
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Lembaga	1	465.000.000	1	455.828.590	1	52.190.000	0	0	0	0	1	455.828.590	100	98,03	DINSOS PMDPPA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
	2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	persen	0.01	255.000.000	0.01	50.880.000	0.01	500.000	0	0	0	0	0.01	50.880.000	100	19,95	**DINSOS PMDPPA**	
	2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan	kegiatan	12	255.000.000	11	50.880.000	12	500.000	0	0	0	0	11	50.880.000	91,67	19,95	**DINSOS PMDPPA**	
	2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase PKK Aktif (%)	persen	100	1.605.000.000	100	213.104.550	100	272.033.800	0	0	0	0	100	213.104.550	100	13,28	**DINSOS PMDPPA**	
	2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan pemenuhan hak anak	bulan	12	1.195.000.000	12	197.122.450	12	248.649.000	0	0	0	0	12	197.122.450	100	16,5	**DINSOS PMDPPA**	
	2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (Lembaga)	Lembaga	2	210.000.000	2	3.000.000	2	22.885.000	0	0	0	0	2	3.000.000	100	1,43	**DINSOS PMDPPA**	
	2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lembaga layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak (lembaga)	Lembaga	1	200.000.000	1	12.982.100	1	499.800	0	0	0	0	1	12.982.100	100	6,49	**DINSOS PMDPPA**	
	2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase sekolah ramah anak (%)	persen	100	563.000.000	100	56.284.200	100	26.945.000	0	0	0	0	100	56.284.200	100	10	**DINSOS PMDPPA**	
			Persentase Kelurahan ramah anak (%)	persen	100		100		100		0		0		100		100		**DINSOS PMDPPA**	
	2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Anak yang terpenuhi haknya	persen	100	323.000.000	100	51.284.200	100	22.215.000	0	0	0	0	100	51.284.200	100	15,88	**DINSOS PMDPPA**	
	2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak (lembaga)	Lembaga	42	240.000.000	42	5.000.000	42	4.730.000	0	0	0	0	42	5.000.000	100	2,08	**DINSOS PMDPPA**	
	2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memproleh layanan sesuai (per 1000 anak (permil)	persen	100	0	100	157.509.000	100	8.040.000	5	3.020.000	5	37,56	105	160.529.000	105	inf	**DINSOS PMDPPA**	
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)	persen	100		100		100		5		5		105		105		**DINSOS PMDPPA**	
	2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang**	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	kegiatan	12	0	12	75.029.000	12	3.040.000	3	3.020.000	25	99,34	15	78.049.000	125	inf	**DINSOS PMDPPA**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak (lembaga)	Lembaga	42	0	39	82.480.000	42	5.000.000	0	0	0	0	39	82.480.000	92,86	inf	DINSOS PMDPPA	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.850.006.168		1.928.254.301		1.346.852.877		317.657.011		23,59		2.245.911.312		28,61	DINSOS PMDPPA	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4.482.006.168		827.094.961		912.221.477		149.670.857		16,41		976.765.818		21,79	DINSOS PMDPPA	
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	persen	100	2.197.006.168	100	582.625.566	100	492.554.362	14	114.324.732	14	23,21	114	696.950.298	114	31,72	DINSOS PMDPPA	
			Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	persen	0		0		0		0		nan		0		nan		DINSOS PMDPPA	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Desa yang dibina (%)	persen	100	2.197.006.168	100	582.625.566	100	492.554.362	23	114.324.732	23	23,21	123	696.950.298	123	31,72	DINSOS PMDPPA	
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina (%)	persen	100	2.285.000.000	100	244.469.395	100	419.667.115	20	35.346.125	20	8,42	120	279.815.520	120	12,25	DINSOS PMDPPA	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan desa	Lembaga	195	2.285.000.000	185	244.469.395	185	419.667.115	0	35.346.125	0	8,42	185	279.815.520	94,87	12,25	DINSOS PMDPPA	
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN					61.606.490.603		13.286.701.146		12.194.090.334		3.312.168.184		27,16		16.598.869.330		26,94	DKP3	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				22.284.500.000		2.330.021.517		1.377.275.615		196.665.016		14,28		2.526.686.533		11,34	DKP3	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				20.459.500.000		2.251.433.037		1.276.637.215		187.110.016		14,66		2.438.543.053		11,92	DKP3	
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi Daging Ayam	ton	2700.78	8.934.500.000	986.03	841.011.895	900,26	534.295.470	228.85	31.332.816	25,43	5,86	1214.88	872.344.711	44,98	9,76	DKP3	
			Rasio Serangan OPT terhadap luas tanam	Rasio	10		19.7		01:10		6.76		676		26.46		264,6		DKP3	
			Jumlah Produksi Telur	ton	407.58		391.1		135,86		93.85		69,52		484.95		118,98		DKP3	
			Jumlah Produksi Padi	ton	47505		18006.25		15850		4787.43		30,2		22793.68		47,98		DKP3	
			Jumlah Produksi Karet	ton	5205		2389.03		1735		495.87		28,58		2884.9		55,43		DKP3	
			Jumlah Produksi Kakao	ton	1710		592.7		570		143.48		25,17		736.18		43,05		DKP3	
			Jumlah Produksi Daging Sapi	ton	960		413.07		320		69.3		21,66		482.37		50,25		DKP3	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penebusan Pupuk Subsidi oleh Petani	%	85	442.000.000	167.13	158.250.300	85	34.499.800	17.71	22.748.816	20,84	65,94	184.84	180.999.116	217,46	40,95	DKP3	
			Persentas e Kelompok Penerima Sarana yang Didampingi	%	15		100		15		100		666,67		200		1.333,33		DKP3	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Produktifi tas Padi	Ton GKG/Ha	5.42	2.237.500.000	5.84	228.255.583	5	208.039.970	6.01	8.584.000	120,2	4,13	11.85	236.839.583	218,63	10,59	DKP3	
			Produktifi tas Karet	Ton/ha	1.28		1.31		1		0.27		27		1.58		123,44		DKP3	
			Produktifi tas Kakao	ton/ha	1.13		1.14		1		0.28		28		1.42		125,66		DKP3	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentas e benih atau bibit ternak yang beredar sesuai standar	%	95	375.000.000	100	15.703.750	95	65.795.900	100	0	105,26	0	200	15.703.750	210,53	4,19	DKP3	
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentas e Kelahiran Sapi yang di IB	%	37	480.000.000	59	14.593.612	37	14.640.000	35	0	94,59	0	94	14.593.612	254,05	3,04	DKP3	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Populasi ternak sapi	ekor	4750	5.400.000.000	4981	424.208.650	4725	211.319.800	4997	0	105,76	0	9978	424.208.650	210,06	7,86	DKP3	
			Jumlah Populasi ternak kambing	ekor	2210		2560		2.2		2591		117.772,73		5151		233,08		DKP3	
			Jumlah populasi ternak ayam kampung	ekor	49845		49211		49.845		49575		99.458,32		98786		198,19		DKP3	
			jumlah Populasi ternak itik	ekor	15022		18330		15.022		19288		128.398,35		37618		250,42		DKP3	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan atau perbaikan jaringan irigasi	ha	7.5	8.115.000.000	9.84	1.169.285.142	2,5	479.090.770	0	54.628.000	0	11,4	9.84	1.223.913.142	131,2	15,08	DKP3	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase realisasi perencanaan	100	100	395.000.000	100	26.115.000	100	33.679.720	0	0	0	0	100	26.115.000	100	6,61	DKP3	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun/diperbaiki	Meter	1050	7.720.000.000	2211	1.143.170.142	350	445.411.050	0	54.628.000	0	12,26	2211	1.197.798.142	210,57	15,52	DKP3	
			Panjang Jalan yang dibangun yang dibangun / diperbaiki		1050		1976		0		0		nan		1976		188,19		DKP3	
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	10	2.010.000.000	100	114.157.500	10	141.382.225	100	89.709.200	1.000,00	63,45	200	203.866.700	2.000,00	10,14	DKP3	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	Persentase Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis yang di tangani	%	90	375.000.000	100	42.767.500	90	60.051.600	100	10.686.000	111,11	17,79	200	53.453.500	222,22	14,25	DKP3	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota																		
	3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Hewan yang Terlayani	ekor	10500	1.275.000.000	9531	49.438.250	3	52.350.725	2448	79.023.200	81.600,00	150,95	11979	128.461.450	114,09	10,08	**DKP3**	
	3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Jumlah UPH yang Berstatus Pra NKV	UPH	2	360.000.000	2	21.951.750	2	28.979.900	1	0	50	0	3	21.951.750	150	6,1	**DKP3**	
	3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	100	10	620.000.000	19.7	72.690.600	100	75.000.000	25	2.500.000	25	3,33	44.7	75.190.600	447	12,13	**DKP3**	
	3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Jenis komoditi yang dikendalikan	Jenis	1	620.000.000	5	72.690.600	1	75.000.000	1	2.500.000	100	3,33	6	75.190.600	600	12,13	**DKP3**	
	3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi	Lembaga	3	780.000.000	1	54.287.900	1	46.868.750	0	8.940.000	0	19,07	1	63.227.900	33,33	8,11	**DKP3**	
			Jumlah Ketenagaan Penyuluhan yang Berprestasi	\N	3		1		1		0		0		1		33,33		**DKP3**	
	3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan	%	5	780.000.000	11.76	54.287.900	5	46.868.750	0	8.940.000	0	19,07	11.76	63.227.900	235,2	8,11	**DKP3**	
			Jumlah kelompok tani yang Naik Kelas sesuai Permentan	klmpk/wkpp	6		10		6		0		0		10		166,67		**DKP3**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**39.321.990.603**		**10.956.679.629**		**10.816.814.719**		**3.115.503.168**		**28,8**		**14.072.182.797**		**35,79**	**DKP3**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**39.321.990.603**		**10.956.679.629**		**10.816.814.719**		**3.115.503.168**		**28,8**		**14.072.182.797**		**35,79**	**DKP3**	
	2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintah Daerah Berjalan yang berjalan lancar dan tertib	%	100	37.053.369.603	100	10.909.767.879	100	10.749.974.619	100	3.099.652.468	100	28,83	200	14.009.420.347	200	37,81	**DKP3**	
	2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	31	30.000.000	12	4.477.000	10	5.196.000	3	0	30	0	15	4.477.000	48,39	14,92	**DKP3**	
	2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	42	29.589.891.359	14	9.376.638.585	14	9.112.313.234	4	2.871.104.327	28,57	31,51	18	12.247.742.912	42,86	41,39	**DKP3**	
	2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Aparatur yang meningkat SDM-nya	%	18	425.000.000	12.5	32.990.000	6	34.994.000	0	0	0	0	12.5	32.990.000	69,44	7,76	**DKP3**	
	2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya administrasi Perkantoran	Dokumen	36	2.978.350.000	12	428.895.720	12	437.512.303	3	32.739.565	25	7,48	15	461.635.285	41,67	15,5	**DKP3**	
	2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Administrasi Perkantoran Berjalan lancar dan tertib	bulan	36	744.276.910	12	686.212.144	12	751.989.082	3	138.782.026	25	18,46	15	824.994.170	41,67	110,85	**DKP3**	
	2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Keadaan Baik	%	100	3.285.851.334	100	380.554.430	100	407.970.000	100	57.026.550	100	13,98	200	437.580.980	200	13,32	**DKP3**	
	2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK**	Persentase Kecukupan Kebutuhan Beras	%	100	318.706.000	213	1.680.000	100	2.999.800	0	560.000	0	18,67	213	2.240.000	213	0,7	**DKP3**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN																		
	2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang ditangani	Desa	3	318.706.000	1	1.680.000	1	2.999.800	0	560.000	0	18,67	1	2.240.000	33,33	0,7	**DKP3**	
	2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Skor PPH	%	87	1.332.600.000	91.1	26.356.000	86,5	31.356.000	0	924.000	0	2,95	91.1	27.280.000	104,71	2,05	**DKP3**	
	2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Jumlah Ketersedian Bahan Pangan Pokok	kg/Perkapita/Pertahun	147	140.300.000	165.89	3.000.000	146	1.500.000	39.77	280.000	27,24	18,67	205.66	3.280.000	139,9	2,34	**DKP3**	
	2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Konsumsi Energi	kakal/kapita/Pertahun	1850	1.192.300.000	2085	23.356.000	1.845	29.856.000	0	644.000	0	2,16	2085	24.000.000	112,7	2,01	**DKP3**	
			Protein	Gr/Kapita/Tahun	56		58.6		55		0		0		58.6		104,64		**DKP3**	
	2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	%	6	165.500.000	5.5	3.909.750	6	15.000.000	0	0	0	0	5.5	3.909.750	91,67	2,36	**DKP3**	
	2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Desa rawan Pangan yang ditangani	Desa	3	165.500.000	1	3.909.750	1	15.000.000	0	0	0	0	1	3.909.750	33,33	2,36	**DKP3**	
	2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu pestisida	%	93	451.815.000	96.3	14.966.000	93	17.484.300	95	14.366.700	102,15	82,17	191.3	29.332.700	205,7	6,49	**DKP3**	
	2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Komoditi Kelompok Pangan Konsumsi yang diawasi	%	30	451.815.000	30	14.966.000	30	17.484.300	30	14.366.700	100	82,17	60	29.332.700	200	6,49	**DKP3**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**22.284.500.000**		**2.330.021.517**		**1.377.275.615**		**196.665.016**		**14,28**		**2.526.686.533**		**11,34**	**DKP3**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**1.825.000.000**		**78.588.480**		**100.638.400**		**9.555.000**		**9,49**		**88.143.480**		**4,83**	**DKP3**	
	3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah Produksi Ikan	ton	606	1.825.000.000	229.69	76.560.480	202	80.998.400	57.01	9.555.000	28,22	11,8	286.7	86.115.480	47,31	4,72	**DKP3**	
	3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Produktivitas Produksi Ikan	Prokg/m2	15.95	1.825.000.000	5.89	76.560.480	5	80.998.400	1.46	9.555.000	29,2	11,8	7.35	86.115.480	46,08	4,72	**DKP3**	
	3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	39	0	44.73	2.028.000	39	19.640.000	0	0	0	0	44.73	2.028.000	114,69	inf	**DKP3**	
	3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil**	-	-	0	0	0	2.028.000	0	19.640.000	0	0	nan	0	0	2.028.000	nan	inf	**DKP3**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil																		
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.494.336.948		3.706.117.524		5.088.444.330		960.171.764		18,87		4.666.289.288		84,93	DISDUKCAPIL	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.494.336.948		3.706.117.524		5.088.444.330		960.171.764		18,87		4.666.289.288		84,93	DISDUKCAPIL	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.494.336.948		3.706.117.524		5.088.444.330		960.171.764		18,87		4.666.289.288		84,93	DISDUKCAPIL	
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib	persen	100	5.019.516.278	100	3.483.348.803	100	4.965.070.210	0	930.021.964	0	18,73	100	4.413.370.767	100	87,92	DISDUKCAPIL	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	%	24	3.607.195.273	97.12	2.888.449.516	24	4.328.428.952	24	860.045.800	100	19,87	121.12	3.748.495.316	504,67	103,92	DISDUKCAPIL	
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	45	53.561.250	93.26	21.950.490	85	18.950.000	25	0	29,41	0	118.26	21.950.490	262,8	40,98	DISDUKCAPIL	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	%	100	360.350.496	82.22	160.996.676	100	131.032.775	25	0	25	0	107.22	160.996.676	107,22	44,68	DISDUKCAPIL	
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemeraintah daerah	%	90	195.358.113	0	0	90	15.910.600	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDUKCAPIL	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	95	531.861.747	85.51	352.391.584	95	334.412.883	25	63.680.464	26,32	19,04	110.51	416.072.048	116,33	78,23	DISDUKCAPIL	
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	90	271.189.399	78.54	59.560.537	90	136.335.000	20	6.295.700	22,22	4,62	98.54	65.856.237	109,49	24,28	DISDUKCAPIL	
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan KTP	%	99.9	332.850.670	98.49	197.149.471	99,8	86.291.720	24.68	30.149.800	24,93	34,94	123.17	227.299.271	123,29	68,29	DISDUKCAPIL	
			Cakupan KK	%	96		99.67		94		26.15		27,82		125.82		131,06		DISDUKCAPIL	
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	85		75.98		80		24.9		31,13		100.88		118,68		DISDUKCAPIL	
			Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan	%	95		98.66		90		25		27,78		123.66		130,17		DISDUKCAPIL	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan dan persentase pengaduan yang diselesaikan	%	100	78.413.270	100	8.922.800	100	10.725.600	25	3.312.700	25	30,89	125	12.235.500	125	15,6	DISDUKCAPIL	
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase blanko, tonner, ribbon, cleaning kit dan bahan-bahan lain yang diadakan	%	100	224.437.400	95	74.336.000	100	56.685.720	25	26.837.100	25	47,34	120	101.173.100	120	45,08	DISDUKCAPIL	
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk (Laporan)	Laporan	12	30.000.000	12	113.890.671	12	18.880.400	1	0	8,33	0	13	113.890.671	108,33	379,64	DISDUKCAPIL	
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan Akte kelahiran	%	70	73.000.000	71.53	2.048.250	68	17.738.600	17.94	0	26,38	0	89.47	2.048.250	127,81	2,81	DISDUKCAPIL	
			Cakupan akte kematian	%	100		100		100		25		25		125		125		DISDUKCAPIL	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Laporan	1	73.000.000	1	2.048.250	1	17.738.600	0.25	0	25	0	1.25	2.048.250	125	2,81	DISDUKCAPIL	
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN	Validltas Data Kependudukan	%	100	18.150.000	100	3.571.000	100	3.568.800	25	0	25	0	125	3.571.000	125	19,67	DISDUKCAPIL	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																		
	2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Data Administrasi Kependudukan Yang Akurat	Dokumen	100	18.150.000	100	3.571.000	100	3.568.800	25	0	25	0	125	3.571.000	125	19,67	**DISDUKCAPIL**	
	2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Penyediaan Profil Kependudukan	Buku	3	50.820.000	3	20.000.000	3	15.775.000	0	0	0	0	3	20.000.000	100	39,35	**DISDUKCAPIL**	
	2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	Data Agregat Kependudukan	%	100	50.820.000	100	20.000.000	100	15.775.000	50	0	50	0	150	20.000.000	150	39,35	**DISDUKCAPIL**	
10	**DINAS PERHUBUNGAN**					**33.847.727.062**		**7.173.656.597**		**9.379.856.122**		**2.970.428.520**		**31,67**		**10.144.085.117**		**29,97**	**DISHUB**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**30.697.756.750**		**6.364.193.217**		**8.656.385.854**		**2.807.114.771**		**32,43**		**9.171.307.988**		**29,88**	**DISHUB**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**30.697.756.750**		**6.364.193.217**		**8.656.385.854**		**2.807.114.771**		**32,43**		**9.171.307.988**		**29,88**	**DISHUB**	
	2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintah Daerah berjalan lancar dan tertib	Bulan	12	24.345.000.000	24	5.964.205.622	12	8.038.941.754	3	1.851.476.187	25	23,03	27	7.815.681.809	225	32,1	**DISHUB**	
	2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan)	Bulan	14	8.415.000.000	24	2.795.110.184	14	3.891.011.729	3	883.929.537	21,43	22,72	27	3.679.039.721	192,86	43,72	**DISHUB**	
	2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya (%)	%	100	370.000.000	0	115.244.304	15	5.100.000	0	0	0	0	0	115.244.304	0	31,15	**DISHUB**	
			Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap (%)	%	100		100		64		0		0		100		100		**DISHUB**	
	2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya sarana dan prasarana Administrasi umum Perkantoran (bulan)	Bulan	12	920.000.000	12	40.652.744	12	32.042.025	12	0	100	0	24	40.652.744	200	4,42	**DISHUB**	
	2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan (bl	Bulan	12	0	12	0	12	0	12	0	100	nan	24	0	200	nan	**DISHUB**	
	2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum (bulan)	Bulann	12	12.930.000.000	12	2.984.080.540	12	4.068.288.000	0	951.580.050	0	23,39	12	3.935.660.590	100	30,44	**DISHUB**	
	2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya sarana dan prasarana Administrasi umum Perkantoran (bulan)	Bulan	12	1.710.000.000	12	29.117.850	12	42.500.000	0	15.966.600	0	37,57	12	45.084.450	100	2,64	**DISHUB**	
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)	%	1	5.652.756.750	54.33	387.987.595	100	579.444.100	54.33	955.638.584	54,33	164,92	108.66	1.343.626.179	10.866,00	23,77	**DISHUB**	
	2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia (%)	%	80	4.470.000.000	1	315.866.195	65	520.844.100	65	950.108.584	100	182,42	66	1.265.974.779	82,5	28,32	**DISHUB**	
	2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Persentase kendaraan yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor (%)	%	70	220.000.000	50	22.500.000	20	25.000.000	20	0	100	0	70	22.500.000	100	10,23	**DISHUB**	
	2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu**	Persentase angka kecelakaan lalu lintas perseribu kendaraan	%	3	962.756.750	3	49.621.400	3	33.600.000	3	5.530.000	100	16,46	6	55.151.400	200	5,73	**DISHUB**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	-Persentase sarana prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)	%	100	700.000.000	100	12.000.000	90	38.000.000	100	0	111,11	0	200	12.000.000	200	1,71	DISHUB	
	2.15.05.2.05	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	700.000.000	0	12.000.000	0	38.000.000	0	0	nan	0	0	12.000.000	nan	1,71	DISHUB	
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.149.970.312		809.463.380		723.470.268		163.313.749		22,57		972.777.129		30,88	DISHUB	
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				3.149.970.312		809.463.380		723.470.268		163.313.749		22,57		972.777.129		30,88	DISHUB	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	12	3.149.970.312	12	809.463.380	-	723.470.268	3	163.313.749	inf	22,57	15	972.777.129	125	30,88	DISHUB	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12	3.149.970.312	24	809.463.380	0	723.470.268	3	163.313.749	inf	22,57	27	972.777.129	225	30,88	DISHUB	
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					14.379.277.943		3.363.065.013		5.329.670.434		1.122.448.713		21,06		4.485.513.726		31,19	DISKOMINFO	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.379.277.943		3.363.065.013		5.329.670.434		1.122.448.713		21,06		4.485.513.726		31,19	DISKOMINFO	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				14.034.680.959		3.329.198.013		5.252.261.734		1.121.220.713		21,35		4.450.418.726		31,71	DISKOMINFO	
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	%	100	14.018.130.959	100	3.325.302.013	100	4.038.818.434	0	929.226.213	0	23,01	100	4.254.528.226	100	30,35	DISKOMINFO	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	32.050.000	100	3.942.000	100	1.723.000	0	0	0	0	100	3.942.000	100	12,3	DISKOMINFO	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	9.891.843.959	100	2.542.619.844	100	3.423.634.688	25	792.173.870	25	23,14	125	3.334.793.714	125	33,71	DISKOMINFO	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian perangkat daerah	%	100	188.672.000	160	21.044.714	100	14.320.000	0	0	0	0	160	21.044.714	160	11,15	DISKOMINFO	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi Umum perangkat daerah	%	100	1.746.465.000	100	360.056.878	100	148.944.405	36.36	36.918.400	36,36	24,79	136.36	396.975.278	136,36	22,73	DISKOMINFO	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.327.650.000	100	353.173.727	100	378.298.341	28	72.546.743	28	19,18	128	425.720.470	128	32,07	DISKOMINFO	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	831.450.000	138.34	44.464.850	100	71.898.000	61.54	27.587.200	61,54	38,37	199.88	72.052.050	199,88	8,67	DISKOMINFO	
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota	%	100	0	77	0	100	268.119.700	8.1	16.819.500	8,1	6,27	85.1	16.819.500	85,1	inf	DISKOMINFO	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) Dan SOP Yang Ditetapkan	%	85	0	75	0	85	268.119.700	33	16.819.500	38,82	6,27	108	16.819.500	127,06	inf	DISKOMINFO	
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	(Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/Jumla h Layanan Publik)	%	80	16.550.000	100	3.896.000	75	945.323.600	74	175.175.000	98,67	18,53	174	179.071.000	217,5	1.082,00	DISKOMINFO	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			85	16.550.000	99.97	3.896.000	0	0	0	0	nan	nan	99.97	3.896.000	117,61	23,54	DISKOMINFO	
			Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Portal dan Situs Web Yang Sesuai Standar	%	85		99.97		85		0		0		99.97		117,61		DISKOMINFO	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	85	0	59.05	0	85	945.323.600	9.5	175.175.000	11,18	18,53	68.55	175.175.000	80,65	inf	DISKOMINFO	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.379.277.943		3.363.065.013		5.329.670.434		1.122.448.713		21,06		4.485.513.726		31,19	DISKOMINFO	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				0		0		61.115.150		1.228.000		2,01		1.228.000		inf	DISKOMINFO	
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	"Ketersediaan Buku ""Kota Sawahlunto Dalam Angka"""	Ada/Tidak ada	0	0	0	0	Ada	61.115.150	0	1.228.000	nan	2,01	0	1.228.000	nan	inf	DISKOMINFO	
			"Ketersediaan Buku "" PDRB Kota Sawahlunto"	Ada/Tidak ada	0		0		Ada		0		nan		0		nan		DISKOMINFO	
			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak ada	0		0		Ada		1		inf		1		inf		DISKOMINFO	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya buku profil daerah	Dokumen	9	0	7	0	9	61.115.150	0	1.228.000	0	2,01	7	1.228.000	77,78	inf	DISKOMINFO	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.379.277.943		3.363.065.013		5.329.670.434		1.122.448.713		21,06		4.485.513.726		31,19	DISKOMINFO	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				344.596.984		33.867.000		16.293.550		0		0		33.867.000		9,83	DISKOMINFO	
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Titik yang Diamankan Dibandingkan dengan Seluruh Titik Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang Ditetapkan	%	70	344.596.984	100	33.867.000	65	16.293.550	100	0	153,85	0	200	33.867.000	285,71	9,83	DISKOMINFO	
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		200		200		DISKOMINFO	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	60	301.332.470	96.33	20.671.100	20	13.838.700	5	0	25	0	101.33	20.671.100	168,88	6,86	DISKOMINFO	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	%	20	43.264.514	20	13.195.900	20	2.454.850	0	0	0	0	20	13.195.900	100	30,5	DISKOMINFO	
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					15.334.825.000		14.354.499.619		9.296.328.859		1.991.773.711		21,43		16.346.273.330		106,6	DISKOPERINDAG	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.254.825.000		6.684.608.383		8.990.342.184		1.933.273.711		21,5		8.617.882.094		76,57	DISKOPERINDAG	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				11.254.825.000		6.684.608.383		8.990.342.184		1.933.273.711		21,5		8.617.882.094		76,57	DISKOPERINDAG	
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	%	100	10.689.825.000	100	6.416.345.683	100	8.769.502.184	25	1.798.234.991	25	20,51	125	8.214.580.674	125	76,84	DISKOPERINDAG	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	10.825.000	14	4.424.442.035	14	6.805.151.469	4	1.336.520.480	28,57	19,64	18	5.760.962.515	128,57	53.219,05	DISKOPERINDAG	
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	Orang	27	630.000.000	10	8.630.000	27	1.300.000	0	0	0	0	10	8.630.000	37,04	1,37	DISKOPERINDAG	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Perkantoran berjalan Lacar dan tertib	Bulan	12	2.449.000.000	12	254.927.184	12	358.384.315	3	13.418.500	25	3,74	15	268.345.684	125	10,96	DISKOPERINDAG	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik dan Layak pakai	Bulan	12	6.265.000.000	12	1.567.552.685	12	1.482.366.800	3	433.419.301	25	29,24	15	2.000.971.986	125	31,94	DISKOPERINDAG	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	1.335.000.000	12	160.793.779	12	122.299.600	3	14.876.710	25	12,16	15	175.670.489	125	13,16	DISKOPERINDAG	
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	%	52	310.000.000	50.72	3.761.800	52	19.940.000	0	1.018.400	0	5,11	50.72	4.780.200	97,54	1,54	DISKOPERINDAG	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP USP yang mempunya i laporan keuangan yang sehat	%	18	310.000.000	18.84	3.761.800	17	19.940.000	0	1.018.400	0	5,11	18.84	4.780.200	104,67	1,54	DISKOPERINDAG	
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha	%	47	255.000.000	32.56	264.500.900	47	200.900.000	0	134.020.320	0	66,71	32.56	398.521.220	69,28	156,28	DISKOPERINDAG	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang difasilitasi	%	4	255.000.000	1.8	264.500.900	4	200.900.000	0	134.020.320	0	66,71	1.8	398.521.220	45	156,28	DISKOPERINDAG	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.080.000.000		7.669.891.236		305.986.675		58.500.000		19,12		7.728.391.236		189,42	DISKOPERINDAG	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.680.000.000		7.055.580.936		162.860.575		58.500.000		35,92		7.114.080.936		423,46	DISKOPERINDAG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya	%	2	1.680.000.000	2.2	7.055.580.936	2	162.860.575	0	58.500.000	0	35,92	2.2	7.114.080.936	110	423,46	DISKOPERINDAG	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan industri	%	50	1.680.000.000	50	7.055.580.936	50	162.860.575	0	58.500.000	0	35,92	50	7.114.080.936	100	423,46	DISKOPERINDAG	
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0		0		0		0		nan		0		nan	DISKOPERINDAG	
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0		nan		0		nan	DISKOPERINDAG	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.080.000.000		7.669.891.236		305.986.675		58.500.000		19,12		7.728.391.236		189,42	DISKOPERINDAG	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.400.000.000		614.310.300		143.126.100		0		0		614.310.300		25,6	DISKOPERINDAG	
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	tan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C	%	14	1.500.000.000	14	569.310.300	14	110.399.800	14	0	100	0	28	569.310.300	200	37,95	DISKOPERINDAG	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola/ pengurus	%	80	1.500.000.000	80	569.310.300	80	110.399.800	80	0	100	0	160	569.310.300	200	37,95	DISKOPERINDAG	
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional	%	80	300.000.000	0	0	80	13.126.300	80	0	100	0	80	0	100	0	DISKOPERINDAG	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase item barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disurvei	%	80	300.000.000	0	0	80	13.126.300	80	0	100	0	80	0	100	0	DISKOPERINDAG	
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk unggulan yang diekspor	%	50	600.000.000	50	45.000.000	50	19.600.000	50	0	100	0	100	45.000.000	200	7,5	DISKOPERINDAG	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis produk unggulan yang dipromosikan	Jenis Produk	10	600.000.000	10	45.000.000	8	19.600.000	8	0	100	0	18	45.000.000	180	7,5	DISKOPERINDAG	
13	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA					18.399.507.269		4.791.562.062		5.829.663.447		1.263.111.734		21,67		6.054.673.796		32,91	DPMPTSP NAKER	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.399.507.269		4.791.562.062		5.829.663.447		1.263.111.734		21,67		6.054.673.796		32,91	DPMPTSP NAKER	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				457.314.900		0		159.956.200		12.661.230		7,92		12.661.230		2,77	DPMPTSP NAKER	
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERAKSES PUBLIK	%	100	457.314.900	100	0	100	159.956.200	25	12.661.230	25	7,92	125	12.661.230	125	2,77	DPMPTSP NAKER	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Ketersediaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan	%	100	457.314.900	100	0	100	159.956.200	25	12.661.230	25	7,92	125	12.661.230	125	2,77	DPMPTSP NAKER	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**18.399.507.269**		**4.791.562.062**		**5.829.663.447**		**1.263.111.734**		**21,67**		**6.054.673.796**		**32,91**	**DPMPTSP NAKER**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**17.942.192.369**		**4.791.562.062**		**5.669.707.247**		**1.250.450.504**		**22,05**		**6.042.012.566**		**33,67**	**DPMPTSP NAKER**	
	2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERJALAN LANCAR DAN TERTIB	%	100	15.725.037.169	100	4.688.202.462	100	5.218.996.367	25	1.202.788.904	25	23,05	125	5.890.991.366	125	37,46	**DPMPTSP NAKER**	
	2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Terhadap Aliran Kas	%	95	10.400.000.000	96	3.485.191.669	95	4.282.038.967	28	1.000.385.062	29,47	23,36	124	4.485.576.731	130,53	43,13	**DPMPTSP NAKER**	
	2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Keadaan Baik	%	80	1.494.645.340	80	204.017.580	80	125.659.692	30	10.218.373	37,5	8,13	110	214.235.953	137,5	14,33	**DPMPTSP NAKER**	
	2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	%	80	3.274.239.879	80	860.368.633	80	761.358.108	20	185.218.969	25	24,33	100	1.045.587.602	125	31,93	**DPMPTSP NAKER**	
	2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Aset yang Terpelihara	%	100	556.151.950	100	138.624.580	100	49.939.600	15	6.966.500	15	13,95	115	145.591.080	115	26,18	**DPMPTSP NAKER**	
	2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA	%	100	150.000.000	100	0	100	15.410.980	0	0	0	0	100	0	100	0	**DPMPTSP NAKER**	
	2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	%	100	150.000.000	0	0	100	15.410.980	0	0	0	0	0	0	0	0	**DPMPTSP NAKER**	
	2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	PERSENTASE LULUSAN PELATIHAN YANG BERWIRAUSAHA	%	9	1.720.000.000	6.7	600.000	7	199.300.000	0	0	0	0	6.7	600.000	74,44	0,03	**DPMPTSP NAKER**	
	2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	85	1.720.000.000	64	600.000	83	199.300.000	0	0	0	0	64	600.000	75,29	0,03	**DPMPTSP NAKER**	
	2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN)	%	90	347.155.200	91	102.759.600	89	235.999.900	0	47.661.600	0	20,2	91	150.421.200	101,11	43,33	**DPMPTSP NAKER**	
	2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Peraturan Perusahaan Dan Perjanjian Kerja Bersama	%	85	347.155.200	60	102.759.600	85	235.999.900	0	47.661.600	0	20,2	60	150.421.200	70,59	43,33	**DPMPTSP NAKER**	
14	**DINAS KEBUDAYAAN**					**8.980.518.768**		**4.460.951.220**		**5.352.848.230**		**1.119.382.302**		**20,91**		**5.580.333.522**		**62,14**	**DINAS KEBUDAYAAN**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**8.980.518.768**		**4.460.951.220**		**5.352.848.230**		**1.119.382.302**		**20,91**		**5.580.333.522**		**62,14**	**DINAS KEBUDAYAAN**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**8.980.518.768**		**4.460.951.220**		**5.352.848.230**		**1.119.382.302**		**20,91**		**5.580.333.522**		**62,14**	**DINAS KEBUDAYAAN**	
	2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintah Daerah Berjalan Lancar dan Tertib	%	100	5.985.768.768	100	4.021.091.550	100	4.863.892.230	25	1.100.278.702	25	22,62	125	5.121.370.252	125	85,56	**DINAS KEBUDAYAAN**	
	2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	12	3.141.013.521	12	2.860.886.143	12	3.578.529.363	3	858.513.240	25	23,99	15	3.719.399.383	125	118,41	**DINAS KEBUDAYAAN**	
	2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	484.446.732	12	134.562.885	12	80.669.800	3	1.553.000	25	1,93	15	136.115.885	125	28,1	**DINAS KEBUDAYAAN**	
	2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	2.061.947.296	12	953.172.822	12	1.147.671.067	3	182.482.212	25	15,9	15	1.135.655.034	125	55,08	**DINAS KEBUDAYAAN**	
	2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	Bulan	12	298.361.219	12	72.469.700	12	57.022.000	2	57.730.250	16,67	101,24	14	130.199.950	116,67	43,64	**DINAS KEBUDAYAAN**	
	2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Pemajuan Kebudayaan yang Lestari	%	31.3	199.650.000	29	366.186.470	31,1	75.000.000	2.24	1.434.400	7,23	1,91	31.24	367.620.870	99,81	184,13	**DINAS KEBUDAYAAN**	
	2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	%	23.3	199.650.000	25	366.186.470	27	75.000.000	1.67	1.434.400	6,19	1,91	26.67	367.620.870	114,46	184,13	**DINAS KEBUDAYAAN**	
	2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Jumlah Kelompok Seni Tradisional yang Mandiri	Kelompok	13.6	665.500.000	13	24.864.000	13,6	334.000.000	0.09	2.669.200	0,69	0,8	13.09	27.533.200	96,25	4,14	**DINAS KEBUDAYAAN**	
	2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelompok seni yang dibina	%	100	665.500.000	98	24.864.000	100	334.000.000	0.68	2.669.200	0,68	0,8	98.68	27.533.200	98,68	4,14	**DINAS KEBUDAYAAN**	
	2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase cagar Budaya Yang Lestari	%	65	1.996.500.000	64	28.809.200	65	30.000.000	32.5	15.000.000	50	50	96.5	43.809.200	148,46	2,19	**DINAS KEBUDAYAAN**	
	2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Persentase cagar budaya yang dikelola	%	44.3	1.996.500.000	40	28.809.200	45	30.000.000	22.15	15.000.000	49,22	50	62.15	43.809.200	140,29	2,19	**DINAS KEBUDAYAAN**	
	2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Jumlah kunjungan museum	Orang	33500	133.100.000	27724	20.000.000	33500	49.956.000	4336	0	12,94	0	32060	20.000.000	95,7	15,03	**DINAS KEBUDAYAAN**	
	2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Jumlah museum yang meningkat pengelolaannya	Museum	50	133.100.000	56	20.000.000	60	49.956.000	6	0	10	0	62	20.000.000	124	15,03	**DINAS KEBUDAYAAN**	
15	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**					**3.440.575.057**		**3.379.875.658**		**4.432.652.286**		**930.146.396**		**20,98**		**4.310.022.054**		**125,27**	**DINAS PERPUS ARSIP**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.440.575.057**		**3.379.875.658**		**4.432.652.286**		**930.146.396**		**20,98**		**4.310.022.054**		**125,27**	**DINAS PERPUS ARSIP**	
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**55.536.300**		**63.228.750**		**55.988.800**		**0**		**0**		**63.228.750**		**113,85**	**DINAS PERPUS ARSIP**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		\N	12	46.256.000	0	46.019.250	\N	42.489.400	0	0	nan	0	0	46.019.250	0	99,49	**DINAS PERPUS ARSIP**	
			Terkelolanya Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12		0		12		0		0		0		0		**DINAS PERPUS ARSIP**	
			Tingkat ketersediaan arsip sbg bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah & pertanggungjawaban nasional (pasal 40 & pasal 59 UU no 43/2009 ttg kearsipan) (%)	%	79		0		50,6		0		0		0		0		**DINAS PERPUS ARSIP**	
	2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pengelolaan Arsip Dinamis	Berkas	25	33.129.000	0	32.997.250	0	21.499.800	0	0	nan	0	0	32.997.250	0	99,6	**DINAS PERPUS ARSIP**	
	2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengelolaan Arsip Statis	Berkas	5000	13.127.000	0	13.022.000	0	8.999.800	0	0	nan	0	0	13.022.000	0	99,2	**DINAS PERPUS ARSIP**	
	2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	-	-	0	0	0	0	0	11.989.800	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	**DINAS PERPUS ARSIP**	
	2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Terlaksananya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.	Bulan	12	9.280.300	6	17.209.500	12	13.499.400	0	0	0	0	6	17.209.500	50	185,44	**DINAS PERPUS ARSIP**	
			Tingkat keberadaan & keutuhan arsip sbg bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa & bernegara utk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik & kesejahteraan rakyat (%).	%	85		85		50,6		0		0		85		100		**DINAS PERPUS ARSIP**	
	2.24.03.2.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan	Berkas	3000	8.250.000	99.09	8.175.000	0	7.499.800	0	0	nan	0	99.09	8.175.000	3,3	99,09	**DINAS PERPUS ARSIP**	
	2.24.03.2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	Jumlah Autentikasi Arsip dan Arsip Alih Media	Arsip	3000	1.030.300	3	9.034.500	0	5.999.600	0	0	nan	0	3	9.034.500	0,1	876,88	**DINAS PERPUS ARSIP**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.440.575.057**		**3.379.875.658**		**4.432.652.286**		**930.146.396**		**20,98**		**4.310.022.054**		**125,27**	**DINAS PERPUS ARSIP**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**3.385.038.757**		**3.316.646.908**		**4.376.663.486**		**930.146.396**		**21,25**		**4.246.793.304**		**125,46**	**DINAS PERPUS ARSIP**	
	2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Perpustakaan)	%	96.07	3.339.118.757	35	3.270.861.708	100	3.816.903.586	20.3	844.731.900	20,3	22,13	55.3	4.115.593.608	57,56	123,25	**DINAS PERPUS ARSIP**	
	2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecukupan Modal,Likuiditas dan Profitibilitas	Bulan	12	2.661.715.182	15	2.661.715.182	14	3.248.345.137	4	751.095.629	28,57	23,12	19	3.412.810.811	158,33	128,22	**DINAS PERPUS ARSIP**	
	2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Urusan Pemerintahan Dearah berjalan tertib dan lancar	Bulan	12	0	12	0	0	9.960.000	0	0	nan	0	12	0	100	nan	**DINAS PERPUS ARSIP**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	208.340.593	12	201.448.799	0	104.234.120	12	1.935.000	inf	1,86	24	203.383.799	200	97,62	DINAS PERPUS ARSIP	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasiltasinya Penyedian Jasa Penunjang	Bulan	12	398.221.742	12	340.087.377	0	341.749.529	0	82.569.371	nan	24,16	12	422.656.748	100	106,14	DINAS PERPUS ARSIP	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Pengadan Barang	Bulan	12	70.841.240	12	67.610.350	0	112.614.800	0	9.131.900	nan	8,11	12	76.742.250	100	108,33	DINAS PERPUS ARSIP	
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan yang Di Kelola dan di Bina	Unit	108	45.920.000	108	45.785.200	108	559.759.900	0	85.414.496	0	15,26	108	131.199.696	100	285,71	DINAS PERPUS ARSIP	
			Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	74.5		94.81		74,5		0		0		94.81		127,26		DINAS PERPUS ARSIP	
			Nilai tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	%	51.5		67.45		51,5		0		0		67.45		130,97		DINAS PERPUS ARSIP	
			Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (%)	%	2		5		2		0.22		11		5.22		261		DINAS PERPUS ARSIP	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikelola dan Dibina	Unit	108	10.834.300	108	10.746.300	20	20.834.300	0	14.276.300	0	68,52	108	25.022.600	100	230,96	DINAS PERPUS ARSIP	
					0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PERPUS ARSIP	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan budaya membaca masyarakat	%	2	35.085.700	5	35.038.900	7	538.925.600	0.22	71.138.196	3,14	13,2	5.22	106.177.096	261	302,62	DINAS PERPUS ARSIP	
16	**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**					**30.716.271.759**		**13.983.529.496**		**9.040.268.599**		**1.670.643.318**		**18,48**		**15.654.172.814**		**50,96**	**DISPARPORA**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**13.985.267.214**		**7.582.228.449**		**7.123.410.391**		**1.334.089.162**		**18,73**		**8.916.317.611**		**63,76**	**DISPARPORA**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**13.985.267.214**		**7.582.228.449**		**7.123.410.391**		**1.334.089.162**		**18,73**		**8.916.317.611**		**63,76**	**DISPARPORA**	
	2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar dan Tertib	%	100	6.377.230.000	100	5.318.883.665	100	5.520.410.391	25	1.316.389.162	25	23,85	125	6.635.272.827	125	104,05	**DISPARPORA**	
	2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	12	3.600.000.000	12	2.742.024.733	12	3.280.454.684	3	831.564.960	25	25,35	15	3.573.589.693	125	99,27	**DISPARPORA**	
	2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	603.700.000	12	312.415.866	12	233.454.100	3	72.332.769	25	30,98	15	384.748.635	125	63,73	**DISPARPORA**	
	2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pengadaan Barang	Bulan	12	1.977.190.000	12	2.068.850.752	12	1.868.102.007	3	401.321.808	25	21,48	15	2.470.172.560	125	124,93	**DISPARPORA**	
	2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksanany a Belanja Pemeliharaan Kendaraan, Mobiler Kantor dan Gedung Kantor	Bulan	12	196.340.000	12	195.592.314	12	138.399.600	3	11.169.625	25	8,07	15	206.761.939	125	105,31	**DISPARPORA**	
	2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	Orang	18	2.582.840.000	18	697.323.000	17	145.000.000	0	0	0	0	18	697.323.000	100	27	**DISPARPORA**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Sawahlunto menjadi Utusan Pemuda Pelopor	Orang	1	1.990.640.000	1	650.250.000	1	97.000.000	0	0	0	0	1	650.250.000	100	32,67	DISPARPORA	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	Organisasi	1	592.200.000	1	47.073.000	1	48.000.000	0	0	0	0	1	47.073.000	100	7,95	DISPARPORA	
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/internasional	Atlet	160	3.866.697.214	160	1.294.128.284	155	1.383.000.000	17	12.500.000	10,97	0,9	177	1.306.628.284	110,63	33,79	DISPARPORA	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Sesuai Standar	Unit	1	1.990.129.429	1	897.569.159	6	478.000.000	0	0	0	0	1	897.569.159	100	45,1	DISPARPORA	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kejuaraan Olahraga TK. Kab/Kota yang Dilaksanakan dan Diikuti	Orang	0	0	0	0	100	245.000.000	17	12.500.000	17	5,1	17	12.500.000	inf	inf	DISPARPORA	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang Berprestasi	Orang	100	880.237.785	100	149.934.125	100	460.000.000	0	0	0	0	100	149.934.125	100	17,03	DISPARPORA	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terselenggar anya Kegiatan Olahraga Rekreasi dan Tradisional	Kegiatan	4	996.330.000	1	246.625.000	8	200.000.000	0	0	0	0	1	246.625.000	25	24,75	DISPARPORA	
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	%	79	1.158.500.000	75	271.893.500	77	75.000.000	15	5.200.000	19,48	6,93	90	277.093.500	113,92	23,92	DISPARPORA	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Dibina	Organisasi	2	1.158.500.000	2	271.893.500	2	75.000.000	1	5.200.000	50	6,93	3	277.093.500	150	23,92	DISPARPORA	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**16.731.004.545**		**6.401.301.047**		**1.916.858.208**		**336.554.156**		**17,56**		**6.737.855.203**		**40,27**	DISPARPORA	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**16.731.004.545**		**6.401.301.047**		**1.916.858.208**		**336.554.156**		**17,56**		**6.737.855.203**		**40,27**	DISPARPORA	
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul	%	60	13.901.511.809	60	5.873.941.032	55	1.423.258.208	20	335.558.156	36,36	23,58	80	6.209.499.188	133,33	44,67	DISPARPORA	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Berkembangn ya Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Destinasi	1	0	0	0	1	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	DISPARPORA	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Kawasan Strategis Pariwisata	Kawasan	2	5.546.625.000	3	405.879.615	2	190.000.000	0	480.000	0	0,25	3	406.359.615	150	7,33	DISPARPORA	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang Terkelola	Destinasi	3	7.553.871.809	3	4.921.922.417	3	1.193.258.208	1	185.978.156	33,33	15,59	4	5.107.900.573	133,33	67,62	DISPARPORA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	10	801.015.000	10	546.139.000	10	40.000.000	1	149.100.000	10	372,75	11	695.239.000	110	86,79	DISPARPORA	
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kepuasan pengunjung	%	80	2.374.161.880	70	480.727.615	75	443.600.000	0	996.000	0	0,22	70	481.723.615	87,5	20,29	DISPARPORA	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	160000	2.374.161.880	160000	480.727.615	160000	443.600.000	26073	996.000	16,3	0,22	186073	481.723.615	116,3	20,29	DISPARPORA	
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI	%	3	30.070.000	0	0	2	0	0	0	0	nan	0	0	0	0	DISPARPORA	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mandiri	Orang	40	30.070.000	0	0	40	0	0	0	0	nan	0	0	0	0	DISPARPORA	
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional	%	30	425.260.856	20	46.632.400	25	50.000.000	0	0	0	0	20	46.632.400	66,67	10,97	DISPARPORA	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Ekraf	Orang	20	328.479.000	20	46.632.400	20	30.000.000	0	0	0	0	20	46.632.400	100	14,2	DISPARPORA	
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang Berbadan Usaha	Orang	2	96.781.856	0	0	2	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPARPORA	
17	SEKRETARIAT DAERAH					138.807.854.995		29.369.550.655		34.457.174.994		6.378.307.159		18,51		35.747.857.814		25,75	SETDAKO	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				138.807.854.995		29.369.550.655		34.457.174.994		6.378.307.159		18,51		35.747.857.814		25,75	SETDAKO	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				138.807.854.995		29.369.550.655		34.457.174.994		6.378.307.159		18,51		35.747.857.814		25,75	SETDAKO	
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintah yang berjalan lancar dan tertib	%	100	88.598.138.840	240.59	19.822.712.833	100	24.712.532.924	25	4.818.625.590	25	19,5	265.59	24.641.338.423	265,59	27,81	SETDAKO	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bulan	36	30.000.000	12	1.710.000	12	4.508.000	12	0	100	0	24	1.710.000	66,67	5,7	SETDAKO	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	Bulan	36	35.754.231.893	12	10.996.484.147	12	11.765.949.042	3	3.163.767.401	25	26,89	15	14.160.251.548	41,67	39,6	SETDAKO	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian	Bulan	36	423.000.000	12	161.659.552	12	59.508.000	0	0	0	0	12	161.659.552	33,33	38,22	SETDAKO	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	Bulan	36	15.920.480.343	12	3.322.431.147	12	2.391.648.620	3	696.574.785	25	29,13	15	4.019.005.932	41,67	25,24	SETDAKO	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan penunjang kegiatan	Unit	105	1.660.000.000	3	175.851.750	35	2.835.434.700	0	0	0	0	3	175.851.750	2,86	10,59	SETDAKO	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	Bulan	36	12.050.391.032	12	2.173.361.791	12	2.257.515.620	3	459.229.364	25	20,34	15	2.632.591.155	41,67	21,85	SETDAKO	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	Bulan	36	7.637.076.000	12	1.211.763.120	12	1.761.964.500	3	139.375.245	25	7,91	15	1.351.138.365	41,67	17,69	SETDAKO	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah	Bulan	36	2.528.595.576	12	498.432.061	12	1.429.409.760	3	99.847.950	25	6,99	15	598.280.011	41,67	23,66	SETDAKO	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana kepala daerah dan sekretaris daerah	Bulan	36	2.149.788.216	12	422.943.770	12	643.766.932	3	60.935.675	25	9,47	15	483.879.445	41,67	22,51	SETDAKO	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah laporan AKIP dan RB yang disusun	2	6	1.191.000.000	2	69.953.677	2	195.562.000	1	33.450.200	50	17,1	3	103.403.877	50	8,68	SETDAKO	
			Jumlah kelembagaan yang mengacu pada aturan terbaru	27	27		27		27		0		0		27		100		SETDAKO	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya pendokumentasi kegiatan kepala daerah	laporan	36	9.253.575.780	12	788.121.818	12	1.367.265.750	3	165.444.970	25	12,1	15	953.566.788	41,67	10,3	SETDAKO	
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	47.137.216.155	240	9.241.354.120	100	9.405.084.600	10	1.528.594.119	10	16,25	250	10.769.948.239	250	22,85	SETDAKO	
			Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi	%	100		140		100		40		40		180		180		SETDAKO	
			Jumlah Hafidz Al Quran (Orang)	Orang	700		1304		650		1234		189,85		2538		362,57		SETDAKO	
			Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto	Miliar	6.58		5.89		6,17		0.77		12,83		6.66		101,22		SETDAKO	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	%	90	1.120.800.100	270.45	199.049.650	85	363.750.940	15	65.460.000	17,65	18	285.45	264.509.650	317,17	23,6	SETDAKO	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kerja bidang keagamaan	%	90	40.282.867.055	216	8.831.398.370	80	8.714.166.100	33.33	1.460.146.459	41,66	16,76	249.33	10.291.544.829	277,03	25,55	SETDAKO	
			Persentase capaian Kesra kerja bidang kesejahteraan Sosial	%	80		200		75		16.67		22,23		216.67		270,84		SETDAKO	
			Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan masyarakat	%	90		225		85		25		29,41		250		277,78		SETDAKO	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%	90	1.399.194.000	139.3	115.906.100	85	232.167.560	43	2.987.660	50,59	1,29	182.3	118.893.760	202,56	8,5	SETDAKO	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian/realisasi Anggaran Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	95	4.334.355.000	235	95.000.000	90	95.000.000	0	0	0	0	235	95.000.000	247,37	2,19	SETDAKO	
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	67	3.072.500.000	79.73	305.483.702	66	339.557.470	0	31.087.450	0	9,16	79.73	336.571.152	119	10,95	SETDAKO	
			Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	%	37		126.95		0,36		11		inf		137.95		372,84		SETDAKO	
			Persentase kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi (%)-	%	100		210		100		25		25		235		235		SETDAKO	
			Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0		0		0		0		nan		0		nan		SETDAKO	
			Persentase kegiatan pembangunan yang terserap (%)	%	96		207.05		94		26.64		28,34		233.69		243,43		SETDAKO	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD, BLUD dan Lembaga Keuangan yang berkinerja sehat dan Menguntungkan	%	100	1.139.500.000	80	123.476.700	100	114.399.720	0	3.562.000	0	3,11	80	127.038.700	80	11,15	SETDAKO	
			Persentase peningkatan pengawasan dan pengendalian inflasi Daerah	%	100		228		100		0		0		228		228		SETDAKO	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Penyusunan Laporan Kota dan Setdako yang tepat waktu (%)	%	100	744.162.600	241.01	1.987.500	90	24.172.000	25	280.000	27,78	1,16	266.01	2.267.500	266,01	0,3	SETDAKO	
			Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berkualitas (%)	%	100		370.06		90		25		27,78		395.06		395,06		SETDAKO	
			Persentase Capaian fisik kegiatan pembangunan kota yang optimal (%)	%	100		207.1		98		26.64		27,18		233.74		233,74		SETDAKO	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ oleh LKPP (Level)	Level	4	828.837.400	3	168.361.702	4	188.582.640	0	25.033.450	0	13,27	3	193.395.152	75	23,33	SETDAKO	
			Persentase Nilai Capaian Pemberantasan Korupsi Terintegras Pengadaan Barang/Jasa oleh KPK (%)	100	100		77.74		100		0		0		77.74		77,74		SETDAKO	
			Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diproses pada UKPBJ (paket)	Paket	1875		3063		625		190		30,4		3253		173,49		SETDAKO	
			Jumlah Laporan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi secara elektronik (Laporan)	12	12		4		4		1		25		5		41,67		SETDAKO	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan daerah serta pengelolaan di bidang SDA Pertanian, Kehutana, Kelautan, dan Perikanan, Pertambangan,Energi, LH dan Air	%	100	360.000.000	100	11.657.800	100	12.403.110	0	2.212.000	0	17,83	100	13.869.800	100	3,85	SETDAKO	
18	**SEKRETARIAT DPRD**					**68.875.450.000**		**29.853.880.009**		**21.289.551.233**		**4.008.454.855**		**18,83**		**33.862.334.864**		**49,16**	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**68.875.450.000**		**29.853.880.009**		**21.289.551.233**		**4.008.454.855**		**18,83**		**33.862.334.864**		**49,16**	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**68.875.450.000**		**29.853.880.009**		**21.289.551.233**		**4.008.454.855**		**18,83**		**33.862.334.864**		**49,16**	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Sekretariat DPRD)	%	100	18.066.950.000	100	14.100.352.268	100	15.905.378.233	100	1.099.268.121	100	6,91	200	15.199.620.389	200	84,13	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	43.030.000	100	9.958.772.605	100	10.750.100.734	100	619.416.543	100	5,76	200	10.578.189.148	200	24.583,29	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian perangkat daerah	%	100	496.500.000	100	100.000	100	9.900.000	0	0	0	0	100	100.000	100	0,02	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	%	100	2.247.700.000	100	779.052.461	100	657.227.700	100	9.977.145	100	1,52	200	789.029.606	200	35,1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	3.986.000.000	100	176.353.311	100	2.258.910.000	0	0	0	0	100	176.353.311	100	4,42	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3.763.470.000	100	1.028.666.984	100	957.842.499	100	219.601.268	100	22,93	200	1.248.268.252	200	33,17	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.730.750.000	100	686.880.640	100	455.670.000	100	205.208.080	100	45,03	200	892.088.720	200	32,67	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	100	2.317.000.000	100	445.578.000	100	285.000.000	100	6.000.000	100	2,11	200	451.578.000	200	19,49	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	%	100	2.482.500.000	100	1.024.948.267	100	530.727.300	100	39.065.085	100	7,36	200	1.064.013.352	200	42,86	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	50.808.500.000	100	15.753.527.741	100	5.384.173.000	25	2.909.186.734	25	54,03	125	18.662.714.475	125	36,73	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase Perda yang Ditetapkan	%	100	662.000.000	0	0	100	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Terlaksananya rapat pembahasan	dokumen	100	910.250.000	12	192.693.500	5	220.710.000	0	0	0	0	12	192.693.500	12	21,17	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	%	100	6.702.750.000	400	724.195.438	100	1.058.163.000	25	50.332.653	25	4,76	425	774.528.091	425	11,56	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase terhimpunnya aspirasi masyarakat	%	100	1.158.500.000	200	95.120.000	100	225.300.000	0	0	0	0	200	95.120.000	200	8,21	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	%	100	41.375.000.000	12	14.741.518.803	100	3.750.000.000	25	2.858.854.081	25	76,24	37	17.600.372.884	37	42,54	**SEKRETARIAT DPRD**	
19	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**					**22.918.715.483**		**5.972.875.638**		**6.883.214.171**		**1.578.170.349**		**22,93**		**7.551.045.987**		**32,95**	**BARENLITBANGDA**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**22.918.715.483**		**5.972.875.638**		**6.883.214.171**		**1.578.170.349**		**22,93**		**7.551.045.987**		**32,95**	**BARENLITBANGDA**	
	5.01	**PERENCANAAN**				**2.886.576.039**		**258.659.642**		**545.295.010**		**28.765.960**		**5,28**		**287.425.602**		**9,96**	**BARENLITBANGDA**	
	5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib	%	100	93.489.420	100	38.997.000	100	13.452.000	0	0	0	0	100	38.997.000	100	41,71	**BARENLITBANGDA**	
	5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	9	93.489.420	6	38.997.000	100	13.452.000	0	0	0	0	6	38.997.000	66,67	41,71	**BARENLITBANGDA**	
	5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase konsistensi program RPJMD/RPD ke dalam RKPD	Persen	100	1.710.282.090	100	104.636.902	100	336.366.100	0	11.254.000	0	3,35	100	115.890.902	100	6,78	**BARENLITBANGDA**	
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Persen	100		94.89		100		0		0		94.89		94,89		**BARENLITBANGDA**	
	5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan pendanaan	Dokumen	9	895.282.090	4	94.161.124	4	315.961.700	0	10.720.000	0	3,39	4	104.881.124	44,44	11,71	**BARENLITBANGDA**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah	Dokumen	3	570.000.000	1	2.943.900	1	7.628.000	0	0	0	0	1	2.943.900	33,33	0,52	BARENLITBANGDA	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase optimalisasi pengendalian evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persen	100	245.000.000	100	7.531.878	85	12.776.400	0	534.000	0	4,18	100	8.065.878	100	3,29	BARENLITBANGDA	
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan kebijakan/perencanaan pembangunan	%	100	1.082.804.529	0	115.025.740	100	195.476.910	0	17.511.960	0	8,96	0	132.537.700	0	12,24	BARENLITBANGDA	
			Persentase kesesuain capaian kinerja perencanaan pembangunan bidang mitra	%	100		94.89		100		0		0		94.89		94,89		BARENLITBANGDA	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	9	214.682.140	4	24.452.000	3	54.464.070	0	4.686.800	0	8,61	4	29.138.800	44,44	13,57	BARENLITBANGDA	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pengendalian dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor perekonomian dan SDA	Dokumen	9	596.859.250	4	43.849.640	4	69.835.230	0	2.444.960	0	3,5	4	46.294.600	44,44	7,76	BARENLITBANGDA	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	9	271.263.139	4	46.724.100	3	71.177.610	0	10.380.200	0	14,58	4	57.104.300	44,44	21,05	BARENLITBANGDA	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				22.918.715.483		5.972.875.638		6.883.214.171		1.578.170.349		22,93		7.551.045.987		32,95	BARENLITBANGDA	
	5.03	KEPEGAWAIAN				19.282.139.444		5.668.724.611		6.221.433.161		1.549.404.389		24,9		7.218.129.000		37,43	BARENLITBANGDA	
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib	(%)	100	19.282.139.444	100	5.668.724.611	100	6.221.433.161	25	1.549.404.389	25	24,9	125	7.218.129.000	125	37,43	BARENLITBANGDA	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	%	100	22.000.000	100	2.612.000	100	2.620.000	0	0	0	0	100	2.612.000	100	11,87	BARENLITBANGDA	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	34	15.489.266.344	44	4.890.286.786	100	5.414.277.445	43	1.471.477.096	43	27,18	87	6.361.763.882	255,88	41,07	BARENLITBANGDA	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	200.000.000	100	0	100	50.000.000	0	0	0	0	100	0	100	0	BARENLITBANGDA	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.632.986.900	100	475.927.236	100	375.290.940	25	35.964.947	25	9,58	125	511.892.183	125	31,35	BARENLITBANGDA	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.090.146.000	100	161.653.728	100	171.480.776	25	34.484.246	25	20,11	125	196.137.974	125	17,99	BARENLITBANGDA	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik	%	100	847.740.200	100	138.244.861	100	207.764.000	0	7.478.100	0	3,6	100	145.722.961	100	17,19	BARENLITBANGDA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				22.918.715.483		5.972.875.638		6.883.214.171		1.578.170.349		22,93		7.551.045.987		32,95	BARENLITBANGDA	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				750.000.000		45.491.385		116.486.000		0		0		45.491.385		6,07	BARENLITBANGDA	
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan kebijakan/perencanaan pembangunan	%	100	750.000.000	100	45.491.385	100	116.486.000	0	0	0	0	100	45.491.385	100	6,07	BARENLITBANGDA	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen dukungan inovasi	Dokumen	3	750.000.000	1	45.491.385	1	116.486.000	0	0	0	0	1	45.491.385	33,33	6,07	BARENLITBANGDA	
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					229.062.949.812		78.099.477.427		78.152.957.818		24.869.110.805		31,82		102.968.588.232		44,95	BPKAD	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				229.062.949.812		78.099.477.427		78.152.957.818		24.869.110.805		31,82		102.968.588.232		44,95	BPKAD	
	5.02	KEUANGAN				229.062.949.812		78.099.477.427		78.152.957.818		24.869.110.805		31,82		102.968.588.232		44,95	BPKAD	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB	%	100	29.826.847.559	100	8.624.410.320	100	8.121.129.839	25	2.020.800.895	25	24,88	125	10.645.211.215	125	35,69	BPKAD	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan	%	100	51.570.120	100	6.823.600	100	9.435.200	25	400.000	25	4,24	125	7.223.600	125	14,01	BPKAD	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Terhadap Aliran Kas	%	95	20.467.120.249	95	5.897.446.662	95	6.349.296.144	28	1.766.608.453	29,47	27,82	123	7.664.055.115	129,47	37,45	BPKAD	
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Barang Milik Daerah	%	100	8.000.000	100	0	100	2.030.000	0	0	0	0	100	0	100	0	BPKAD	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Berkapasitas	%	100	331.268.000	90	88.368.000	100	144.360.000	0	0	0	0	90	88.368.000	90	26,68	BPKAD	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kondisi Sarana Dan Prasarana Kantor Dalam Keadaan Baik	%	80	3.068.093.571	80	1.064.979.004	80	556.535.600	12.85	71.497.930	16,06	12,85	92.85	1.136.476.934	116,06	37,04	BPKAD	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kantor Dalam Keadaan Baik	%	100	1.822.142.688	85	651.800.000	100	5.680.950	85	13.209.000	85	232,51	170	665.009.000	170	36,5	BPKAD	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Perkantoran Yang Terfasilitasi Dengan Baik	%	80	3.070.813.571	80	676.633.902	80	833.126.145	14.21	118.405.297	17,76	14,21	94.21	795.039.199	117,76	25,89	BPKAD	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset Yang Terpelihara	%	100	1.007.839.360	100	238.359.152	100	220.665.800	22.97	50.680.215	22,97	22,97	122.97	289.039.367	122,97	28,68	BPKAD	
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)	Indeks	78	194.891.284.050	70.79	68.626.519.932	77	69.194.437.577	0	22.769.098.187	0	32,91	70.79	91.395.618.119	90,76	46,9	BPKAD	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	Tepat Waktu	100	3.002.275.675	100	708.056.078	0	873.006.300	0	84.810.605	nan	9,71	100	792.866.683	100	26,41	BPKAD	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4	823.501.608	3.5	241.675.882	4	154.523.090	0	52.145.925	0	33,75	3.5	293.821.807	87,5	35,68	BPKAD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	%	100	542.435.830	100	146.322.575	100	114.632.000	25	14.039.375	25	12,25	125	160.361.950	125	29,56	BPKAD	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Urusan Kewenangan Daerah Dan Bantuan Yang Tersalurkan	%	100	190.321.260.937	100	67.471.255.397	100	67.998.976.187	33.26	22.618.102.282	33,26	33,26	133.26	90.089.357.679	133,26	47,34	BPKAD	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual	Ada	0	201.810.000	100	59.210.000	0	53.300.000	0	0	nan	0	100	59.210.000	inf	29,34	BPKAD	
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE OPD DENGAN LAPORAN BMD YANG AKURAT DAN AKUNTABEL	%	95	2.535.584.225	89.29	262.252.620	95	409.210.736	0	21.185.715	0	5,18	89.29	283.438.335	93,99	11,18	BPKAD	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kesesuaian Pencatatan Dan Pelaporan BMD Sesuai Aturan	%	90	2.535.584.225	267.87	262.252.620	90	409.210.736	0	21.185.715	0	5,18	267.87	283.438.335	297,63	11,18	BPKAD	
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH	%	12.43	1.809.233.978	10.24	586.294.555	12,35	428.179.666	0.02	58.026.008	0,17	13,55	10.26	644.320.563	82,54	35,61	BPKAD	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	1.5	1.809.233.978	1.01	586.294.555	1	428.179.666	0	58.026.008	0	13,55	1.01	644.320.563	67,33	35,61	BPKAD	
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					24.259.180.474		4.265.969.934		6.080.946.140		1.108.968.241		18,24		5.374.938.175		22,16	BKPSDM	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				24.240.700.474		4.265.469.934		6.080.446.140		1.108.968.241		18,24		5.374.438.175		22,17	BKPSDM	
	5.03	KEPEGAWAIAN				24.240.700.474		4.265.469.934		6.080.446.140		1.108.968.241		18,24		5.374.438.175		22,17	BKPSDM	
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib	persen	100	20.197.434.445	97.46	3.833.354.887	100	4.834.059.660	24.47	1.101.688.241	24,47	22,79	121.93	4.935.043.128	121,93	24,43	BKPSDM	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	17.268.014.445	98.64	3.438.895.839	100	4.409.645.691	25.76	1.045.858.226	25,76	23,72	124.4	4.484.754.065	124,4	25,97	BKPSDM	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	1.593.584.000	84.26	111.906.564	100	98.926.400	10.24	14.688.750	10,24	14,85	94.5	126.595.314	94,5	7,94	BKPSDM	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	1.003.239.000	98.03	227.276.284	100	246.637.969	16.59	39.341.265	16,59	15,95	114.62	266.617.549	114,62	26,58	BKPSDM	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	332.597.000	67.34	55.276.200	100	78.849.600	24.47	1.800.000	24,47	2,28	91.81	57.076.200	91,81	17,16	BKPSDM	
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Rasio	0.4	4.043.266.029	1.5	432.115.047	80	1.246.386.480	0.57	7.280.000	0,71	0,58	2.07	439.395.047	517,5	10,87	BKPSDM	
			Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Rasio	0.26		0.76		0.25		0.24		96		1		384,62		BKPSDM	
			Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Rasio	3		11.15		2.95		4.17		141,36		15.32		510,67		BKPSDM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ketercapaian pengadaan,pemberhentian dan informasi kepegawaian	persentase	100	141.213.149	94.26	16.467.104	100	23.419.000	6.69	7.280.000	6,69	31,09	100.95	23.747.104	100,95	16,82	BKPSDM	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ketercapaian pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	%	100	1.020.000.000	17.27	18.413.000	100	105.960.000	0	0	0	0	17.27	18.413.000	17,27	1,81	BKPSDM	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ketercapaian pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN	%	100	2.544.132.000	66.42	397.234.943	100	1.043.189.080	0	0	0	0	66.42	397.234.943	66,42	15,61	BKPSDM	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ketercapaian pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja aparatur	%	100	337.920.880	0	0	100	73.818.400	0	0	0	0	0	0	0	0	BKPSDM	
	X	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**18.480.000**		**500.000**		**500.000**		**0**		**0**		**500.000**		**2,71**	**BKPSDM**	
	X.XX	**PENUNJANG URUSAN**				**18.480.000**		**500.000**		**500.000**		**0**		**0**		**500.000**		**2,71**	**BKPSDM**	
	X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib	persen	100	18.480.000	98.03	500.000	100	500.000	0	0	0	0	98.03	500.000	98,03	2,71	BKPSDM	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100	18.480.000	98.03	500.000	0	500.000	0	0	nan	0	98.03	500.000	98,03	2,71	BKPSDM	
22	**INSPEKTORAT**					**24.772.814.802**		**5.966.511.012**		**7.001.430.647**		**2.166.547.539**		**30,94**		**8.133.058.551**		**32,83**	**INSPEKTORAT**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**24.772.814.802**		**5.966.511.012**		**7.001.430.647**		**2.166.547.539**		**30,94**		**8.133.058.551**		**32,83**	**INSPEKTORAT**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**24.772.814.802**		**5.966.511.012**		**7.001.430.647**		**2.166.547.539**		**30,94**		**8.133.058.551**		**32,83**	**INSPEKTORAT**	
	6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (%)	%	100	24.489.089.802	100	5.751.731.036	100	6.783.074.747	25	2.150.866.989	25	31,71	125	7.902.598.025	125	32,27	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terselenggaranya administrasi keuangan OPD (bulan)	%	100	21.134.818.572	100	5.292.886.438	100	6.149.185.857	25	1.563.345.382	25	25,42	125	6.856.231.820	125	32,44	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya administrasi Kepegawaian	orang	91	378.300.000	0	0	46	85.000.000	1	7.732.699	2,17	9,1	1	7.732.699	1,1	2,04	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	paket	12	862.982.399	12	217.275.865	4	184.073.500	0	25.051.681	0	13,61	12	242.327.546	100	28,08	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Penambahan peralatan dan mesin	Unit	77	340.151.000	0	0	33	38.300.410	100	508.103.000	303,03	1.326,63	100	508.103.000	129,87	149,38	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah terpenuhinya fasilitasi kebutuhan jasa kantor	Laporan	144	782.439.410	12	137.392.171	48	146.095.780	3	35.425.627	6,25	24,25	15	172.817.798	10,42	22,09	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah terpeliharanya Barang Milik Daerah	Unit	49	990.398.421	12	104.176.562	47	180.419.200	3	11.208.600	6,38	6,21	15	115.385.162	30,61	11,65	INSPEKTORAT	
	6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	pengawasan terlaksana sesuai PKPT	%	100	126.100.000	100	97.376.156	100	105.156.100	25	10.982.800	25	10,44	125	108.358.956	125	85,93	INSPEKTORAT	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan penyelenggaraan Pengawasan yang dilaporkan	%	100	126.100.000	100	97.376.156	100	105.156.100	25	10.982.800	25	10,44	125	108.358.956	125	85,93	INSPEKTORAT	
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	persemtase rekomendasi kebijakan yang disusun	Rekomendasi	5	157.625.000	0	117.403.820	2	113.199.800	1	4.697.750	50	4,15	1	122.101.570	20	77,46	INSPEKTORAT	
			Persentase peningkatan Skor IPAK	%	3.8		3.81		3,7		0		0		3.81		100,26		INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Indeks PMPRB PD	Indeks	6	157.625.000	6	117.403.820	0	113.199.800	0	4.697.750	nan	4,15	6	122.101.570	100	77,46	INSPEKTORAT	
			Meningkatnya % Intervensi Pencegahan Korupsi terintegrasi Pemerintah Kota Sawahlunto	%	85		81		81		0		0		81		95,29		INSPEKTORAT	
23	**KECAMATAN BARANGIN**					**30.230.032.055**		**9.550.566.266**		**7.539.923.075**		**1.612.626.870**		**21,39**		**11.163.193.136**		**36,93**	**KEC BARANGIN**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**30.218.032.055**		**9.550.566.266**		**7.537.123.075**		**1.612.126.870**		**21,39**		**11.162.693.136**		**36,94**	**KEC BARANGIN**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**				**30.218.032.055**		**9.550.566.266**		**7.537.123.075**		**1.612.126.870**		**21,39**		**11.162.693.136**		**36,94**	**KEC BARANGIN**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik	%	100	17.294.619.555	100	4.911.848.943	100	5.505.144.965	100	1.364.742.000	100	24,79	200	6.276.590.943	200	36,29	**KEC BARANGIN**	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	42	15.543.978.555	14	4.353.124.866	14	4.954.078.568	4	1.251.404.340	28,57	25,26	18	5.604.529.206	42,86	36,06	**KEC BARANGIN**	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	100	111.457.000	100	1.610.000	2	10.820.000	0	0	0	0	100	1.610.000	100	1,44	**KEC BARANGIN**	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	36	372.584.000	12	87.234.610	12	69.244.385	3	9.119.000	25	13,17	15	96.353.610	41,67	25,86	**KEC BARANGIN**	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	**KEC BARANGIN**	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	36	859.600.000	12	412.622.767	12	419.961.212	3	102.113.660	25	24,32	15	514.736.427	41,67	59,88	**KEC BARANGIN**	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	36	407.000.000	12	57.256.700	12	51.040.800	3	2.105.000	25	4,12	15	59.361.700	41,67	14,59	**KEC BARANGIN**	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Barangin)	%	100	7.147.862.500	100	334.166.708	100	412.489.880	100	50.431.734	100	12,23	200	384.598.442	200	5,38	**KEC BARANGIN**	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	3	48.000.000	1	9.180.000	2	4.991.600	0	0	0	0	1	9.180.000	33,33	19,13	**KEC BARANGIN**	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	5	7.099.862.500	5	324.986.708	5	407.498.280	4	50.431.734	80	12,38	9	375.418.442	180	5,29	**KEC BARANGIN**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Barangin)	%	100	5.158.050.000	100	4.295.780.615	100	1.589.469.030	100	196.435.536	100	12,36	200	4.492.216.151	200	87,09	KEC BARANGIN	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	KEC BARANGIN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitas	Kegiatan	8	4.367.750.000	8	4.258.444.815	9	1.297.179.430	4	179.753.936	44,44	13,86	12	4.438.198.751	150	101,61	KEC BARANGIN	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Barangin)	%	100	97.000.000	100	4.926.000	100	9.991.600	100	517.600	100	5,18	200	5.443.600	200	5,61	KEC BARANGIN	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat	Kegiatan	1	97.000.000	1	4.926.000	2	9.991.600	1	517.600	50	5,18	2	5.443.600	200	5,61	KEC BARANGIN	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (Barangin)	%	100	388.000.000	100	1.344.000	100	5.890.000	0	0	0	0	100	1.344.000	100	0,35	KEC BARANGIN	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	2	388.000.000	100	1.344.000	2	5.890.000	0	0	0	0	100	1.344.000	5.000,00	0,35	KEC BARANGIN	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik (Barangin)	%	100	132.500.000	100	2.500.000	100	14.137.600	0	0	0	0	100	2.500.000	100	1,89	KEC BARANGIN	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang dilaksanakan	Kegiatan	6	132.500.000	2	2.500.000	6	14.137.600	0	0	0	0	2	2.500.000	33,33	1,89	KEC BARANGIN	
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**12.000.000**		**0**		**2.800.000**		**500.000**		**17,86**		**500.000**		**4,17**	KEC BARANGIN	
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				**12.000.000**		**0**		**2.800.000**		**500.000**		**17,86**		**500.000**		**4,17**	KEC BARANGIN	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik	%	100	12.000.000	0	0	100	2.800.000	100	500.000	100	17,86	100	500.000	100	4,17	KEC BARANGIN	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	36	4.500.000	12	0	12	1.300.000	3	500.000	25	38,46	15	500.000	41,67	11,11	KEC BARANGIN	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	7.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	nan	0	0	0	nan	0	KEC BARANGIN	
24	**KECAMATAN LEMBAH SEGAR**					**27.850.084.509**		**8.901.425.226**		**9.307.521.396**		**1.985.541.438**		**21,33**		**10.886.966.664**		**39,09**	**KEC LEMBAH SEGAR**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**27.850.084.509**		**8.901.425.226**		**9.307.521.396**		**1.985.541.438**		**21,33**		**10.886.966.664**		**39,09**	**KEC LEMBAH SEGAR**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**				**27.850.084.509**		**8.901.425.226**		**9.307.521.396**		**1.985.541.438**		**21,33**		**10.886.966.664**		**39,09**	**KEC LEMBAH SEGAR**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah dengan baik	%	100	20.967.591.789	100	6.486.687.075	100	6.474.006.325	100	1.710.392.628	100	26,42	200	8.197.079.703	200	39,09	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	36	20.967.591.789	12	5.867.556.651	14	5.965.501.774	3	1.588.499.911	21,43	26,63	15	7.456.056.562	41,67	35,56	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	6	0	2	12.160.000	2	13.060.000	2	0	100	0	4	12.160.000	66,67	inf	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	36	0	12	133.091.251	12	73.334.355	3	11.837.690	25	16,14	15	144.928.941	41,67	inf	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3	0	1	0	0	728.400	1	0	inf	0	2	0	66,67	nan	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	36	0	12	403.623.823	12	346.871.876	3	105.755.577	25	30,49	15	509.379.400	41,67	inf	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	36	0	12	70.255.350	12	74.509.920	3	4.299.450	25	5,77	15	74.554.800	41,67	inf	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik	%		0	100	539.464.134	100	617.419.095	100	67.949.360	100	11,01	200	607.413.494	inf	inf	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya Kegiatan Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan)	Kegiatan	0	0	2	5.016.200	2	9.419.200	2	0	100	0	4	5.016.200	inf	inf	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	0	0	7	534.447.934	7	607.999.895	7	67.949.360	100	11,18	14	602.397.294	inf	inf	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	6.882.492.720	100	1.859.379.017	100	2.180.931.576	100	207.199.450	100	9,5	200	2.066.578.467	200	30,03	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	Kegiatan	28	827.492.720	5	37.886.950	5	278.037.740	1	6.560.500	20	2,36	6	44.447.450	21,43	5,37	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	Kegiatan	28	6.055.000.000	12	1.821.492.067	12	1.902.893.836	6	200.638.950	50	10,54	18	2.022.131.017	64,29	33,4	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib	%	100	0	100	9.411.000	100	13.760.000	0	0	0	0	100	9.411.000	100	inf	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat	Kegiatan	0	0	2	9.411.000	2	13.760.000	0	0	0	0	2	9.411.000	inf	inf	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	0	100	4.200.000	100	6.998.000	0	0	0	0	100	4.200.000	100	inf	KEC LEMBAH SEGAR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	2	0	100	4.200.000	2	6.998.000	0	0	0	0	100	4.200.000	5.000,00	inf	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik	%	100	0	100	2.284.000	100	14.406.400	0	0	0	0	100	2.284.000	100	inf	KEC LEMBAH SEGAR	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0	5	2.284.000	5	14.406.400	0	0	0	0	5	2.284.000	inf	inf	KEC LEMBAH SEGAR	
25	KECAMATAN SILUNGKANG					2.928.183.800		2.201.856.711		2.566.847.327		655.873.983		25,55		2.857.730.694		97,59	KEC SILUNGKANG	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.928.183.800		2.201.856.711		2.566.847.327		655.873.983		25,55		2.857.730.694		97,59	KEC SILUNGKANG	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				2.928.183.800		2.201.856.711		2.566.847.327		655.873.983		25,55		2.857.730.694		97,59	KEC SILUNGKANG	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	2.738.683.800	92.05	2.082.831.857	100	2.202.882.067	100	543.377.133	100	24,67	192.05	2.626.208.990	192,05	95,89	KEC SILUNGKANG	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	2.200.000.000	93.1	1.665.392.245	100	1.884.556.144	26.73	478.495.858	26,73	25,39	119.83	2.143.888.103	119,83	97,45	KEC SILUNGKANG	
					100		93.1		0		26.73		inf		119.83		119,83		KEC SILUNGKANG	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	36.500.000	100	8.850.000	100	9.860.000	0	0	0	0	100	8.850.000	100	24,25	KEC SILUNGKANG	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	147.700.000	89.94	102.921.819	100	65.717.475	100	7.195.000	100	10,95	189.94	110.116.819	189,94	74,55	KEC SILUNGKANG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	265.383.800	98.77	240.761.292	100	205.468.448	100	54.574.925	100	26,56	198.77	295.336.217	198,77	111,29	KEC SILUNGKANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	36	89.100.000	12	64.906.501	36	37.280.000	10.8	3.111.350	30	8,35	22.8	68.017.851	63,33	76,34	KEC SILUNGKANG	
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik	%	100	38.500.000	100	9.119.500	100	16.321.660	0	0	0	0	100	9.119.500	100	23,69	KEC SILUNGKANG	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	12	22.000.000	12	4.120.000	12	8.040.000	0	0	0	0	12	4.120.000	100	18,73	KEC SILUNGKANG	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	3	16.500.000	12	4.999.500	1	8.281.660	0	0	0	0	12	4.999.500	400	30,3	KEC SILUNGKANG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	88.800.000	100	103.653.454	100	309.810.600	100	112.496.850	100	36,31	200	216.150.304	200	243,41	KEC SILUNGKANG	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	Kegiatan	8	88.800.000	6	103.653.454	8	309.810.600	6	112.496.850	75	36,31	12	216.150.304	150	243,41	KEC SILUNGKANG	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib	%	100	16.500.000	0	0	100	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	KEC SILUNGKANG	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat	Kegiatan	2	16.500.000	0	0	2	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	KEC SILUNGKANG	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan umum dengan baik	%	100	22.000.000	100	3.139.400	100	20.053.000	0	0	0	0	100	3.139.400	100	14,27	KEC SILUNGKANG	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	100	22.000.000	100	3.139.400	1	20.053.000	0	0	0	0	100	3.139.400	100	14,27	KEC SILUNGKANG	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik	%	100	23.700.000	100	3.112.500	100	11.780.000	0	0	0	0	100	3.112.500	100	13,13	KEC SILUNGKANG	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Desa	5	23.700.000	5	3.112.500	5	11.780.000	0	0	0	0	5	3.112.500	100	13,13	KEC SILUNGKANG	
26	KECAMATAN TALAWI					10.189.685.186		2.249.113.244		2.736.380.804		505.707.267		18,48		2.754.820.511		27,04	KEC TALAWI	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				10.189.685.186		2.249.113.244		2.736.380.804		505.707.267		18,48		2.754.820.511		27,04	KEC TALAWI	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.189.685.186		2.249.113.244		2.736.380.804		505.707.267		18,48		2.754.820.511		27,04	KEC TALAWI	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	8.507.581.203	100	2.181.084.144	100	2.422.475.104	100	498.698.267	100	20,59	200	2.679.782.411	200	31,5	KEC TALAWI	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	Bulan	42	6.785.420.243	14	1.806.307.809	14	2.060.396.022	4	460.385.886	28,57	22,34	18	2.266.693.695	42,86	33,41	KEC TALAWI	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	28.610.000	100	0	100	15.327.000	0	0	0	0	100	0	100	0	KEC TALAWI	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	36	326.050.000	12	90.446.705	12	62.016.000	3	0	25	0	15	90.446.705	41,67	27,74	KEC TALAWI	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	Unit	6	105.000.000	1	3.534.000	17	399.900	0	0	0	0	1	3.534.000	16,67	3,37	KEC TALAWI	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	36	1.083.750.960	12	224.289.730	12	246.516.182	3	34.957.381	25	14,18	15	259.247.111	41,67	23,92	KEC TALAWI	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	36	178.750.000	12	56.505.900	12	37.820.000	3	3.355.000	25	8,87	15	59.860.900	41,67	33,49	KEC TALAWI	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana dengan Baik	%	100	107.000.000	100	2.840.000	100	12.489.400	0	0	0	0	100	2.840.000	100	2,65	KEC TALAWI	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	4	62.000.000	3	2.240.000	2	8.000.000	0	0	0	0	3	2.240.000	75	3,61	KEC TALAWI	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	3	45.000.000	12	600.000	3	4.489.400	0	0	0	0	12	600.000	400	1,33	KEC TALAWI	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	928.103.983	100	58.547.200	100	258.916.800	100	7.009.000	100	2,71	200	65.556.200	200	7,06	KEC TALAWI	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	Kegiatan	9	928.103.983	3	58.547.200	9	258.916.800	3	7.009.000	33,33	2,71	6	65.556.200	66,67	7,06	KEC TALAWI	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib	%	100	97.000.000	100	1.040.000	100	10.000.000	0	0	0	0	100	1.040.000	100	1,07	KEC TALAWI	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat	Kegiatan	2	97.000.000	1	1.040.000	3	10.000.000	0	0	0	0	1	1.040.000	50	1,07	KEC TALAWI	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik	%	100	360.000.000	100	4.999.900	100	12.499.800	0	0	0	0	100	4.999.900	100	1,39	KEC TALAWI	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	2	360.000.000	100	4.999.900	100	12.499.800	0	0	0	0	100	4.999.900	5.000,00	1,39	KEC TALAWI	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik	%	100	190.000.000	100	602.000	100	19.999.700	0	0	0	0	100	602.000	100	0,32	KEC TALAWI	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang dilaksanakan	Desa	11	190.000.000	11	602.000	11	19.999.700	0	0	0	0	11	602.000	100	0,32	KEC TALAWI	
27	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					**20.854.072.272**		**14.502.559.594**		**4.213.075.482**		**634.649.850**		**15,06**		**15.137.209.444**		**72,59**	**KESBANGPOL**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**0**		**0**		**0**		**0**		**nan**		**0**		**nan**	**KESBANGPOL**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**0**		**0**		**0**		**0**		**nan**		**0**		**nan**	**KESBANGPOL**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**20.849.072.272**		**14.502.559.594**		**4.212.825.482**		**634.649.850**		**15,06**		**15.137.209.444**		**72,6**	**KESBANGPOL**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**20.849.072.272**		**14.502.559.594**		**4.212.825.482**		**634.649.850**		**15,06**		**15.137.209.444**		**72,6**	**KESBANGPOL**	
	8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib	%	80	13.332.072.272	140	2.274.703.397	100	2.218.041.892	80	605.149.850	80	27,28	220	2.879.853.247	275	21,6	**KESBANGPOL**	
			Persentase Indikator Program yang Tercapai	%	80		50		95		80		84,21		130		162,5		**KESBANGPOL**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase Realisasi Anggaran	%	90		0		95		90		94,74		90		100		KESBANGPOL	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	orang/bulan	14	9.476.561.144	6	2.002.926.462	17	1.891.915.239	16	594.867.122	94,12	31,44	22	2.597.793.584	157,14	27,41	KESBANGPOL	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	%	100	190.386.064	0	13.575.427	100	10.730.000	100	0	100	0	100	13.575.427	100	7,13	KESBANGPOL	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	100	80	1.224.017.000	200	158.445.516	100	142.503.995	0	0	0	0	200	158.445.516	250	12,94	KESBANGPOL	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Unit	1	65.000.000	0	0	2	14.881.250	0	0	0	0	0	0	0	0	KESBANGPOL	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	2.029.308.064	5	64.354.293	12	94.071.408	2	10.282.728	16,67	10,93	7	74.637.021	58,33	3,68	KESBANGPOL	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	346.800.000	4	35.401.699	12	63.940.000	0	0	0	0	4	35.401.699	33,33	10,21	KESBANGPOL	
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		\N	0	1.200.000.000	0	984.092.096	\N	718.511.800	0	0	nan	0	0	984.092.096	nan	82,01	KESBANGPOL	
			Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	70		57		60		0		0		57		81,43		KESBANGPOL	
				\N	70		57		\N		0		nan		57		81,43		KESBANGPOL	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Wasbang	orang	120	1.200.000.000	120	984.092.096	120	718.511.800	0	0	0	0	120	984.092.096	100	82,01	KESBANGPOL	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan terkait pemantapan Pelaksanaan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	0		0		1		0		0		0		nan		KESBANGPOL	
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu	%	86.5	2.285.000.000	97	10.555.609.914	0	644.818.590	0	0	nan	0	97	10.555.609.914	112,14	461,95	KESBANGPOL	
			Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah	%	82.5		80		0		0		nan		80		96,97		KESBANGPOL	
			Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gunbernur	%	65.8		79		0		0		nan		79		120,06		KESBANGPOL	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Persentase anggota Parpol yang mengikuti Bimtek pertanggungjawaban Keuangan Parpol	%	100	2.285.000.000	100	10.555.609.914	3	644.818.590	0	0	0	0	100	10.555.609.914	100	461,95	KESBANGPOL	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																		
	8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif di Kota Sawahlunto	100	100	145.000.000	100	22.176.000	100	27.812.200	0	0	0	0	100	22.176.000	100	15,29	**KESBANGPOL**	
	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Jumlah organisasi yang terdaftar	organisasi	41	145.000.000	41	22.176.000	41	27.812.200	0	0	0	0	41	22.176.000	100	15,29	**KESBANGPOL**	
	8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	%	100	1.437.000.000	100	200.881.330	100	59.987.800	0	0	0	0	100	200.881.330	100	13,98	**KESBANGPOL**	
			Desa Bersinar Yang Terbentuk	Desa	6		2		1		0		0		2		33,33		**KESBANGPOL**	
			Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis	%	100		100		85		0		0		100		100		**KESBANGPOL**	
	8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	kegiatan	2	1.437.000.000	2	200.881.330	2	59.987.800	0	0	0	0	2	200.881.330	100	13,98	**KESBANGPOL**	
			Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama yang terlaksana	%	100		100		100		0		0		100		100		**KESBANGPOL**	
			Persentase Fasilitasi kegiatan P4GN yang terlaksana	%	100		100		100		0		0		100		100		**KESBANGPOL**	
	8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase gejala konflik sosial yang dapat diselesaikan	%	100	2.450.000.000	100	465.096.857	100	543.653.200	0	29.500.000	0	5,43	100	494.596.857	100	20,19	**KESBANGPOL**	
			Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis	100	100		100		100		0		0		100		100		**KESBANGPOL**	
	8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah Kegiatan FKDM, Pengawasan Orang Asing dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	laporan	36	2.450.000.000	12	465.096.857	12	543.653.200	0	29.500.000	0	5,43	12	494.596.857	33,33	20,19	**KESBANGPOL**	
	X	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5.000.000**		**0**		**250.000**		**0**		**0**		**0**		**0**	**KESBANGPOL**	
	X.XX	**PENUNJANG URUSAN**				**5.000.000**		**0**		**250.000**		**0**		**0**		**0**		**0**	**KESBANGPOL**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 * 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	0	5.000.000	0	0	-	250.000	0	0	nan	0	0	0	nan	0	KESBANGPOL	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12	5.000.000	0	0	0	250.000	0	0	nan	0	0	0	0	0	KESBANGPOL	

2.2.2 EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis-jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dikemudian dinyatakan dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah telah menetapkan SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar yang terdiri dari Bidang :

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
f. Sosial

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Sawahlunto menyusun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Untuk pencapaian target program dan kegiatan SPM dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat ada tabel di bawah ini :

Tabel 2.312
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENDIDIKAN**											**97,65**
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipas di dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MT) (%)	100	100	100	100	100	92,09	100	80	100	97,56
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100	100	100	100	100	56,7	50,3	80	100	98,23
	Pendidika n Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi (%)	100	100	100	100	100	93,27	100	80	100	97,15
2	**KESEHATAN**											**87,46**
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	56,7	71,7	80	69,03	69,92
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan (%)	100	100	100	100	100	76,78	79,9	80	77,23	69,72
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	79,68	83,6	80	80,18	74,45
	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	38	74,6	80	88,73	91,82
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100	68,36	80	94,24	100
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	100	100	100	100	100	76,05	49,83	80	78,65	88,1
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung yang berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan (%)	100	100	100	100	100	46,66	44,64	80	100	99,34
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	16,72	7,95	80	45,52	57,53
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	88,06	50,59	80	100	100

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	150	100	80	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB (%)	100	100	100	100	100	13,1	26,03	80	81,14	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	98,59
3	**PEKERJAAN UMUM**											**100**
	Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minumsehari-hari (SPM) (SDGs) (%)	100	100	100	100	100	85,26	86	80	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)	100	100	100	100	100	99,86	90	80	100	100
	Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%) (SPM)	100	100	100	100	100	92,5	92,23	94	100	100
4	**PERUMAHAN RAKYAT**											**100**
		Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100
		Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (SPM) (%)	100	100	100	100	100	-	100	80	100	100
5	**KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**100**
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kab/ kota (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	**SOSIAL**											**99,67**
		Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	98,33
		Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100
		Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100
		Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Adapun permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi sampai triwulan I tahun 2025 yang telah dilakukan adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.313
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Prioritas Tahun 2025

Prioritas Tahun 2025	Masalah
Peningkatan SDM yang berdaya saing	Perlunya Peningkatan Kualitas Pendidikan
	Perlunya peningkatan Derajat Kesehatan
Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	Rendahnya kontribusi lapangan usaha penyediaan jasa akomodasi makan dan minum, dan melambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian perikanan serta industri pengolahan
	Pengeluaran perkapita disesuaikan masih di bawah rata-rata nasional
	Belum Optimalnya Pengelolaan pendapatan asli daerah
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata Melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia Dan Geopark Nasional	Rendahnya kontribusi lapangan usaha penyediaan jasa akomodasi makan dan minum, dan melambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian perikanan serta industri pengolahan
Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Belum optimalnya aksesibilitas wilayah
	Perlunya Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	Belum terpenuhinya tanah/lahan untuk pembangunan fasilitas umum
	Belum optimalnya pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pola ruang
	Masih tingginya resiko bencana daerah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (Tik) Dan Mall Pelayanan Publik (Mpp)	Iklim investasi yang belum kondusif
Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik
	Belum Optimalnya pengelolaan inovasi daerah

Jadi permasalahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Perlunya Peningkatan Kualitas Pendidikan
2. Perlunya peningkatan Derajat Kesehatan
3. Rendahnya kontribusi lapangan usaha penyediaan jasa akomodasi makan dan minum, dan melambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian perikanan serta industri pengolahan
4. Pengeluaran perkapita disesuaikan masih di bawah rata-rata nasional
5. Belum Optimalnya Pengelolaan pendapatan asli daerah
6. Rendahnya kontribusi lapangan usaha penyediaan jasa akomodasi makan dan minum, dan melambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian perikanan serta industri pengolahan
7. Belum optimalnya aksesibilitas wilayah
8. Perlunya Peningkatan kualitas lingkungan hidup
9. Belum terpenuhinya tanah/lahan untuk pembangunan fasilitas umum
10. Belum optimalnya pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pola ruang
11. Masih tingginya resiko bencana daerah
12. Iklim investasi yang belum kondusif
13. Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik
14. Belum Optimalnya pengelolaan inovasi daerah

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan pembangunan yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut :

2.3.2.1 Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Belum optimalnya pemenuhan kemampuan siswa dalam peningkatan kemampuan Numerasi dan Literasi, baik di Tingkat SD maupun SMP.
2. Belum meratanya sarana prasarana Pendidikan yang optimal.
3. Belum meratanya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Pembelajaran berkualitas belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah.
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sekolah Non Formal (NF)/ Kesetaraan.

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Masih belum optimalnya intervensi spesifik dan sensitif terhadap penurunan angka prevalensi stunting.
2. Masih belum optimalnya kapasitas SDM dan Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).
4. Masih belum optimalnya pelayanan di RSUD, baik dalam sarana dan prasarana dan SDM kesehatan.
5. Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Belum optimalnya persentase jumlah rumah tangga dengan sanitasi aman.
2. Belum optimalnya jumlah kapasitas air baku.
3. Belum optimalnya persentase akses rumah tangga dengan sanitasi aman.

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Belum tersedia lahan relokasi program pemerintah, karena kondisi geografis Sawahlunto yang berada pada daerah berkontur.
2. Belum optimalnya penanganan infrastruktur permukiman
3. Belum optimalnya prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
4. Masih adanya kondisi rumah tidak layak huni;
5. Masih banyak permukiman dengan status tanah ilegal atau dalam kawasan rawan bencana.

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (termasuk penanggulangan bencana dan kebakaran)

1. Masih tingginya indeks resiko bencana.
2. Masih tingginya angka pelanggaran Perda di Kota Sawahlunto.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Sawahlunto untuk menjaga ketertiban.
4. Masih terbatasnya operasional dan SDM penanganan kebakaran di Kota Sawahlunto
5. Masih rendahnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana
6. Masih rendahnya kesiagaan masyarakat dalam mitigasi bencana

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial (termasuk penanganan Pasca Bencana serta Taman Makam)

1. Belum optimal pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik secara kuantitas ataupun kualitas.
2. Masih adanya PPKS yang belum tersentuh bantuan dikarenakan beberapa alasan, diantaranya jumlah bantuan yang terbatas serta kendala dalam status administrasi kependudukan.

3. Belum semua bantuan yang diberikan memberikan daya ungkit optimal dalam mengangkat persoalan sosial (terutama ekonomi) bagi penerima bantuan.
4. Keberadaan Yayasan Penyantun Anak Cacat (YPAC) yang kurang layak dari segi luas bangunan.

2.3.2.2 Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1. Masih rendahnya skill angkatan kerja
2. Masih rendahnya kesempatan kerja/lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja
3. Belum optimalnya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja
4. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsostek.

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Belum optimalnya ketahanan keluarga untuk mewujudkan tatanan sosial yang berbasis agama, adat dan budaya.
3. Keberdayaan (wawasan, pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan keterampilan) ekonomi perempuan belum optimal.
4. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam perumusan kebijakan, SDM, dan Data Terpilah serta Kebijakan Teknis Pengarusutamaan Gender dalam hal Perencanaan, Penyelenggaraan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan yang melibatkan berbagai pihak belum optimal dan harus di sinergikan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1. Rata-rata kelompok konsumsi pangan yang masih dibawah batas ideal.
2. Masih adanya daerah yang rawan pangan yang perlu mendapatkan intervensi khusus.
3. Resiko cemaran mikroba, bahan kimia /berbahaya dan residu pestisida terhadap bahan pangan segar asal tumbuhan.
4. Masih belum tercukupinya stok Cadangan Pangan beras di Kota Sawahlunto sebagaimana yang harus dipenuhi dikarenakan keterbatasan anggaran.

Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya indeks kualitas tutupan lahan.
2. Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup.
3. Belum optimalnya penanganan pemulihan kerusakan LH.
4. Masih terdapatnya Pembuangan limbah dari beberapa pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa pengolahan ke badan sungai mengakibatkan terjadinya pencemaran sungai.
5. Masih rendahnya persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah.
6. Belum optimalnya proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.
7. Belum sepenuhnya masyarakat mendukung dan peduli terhadap pengurangan sampah plastik.
8. Pembuangan limbah dari beberapa pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa pengolahan ke badan sungai.

Urusan Pertanahan

1. Masih terdapat tanah yang belum jelas kepemilikannya.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait tertib administrasi pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Belum terintegrasinya data kependudukan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan publik

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang masuk dalam DTKS (24,50 %).
2. Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi desa dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerjasama antar desa dalam peningkatan pendapatan desa. Hal ini bisa dilihat pada salah satu contoh bahwa belum seluruh desa memiliki Bumdes dan hanya sebanyak 10 atau 43.37% dari 23 Bumdes yang aktif, dan hanya 3 dari 10 Bumdes yang aktif yang baru menghasilkan laba.
3. Masih ada desa yang sulit mengakses internet.

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih rendahnya nilai indeks pembangunan keluarga.
4. Belum meratanya kapasitas/kemampuan SDM aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB
5. Masih rendahnya keterlibatan dan peran serta organisasi masyarakat dan tokoh agama dalam upaya peningkatan dan pembangunan keluarga
6. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana
7. Belum maksimal desain program dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga;
8. kekurangan data dasar program KB didaerah sebagai dasar dalam penyusunan peta kerja untuk memudahkan penyusunan perencanaan pelaksanaan program KB.

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

1. Masih kurangnya pelayanan dan keselamatan transportasi jalan seperti rambu dan marka jalan di Kota Sawahlunto
2. Kurang optimalnya fasilitas pelayanan gedung uji kendaraan di Kota Sawahlunto
3. Masih kurangnya kualitas dan pemeliharaan infrastruktur kota

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sawahlunto adalah

1. Terbatasnya Sumber daya manusia yang berlatar belakang keahlian Informasi dan teknologi (IT);
2. Sulitnya pembangunan jaringan internet yang disebabkan kondisi geografis Kota Sawahlunto yang berbukit-bukit;
3. Terbatasnya pembangunan dan pelayanan jaringan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi;
4. Belum optimalnya integrasi data.

Kota Sawahlunto dengan kondisi topografi wilayah yang berbukit-bukit menjadi salah satu tantangan yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur digital secara merata dan mampu di akses oleh seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan masih terkendala dikarenakan Kota Sawahlunto dengan kontur perbukitan yang mengakibatkan jaringan internet agak sulit dijangkau bagi daerah yang berada diperbukitan, namun Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya agar tidak ada lagi daerah yang tidak memiliki akses internet dengan mengajukan penambahan tower untuk akses jaringan.

Sementara itu, arah visi misi Kota Sawahlunto ke depan yang akan menjadi Smart City dan kebijakan pemanfaatan akses digital bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut disikapi dengan melakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain : Menjalin kerjasama dengan pihak provider/swasta lainnya, Sosialisasi Pendidikan berbasis IT, Menumbuhkan Generasi Muda sebagai agen Literasi Digital. Program kegiatan dan inovasi yang dilakukan dalam mewujudkan smart city juga telah memberikan dampak terhadap masyarakat, peningkatan kelompok informasi masyarakat yang meningkat tiap tahunnya menggambarkan keberhasilan program kegiatan dan inovasi yang dilakukan.

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Kurangnya minat masyarakat kurang tertarik untuk menjadi anggota koperasi
2. Keterbatasan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia yang mengelola koperasi.
3. Keterbatasan permodalan koperasi untuk berkembang baik yang baru berdiri maupun yang sudah lama.
4. Persaingan yang ketat dari sesama koperasi maupun dari badan usaha lainnya
5. Manajemen koperasi yang kurang baik, misalnya pembukuan dan pelaporan keuangan yang tidak baik, tidak terselenggaranya RAT, piutang yang macet dan tidak terselesaikan,.
6. Minimnya pembinaan dan pengawasan pengurus terhadap koperasi

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1. Masih rendahnya realisasi investasi
2. Masih rendahnya kualitas promosi dan informasi peluang investasi
3. Permasalahan kepemilikan lahan/tanah ulayat.

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih rendahnya daya saing kepemudaan yang disebabkan Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan.
2. Masih rendahnya daya saing olahraga disebabkan Belum tersedianya sarana dan prasarana olah raga yang berkualitas, Belum terintegrasinya kebijakan pembinaan olahraga antara provinsi dan daerah, belum tertatanya sistem pembibitan dan Kurangnya Pelatih yang bersertifikasi.

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Meskipun indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik telah terpenuhi, namun masih terdapat permasalahan yang harus segera diatasi, yakni belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pemahaman beberapa Perangkat Daerah yang telah menyampaikan data saat dilakukan verifikasi dan validasi;
2. Belum optimalnya hasil forum satu data;
3. Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan portal satu data.

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Pengamanan informasi merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto melalui urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting dalam era teknologi informasi saat ini yang sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek, mulai dari administrasi perkantoran, perencanaan dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait urusan persandian antara lain :

1. Terbatasnya Sumber daya manusia yang berlatar belakang keahlian keamanan informasi (IT);
2. Tingginya biaya pembangunan dan jaringan keamanan informasi yang berbasis teknologi tinggi yang terintegrasi ;
3. Masih minimnya kegiatan pembinaan dan koordinasi untuk pengamanan informasi di seluruh pengguna (user) perangkat daerah.

Untuk menjaga pencapaian keberhasilan pelaksanaan urusan bidang persandian tersebut, dan untuk menyikapi tantangan ke depan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana persandian dan keamanan informasi.
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola dan pelaksana bidang persandian; serta
3. Peningkatan koordinasi dan pembinaan pengaman informasi di seluruh perangkat daerah

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1. Belum Optimalnya Status Warisan Tambang Batubara Ombilin sebagai Situs Warisan UNESCO utuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Beberapa bangunan atau benda cagar budaya belum terpelihara dan dilestarikan dengan baik disebabkan Kesadaran masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian warisan budaya dunia yang perlu ditingkatkan, Tingginya biaya pemeliharaan dan pelestarian bangunan atau benda cagar budaya, Sebagian besar bangunan/benda cagar budaya yag terdaftar sebagai warisan dunia dimiliki oleh perusahan tambang/pihak ketiga sehingga dalam pengelolaan mengalami masalah, Masih rendahnya kualitas SDM situs warisan dunia, Belum di tetapkannya badan pengelola WTBOS dan Sebagian besar situs/cagar budaya belum dilestarikan dengan baik
2. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi budaya lokal disebabkan Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan dan kurang optimalnya kelembagaan budaya

2.3.2.3 Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Masih kurangnya minat petani ikan budidaya untuk mengembangkan usaha budidaya ikan.
2. Harga pakan ikan relatif mahal
3. Pemasaran hasil budidaya yang relatif sulit.

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

1. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Sawahlunto dan Belum optimalnya pengelolaan Destinasi Pariwisata di Kota sawahlunto disebabkan Beberapa objek wisata strategis belum mempunyai dokumen perencanaan, Kualitas sarana pendukung objek wisata belum memadai, Kurang optimalnya pemeliharaan objek wisata, Akses dan konektivitas menuju destinasi wisata belum memadai dan kurangnya peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan objek pariwisata
2. Kurangnya Atraksi pada setiap objek wisata disebabkan Sarana dan prasarana atraksi tidak memadai, SDM pelaku atraksi belum mendukung
3. Kualitas Promosi masih rendah disebabkan SDM pelaku promosi pariwisata belum mendukung, Kemitraan/kerjasama biro perjalanan belum aktif, Sarana dan prasarana promosi pariwisata belum memadai dan Promosi pariwisata dilakukan secara manual
4. Industri Pariwisata belum berkembang disebabkan Kurangnya sarana dan presarana penginapan dan Akomodasi yang representative, Belum tersedianya rumah makan yang representative, Sarana dan prasarana transportasi belum memadai dan Belum tersedianya Biro perjalanan yang profesional
5. Kelembagaan Pariwisata yang belum profesional disebabkan Belum tepatnya pembagian tupoksi dalam kelembagaan, Belum meratanya penguatan organisasi kelompok sadar wisata yang ada, Kurangnya koordinasi antara pokdarwis dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah dan Kurangnya SDM dari pokdarwis
6. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelaku ekonomi Kreatif disebabkan SDM pelaku ekonomi kreatif belum memadai, Sarana dan prasarana pendukung ekonomi kreatif belum ada dan Akses pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber pendanaan belum luas.

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Luas lahan tadah hujan yang lebih besar dibandingkan dengan luas lahan irigasi yang berpengaruh besar terhadap produktivitas pertanian.
2. Rendahnya pengunaan benih unggul bersertifikasi.
3. Ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta pengelolaan pertanian masih terbatas.
4. Masih kurangnya diversifikasi dan konsumsi masyarakat B2SA (Beragam, Bergizi seimbang dan aman).
5. Masih rendahnya motivasi petani dalam berusaha tani.
6. Usaha peternakan masih banyak yang menjadi usaha sampingan belum menjadi usaha pokok masyarakat.
7. Kurangnya pakan alternatif serta adanya serangan penyakit.

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

1. Masih sulitnya pemasaran untuk madu galo-galo ke konsumen dalam skala besar.
2. Banyaknya hama koloni lebah madu yang mengakibatkan tidak berkembangnya lebah madu

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1. Ketersediaan pasar
   - Kondisi pasar rakyat yang tidak memadai dari kondisi ideal.
   - Keterbatasan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional
2. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga dan pengawasan barang/jasa.
3. Kualitas produk
   - Rendahnya keinginan masyarakat untuk membeli produk di pasar Sawahlunto karena persaingan harga.
   - Kurangnya kualitas pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk
   - Terbatasnya jenis, varian dan jumlah kelengkapan barang yang dipasarkan di Pasar Sawahlunto
4. Penataan Pedagang
   - Belum optimalnya penataan tempat berusaha pedagang yang membuat nyaman bagi pedagang, pembeli dan wajah kota secara umum.
   - Belum optimalnya kesadaran PKL dalam menjaga ketertiban dan kebersihan

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1. Keterbatasan ketersediaan bahan baku penunjang industri kecil dapat mempengaruhi harga jual
2. Kekurangan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung, seperti pasokan listrik, peralatan dan teknologi, dapat menghambat kegiatan industri
3. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang memadai masih menjadi kendala
4. Pemasaran hasil industri belum merata dan masih sangat terbatas pada skala kecil.
5. Terbatasnya modal dan sulitnya mekanisme permodalan melalui perbankan dan kemampuan inovasi dan diversifikasi produk yang masih rendah.
6. Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastawan pengusaha/pengrajin masih kurang
7. Regulasi: Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standarisasi, dan sertifikasi produk

2.3.2.4 Permasalahan Terkait Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah

1. Belum optimalnya indeks reformasi hukum.
2. Belum optimalnya Indeks Pelayanan Publik.
3. Belum optimalnya survei penilaian integritas (SPI) KPK
4. Belum optimalnya Indeks persepsi anti korupsi.

Inovasi Daerah

1. Belum optimalnya nilai Indeks Inovasi Daerah

2.3.2.5 Permasalahan Terkait Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur Perencanaan

1. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidang Perencanaan
2. Kurang memadainya data dan informasi pendukung dalam menyusun dokumen perencanaan
3. Masih kurangnya komitmen dalam menyusun dokumen perencanaan

Unsur Keuangan

1. Masih terbatasnya potensi pendapatan asli daerah
2. Masih rendahnya kemandirian keuangan dan PAD
3. Belum optimalnya pelayanan-pelayanan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah
4. Masih rendahnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban pajak dan membayar retribusi daerah

Unsur Kepegawaian

1. Belum semua ASN memberikan pelayanan maksimal sesuai tupoksinya
2. Penempatan pegawai masih ada yang belum sesuai dengan kompetensi dan keahliannya
3. Masih rendahnya kemampuan inovasi ASN
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan
5. Belum maksimalnya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/ budaya melayani
6. Masih rendahnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal maupun struktural.

2.3.2.6 Permasalahan Terkait Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah

1. Faktor Internal
   a. Belum optimalnya komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah
   b. Belum efektifnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemeriksa Inspektorat dikarenakan masih adanya temuan pemeriksaan setiap kali pemeriksaan.
   c. Adanya keterbatasan SDM pada Inspektorat Kota Sawahlunto untuk melakukan pembinaan pada OPD.
   d. Kurangnya Jabatan Fungsional yang ada di Inspektorat Kota Sawahlunto, terutama pada Jabatan Ahli Muda dan Pertama.
   e. Kualitas LHP belum sesuai yang diharapkan dan belum memenuhi standar pemeriksaan, dikarenakan belum memadainya kualitas SDM.

2. Faktor Eksternal
   a. Masih rendahnya anggaran pengawasan yang ada pada Inspektorat Kota Sawahlunto yang mengakibatkan pemeriksaan yang dilaksanakan tidak optimal.
   b. Terbatasnya anggaran pendidikan dan pelatihan sehingga dalam pengembangan pengetahuan dan potensi pegawai dan pejabat fungsional dalam meningkatkan SDM tidak maksimal.
   c. Belum optimalnya OPD menindaklanjuti temuan pemeriksaan.
   d. Adanya perubahan regulasi menuntut APIP agar segera dapat memahami aturan baru tersebut sebagai landasan dalam melakukan pengawasan.

2.3.2.7 Permasalahan Terkait Unsur Kewilayahan Kecamatan

1. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat
2. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang terbatas
3. Keterbatasan SDM yang menguasai teknologi
4. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antar personil di kecamatan dan desa/ kelurahan
5. Minimnya inovasi dalam pelayanan publik di kecamatan, masih menggunakan pelayanan secara konvensional

2.3.2.8 Permasalahan Terkait Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Belum optimalnya peran kelembagaan Kesbangpol Kota Sawahlunto
2. Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan

2.3.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka Panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Pembangunan dan pemerataan ekonomi dengan keunggulan Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) dan Geopark Nasional

Pemerataan ekonomi adalah tujuan yang penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan, melalui pendidikan dan pelatihan, pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang progresif sehingga dapat mencapai pemerataan ekonomi yang lebih baik. Dengan pemerataan ekonomi kita dapat mencapai kesetaraan peluang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan Kota sawahlunto mendapatkan predikat dan Status Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) tahun 2019 dan Geopark Nasional Tahun 2018 namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto, ini menjadi kesempatan dan tantangan bagi pemerintah daerah Kota sawahlunto untuk kembali menarik kunjungan wisatawan yang akan berdampak kepada perekonomian masyarakat. Sesuai tema RPJPN 2025-2045 yang diberikan ke Provinsi Sumatera Barat adalah pengembangan pariwisata kelas dunia, ini menjadi peluang bagi Kota Sawahlunto dalam mewujudkan visi daerah Kota Sawahlunto tahun 2025-2045 yaitu untuk menjadikan kota wisata yang berkelas dunia. Ini diharapkan kedepannya akan meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri sehingga berdampak bagi perekonomian Kota Sawahlunto dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Untuk jangka Panjang akan menjadi daya tarik bagi akademisi kelas Nasional maupun Internasional untuk kegiatan riset maupun edukasi.

Selain itu, peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan juga akan diprioritaskan. Dengan telah adanya sentra Industri Kecil Menengah (IKM), diharapkan daya saing produk-produk industri unggulan Kota Sawahlunto dapat ditingkatkan. Hal ini diharapkan juga akan mendukung pengembangan sektor pariwisata yang ada. Selain itu, peningkatan aktivitas industri ini juga harus mampu diiringi dan mendukung peningkatan nilai tambah untuk sektor pertanian dan peternakan. Sektor pertanian dan peternakan juga akan menjadi perhatian karena sektor pertanian ini merupakan sektor yang dominan mempengaruhi ekonomi masyarakat di Kota Sawahlunto. Keberadaan mall Pelayanan publik yang telah diresmikan oleh Menteri PAN RB RI pada tahun 2022, diharapkan meningkatkan jumlah investasi di Kota sawahlunto. Kemudahan-kemudahan perizinan, ketersediaan bahan baku yang berkualitas, serta penyediaan iklim investasi yang kondusif juga diharapkan akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. Hal lain yang menjadi perhatian adalah perlunya optimalisasi potensi dan pengelolaan pendapatan asli daerah.

Dengan proyeksi jumlah penduduk yang bertambah disetiap tahunnya, ini menjadi tantangan yang luar biasa dalam ketersediaan pangan di Kota Sawahlunto untuk 20 tahun yang akan datang. Estimasi konsumsi beras untuk Kota Sawahlunto di tahun 2025 sudah mengalami krisis pangan(beras) dengan asumsi konsumsi beras defisit sebesar (746,48 ton). Ini sangat perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai pemerataan ekonomi. Peningkatan produksi dan perbaikan/ pengawasan jalur distribusi pangan menjadi langkah dalam menyikapi krisis pangan.

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi salah satu isu strategis utama pemerintah Pusat sampai Daerah. Mengingat di tahun 2045 Indonesia akan memperoleh bonus demografi, maka harus dipersiapkan dari sekarang generasi yang berakhlak, tangguh, mandiri, berkualitas & punya daya saing. Untuk mendukung langkah ini, Pemerintah telah menyediakan Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD (UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ps 49 ayat 1). Kemudian urusan Pendidikan juga menjadi salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilakukan oleh setiap Provinsi/ Kab/Kota (Permendikbud RI nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan). Dan Pendidikan yang berkualitas dan merata masuk dalam Misi 1 RPJPN 2025-2045. Faktor penting yang harus ditingkatkan untuk mencapai pendidikan berkualitas adalah dengan : Menciptakan pendidik & tenaga kependidikan yang berkualitas & berkuantitas, menyediakan sarana & prasarana sekolah yang berkualitas & berkuantitas, mendorong & menumbuhkan minat /bakat siswa untuk mau selalu meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan peran orang tua, keluarga, masyarakat & pemerintah dalam mengawal proses tumbuh kembang pendidikan anak dan mengantisipasi kuatnya arus informasi melalui media sosial yang dapat membawa efek positif maupun negatif bagi perkembangan pola pikir, sikap & adab siswa / guru/ tenaga pendidik.

Peningkatan kualitas kesehatan menjadi salah satu isu strategis utama pemerintah Pusat sampai Daerah. Pada tahun 2030 Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi dimana 68,3 % adalah penduduk usia produktif sehingga merupakan peluang untuk meraih Indonesia emas tahun 2045. Urusan kesehatan masuk dalam Misi 1 RPJPN 2025-2045 yaitu membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing. Untuk mewujudkan Indonesia sehat diwujudkan melalui membangun sistem kesehatan yang tangguh dan responsif serta memastikan penduduk berusia panjang dan hidup sehat. Upaya transformasi kesehatan adalah melalui penguatan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas & berkuantitas, menyediakan sarana & prasarana kesehatan yang berkualitas & berkuantitas, jaminan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan untuk penurunan stunting.

Sebanyak 3.120 individu pada tahun 2023 termasuk ke dalam masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang didominasi oleh fakir miskin dan lansia terlantar. Di sisi lain, kemiskinan menjadi 0% merupakan salah satu visi dari Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung visi tersebut, diperlukan sinergitas bersama untuk menekan angka kemiskinan yang dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan serta pemberian perlindungan sosial yang memadai dan menjadi aksi nyata bagi setiap unsur yang terlibat. Pertambahan jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri dan pastinya menuntut kesiapan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial guna menekan angka kemiskinan. Maka dari itu, perlu dilakukan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat yang ditujukan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan pula pemberian bantuan sosial yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi saat ini meliputi pelaksanaan bantuan sosial terfregmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini disebabkan penggunaan data mesih terfragmentasi dan belum termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih terjadi.

Pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Secara garis besar capaian IPG Kota Sawahlunto di angka 95,17 dengan IPM laki-laki sebesar 77,08 dan IPM perempuan sebesar 73,36. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat perbedaan antara kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, serta ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Pemerintah Pusat maupun Daerah mesti bersinergi untuk menggalakkan pembangunan berbasis kesetaraan gender, dengan salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu pembentukan kelembagaan PUG di Kota Sawahlunto.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan serta pemberdayaan perempuan harus selalu diperhatikan. Karena mengingat jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terlapor mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun, secara garis besar angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor belum lah bisa menjadi representasi dari kasus yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat. Kebanyakan masyarakat masih merasa tabu dalam membahas atau menguak permasalahan KDRT sehingga hal ini seperti fenomena gunung es. Dalam hal ini perlu penguatan kelembagaan P2TP2A dalam rangka promotif (sosialisasi, kampanye, penyuluhan) preventif (pencegahan), kuratif (penanganan), rehabilitatif (pemulihan/pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan). Selain itu, diperlukan pula peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, Pemberdayaan perempuan melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan dan juga penguatan PUG dan inklusi sosial dalam pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pada RPJPN tahun 2025-2045.

Pembangunan dan Infrastruktur yang berkelanjutan

Infrastruktur berperan sebagai roda penggerak ekonomi dan juga pembangunan. Infrastruktur mampu menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi, dengan menciptakan lapangan kerja dan titik pertumbuhan ekonomi baru, membuka jaringan logistik ke sentra-sentra produksi serta stimulan pengembangan lapangan usaha. Selain itu, keberadaan infrastruktur sangat vital untuk mendukung berbagai macam kegiatan pemerintahan, industri, dan juga kegiatan sosial masyarakat. Mulai dari transportasi jalan raya, sistem energi, bangunan sekolah dan perkantoran, sampai jaringan telekomunikasi, jaringan layanan air bersih, rumah ibadah, dan lainnya. Infrastruktur juga merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

Gambar 2.7
Peran Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi

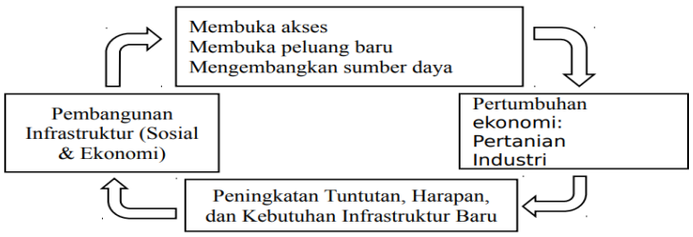

Sumber: Usman, Sunyoto (2010)

Mengingat pentingnya peran infrastruktur dalam kegiatan ekonomi, sosial, pelayanan dan pembangunan, maka kehadiran infrastruktur yang memadai memang sangat diperlukan. Ketika suatu daerah mengalami perkembangan dalam kegiatan perekonomian, maka tuntutan terhadap ketersediaan infrastruktur juga akan terus bertambah. Selanjutnya, apabila ketersediaan infrastruktur terus berkembang, maka daerah tersebut mempunyai kemampuan produksi yang lebih besar. Keberadaan infrastruktur di Kota Sawahlunto juga memiliki peranan penting dalam peningkatan ekonomi dan daya saing daerah. Terlebih untuk mendukung potensi wisata sejarah dunia UNESCO *Ombilin Coal Meaning Heritage of Sawahlunto* (OCMHS) dan Geopark Nasional Sawahlunto yang menjadi wisata unggulan dan memberikan *multiplier effect* dalam pertumbuhan sektor ekonomi lain. Keberadaan infrastruktur tentunya memberikan dampak besar dalam pengembangan kegiatan pariwisata tersebut.

Pembangunan infrastruktur di Kota Sawahlunto hingga mendekati akhir berlakunya RPJPD Kota Sawahlunto, tentunya telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari sektor pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan permukiman. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berkembangnya kegiatan sosial ekonomi di Kota Sawahlunto, maka penyediaan infrastruktur belum sepenuhnya terakomodir dengan baik. Masih terdapat GAP antara kebutuhan dan ketersediaan secara kuantitas maupun kualitas. Pemenuhan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah juga belum terpenuhi seluruhnya. Perlu pemenuhan, peningkatan dan pemeliharaan yang optimal pada infrastruktur tersebut, hingga dapat menjadi penopang yang kuat dalam penggerak kegiatan ekonomi dan sosial Masyarakat di Kota Sawahlunto.

Pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum yang meliputi penyediaan jalan, pemenuhan air bersih dan air minum, sanitasi layak, sawah yang dilayani jaringan irigasi serta drainase dalam kondisi baik, masih perlu peningkatan dan pemeliharaan. Pelayanan air bersih,

sanitasi dan drainase yang layak merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah secara maksimal, yang hingga saat ini pemenuhannya belum 100%. Padahal, jika dikaitkan dengan potensi yang dimiliki, Kota Sawahlunto memiliki sumber air baku dari 5 aliran Sungai dan 5 danau yang mampu memenuhi kebutuhan debit air. Namun keterbatasan sarana prasarana menjadi penghambat dalam pemanfaatan sumber air yang lebih besar. Pemenuhan sanitasi layak belum optimal, pengelolaan limbah terpadu dalam skala besar belum dimiliki oleh Kota Sawahlunto, pengelolaan masih secara mandiri di setiap rumah tangga. Pemenuhan sistem drainase masih dibawah 50% karena pemeliharaan yang sangat minim setiap tahunnya.

Konektivitas antar daerah baik didalam maupun diluar kota belum memadai. Kondisi jalan dan sarana prasarana pelengkap jalan sangat menentukan aksesibilitas dari dan menuju Kota Sawahlunto dan dapat mempengaruhi alur produksi dan distribusi barang jasa, kelancaran transportasi, biaya logistik, hingga kunjungan wisata. Konektivitas jalan dengan daerah perbatasan menuju Kabupaten Tanah Datar belum memadai untuk dilalui kendaraan berat, kondisi rusak dengan volume jalan yang kecil serta sarana dan prasarana jalan belum lengkap. Belum optimalnya capaian infrastruktur urusan perumahan kawasan permukiman masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah**.** Setiap tahunnya telah dilaksanakan kegiatan seperti penanganan RTLH, Kawasan kumuh, PSU perumahan permukiman. Namun kegiatan diatas perlu optimalisasi baik dari segi mekanisme pengajuan lokasi, besaran anggaran yang dibutuhkan serta stakeholder terkait.

Pembangunan dan pengembangan suatu daerah seringkali memberikan efek jangka panjang yang buruk terhadap kelestarian lingkungan. Begitupun dengan penyediaan sarana dan prasaranan kota yang pengembangannya tidak secara komprehensif berdasarkan kajian dampak lingkungan yang ditimbulkan, sehingga memberikan pengaruh pada kualitas air, udara, ketersediaan lahan dan sampah yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, perlu analisis dan kajian mendalam pada aplikasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Untuk pemenuhan infrastruktur, Kota Sawahlunto dihadapkan dengan peluang dan tantangan eksternal baik di tingkat provinsi maupun nasional. Infrastruktur air minum, sanitasi, dan perumahan kawasan permukiman merupakan pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga dengan air minum dan sanitasi aman juga didukung pengembangannya dalam RPJPN 2025-2045, dalam arah kebijakan Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana untuk wilayah Sumatera. Sektor irigasi menjadi pendukung rencana pengembangan Provinsi Sumatera Barat menjadi Kawasan ketahanan pangan yang sudah ditetapkan dalam arah kebijakan RPJPN 2025 – 2045.

Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas Aparatur Kota Sawahlunto berpotensi untuk ditingkatkan berdasarkan Rasio ASN Kota Sawahlunto terhadap jumlah penduduk Kota Sawahlunto tahun 2022 sebesar 3,1 % (2040 : 66.413). Sementara Rasio ASN secara nasional adalah sebesar 1,5 %. Dengan demikian Rasio ASN Kota Sawahlunto dua kali lebih besar dari Rasio ASN Nasional, angka ini merupakan potensi yang cukup besar untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat Kota Sawahlunto. Integritas pemberi layanan tata kelola pemerintahan masih rentan praktik korupsi. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Sawahlunto 83,96 (skala 100) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal 73,83 (skala 100). Disamping itu belum ada unit kerja/perangkat daerah yang memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Keberadaan desa di Kota Sawahlunto yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan masih belum banyak. Hal ini tercermin melalui persentase dari jumlah desa mandiri yang baru menginjak di angka 14.8% atau sebanyak 4 desa berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2023. Di sisi lain, desa/kelurahan di Kota Sawahlunto memiliki berbagai kelembagaan yang jika dimanfaatkan dengan optimal tentunya akan memberikan manfaat yang besar untuk pembangunan desa, seperti keberadaan 23 Bumdes di Kota Sawahlunto, dimana dalam hal ini baru sebanyak 35.5% yang sudah menghasilkan laba. Kurang optimalnya keberadaan berbagai kelembagaan yang ada juga mampu mengindikasi masih rendahnya daya saing, produktivitas dan ketahanan aktivitas perekonomian pedesaan. Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan fisik serta non fisik juga mesti dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kemandirian serta peningkatan masing-masing desa di segala aspek.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Sawahlunto yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2026.

Kerangka ekonomi dan pendanaan daerah menjadi dasar kebijakan perencanaan anggaran agar dapat dialokasikan secara efektif dan berbasis program prioritas, disamping untuk mengevaluasi capaian program-program rutin tahun 2024, apakah program tersebut sudah masuk dalam kategori tercapai atau perlu upaya keras untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh sesuai target dan menjadi pemicu (*trigger*) untuk menurunkan kemiskinan, memperbaiki ketimpangan pendapatan, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Kerangka ekonomi dan pendanaan daerah tahun 2026 diharapkan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Sawahlunto.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

Perekonomian global tahun 2024 tumbuh melambat dibanding tahun 2023. Tercatat tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3 persen, melanjutkan tren perlambatan dari pertumbuhan tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 3,6 persen dan 3,5 persen. Tren perlambatan perekonomian global diproyeksikan berlanjut dan semakin dalam pada tahun 2025 dan 2026, masing-masing sebesar 2,8 persen dan 3,0 persen yang disebabkan oleh risiko perang dagang akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dan 2026 utamanya masih ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Sementara negara maju diproyeksikan tumbuh lebih lambat.

Ekonomi global masih menghadapi tantangan utamanya berasal dari sisi geopolitik. Kebijakan pemerintah AS telah mendorong eskalasi perang dagang. AS menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang yang memiliki surplus perdagangan dengan AS, seperti Tiongkok, Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut telah merespon kebijakan AS dengan melakukan retaliasi atas tarif impor produk AS, sehingga berpotensi menurunkan volume perdagangan bilateral dan global.

3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan tumbuh 5,03 persen pada tahun 2024, meski sedikit melambat dibanding tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Capaian ini mencerminkan ketangguhan ekonomi Indonesia serta kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding beberapa negara seperti Tiongkok, Brasil, dan Thailand. Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi, Gross National Income (GNI) per kapita diperkirakan meningkat dari US$4.810 pada tahun 2023 menjadi US$4.930 pada tahun 2024, sehingga mempertahankan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (*upper middle-income country*).

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 relatif kuat di tengah gejolak global. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi terbesar tumbuh 4,94 persen, meningkat dari 4,82 persen pada tahun 2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh tinggi sebesar 12,48 persen, didorong oleh penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Secara keseluruhan, konsumsi masyarakat tumbuh 5,11 persen pada tahun 2024. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 6,61 persen seiring meningkatnya belanja negara untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan program bantuan sosial.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor kembali mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2024. Tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi meliputi sektor jasa lainnya (9,80 persen); transportasi dan pergudangan (8,69 persen); serta penyediaan akomodasi dan makan minum (8,56 persen). Pertumbuhan sektor jasa lainnya didorong oleh peningkatan aktivitas

rekreasi serta berbagai event olahraga dan hiburan. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh seiring peningkatan mobilitas, jumlah penumpang, dan volume barang. Sementara itu, sektor akomodasi dan makan minum didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat serta aktivitas pemerintah dan swasta. Adapun sektor pertanian, yang memberikan kontribusi sebesar 12,61 persen terhadap perekonomian Indonesia, tetap tumbuh positif sebesar 0,67 persen.

Ekonomi Indonesia tahun 2025 diperkirakan akan bertahan pada kisaran 5,20 persen di tengah dinamika global melalui berbagai kebijakan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi. Dari sisi eksternal yang menghadapi tantangan risiko perang dagang secara langsung, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap menunjukkan kinerja yang tangguh. Dengan pertumbuhan tersebut, GNI per kapita Indonesia diharapkan meningkat ke level US$5.230. Peningkatan pertumbuhan dari baseline dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh meningkat menjadi 4,97 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali, program bantuan sosial, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 4,91 persen, seiring percepatan pelaksanaan belanja prioritas. PMTB atau investasi pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 4,96 persen, didukung oleh kebijakan optimalisasi pengelolaan aset BUMN; pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); peningkatan kredit investasi untuk industri padat karya, tax holiday dan tax allowance; dan penghapusan buku atau tagih utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kinerja ekspor Indonesia diperkirakan menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan tarif resiprokal AS dan kebijakan lanjutan lainnya, serta beragam respons dari negara mitra dagang. Risiko penurunan ekspor baik secara langsung ke pasar AS maupun secara tidak langsung akibat melemahnya permintaan global dan disrupsi rantai pasok Tiongkok perlu diantisipasi. Meski demikian, ekspor barang dan jasa pada tahun 2025 tetap didorong tumbuh melalui berbagai kebijakan pemerintah, antara lain diversifikasi produk dan pasar ekspor, reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, serta penguatan sektor-sektor yang terdampak tarif. Sementara itu, impor diperkirakan meningkat untuk mendukung kebutuhan sektor industri dalam negeri yang terus berkembang.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2025, industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 5,05 persen, dengan kontribusi PDB industri pengolahan yang mencapai 20,80 persen dari total PDB nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan pada tahun 2025 utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral, terutama di wilayah timur Indonesia, yang dipercepat melalui penanaman modal negara; inisiasi program MBG bagi anak sekolah dan ibu hamil yang mendorong permintaan pada subsektor industri makanan dan minuman; peningkatan penggunaan teknologi Generative AI (Artificial Intelligence) yang mendorong permintaan pada subsektor industri elektronik; serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0, penerapan standardisasi, dan akselerasi transisi menuju industri hijau.

Perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80– 6,30 persen. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori *upper middle-income country*. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat relatif tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi

dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3–2.175,3 triliun. Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tercermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp194,30–205,31 triliun dan Rp68,04–71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14–52,37 persen terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental *Capital Output Ratio* (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,85–6,38 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai trajectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 21,20 persen di tahun 2026.

Sektor pertanian dalam arti luas pada tahun 2026 ditargetkan mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 3,09–3,33 persen. Pertumbuhan sektor pertanian utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Sektor konstruksi pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 7,80–7,91 persen, didorong oleh proyek-proyek seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit daerah dan pembangunan KI dan KEK. Sektor perdagangan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,25–5,62 persen. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global.

3.1.3 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Sumatera Barat

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan IV 2024 tumbuh melambat. Pertumbuhan pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 4,04% (yoy) melambat dibandingkan dengan triwulan III 2024 sebesar 4,33% (yoy). Hal tersebut didorong oleh kinerja pertanian yang menurun terutama padi hingga penurunan kinerja transportasi udara seiring dengan mobilitas dan konsumsi rumah tangga yang melambat. Secara keseluruhan tahun 2024, perekonomian Sumatera Barat tumbuh sebesar 4,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,62% (yoy). Penurunan sejalan dengan hampir seluruh lapangan usaha utama mengalami perlambatan. Penyumbang utamanya yaitu kinerja pertanian yang menurun akibat dampak bencana alam. Meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan keuangan global juga menahan kinerja PMTB sehingga melambat pada tahun 2024. Namun demikian, meningkatnya konsumsi masyarakat di tengah kunjungan wisatawan yang terakselerasi menopang pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Inflasi Sumatera Barat pada triwulan IV 2024 sebesar 0,89% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang sebesar 1,52 % (yoy). Penurunan harga komoditas pangan terutama komoditas cabai merah yang didukung pasokan dari Jawa serta kembali lancarnya distribusi pangan pasca perbaikan akses jalan utama menjadi faktor stabilnya inflasi. Lebih lanjut, inflasi yang terjaga rendah juga diperkuat oleh sinergi pengendalian inflasi TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota.

Kondisi lapangan kerja Sumatera Barat membaik. Hal ini tercermin dari meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Agustus 2024, TPAK Sumatera Barat tercatat sebesar 70,28%, lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2023 yang sebesar 69,61%. Sementara TPT periode Agustus 2024 sebesar 5,75%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,94%. Membaiknya kondisi ketenagakerjaan tersebut sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja yang tetap terjaga.

Sejalan dengan perbaikan lapangan kerja, kesejahteraan penduduk Sumatera Barat lebih baik dibandingkan tahun 2023. Kondisi ini tercermin dari persentase penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2024 sebesar 5,42%, lebih rendah dibandingkan dengan posisi Maret 2023 yang sebesar 5,95%. Perbaikan tersebut terjadi baik di perkotaan maupun

perdesaan dengan persentase penduduk miskin yang menurun. Kondisi penduduk miskin secara umum juga lebih baik yang ditunjukkan dengan kesenjangan yang lebih kecil antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kondisi yang lebih baik ini juga diindikasi merata sejalan dengan kesenjangan antar penduduk miskin yang semakin mengecil.

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh dan berada pada kisaran 4,0% (yoy) – 4,8% (yoy), didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, pemulihan sektor pertanian, dan peningkatan event pariwisata. Operasional JTTS seksi Padang–Sicincin diperkirakan menjadi daya tarik ekonomi sehingga mendorong kunjungan wisatawan. Tren kenaikan harga komoditas global serta peremajaan lahan juga memperkuat ekspor dan kinerja industri pengolahan. Namun, ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi cuaca tetap menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.

Laju inflasi Sumatera Barat pada tahun 2025 diperkirakan meningkat dibandingkan inflasi tahun 2024. Namun demikian, inflasi diperkirakan tetap terjaga berada pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Peningkatan inflasi diperkirakan berasal dari perbaikan konsumsi masyarakat. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi berlanjut dapat mempengaruhi harga acuan global dan nilai tukar rupiah sehingga berdampak pada peningkatan harga komoditas impor. Untuk itu, TPID Sumatera Barat berkomitmen melanjutkan berbagai upaya pengendalian inflasi sehingga inflasi terjaga rendah dan stabil pada tahun 2025.

Untuk tahun 2026 dan beberapa tahun seterusnya beberapa tantangan yang akan dihadapi Sumatera Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Infrastruktur dan Konektivitas yang Masih Terbatas
   Aksesibilitas ke beberapa daerah masih terbatas, terutama di wilayah pedalaman dan kepulauan seperti Mentawai. Keterbatasan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara dapat menghambat perdagangan dan pariwisata.
2. Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertanian dan Perikanan)
   Sebagian besar perekonomian Sumbar masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan yang rentan terhadap cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
   Hilirisasi produk pertanian masih terbatas, sehingga nilai tambah ekonomi rendah.
3. Kurangnya Investasi dan Daya Saing Industri
   Masih sedikit investor yang tertarik menanam modal di Sumbar karena regulasi yang belum cukup menarik dan infrastruktur yang belum optimal. Daya saing industri masih rendah dibandingkan daerah lain seperti Riau dan Sumatera Utara.
4. Digitalisasi UMKM yang Masih Lambat
   Banyak UMKM masih belum mengadopsi teknologi digital, sehingga sulit bersaing di pasar nasional maupun global. Akses ke permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil masih terbatas.
5. Ancaman dari Isu Global dan Nasional
   Fluktuasi harga komoditas ekspor seperti sawit, kopi, dan kakao dapat mempengaruhi pendapatan petani. Inflasi dan ketidakpastian ekonomi global bisa berdampak pada daya beli masyarakat.

Prospek Ekonomi Sumatera Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Potensi Besar di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   Pariwisata berbasis alam, budaya, dan kuliner khas Minangkabau semakin diminati, terutama dengan tren wisata halal. Peluang besar dalam ekonomi kreatif seperti kuliner, fesyen berbasis tenun, dan seni pertunjukan.
2. Penguatan Ekonomi Digital dan Startup
   Digitalisasi UMKM dan perdagangan online semakin berkembang, membuka peluang ekspansi ke pasar lebih luas. Potensi tumbuhnya startup lokal di bidang agritech, fintech, dan edutech.
3. Hilirisasi dan Industrialisasi Sektor Pertanian dan Perikanan
   Dengan pengembangan industri pengolahan, komoditas unggulan Sumbar seperti kakao, kopi, dan ikan bisa memiliki nilai tambah lebih tinggi.
   Pengembangan sistem agribisnis modern berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas.
4. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas
   Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, perluasan Pelabuhan Teluk Bayur, dan modernisasi Bandara Minangkabau dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
   Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk menarik investasi industri dan perdagangan.

5. Peluang Investasi di Energi Terbarukan dan Maritim
   Sumbar memiliki potensi besar dalam energi terbarukan seperti PLTA dan geothermal yang dapat menarik investor. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan untuk meningkatkan ekspor hasil laut.

Kebijakan ekonomi yang dapat diterapkan pada tahun 2026 untuk memaksimalkan potensi tersebut meliputi:

1. Penguatan Sektor Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan
   Dengan mendorong modernisasi pertanian melalui teknologi digital (smart farming) diharapkan mampu untuk mengembangkan komoditas unggulan seperti padi, jagung, kakao, kopi, dan gambir dengan sistem hilirisasi. Selain itu peningkatan akses pasar melalui kerja sama dengan industri pangan dan ekspor dan optimalisasi lahan pertanian dan pengelolaan irigasi untuk meningkatkan produktivitas sangat diharapkan bisa dicapai di tahun 2026..
2. Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal
   Pengembangkan pariwisata berbasis alam, budaya, dan kuliner, seperti wisata halal dan ekowisata di Danau Maninjau, Harau, dan Mentawai sangat berpotensi untuk dapat ditingkatkan. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata (bandara, jalan, dan fasilitas akomodasi) serta dapat memperkuat promosi wisata dengan digital marketing serta kolaborasi dengan influencer dan travel blogger.Dengan mengembangkan desa wisata dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata disinyalir akan mampu mendongkrak perekonomian di Sumatera Barat.
3. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi UMKM
   Sejalan dengan peningkatan pariwisata, penguatan ekonomi kreatif dan UMKM diharapkan mampu tumbuh berdampingan dan saling menguatkan perekonomian Sumatera Barat
4. Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Regional
   Meningkatkan konektivitas antar daerah dengan pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta pelabuhan dan juga melakukan optimalisasi jalur perdagangan antarprovinsi dan internasional melalui penguatan sektor maritim.
5. Peningkatan Investasi dan Kemudahan Berusaha
   Memberikan insentif pajak dan kemudahan regulasi bagi investor yang menanamkan modal di Sumbar. Mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk sektor industri dan perdagangan. Mendorong investasi di sektor energi terbarukan seperti PLTA dan energi geothermal.
6. Penguatan Sektor Perikanan dan Kelautan
   Pengembangan budidaya ikan air tawar dan air laut secara berkelanjutan.
   Peningkatan kesejahteraan nelayan melalui bantuan alat tangkap modern dan akses permodalan. Ekspansi ekspor hasil laut, seperti tuna dan ikan kerapu, ke pasar internasional.

3.1.4 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kota Sawahlunto

a. Pertumbuhan Ekonomi

Sebelum tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto mengalami tren positif dan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat maupun nasional. Namun tahun 2020 perekonomian Kota Sawahlunto terkontraksi sebesar -1,27% akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 sampai tahun 2024 perekonomian Kota Sawahlunto kembali tumbuh positif meskipun masih di bawah 5 %, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto kondisi sebelum pandemi Covid-19 yang terealisasi di atas 5,30 %.

Grafik 3.1
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

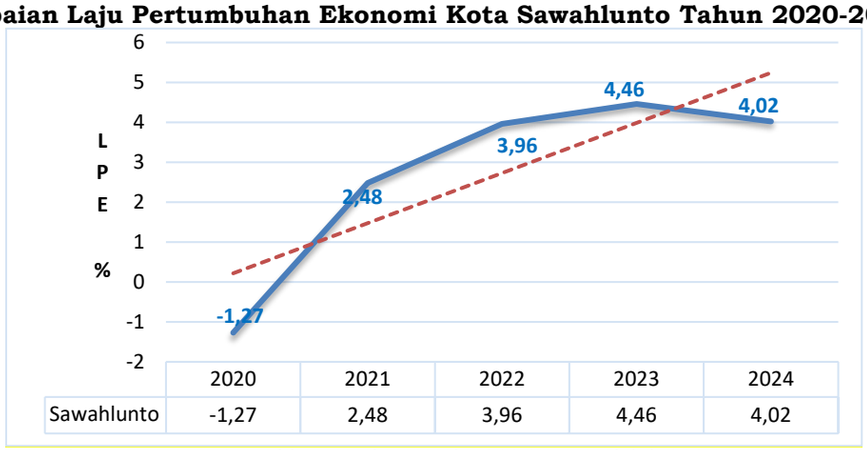

	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	-1,27	2,48	3,96	4,46	4,02

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Ekonomi Kota Sawahlunto tumbuh positif selama tahun 2020-2024 dengan dukungan lapangan usaha dominan dan jenis pengeluaran dominan, seperti lapangan usaha Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor, industri pengolahan, jenis pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, PMTB dan Konsumsi Pemerintah, dan lain-lain.

Perkiraan kondisi ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2025-2026 masih akan melanjutkan progres positif hingga 4,27% dan 6,71% dengan Stimulan terlihat dari semakin banyaknya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, dengan harapan upaya tersebut dapat merangsang pertumbuhan ekonomi kota yang bersumber pada sektor tersier.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah dapat diproksi dengan indikator PDRB per kapita, baik ADHB maupun ADHK. Indikator ini dapat menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk, sehingga dapat disandingkan dengan wilayah lain dalam membandingkan kemakmuran penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. PDRB per kapita berbanding lurus dengan tingkat kemakmuran penduduk, semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk, begitupun sebaliknya.

Berikut capaian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Per Kapita Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir:

Grafik 3.2
Capaian PDRB ADHB Per Kapita Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

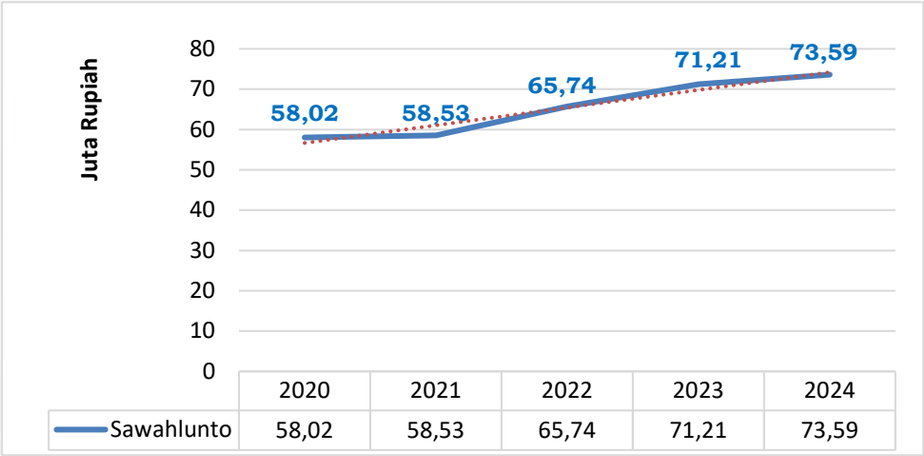

	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	58,02	58,53	65,74	71,21	73,59

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Berikut capaian PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Per Kapita Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Grafik 3.3
Capaian PDRB ADHK Per Kapita Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

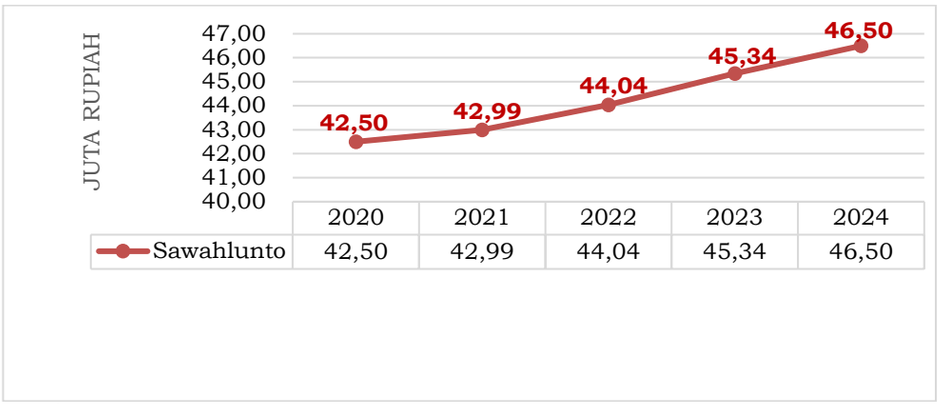

Sumber Data : BPS 2025

PDRB ADHB Per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 meningkat dari tahun ke tahun pada kisaran 0,88% – 12,32% dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,22% per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan terendah tahun 2021. Pada tahun 2024 PDRB ADHB per kapita hanya tumbuh sebesar 3,34% seiring dengan melambatnya perekonomian global, namun angka ini masih lebih tinggi dari PDRB ADHB per kapita Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 57,05 juta rupiah.

Merujuk pada perkembangan PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto lima tahun terakhir serta arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto lima tahun ke depan, maka pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan PDRB ADHB Per Kapita Kota Sawahlunto sebesar 80,61 juta rupiah dan 89,48 juta rupiah.

PDRB ADHK Per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 meningkat dari tahun ke tahun pada kisaran 1,15 % – 2,95 % dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,28 % per tahun. Meskipun pada tahun 2024 PDRB ADHK per kapita Kota Sawahlunto hanya tumbuh sebesar 2,56 % akibat melambatnya perekonomian global, namun angka ini masih lebih tinggi dari PDRB ADHK per kapita Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 34,17 juta rupiah.

Merujuk pada perkembangan PDRB ADHK per kapita Kota Sawahlunto lima tahun terakhir serta arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto lima tahun ke depan, maka pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan PDRB ADHK Per Kapita Kota Sawahlunto sebesar 47,81 juta rupiah dan 50,32 juta rupiah.

c. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto merupakan yang terendah di Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir dan masuk dalam 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional Tahun 2020-2024. Pada tahun 2020-2024 angka kemiskinan Kota Sawahlunto berada pada kisaran 2,16 – 2,38 % dari jumlah penduduk. Sebagian besar penduduk miskin Kota Sawahlunto merupakan kelompok lansia dan penyandang disabilitas.

Grafik 3.4
Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

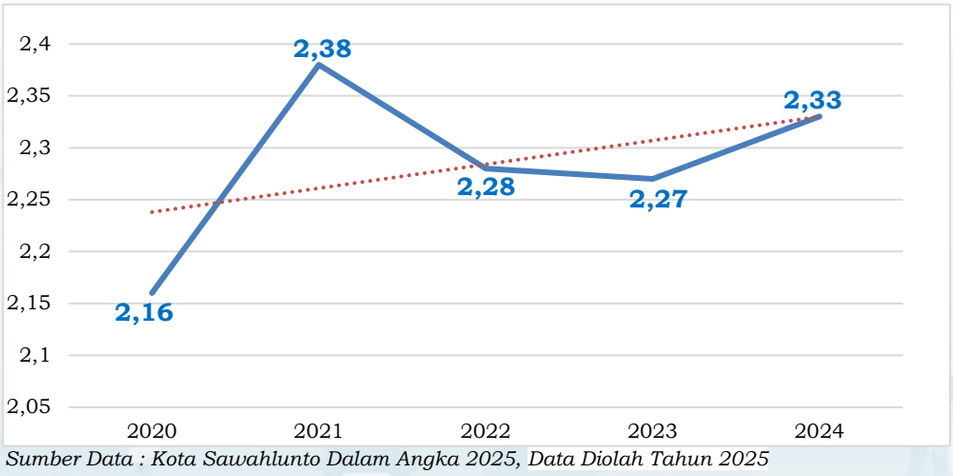

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah Tahun 2025

Berdasarkan pada perkembangan tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto lima tahun terakhir serta arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto lima tahun ke depan, maka pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto sebesar 1,98 % dan 1,92 %.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha, sudah diterima tetapi belum mulai bekerja, atau mereka yang merasa tidak akan mendapat pekerjaan/putus asa (*discourage works*).

Salah satu masalah utama wilayah perkotaan adalah tingginya angka pengangguran terbuka. Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk angkatan kerja tidak diiringi oleh pertumbuhan lapangan kerja, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi.

Grafik 3.5
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

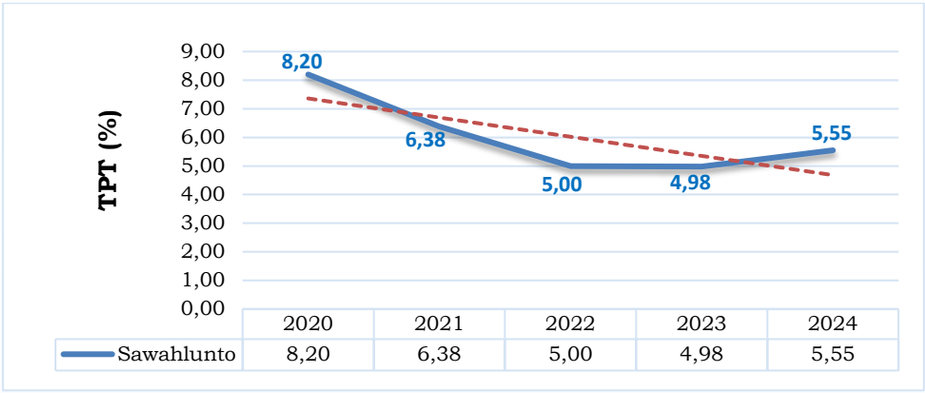

	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	8,20	6,38	5,00	4,98	5,55

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2025, Data Diolah Tahun 2025

Pada tahun 2020-2024 pengangguran terbuka di Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, walaupun pada tahun 2024 TPT Kota Sawahlunto meningkat sebesar 11,44%. Peningkatan TPT ini salah satunya disebabkan tidak diselenggarakan kegiatan *Job Fair* tahun 2024 di Kota Sawahlunto dan berkurangnya kegiatan pelatihan tenaga kerja pada BLK Kota Sawahlunto disebabkan adanya instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, dimana pada tahun 2024 kegiatan yang terlaksana hanya sebanyak 6 paket pelatihan yang dibiayai dari dana APBN. Sementara pada tahun 2023 terlaksana sebanyak 13 paket pelatihan, 6 paket pelatihan dibiayai oleh dana APBN dan 7 paket pelatihan dibiayai oleh dana APBD Kota Sawahlunto.

Merujuk pada perkembangan TPT Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir serta arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto lima tahun ke depan, maka pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan TPT Kota Sawahlunto sebesar 4,61 % dan 4,66 %.

e. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Gini Ratio adalah ukuran untuk menunjukkan "tingkat ketimpangan" pengeluaran atau pendapatan secara menyeluruh. Gini Ratio berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Gini Ratio bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna dari pengeluaran atau pendapatan, sedangkan apabila Gini Ratio bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna dari pengeluaran atau pendapatan.

Grafik 3.6
Capaian Gini Ratio Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

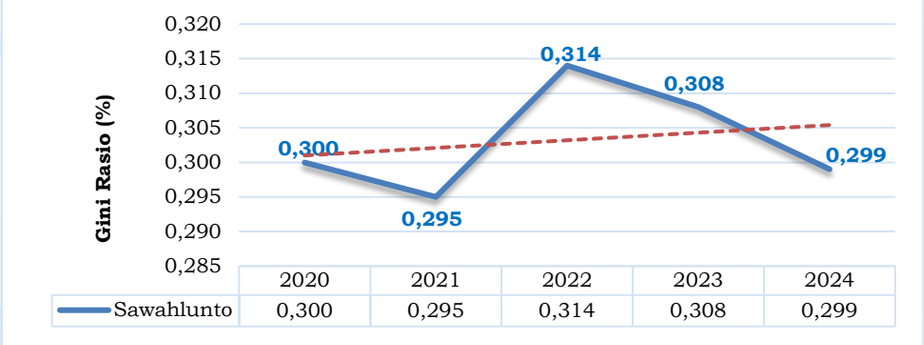

	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	0,300	0,295	0,314	0,308	0,299

Sumber Data : Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Data Diolah Tahun 2025

Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada kisaran (-1,67 %) – (-2,92 %) dengan rata-rata penurunan sebesar (-2,17 %) per tahun. Merujuk pada perkembangan Gini Ratio Kota Sawahlunto lima tahun terakhir serta arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto lima tahun ke depan, maka pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan Gini Ratio Kota Sawahlunto sebesar 0,297 dan 0,296.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang terdiri atas 3 (tiga) dimensi yakni kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan layak.

Grafik 3.7
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

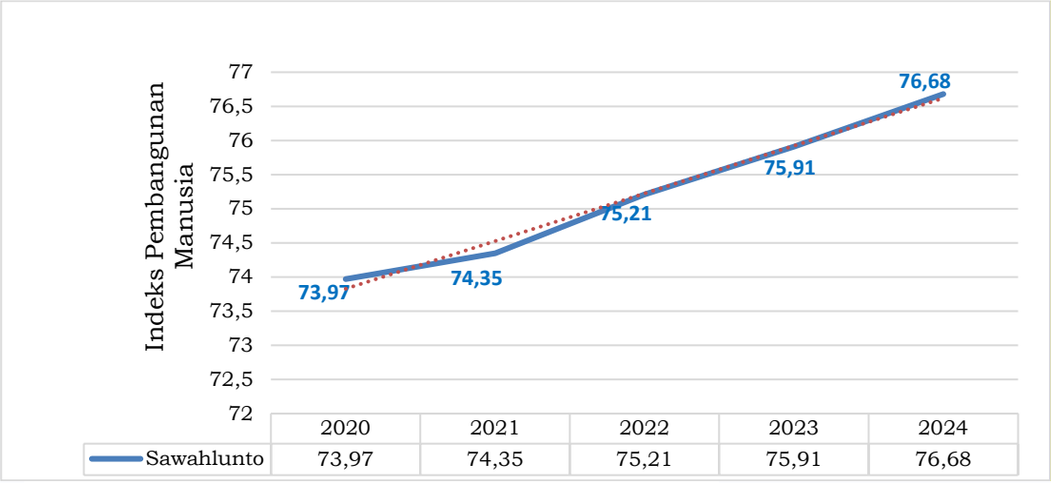

	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	73,97	74,35	75,21	75,91	76,68

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Sawahlunto pada tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan seluruh komponen yang dihitung dalam IPM juga terus mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto tergolong kategori tinggi, namun merupakan yang terendah dibandingkan 6 kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Merujuk pada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto lima tahun terakhir serta arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto lima tahun ke depan, maka pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto sebesar 77,45 dan 78,11.

3.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Kota Sawahlunto sampai akhir tahun 2026 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh aktivitas perekonomian regional, nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan perekonomian yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah :

1. Perlambatan ekonomi global dapat menekan permintaan terhadap produk ekspor Indonesia, sementara ketergantungan terhadap impor pangan untuk kebutuhan domestik dapat memberikan tekanan pada neraca perdagangan dan memperlebar defisit perdagangan serta stabilitas harga pangan;
2. Ketidakpastian ekonomi global, seperti perang tarif, konflik geopolitik, dan kebijakan moneter negara maju dapat menciptakan ketidakpastian dan volatilitas di pasar keuangan global dan mempengaruhi kinerja ekspor dan investasi nasional dan regional;
3. Suku bunga yang tinggi, baik di tingkat global maupun domestik, dapat menghambat pertumbuhan kredit dan investasi;
4. Penguatan dolar AS dapat memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global dan di sisi lain stabilitas harga barang impor rentan terhadap gejolak harga impor pangan yang dan ketersediaan pangan;
5. Tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama pada kelompok menengah ke bawah, yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan;

6. Kebijakan Pemerintah untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali dengan meningkatkan efisiensi belanja dan mengoptimalkan penerimaan negara mengurangi jumlah uang beredar yang menyebabkan perlambatan ekonomi nasional.
7. Perlambatan ekonomi global dan nasional dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial.
8. Konektivitas antar daerah yang terbatas sehingga investor kurang tertarik untuk berinvestasi.
9. Infrastruktur yang belum optimal dan daya saing industri masih rendah dibandingkan daerah lain.
10. Kondisi topografi Kota Sawahlunto yang dominan daerah perbukitan sehingga sering terjadi longsor.

Meskipun terdapat tantangan yang bersifat eksternal dan internal dalam perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2026, namun masih terdapat prospek ekonomi Kota Sawahlunto ke depan, yaitu :

1. Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pembangunan perekonomian daerah;
2. Meningkatnya daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.
3. Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia;
4. Meningkatnya produktivitas produk pertanian, peternakan dan perikanan;
5. Berkembangnya hilirisasi industri produk pertanian dan perikanan;
6. Berkembangnya produk unggulan Kota Sawahlunto melalui peningkatan ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, pengembangan promosi dan jejaring pemasaran produk-produk unggulan;

Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian Kota Sawahlunto beberapa tahun terakhir, tantangan dan daya dukung perekonomian Kota Sawahlunto serta prediksi ekonomi makro Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025-2026, maka prediksi ekonomi makro Kota Sawahlunto pada tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2025-2026

No	Indikator Makro Ekonomi	Prediksi	
		Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,27	6,71
2	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	80,61	89,48
3	PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	47,81	50,32
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,61	4,66
5	Tingkat Kemiskinan (%)	1,98	1,92
6	Gini Ratio	0,297	0,296
7	IPM	77,45	78,11

Sumber Data : RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

3.1.6. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2026

RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 berfokus pada percepatan ekonomi yang inklusif dengan tema pembangunan dalam RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif", dan tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 adalah "Perkuatan Pondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Selaras dengan tema RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026, Pemerintah Kota Sawahlunto memilih tema "Perkuatan Pondasi Keunggulan Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dalam RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026, dengan Arah kebijakan Ekonomi sebagai berikut :

1. Penataan sarana prasarana pendukung kepariwisataan dengan Infrastruktur yang Futuristik, Instagramable;
2. Pembangunan destinasi wisata baru di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan keberdayagunaan, tingkat daya saing, dan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian;
3. Mengoptimalkan fungsi Geopark nasional di Kota Sawahlunto;
4. Pengembangan kawasan terpadu kandih di Sawahlunto;

5. Meningkatkan daya tarik dan keunggulan pariwisata seperti pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, penginapan, fasilitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya di destinasi pariwisata;
6. Pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata unggulan di Sawahlunto yang mendukung status sebagai Warisan Dunia UNESCO Tambang Batubara Ombilin dan Geopark Nasional Sawahlunto;
7. Penyelenggaraan multi eventyang berkualitas yang mampu memacu tumbuh kembangnya elektabilitas dunia kepariwisataan Kota Sawahlunto seperti Multi Event Tourism, Event SISSCA melibatkan International Event yang optimal;
8. Membangun kemitraan pariwisata antar daerah;
9. Membangun sistem manajemen kepariwisataan yang efektif dan efisien (Top Management Tourism);
10. Penguatan branding destinasi dan produk wisata dengan Branding ulang destinasi yang ada;
11. Peningkatan kualitas layanan pariwisata. (Service Excellent Pariwisata, SOP Pelayanan Kepariwisataan);
12. Mendukung penerapan pariwisata halal mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi ramah muslim, dan lingkungan yang bebas dari alkohol atau produk non- halal;
13. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Event Kreatif (festival seni, musik, olahraga;
14. Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan penyediaan sarana MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions);
15. Memperluas promosi dan pemasaran, termasuk pemanfaatan kanal digital dan kolaborasi multi-stakeholder;
16. Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia;
17. Mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan penyediaan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, restoran, transportasi, biro travel, kuliner, pusat oleh-oleh dan cinderamata;
18. Mendukung penyelenggaraan event kreatif yang diinisiasi oleh kelompok/komunitas, BUMN/BUMD, swasta dan lain sebagainya;
19. Penguatan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan keterlibatan masyarakat lokal;
20. Peningkatan kapasitas SDM pariwisiata melalui pelatihan;
21. Revitalisasi / pembangunan pasar wisata terintegrasi;
22. Pendataan UKM dalam Mendorong pengembangan pasar online dan ekspor produk unggulan daerah;
23. Penyediaan pusat cenderamata dan oleh-oleh khas Sawahlunto yang lengkap dan mudah diakses wisatawan;
24. Penataan kawasan Rest Area di Kebun Jeruk dan Muaro Kalaban (Kecamatan Silungkang) sebagai kawasan perdagangan;
25. Pendataan IKM dalam rangka membangkitkan daya saing ekonomi;
26. Pembinaan terhadap IKM unggulan dapat memiliki akses pasar pada e- commerce platform;
27. Pengembangan Koperasi Merah Putih yang fokus pada sektor produksi/jasa potensial di masing-masing desa/kelurahan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah. Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus tantangan yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk menunjukkan kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dalam konteks penyusunan rancangan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 walaupun terjadi perubahan signifikan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, namun masih berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah. Sehingga analisis kinerja keuangan daerah akan disajikan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam bab ini disajikan gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam dua tahun terakhir . Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasar nya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun 2026 guna penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program–program pemerintah daerah. Oleh sebab itu Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Sehinga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun-tahun mendatang kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu difokuskan juga pada belanja yang memfokuskan kepada prioritas pembangunan daerah, isu-isu strategis terkait peningkatan ekonomi.

Selanjutnya pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedapankan prinsip akuntabilitas.

3.2.1 Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2022-2024

Analisis terhadap kinerja keuangan tahun anggaran 2022-2024 merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di tahun 2026 khususnya dalam memproyeksikan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya dapat diketahui rata-rata pertumbuhan dan kontribusi komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan indikator menganalisis kemampuan keuangan daerah yang diukur melalui kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Hal ini juga terkait dengan kemandirian keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam membiayai pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kota Sawahlunto periode tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2022- 2024

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	DOFD (%)	Pertumbuhan DOFD (%)
2022	620.647.226.213,62	66.920.994.265,62	10,78	2,18
2023	632.806.852.185,64	59.943.839.179,64	9,47	-1,31
2024	641.838.986.100,93	65.744.558.733,93	10,24	0,77
Rata-rata			**9,89**	

Sumber : LRA Audited 2022-2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa DOFD Kota Sawahlunto periode 2022-2024 rata-rata sebesar 9,89%. Secara keseluruhan DOFD Kota Sawahlunto menunjukkan DOFD yang masih sangat rendah atau sangat mengandalkan pendapatan dari penerimaan transfer baik transfer dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya.

Dari tabel diatas juga terlihat derajat desentralisasi fiskal daerah Kota Sawahlunto selama periode Tahun 2022-2024 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2022-2024 cenderung meningkat namun masih berada pada kategori kurang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan Kota Sawahlunto dalam melaksanakan desentralisasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program–program pemerintah daerah. Oleh sebab itu

kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Sehinga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2026 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya konkrit yang dapat menggali dan mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, sehingga Kota Sawahlunto tidak terlalu bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Kondisi derajat desentralisasi fiskal Kota Sawahlunto selama tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang belum optimal. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk membiayai pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan.

3.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022-2024

Komponen APBD Pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih daerah pada periode anggaran. Sedangkan pembiayaan daerah adaalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah Kota Sawahlunto terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Sawahlunto selama Tahun 2022-2024 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi pertahun hanya 0,01%. Hal ini tentunya bukanlah angka yang menggembirakan. Realisasi capaian pendapatan daerah dan tingkat pertumbuhan dan anggaran selama periode Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2022	626.757.178.292,00	620.647.226.213,62	99,03	4,73	0,04
2023	625.185.465.083,00	605.314.638.183,64	96,82	-0,25	-0,02
2024	642.895.237.441,36	641.838.986.100,93	99,84	2,83	0,06

Sumber : LRA audited Kota Sawahlunto (data diolah)

Pada tahun anggaran 2024 realisasi mencapai 99,84% dan terdapat pertumbuhan pendapatan sebesar 2,83%. Dari sisi pertumbuhan anggaran atas pendapatan daerah berfluktuasi setiap tahunnya dan cenderung mengalami penurunan namun pada tahun 2024 telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan atas pendapatan belum terlalu efektif, sehingga dibutuhkan intensifikasi dan ekstensifikasi atas pendapatan.

Perkembangan realisasi dan pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2022 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024	%
PENDAPATAN	**620.647.226.213,62**	**605.314.638.183,64**	**641.838.986.100,93**	**0,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**66.920.994.265,62**	**59.943.839.179,64**	**65.744.558.733,93**	**0,05**
Pendapatan Pajak Daerah	7.434.059.921,40	8.149.995.371,00	9.115.911.011,00	0,14
Pendapatan Retribusi Daerah	3.543.204.313,00	2.691.622.325,00	35.499.235.523,16	3,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.477.268.009,00	15.663.529.464,00	17.143.203.404,00	0,13
Lain-lain PAD yang Sah	42.466.462.022,22	33.438.692.019,64	3.986.208.795,77	-0,22

Uraian	2022	2023	2024	%
PENDAPATAN TRANSFER	**551.073.826.548,00**	**545.370.799.004,00**	**575.974.427.367,00**	0,01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**516.814.855.288,00**	**514.078.585.002,00**	**542.408.265.790,00**	0,03
Bagi Hasil Pajak	36.873.646.167,00	34.188.263.466,00	32.709.006.000,00	0,68
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam				
Dana Alokasi Umum	340.799.183.261,00	357.769.014.914,00	396.423.949.217,00	0,01
Dana Alokasi Khusus	113.999.178.860,00	100.781.993.622,00	77.829.612.573,00	0,05
Dana Insentif Daerah	5.044.116.000,00	-	13.892.503.000,00	-
Dana Desa	20.098.731.000,00	21.339.313.000,00	21.553.195.000,00	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**-**	**-**	**-**	**-**
Dana Penyesuaian	-	-	-	-
Dana Alokasi Desa	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**34.258.971.260,00**	**31.292.214.002,00**	**33.566.161.577,00**	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33.658.971.260,00	27.492.214.002,00	33.566.161.577,00	0,03
Bantuan Keuangan	600.000.000,00	3.800.000.000,00	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**2.652.405.400,00**	**-**	**120.000.000,00**	**-**
Pendapatan Hibah	-	-	120.000.000,00	-
Pendapatan Lainnya	2.652.405.400,00	-	-	-
Bantuan Keuangan	-	-	-	-

Sumber : LRA audited Kota Sawahlunto (data diolah)

Perkembangan realisasi pendapatan daerah untuk masing-masing komponen dijelaskan sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sumber pendapatan daerah harus seimbang dengan urusan pemerintah daerah, dengan mengoptimalkan potensi potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melaui Pajak dan Retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata selama Tahun 2022-2024 sebesar 0,02% dan tingkat realisasi PAD terhadap target yang ditetapkan dalam APBD selama tiga tahun terakhir secara rata-rata mencapai 97,37%. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan PAD belum mencapai angka yang maksimal, walaupun secara realisasi menunjukkan perkembangan capaian yang optimal. Sehingga kapasitas fiskal pembangunan masih tinggi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam membiayai pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dituntut agar dapat meningkatkan PAD melalui penggalian potensi sumber-sumber potensi PAD secara efektif dan transformatif.

Perkembangan realisasi PAD, tingkat capaian, tingkat pertumbuhan anggaran dan tingkat pertumbuhan realisasi Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Perkembangan Realisasi PAD, Tingkat Capaian, Tingkat Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realiasi Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2022	69.315.857.768,00	66.920.994.265,62	96,54	0,37	0,30
2023	66.783.021.097,00	59.943.839.179,64	89,76	-0,04	-0,10
2024	67.929.260.956,36	65.744.558.733,93	96,78	0,02	0,10
Rata-rata				**0,03**	**0,02**

Sumber : LRA Audited 2022-2023 (data diolah)

Ditinjau dari sisi kontribusi komponen PAD terhadap PAD dalam rentang waktu 2022-2024 masih didominasi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata sebesar 55,78% disusul penerimaan pajak daerah sebesar 13,60%, retribusi daerah sebesar 4,49%. Sedangkan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,59%. Namun pada tahun 2024, retribusi daerah menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kode rekening pendapatan BLUD RSUD dari lain-lain pendapatan daeran yang sah menjadi retribusi daerah.

b) Pendapatan Transfer

Untuk pendapatan transfer, pada penerimaan Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan karena adanya kenaikan gaji PNS di tahun 2024 dan adanya penambahan alokasi DAU yang ditentukan peruntukannya. Untuk Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik rata-rata terjadi penurunan. Berikut tabel perbandingan pendapatan transfer pusat ke daerah tahun 2022 – 2024 :

Tabel 3.6
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Uraian	2022	2023	2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**525.076.266.264,00**	**511.145.788.000,00**	**535.700.109.000,00**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	**28.544.050.903,00**	**27.204.767.000,00**	**32.636.905.000,00**
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	**341.124.424.361,00**	**356.278.450.000,00**	**381.865.492.000,00**
DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	-	276.937.890.000,00	321.981.891.000,00
DAU Penggajian P3K	-	20.519.466.000,00	17.354.466.000,00
DAU Pendanaan Kelurahan	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
DAU Bidang Pendidikan	-	11.539.812.000,00	10.068.172.000,00
DAU Bidang Kesehatan	-	21.707.230.000,00	11.517.148.000,00
DAU Bidang Pekerjaan Umum	-	23.574.052.000,00	18.943.815.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	**81.827.919.000,00**	**54.035.717.000,00**	**35.173.088.000,00**
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**48.437.025.000,00**	**53.125.393.000,00**	**51.481.022.000,00**
Dana Insentif Daerah (DID)	**5.044.116.000,00**	**-**	**13.892.503.000,00**
Dana Desa	**20.098.731.000,00**	**20.501.461.000,00**	**20.651.099.000,00**

Sumber : APBD 2022-2024

Perkembangan pendapatan transfer Tahun 2022-2024 cenderung stagnan, hal ini ditandai belum optimalnya tingkat capaian realisasi berada dibawah 100%. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perkembangan capaian realisasi pendapatan transfer Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Perkembangan Capaian Realisasi Pendapatan Transfer Kota Sawahlunto
Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)
2022	554.692.189.893,00	551.073.826.548,00	99,35
2023	558.402.443.986,00	545.370.799.004,00	97,67
2024	574.845.976.485,00	575.974.427.367,00	100,20
Rata-rata			99,07

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa baik dari segi anggaran maupun realisasi pendapatan transfer mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Kondisi ini berimplikasi terhadap kapasitas riil keuangan daerah dalam membiayai belanja pembangunan daerah. Pada tahun anggaran 2024, realisasi pendapatan transfer mencapai 100,20% dan hal ini dikarenakan adanya penerimaan transfer TDF dari pemerintah pusat sebesar Rp15M.

a. Dana Bagi Hasil

Perkembangan realisasi target dana bagi hasil Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024 cenderung berfluktuatif. Perkembangan capaian realisasi dana bagi hasil pajak/bukan pajak Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Perkembangan Capaian Realisasi Dana Bagi Hasil Kota Sawahlunto
Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)
2022	28.544.050.903,00	36.873.646.167,00	129,18
2023	32.682.958.000,00	34.188.263.466,00	104,61
2024	32.726.936.635,00	32.709.006.000,00	99,95
Rata-rata			111,25

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

Rata-rata realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah 111,25%.

b. Dana Alokasi Umum

Perkembangan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024 pada umumnya sesuai dengan target. Kecenderungan minusnya pertumbuhan DAU ini sangat dipengaruhi adanya kebijakan Pemerintah dan bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun anggaran 2024, terdapat penerimaan DAU untuk PPPK yang tidak terealisasi 100%, namun secara keseluruhan realisasi mencapai 103,81% dikarenakan adanya penerimaan dana TDF sebesar Rp15M. Perkembangan capaian realisasi dan pertumbuhan DAU Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Umum
Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2022	341.124.424.361,00	340.799.183.261,00	99,90	0,00
2023	356.278.450.000,00	357.769.014.914,00	100,42	0,05
2024	381.865.492.000,00	396.423.949.217,00	103,81	0,11
Rata-rata				-0,01

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

c. Dana Alokasi Khusus

Perkembangan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024 cenderung stagnan. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK tidak sesuai dengan diharapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Hal ini disebabkan, pada umumnya keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari Kementerian/Lembaga terkait dan terjadinya perubahan kebijakan tahun anggaran berjalan. Kecenderungan minusnya pertumbuhan DAK ini sangat dipengaruhi adanya kebijakan Pemerintah dan bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perkembangan capaian realisasi dan pertumbuhan DAK Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2022	130.264.944.000,00	113.999.178.860,00	87,51	0,59
2023	107.161.110.000,00	100.781.993.622,00	94,05	-0,12
2024	86.654.110.000,00	77.829.612.573,00	89,82	-0,23
Rata-rata				0,04

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

d. Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi

Tabel 3.11
Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi
Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2022	29.615.923.629,00	34.258.971.260,00	115,68	0,19
2023	40.940.612.986,00	31.292.214.002,00	76,43	-0,09
2024	38.153.739.850,00	33.566.161.577,00	87,98	0,07
Rata-rata				0,05

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

Untuk pendapatan transfer dari Pemerintah Propinsi, maka dapat dilihat mengalami fluktuasi dan selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan.

c) Lain-lain pendapatan yang sah

Tabel 3.12
Lain – lain Pendapatan yang Sah
Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2022	2.749.130.631,00	2.652.405.400,00	96,48	-0,68
2023	0,00	0,00	0,00	-1,00
2024	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	
Rata-rata				-0,17

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024(data diolah)

Untuk lain-lain pendapatan yang sah, mengalami penurunan setiap tahunnya. Untuk tahun anggara 2023, Kota Sawahlunto tidak ada anggaran dan realisasi untuk pendapatan lain-lain. Pada tahun anggaran 2024, terdapat anggaran dan realisasi hibah dari Bank Nagari sebesar Rp120 juta yang diperuntukkan untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

3.2.1.1.2 Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Maka evaluasi realisasi belanja daerah sangat penting dalam melihat perkembangan kinerja pembangunan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan daerah Kota Sawahlunto selama periode 2022-2024.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan

Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga; 4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Perkembangan kinerja realisasi belanja daerah Tahun 2022-2024 cenderung cukup optimal karena capaiannya rata-rata sebesar 91,25% dan diikuti rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 0,03%. Perkembangan capaian realisasi dan pertumbuhan serta realisasi belanja daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13
Perkembangan Capaian Realisasi, Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2022	682.809.902.738,00	643.653.414.741,00	94,27	0,07
2023	669.237.924.585,00	607.064.912.961,00	90,71	-0,06
2024	661.367.728.186,00	623.136.378.770,99	94,22	0,03
Rata-rata			93,06	0,03

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

Sedangkan pertumbuhan komponen belanja daerah Kota Sawahlunto periode 2022-2024 untuk pelayanan dasar belum menunjukkan peningkatan yang signifikan karena belanja modal bertumbuh secara rata-rata sebesar 0,11%. Sementara itu, pertumbuhan belanja operasi yang paling tinggi terdapat pada komponen belanja hibah yakni bertumbuh sebesar 0,99% dan diikuti oleh belanja barang dan jasa sebesar 0,16%. Tingginya belanja hibah pada tahun anggaran 2023 dan 2024 dikarenakan adanya hibah ke KPU dan TNI/Polri untuk pelaksanaan Pilkada serentak.

Lebih tingginya rata-rata pertumbuhan komponen belanja hibah dan belanja barang dan jasa dibandingkan dengan komponen belanja modal mencerminkan belum proporsionalnya alokasi belanja daerah terhadap pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2019-2023.

Tabel 3.14
Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022-2024

URAIAN	2022	2023	2024	rata-rata
BELANJA	**589.240.216.141,00**	**607.064.912.961,00**	**623.136.378.770,99**	
Belanja Operasi	**468.731.239.357,00**	**465.316.924.124,00**	**483.711.172.548,99**	**84,89**
Belanja Pegawai	259.237.850.902,00	246.879.933.557,00	275.738.214.701,00	53,06
Belanja Barang dan Jasa	190.660.034.017,00	189.393.433.222,00	186.955.981.790,99	31,20
Belanja Bunga	891.962.272,00	1.122.101.270,00	1.052.126.059,00	0,59
Belanja Hibah	14.110.242.166,00	24.475.356.075,00	17.587.499.998,00	0,04
Belanja Bantuan Sosial	3.831.150.000,00	3.446.100.000,00	2.377.350.000,00	0,01
Belanja Modal	**116.514.679.424,00**	**84.381.971.361,00**	**73.075.789.709,00**	13,90
Belanja Modal Tanah	-	-		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.666.803.013,00	12.084.173.858,00	35.246.025.880,00	4,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.516.117.751,00	35.635.719.133,00	12.043.741.217,00	5,87

URAIAN	2022	2023	2024	rata-rata
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.231.799.760,00	36.392.598.160,00	24.991.542.821,00	5,99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	99.958.900,00	269.480.210,00	794.479.791,00	1,10
Belanja Modal Dana BOS				
Belanja Modal Dana BLUD				
BeLanja Tak Terduga	**294.991.005,00**	**836.646.211,00**	**2.479.496.967,00**	**0,14**
BeLanja Tak Terduga	294.991.005,00	836.646.211,00	2.479.496.967,00	**0,14**
TRANSFER	**3.699.306.355,00**	**56.529.371.265,00**	**63.869.919.546,00**	**9,31**
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**1.046.900.955,00**	**954.510.748,00**	**857.466.546,00**	**0,16**
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	637.792.686,00	620.462.410,00	622.798.506,00	
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	409.108.269,00	334.048.338,00	234.668.040,00	
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	-			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**2.652.405.400,00**	**55.574.860.517,00**	**63.012.453.000,00**	**9,15**
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.652.405.400,00	55.574.860.517,00	63.012.453.000,00	
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
Surplus/defisit	**-23.006.188.527,38**	**-1.750.274.777,36**	**18.702.607.329,94**	

Sumber : LRA Audited 2022-2024 (data diolah)

3.2.1.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang;dan
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan Anggaran.

Memanfaatkan pembiayaan daerah secara signifikan merupakan fokus kebijakan dalam proses pembangunan daerah, kecuali pemanfaatan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun sebelumnya yang di gunakan untuk proses pembiayaan anggaran tahun anggaran selanjutnya. Rata-rata pertumbuhan SilPA Tahun 2022-2024 tercapai 0,27%, sehingga berimplikasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Cukup tingginya SilPA disebabkan karena disamping adanya kebijakan pengunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan rata-rata pertumbuhan sisa lebih pembiayaan anggaran berkorelasi dengan rata-rata pertumbuhan SiLPA. Perkembangan realisasi dan pertumbuhan pembiayaan daerah tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15
Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022-2024

URAIAN	2022	2023	2024	%
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**38.719.707.744,76**	**12.116.356.260,00**	**8.772.197.707,02**	
Penggunaan SILPA	38.719.707.744,76	12.114.946.260,00	8.753.029.707,02	0,37

URAIAN	2022	2023	2024	%
Pinjaman Dalam Negeri				
Penerimaan Kembali Piutang	-	1.410.000,00	19.168.000,00	-0,23
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**3.636.666.668,00**	**1.369.666.668,00**	**1.166.666.666,00**	**0,11**
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00			0,41
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00	1.166.666.666,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	470.000.000,00	203.000.000,00		
Pembiayaan Netto	**35.083.041.076,76**	**10.746.689.592,00**	**7.605.531.041,02**	**0,42**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**12.076.852.549,38**	**8.996.414.814,64**	**7.605.531.041,02**	**-0,27**

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dalam periode 2022-2024 Pemerintah Kota Sawahlunto mengalami defisit anggaran, namun dapat ditutupi oleh pembiayaan neto yang ada. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan daerah selama tiga tahun terakhir cenderung kurang optimal dalam memenuhi fiskal pembangunan. Sehingga berdampak terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah yang tidak dapat berjalan secara maksimal.

3.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2022-2024

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pendapatan daerah dan besarannya sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan program-program pembangunannya. Pendapatan daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat Pendapatan daerah diupayakan selalu meningkat seiring pertumbuhan indikator kondisi perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baik dari potensi daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

Kebijakan pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup: a). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, b). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek pendapatan yang terdiri dari: a). Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, b). Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, c). Jasa Giro, d). Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, e). Pendapatan Bunga, f). Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, g). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, h). Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan i). Pendapatan dari Pengembalian, j). Pendapatan BLUD, k). Pendapatan Denda atas Pelanggaran Daerah.

Permasalahan utama pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2022-2024 adalah :

1. Tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Sawahlunto terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Propinsi. Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan hanya berkisar 8-11%. Pendapatan Kota Sawahlunto sangat bergantung pada penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
2. Kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dan stabilitas nasional menyebabkan adanya penyesuaian dan perubahan pada postur APBN yang berdampak pada penyaluran dana transfer dan dana desa. Ditambah dengan aturan pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis dan mengalami perubahan aturan, misalnya kebijakan restrukturisasi anggaran.
3. Hak-hak pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil belum optimal karena kurang akuratnya alokasi untuk pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu sumber penerimaan PAD. Berdasarkan data laporan keuangan selama beberapa tahun terakhir ini, maka dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kecil. Perlu dilakukan kajian dan inventarisasi terhadap pengoptimalan pemanfaatan barang milik daerah demi peningkatan pendapatan. Masih banyaknya potensi pendapatan yang belum tergali serta aset barang milik daerah yang bersifat *idle* mengakibatkan kerugian bagi Kota Sawahlunto.

5. Belum optimalnya kinerja keuangan beberapa unit usaha daerah sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah. Pada Kota Sawahlunto, beberapa unit usaha belum memberikan kontribusi pendapatan terhadap pendapatan daerah. Penerimaaan hanya diperoleh dari Bank Nagari berupa dividen atas penyertaan modal pada bank tersebut

Dari analisa permasalah yang ada di atas maka kebijakan pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, perbaikan administrasi perpajakan dan peningkatan kerja sama dengan *stakeholder*. Dengan adanya Undang- Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Kota Sawahlunto perlu melakukan penyederhanaan sistem perpajakan dan retribusi sesuai amanat UU tersebut.
2. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui pengembangan aplikasi sistem pemungutan secara elektronik dan *push android* yang menyajikan tagihan secara *real time* dan dukungan transaksi non tunai.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan secara tepat dan kondusif melalui pelatihan, pelayanan yang mudah dan berkualitas serta edukasi dan hubungan masyarakat yang efektif.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung peningkatan pendapatan daerah.
5. Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
6. Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
7. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi pendapatan daerah seiring dengan makin membaiknya tingkat perekonomian daerah yakni menjadi Rp. 620.582.717.802,53 atau terdapat peningkatan sebesar 3,77% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan jika dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah, maka diketahui bahwa Kota Sawahlunto berada pada tingkat yang sangat kurang, artinya sangat mengandalkan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan provinsi. Sedangkan jumlah PAD yang dihasilkan sangat minim, sehingga Kota Sawahlunto dikategorikan sangat tidak mandiri dalam penyediaan anggaran.

Kebijakan Pengelolaan Belanja

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga; 4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan Belanja Daerah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Pemenuhan *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :
   - Alokasi anggaran pendidikan secara konisten dan berkesinambungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indicator SPM bidang pendidikan.
   - Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan secara konsisten dan berkesinambungan serta memadai untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian SPM bidang kesehatan.
   - Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
5. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
6. Belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk meningkatkan kemampuan pendapatan daerah.
7. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
8. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
b. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang;dan
c. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan Anggaran.

Sementara itu, disisi kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2022-2024, dibagi atas dua yaitu, penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan dalam rangka penerimaan pembiayaan
   a. melakukan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diprioritaskan untuk membiayai kegiatan lanjutan serta membiayai utang belanja tahun sebelumnya serta sekaligus dalam menutup defisit anggaran.
   b. Melakukan pencairan atas dana cadangan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto
   c. Melakukan pemungutan dan penagihan atas piutang daerah.

2. Kebijakan dalam rangka pengeluaran pembiayaan
   a. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pembangunan pasar sesuai dengan perjanjian dengan International Bank For Recontruct & Development Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 11 April 2011 selama 20 tahun hingga Tahun 2030.
   b. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, yang pengelolaannya melaui UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/UKM dan masyakat.

3.2.3 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah pada RKPD Tahun 2026

Untuk proyeksi pendapatan dan belanja tahun 2026, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1. Kebijakan nasional atau peraturan yang lebih tinggi, antara lain :
   a. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dimana Undang -undang tersebut memiliki hubungan erat dengan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). UU ini bertujuan untuk memperkuat desentralisasi fiskal, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.
   b. Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tetang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menginstruksikan Kepala Daerah untuk membatasi belanja dan mefokuskan alokasi anggaran pada pelayanan publik.
   c. Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan yang merupakan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui koperasi dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan, mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
   d. Diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 14 Februari 2025 yang menetapkan kepala daerah baru Kota Sawahlunto periode 2025-2030

e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Perubahan Alokasi Rincian Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
f. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor : 33.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal penyesuaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024.
g. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional sehingga diperlukan beberapa penyesuaian belanja.

Selain mempedomani adanya perubahan ketentuan perundang-undangan dalam penyusunan kebijakan pendapatan daerah, kinerja keuangan tahun sebelumnya juga perlu menjadi perhatian. Berikut kebijakan pendapatan daerah Kota Sawahlunto untuk tahun 2026 adalah :

3.2.4 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Diproyeksikan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang,. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Dalam memproyeksikan pendapatan tahun 2026 digunakan format penyajian sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

a) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.
b) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain).
c) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
d) Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

3.2.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyelenggaraan otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sumber pendapatan daerah harus seimbang dengan urusan pemerintah daerah, dengan mengoptimalkan potensi potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melaui Pajak dan Retribusi.

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

   Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi beberapa perubahan dalam pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian juga terdapat jenis pajak baru bagi daerah yakni opsen pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi.

Selain ini juga terdapat restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini bertujuan antara lain untuk :

a. Untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
b. Menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
c. Memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh pemerintah daerah; dan
d. Mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan antara lain :

a. Agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan yang lebih rendah.
b. Mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Dari uraian di atas maka disusunlah beberapa kebijakan pendapatan daerah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah :

a. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya, data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun -tahun sebelumnya;
b. Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan PBB P2 dan penagihan pajak daerah lainnya.
c. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi.
d. Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD;

2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk Tahun Anggaran 2026 memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

3. Penganggaran penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah dilakukan dengan memperhatikan :
   a. Pendapatan dari jasa giro yang dipengaruhi oleh besar atau kecilnya dana pemerintah daerah yang ada pada rekening kas daerah.
   b. Pendapatan dari bunga deposito diperhitungkan besaran dana pemerintah daerah yang diinvestasikan.

3.2.4.2 Pendapatan Transfer

Untuk pendapatan transfer, pada penerimaan Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan karena adanya kenaikan gaji ASN dan kewajiban untuk melakukan pengangkatan CPNS dan PPPK. Untuk Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik rata-rata terjadi penurunan.

Dari uraian di atas maka disusunlah beberapa kebijakan terkait dengan pendapatan transfer :

1. Mengupayakan peningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
2. Mengupayakan peningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun Kota Sawahlunto sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Sawahlunto dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.

3. Mengupayakan peningkatan Dana Insentif Fiskal Daerah untuk menambah sumber pendapatan dan penerimaan daerah dengan mengupayakan pencapaian indikator kinerja yang digunakan dalam penilaian.
4. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
5. Mengupayakan peningkatan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Sawahlunto.
6. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan pihak ketiga lainnya.

Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) sumber yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Dalam proyeksi pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2026 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dan data keuangan APBD Tahun 2024 serta identifikasi potensi pajak dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan daerah Kota Sawahlunto tidak terpaut jauh dengan pendanaan indikatif tahun yang terdekat.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2026 direncanakan bersumber dari sumber-sumber sebagai berikut :

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:
   A. Dana Perimbangan :
      (1) Dana Bagi Hasil (DBH)
      (2) Dana Alokasi Umum (DAU)
      (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
      (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
   B. Dana Desa (DD)
      Merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa.
   C. Insentif Fiskal
      Insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
2. Transfer Antar Daerah
   a. Pendapatan Bagi Hasil
      Merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak air permukaan dan pajak rokok dialokasikan sesuai Peraturan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi .
   b. Bantuan Keuangan
      Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Sawahlunto sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Berlandaskan kebijakan pendapatan daerah tersebut, sehingga proyeksi pendapatan Kota Sawahlunto Tahun 2026 dengan mempertimbangkan analisis pendapatan daerah yang terukur, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Sawahlunto
Tahun 2026

Kode Rekening	URAIAN	REALISASI 2023	APBD 2024	APBD 2025	APBD 2026	APBD 2027
1	2	4	5	3	4	4
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**605.314.638.183,64**	**639.083.141.441,36**	**580.022.893.950,00**	**579.534.759.608,88**	**599.657.825.455,41**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**59.943.839.179,64**	**65.139.260.956,36**	**75.593.282.944,00**	**77.105.148.602,88**	**99.228.214.449,41**
4.1.01	Pajak Daerah	8.149.995.371,00	7.548.000.000,00	15.576.717.548,00	15.888.251.898,96	19.860.314.873,70
4.1.02	Retribusi Daerah	2.691.622.325,00	35.304.800.262,00	34.992.938.253,00	35.692.797.018,06	42.831.356.421,67
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.663.529.464,00	17.156.352.664,00	17.153.003.674,00	17.496.063.747,48	24.494.489.246,47
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	33.438.692.019,64	5.130.108.030,36	7.870.623.469,00	8.028.035.938,38	12.042.053.907,57
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**59.943.839.179,64**	**65.139.260.956,36**	**75.593.282.944,00**	**77.105.148.602,88**	**99.228.214.449,41**
	PENDAPATAN TRANSFER	**545.370.799.004,00**	**573.943.880.485,00**	**504.429.611.006,00**	**502.429.611.006,00**	**500.429.611.006,00**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	492.739.272.002,00	501.246.538.635,00	464.352.719.000,00	464.352.719.000,00	463.352.719.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	34.188.263.466,00	32.726.936.635,00	26.231.545.000,00	26.231.545.000,00	26.231.545.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	357.769.014.914,00	381.865.492.000,00	382.035.642.000,00	382.035.642.000,00	382.035.642.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	50.548.393.204,00	35.173.088.000,00	6.355.359.000,00	6.355.359.000,00	6.355.359.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	50.233.600.418,00	51.481.022.000,00	49.730.173.000,00	49.730.173.000,00	48.730.173.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**492.739.272.002,00**	**501.246.538.635,00**	**464.352.719.000,00**	**464.352.719.000,00**	**463.352.719.000,00**
4.2.01.02	Dana Insentif Fiskal	-	13.892.503.000,00	8.752.114.000,00	6.752.114.000,00	5.752.114.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	21.339.313.000,00	20.651.099.000,00	21.612.927.000,00	21.612.927.000,00	21.612.927.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**21.339.313.000,00**	**34.543.602.000,00**	**30.365.041.000,00**	**28.365.041.000,00**	**27.365.041.000,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.292.214.002,00	38.153.739.850,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	27.492.214.002,00	38.153.739.850,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	3.800.000.000,00				
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**31.292.214.002,00**	**38.153.739.850,00**	**9.711.851.006,00**	**9.711.851.006,00**	**9.711.851.006,00**
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	**545.370.799.004,00**	**573.943.880.485,00**	**504.429.611.006,00**	**502.429.611.006,00**	**500.429.611.006,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**605.314.638.183,64**	**639.083.141.441,36**	**580.022.893.950,00**	**579.534.759.608,88**	**599.657.825.455,41**

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan bahwa pendapatan daerah mengalami fluktuasi. Untuk angka pendapatan asli daerah, maka diproyeksikan mengalami peningkatan. Sedangkan untuk proyeksi dana transfer diperkirakan mengalami penurunn. Angka ini dikarenakan adanya kebijakan presiden terkait efisiensi belanja melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 , Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Perubahan Rincian TKD Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ. Hal in berdampak pada pengurangan pendapatan DAK sebesar Rp26 M dan DAU Pekerjaan Umum sebesar Rp11 M.

Strategi dalam peningkatan pendapatan Kota Sawahlunto adalah :

a. Pemerintah Daerah harus memiliki target kemandirian fiskal di atas 50 persen sebagai pijakan penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah, maka perlu disusun secara komprehensif peta jalan kemandirian fiskal dengan fokus pada peningkatan PAD dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan sah.

b. Reformasi kebijakan fiskal daerah perlu dilakukan dengan memperbaiki basis data perpajakan, melakukan intensifikasi penagihan, meningkatkan transparansi pelayanan, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui kanalkanal digital yang terintegrasi

c. Optimalisasi sumber PAD mencakup pembaruan data potensi pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi dalam monitoring pendapatan, dan mendorong setiap OPD untuk menciptakan inovasi pelayanan publik berbayar yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan.

d. Pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki pelayanan perpajakan akan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, program literasi pajak untuk masyarakat dan pelaku usaha juga akan diperkuat agar kesadaran membayar pajak tumbuh secara alami tanpa tekanan administratif.

e. Membangun dan mengembangkan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi melalui QRIS, ewallet, dan aplikasi mobile banking. Semua jenis pajak dan retribusi harus bisa dibayarkan melalui berbagai kanal digital untuk meningkatkan kenyamanan dan partisipasi masyarakat

f. Melakukan implementasi dashboard monitoring pendapatan secara real time yang akan mempercepat deteksi terhadap potensi penyimpangan dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Transparansi ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah

g. Membangun analisis data besar (big data analytics) untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Tax intelligence berbasis data ini akan memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menargetkan sektor-sektor yang memiliki potensi pajak tinggi namun masih belum dimaksimalkan. Dengan menggunakan alat analisis data dan model prediksi, pengelolaan pajak daerah akan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah.

h. Performance-Based Revenue Targeting per OPD yakni setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan PAD memiliki key performance indicators (KPI) berbasis target pendapatan yang jelas dan terukur. Penerapan sistem penilaian kinerja yang berbasis pada pencapaian target PAD akan memastikan setiap OPD memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini akan memudahkan Pemerintah Daerah untuk memantau, mengevaluasi, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

i. Optimalisasi Pajak Daerah Kendaraan Bermotor, dengan:

   1. Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang saat ini hanya sekitar 50- 60%. Ini dapat dicapai dengan menggunakan sistem digital untuk mempermudah pembayaran dan pengawasan

   2. Program edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat pembayaran pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

   3. Mengintegrasikan data kendaraan dengan sistem Samsat Online untuk mempermudah identifikasi kendaraan yang belum bayar pajak, serta meningkatkan efisiensi penagihan

j. Meningkatkan sumber Pendapatan Lain, Terutama Aset, melalui memaksimalkan pengelolaan aset daerah yang belum optimal, seperti tanah dan bangunan milik daerah yang dapat disewakan atau dijadikan objek kerjasama dengan pihak ketiga

k. Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan.

l. Mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk public-private partnership (PPP) untuk mengelola aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

m. Melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga, melalui :

1. Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam pengelolaan proyek besar yang dapat menghasilkan pendapatan baru, baik dalam bentuk pembangunan bersama maupun kerjasama untuk pengelolaan layanan publik.
2. Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam pembiayaan pembangunan daerah atau program keberlanjutan.

3.2.4.3 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat, serta dapat memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Beberapa kebijakan yang telah diambil untuk penggunaan alokasi belanja yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
2. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran
3. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal
4. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat
5. Prinsip pelaksanaan kegiatan menjadi *money follow program*
6. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat banyak bagi masyarakat
7. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dalam mengalokasikan anggaran
8. Penetapan tolak ukur dan target kinerja pada setiap kegiatan yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
9. Memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban

Berikut beberapa kebijakan belanja daerah Kota Sawahlunto terdiri atas :

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
   a. Belanja pegawai
      - Pemerintah daerah berkomitmen tetap berupaya dalam mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja.

- Penganggaran gaji dan tunjangan memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengalokasi penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan kerja dan jaminan kematian.

b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarakan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian RPD pada SKPD terkait.

c. Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman.

d. Belanja Subsidi digunakan untuk subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat sesuai dnegn ketentuan peaturan perundang-undangan.

e. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan pilihan kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Hibah dianggarkan sebesar harga beli/bangun ditambah seluruh belanja terkait langsung.

f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang/barang untuk yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

2. Hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD antara sebagai berikut :
   a. Pemenuhan *Mandatory Spending*
   b. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Melakukan alokasi penggunaan penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan antara lain sebagai berikut :
   a. Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
   b. Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik:
   - hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan
   - penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).

   c. Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
4. Penggunaan Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
5. Belanja tidak terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
6. Belanja transfer merupakan pengeluaran kepada daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah.

Sedangkan kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib mengikat, belanja prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta belanja pendukung lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut :

1. Mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Sawahlunto;
2. Penganggaran belanja operasi diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat;
3. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
4. Pemanfaatan belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan daerah setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto;
5. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
6. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.

Proyeksi belanja Kota Sawahlunto tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17
Proyeksi Belanja Daerah
Kota Sawahlunto
Tahun 2026

Kode Rekening	URAIAN	REALISASI 2023	APBD 2024	APBD 2025	APBD 2026	APBD 2027
5	**BELANJA DAERAH**	**607.064.912.961,00**	**646.412.889.586,37**	**601.314.487.571,00**	**577.868.092.939,88**	**597.991.158.786,41**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**465.316.924.124,00**	**497.662.733.750,37**	**506.645.368.257,00**	**435.265.897.070,20**	**282.616.069.397,86**
5.1.01	Belanja Pegawai	246.879.933.557,00	290.225.848.879,99	309.202.775.681,00	293.659.642.878,84	184.090.284.344,47
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.393.433.222,00	184.166.020.746,38	185.097.832.618,00	137.133.122.601,36	94.875.785.053,39
5.1.03	Belanja Bunga	1.122.101.270,00	1.250.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	24.475.356.075,00	18.622.164.124,00	8.184.759.958,00	1.823.131.590,00	1.500.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.446.100.000,00	3.398.700.000,00	3.010.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**465.316.924.124,00**	**497.662.733.750,37**	**506.645.368.257,00**	**435.265.897.070,20**	**282.616.069.397,86**
5.2	**BELANJA MODAL**	**84.381.971.361,00**	**81.550.463.785,00**	**25.025.329.284,00**	**75.525.835.869,68**	**248.298.729.388,56**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.084.173.858,00	34.301.080.979,00	7.128.218.840,00	7.270.783.216,80	22.332.424.924,38
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.635.719.133,00	14.406.105.206,00	1.281.800.000,00	51.307.436.000,00	106.619.634.090,49
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.392.598.160,00	32.672.891.000,00	15.945.692.630,00	16.264.606.482,60	118.650.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	269.480.210,00	170.386.600,00	669.617.814,00	683.010.170,28	696.670.373,69
	JUMLAH BELANJA MODAL	**84.381.971.361,00**	**81.550.463.785,00**	**25.025.329.284,00**	**75.525.835.869,68**	**248.298.729.388,56**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**836.646.211,00**	**3.881.338.051,00**	**4.067.430.030,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	836.646.211,00	3.881.338.051,00	4.067.430.030,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**836.646.211,00**	**3.881.338.051,00**	**4.067.430.030,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**56.529.371.265,00**	**63.318.354.000,00**	**65.576.360.000,00**	**64.576.360.000,00**	**64.576.360.000,00**

Kode Rekening	URAIAN	REALISASI 2023	APBD 2024	APBD 2025	APBD 2026	APBD 2027
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	620.462.410,00	757.500.000,00	1.557.720.000,00	1.557.720.000,00	1.557.720.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	334.048.338,00	459.515.000,00	346.734.000,00	346.734.000,00	346.734.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	55.574.860.517,00	62.101.339.000,00	63.671.906.000,00	62.671.906.000,00	62.671.906.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**56.529.371.265,00**	**63.318.354.000,00**	**65.576.360.000,00**	**64.576.360.000,00**	**64.576.360.000,00**
	JUMLAH BELANJA	**607.064.912.961,00**	**646.412.889.586,37**	**601.314.487.571,00**	**577.868.092.939,88**	**597.991.158.786,41**
	SURPLUS/DEFISIT	**(1.750.274.777,36)**	**(7.329.748.145,01)**	**(21.291.593.621,00)**	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

Belanja untuk tahun anggaran 2026 ini diasumsikan mengalami penurunan seiring dengan berkurangnya pendapatan Dana Alokasi Khusus dan DAU Bidang Pekerjaan umum, kebijakan pengurangan perjalanan dinas sebesar 50%, pengurangan acara yang bersifat seremonial, kajian, studi banding ,percetakan, publikasi, seminar, pembatasan belanja honorarium serta hibah sesuai kebijakan Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2025. Sedangkan untuk tahun anggaran 2027 belanja diasumsikan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Kota Sawahlunto harus diproyeksikan surplus, dikarenakan adanya pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran hutang dan pemberian dana bergulir.

Untuk stratregi belanja, Pemerintah Kota Sawahlunto harus menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan melalui pengelolaan fiskal yang efisien (Smart Fiscal Management), melalui langkah-langkah yang dapat diambil yakni :

- Fixed Cost Discipline and Variable Cost Agility yakni Pemerintah Daerah harus menjaga keseimbangan antara fixed cost dan variable cost, dengan fokus pada fisiensi anggaran. Rasio fixed cost harus dijaga agar tidak melebihi 50% dari total anggaran belanja daerah. Untuk anggaran variable cost, prioritas harus diberikan pada program-program strategis yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

3.2.4.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah dapat dikelompokkan atas 2 komponen, yaitu: (a) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah: dan (b) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

3.2.4.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah diberi kewajiban untuk membayar kembali. Kebijakan ini dilakukan untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Komponen penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLpa) sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Penerimaan, Penerimaan Piutang Daerah.

3.2.4.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pembangunan pasar sesuai dengan perjanjian dengan International Bank For Recontruct & Development Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 11 April 2011 selama 20 tahun hingga Tahun 2030.
2. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, yang pengelolaannya melaui UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/UKM dan masyarakat.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, maka perhitungan proyeksi pembiayaaan daerah tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.18
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kota Sawahlunto
Tahun 2026

Kode Rekening	URAIAN	REALISASI 2023	APBD 2024	APBD 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**10.746.689.591,38**	**7.329.748.146,02**	**21.291.593.621,00**	**18.635.160.558,97**	**19.080.365.909,52**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**12.116.356.259,38**	**8.996.414.814,02**	**22.958.260.290,00**	**20.301.827.227,97**	**20.747.032.578,52**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.114.946.259,38	8.996.414.814,02	22.958.260.290,00	20.301.827.227,97	20.747.032.578,52
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.410.000,00	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**12.116.356.259,38**	**8.996.414.814,02**	**22.958.260.290,00**	**20.301.827.227,97**	**20.747.032.578,52**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.369.666.668,00**	**1.666.666.668,00**	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-				
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	203.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.369.666.668,00**	**1.666.666.668,00**	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**10.746.689.591,38**	**7.329.748.146,02**	**21.291.593.621,00**	**18.635.160.558,97**	**19.080.365.909,52**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	***8.996.414.814,02***	**-**	**-**	***0,00***	***0,00***

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat tergambar bahwa penerimaan pembiayaan bersih setiap tahunnya dapat menutup defisit anggaran akibat dari lebih besarnya porsi belanja dibandingkan dengan proyeksi pendapatan. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA) merupakan komponen yang dominan mempengaruhi Pembiayaan Bersih. SiLPA timbul disebabkan beberapa faktor, diantaranya; 1) sisa dana DAK dan Hibah yang belum terserap akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah, 2) hutang pada pihak ketiga yang belum dibayarkan pada akhir tahun anggaran dan 3) efektivitas dan efisiensi belanja pembangunan.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan Pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya penentuan prioritas pembangunan Kota Sawahlunto juga mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multipler effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Sasaran dan prioritas pembangunan Kota Sawahlunto tahun 2026 berpedoman pada sasaran dan prioritas pembangunan rancangan akhir RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan pasal 2, ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dinyatakan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan antara tujuan RJMD dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya tujuan RPJMD dan tercapainya kinerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 diturunkan berdasarkan tujuan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029. Selain itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sawahlunto juga memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

4.1.1 Telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 mengacu pada visi Gubernur dan Wakil Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2025-2030 yaitu: **"Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan** ". Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan, yaitu:

1. Pendidikan merata, kesehatan berkualitas;
2. Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan;
3. Nagari/Desa sebagai basis kemajuan;
4. Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis sumatera bagian barat;
5. Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana;
6. Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas;
7. Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM; dan
8. Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif

Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas

Bertujuan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan perbaikan menyeluruh terhadap akses dan kualitas pendidikan serta layanan Kesehatan, yang difokuskan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang merata dan terjangkau serta percepatan penurunan stunting dan angka kematian ibu.

Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
Terkait dengan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan, namun masih menghadapi tantangan produktivitas, keberlanjutan, dan ketahanan pangan. Transformasi sektor pertanian melalui inovasi, digitalisasi, dan modernisasi alat produksi, dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan, hilirisasi hasil pertanian serta peningkatan pengelolaan SDA yang ramah lingkungan dan lestari berbasis ekonomi hijau dan biru harus dipercepat untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
Menekankan bahwa pembangunan berbasis nagari/desa menjadi hal penting untuk pemerataan kesejahteraan. Kemandirian ekonomi lokal harus diperkuat melalui pemanfaatan potensi daerah, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan kapasitas kelembagaan nagari dan desa.Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nagari, lebih ditekankan kepada digitalisasi di nagari dengan memperkuat aktivitas ekonomi saat ini. Secara natural pertumbuhan daerah akan bertumpu pada pusat-pusat kegiatan yang berada di kawasan perkotaan. Share ekonomi perkotaan diprediksi akan meningkat dari 38% menjadi 40% di tahun 2030 mendatang. Dengan adanya potensi ekonomi di kawasan perdesaan, maka yang perlu dibangun adalah urban-rural linkage yang baik dan saling mendukung satu sama lain.

Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
Bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai simpul ekonomi di pesisir barat Sumatera, sehingga perlu dilakukan penguatan sektor industri, perdagangan, dan investasi. Ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan dorongan terhadap UKM harus ditingkatkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif.

Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
Menekankan bahwa Pembangunan infrastruktur harus menjawab tantangan keberlanjutan dan ketangguhan terhadap bencana. Diperlukan investasi infrastruktur yang merata dan responsif terhadap risiko bencana serta integrasi TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pembangunan.

Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
Menekan pada penguatan jati diri masyarakat Sumatera Barat yang religius dan berbudaya menjadi fondasi pembangunan. Pelestarian nilai-nilai adat, budaya, dan penguatan keluarga berkualitas penting untuk mewujudkan masyarakat harmonis dan berkarakter.

Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UKM
Bertujuan untuk mendorong Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masa depan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan branding destinasi, pengembangan SDM pariwisata, dan fasilitasi pelaku kreatif menjadi prioritas untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah.

Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif
Bertujuan untuk terbentuknya Pemerintahan yang bersih dan layanan publik yang efisien merupakan pondasi pembangunan daerah. Reformasi birokrasi berbasis digital, perbaikan pelayanan, dan optimalisasi PAD akan memperkuat kapasitas fiskal dan kepercayaan publik.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran serta strategi pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan memperhatikan pemulihan ekonomi daerah dan nasional tahun 2024, serta upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakan ekonomi yang bertumbuh disertai antisipasi terhadap isu resesi ekonomi yang sebagian besar diakibatkan pada krisis energi dan krisis pangan dan bertumpu pada kemampuan ekonomi Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian tema pembangunan RKP Tahun 2026.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat merumuskan Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yakni : **"Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan**". Makna dari tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, dijelaskan sebagai berikut:

1. **Perkuatan fondasi** dimaknai memperbaiki serta memperkuat dasar-dasar yang menjadi landasan pengembangan sektor strategis melalui penyediaan basis yang kokoh untuk mendukung pelaksanaan program dan inisiatif pembangunan di sektor-sektor utama.
2. **Transformasi sektor strategis** dimaknai mengubah dan memodernisasi sektor-sektor kunci perekonomian yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan nasional dan daerah melalui peningkatan daya saing sektor strategis daerah, terutama sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan industry kecil serta UMKM, baik di tingkat nasional dan maupun internasional.
3. **Pertumbuhan ekonomi yang inklusif** dimaknai bertumbuhnya sektor-sektor ekonomi secara produktif yang memberikan manfaat secara merata dan berkeadilan kepada seluruh masyarakat, terutama penduduk miskin dan rentan serta kelompok marginal lainnya melalui pengurangan ketimpangan pembangunan sosial-ekonomi segala bidang.
4. **Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan** dimaknai pembangunan yang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, keseimbangan sosial dan keseimbangan ekonomi secara jangka panjang melalui penciptaan pertumbuhan yang menjamin untuk keberlanjutan generasi mendatang.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Sawahlunto

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD tahun 2026 yang merujuk pada rancangan akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai implementasi terhadap visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Periode 2025-2030, yaitu**:" Sawahlunto Kota Wisata Yang Estetik, Futuristik, Hidup Dan Menghidupi "** yang dirumuskan kedalam 7 (tujuh) misi, 7 (tujuh) tujuan, 13 (tiga belas) sasaran pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut ini **:**

Tabel 4.1
Penjabaran Misi Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Base line 2024	Target						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kondisi Akhir RPJMD
1 **Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan**	1 **Terwujudnya pertumbuhan perekonomian yang berwawasan lingkungan**			**SV 2.3** Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,02	4,63	5,84	6,89	7,01	7,29	5,87	5,87
				SV 1.1 PDRB per kapita ADHB (Rp Juta)	73,59	80,61	89,48	99,53	110,71	123,5	136,45	136,45
				SV 2.1/8 Tingkat Kemiskinan	2,33	1,98	1,92	1,87	1,81	1,76	1,71	1,71
				21 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,01	23,69	23,7	23,71	23,71	23,72	23,73	23,73
				15 Tingkat Pengangguran Terbuka	5,55	5,30	5,06	4,83	4,61	4,40	4,20	4,20
				SV 2.2 Rasio Gini (Indeks)	0,299	0,297	0,296	0,295	0,294	0,293	0,291	0,291
				23.a Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	1,54	1,52	1,52	1,52	1,53	1,54	1,54	1,54
		1	Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	**SV 1.2/ 11** Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,23	8,82	9,0325	9,245	9,4575	9,67	11,85	11,85
				14.d Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	1,490	1,673	1,715	1,757	1,799	1,841	2,128	2,128
				22 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	14,30	7,61	8,048	8,486	8,924	9,362	13,38	13,38

Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Base line 2024	Target						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kondisi Akhir RPJMD
		2 Meningkatnya iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah	SV 4.2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	88,84	93,84	94,74	95,63	96,50	97,42	98,31	98,31
			15.a	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	52,25	52,96	54,16	55,36	56,56	57,76	62,62	62,62
				Persentase Peningkatan Investasi (%)								
		3 Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	23.c	indeks Desa (rata-rata indeks desa)	-	78,72	79,02	79,32	79,62	79,92	80,22	80,22
		4 Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	18.a	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	8,76	8,86	8,90	8,95	8,99	9,04	9,08	9,08
			43.b	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	8,19	7,81	7,33	6,85	6,36	5,39	4,91	5,94
			18.b	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	50,21	50,881	52,481	54,081	55,681	57,281	58,88	58,881
2 **Mewujudkan Smart Governance berbasis IT**	2 **Terwujudnya smart governance berbasis IT**		19	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	43,04	53,80	55,11	56,42	57,73	59,04	60,35	60,35
		1 Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi		Indeks Pemerintah Digital	-	-	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.1
		2 Terwujudnya pelayanan pubik yang efektif dan efisien	26	Indeks Pelayanan Publik	3,18	3,19	3,2	3,21	3,22	3,22	4	4,00
3 **Penguatan Infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat**	3 **Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan**			Indeks Kinerja Infrastruktur	66,94	68,24	70,58	72,92	75,25	77,59	79,93	79,93
			44	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	114,22	103,52	103,51 - 102,24	111,65 - 110,38	110,37 - 109,1	109,09 - 107,82	107,81 - 106,54	107,81 - 106,54

Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Base line 2024	Target						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kondisi Akhir RPJMD
		1 Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	**SV.5.1/42.a/45.a**	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,89	71,91	72,12	72,33	72,55	72,76	72,97	72,97
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	64,40	64,43	64,45	64,50	64,55	64,60	64,65	64,65
				Indeks Ketahanan Daerah	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,55
		2 Meningkatnya Aksesbilitas dan Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas		Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	50,20	51,25	53,16	55,09	57,03	59,44	62,71	62,71
				Indek Konektivitas darat	51,91	53,65	55,34	57,13	59,12	61,21	63,58	63,58
				Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	47.79	47.79	49.90	52.01	54.12	56.23	58.34	58.34
4 **Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan Pelestarian budaya melalui Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan**	4 **Terwujudnya ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis**		**37**	Indeks Ketahanan Nasional	-	3,06	3,07	3,08	3,09	3,10	3,11	3,11
		1 Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama		Indeks Harmoni Indonesia	-	3,20	3,50	3,70	4,20	4,30	4,50	4,50
			29	Angka Kriminalitas	0,037	0,025	0,024	0,022	0,021	0,019	0,018	0,018
			30	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	-	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	14,00

Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Base line 2024	Target						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kondisi Akhir RPJMD
		2 Meningkatnya komunitas seni dalam pelestarian cagar budaya dan adat istiadat		Persentase Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan	68,52	74,00	76,80	78,77	80,76	83,43	85,49	85,49
5 Meningkatkan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi kepariwisataan	**5 Peningkatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat**		**12.a**	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	2,30	2,33	2,35	2,37	2,39	2,41	2,5	2,50
		1 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah		PAD sektor Pariwisata (%)	3,10	3,200	3,400	3,600	3,800	4,000	4,20	4,20
		2 Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah	**13**	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif daerah (%)	4,59	6,205	6,195	6,185	6,165	6,155	6,866	6,866
6 Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat	**6 Terwujudnya SDM yang berdaya saing**		**SV.4.1**	Indeks Pembangunan Manusia	76,68	76,55	77,13	77,72	78,30	78,89	79,47	79,47
		1 Meningkatnya kualitas pendidikan	**5a.1**	Persentase Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional								
			5a.1a	- Literasi Membaca	82,73	82,83	82,90	83,00	83,10	83,20	83,25	83,25
			5a.1b	- Numerasi	79,57	79,67	79,70	79,85	79,90	79,91	79,92	79,92
			5.b	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,53	10,65	10,78	10,9	11,02	11,13	11,25	11,25
			5.c	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,86	14,1	14,32	14,53	14,76	14,97	15,19	15,19
			6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	15,19	14	14,12	14,24	14,36	14,47	14,58	14,58
		2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**1**	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,12	74,43	74,75	75,07	75,39	75,71	76,03	76,03
			2.b	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13	17,7	16,45	15,2	13,95	12,7	12,9	12,90

Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Base line 2024	Target						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kondisi Akhir RPJMD
			4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	99,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3 Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	**39**	Indeks Pembangunan Keluarga	63,88	65,40	66,20	67,00	67,80	68,60	69,40	69,40
			40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,270	0,270	0,270	0,269	0,269	0,268	0,268	0,268
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,47 (2023)	65,67	65,77	65,87	65,97	66,07	66,17	66,17
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,73	95,83	95,93	96,03	96,13	96,23	96,33	96,33
				Indeks Kesejahteraan Sosial	-	42,00	42,75	43,50	44,25	45,00	45,75	45,75
		4 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga		Persentase peningkatan partisipasi pemuda berwirausaha	-	0,33	1,00	1,32	1,30	1,28	1,27	1,27
				Persentase peningkatan prestasi Olahraga	-	-	1,38	1,36	1,34	1,32	1,31	1,31
7 Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lainnya	**7 Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah yang berdaya saing**			Indeks Reformasi Birokrasi	75,04	76,35	77,56	78,17	79,01	80,47	82,72	82,72
			17.b	Indeks inovasi daerah	72,87	73,21	74,67	76,14	77,6	79,07	80,53	80,53
		1 Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas	**SV.3.1**	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20	3,20
				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Nilai AKIP Instansi Pemerintah	64,00	65,23	68,17	70,11	71,02	72,03	73,20	73,20

Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Base line 2024	Target						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kondisi Akhir RPJMD
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,016	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	3,45
		2	Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesional ASN	-	78,72	81,00	84,00	87,00	90,00	90,00	90,00
		3	Meningkatnya tata kelola arsip dan literasi masyarakat	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkungan Pemerintahan Daerah	43,18	50,58	50,60	50,65	50,70	50,75	60,00	60,00
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	94,81	94,83	94,85	94,90	94,95	94,98	95,00	95,00
		4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,785	70,85	71	72	73	74	75	75

Visi dan Misi Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 tersebut sepenuhnya mendukung tercapainya target Visi dan Misi Pemerintah Provinsi dan Nasional. Secara lebih terfokus, berikut disajikan tabel persandingan Visi dan Misi Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Adapun keterkaitan antara misi Provinsi Sumatera Barat dan misi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Matriks keselarasan Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Sawahlunto

PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2029		KOTA SAWAHLUNTO 2025-2029	
VISI : SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN		**VISI : SAWAHLUNTO KOTA WISATA YANG ESTETIK, FUTURISTIK, HIDUP DAN MENGHIDUPI**	
MISI 1	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat	MISI 6
MISI 2	Lumbung pangan, Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan	MISI 1
MISI 3	Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan		
MISI 4	Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat		
MISI 5	Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan siap Tanggap Bencana	Penguatan Infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat	MISI 3
MISI 6	Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, karifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan Pelestarian budaya melalui Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan	MISI 4
MISI 7	Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi Ekonomi kreatif untuk UKM	Meningkatkan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi kepariwisataan	MISI 5
MISI 8	Tata kelola Pemerintah Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Mewujudkan Smart Governance berbasis IT	MISI 2
		Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lainnya	MISI 7

Sumber Data : Rancangan Akhir RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penentuan prioritas pembangunan daerah berdasarkan permasalahan/isu strategis pembangunan daerah di kota Sawahlunto seperti dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel 4.3
Konsistensi Permasalahan/Isu Strategis Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1. Perlunya Peningkatan Kualitas Pendidikan 2. Perlunya peningkatan Derajat Kesehatan 3. Rendahnya kontribusi lapangan usaha penyediaan jasa akomodasi makan dan minum, dan melambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian perikanan serta industri pengolahan 4. Pengeluaran perkapita disesuaikan masih di bawah rata-rata nasional 5. Belum Optimalnya Pengelolaan pendapatan asli daerah Rendahnya kontribusi lapangan usaha penyediaan jasa akomodasi makan dan minum, dan melambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian perikanan serta industri pengolahan 6. Belum optimalnya aksesibilitas wilayah 7. Perlunya Peningkatan kualitas lingkungan hidup 8. Belum terpenuhinya tanah/lahan untuk pembangunan fasilitas umum 9. Belum optimalnya pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pola ruang 10. Masih tingginya resiko bencana daerah 11. Masih tingginya resiko bencana daerah 12. Iklim investasi yang belum kondusif 13. Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik 14. Belum Optimalnya pengelolaan inovasi daerah	1. Pembangunan dan pemerataan ekonomi dengan keunggulan Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) dan Geopark Nasional 2. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 3. Pembangunan dan Infrastruktur yang berkelanjutan 4. Transformasi tata kelola pemerintahan	1. Penguatan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan 2. Penguatan Smart Governance berbasis IT melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi 3. Penguatan infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan 4. Penguatan ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis 5. Penguatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat 6. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan 7. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah tahun rencana. Dalam RKPD Tahun 2026, prioritas pembangunan daerah lebih disinergikan dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2026 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kota Sawahlunto (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) serta selaras dengan pembangunan Nasional dan Provinsi. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2026

dengan mengangkat tema pembangunan **"Perkuatan Fondasi Keunggulan Pariwisata Untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** adalah sebagai berikut:

1. Penguatan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan
2. Penguatan Smart Governance berbasis IT melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi
3. Penguatan infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan
4. Penguatan ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis
5. Penguatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat
6. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan
7. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan

4.2.1 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi

4.2.1.1 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional`

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran dan memperhatikan RPJPN Tahun 2025-2045. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025' merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2026 adalah. "**Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada pangan dan Energi serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**"

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut;

Program Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;

a) Pemenuhan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar
b) Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah;
c) Penguatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila

Program Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

a) Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang;
b) Peningkatan ketahanan pangan;
c) Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas
d) Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah
e) Pemenuhan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
f) Peningkatan Produksi Pertanian

Program Nasional 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

a) Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah;
b) Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
c) Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM;
d) Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK);
e) Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Program Nasional 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas

a) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan;
b) Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua;
c) Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi;
d) Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja;
e) Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak;
f) Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital;
g) Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK);
h) Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga;
i) Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat;

Program Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

a) Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air;
b) Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
c) Pemenuhan Target realisasi Penanaman Modal;
d) Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global
e) Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas

Program Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

a) Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
b) Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi;
c) Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja;
d) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa;
e) Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi

Program Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

a) Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah;
b) Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN);
c) Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah;
d) Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila;

Program Nasional 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

a) Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar;
b) Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas
c) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa;
d) Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK);
e) Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat;
f) Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa;
g) Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila.

Selain berpedoman terhadap prioritas Nasional, Pembangunan Kota Sawahlunto juga berorientasi terhadap prioritas Provinsi Sumatera Barat. Sama halnya dengan pembangunan Nasional tema pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yaitu **"Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, berikut merupakan sinkronisasi prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2026 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Dalam mendukung program RKP Tahun 2026, Kota Sawahlunto telah merencanakan beberapa program pendukung yang selaras dengan program yang ada di Kota Sawahlunto untuk Tahun 2026. Adapun dapat dijelaskan secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Program Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2026 Dalam Mendukung Program Prioritas/ Unggulan RKP Tahun 2026

RKP 2026	RKPD 2026		
Prioritas Nasional	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	2	3	4
Program Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	881.862.400,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	644.818.590,00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30.400.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	87.085.000,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	369.100.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	9.980.800,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	401.386.930,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.113.477.300,00
Program Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	10.000.000,00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	75.560.000,00
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	45.500.000,00
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	30.500.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	163.000.000,00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	23.440.000,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.078.599.900,00

RKP 2026	RKPD 2026		
Prioritas Nasional	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	883.652.850,00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	180.942.225,00
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	85.000.000,00
		Program Penyuluhan Pertanian	142.816.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.170.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	570.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	610.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.335.000.000,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	4.900.000.000,00
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	4.245.000.000,00
		Program Penyelenggaraan Jalan	15.125.000.000,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	17.519.800,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	65.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.000.000,00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	504.000.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	4.500.000,00
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20.000.000,00
		Program Pengelolaan Persampahan	1.509.000.000,00
Program Nasional 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	35.226.000,00
		Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	34.000.000,00
		Program Penetapan Tanah Ulayat	30.000.000,00
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	12.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.170.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	37.920.000,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	495.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	375.000.000,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	541.000.000,00
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50.000.000,00

RKP 2026	RKPD 2026		
Prioritas Nasional	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
		Program Pengelolaan Permuseuman	197.130.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	418.678.000,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	59.004.000,00
Program Nasional 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	6.198.245.552,00
		Program Pengembangan Kurikulum	15.000.000,00
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	12.875.970,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.194.947.573,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	270.316.849,00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	65.000.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	20.000.000,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.622.241.720,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.117.500.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	147.976.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial	1.159.630.000,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	23.825.460,00
		Program Penanganan Bencana (sosial)	64.257.100,00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	34.978.140,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	-
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	300.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	334.715.650,00
		Program Pencatatan Sipil	12.000.750,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	30.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.075.354.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.703.146.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	244.105.000,00
		Program Perlindungan Perempuan	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	283.549.000,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	78.300.000,00

RKP 2026	RKPD 2026		
Prioritas Nasional	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
		Program Perlindungan Khusus Anak	-
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	1.397.633.565,00
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	12.126.300,00
Program Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.170.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	570.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	610.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.335.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.170.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	38.000.000,00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	80.000.000,00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	85.000.000,00
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	234.956.160,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	303.697.375,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	372.522.500,00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	4.566.175,00
		Program Pengembangan Ekspor	19.000.000,00
Program Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	586.368.384,00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	459.581.265,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	223.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	147.976.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial	1.159.630.000,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	23.825.460,00
		Program Penanganan Bencana (sosial)	64.257.100,00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	34.978.140,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	300.000.000,00
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.454.409.900,00
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	364.358.880,00

RKP 2026	RKPD 2026		
Prioritas Nasional	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
Program Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	401.386.930,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.113.477.300,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	47.326.450,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	11.777.350,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	881.862.400,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	644.818.590,00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30.400.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	87.085.000,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	369.100.000,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	341.850.420,00
	Urusan Penelitian Dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	-
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	70.664.984.602,00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	351.812.903,00
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	523.324.923,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Program Kepegawaian Daerah	1.651.220.660,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengawasan)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	399.475.000,00
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	144.325.000,00
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.454.409.900,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	459.581.265,00
Program Nasional 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	9.980.800,00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	268.394.000,00

RKP 2026	RKPD 2026		
Prioritas Nasional	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Program Penanggulangan Bencana	424.709.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.000.000,00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	504.000.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	4.500.000,00
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20.000.000,00
		Program Pengelolaan Persampahan	1.509.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	586.368.384,00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	459.581.265,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	375.000.000,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	541.000.000,00
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50.000.000,00
		Program Pengelolaan Permuseuman	197.130.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	1.397.633.565,00
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	12.126.300,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	39.650.700,00
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	15.268.300,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	881.862.400,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	644.818.590,00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30.400.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	87.085.000,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	369.100.000,00

4.2.1.2 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat

Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 terdiri dari :

1. Prioritas Pembangunan 1 yakni Pendidikan yang Merata dan Kesehatan yang Berkualitas
2. Prioritas Pembangunan 2 yakni Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Hijau Sumatera Barat

3. Prioritas Pembangunan 3 yakni Nagari dan Desa sebagai Basis Kemajuan
4. Prioritas Pembangunan 4 yakni Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
5. Prioritas Pembangunan 5 yakni Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan siap tanggap bencana
6. Prioritas Pembangunan 6 yakni Membangun Kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas
7. Prioritas Pembangunan 7 yakni Tingkat Daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM
8. Prioritas Pembangunan 8 yakni Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang efektif

Dalam mendukung program unggulan provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, Kota Sawahlunto telah merencanakan beberapa program pendukung yang selaras dengan program yang ada di Kota Sawahlunto untuk Tahun 2026. Adapun dapat dijelaskan secara rinci pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Program Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2026 Dalam Mendukung Program Prioritas/ Unggulan Provinsi Sumatera Barat

Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	RKPD 2026		
	Bidang Urusan	Program	Pagu (Rp)
1	2	3	4
Prioritas Pembangunan 1 Pendidikan yang Merata dan Kesehatan yang Berkualitas Terampil dan Berdaya Saing	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	6.198.245.552,00
		Program Pengembangan Kurikulum	15.000.000,00
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	12.875.970,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.622.241.720,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.117.500.000,00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	65.000.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	20.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	30.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.075.354.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.703.146.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	244.105.000,00
		Program Perlindungan Perempuan	-
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	283.549.000,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	78.300.000,00
		Program Perlindungan Khusus Anak	-
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	300.000.000,00
	Urusan Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.075.354.000,00

Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	RKPD 2026		
	Bidang Urusan	Program	Pagu (Rp)
1	2	3	4
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.703.146.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000,00
Prioritas Pembangunan 2 Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Hijau Sumatera Barat	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	10.000.000,00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	75.560.000,00
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	45.500.000,00
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	30.500.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	163.000.000,00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	23.440.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.078.599.900,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	883.652.850,00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	180.942.225,00
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	85.000.000,00
		Program Penyuluhan Pertanian	142.816.000,00
Prioritas Pembangunan 3 Nagari dan Desa sebagai basis kemajuan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	459.581.265,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kecamatan Barangin)	4.144.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Barangin)	394.171.328,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Talawi)	245.791.116,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Silungkang)	261.220.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Lembah Segar)	293.614.527,00
Prioritas Pembangunan 4 Sumatera Barat Pusat perdagangan dan bisnis sumatera bagian barat	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	37.920.000,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	495.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	372.522.500,00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4.566.175,00
		Program Pengembangan Ekspor	19.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem	234.956.160,00

Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	RKPD 2026		
	Bidang Urusan	Program	Pagu (Rp)
1	2	3	4
		Informasi Penanaman Modal	
		Program Promosi Penanaman Modal	38.000.000,00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	80.000.000,00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	85.000.000,00
Prioritas Pembangunan 5 Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.170.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	570.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	610.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.335.000.000,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	4.900.000.000,00
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	4.245.000.000,00
		Program Penyelenggaraan Jalan	15.125.000.000,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	17.519.800,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	65.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	223.000.000,00
		Program Kawasan Permukiman	1.240.000.000,00
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.645.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	34.000.000,00
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	12.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.000.000,00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	504.000.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	4.500.000,00
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20.000.000,00
		Program Pengelolaan Persampahan	1.509.000.000,00
		Program Penanggulangan Bencana	679.362.800,00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	268.394.000,00
Prioritas Pembangunan 6 Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	131.678.000,00

Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	RKPD 2026		
	Bidang Urusan	Program	Pagu (Rp)
1	2	3	4
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	586.368.384,00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	459.581.265,00
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.454.409.900,00
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	364.358.880,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	147.976.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial	1.159.630.000,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	23.825.460,00
		Program Penanganan Bencana	64.257.100,00
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	30.000.000,00
Prioritas Pembangunan 7 Tingkat daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	418.678.000,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	59.004.000,00
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.265.260.608,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	303.697.375,00
Prioritas Pembangunan 8 Tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang efektif	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	250.032.390,00
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	341.850.420,00
	Urusan Penelitian Dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	152.871.579,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	70.664.984.602,00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	351.812.903,00
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	523.324.923,00
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	9.454.409.900,00
		Program Perekonomian dan Pembangunan	364.358.880,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Program Kepegawaian Daerah	1.615.020.660,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengawasan)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	399.475.000,00
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	144.325.000,00
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.454.409.900,00

4.2.2 Penetapan Prioritas Pembangunan Kota Sawahunto Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dicapai dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan untuk mencapai prioritas daerah disebut program prioritas. Pada penyusunan RKPD tahun 2026, program prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang *outcome* nya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah, anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang bersifat mendukung atau *supporting*. Berikut merupakan sasaran pembangunan dan program prioritas

pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2026

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Prioritas 1 : Penguatan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan**				
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	15900	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	1.078.599.900,00
		Jumlah Produksi Karet (ton)	1740		
		Jumlah Produksi Kakao (ton)	571		
		Daging Sapi (ton)	321		
		Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	900,26		
		Jumlah Produksi Telur (ton)	135,86		
		Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	01:10		
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	2,5		883.652.850,00
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	90		180.942.225,00
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian Serangan OPT terhadap Luas Tanam	100		85.000.000,00
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi	1		142.816.000,00
		Jumlah Ketenangan Penyuluh yang berprestasi	1		
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan	204		163.000.000,00
7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	39		23.440.000,00
8	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja (%	100		
9	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Berwirausaha (%	9		300.000.000,00
10	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	56		
11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Dokumen Perizinan Dan Non Perizinan Sesuai SOP (%)	100		80.000.000,00
12	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Dokumen Perizinan Dan Non Perizinan Sesuai SOP	100		38.000.000,00
13	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	10		95.000.000,00
14	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				37.920.000,00
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				495.000.000,00

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
16	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya			372.522.500,00
17	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	9.7		4.566.175,00
18	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	800000000		19000000
19	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				303.697.375,00
20	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				300.000.000,00
21	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				450.999.600,00
22	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				38.000.000,00
23	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100		80.000.000,00
24	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100		85.000.000,00
25	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				234.956.160,00
26	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100		586.368.384,00
27	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	100		459.581.265,00
28		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	50		
29	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KECAMATAN BARANGIN)				227.309.600,00
30	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL. DURIAN 1)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100		433.872.540,00
31	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL. LUBANG PANJANG)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100		396.095.456,00
32	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL. SARINGAN)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100		492.511.356,00
33	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (KECAMATAN BARANGIN	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik	100		4.144.000,00
34	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100		347.750.500,00

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KECAMATAN LEMBAH SEGAR)				
35	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL. AIR DINGIN)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100		283.614.529,00
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL. AUR MULYO)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100		301.308.556,00
37	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL. KUBANG SIRAKUK UTARA)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100		283.614.529,00
38	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL. KUBANG SIRAKUK SELATAN)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100		300.332.272,00
39	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL. PASAR)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100		298.067.012,00
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL. TANAH LAPANG)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100		283.614.527,00
41	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN LEMBAH SEGAR)				
42	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KECAMATAN SILUNGKANG)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100		261.220.000,00
43	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (KECAMATAN SILUNGKANG)	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik	100		11.052.000,00
44	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KECAMATAN TALAWI)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100		245.791.116,00
45	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (KECAMATAN TALAWI)	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik	100		9.489.294,00
2	**Prioritas 2 :Penguatan Smart Governance berbasis IT melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi**				
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	401.386.930,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80		1.113.477.300,00
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				47.326.450,00
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK				11.777.350,00

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	PENGAMANAN INFORMASI				
5	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik	15		334.715.650,00
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	80		
		Persentase Kepemilikan KTP-el Bagi Wajib KTP-el	98.80		
		Persentase Penduduk Yang Menggunakan IKD Bagi Wajib KTP-el	99.42		
6	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				12.000.750,00
7	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				2.994.000,00
3	**Prioritas 3 : Penguatan infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan**				
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	52,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.170.000.000,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	100		570.000.000,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%	92,97		610.000.000,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	49,26		1.335.000.000,00
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase permukian yang tertata (%)	82,52		
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	77,27		15.125.000.000,00
		Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	95,94		
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	87,14		4.900.000.000,00
		Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%)	65,98		
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	55		65.000.000,00
		Persentase kesesuaian dan keteraturan mendirikan bangunan			
9	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	94	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	223.000.000,00
10	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas Kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	19,08		
11	PROGRAM PENINGAKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	86		1.645.000.000,00
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%	100		1.170.000.000,00

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
13	PROGRAM PENGELOLAAAN KENANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%	100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	504.000.000,00
14	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang terkelola (%)	99		1.509.000.000,00
15	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	80		603.446.706,00
16	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100		424.709.000,00
4	**Prioritas 4 : Penguatan ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis**				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				375.000.000,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	62.50		541.000.000,00
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	67		50.000.000,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	34000		197.130.000,00
5	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100		881.862.400,00
6	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100		644.818.590,00
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100		87.085.000,00
8	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100		369.100.000,00
9	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				131.678.000,00
10	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				259.844.000,00
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				147.976.000,00

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
12	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.159.630.000,00
13	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100		64.257.100,00
5	**Prioritas 5 : Penguatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat**				
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				5.265.260.608,00
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				418.678.000,00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				20.400.000,00
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	21,92		59.004.000,00
6	**Prioritas 6 : 6. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan**				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				6.198.245.552,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	18,58		15.000.000,00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	10		10.000.000,00
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				12.875.970,00
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				270.316.849,00
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				65.000.000,00
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				20.000.000,00
9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD)				1.622.241.720,00
10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (RSUD)	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	35		2.117.500.000,00
11	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)			244.105.000,00

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
12	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	100		283.549.000,00
13	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase desa/kelurahan ramah anak	100		78.300.000,00
14	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1.075.354.000,00
15	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				2.703.146.000,00
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan kapasitas anggota	17		200.000.000,00
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				30.000.000,00
7	**Prioritas 7 : Penguatan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan**				
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Bantuan Hukum yang yang Difasilitasi	100		9.454.409.900,00
		Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100		
		Zakat yang terkumpul pada BAZNAS Kota Sawahlunto (Milyar)	6,58		
		Jumlah Hafidz Quran	700		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0		364.358.880,00
		Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaa	0,37		
		Persentase kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi	100		
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	67		
		Persentase Peningkatan Pengawasa dan Pengendalian Inflasi Daerah	96		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100		250.032.390,00
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100		
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100		341.850.420,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100		152.871.579,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	10		70.664.984.602,00
		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	47		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				351.812.903,00

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	11,3		523.324.923,00
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	100		1.651.220.660,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				399.475.000,00
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				144.325.000,00
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				12.126.300,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	40,05		15.268.300,00
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks pembangunan literasi masyarakat	94,85		1.397.633.565,00

4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH MEMUAT POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN 2026

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 78 menjelaskan bahwa Rancangan Awal RKPD salah satunya mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD ini merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses, diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Sawahlunto untuk RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 dimulai dengan Surat Walikota Sawahlunto Nomor : 000.7.2/53/Barenlitbangda-Swl/2025 untuk ketua DPRD perihal pokok-pokok pikiran DPRD untuk Tahun 2026 pada tanggal 12 Maret 2025. Pokok-pokok pikiran DPRD dientrikan oleh masing-masing anggota dewan melalui aplikasi SIPD-RI berdasarkan surat Keputusan rapat paripurna DPRD Nomor : 01 Tahun 2025 tanggal 09 April 2025, yang dilanjutkan dengan proses verifikasi dari mitra bidang Barenlitbangda, Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pokok-pokok pikiran DPRD ditelaah oleh Barenlitbangda menjadi sub kegiatan, kegiatan dan program Perangkat Daerah dan penentuan pagu anggaran oleh Perangkat Daerah pengampu. Adapun prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 yang memuat pokok-pokok pikiran DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.7
Program Pemerintah Daerah Yang Memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No.	Program Prioritas Daerah	Program Pemerintah Daerah yang Memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD		
		Program Pemerintah Daerah	Pagu	Perangkat Daerah
1	Penguatan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	20.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	415.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	40.000.000	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	170.000.000	

No.	Program Prioritas Daerah	Program Pemerintah Daerah yang Memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD		
		Program Pemerintah Daerah	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	15.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	50.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	85.000.000	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	555.000.000	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	690.000.000	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	100.000.000	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	15.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	Penguatan Smart Governance berbasis IT melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	Penguatan infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.520.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.145.000.000	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	470.000.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.415.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.645.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	420.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	90.000.000	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.240.000.000	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.945.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Penguatan ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	245.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN

No.	Program Prioritas Daerah	Program Pemerintah Daerah yang Memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD		
		Program Pemerintah Daerah	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	30.000.000	DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	185.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	135.000.000	
5	Penguatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.010.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	560.000.000	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	40.000.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	30.000.000	
6	Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.470.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	80.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	105.000.000	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	15.000.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	110.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	Penguatan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.120.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Jumlah Pagu		**Rp21.500.000.000**	

4.4 ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Arah kebijakan untuk tahun 2026 difokuskan dalam pencapaian tema **"Perkuat Fondasi Keunggulan Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Adapun arah kebijakan tahun 2026 berdasarkan visi misi dan tujuan RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN TAHUN 1 (2026)
Misi 1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan		
Tujuan 1. Terwujudnya pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan		
1	Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	Penyediaan pusat cenderamata dan oleh-oleh khas Sawahlunto yang lengkap dan mudah diakses wisatawan
		Revitalisasi Pasar Sawahlunto melalui kerjasama dengan investor
		Revitalisasi / pembangunan pasar wisata terintegrasi (RPJMN)
		Pendataan dalam rangka Penataan pasar tradisional dan pengoptimalan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan
		Pendataan pedagang kaki lima dan peningkatan sarana dan prasarana pedagang kaki lima
		Pendataan UKM dalam Mendorong pengembangan pasar online dan ekspor produk unggulan daerah
		Penataan kawasan Rest Area di Kebun Jeruk dan Muaro Kalaban (Kecamatan Silungkang) sebagai kawasan perdagangan
		Operasionalisasi sentra IKM Tenun di Silungkang sebagai pusat pelatihan tenun
		Optimalisasi fungsi UPTD tekstil di Muaro Kalaban
		Pendataan IKM dalam rangka membangkitkan daya saing ekonomi
		Operasionalisasi sentra IKM pengolahan
		Pembinaan terhadap IKM unggulan dapat memiliki akses pasar pada e-commerce platform
		Pendataan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
		Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kopdes Merah Putih.
		Peningkatan kapasitas pelaku usaha koperasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis
		Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat melalui Koperasi
		Pengembangan Koperasi Merah Putih yang fokus pada sektor produksi/jasa potensial di masing-masing desa/kelurahan
		Pembinaan penguatan kelembagaan koperasi, termasuk penyusunan anggaran dasar, manajemen, dan tata kelola.
2	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah	Pendataan Aset Daerah yang produktif
		Melakukan pemutakhiran data potensi investasi daerah secara berkala
		Menetapkan kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah.
		Fasilitasi percepatan pengelolaan perizinan
		Meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi investasi untuk menarik investor
		Mendorong Kemitraan Strategis antara Perusahaan Daerah dan Investor dalam rangka pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, energi terbarukan, pertambangan ramah lingkungan, dan ekonomi kreatif.

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		TAHUN 1 (2026)
		Menetapkan kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah.
		Melaksanakan evaluasi berkala untuk mengukur dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan PAD, dan kesejahteraan masyarakat
		Memperkuat kapasitas lembaga daerah (DPMPTSP) dalam pelayanan perizinan, fasilitasi investasi, dan promosi potensi daerah
		Menyusun strategi promosi investasi daerah yang fokus pada sektor unggulan sesuai potensi lokal
		Mengintegrasikan promosi peluang investasi Kota Sawahlunto dengan kemitraan dengan perusahaan daerah dan swasta
		Melaksanakan promosi investasi secara langsung melalui pameran, forum bisnis, misi dagang, dan *business matching*
		Mendorong koordinasi lintas sektor (BUMD, asosiasi usaha, lembaga pendidikan) untuk mendukung keberhasilan promosi investasi.
		Memperkuat teknologi digital untuk promosi (website investasi, media sosial, platform OSS/NSWI).
		Memperkuat layanan OSS-RBA (*Online Single Submission – Risk Based Approach)* agar terintegrasi penuh dengan sistem perizinan pusat dan daerah
		Penguatan infrastruktur digital untuk mendukung integrasi sistem data penanaman modal dengan OSS-RBA *(Online Single Submission Risk Based Approach).*
		penguatan kelembagaan dan basis data ketenagkerjaan (pemetaan angkatan kerja, potensi sektor unggulan)
		Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan pasar kerja lokal maupun nasional
		Menyusun kurikulum pelatihan yang adaptif mengikuti perkembangan teknologi dan tren permintaan tenaga kerja
		Memberikan pelatihan untuk disabilitas
		Pengembangan Balai Latihan Kerja Kota Sawahluhto
		peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
		Penguatan motivasi angkatan kerja untuk mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi
		Penyebar luasan informasi pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan di BLK secara digitalisasi
		Mengembangkan program pelatihan kerja khusus bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses kerja yang layak
		Pelaksanaan Job fair
		menyediakan bursa kerja online yang terintegrasi dengan sistem nasional ketenagakerjaan
		Mendorong skema kemitraan dengan BUMN, BUMD, swasta kperasi dalam mencipatkan lapangan kerja baru
		Mengadakan kerjasama strategis dengan perusahaan, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan dalam membuka akses kerja
		Mendorong peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki PKB sebagai bentuk kemitraan yang sehat antara pekerja dan pengusaha.
		Memperluas cakupan kepesertaan pekerja formal dan informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
		Mendorong peran lembaga kerja sama bipartit di perusahaan dan tripartite dalam membangun komunikasi sosial yang efektif.

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		TAHUN 1 (2026)
3	Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	Membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam percepatan pembangunan kota
		Memberikan pelatihan kerja ke desa/kelurahan dalam menciptakan enterpreneur muda
		Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan
		mendorong kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes dengan pemanfaatan potensi desa melalui berbagai usaha
		Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		identifikasi menyeluruh terhadap potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki desa
		Partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan produk untuk membangun ekonomi daerahnya sendiri.
4	Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Pemetaan agroindustri skala mikro yang cocok di Kota Sawahlunto: pengolahan pangan, produk olahan hortikultura, pertanian dan perkebunan
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
		Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah
		Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
		Penguatan jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan
		Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi)
		Penetapan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi
		Pemetaan komoditi pertanian unggulan daerah
		Peningkatan varietas tanaman dan bibit di Kebun Buah Kandi yang mencirikan kekhasan di Kota Sawahlunto
		Peningkatan sarana dan prasarana Kebun Buah Kandi sebagai destinasi wisata dan eduwisata
		Peremajaan kembali tanaman perkebunan dan hortikultura terutama tanaman lokal di Kota Sawahlunto
		Pendampingan penyusunan RDKK dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi
		Peningkatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
		Pengelolaan penggunaan brigade Alsintan
		Pengadaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), fasilitasi saprodi
		Pemetaan kesesuaian lahan berdasarkan potensi dan kesesuaiannya untuk ditanami tanaman tertentu
		Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin
		Pembangunan/ Rehabilitasi Puskeswan
		Operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin sebagai standar RPH bersertifikasi halal dalam rangka mendukung sertifikasi halal produk-produk olahan daging
		peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hewan,
		Pencegahan dan vaksinasi hewan liar
		Pengendalian penyakit hewan
		Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan irigasi

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		TAHUN 1 (2026)
		Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
		Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian
		Peningkatan budidaya perikanan
		sosialisasi gemar makan ikan kepada masyarakat
Misi 2. Mewujudkan Smart Governance berbasis IT		
Tujuan 2. Terwujudnya smart governance berbasis IT		
1	Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi	Meningkatkan penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat di ruang publik seperti taman, objek wisata, terminal, dan tempat ibadah
		Meningkatkan layanan perluasan infrastruktur komunikasi untuk mengatasi daerah blank spot di Sawahlunto
		Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
		Membangun daerah sulit signal harus diperbaiki kualitas signal nya atau dengan pengadaan Tower
		pembangunan dan pengelolaan *comand center* (pusat data pemerintahan daerah)
		Membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK seperti jaringan internet, fasilitas telekomunikasi, dan perangkat keras pendukung
		Mendukung pengembangan industri digital, startup, dan e-commerce melalui berbagai program dan layanan
		Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia
		Menyediakan informasi publik melalui portal online, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya
		Membangun infrastruktur digital yang berkualitas dan berkelanjutan setiap ASN harus dilengkapi dengan PC
		Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Menjamin keamanan informasi dan pembatasan akses bagi pengguna internet di ruang publik khususnya terhadap konten-konten yang tidak sesuai.
		Melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber dan IT.
		Pengamanan infrastruktur TIK
		Mengoptimalkan Edukasi Keamanan SPBE, Satu Server dan pengadaan *Command Centre*, Layanan Kesehata Digital yang Optimal Keamanan *Cyber* Pemerintahan
		Mengoptimalkanpengintegrasian data, pelaporan dan penilaian atas kinerja aparatur pelaksana yang akuntabel.
		meningkatkan koordinasi dalam Forum data Penguatan fungsi wali data
2	Terwujudnya pelayanan pubik yang efektif dan efisien	meningkatkan kualitas dan sarana parasarana pelayanan administrasi kependudukan
		Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan
		Pengembangan Sistem dan Inovasi Pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
		memastikan keakuratan data dan ketunggalan NIK, serta menyediakan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah
Misi 3. Penguatan Infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat		
Tujuan 3. Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan		
1	pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Penyusunan Dokumen RPPLH
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
		ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan hidup

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		TAHUN 1 (2026)
		Sertifikasi labor lingkungan hidup
		Peningkatan sarana dan prasarana labor lingkungan hidup
		meningkatkan ruang terbuka hijau
		meningkatkan kebersihan/kerapian/keindahan taman-taman kota
		Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan limbah B3
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap keberadaan MHA,
		pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan lingkungan hidup
		pemenuhan indikator-indikator penilaian lingkungan hidup
		penyelesaian permasalahan2 lingkungan hidup
		meningkatkan pengelolaan sampah dari rumah tangga
		Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan
		Pengembangan PTPS 3 R, Bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
		Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan
		Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.
		penyusunan dokumen kebencanaan dan pengadaan sarana prasarana keselamatan
		pembangunan gedung PUSDALOPS
2	Meningkatnya Aksesbilitas/Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Peningkatan potensi-potensi sumber daya air : Pembangunan Embung Lurah Bomben Desa Kolok Nan Tuo Kota Sawahlunto,
		Normalisasi/ Restorasi Sungai Kali Hitam Kota Sawahlunto untuk mencegah terjadinya banjir
		Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)
		Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak
		Peningkatan sistem drainase perkotaan
		Peningkatan penataan gedung-gedung perkantoran
		Peningkatan kualitas Jalan Kota
		Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua
		Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas untuk pengembangan wilayah dengan Kab. Solok dengan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Talawi - Rawang (Segmen SMK 1 Talawi - Batas Kab. Solok)
		Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dengan Kab. Tanah Datar untuk mendukung pariwisata dengan 1. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Segmen Simp. Bank Mandiri - Batas Kab, Tanah Datar)
		Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Maping digitalisasi RTRW
		Optimalisasi Embung Sumpahan
		Optimalisasi jaringan Irigasi
		Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)
		Optimalisasi SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		TAHUN 1 (2026)
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan IPLT
		Pembangunan Tankiseptik individu
		Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi aman
		Peningkatan sistem drainase Perkotaan
		Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah
		Optimalisasi Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan
		Pembangunan Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan
		Pembangunan jalan Muaro Kalaban -Pondok Kapua
		Guguak bungo simarambang
		Peningkatan jalan puskesmas Silungkang- sungai cancang silungkang- taratak bancah
		Peningkatan jalan muaro kalaban -taratak bancah
		Peningkatan jalan pasar guguak - kelumindai
		Pembinaan bagi tenaga jasa kontruksi
		Penyusunan PERDA RTRW
		Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Maping digitalisasi RTRW
		Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan (RPJMN)
		Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan Kota Lama
		Pembangunan/Rehabilitasi rumah yang korban bencana
		Peningkatan kualitas kawasan kumuh sesuai SK Walikota yaitu Kolok mudiak dan kolok nan tuo
		Peningkatan kualitas kawasan rawan kumuh
		Koordinasi penyerahan PSU perumahan ke pemerintah daerah
		Penerbitan perwako PSU Perumahan
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitasi Perumahan
		Penyelesaiaan status tanah pemerintah,
		pembentukan tim satuan tugas penyelesaian konflik agraria daerah
		peningkatan koordinasi tim satuan tugas dalam penyelesaian konflik agraria daerah
		inventarisasi dan identifikasi status tanah kota sawahlunto
		inventarisasi dan identifikasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absente
		Penutasan sertifikat tanah 393 hektar
		Pengadaan penerangan Jalan umum
		Pengadaan Perlengkapan Jalan (Warning Light, Guard Rail, Cermin Tikungan (Safety Mirror), Rambu Standar, RPPJ (Wisata), Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Marka Jalan)
		penerapan standar dan prosedur keselamatan yang lebih ketat untuk lalu lintas dan angkutan jalan.
		Koordinasi ke KAI dan balai perkeretapian terkait dengan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran operasional, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Misi 4. Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan Pelestarian budaya melalui Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan		

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN TAHUN 1 (2026)
Tujuan 4. Terwujudnya ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis		
1	Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Penguatan koloboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)
		Membina kerukunan antarsuku, agama, ras, dan golongan lainnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
		Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat.
		Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama
		Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya
		Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter
		Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat
		Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial
		menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menciptakan kondisi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
		menjaga keamanan dan ketertiban di ruang publik, serta mencegah terjadinya gangguan ketenteraman yang dapat meresahkan masyarakat
		memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin timbul.
		Meningkatkan kemampuan dan keahlian petugas pemadam kebakaran serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.
		Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk memastikan kesiapan menghadapi risiko kebakaran.
2	Meningkatnya komunitas seni dalam pelestarian cagar budaya dan adat istiadat	Melestarikan tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto
		Pembinaan untuk pengkaderan ninik mamak
		Menumbuhkembangkan komunitas seni tradisional dan modern melalui pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi ruang kreatif
		Mendukung dan memfasilitasi kalender acara budaya seperti festival, pameran seni, pentas kesenian sebagai sarana ekspresi lokal dan daya tarik wisata
		Mendorong kemitraan antara seniman, UMKM lokal, dan investor (termasuk BUMN/BUMD) untuk komersialisasi budaya
		Pembentukan kelompok-kelompok seni yang produktif dengan program yang berkualitas Melahirkan Komunitas yang baru, berkompeten Studi Banding dan Evaluasi yang berkelanjutan sesuai peningkatan kompetensi seni dan mengemas hal yang estetik untuk Kota Sawahlunto dan Pelatihan Kurator Seni, Bimtek Pelatih Kesenian
		Peningkatan kualitas seni pertunjukan (teater, musik, tari).Event event berkesinambungan yang menghidupi warga kota, Pasar Seni.

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		TAHUN 1 (2026)
		Terbentuknya rumah seni dengan pemenuhan sarana dan prasarana penunjangnya.Kampung Seni Rumah Seni atau pemberdayaan Museum Seni yang lebih aktif dalam menampung aspirasi warga yang sangat menyukai seni dan berprofesi di bid kesenian
		Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya
		Melestarikan tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto
		Meningkatkan upaya inventarisasi, konservasi, dan revitalisasi bangunan serta kawasan cagar budaya
		mempertahankan dan mengelola nilai universalnya yang luar biasa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO
		Mendorong kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, perguruan tinggi, BPCB, serta sumber dana multilateral/BUMN untuk mendukung pengelolaan, penelitian, dan pemeliharaan warisan budaya
		Menjaga pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Sawahlunto
		pengembangan pariwisata yang memanfaatkan warisan budaya
		pengelolaan museum secara optimal
		Melaksanakan penataan ulang ruang museum
Misi 5. Optimalisasi potensi kepariwisataan		
Tujuan 5 Peningkatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat		
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	Penataan sarana prasarana pendukung kepariwisataan dengan Infrastruktur yang Futuristik, *Instagramable*
		Pembangunan destinasi wisata baru di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan keberdayagunaan, tingkat daya saing, dan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian
		Mengoptimalkan fungsi Geopark nasional di Kota Sawahlunto
		Pengembangan kawasan terpadu kandih di sawahlunto (RPJMN)
		Meningkatkan daya tarik dan keunggulan pariwisata seperti pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, penginapan, fasilitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya di destinasi pariwisata
		Pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata unggulan di Sawahlunto yang mendukung status sebagai Warisan Dunia UNESCO Tambang Batubara Ombilin dan Geopark Nasional Sawahlunto
		Penyelenggaraan multi eventyang berkualitas yang mampu memacu tumbuh kembangnya elektabilitas dunia kepariwisataan Kota Sawahlunto seperti Multi Event Tourism, Event SISSCA melibatkan International Event yang optimal
		Membangun kemitraan pariwisata antar daerah
		Membangun sistem manajemen kepariwisataan yang efektif dan efisien (Top Management Tourism)
		Penguatan branding destinasi dan produk wisata dDengan Branding ulang destinasi yang ada
		Peningkatan kualitas layanan pariwisata. (Service Excellent Pariwisata, SOP Pelayanan Kepariwisataan)
		Mendukung penerapan pariwisata halal mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi ramah muslim, dan lingkungan yang bebas dari alkohol atau produk non-halal
		Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Event Kreatif (festival seni, musik, olahraga)

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		TAHUN 1 (2026)
		Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan penyediaan sarana MICE *(Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions*)
		Memperluas promosi dan pemasaran, termasuk pemanfaatan kanal digital dan kolaborasi multi-stakeholder
		Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia
2	Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah	Mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan penyediaan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, restoran, transportasi, biro travel, kuliner, pusat oleh-oleh dan cinderamata.
		Mendukung penyelenggaraan event kreatif yang diinisiasi oleh kelompok/komunitas, BUMN/BUMD, swasta dan lain sebagainya
		Penguatan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan keterlibatan masyarakat lokal
		Memberikan perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan fasilitasi akses terhadap sumber daya hukum bagi pelaku ekonomi kreatif.
		Mempermudah akses ke pasar melalui promosi produk dan jasa kreatif.
		Peningkatan kapasitas SDM pariwisiata melalui pelatihan
Misi 6. Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat		
Tujuan 6. Terwujudnya SDM yang berdaya saing		
1	Terciptanya pendidikan yang berkualitas	Penerapan pembelajaran interaktif dan vokatif serta individual yaitu PISA *(Program International Student Asessment)* - Program Penilaian Siswa Internasional, *Computational Thinking Era.*
		Mengoptimalkan pemenuhan SPM pendidikan
		Pelaksanaan kompetisi pendidikan yang berkelanjutan yang memberikan kontribusi atas bergairahnya dunia pendidikan dan memberikan multiplier effect, terutama dalam pembentukan kota wisata pendidikan seperti Kompetisi melibatkan Antar Provinsi dan capaian rekor MURI.
		Perluasan akses pendidikan dengan Perda Pendidikan Terbaru
		Bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu
		mengadakan kelengkapan sekolah bagi peserta didik (SD dan SMP) bagi siswa yang tidak mampu
		pemberian transportasi dan kelengkapan sekolah untuk sekolah Non Formal
		pemeratan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		Penjaminan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan
		Peningkatan kompetensi guru sebagai pengajar dengan TOT
		Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah
		Pembangunan pendidikan berkarakter dengan satuan ukur yang terstandarisasi seperti Pendidikan Tauhid , Indikator Kuantitatif Karakter
		Mendukung optimalisasi peran tokoh agama dan adat dalam kegiatan Pendidikan
		sinergitas dengan semua stake holders terkait dengan tata kelola pendidikan dengan Muatan Lokal Agama dan Budaya , serapan ajar dari semua profesi pakar, Reward /Beasiswa
		Menggiatkan Kurikulum Anti Narkoba (IKAN) ke sekolah2
		Percepatan peraturan daerah tentang muatan lokal untuk mendukung pendidikan/sekolah berkarakter
		Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat seperti Muatan Lokal diajar oleh Niniak mamak atau tigo tungku sajarangan, Pembangunan Sekretariat MUI,LKAAM, Kaderisasi).

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		TAHUN 1 (2026)
		Fasilitasi status dan perizinan sekolah dan institusi pendidikan
		Pengendalian, pembinaan dan pengawasan institusi pendidikan
		Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan
		terlestarinya bahasa dan sastra daerah
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terpenuhinya pelayanan dasar publik atas program stunting dan imunisasi serta pemenuhan standar pelayanal minimal (SPM)
		Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
		Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan
		Peningkatan Kualitas Obat
		Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Sawahlunto (PHTC)
		Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis dan standar layanan optimal.
		Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata untuk seluruh masyarakat.Fasilitas Puskesmas
		Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis, Kualitas Obat dan standar layanan optimal.
		Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi
		Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC
		Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat
		Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas
		Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat
		Peningkatan koloboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan
3	Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjadikan keluargas sejahtera
		Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak
		Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini
		Pemberdayaan perempuan.UMKM Wanita/PKK
		Penguatan peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandangdisabilitas, dan orang lanjut usia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
		Optimalisasi SPM bidang sosial
		meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.
		Melindungi kelompok rentan dan korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.
		identifikasi dan verifikasi penerima bantuan sosial (data DTKS)

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		TAHUN 1 (2026)
		Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak
		Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah
		Peningkatan kelas kemandirian ABK
		Pencegahan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pemenuhan hak dan perlindungan tumbuh kembang anak.
		Peningkatan dan penyebarluasan data terpilah terkait perempuan dan anak untuk mendukung penyusunan dan evaluasi kebijakan.
4	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Mendorong program pelatihan dan event pemuda
		Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event pemuda
		Mendorong pemuda untuk berwirausaha dan menjadi pencipta lapangan kerja
		Membangun kemitraan dan jejaring kerja dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan pemuda.
		Meningkatkan kualitas pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan kerja agar mampu bersaing dan berdaya.
		Mewujudkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi luar negeri yang berkualitas dan memberikan kesempatan kepada 8 (delapan) orang siswa sekolah menengah atas yang memenuhi standarisasi tertinggi setiap tahunnya dengan dukungan pembiayaan APBD dan pembiayaan lainnya yang sah seperti Kuliah seperti di Al Azhar dll dan mengabdi di kampung halaman.
		Penyediaan sarana dan prasarana olahraga indoor beberapa cabor unggulan dan pemfungsian kembali sarana dan prasarana olahraga masyarakat
		Mendukung pelaksanaan turnamen dan event olahraga berkelanjutan untuk pengembangan prestasi atlet sampai ke tingkat nasional/internasional
		Peningkatan, rehabilitasi, dan pembangunan sarana/prasarana olahraga di pusat kota, kecamatan, dan desa
		Penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat dalam mendukung gaya hidup sehat, dan prestasi olahraga amatir serta profesional
		Penguatan pembinaan olahraga melalui kompetisi tingkat daerah (POPDA), kejuaraan lokal, dan program peningkatan prestasi atlet muda
		Mendorong program pelatihan atlet berprestasi, kompetisi olahraga lokal,
		Penyelenggaraan event olahraga daerah (sepak bola, voli, futsal, atletik) sebagai ajang rekreasi dan promosi daerah
		Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan induk olahraga (KONI), sekolah, perguruan tinggi, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event olahraga
Misi 7. Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kemendagri RI, Kemenpan RB dan Kementerian lainnya sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Daerah		
Tujuan 7. Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah yang berdaya saing		
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas fasilitasi produk hukum yang dihasilkan
		Meningkatkan kualitas kematangan organisasi pemerintah daerah
		Support System Penilaian Kinerja Walikota,
		Komitmen penuh atas pembangunan di bidang keagamaan Fasilitasi honor Guru Tahfidz dan Ketersediaan lahan TPU

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		TAHUN 1 (2026)
		Mengoptimalkan fungsi rumah Tahfidz untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama
		Mengoptimalkan fungsi mesjid/musala untuk sebagai tempat ibadah, sosial dan pemberdayaan umat
		melakukan pembinaan dan evaluasi rumah tahfiz dan TPA serta stadarisasinya
		Meningkatkan daya saing daerah melalui koordinasi forum CSR
		Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal
		Penyaluran dana CSR yang berdasarkan sektor prioritas mendukung tujuan pembangunan daerah
		percepatan pembentukan forum CSR dalam meningkatkan partisipasi BUMN, BUMD, perusahaan Swasta dalam pembangunan Kota
		Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
		Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal
		Penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi tertetapkan. MOU dengan Pemprov dan Proposal Pusat
		Meningkatkan Peran Perantau (diaspora sawahlunto) dalam pembangunan kota
2	Terwujudnya profesionalitas ASN	Penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur pelaksana. Core Values Sawahlunto Maju
3	Meningkatnya tata kelola arsip dan literasi masyarakat	Meningkatkan pelayanan Pengelolaan Arsip untuk perangkat daerah, desa/kelurahan dan arsip masyarakat dalam mewujudkan kampung sadar arsip
		Pengintegrasian Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan aplikasi Srikandi untuk mendukung pemerintahan digital.
		Peningkatan akses dan pemanfaatan arsip secara digital.
		Mengoptimalkan pembinaan perpustakaan yang ada didesa/kel, masjid dan TBM
		peningkatan minat baca dan kecakapan literasi masyarakat melalui program dan kegiatan yang inovatif dan inklusif.
		pengarusutamaan dan pelestarian naskah Nusantara dalam kebijakan untuk memelihara dan mengembangkan koleksi naskah kuno
		Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan local
4	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan inovatif	Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal
		Musrenbang Digital dilengkapi Core Values ERA BARU
		Perencanaan digitalisasi partisipatif personal yang terintegrasi.
		peningkatan kapasitas SDM Perencana
		meningkatkan konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
		menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah
		penguatan koordinasi dan partisipasi dalam Musrenbang untuk memastikan program pembangunan daerah efektif, efisien, dan akuntabel demi mencapai tujuan pembangunan nasional

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		TAHUN 1 (2026)
		Perencanaan pembangunan wilayah yang adil dan merata demi terwujudnya kesinambungan pembangunan daerah Master Plan, air dan jalan dan penerangan
		Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan Rriset, Inovasi dan teknologi
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi perangkat daerah untuk Indeks Inovasi Daerah
5	Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip anggaran berimbang
		Pemenuhan Kebutuhan Belanja untuk Urusan Wajib Secara Prioritas
		Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance
		Peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui publikasi laporan keuangan yang mudah diakses masyarakat.
		Implementasi penuh akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah terbaru
		Digitalisasi penuh siklus pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, kas, akuntansi, dan pelaporan).
		Optimalisasi perencanaan anggaran berbasis kinerja dan penganggaran terpadu (integrated budgeting).
		Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
		Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai
		Penertiban penggunaan aset untuk memastikan status hukum dan kepemilikan jelas
		Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD
		Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
		Pemutakhiran data wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan PAD yang lebih akurat dan efisien
		Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Manajemen Pendapatan Daerah
		Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD
		Mendorong inovasi daerah dalam menciptakan potensi pendapatan baru
		Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Kebocoran PAD
		Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah secara Bertahap
		Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai
		Pemutakhiran dan integrasi basis data wajib pajak & objek pajak berbasis NIK, NIB, dan data sectoral
		Penerapan sistem informasi pajak dan retribusi berbasis digital *(online payment & e-billing)*.
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance
		Menggali potensi sektor unggulan daerah (pariwisata, industri kreatif, pertanian, perikanan, dll.) untuk menciptakan pendapatan baru
		Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.
6	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Dashboard Monitoring Kinerja Pemerintahan dan Support System Penilaian Kinerja Walikota, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		TAHUN 1 (2026)
		memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, dan sesuai aturan
		peningkatan kualitas pengawasan internal, fokus pada area berisiko tinggi seperti kinerja dan keuangan, pencegahan korupsi, dan penerapan sistem peringatan dini untuk mendukung reformasi birokrasi dan good governance.
		Memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah daerah.
		Melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, yang meliputi target pencapaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Perangkat Daerah (PD) Kota Sawahlunto.

RKPD Kota Sawahlunto merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto yang akan dilaksanakan tahun 2026 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2024. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Sawahlunto.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Daerah Kota Sawahlunto.

5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan menurut Perangkat Daerah dan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KOTA SAWAHLUNTO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						DINAS PENDIDIKAN				93.932.207.638,00						0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				93.932.207.638,00						0,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				93.932.207.638,00						0,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	87.696.086.116,00					-	0,00	
						[Tercapainya penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	87.696.086.116,00						0,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		833 Orang/bulan	81.000.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
		Kinerja Pegawai											
	1 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0 Orang	150.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	1 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	1 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	1 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
	1 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	1 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	1 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
	1 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	250.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	1	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya											
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		0 Unit	59.490.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	4.587.029.312,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										Kesehatan			
	1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	1 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	1 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	1 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	70.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
2	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	6.198.245.552,00					-	0,00	
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]											
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	-	3.279.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	0,00	
	1 01 02 2.01 0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)											
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan,		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										Pendidikan dan Kesehatan			
	1 01 02 2.01 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		5 Unit	315.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah											
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDIDIKAN-REGULER-SD		Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah											
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah											
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		0 Paket	350.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah											
							Jumlah Alat Rumah Tangga		0 Paket	0,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Sekolah yang Tersedia				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		2 Paket	160.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		0 Peserta Didik	700.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		0 Orang	14.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		0 Orang	150.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah											
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		0 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		0 Satuan Pendidikan	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-AFIRMASI-SD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		0 Orang	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar											
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar											
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan,		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.01	0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah											
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
						-											
	1	01	02	2.01	0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar											
						[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal	38 42.57	34 35.65	6.198.245.552,00						0,00	
							ketercapaian SPM bidang pendidikan	59.72 60.91	55.52 57								
							Lulusan SD yang hafal alqur''an juz 30	61	60.31								
							Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	65.76 70.39-70.49 73.75	65.16 69.59-69.79 72								
							Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	75.72 98.25	74.92 97.85								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Sekolah yang terakreditasi A.									
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		0 Orang	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		0 Konten Digital	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
							Jumlah peserta pelatihan		0 Orang	25.000.000,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		0 Dokumen	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0 Dokumen	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		0 Komunitas	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK											
							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia		0 Paket	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		0 Kegiatan	25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0044	Penataan Ruang/Sudut Baca											
							Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata		0 Ruang	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	1 01 02 2.01 0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik											
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		0 Buku	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		0 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
			-		-	0,00	-	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		7 Unit	605.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau		0 Orang	15.000.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
								Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik											
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		0 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
								Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
							-											
	1	01	02	2.01	0052		Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus											
	1	01	02	2.01	0053		Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus											
								Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang		0 Ruang	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Telah Dibangun							Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
						[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]											
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	1.540.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	0,00	
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)											
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala		0 Ruang	0,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Sekolah/TU yang Telah Dibangun				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium											
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula											
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0008	Pembangunan Asrama Sekolah											
							Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah											
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	1 01 02 2.02 0010	Pembangunan Fasilitas Parkir											
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0011	Pembangunan Kantin Sekolah											
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		0 Unit	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan,		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium											
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										Pendidikan dan Kesehatan			
	1 01 02 2.02 0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula											
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah											
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir											
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah											
			Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDIDIKAN-REGULER-SMP		Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2 Unit	160.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah											
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		0 Paket	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah											
							Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia		0 Paket	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		0 Paket	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		4 Peserta Didik	250.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											
							Jumlah Siswa yang Mengikuti		0 Peserta Didik	500.000.000,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		0 Orang	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		0 Orang	25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah											
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		0 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		0 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		0 Orang	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-AFIRMASI-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah											
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	-												
	1 01 02 2.02 0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama											
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal ketercapaian SPM bidang pendidikan Lulusan SD yang hafal alqur''an juz 30 Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Sekolah yang terakreditasi A.	38 42.57 59.72 60.91 61 65.76 70.39-70.49 73.75 75.72 98.25	34 35.65 55.52 57 60.31 65.16 69.59-69.79 72 74.92 97.85	6.198.245.552,00					0,00	
	1 01 02 2.02 0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,		0 Orang	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				Kecamatan, Semua Kel/Desa			Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		0 Konten Digital	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		0 Orang	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		0 Dokumen	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0 Dokumen	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		0 Komunitas	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		0 Kegiatan	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0056	Penataan Ruang/Sudut Baca											
							Jumlah Ruang/Sudut Baca yang		0 Ruang	0,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Telah Ditata				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		0 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0 Orang	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
															Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik												
								Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		0 Buku	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik												
								Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		0 Paket	150.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah												
								Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	1 01 02 2.02 0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	-	-	-	6.198.245.552,00						0,00	
	1 01 02 2.02 0065	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus											
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0066	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus											
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]											
	1 01 02 2.02 0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	1 01 02 2.02 0068	Penyediaan infrastruktur TIK											
	1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	-	1.078.245.552,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	0,00	
	1 01 02 2.03 0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD											
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0007	Pengadaan Mebel PAUD											
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		0 Paket	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD											
			Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia		0 Paket	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Semua Kel/Desa			Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD											
							Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		0 Paket	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD											
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		0 Peserta Didik	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		0 Orang	408.245.552,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		0 Orang	340.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD											
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		0 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD											
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		0 Satuan Pendidikan	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD											
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan		0 Orang	10.000.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Dana BOP PAUD				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah											
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
						-											
	1	01	02	2.03	0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
						[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal ketercapaian SPM bidang pendidikan Lulusan SD yang hafal alqur''an juz 30 Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar	38 42.57 59.72 60.91 61 65.76 70.39-70.49 73.75 75.72	34 35.65 55.52 57 60.31 65.16 69.59-69.79 72 74.92	6.198.245.552,00					0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Sekolah yang terakreditasi A.	98.25	97.85								
	1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		0 Orang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		0 Konten Digital	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										Kesehatan			
	1 01 02 2.03 0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		0 Orang	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0 Dokumen	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
		-											
	1 01 02 2.03 0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
	1	01	02	2.03	0031	Penyediaan infrastruktur TIK											
						[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal ketercapaian SPM bidang pendidikan Lulusan SD yang hafal alqur''an juz 30 Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Sekolah yang terakreditasi A.	38 42.57 59.72 60.91 61 65.76 70.39-70.49 73.75 75.72 98.25	34 35.65 55.52 57 60.31 65.16 69.59-69.79 72 74.92 97.85	6.198.245.552,00					0,00	
	1	01	02	2.03	0032	Penataan Ruang/Sudut Baca											
							Jumlah Ruang/Sudut Baca yang		0 Ruang	0,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Telah Ditata				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.03	0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik											
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		0 Peserta didik	40.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
						-											
	1	01	02	2.03	0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik											
							[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal	38 42.57	34 35.65	6.198.245.552,00					0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							ketercapaian SPM bidang pendidikan Lulusan SD yang hafal alqur''an juz 30 Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Sekolah yang terakreditasi A.	59.72 60.91 61 65.76 70.39-70.49 73.75 75.72 98.25	55.52 57 60.31 65.16 69.59-69.79 72 74.92 97.85						
	1	01	02	2.03	0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										Kesehatan			
	-												
	1 01 02 2.03 0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											
	[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal ketercapaian SPM bidang pendidikan Lulusan SD yang hafal alqur''an juz 30 Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Sekolah yang terakreditasi A.	38 42.57 59.72 60.91 61 65.76 70.39-70.49 73.75 75.72 98.25	34 35.65 55.52 57 60.31 65.16 69.59-69.79 72 74.92 97.85	6.198.245.552,00						0,00	
	1 01 02 2.03 0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula											
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula		0 Ruang	0,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0 Orang	25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)											
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		0 Paket	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		0 Unit	40.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
						-	-	-	-	6.198.245.552,00						0,00	
	1	01	02	2.03	0043	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus											
							Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0044	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus											
							Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										Kesehatan			
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]											
	1 01 02 2.03 0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD											
	1 01 02 2.03 0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD											
	1 01 02 2.03 0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD											
		-	-	-	-	6.198.245.552,00						0,00	
	1 01 02 2.03 0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]											
	1 01 02 2.03 0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
		-	-	-	-	6.198.245.552,00						0,00	
	1 01 02 2.03 0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto,	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Sedang/Berat				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
						[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]											
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	301.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	0,00	
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		0 Peserta Didik	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		0 Orang	120.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		0 Orang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		0 Satuan Pendidikan	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		0 Satuan Pendidikan	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		0 Orang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
						-											
	1	01	02	2.04	0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
						[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal ketercapaian SPM bidang pendidikan Lulusan SD yang hafal alqur''an juz 30 Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	38 42.57 59.72 60.91 61 65.76 70.39-70.49 73.75	34 35.65 55.52 57 60.31 65.16 69.59-69.79 72	6.198.245.552,00				0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Sekolah yang terakreditasi A.	75.72 98.25	74.92 97.85							
	1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		0 Orang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		0 Konten Digital	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1 01 02 2.04 0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		0 Orang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik		0 Komunitas	0,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							yang terfasilitasi				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		0 Kegiatan	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
							Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi		0 Orang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0033	Penyediaan infrastruktur TIK											
							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia		0 Paket	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.04	0034	Penataan Ruang/Sudut Baca											
							Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik											
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		0 Peserta Didik	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		0 Paket	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		0 Buku	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		0 Paket	25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0 Orang	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium											
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										Kesehatan			
	1 01 02 2.04 0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)											
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah											
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia		0 Paket	51.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		0 Peserta Didik	60.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0047	Pembangunan Ruang Laboratorium											
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Semua Kel/Desa	REGULER-SKB		Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah											
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		0 Paket	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun		1 unit	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	-	-	-	-	-	6.198.245.552,00						0,00	
	1 01 02 2.04 0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus											
	1 01 02 2.04 0054	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus											
						0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					0,00	DINAS PENDIDIKAN
	[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]					6.198.245.552,00						0,00	
	1 01 02 2.04 0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan											
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia		0 Paket	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0056	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
	1 01 02 2.04 0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
	-	-	-	-	-	6.198.245.552,00						0,00	
	1 01 02 2.04 0058	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat											
	1 01 02 2.04 0059	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat											
	[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal ketercapaian SPM bidang pendidikan Lulusan SD yang hafal alqur''an	38 42.57 59.72 60.91	34 35.65 55.52 57	6.198.245.552,00							0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							juz 30 Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Sekolah yang terakreditasi A.	61 65.76 70.39-70.49 73.75 75.72 98.25	60.31 65.16 69.59-69.79 72 74.92 97.85						
	1	01	02	2.04	0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		0 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU),	-	Meningkatkan Kualitas Sumber		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Sedang/Berat				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB		Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM											
						[Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan]	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	25	18.58	15.000.000,00						0,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	-	15.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	0,00	
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar											
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		0 Dokumen	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	-	12.875.970,00					-	0,00	
						[Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan]											
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,	-	-	-	12.875.970,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		0 Dokumen	12.875.970,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
5	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA											
						[Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah]	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	18	10	10.000.000,00						0,00	
	1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	10.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	0,00	
	1	01	06	2.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun		0 Dokumen	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
						DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.324.013.263,00						63.797.953.089,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	44.211.007.451,00					-	46.524.815.074,00	
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	44.211.007.451,00						46.524.815.074,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	41.147.387.757,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	43.205.557.145,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		428 Orang/bulan	41.143.387.757,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		43.200.557.145,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/		10 Laporan	4.000.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 Paket	9.446.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		9.918.300,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	54.996.170,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		57.745.979,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							-		-	15.000.000,00	-	-	-	-		15.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	26.774.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		28.113.540,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	95.192.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		99.951.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.898.447.724,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	1.993.370.110,00	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Laporan	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		1.050.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	213.156.624,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang		223.814.455,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Kecamatan, Semua Kel/Desa			Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	1.684.291.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		1.768.505.655,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						-	-	-	-	44.211.007.451,00						46.524.815.074,00	
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 Unit	39.930.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan		41.926.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kesehatan			
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.194.974.573,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	1.236.621.802,00	
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Unit	968.430.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]											
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	14.525.714.390,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya	-	15.604.436.537,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1461 Orang	22.211.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		55.058.304,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1772 Orang	12.523.880,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		142.554.804,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1273 Orang	32.525.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		39.201.204,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
							Jumlah Balita yang		4603 Orang	18.129.780,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		41735 Orang	8.548.480,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		8.975.904,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		7500 Orang	4.650.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		4.882.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan		16541 Orang	4.997.250,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber		11.850.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
								Kesehatan Sesuai Standar				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus												
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		962 Orang	10.112.980,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		10.618.629,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat												
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis												
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		661 Orang	51.494.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		54.069.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV												
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		1600 Orang	2.950.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,		3.097.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Semua Kel/Desa			Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			BERENCANA
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		1 Dokumen	2.790.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		21.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		50.188.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang		19.586.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Kecamatan, Semua Kel/Desa			Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	45.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		46.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		1 Dokumen	13.931.570.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		14.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Dokumen	65.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas		68.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah											
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)											
										212.520.220,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		178.206.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		2 Dokumen	20.288.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		21.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	12.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui	-	12.600.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		3 Dokumen	12.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		12.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00						26.250.000,00	
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan											
										25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		26.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	270.316.849,00					-	285.979.676,00	
						-	-	-	-	270.316.849,00						285.979.676,00	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota											
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		12 Dokumen	3.193.348,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		10.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						[Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan]											
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	257.123.501,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	269.979.676,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		100 Orang	257.123.501,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan		269.979.676,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Pendidikan dan Kesehatan			
9	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	-	65.000.000,00					-	80.750.000,00	
						[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]											
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	10.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11.500.000,00	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	-	10.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11.500.000,00	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan		1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber		11.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga											
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan											
10	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	20.000.000,00					-	26.500.000,00	
						[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]											
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	10.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11.500.000,00	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		4 Dokumen	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		11.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	10.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	15.000.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				30.000.000,00						31.500.000,00	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				30.000.000,00						31.500.000,00	
11	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											
						-	-	-	-	30.000.000,00						31.500.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				30.000.000,00						31.500.000,00	
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))											
										30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		31.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				74.934.143.682,00						74.337.416.279,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				74.934.143.682,00						74.337.416.279,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	71.194.401.962,00					-	70.410.687.473,00	
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD RSUD)]				71.194.401.962,00						70.410.687.473,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				41.867.896.164,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	39.617.856.385,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		342 Orang/bulan	41.867.896.164,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		39.617.856.385,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
						-	-	-	-	71.194.401.962,00						70.410.687.473,00	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
										250.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio					262.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD RSUD)]				71.194.401.962,00						70.410.687.473,00	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.687.445.798,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas	-	1.771.818.088,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	1.326.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		1.392.300.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	361.445.798,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		379.518.088,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				389.060.000,00						408.513.000,00	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
										389.060.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan		408.513.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Pendidikan dan Kesehatan			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	27.000.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	28.350.000.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
13	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	1.622.241.720,00					-	1.703.353.806,00	
						[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD RSUD)]				1.622.241.720,00						1.703.353.806,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.622.241.720,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	1.703.353.806,00	
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		1 Unit	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan		52.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										Kesehatan			
	1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
	1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						85.017.100,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio					89.267.955,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
						1.457.224.620,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		1.530.085.851,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
14	1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	2.117.500.000,00					-	2.223.375.000,00	
		[Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan (UPTD RSUD)]	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	39	35	2.117.500.000,00						2.223.375.000,00	
	1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											
	1 02 03 2.02 0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar											
						1.817.500.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio					1.908.375.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan	-	315.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kesehatan			
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		6 Orang	300.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		315.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
						UPTD PUSKESMAS KOLOK				507.822.000,00						533.213.100,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				507.822.000,00						533.213.100,00	
15	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	507.822.000,00					-	533.213.100,00	
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD Puskesmas Kolok)]											
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	507.822.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	533.213.100,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
										507.822.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya		533.213.100,00	UPTD PUSKESMAS KOLOK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
						UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN				900.738.000,00						945.774.900,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				900.738.000,00						945.774.900,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				900.738.000,00						945.774.900,00	
16	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD Puskesmas Sungai Durian)]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	900.738.000,00						945.774.900,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	900.738.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	945.774.900,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	900.738.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		945.774.900,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN
						UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG				986.245.000,00						1.035.557.250,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				986.245.000,00						1.035.557.250,00	
17	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD Puskesmas Silungkang)]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	986.245.000,00						1.035.557.250,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
						UPTD PUSKESMAS TALAWI				1.812.556.781,00						1.903.184.620,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.812.556.781,00						1.903.184.620,00	
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.812.556.781,00					-	1.903.184.620,00	
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD Talawi)]											
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	1.812.556.781,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	1.903.184.620,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
						UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG				608.579.934,00						639.008.931,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				608.579.934,00						639.008.931,00	
19	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD Kampung Teleng)]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	608.579.934,00						639.008.931,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	608.579.934,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar,	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang		639.008.931,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Pasar			Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
						UPTD PUSKESMAS LUNTO											
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				400.981.000,00						421.030.050,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
20	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	400.981.000,00					-	421.030.050,00	
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD Lunto)]											
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	400.981.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	421.030.050,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	400.981.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		421.030.050,00	UPTD PUSKESMAS LUNTO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						UPTD INSTALASI FARMASI KOTA											
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				738.006.444,00						760.500.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
21	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	738.006.444,00					-	760.500.000,00	
						[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD INSTALASI FARMASI KOTA)]												
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	648.087.554,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	670.250.000,00	
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	89.918.890,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	90.250.000,00	
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	89.918.890,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan		90.250.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.221.772.202,00						29.378.114.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
22	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	11.184.252.402,00					-	12.503.114.000,00	
						[Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	11.184.252.402,00						12.503.114.000,00	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	9.129.804.380,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	10.000.000.000,00	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		48/14 Orang/bulan	9.129.804.380,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0 Orang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Konektivitas Antar Wilayah			
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	262.325.330,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	235.000.000,00	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	16.996.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	55.172.630,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	21.732.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang		1 Paket	18.424.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Disediakan				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah			PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	150.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	20.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	30.000.000,00	
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.339.276.092,00			-	-	-	1.748.114.000,00	
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							-		-	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	246.331.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan		12 Laporan	3.410.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan		4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Kantor yang Disediakan				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah			PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	1.084.534.392,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan		1.489.114.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	432.846.600,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	490.000.000,00	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
23	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	-	2.170.000.000,00					-	700.000.000,00	
						[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]											
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.090.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	300.000.000,00	
	1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara		0 KM	250.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai											
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		0 KM	740.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya											
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		1 Unit	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan											
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		0 KM	540.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan											
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan											
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		0,2 KM	300.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah			
						-	-	-	-	2.170.000.000,00						700.000.000,00	
	1	03	02	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa											
							Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun		1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	-	570.000.000,00					-	700.000.000,00	
						[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]											
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	570.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	700.000.000,00	
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan											
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		7 Liter/Detik	400.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan											
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		7 Liter/Detik	170.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Wilayah			
25	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				610.000.000,00						500.000.000,00	
						[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]				610.000.000,00						500.000.000,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				610.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-	500.000.000,00	
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman											
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		0 M^3/Hari	610.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE											
						[Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	52	47.45	1.335.000.000,00						400.000.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.335.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	400.000.000,00	
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan											
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		0 Sistem Drainase Perkotaan	935.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan											
										0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Wilayah			
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan											
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		3 Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	4.900.000.000,00					-	2.540.000.000,00	
						[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]											
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	-	4.900.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	2.540.000.000,00	
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota											
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota											
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG											
28	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	-	4.245.000.000,00					-	300.000.000,00	
						[Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata]											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	4.245.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	300.000.000,00	
	1	03	09	2.01	0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota											
29	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	-	15.125.000.000,00					-	11.650.000.000,00	
						[Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman]	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	63.67	57.47	15.125.000.000,00						11.650.000.000,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota											
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan											
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan											
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan											
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan											
							Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan		0 KM	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan											
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi		0 KM	1.640.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Wilayah			
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan											
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi		3,4 KM	11.075.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan											
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		5 Jembatan	300.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan											
							Panjang jembatan yang dibangun		0 Meter	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI											
						[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	35	29	17.519.800,00						20.000.000,00	
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	17.519.800,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	20.000.000,00	
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		0 Dokumen	17.519.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Konektivitas Antar Wilayah			
31	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-	-	65.000.000,00					-	65.000.000,00	
						[Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang]											
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	10.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	10.000.000,00	
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang											
							Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		12 Layanan	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota											
	1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR											
							Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif		5 Kasus	3.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK											
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang											
						UPTD ALAT BERAT				753.626.228,00						230.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				753.626.228,00						230.000.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				753.626.228,00						230.000.000,00	
32	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	753.626.228,00					-	230.000.000,00	
						[Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (UPTD Alat Berat)]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	753.626.228,00						230.000.000,00	
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	532.744.353,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	0,00	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6 Unit	532.744.353,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		0,00	UPTD ALAT BERAT
						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP											
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.448.921.759,00						0,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
33	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	11.340.921.759,00					-	0,00	
						[Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	11.340.921.759,00						0,00	
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.999.947.175,00			-	Meningkatkan Pembangunan	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50/14 Orang/bulan	5.999.947.175,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	62.648.560,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	-	0,00	
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
										7.785.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang		1 Paket	16.162.800,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Disediakan				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	4.647.970.424,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	-	0,00	
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	550.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	242.798.936,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										yang Berkelanjutan			
	1 04 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	2.400.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	4.402.221.488,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		-											
	1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	610.355.600,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	-	0,00	
	1 04 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		55 Unit	589.855.600,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		[Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota]											
	1 04 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 Unit	20.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						-	-	-	-	11.340.921.759,00						0,00	
	1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
34	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	-	223.000.000,00					-	0,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	9.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	-	0,00	
	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		10 Dokumen	9.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah]											
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	9.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana											
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		60 Orang	9.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				205.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	-	0,00	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana											
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		10 Unit Rumah	205.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
35	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	1.240.000.000,00					-	0,00	
						[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]											
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	1.240.000.000,00			-	-	-	0,00	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni											
										1.240.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
36	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				1.645.000.000,00					-	0,00	
						-	-	-	-	1.645.000.000,00						0,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU	-	-	-	1.645.000.000,00			-	Meningkatkan	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						Perumahan								Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			
	1	04	05	2.01	0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan											
							Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		0 Lokasi	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						[Meningkatnya penyediaan PSU permukiman]											
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan											
										1.645.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.303.726.000,00						0,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				111.226.000,00						0,00	
37	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	-	35.226.000,00					-	0,00	
						[Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan]	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	100	100	35.226.000,00						0,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota											
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
										25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
										10.226.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Kecamatan, Semua Kel/Desa			Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
38	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-	-	34.000.000,00					-	0,00	
						-	-	-	-	34.000.000,00						0,00	
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	10	06	2.01	0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah											
							Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 Dokumen	34.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
39	2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-	-	-	30.000.000,00					-	0,00	
						[Meningkatnya tata kelola tanah ulayat]											
	2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	30.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	-	0,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	2 10 07 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		5 Laporan	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
40	2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG											
		[Meningkatnya pengelolaan tanah kosong]	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	50	30	12.000.000,00						0,00	
	2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong											
	2 10 08 2.02 0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong											
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.		1 Laporan	12.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		-											
	2 10 08 2.02 0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong											
			Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		0 Berita Acara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
41	2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	150.000.000,00					-	0,00	
		[Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRF]											
	2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-	-	150.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota											
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
42	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	5.000.000,00					-	0,00	
						[Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup]											
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	5.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	-	0,00	
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		3 Dokumen	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
43	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											
						[Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	Persentase RTH yang dikelola	100	100	504.000.000,00						0,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	-	504.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)											
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati											
	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan											
44	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-	-	4.500.000,00					-	0,00	
						[Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	90	80	4.500.000,00						0,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												
45	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	20.000.000,00					-	0,00	
						[Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup]	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	88	80	20.000.000,00						0,00	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup											
							Jumlah Masyarakat/Lembaga		4 Entitas	20.000.000,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan		0,00	DINAS PERUMAHAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
46	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-	-	1.509.000.000,00					-	0,00	
						[Meningkatnya tata kelola persampahan]											
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	-	-	-	1.509.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	-	0,00	
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		1 Dokumen	190.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		6 Unit	350.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan											
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi		6950 Ton	969.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				Kecamatan, Semua Kel/Desa			Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	X					NON URUSAN				100.000.000,00						0,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX											
47	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	100.000.000,00					-	0,00	
						-	-	-	-	100.000.000,00						0,00	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						UPTD RUSUNAWA											
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				260.000.000,00						0,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				260.000.000,00						0,00	
48	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				260.000.000,00					-	0,00	
						[Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)]				260.000.000,00						0,00	
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	-	260.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	-	0,00	
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun											
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus											

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
								Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1 Dokumen	120.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		0,00	UPTD RUSUNAWA
							UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN											
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				603.446.706,00						0,00	
	2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				603.446.706,00						0,00	
49	2	11	03				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											
							[Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan sebagai dasar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup]	Persentase sampel uji kualitas lingkungan yang dianalisis tepat waktu	100	100	603.446.706,00						0,00	
	2	11	03	2.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											
	2	11	03	2.01	0015		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota											
							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				10.921.158.944,00						13.050.482.785,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				10.921.158.944,00						13.050.482.785,00	
50	1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
							[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	10.521.086.944,00						12.651.478.785,00	
	1	05	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	1	05	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		113/14 Orang/bulan	8.800.920.325,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi		10.121.058.374,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	182.049.255,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	138.922.306,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	1.112.031.364,00			-	Mewujudkan Tata	-	1.924.385.305,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Pemerintahan Daerah								Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	1	05	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Laporan	750.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	91.290.812,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		95.855.353,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	1.019.990.552,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi		1.827.779.952,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
						-	-	-	-	10.521.086.944,00						12.651.478.785,00	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	10.521.086.944,00					12.651.478.785,00	
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		28 Unit	9.320.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		10.220.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	35.268.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		49.244.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
51	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	131.678.000,00					-	153.860.000,00	
						[Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat]											
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	65.994.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih,	-	76.562.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan											
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		12 laporan	43.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		51.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						[Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum]											
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa											
						[Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat]	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100	100	131.678.000,00						153.860.000,00	
						[Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum]	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100	100	131.678.000,00						153.860.000,00	
	1	05	02	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja											
							Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas		1 Orang	13.154.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		13.154.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						[Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada]				131.678.000,00						153.860.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				26.070.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	37.684.000,00	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 Laporan	10.355.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		12.426.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						[Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat]	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100	100	131.678.000,00						153.860.000,00	
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		12 Laporan	15.715.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		25.258.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						[Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum]	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100	100	131.678.000,00						153.860.000,00	
						[Meningkatnya kapasitas SDM PPNS]											
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	-	39.614.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih,	-	39.614.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS											
52	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	-	268.394.000,00					-	245.144.000,00	
						[Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]											
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	259.844.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	232.196.000,00	
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran											
						[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran]	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100	100	268.394.000,00						245.144.000,00	
						[Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]											
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran											
						[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran]	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100	100	268.394.000,00						245.144.000,00	
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		5 Unit	155.750.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata		160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
						[Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]											
						[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran]	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100	100	268.394.000,00						245.144.000,00	
	1	05	04	2.01	0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											
						[Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	268.394.000,00						245.144.000,00	
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran											
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran											
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	-	2.800.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	6.048.000,00	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat											
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	-	4.250.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang	-	5.100.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Terintegrasi			
	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi											
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis		5 Unit	4.250.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		5.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.924.068.542,00						5.582.014.592,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.924.068.542,00						5.582.014.592,00	
53	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	4.499.359.542,00						4.902.651.792,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		15.342.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.358.391.870,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	3.641.828.920,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		29 Orang/bulan	3.358.391.870,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan		3.641.828.920,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah			
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	3.282.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	20.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	20.000.000,00	
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	798.086.372,00			-	-	-	799.086.372,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	50.064.300,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		50.064.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 bulan Laporan	747.022.072,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		747.022.072,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	153.830.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		153.830.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	3.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15 Unit	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
54	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											
						[Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana]	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	100	424.709.000,00						679.362.800,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				30.000.000,00			-	-	-	43.577.800,00	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)											
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		20400 Orang	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		43.577.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	-	188.924.000,00			-	-	-	210.000.000,00	
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota											
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya		2 Unit	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana											
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		1 laporan	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan		12 bulan Kawasan	18.924.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				Barangin, Durian II						BENCANA DAERAH
						[Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat]	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	100	100	424.709.000,00						679.362.800,00	
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	175.785.000,00			-	-	-	385.785.000,00	
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		1 Dokumen	84.785.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		84.785.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota											
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota											
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota		12 Laporan Laporan	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						[Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana]	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	100	424.709.000,00						679.362.800,00	
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana											
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan		12 Laporan Kegiatan	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.495.752.198,00						8.028.099.373,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7.495.752.198,00						8.028.099.373,00	
55	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	-	6.065.085.498,00					-	6.793.007.327,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
		KABUPATEN/KOTA											
		[Terselenggaranya urusean pemerintahan daerah yang berjalan lancar dan tertib]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	6.065.085.498,00						6.793.007.327,00	
	1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	1 06 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
	1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.498.269.316,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	5.153.527.167,00	
	1 06 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/bulan	4.498.269.316,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		5.153.527.167,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	1 06 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
	1 06 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
	1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	519.262.394,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata	-	357.004.980,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	15.127.044,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		17.150.630,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	167.006.350,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		187.006.350,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	67.348.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		77.348.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan		12 Paket	65.371.000,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Mewujudkan Tata		75.500.000,00	DINAS SOSIAL,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							dan Penggandaan yang Disediakan				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70 Laporan	204.410.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						-				6.065.085.498,00						6.793.007.327,00	
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				125.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	40.000.000,00	
	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		4 Unit	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Tata Kelola Pemerintahan		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						[Terselenggaranya urusean pemerintahan daerah yang berjalan lancar dan tertib]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	6.065.085.498,00						6.793.007.327,00	
	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	697.423.788,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	992.413.766,00	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	99.998.344,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		109.998.178,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	592.425.444,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih,		876.415.588,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Semua Kel/Desa			Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
56	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	-	147.976.000,00					-	79.116.800,00	
						[Meningkatnya pemberdayaan sosial]											
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	147.976.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	79.116.800,00	
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota											
57	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	-	1.159.630.000,00					-	1.021.291.286,00	
						[Meningkatnya rehabilitasi sosial]											
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	-	-	-	1.139.630.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber	-	999.291.286,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan											
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu											
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat											
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		100 Orang	198.397.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		218.237.360,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan											
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	-	20.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya	-	22.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		40 Orang	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
58	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											
						[Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial]	persentase daerah yang melalsanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 3.80 62	100 2.7 54	23.825.460,00						26.208.006,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	23.825.460,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	26.208.006,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga											
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		6 Orang	18.969.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		20.866.340,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan		3194 Usulan	4.856.060,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		5.341.666,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
59	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-	-	64.257.100,00					-	70.000.000,00	
						[Meningkatnya perlindungan sosiaal korban bencana]	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya	100	100	64.257.100,00						70.000.000,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)		30 Orang	25.370.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,		30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Kewenangan Kabupaten/Kota				Semua Kel/Desa			Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota											
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana											
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Orang	38.887.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
60	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-	-	34.978.140,00					-	38.475.954,00	
						[Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan]											
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	-	34.978.140,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	38.475.954,00	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		4 Makam	34.978.140,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		38.475.954,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.651.903.649,00						1.255.590.248,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				605.954.000,00						493.259.400,00	
61	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	-	244.105.000,00					-	153.015.500,00	
						[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	8.54	8.50	244.105.000,00						153.015.500,00	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											
	2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG		2 Laporan	39.105.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		43.015.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	105.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	0,00	
	2	08	02	2.02	0006	Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota											
							jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan		03 Lembaga	105.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	110.000.000,00	
	2	08	02	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota											
							jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan		20 Lembaga	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		110.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
62	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA											
						[Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak]	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	100	100	283.549.000,00					256.943.900,00	
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota											
	2	08	04	2.02	0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas		1 Lembaga	50.000.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota											
	2	08	04	2.03	0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota											
	2	08	04	2.03	0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota											
63	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	-	78.300.000,00					-	83.300.000,00	
						[Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif]	persentase desa/kelurahan ramah anak	100	100	78.300.000,00						83.300.000,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											
	2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		42 Lembaga	42.300.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing		37.300.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											
	2	08	06	2.02	0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		2 Dokumen	36.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang		46.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Kewenangan Kabupaten/Kota				Kecamatan, Semua Kel/Desa			Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
64	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	586.368.384,00					-	509.791.456,00	
						[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	100	586.368.384,00						509.791.456,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	586.368.384,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	509.791.456,00	
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		2 Dokumen	532.648.384,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		455.199.456,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih,		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Semua Kel/Desa			Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			PERLINDUNGAN ANAK
	2 13 04 2.01 0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa											
		-	-	-	-	586.368.384,00						509.791.456,00	
	2 13 04 2.01 0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa											
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		3 Dokumen	33.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		33.330.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]											
	2 13 04 2.01 0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa											
	2 13 04 2.01 0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa											
	2 13 04 2.01 0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa											
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 13 04 2.01 0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						serta Lomba Desa dan Kelurahan											
65	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	-	459.581.265,00					-	252.539.392,00	
						[Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan]	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100 70	100 50	459.581.265,00						252.539.392,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota											
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		42 Dokumen	379.581.265,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		197.539.392,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN											
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.448.586.817,00						12.927.150.000,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
66	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	-	12.287.026.817,00					-	12.765.750.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						KABUPATEN/KOTA											
						[Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	12.287.026.817,00					12.765.750.000,00		
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	4.477.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	7.000.000,00	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	4.477.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		91 Orang/bulan	10.517.576.529,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui		10.650.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	25.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	50.000.000,00	
	2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Orang	25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
										10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
										128.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	40.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	31.402.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	932.490.268,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan	-	989.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	348.080.270,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	509.750.000,00	
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		90 Unit	278.080.270,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		356.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel yang Dipelihara		10 Unit	3.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas		3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Kecamatan, Semua Kel/Desa			pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
67	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-	-	10.000.000,00					-	15.000.000,00	
						[Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan]											
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	10.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	15.000.000,00	
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya											
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia		1 Unit	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
68	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN	-	-	-	75.560.000,00					-	54.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											
						[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]											
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	-	5.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	10.000.000,00	
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis											
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis		3 Laporan	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi											
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		3 Laporan	67.560.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Pariwisata dan Ketahanan Pangan			
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun											
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun		1 Laporan	3.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
69	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											
						[Meningkatnya penanganan kerawanan pangan]	Angka Konsumsi Ikan	13.5	2.7	45.500.000,00						60.000.000,00	
							Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	44.80	44.76								
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan											
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan											
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan		1 Dokumen	12.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	33.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan	-	45.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota											
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota		12 Laporan	33.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
70	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	-	30.500.000,00					-	32.400.000,00	
						[Menigkatnya pengawasan dan mutu dan kemanan pangan]											
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	30.500.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	32.400.000,00	
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota											
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah sarana pengujian		5 Dokumen	28.500.000,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan nilai		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.557.450.975,00						2.336.800.000,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
71	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	163.000.000,00					-	80.000.000,00	
						[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]											
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	-	163.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	80.000.000,00	
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 Unit	163.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
72	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN	-	-	-	23.440.000,00					-	25.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						PEMASARAN HASIL PERIKANAN											
						[Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat]	Angka Konsumsi Ikan	44.80	44.76	23.440.000,00						25.000.000,00	
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil											
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko											
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		1 Unit Usaha	23.440.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2.371.010.975,00						2.231.800.000,00	
73	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											
						[Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian]	Jumlah produksi daging sapi Jumlah Produksi Kakao Jumlah Produksi Kopi Robusta Jumlah Produksi Padi	18170 415.70 603.74 64.33	18065 413.47 42.85 696.32	1.078.599.900,00						721.800.000,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian											
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi											
										20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian											
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		4 Laporan	168.734.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	194.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	226.000.000,00	
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman											
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Ketahanan Pangan			
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman											
										151.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		173.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman											
							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian		1 Varietas Unggul Baru (VUB)	8.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	35.795.900,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	40.000.000,00	
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil											
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan		2 Laporan	35.795.900,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	205.070.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	20.500.000,00	
	3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak											
							Jumlah benih/bibit ternak yang beredar		4 Laporan	205.070.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		20.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	-	455.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	325.300.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain											
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		100 Ekor	455.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		325.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
74	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											
						[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	Persentase Penambahan Prasarana Pertanian	2.5	2.5	883.652.850,00						1.155.000.000,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian											
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya											
	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota											
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	-	857.152.850,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	1.000.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani											
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya											
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		2 Unit	58.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya											
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		10 Unit	143.032.850,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani											
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi		1 Unit	101.120.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui		315.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan											
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi		1 Unit	55.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
75	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	-	180.942.225,00					-	205.000.000,00	
						[Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner]											
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	52.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	60.000.000,00	
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		4 Laporan	52.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota											
	3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium											
							Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium		1 Laporan	2.999.225,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner											
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	27.943.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	41.000.000,00	
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan											
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		4 Laporan	22.943.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			
	3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan											
							Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi		1 Unit Usaha	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
76	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	-	85.000.000,00					-	95.000.000,00	
						[Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian]											
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	-	85.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	95.000.000,00	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											
						-	-	-	-	85.000.000,00						95.000.000,00	
	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan											
							Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman		1 Laporan	50.000.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							pangan, hortikultura dan perkebunan				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			PERTANIAN DAN PERIKANAN
77	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											
						[Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian]	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan	5	5	142.816.000,00						55.000.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				142.816.000,00						55.000.000,00	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa											
										135.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa											
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		150 Unit	7.816.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.011.256.562,00						4.749.426.493,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.011.256.562,00						4.749.426.493,00	
78	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
						[Persentase ketercapaia n penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	4.651.796.162,00						4.468.426.493,00	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.932.112.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	2.956.462.955,00	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		34 Orang/bulan	3.932.112.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		2.956.462.955,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	191.191.635,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	213.665.450,00	
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	1.425.600,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		1.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	54.325.435,00	Kota Sawahlunto, Barangin,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan		80.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Durian II			Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	19.840.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		28.565.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	93.945.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		72.550.450,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						-	-	-	-	4.651.796.162,00						4.468.426.493,00	
	2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						[Persentase ketercapaia n penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	4.651.796.162,00						4.468.426.493,00	
	2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	19.625.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	2 12 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		1.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	2 12 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
	2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	107.130.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	567.000.500,00	
	2 12 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		10 Unit	66.580.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		550.450.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	15.730.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		16.550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-											
	2 12 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
79	2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	-	334.715.650,00					-	241.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	Perekaman KTP elektronik	100	15	334.715.650,00						241.000.000,00	
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	27	80								
			Persentase Kepemilikan KTP-el Bagi Wajib KTP-el	95 99.55	98.80 99.42								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Persentase Penduduk Yang Menggunakan IKD Bagi Wajib KTP-el										
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	9.001.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	9.500.000,00	
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk											
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		12 Laporan	9.001.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		9.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	310.704.650,00			-	-	-	215.000.000,00	
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan											
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		8 Dokumen	310.704.650,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		215.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk											
	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk											
80	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	-	12.000.750,00					-	13.500.000,00	
						[Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil]											
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	-	12.000.750,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	13.500.000,00	
	2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam												
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang		1 Laporan	5.000.500,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Beragama Islam										
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil											
							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		1 Laporan	4.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		4.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil											
							Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		1 Laporan	3.000.250,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
81	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	-	2.994.000,00					-	3.500.000,00	
						[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan]											
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	-	2.994.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	3.500.000,00	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan											
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		4 Dokumen	2.994.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
82	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN											
						-	-	-	-	9.750.000,00						23.000.000,00	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan				9.750.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	23.000.000,00	
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		10.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						[Meningkatnya kualitas profil kependudukan]											
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain											
	X					NON URUSAN				14.940.000,00						16.500.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX											
83	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	14.940.000,00					-	16.500.000,00	
						-											
	X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	14.940.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	16.500.000,00	
	X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						DINAS PERHUBUNGAN				10.222.308.611,00						10.191.600.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.222.308.611,00						10.191.600.000,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				10.222.308.611,00						10.191.600.000,00	
84	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.037.308.611,00					-	9.343.600.000,00	
						[Meningkatnya Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	9.037.308.611,00						9.343.600.000,00	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.985.260.750,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	4.000.000.000,00	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		44/14 Orang/bulan	3.985.260.750,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing		4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah			
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	10.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	15.000.000,00	
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	68.022.265,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	85.000.000,00	
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	20.022.265,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						-											
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
						[Meningkatnya Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan	100	100	9.037.308.611,00						9.343.600.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						Daerah Kab/Kota]	daerah kabupaten/kota										
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	3.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	3.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	20.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	22.000.000,00	
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	4.898.567.996,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	5.150.600.000,00	
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	500.000,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan		600.000,00	DINAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Surat Menyurat				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah			PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	3.983.080.540,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		4.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						-	-	-	-	9.037.308.611,00						9.343.600.000,00	
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Unit	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						[Meningkatnya Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	9.037.308.611,00					9.343.600.000,00	
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Semua Kel/Desa			Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah			
85	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
						[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	45	25	1.170.000.000,00						833.000.000,00	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	1.070.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	753.000.000,00	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan											
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan											
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	50.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	30.000.000,00	
	2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor											
										50.000.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah			
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	50.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	50.000.000,00	
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota											
86	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	-	-	-	15.000.000,00					-	15.000.000,00	
						[Jumlah Perjalanan Kereta Api Wisata]	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	70	70	15.000.000,00						15.000.000,00	
	2	15	05	2.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	15.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	15.000.000,00	
	2	15	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah		2 Laporan	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.069.581.310,00						0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN				6.069.581.310,00						0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						PELAYANAN DASAR											
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
87	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.495.613.280,00					-	0,00	
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota]				4.495.613.280,00						0,00	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.698.704.133,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	17.810.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	17.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				222.144.175,00						0,00	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
										3.978.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	35.189.425,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	35.110.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan		20 Laporan	127.865.000,00	Semua	DANA ALOKASI	-	Mewujudkan Tata		0,00	DINAS KOMUNIKASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	393.565.472,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	77.713.572,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	314.851.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	99.937.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	48.907.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
88	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-	-	401.386.930,00					-	0,00	
						[Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]											
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	401.386.930,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media											
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat											
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik											
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik											
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		2 Rekomendasi	3.769.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik											
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten											
							Jumlah Konten Informasi Publik		10 Konten	20.868.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
89	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-	-	1.113.477.300,00					-	0,00	
						[Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]											
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	3.644.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa											
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa		1 Dokumen	3.644.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.109.832.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	2 16 03 2.02 0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE											
						3.264.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 03 2.02 0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE											
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE		2 Aplikasi	2.256.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 03 2.02 0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE											
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		1 Laporan	3.631.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 03 2.02 0036	Penyediaan Akses Internet											
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses		27 Perangkat Daerah	1.098.051.300,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							internet yang disediakan oleh Dinas				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah											
							Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		1 Dokumen	1.628.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				47.326.450,00						0,00	
90	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-	-	47.326.450,00					-	0,00	
						[Tercapainya kolaborasi integrasi,dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN]											
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	47.326.450,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	2	20	02	2.01	0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional											
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik		100 %	34.966.150,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia											
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk		100 %	6.740.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral											
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		27 Orang	5.619.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
91	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-	-	11.777.350,00					-	0,00	
						[Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]				11.777.350,00						0,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				9.646.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Terintegrasi			
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1 Laporan	1.540.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan											
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian		27 Perangkat Daerah	2.750.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah											
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian		1 Dokumen	1.095.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota											
	2	21	02	2.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah											
						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				10.064.460.937,00						7.767.510.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				9.364.674.887,00						7.767.510.000,00	
92	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12	12	8.736.754.887,00						7.610.150.000,00	
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	6.355.257.770,00			-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	5.000.000.000,00	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		53 Orang/bulan	6.355.257.770,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		5.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						-	-	-	-	8.736.754.887,00						7.610.150.000,00	
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
		[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12	12	8.736.754.887,00						7.610.150.000,00	
	2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	316.827.869,00			-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	480.000.000,00	
	2 17 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Paket	4.871.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	241.883.819,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		15 Paket	10.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	9.572.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Kecamatan, Semua Kel/Desa			Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	100.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		150.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.566.894.348,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		1.600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	178.858.100,00			-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi	-	195.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Berbasis Digital Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		17 Unit	142.500.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
93	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-	-	95.000.000,00					-	0,00	
						[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi]	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	14	10	95.000.000,00						0,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	95.000.000,00			-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	0,00	
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		37 Unit Usaha	90.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota											
										5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
94	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				37.920.000,00					-	20.000.000,00	
						-	-	-	-	37.920.000,00						20.000.000,00	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	37.920.000,00			-	Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	20.000.000,00	
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		35 Unit Usaha	37.920.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
95	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	-	495.000.000,00					-	137.360.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						[Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]											
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	-	495.000.000,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	137.360.000,00	
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro											
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		20 Unit Usaha	495.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		137.360.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				396.088.675,00						0,00	
96	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											
						[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,merata dan terintegrasi]	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	18	5	372.522.500,00						0,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		50 Unit	372.522.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
97	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING											
						[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	8.9	9.7	4.566.175,00						0,00	
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	-	4.566.175,00			-	-	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		12 Laporan	4.566.175,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
98	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR											
						[Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor]	Nilai Ekspor Barang	1000000000	800000000	19.000.000,00						0,00	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		4 Pelaku Usaha	19.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
99	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	-	303.697.375,00					-	0,00	
						[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]											
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	-	303.697.375,00			-	-	-	0,00	
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		6 Dokumen	142.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		2 Dokumen	161.697.375,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA											
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.225.256.810,00						6.625.000.000,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
100	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.036.301.050,00					-	5.208.500.000,00	
						-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.828.718.637,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	4.000.000.000,00	
	2 07 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		34 Orang/bulan	3.828.718.637,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		4.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 07 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	2 07 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4 Orang	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	2 07 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	2 07 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	2 07 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	2 07 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		22.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 07 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	20.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	25.000.000,00	
	2 07 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	955.899.216,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	-	922.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	2.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	288.250.416,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		295.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	665.648.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang		625.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										Terintegrasi			
	2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	82.202.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	90.000.000,00	
	2 07 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Unit	42.202.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 07 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	2 07 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
101	2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	-	0,00					-	110.000.000,00	
		[Terkelolanya informasi tenaga kerja]	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	0,00						110.000.000,00	
	2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-	-	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi	-	110.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro											
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
102	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	-	300.000.000,00					-	321.500.000,00	
						[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]											
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	-	300.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	321.500.000,00	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi											
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		48 Orang	300.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		320.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		0 Lembaga	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
103	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				450.999.600,00						460.000.000,00	
						[Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi]				450.999.600,00						460.000.000,00	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				450.999.600,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	460.000.000,00	
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan											
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		4 Laporan	450.999.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		460.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
104	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-	-	38.000.000,00					-	35.000.000,00	
						[Meningkatnya jangkauan promos penanaman modal]											
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi	-	-	-	38.000.000,00			-	Mewujudkan Tata	-	35.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1 Dokumen	38.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
105	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											
						[Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko]	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	100	80.000.000,00						100.000.000,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		1846 Pelaku Usaha	80.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
106	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											
						[Terkendalinya pelaksanaan	Persentase Penyelesaian	100	100	85.000.000,00						140.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						penanaman modal]	Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha										
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	85.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	140.000.000,00	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya											
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		2 Kegiatan Usaha.	12.130.740,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		200 Pelaku Usaha	48.941.460,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal											
107	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	234.956.160,00					-	250.000.000,00	
						[Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal]											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	234.956.160,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	250.000.000,00	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		1 Dokumen	234.956.160,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
						DINAS KEBUDAYAAN											
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.067.179.199,00						4.696.652.362,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				6.067.179.199,00						4.696.652.362,00	
108	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.904.049.199,00					-	3.892.652.362,00	
						[Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota]											
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.789.429.412,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan	-	2.556.762.789,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Ketahanan Pangan			
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	201.408.990,00			-	-	-	285.653.927,00	
	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							-		-	7.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		9.100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		41 Paket	63.582.990,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		85.453.927,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							0		50 0	112.826.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan		158.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Ketahanan Pangan			
	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	836.098.797,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	967.007.046,00	
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	235.996.849,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		306.795.903,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	57.112.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Penguatan Transformasi Ekonomi yang	-	57.228.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	2	22	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							0		10 0	6.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		7.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
109	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	-	375.000.000,00					-	298.000.000,00	
						[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan]											
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	115.000.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-	103.000.000,00	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan											
										110.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah		97.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	2	22	02	2.01	0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota											
							Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan		1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		5.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota											
	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat											
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina		22 Orang	260.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		195.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
110	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL											
						[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional]	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	69.64	62.50	541.000.000,00						195.000.000,00	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional											
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		7 Lembaga	541.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi		195.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kitabullah Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			
111	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA											
						[Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan]	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82	67	50.000.000,00						55.000.000,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-	15.000.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	16.500.000,00	
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya											
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-	35.000.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	38.500.000,00	
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya											
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		40 Objek	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi		5.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kitabullah Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya											
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		2 Objek	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		33.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
112	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN											
						[Meningkatnya tata kelola museum]	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	37000	34000	197.130.000,00						256.000.000,00	
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	-	197.130.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	256.000.000,00	
	2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum											
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				5.321.425.131,00						6.560.464.486,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				5.266.506.131,00						6.463.464.486,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						PERPUSTAKAAN											
113	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.856.746.266,00					-	5.052.438.821,00	
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	3.856.746.266,00					5.052.438.821,00		
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/bulan	3.128.357.658,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		4.333.638.055,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
										2.150.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		2.366.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	33.671.620,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui		37.038.782,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
										13.643.500,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II					15.007.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						-				3.856.746.266,00						5.052.438.821,00	
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	79.640.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	20.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	22.000.000,00	
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan		22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Pendidikan dan Kesehatan			
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	3.856.746.266,00						5.052.438.821,00	
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1.500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		1.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	137.743.776,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		151.518.154,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	320.587.912,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		357.823.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
114	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	1.397.633.565,00					-	1.398.899.365,00	
						[Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan]	Indeks pembangunan literasi masyarakat	95.00	94.85	1.397.633.565,00						1.398.899.365,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan											
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		2 Perpustakaan	4.326.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		4.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan											
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan		1 Dokumen	9.965.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		9.965.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	2 23 02 2.01 0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan											
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		500 Eksemplar	14.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		14.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota											
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		150 Eksemplar	271.589.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		271.589.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik											
	2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.090.544.065,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	1.090.644.165,00	
	2 23 02 2.02 0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial											
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan		2 Perpustakaan	5.399.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		5.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.02 0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah		2 Perpustakaan	543.640.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih,		543.640.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Kabupaten/Kota							Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		21 Orang	305.022.365,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		305.022.365,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat											
115	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	-	-	12.126.300,00					-	12.126.300,00	
						[Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno]											
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	12.126.300,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	12.126.300,00	
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno											
							Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno		50 Orang	12.126.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		12.126.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
116	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-	-	39.650.700,00					-	60.000.000,00	
						[Meningkatnya tata kelola arsir dinamis dan statis]	Tingkat Ketersediaan Arsip	79.25	79.05	39.650.700,00						60.000.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota											
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis											
						-	-	-	-	39.650.700,00						60.000.000,00	
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis											
	2	24	02	2.01	0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota											
						[Meningkatnya tata kelola arsir dinamis dan statis]	Tingkat Ketersediaan Arsip	79.25	79.05	39.650.700,00						60.000.000,00	
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota											
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis											
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		250 Arsip	9.588.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota											
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN											
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
117	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-	-	15.268.300,00					-	30.000.000,00	
						[Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK]	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	40.25	40.05	15.268.300,00						30.000.000,00	
	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-	-	-	11.181.700,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	15.000.000,00	
	2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana											
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		100 Arsip	11.181.700,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota											
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip											
118	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-	-	-	0,00					-	7.000.000,00	
						-	-	-	-	0,00						7.000.000,00	
	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota											
	2	24	04	2.01	0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup											
						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA				15.681.913.602,00						17.946.118.443,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				6.744.017.996,00						8.600.249.775,00	
119	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.765.517.996,00					-	3.325.885.775,00	
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1339 Paket	44.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		48.684.130,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		8 Paket	12.710.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		13.820.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	200.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui		350.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.223.839.376,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	2.461.628.538,00	
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	158.397.400,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	227.920.000,00	
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15 Unit Unit	98.397.400,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		139.920.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	2	19	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
120	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	-	1.075.354.000,00					-	1.075.354.000,00	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	-	1.000.000.000,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	1.000.000.000,00	
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda											
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda		500 Orang	1.000.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						[Meningkatnya daya saing kepemudaan]											
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	75.354.000,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	75.354.000,00	
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota											
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		3 Organisasi	75.354.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	-	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing		75.354.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Kecamatan, Semua Kel/Desa			Kepariwisataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
121	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				2.703.146.000,00						3.949.010.000,00	
						[Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga]				2.703.146.000,00						3.949.010.000,00	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				505.000.000,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	550.000.000,00	
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota											
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		5 Unit	505.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		550.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		10 Kegiatan	381.936.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga											
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota		100 Orang	113.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing		113.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Kecamatan, Semua Kel/Desa			Kepariwisataan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah			
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	550.410.000,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	-	1.680.410.000,00	
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga											
							0		150 0	180.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		180.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						-											
	2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)											
						[Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga]	Persentase Atlet yang berdaya saing	18	14.7	2.703.146.000,00						3.949.010.000,00	
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota											
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		1 Orang	350.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		1.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						-											
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	-	1.000.000.000,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan	-	1.000.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah			
	2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota											
							0		1 0	1.000.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						[Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga]	Persentase Atlet yang berdaya saing	18	14.7	2.703.146.000,00						3.949.010.000,00	
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi											
	2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan											
							Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		1 Laporan	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional											
							0		2 0	52.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		105.600.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
122	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN											
						[Meningkatnya kualitas kepramukaan]	Persentase peningkatan kapasitas anggota kepramukaan	25	17	200.000.000,00						250.000.000,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan											
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah											
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				5.763.342.608,00						6.045.868.668,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				5.763.342.608,00						6.045.868.668,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
123	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA											
						[Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata]	-	-	-	5.265.260.608,00						5.296.786.668,00	
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	4.695.260.608,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	4.891.786.668,00	
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		4 Lokasi	3.100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		3.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	270.000.000,00			-	Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	55.000.000,00	
	3	26	02	2.04	0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota											
							Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha		1 Laporan	270.000.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Transformasi		55.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			OLAHRAGA
124	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA											
						[Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata]	-	-	-	418.678.000,00						498.678.000,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	418.678.000,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	498.678.000,00	
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri											
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		3 Dokumen	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata											
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		2 Dokumen	8.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		8.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota											
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		4 Kegiatan	378.670.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan		438.670.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri											
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		4 Promosi	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
125	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL											
						[Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif]	-	-	-	20.400.000,00						400.000,00	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif											
	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		4 Laporan	10.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		200.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual											
							Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		10 Produk	10.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		200.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
126	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						[Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif]	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	49.32	21.92	59.004.000,00						250.004.000,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	-	59.000.000,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	250.000.000,00	
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		1 Laporan	59.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif											
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif											
	X					NON URUSAN				3.174.552.998,00						3.300.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				3.174.552.998,00						3.300.000.000,00	
127	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
						-	-	-	-	3.174.552.998,00						3.300.000.000,00	
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.174.552.998,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	3.300.000.000,00	
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima		38 Orang/bulan	3.174.552.998,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan		3.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Gaji dan Tunjangan ASN				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan			PEMUDA DAN OLAHRAGA
						SEKRETARIAT DAERAH											
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				36.238.469.131,00						36.503.199.551,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				36.238.469.131,00						36.503.199.551,00	
128	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				26.419.700.351,00					-	26.047.525.411,00	
						[Meningkatnya Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	26.419.700.351,00						26.047.525.411,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	-	12 bulan	13.643.304.608,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	12.412.734.261,00	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		105 Orang/bulan	13.643.304.608,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		12.412.734.261,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00						230.000.000,00	
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
										0,00	Kota	DANA ALOKASI	Memperkuat	Mewujudkan Tata		230.000.000,00	SEKRETARIAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	-	12 bulan	2.632.312.588,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	3.087.000.000,00	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	2.078.274.418,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan		2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										Komunikasi yang Terintegrasi			
	4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	4 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		4 Unit	2.250.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		2.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		75 Unit	230.826.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	-	12 bulan	2.772.861.644,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	2.625.000.000,00	
	4 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	4 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharananya sarana dan prasarana perkantoran	-	12 bulan	1.529.212.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	1.545.000.000,00	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		17 Unit	437.282.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		440.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		95 Unit	367.860.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		250 Unit	129.520.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
													korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah	-	12 bulan	1.374.696.588,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	1.266.791.150,00	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/Bulan	618.724.088,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		496.791.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		8 Paket	287.972.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		8 Orang	68.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/Bulan	400.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah											
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah											
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		12 Paket	482.900.360,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		360.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah											
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		12 Paket	416.434.273,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata		290.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
													judi, dan penyeludupan.	Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi											
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan											
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana											
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi											
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya Kegiatan Pimpinan Daerah	-	12 Laporan	960.330.590,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	1.050.000.000,00	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12 Laporan	686.727.590,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		12 Laporan	150.603.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
													korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan											
129	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Bantuan Hukum yang yang Difasilitasi Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti Zakat yang terkumpul pada BAZNAS Kota Sawahlunto (Milyar) Jumlah Hafidz Quran	-	100 & 100 % 6,58 Milyar 700 orang	9.454.409.900,00					-	10.097.000.000,00	
						[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat]											
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	-	100 %	209.922.340,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	220.000.000,00	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan											
										41.813.840,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		4 Dokumen	137.431.390,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Kecamatan, Semua Kel/Desa		serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		1 Dokumen	30.677.110,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kerja bidang keagamaan Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan masyarakat Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan Sosial	-	90 % 90 % 80 %	8.867.320.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	9.600.000.000,00	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		6 Dokumen	920.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial											
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat											
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	90 %	262.167.560,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	182.000.000,00	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah											
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		300 Dokumen	15.025.960,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		17.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum											
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		2 Kasus	209.871.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						Pengelolaan Informasi Hukum											
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian/realisasi Anggaran Fasilitasi Kerjasama Daerah	-	95 %	115.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	95.000.000,00	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri											
130	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan Persentase kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi (%) Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase kegiatan pembangunan yang terserap (%)	-	0 % 0,37 Rasio 100 % 67 % 96 %	364.358.880,00					-	358.674.140,00	
						[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan]											
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD, BLUD dan Lembaga Keuangan yang berkinerja sehat dan menguntungkan Persentase Peningkatan Pengawasa dan Pengendalian Inflasi Daerah	-	100 % 100 %	96.853.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	95.674.140,00	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,		3 Dokumen	78.178.880,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian											
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian fisik kegiatan pembangunan kota yang optimal Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan Laporan Kota dan Setdako yang tepat waktu (%)	-	100 % 100 % 100 %	29.306.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	27.000.000,00	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		1 Dokumen	2.388.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		12 Laporan	11.896.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan											
										15.022.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				227.806.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	225.000.000,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		625 Dokumen	79.560.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik											
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		12 Dokumen	87.454.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
													pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		95 Orang	60.792.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam											
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan											
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Permukiman, Pertanahan						korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
						SEKRETARIAT DPRD				30.274.641.472,00						42.016.500.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
	4	02				SEKRETARIAT DPRD				30.254.641.472,00						42.016.500.000,00	
131	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	13.767.121.472,00					-	24.431.500.000,00	
						[Meningkatnya Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota]											
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.480.240.770,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	12.000.000.000,00	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		27/14 Orang/bulan	2.480.240.770,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi	-	50.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0 Orang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	75.000.000,00	
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	235.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	35.878.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	867.442.072,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		25 Unit	313.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	4 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	4 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	-	8.446.947.380,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	9.320.000.000,00	
	4 02 01 2.15 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD											
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		20/14 Orang/Bulan	8.181.947.380,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		9.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD											
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		2 Paket	205.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD											
			Jumlah Orang yang Mengikuti		20 Orang	60.000.000,00	Semua	DANA ALOKASI	-	Mewujudkan Tata		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Medical Check Up DPRD				Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD											
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD											
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD											
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD											
132	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	-	16.487.520.000,00					-	17.585.000.000,00	
						[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan]	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	100	16.487.520.000,00						17.585.000.000,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD											
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah											
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah											
						[Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan]	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	16.487.520.000,00						17.585.000.000,00	
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran											
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD											
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD											
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	-	1.093.290.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	-	1.165.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD											
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		12 Dokumen	935.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		2 Dokumen	13.420.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD											
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	-	353.520.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan	-	400.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Komunikasi yang Terintegrasi			
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses											
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		60 Dokumen	353.520.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD											
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD											
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD											
	X					NON URUSAN				20.000.000,00						0,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX											
133	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	20.000.000,00					-	0,00	
						-											
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	20.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata		0,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
						BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				6.995.376.915,00						7.670.721.011,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	5	01				PERENCANAAN				591.882.810,00						646.662.275,00	
134	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											
						[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah]	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	250.032.390,00						293.462.365,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah											
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik											
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		2 Berita Acara	29.556.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		33.338.776,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota											
							-		-	69.658.000,00	-	-	-	-		76.623.800,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		2 Dokumen	123.028.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih,		152.931.042,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							(RPJPD/RPJMD/RKPD)				Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah											
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	14.267.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	15.694.140,00	
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
							0		0 0	14.267.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		15.694.140,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
135	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
						[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	341.850.420,00						353.199.910,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia											
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
		dan RKPD)											
	5 01 03 2.01 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
	5 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		4 Laporan	11.810.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		11.810.600,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5 01 03 2.01 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
	5 01 03 2.01 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
	5 01 03 2.01 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	341.850.420,00						353.199.910,00	
	5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)											
	5 01 03 2.02 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	5 01 03 2.02 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
	5 01 03 2.02 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
	5 01 03 2.02 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
	5 01 03 2.02 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											
	5 01 03 2.02 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	341.850.420,00						353.199.910,00	
	5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											
	5 01 03 2.03 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
	5 01 03 2.03 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											
	5 01 03 2.03 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											
	5 01 03 2.03 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
						7.436.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					7.436.000,00	BADAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
																	PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan											
										7.473.880,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		7.473.880,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		4 Laporan	7.094.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		7.094.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
136	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	152.871.579,00					-	168.158.736,00	
						[Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan]	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100	100	152.871.579,00						168.158.736,00	
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi											
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan											
	X					NON URUSAN				6.250.622.526,00						6.855.900.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX											
137	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.250.622.526,00					-	6.855.900.000,00	
						-											
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	2.620.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	3.000.000,00	
	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.483.416.334,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	6.000.000.000,00	
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	384.946.112,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi	-	474.900.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	9.872.625,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		9.900.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	60.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	30.000.000,00	
	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	60.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	93.748.336,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		40 Unit	13.130.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Komunikasi yang Terintegrasi			
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH											
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				81.288.020.302,00						80.545.103.870,00	
	5	02				KEUANGAN											
138	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	9.747.897.874,00					-	9.891.636.070,00	
						[Meningkatnya Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota]											
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	8.863.200,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	8.863.200,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	4.510.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		4.510.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2.125.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang		2.125.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Terintegrasi			
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	8.086.261.804,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	8.200.000.000,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		62 Orang/bulan	8.086.261.804,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		8.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.790.200,00						1.790.200,00	
	5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
										1.790.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		1.790.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	93.280.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	123.280.000,00	
	5 02 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
	5 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
	5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	391.501.375,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	391.501.375,00	
	5 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	5 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	91.167.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang		91.167.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Terintegrasi			
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	59.190.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		59.190.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	75.930.375,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		75.930.375,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	150.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	20.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih,	-	20.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	782.564.066,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		782.564.066,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
139	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	70.664.984.602,00					-	69.773.928.437,00	
						[Meningkatnya tata kelola anggaran]	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30 40	10 47	70.664.984.602,00						69.773.928.437,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS											
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD											
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		112 Dokumen	15.471.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		15.471.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD											
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		28 Dokumen	7.812.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata		7.812.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		112 Dokumen	16.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		16.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD											
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2 Dokumen	375.964.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		375.964.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD											
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		5 Dokumen	376.264.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		376.264.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran											
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		10 Dokumen	34.100.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan		34.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		240 Orang	89.246.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		89.246.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						[Meningkatnya tata kelola perbendaharaan]											
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	-	129.766.125,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	129.766.125,00	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		12 Dokumen	9.637.625,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan		9.637.625,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										Komunikasi yang Terintegrasi			
	5 02 02 2.02 0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		6 Dokumen	6.207.125,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		6.207.125,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.02 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		70 Dokumen	10.392.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		10.392.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.02 0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		1 Dokumen	5.546.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		5.546.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)											
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak		12 Laporan	6.357.625,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		6.357.625,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait											
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		12 Dokumen	6.273.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		6.273.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan											
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota											
						[Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan]	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100	70.664.984.602,00						69.773.928.437,00	
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	-	100.837.625,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif melalui Keunggulan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	-	100.837.625,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah											
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban											
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah											
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		28 Laporan	2.270.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		2.270.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota											
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		5 Dokumen	40.089.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		40.089.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD											
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 Dokumen	6.412.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi		6.412.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		3 Dokumen	4.535.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		4.535.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah											
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		1 Dokumen	7.729.125,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		7.729.125,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota											
										27.798.625,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		27.798.625,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						[Meningkatnya tata kelola perbendaharaan]				70.664.984.602,00						69.773.928.437,00	
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	69.426.360.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	-	68.535.303.835,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah											
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan											
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		12 Laporan	63.371.906.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		62.410.849.835,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak											
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		12 Laporan	3.000.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		3.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		12 Laporan	1.904.454.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		1.974.454.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
						[Meningkatnya tata kelola anggaran]	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30 40	10 47	70.664.984.602,00					69.773.928.437,00	
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah											
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah											
140	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	-	351.812.903,00					-	351.812.903,00	
						[Meningkatnya tata kelola aset daerah]											
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	351.812.903,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	351.812.903,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga											
							Jumlah Standar Harga yang Disusun		2 Dokumen	23.628.982,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		23.628.982,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Rencana Kebutuhan		2 Dokumen	18.870.625,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Mewujudkan Tata		18.870.625,00	BADAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Barang Milik Daerah				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		3 Laporan	18.930.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		18.930.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah											
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		1 Laporan	164.517.896,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		164.517.896,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		4 Laporan	20.128.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata		20.128.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		65 Orang	21.269.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		21.269.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
141	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											
						[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	13.11	11.30	523.324.923,00						527.726.460,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	523.324.923,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	527.726.460,00	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		1 Dokumen	4.267.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		4.267.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		2 Dokumen	34.234.475,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		34.234.475,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						[Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan]											
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		1 Laporan	32.397.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		32.397.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	13.11	11.30	523.324.923,00						527.726.460,00	
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		3 Unit	27.987.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		27.987.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
						[Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital]	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis	100	75	523.324.923,00						527.726.460,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
		Digital											
	5 02 04 2.01 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah											
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		1 Laporan	41.700.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		41.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]											
	5 02 04 2.01 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)											
	5 02 04 2.01 0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		39 Dokumen	44.600.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		32.512.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan]	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	100	100	523.324.923,00						527.726.460,00	
	5 02 04 2.01 0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah											
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		12 Layanan	9.418.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi		9.418.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	13.11	11.30	523.324.923,00						527.726.460,00	
	5 02 04 2.01 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah											
	5 02 04 2.01 0011	Penagihan Pajak Daerah											
		[Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan]	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	100	100	523.324.923,00						527.726.460,00	
	5 02 04 2.01 0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		12 Dokumen	4.537.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		4.537.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 04 2.01 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah											
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		2 Laporan	23.864.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		23.864.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital]											
	5 02 04 2.01 0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah											
						10.734.730,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta		10.734.730,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6.223.980.623,00						6.618.005.917,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.223.980.623,00						6.618.005.917,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN				6.223.980.623,00						6.618.005.917,00	
142	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
						[Meningkatnya Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	4.572.759.963,00						4.933.226.768,00	
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.059.263.667,00						4.262.226.768,00	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
										4.059.263.667,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		4.262.226.768,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	145.321.900,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	196.000.000,00	
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	73.376.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
										50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19.900.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	50.000.000,00	
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 Unit	19.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan,		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	252.099.396,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	298.000.000,00	
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	44.999.242,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		48.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	207.100.154,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Pendidikan dan Kesehatan			
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
										5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
										20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
143	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	1.651.220.660,00					-	1.684.779.149,00	
						[Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian]	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	100	100	1.651.220.660,00						1.684.779.149,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		3 Dokumen	99.999.660,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
						-	-	-	-	1.651.220.660,00						1.684.779.149,00	
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN											
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		1 Lembaga	36.200.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						[Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian]											
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian											
										30.170.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					38.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						[Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN]				1.651.220.660,00						1.684.779.149,00	
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				197.515.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	239.000.000,00	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		4 Dokumen	107.960.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing		210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan			
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN											
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		6 Dokumen	89.555.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		1 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						[Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN]											
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	-	1.231.723.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	1.134.425.149,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	5 03 02 2.03 0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN											
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya		1 Orang	468.712.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03 0002	Pengelolaan Assessment Center											
						97.660.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		98.040.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03 0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		2 Dokumen	392.307.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		407.094.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03 0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat											
	5 03 02 2.03 0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		1 Dokumen	89.984.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		89.986.999,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						[Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN]											
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	55.612.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	73.354.000,00	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		2150 Dokumen	26.759.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		38.854.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai											
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN											
						INSPEKTORAT				8.981.917.319,00						0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH				8.981.917.319,00						0,00	
144	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
						[Meningkatnya Persentase Terfasilitasinya urusan Pemerintahan Daerah pada OPD Pengawasan]	-	-	-	8.438.117.319,00						0,00	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45 orang Orang/bulan	6.275.105.042,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		12 dokumen Dokumen	13.230.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
						-	-	-	-	8.438.117.319,00						0,00	
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
	6	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
						[Meningkatnya Persentase Terfasilitasinya urusan Pemerintahan Daerah pada OPD Pengawasan]	-	-	-	8.438.117.319,00						0,00	
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti		33 orang Orang	133.300.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan		0,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Pendidikan dan Pelatihan				Lembah Segar, Semua Kel/Desa			Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		9 orang Orang	22.050.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		12 orang Orang	171.990.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket Paket	136.793.490,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih,		0,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket Paket	31.255.844,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							-		-	159.908.529,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	747.172.217,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							-		-	46.305.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	281.736.464,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan Laporan	5.788.125,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan Laporan	41.706.103,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						-											
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan Laporan	8.100.192,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
						[Meningkatnya Persentase Terfasilitasinya urusan Pemerintahan Daerah pada OPD Pengawasan]	-	-	-	8.438.117.319,00						0,00	
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan Laporan	226.142.044,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
										188.171.423,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa					0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
										11.025.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi		0,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 unit Unit	17.792.696,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit Unit	157.500.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
						-	-	-	-	8.438.117.319,00						0,00	
	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
145	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-	-	399.475.000,00					-	0,00	
						[Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan]											
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	-	371.912.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah											
										133.075.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		2 laporan Laporan	52.050.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja											
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan											
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		28 laporan Laporan	11.025.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa											
						-	-	-	-	399.475.000,00						0,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	6 01 02 2.01 0006	Kerja Sama Pengawasan Internal											
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		2 kesepakatan Kesepakatan	11.025.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
		[Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan]				399.475.000,00						0,00	
	6 01 02 2.01 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP											
						93.075.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
	6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	27.562.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	6 01 02 2.02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah											
	6 01 02 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											
			Jumlah Laporan Hasil		5 laporan	16.537.500,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Mewujudkan Tata		0,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Laporan		Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
146	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	-	144.325.000,00					-	0,00	
						[Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi]											
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	-	16.537.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan											
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		4 rekomendasi Rekomendasi	11.025.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan											
										5.512.500,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan		0,00	INSPEKTORAT

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
															melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	6	01	03	2.02			Pendampingan dan Asistensi				127.787.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	6	01	03	2.02	0001		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah											
								Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		28 Perangkat daerah perangkat daerah	27.562.500,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi											
								Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		28 Perangkat daerah perangkat daerah	27.562.500,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi											
								Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta		1 kegiatan Kegiatan	56.125.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan		0,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				Lembah Segar, Semua Kel/Desa			Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		3 perangkat daerah perangkat daerah	16.537.500,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	INSPEKTORAT
						KECAMATAN BARANGIN											
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				5.978.336.327,00						0,00	
	7	01				KECAMATAN				5.978.336.327,00						0,00	
147	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.720.800.327,00					-	0,00	
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Barangin)]				5.720.800.327,00						0,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.085.082.582,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	9.460.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 Orang	5.960.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
										1.251.925,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa					0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
										32.974.140,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		0,00	KECAMATAN BARANGIN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	3.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	10.600.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							0		4 0	6.240.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan		12 Laporan	40.000.000,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Mewujudkan Tata		0,00	KECAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			BARANGIN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
										20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa					0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				462.622.080,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Laporan	1.300.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		13 Laporan	423.823.780,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Mewujudkan Tata		0,00	KECAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			BARANGIN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel yang Dipelihara		10 Unit	1.500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	3.940.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN
148	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
						[Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Barangin)]	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik	100	100	10.211.600,00						0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	5.220.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		3 Laporan	5.220.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN
149	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	227.309.600,00					-	0,00	
						[Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Barangin)]											
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	227.309.600,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
150	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	9.980.800,00					-	0,00	
						[Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Barangin)]											
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	9.980.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
151	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	5.890.000,00					-	0,00	
						[Meningkatnya Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik(Barangin)]											
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	5.890.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		100 Orang	2.494.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa												
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		100 Orang	3.396.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN
152	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	4.144.000,00						-	0,00	
						[Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Barangin)]	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik	100	100	4.144.000,00							0,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		6 Dokumen	2.072.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		6 Dokumen	2.072.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN
	X					NON URUSAN				4.914.000,00						0,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				4.914.000,00						0,00	
153	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
						-	-	-	-	4.914.000,00						0,00	
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	4.914.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN
						KELURAHAN DURIAN 1				456.410.584,00						0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN											
	7	01				KECAMATAN				456.410.584,00						0,00	
154	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	62.239.256,00					-	0,00	
						[Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Durian 1)]	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik	100	100	62.239.256,00					0,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang		12 Laporan	62.239.256,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan		0,00	KELURAHAN DURIAN 1

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Dilimpahkan				Barangin, Durian I			Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
155	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	394.171.328,00					-	0,00	
						[Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 1)]											
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	394.171.328,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	75.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KELURAHAN DURIAN 1
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	319.171.328,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi		0,00	KELURAHAN DURIAN 1

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
						KELURAHAN DURIAN 2				514.998.580,00						0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				514.998.580,00						0,00	
	7	01				KECAMATAN				514.998.580,00						0,00	
156	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	81.126.040,00					-	0,00	
						[Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Durian 2)]	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik	100	100	81.126.040,00						0,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan	81.126.040,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KELURAHAN DURIAN 2
157	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
						[Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 2)]	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100	100	433.872.540,00						0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	75.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KELURAHAN DURIAN 2

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	358.872.540,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KELURAHAN DURIAN 2
							KELURAHAN LUBANG PANJANG											
	7						UNSUR KEWILAYAHAN				470.587.936,00						0,00	
	7	01					KECAMATAN											
158	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	74.492.480,00					-	0,00	
							[Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Lubang Panjang)]											
	7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	74.492.480,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	7	01	02	2.04	0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
159	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	396.095.456,00					-	0,00	
							[Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Lubang Panjang)]											
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	396.095.456,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	75.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KELURAHAN LUBANG PANJANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
						KELURAHAN SARINGAN				573.280.886,00						0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN											
	7	01				KECAMATAN				573.280.886,00						0,00	
160	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
						[Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Saringan)]	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik	100	100	80.769.530,00						0,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	80.769.530,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan	80.769.530,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata		0,00	KELURAHAN SARINGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
161	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
						[Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Saringan)]	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100	100	492.511.356,00					0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	417.511.356,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KELURAHAN SARINGAN
						KECAMATAN LEMBAH SEGAR				8.204.507.696,00						8.341.850.596,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN											
	7	01				KECAMATAN				8.204.507.696,00						8.341.850.596,00	
162	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	7.815.594.196,00					-	8.043.036.296,00	
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Lembah Segar)]											
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	7.171.928.452,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	7.371.928.452,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		55/14 Orang/bulan	7.171.928.452,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		7.371.928.452,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	8.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		9.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	96.659.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	104.901.500,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		1 Paket	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan		1.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Disediakan				Semua Kel/Desa			Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	31.344.400,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		32.251.500,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.465.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		12.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	3.850.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang		4.150.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										Terintegrasi			
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		55.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	431.186.344,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	432.386.344,00	
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						200.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		400.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	29.999.796,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Mewujudkan Tata		30.999.796,00	KECAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	400.986.548,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		400.986.548,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				84.320.000,00						95.820.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
										63.320.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		68.320.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel yang Dipelihara		10 Unit	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan		1.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		15.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
163	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	15.941.600,00					-	18.141.600,00	
						[Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Lembah Segar)]	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik	100	100	15.941.600,00						18.141.600,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	7.299.200,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	7.499.200,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
										7.299.200,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		7.499.200,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
164	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	347.750.500,00					-	247.750.500,00	
						[Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Lembah Segar)]	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100	100	347.750.500,00						247.750.500,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
165	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	12.380.800,00					-	17.380.800,00	
						[Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Lembah Segar)]	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib	100	100	12.380.800,00						17.380.800,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	12.380.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	17.380.800,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas		4 Laporan	12.380.800,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Mewujudkan Tata		17.380.800,00	KECAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			LEMBAH SEGAR
166	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
						[Meningkatnya Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik(Lembah Segar)]	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik	100	100	6.639.000,00						7.039.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	6.639.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	7.039.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
						-	-	-	-	6.639.000,00						7.039.000,00	
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		110 Orang	4.287.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta		4.487.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
167	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
						[Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Lembah Segar)]	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik	100	100	6.201.600,00						8.502.400,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		5 Dokumen	4.332.800,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		6.502.400,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
						KELURAHAN AIR DINGIN				383.614.529,00						443.614.529,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN											
	7	01				KECAMATAN				383.614.529,00						443.614.529,00	
168	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				100.000.000,00					-	150.000.000,00	
						[Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Air Dingin)]				100.000.000,00						150.000.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	100.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan	-	150.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
169	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	283.614.529,00					-	293.614.529,00	
						[Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Air Dingin)]											
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	283.614.529,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	293.614.529,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	35.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		40.000.000,00	KELURAHAN AIR DINGIN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
						KELURAHAN AUR MULYO				383.614.527,00						398.614.527,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				383.614.527,00						398.614.527,00	
	7	01				KECAMATAN											
170	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	82.305.971,00					-	87.305.971,00	
						[Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Aur Mulyo)]											
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	82.305.971,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	-	87.305.971,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		4 Laporan	82.305.971,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		87.305.971,00	KELURAHAN AUR MULYO
171	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	301.308.556,00					-	311.308.556,00	
						[Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Aur Mulyo)]											
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	301.308.556,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	311.308.556,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	46.150.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan		51.150.000,00	KELURAHAN AUR MULYO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
										Komunikasi yang Terintegrasi			
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	255.158.556,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		260.158.556,00	KELURAHAN AUR MULYO
		KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA											
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				383.614.529,00						443.614.529,00	
	J U M L A H					597.288.950.827,00						465.566.252.549,00	
172	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	100.000.000,00					-	150.000.000,00	
		[Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)]	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik	100	100	100.000.000,00						150.000.000,00	
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	100.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	150.000.000,00	
	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		4 Laporan	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata		150.000.000,00	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
173	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	283.614.529,00					-	293.614.529,00	
						[Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)]	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100	100	283.614.529,00						293.614.529,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	283.614.529,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	293.614.529,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	35.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		40.000.000,00	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	248.614.529,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan		253.614.529,00	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Komunikasi yang Terintegrasi			
						KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN				383.614.527,00						443.614.529,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				383.614.527,00						443.614.529,00	
	7	01				KECAMATAN				383.614.527,00						443.614.529,00	
174	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	83.282.255,00					-	150.000.000,00	
						[Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan)]	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik	100	100	83.282.255,00						150.000.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	83.282.255,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	150.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		4 Laporan	83.282.255,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		150.000.000,00	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN
175	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	300.332.272,00					-	293.614.529,00	
						[Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan)]	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100	100	300.332.272,00						293.614.529,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	300.332.272,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	-	293.614.529,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
															Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	40.057.372,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		40.000.000,00	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	260.274.900,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		253.614.529,00	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN
							KELURAHAN PASAR				383.614.527,00						398.614.527,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN				383.614.527,00						398.614.527,00	
	7	01					KECAMATAN				383.614.527,00						398.614.527,00	
176	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	85.547.515,00					-	90.547.515,00	
							[Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Pasar)]	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik	100	100	85.547.515,00						90.547.515,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	85.547.515,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	90.547.515,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan	85.547.515,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		90.547.515,00	KELURAHAN PASAR
177	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	298.067.012,00					-	308.067.012,00	
						[Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Pasar)]	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100	100	298.067.012,00						308.067.012,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	298.067.012,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	308.067.012,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	15.000.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	KELURAHAN PASAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
											Lembah Segar, Pasar			Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	283.067.012,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		288.067.012,00	KELURAHAN PASAR
						KELURAHAN TANAH LAPANG				383.614.527,00						443.614.527,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				383.614.527,00						443.614.527,00	
	7	01				KECAMATAN				383.614.527,00						443.614.527,00	
178	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	100.000.000,00					-	150.000.000,00	
						[Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Tanah Lapang)]	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik	100	100	100.000.000,00						150.000.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	100.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	150.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		150.000.000,00	KELURAHAN TANAH LAPANG
179	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	283.614.527,00					-	293.614.527,00	
						[Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Tanah Lapang)]	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100	100	283.614.527,00						293.614.527,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	283.614.527,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	293.614.527,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	35.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		40.000.000,00	KELURAHAN TANAH LAPANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang		4 Pokmas /	248.614.527,00	Kota	DANA ALOKASI	-	Mewujudkan Tata		253.614.527,00	KELURAHAN TANAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Ormas		Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	UMUM (DAU)		Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			LAPANG
						KECAMATAN SILUNGKANG				2.605.854.733,00						2.706.086.745,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.605.854.733,00						2.706.086.745,00	
	7	01				KECAMATAN				2.605.854.733,00						2.706.086.745,00	
180	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.292.970.873,00					-	2.482.959.575,00	
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Silungkang)]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	2.292.970.873,00						2.482.959.575,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.931.274.610,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	2.027.838.340,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		18/14 Orang/bulan	1.931.274.610,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		2.027.838.340,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	15.220.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	-	15.800.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		3.500.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	11.720.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		12.300.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	103.959.345,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan	-	120.607.400,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1.015.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		31.476.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	34.761.095,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		40.620.400,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	11.283.250,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		15.519.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							0		1 0	6.900.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan		8.626.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		24.366.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	20.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	21.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan		21.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	180.870.408,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	249.554.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							0		1 0	500.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		1.050.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							0		12 0	29.977.200,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	-	-	-		31.476.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	150.393.208,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		217.028.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	-	41.646.510,00			-	Mewujudkan Tata	-	48.159.835,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8 Unit	26.646.510,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		27.978.835,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		10.500.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
							-	-	-	-	2.292.970.873,00						2.482.959.575,00	
	7	01	01	2.09	0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
								0		0 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		4.431.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
							[Meningkatnya ketercapaian	Persentase ketercapaian	100	100	2.292.970.873,00						2.482.959.575,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Silungkang)]	penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota										
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		13 Unit	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		5.250.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
181	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	15.241.660,00					-	15.603.460,00	
						[Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Silungkang)]	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik	100	100	15.241.660,00					15.603.460,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	7.236.000,00			-	-	-	7.597.800,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4 Laporan	7.236.000,00	-	-	-	-		7.597.800,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	8.005.660,00			-	-	-	8.005.660,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							-		-	8.005.660,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	-	-	-		8.005.660,00	KECAMATAN SILUNGKANG
182	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	261.220.000,00					-	169.281.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						[Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Silungkang)]	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100	100	261.220.000,00						169.281.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	261.220.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	169.281.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		5 Lembaga Kemasyarakatan	6.220.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		6.531.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		8 Laporan	255.000.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		162.750.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
183	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	5.750.000,00					-	6.037.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						[Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Silungkang)]	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib	100	100	5.750.000,00						6.037.500,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	5.750.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	6.037.500,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	5.750.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		6.037.500,00	KECAMATAN SILUNGKANG
184	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	19.620.200,00					-	20.601.210,00	
						[Meningkatnya Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik(Silungkang)]	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik	100	100	19.620.200,00						20.601.210,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	19.620.200,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang	-	20.601.210,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Terintegrasi			
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		250 Orang	19.620.200,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		20.601.210,00	KECAMATAN SILUNGKANG
185	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	11.052.000,00					-	11.604.000,00	
						[Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Silungkang)]	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik	100	100	11.052.000,00						11.604.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	11.052.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	11.604.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		4 Dokumen	6.930.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		7.276.500,00	KECAMATAN SILUNGKANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		4 Dokumen	1.872.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		1.965.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 Dokumen	2.250.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		2.362.500,00	KECAMATAN SILUNGKANG
						KECAMATAN TALAWI				2.736.103.213,00						2.846.436.690,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.724.103.213,00						2.833.936.690,00	
	7	01				KECAMATAN				2.724.103.213,00						2.833.936.690,00	
186	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.445.783.003,00					-	2.551.336.690,00	
						[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Talawi)]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	2.445.783.003,00						2.551.336.690,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.986.534.943,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih,	-	2.085.861.690,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16/14 Orang/bulan	1.986.534.943,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		2.085.861.690,00	KECAMATAN TALAWI
						-	-	-	-	2.445.783.003,00						2.551.336.690,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	15.327.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	16.175.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		3.675.000,00	KECAMATAN TALAWI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	11.827.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		12.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
		[Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Talawi)]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	2.445.783.003,00						2.551.336.690,00	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	131.620.308,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	134.250.000,00	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		1.250.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		5 Paket	63.620.308,00	Kota Sawahlunto,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan		65.000.000,00	KECAMATAN TALAWI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Disediakan				Talawi, Semua Kel/Desa			Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	22.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		22.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	45.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		45.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	25.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang	-	26.550.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Terintegrasi			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit	1.500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		1.550.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	4.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		25.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	219.487.952,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta	-	219.950.000,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
															Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		550.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	38.358.610,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		38.600.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	180.629.342,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		180.800.000,00	KECAMATAN TALAWI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	67.312.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	68.550.000,00	
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		9 Unit	58.812.800,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		59.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel											
			Jumlah Mebel yang Dipelihara		1 Unit	2.500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		2.550.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	2.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih,		2.500.000,00	KECAMATAN TALAWI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 Unit	4.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		4.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
187	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	12.000.000,00					-	13.000.000,00	
						[Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Talawi)]	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik	100	100	12.000.000,00					13.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	8.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	8.500.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan		4 Laporan	8.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan		8.500.000,00	KECAMATAN TALAWI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Kel/Desa			Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi				
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	4.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	4.500.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan	4.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		4.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
188	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	245.791.116,00					-	246.500.000,00	
						[Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Talawi)]	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	0	0	245.791.116,00						246.500.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	245.791.116,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-	246.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		5 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		8.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		9 Laporan	237.791.116,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		238.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
189	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	1.040.000,00					-	1.100.000,00	
						[Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Talawi)]	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib	0	0	1.040.000,00						1.100.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1.040.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-	1.100.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	1.040.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		1.100.000,00	KECAMATAN TALAWI
190	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	9.999.800,00					-	11.000.000,00	
						[Meningkatnya Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (Talawi)]	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik	0	0	9.999.800,00						11.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	9.999.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	11.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						Kesatuan Republik Indonesia											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		100 Orang	4.999.800,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		5.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		110 Orang	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		5.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
191	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	9.489.294,00					-	11.000.000,00	
						[Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Talawi)]	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik	0	0	9.489.294,00						11.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	9.489.294,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	11.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan		4 Dokumen	4.489.394,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan		5.500.000,00	KECAMATAN TALAWI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Desa				Kel/Desa			Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		4 Dokumen	4.999.900,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		5.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
	X					NON URUSAN				12.000.000,00						12.500.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				12.000.000,00						12.500.000,00	
192	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	12.000.000,00					-	12.500.000,00	
						-	-	-	-	12.000.000,00						12.500.000,00	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	12.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	12.500.000,00	
	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	12.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih,		12.500.000,00	KECAMATAN TALAWI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.895.834.020,00						0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.573.582.614,00						0,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				2.573.582.614,00						0,00	
193	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.573.582.614,00					-	0,00	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.495.810.931,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		18/14 Orang/bulan	2.495.810.931,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	20.250.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15 Orang	20.250.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	57.521.683,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	6.733.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Komunikasi yang Terintegrasi			
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	50.788.383,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				2.013.265.990,00						0,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.013.265.990,00						0,00	
194	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	-	881.862.400,00					-	0,00	
						[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan]	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	881.862.400,00						0,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	881.862.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang		4 Dokumen	179.790.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Disusun							Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
							Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1 Dokumen	11.990.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka											
							Jumlah Paskibraka		67 Orang	690.082.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
195	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	-	644.818.590,00					-	0,00	
						[Meningkatnya etika dan budaya politik]	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	100	644.818.590,00						0,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	-	-	-	644.818.590,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih,	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
						Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		8 Dokumen	621.881.590,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		30 Orang	22.937.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
196	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	-	30.400.000,00					-	0,00	
						[Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan]	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	55	40	30.400.000,00						0,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	30.400.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		4 Laporan	30.400.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
197	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	-	87.085.000,00					-	0,00	
						[Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial,dan budaya masyarakat]	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	100	87.085.000,00						0,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	-	-	-	87.085.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	-	0,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi				
	8	01	05	2.01	0001		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
								Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	80.085.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
								Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		20 Orang	7.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
198	8	01	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN	-	-	-	369.100.000,00					-	0,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
		PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100	369.100.000,00						0,00	
	8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	369.100.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	8 01 06 2.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		11 Dokumen	27.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 06 2.01 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		9 Dokumen	342.100.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	X					NON URUSAN				308.985.416,00						0,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				308.985.416,00						0,00	
199	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	308.985.416,00					-	0,00	
						-	-	-	-	308.985.416,00						0,00	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	105.449.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	12.181.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	15.927.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Terintegrasi			
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		125 Laporan	77.341.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	41.934.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	0,00	
	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	41.934.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	86.282.416,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	21.449.292,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	63.833.124,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	-	-	75.320.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	-	0,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
							Daerah								Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	X	XX	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5 Unit	60.670.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	XX	01	2.09	0005		Pemeliharaan Mebel											
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		20 Unit	2.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	XX	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Unit	5.780.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
														Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi			
	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	6.370.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH									597.288.950.827,00						465.566.252.549,00	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indicator Kinerja makro merupakan alat ukur untuk mengetahui perkembangan Dario indicator kinerja yang berlaku secara nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi, nasional serta Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait.

6.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Untuk mengukur tujuan pembangunan Kota Sawahlunto secara makro, baik itu dari pendapatan masyarakat, kemampuan ekonomi, kemiskinan, pembangunan manusia, pemerataan pendapatan dan pengangguran dapat dari pencapaian Indicator Kinerja Makro. Berikut capaian Indikator Kinerja Makro tahun 2024 dan target Indikator Kinerja Makro Kota Sawahlunto tahun 2026 dengan tetap memperhatikan arahan dari Provinsi Sumatera Barat

Tabel 6.1
Target Indikator Kinerja Makro Kota sawahlunto
Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	2024		Target Kinerja tahun 2026	
			Target RPD	Realisasi	RPD	RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	4,48	4,02	4,98	4,98
2	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	71,60	73,59	77,11	77,11
3	Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,289	0,299	0,280	0,280
4	Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,19	2,33	2,17	2,17
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,92	5,55	4,75	4,75
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	74,74	76,68	75,54	75,74
	a. Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	11,15	11,187	11,47	11,47

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	2024		Target Kinerja tahun 2026	
			Target RPD	Realisasi	RPD	RKPD
	b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,57	10,53	10,72	10,72
	c. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,55	13,55	14,01	14,01
	d. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,69	74,12	70,89	70,89

Sumber : RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang berfungsi sebagai aat ukur kuantitatif yang akan memberikan infrmasi sejauh mana keberhasilan peaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dari penetapan IKU adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja pembangunan daerah yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digunakan untuk perbaiakan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Secara rinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang harus dicapai daam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sawahlunto
Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target RPD Tahun 2026
	INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN TUJUAN		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	76,74
2	Indeks Infrastruktur Wilayah	[40 %{50%(50 % kualitas jalan + 50 % kualitas jembatan)} + {40 % (50 % kualitas SDA + 50 % kualitas drainase kondisi baik)} + (10 % bangunan Gedung Pemerintah kondisi baik)] + 20 % {60 %(50 % Pengurangan sampah + 50 % Pungutan sampah) + (40 % IKLH)] + [20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni][20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni)] + [10 % {(50 % kinerja Lalu lintas + (50 % kinerja PJU)} + [10 % {(50 % kampung +20 % rehabilitasi rekonstruksi tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + {30 % ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30 % edukasi proteksi kebakaran + 40 % Response Time}]/2	76,22
3	Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	4,98
4	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	77,11
5	Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,17
6	Pengeluaran per-kapita (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	11,47

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target RPD Tahun 2026
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	58,14
	INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN SASARAN		
1	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,89
2	Prevalensi Stunting	(Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumah anak balita pada waktu yang sama) x 100 %	10,60
3	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	14,01
4	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,72
5	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	(Jumlah persentase kondisi Sumber Daya Air, Drainase, Bangunan sesuai standar, Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik/5	72,65
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKL)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5% IKU, 21,9%	66,57
7	Indeks Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sampah	68,90
8	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	88,32
9	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100 %	87,00
10	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7,00
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,75
12	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,34
13	Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri	12,06
14	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	14,98
15	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.	73,90
16	Kontribusi sektor Pertanian pada PDRB (juta)	Kontribusi PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	431.044,38
17	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	9.03
18	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi SAKIP Kemenpan RB	62,81
19	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	penilaian terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	78,00
20	Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	66,01

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target RPD Tahun 2026
21	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	87,03
22	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	82,00
23	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	3,20

Sumber : RPD Kota Sawahlunto tahun 2024-2026

6.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Selain penetapan Indikator Kinerja Utama, ditetapkan pula Indikator Kinerja Daerah sebagai alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah disusun berdasarkan penetapan kinerja pada aspek kesejahteraan, daya saing daerah dan pelayanan umum. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan yang terkait dengan kependudukan, ketenagakerjaan dan gender.Adpek pelayanan umum mengukur kinerja pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang mencakup fokus pelayanan urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, serta urusan pilihan. Target capaian Indikator Kinerja Daerah yang menggambarkan kinerja pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.3
Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Sawahlunto Tahun 2026

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target RPD 2026
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD/ Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kota Sawahlunto x 100 %	100
APK PAUD (%)	(Jumlah Siswa PAUD /Jumlah seluruh anak yang berusia 3-6 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	96,12
Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	Jumlah anak usia7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar sekolah Dasar / anak usia7-12 Kota Sawahlunto	100
APK SD/MI/Paket A (%)	(Jumlah Siswa SD /Jumlah seluruh anak yang berusia 7- 12 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	111,40
APK SMP/MTs/Paket B (%)	(Jumlah Siswa SMP /Jumlah seluruh anak yang berusia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	96,30
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	(Jumlah Murid SD/sederajat usia 7-12 tahun /Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	99,90
Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama/ Jumlah anak usia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto x 100 %	100
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	(Jumlah Murid SMP/sederajat usia 13-15 tahun /Jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	85,20
Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Capaian kompetensi literasi SD adalah persentase capaian satuan pendidikan setiap	2,25

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target RPD 2026
	tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus di kalikan bobot setiap kompetensi	
Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	capaian kompetensi Numerasi SD adalah presentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	2,03
Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	capaian kompetensi Literasi SMP adalah presentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	2,81
Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Capaian kompetensi Numerasi SMP adalah presentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	2,87
Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP) (%)	Jumlah izin yang dikeluarkan (dibagi) / seluruh usulan yang masuk	100
Persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (%)	Jumlah satuan pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai standar baik kuantitas maupun kualitas disetiap jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah satuan pendidikan	100
Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan (%)	Jumlah Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal dibagi dengan satuan pendidikan yang ada	100
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan/ Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kota Sawahlunto x 100 %	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Cakupan Layanan Rujukan (%)	Jumlah Pasien Rujukan yang Dilayani / Jumlah Pasien yang Dirujuk ke RSUD Sawahlunto x 100%	100
Cakupan Layanan Dasar (%)	Jumlah puskesmas yang menjalankan kegiatan UKM dan UKP dibagi dengan jumlah puskesmas dikali 100 %	100
Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia/Jumlah Penduduk x 100 %	0,16
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	Jumlah RS Rujukan tingkat yang terkreditasi/jumlah RS di kab/ Kota Sawahlunto x100 %	100
Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	Jumlah puskesmas terakreditasi / jumlah seluruh puskesmas x 100 %	100
Rasio Tenaga Kesehatan per satuan Penduduk	Jumlah dokter / dengan jumlah penduduk dikali 1000	0,39
Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya (%)	Jumlah SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya dibagi dengan jumlah tenaga kesehatan seluruhnya x 100	100
Jumlah kasus kematian bayi (kasus)	Jumlah Kematian bayi pada satu tahun tertentu	7
Jumlah Kasus Kematian IBU (kasus)	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	1
Persentase Balita Gizi Buruk (%)	jumlah Balita Gizi buruk/Jumlah Balita di Kota Sawahlunto x 100	7
Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan (%)	Jumlah Sarana yang memenuhi standar dan pelayanan perizinan/Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian x 100	90
Persentase sarana pengelolaan makanan minuman sesuai standar berizin (%)	Jumlah Sarana pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi standar	90

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target RPD 2026
	perizinan/Jumlah Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman x 100	
Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan (%)	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan dibagi dengan jumlah poskesdes dan poskeskel yang ada x 100	100
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan/ Jumlah ibu hamil di Kota Sawahlunto x 100%	100
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan/Jumlah ibu bersalin di Kota Sawahlunto x 100%	100
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota x 100%	100
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar/Jumlah balita di Kota Sawahlunto x 100%	100
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar /Jumlah anak usia pendidikan dasar di kota sawahlunto x 100%	100
Persentase orang usia15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar /Jumlah orang usia 15-59 tahun di kota sawahlunto x 100%	100
Persentase warganegara usia 60 tahun ke atas mendapatkanskrining kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar/Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kota sawahlunto x 100%	100
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /Jumlah penderita hipertensi di kota sawahlunto x 100%	100
Persentase penderitaDM yang mendapatkan pelayanan kesehatansesuai standar (%)	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah penderita DM di kota sawahlunto x100%	100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/Jumlah penderita ODGJ di kota sawahlunto x 100%	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar /Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kota sawahlunto x 100%	100
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar/Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kota sawahlunto x 100%	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Nilai SAKIP Dinas PUPR	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	(luas daerah yang dilayani jaringan irigasi/total luas daerah) x 100	0,71
Presentase sawah yang terairi (%)	Luas sawah yang terairi/luas sawah x 100	54,48
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota sawahlunto/Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota sawahlunto x 100%	99,50
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah rumah di kota sawahlunto x 100%	92,97
Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang saluran irigasi dikali seratus persen	52,45
Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak/ total jumlah rumah tangga) x 100	100

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target RPD 2026
Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	Panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %	49,26
Persentase luas permukiman yang tertata (%)	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100	82,52
Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	Jumlah gedung pemerintah kondisi baik/ jumlah gedung pemerintah x 100	87,14
Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap/jumlah panjang jalan x 100 %	79,27
Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	(Panjang Jembatan dalam kondisi mantap dibagi total panjang Jembatan) x 100 %	95,94
Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang (%)	(Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia / jumlah dokumen kebutuhan Penataan Ruang x 100%	100
Persentase kesesuaian dan keteraturan mendirikan bangunan (%)	Jumlah bangunan sesuai tata ruang/ jumlah bangunan X 100	55
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di kota sawahlunto yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis /Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di kota sawahluntox 100%	0,2
Rasio kepatuhan PBG kab/ kota	Jumlah pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya/Jumlah PBG yang berlaku x 100%	87
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Nilai SAKIP Dinas KP2LH	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sesuai SK Walikota (Ha)	3,08
Persentase Penanganan Kawasan permukiman (%)	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %	85
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni / Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100%	100
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	Jumlah unit rumah tidak layak huni/Jumlah total unit rumah kabupaten/kota x 100%	1
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU/Jumlah unit rumah di kota sawahlunto x 100%	87
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	(Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi) x 100%	100
Persentase Penurunan kasus kebakaran (%)	(jumlah kasus kebakaran tahun (n-1) -jumlah kasus kebakaran tahun n)/ jumlah kasus kebakaran tahun (n) x 100%	15,3
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	(Jumlah pengaduan yang ditagani/ jumlah pendaguan pelanggaran yang masuk) x 100%	100
Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto (%)	(Jumlah kasus kebakaran yang ditangani/jumlah kasus kebakaran) x 100%	100
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran danPenyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kota sawahlunto dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah/Jumlah kejadian kebakaran di kota sawahlunto x 100%	100

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target RPD 2026
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	15
Nilai SAKIP BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100
Indeks Ketahanan daerah	Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,57
Persentase Penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus Pelanggaran perda tahun (n-1) - jumlah kasus pelanggaran perda tahun n)/ jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100%	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Nilai SAKIP Dinas Sosial PMDesPPA	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti : populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100%	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun anggaran : populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
Nilai SAKIP DPMPTSPNaker	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi/Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	80
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	PDRB ADHK tahun berjalan / Jumlah tenaga kerja x 100%	97,94
Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD/Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan x 100%	100
Persentase lulusan pelatihan yang berwirausaha (%)	Jumlah lulusan pelatihan yang berwirausaha / Jumlah peserta pelatihan keseluruhan x 100%	9
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	30
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja(%)	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	30
Persentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (%)	Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan / Jumlah pekerja pada perusahaan se-Kota Sawahlunto x 100%	100
Persentase perusahaan yang menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (%)	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun n / Jumlah perusahaan di wilayah Kota Sawahlunto pada tahun n x 100%	50
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS BIPARTIT, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) (%)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/Jumlah total perusahaan x 100%	90
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Indeks Pemberdayaan gender / IDG (IKU OPD) (%)	Indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik	65,9

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target RPD 2026
Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD : jumlah seluruh belanja langsung APBD x 100%	7
Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	Jumlah anggota DRPD perempuan/ jumlah total anggota DPRD x 100%	20
Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%)	Jumlah keluarga yang ditingkatkan kualiasnya/ jumlah seluruh keluarga x 100 %	100
Persentase Kelurahan ramah anak (%)	Jumlah kelurahan ramah anak / jumlah seluruh kelurahan x 100 %	100
Persentase sekolah ramah anak (%)	Jumlah sekolah ramah anak/ jumlah seluruh sekolah x 100 %	100
Rasio KDRT (%)	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun keatas)	0,01
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kota yang didampingi/Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) di kota sawahlunto x 100%	100
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan/Jumlah penduduk perempuan x100%	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
Nilai SAKIP Dinas KP3	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Persentase Kecukupan Kebutuhan Beras (%)	Kebutuhan/Produksi X 100 %	100
Skor PPH	Komposisi kelompok Pangan Utama yang bila dikonsumsi dapat Memenuhi Kebutuhan	87
Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)	Jumlah penurunan produk rawan pangan/jumlah penduduk rawan pangan x 100%	6
Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	Perbandingan produk pangan segar yang terdeteksi dari cemaran mikroba bagi total bahan pangan yang menjadi sampel	93
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	Jumlah cadangan pangan/ Jumlah kebutuhan pangan x 100%	179,2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani/jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x 100%	100
Persentase Dokumen Pertanahan (%)	jumlah dokumen pertanahan yang terlaksana/jumlah dokumen yang dibutuhkan x 100	25
Persentase tanah pemerintah yang tertib administrasi (%)	Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat/jumlah tanah pemerintah x 100 %	30,6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5% IKU, 21,9%	66,57
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota (%)	Total Vol sampah yang dapat ditangani /Total vol timbunan sampah kabupaten/kota x 100%	99
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izinlingkungan, izin PPLHdan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kota sawahlunto /usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x 100%	79
Indeks Kualitas Air (IKA) 37,6 %	Jumlah sampel yang memenuhi baku mutu air	58
Indeks Kualitas udara (IKU) 40,5 %	Jumlah sampel yang memenuhi baku mutu udara	87,64
Indeks Kualitas tutupan lahan (IKL) 21,9 %	luas tutupan lahan	48,72
Indeks Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sambah	68,90

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target RPD 2026
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Catpil	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)	Jumlah anak usia 0-17 th kurang 1 hari yg sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 th x 100%	85
Perekaman KTP elektronik (%)	Jumlah penduduk berumur 17 th keatas yg memiliki KTP /jumlah penduduk 17 th keatas x 100%	99,9
Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir) (%)	Jumlah anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir /Jumlah anak usia 0-18 th x100%	98,2
Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)	Jumlah OPD yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama : Jumlah OPD x 100%	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun : Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x100%	100
Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang pertahun berdasarkan indeks desa membangun/tahun x 100%	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
TFR (Total Fertility Rate) Angka Kelahiran Total	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya	2,16
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate /MCPR (%)	Jumlah AkseptorAktif Moder/ Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100	70
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	Jumlah PUS yang ingin ber - KB tetapi tidak terlayani/Jumlah Pasangan Usia Subur)x 100	11,60
Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga (%)	Jumlah semua kelompok ketahanan keluarga yang mendapatkan informasi Bangga /Semua Jumlah Ketahanan Kelompok yang ada x 100	88
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Rasio konektivitas kota	(IK1 x bobot angkutan jalan) + IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0,56
Kinerja lalu lintas (%)	(Volume lalu lintas/kapasitas jalan) x 100 %	65
Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun n-tahun n-1/ jumlah angka kecelakaan tahun n-1 x 100%	70
Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan/ jumlah ruas jalan x 100%	100
Persentase sarana prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)	Jumlah sarana yang tersedia/jumlah sarana yang dibutuhkan X 100%	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Nilai SAKIP Dinas Kominfo	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	(Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah Layanan Publik) x 100 % (Permendagri 18/2020)	80
Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota (%)	(jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota/jumlah penduduk) x 100%	100
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (%)	(jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo/jumlah opd) x 100%	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
Nilai SAKIP Dinas Koperindag	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target RPD 2026
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/ Jumlah seluruh koperasi x 100%	8,9
Persentase koperasi sehat (%)	(jumlah koperasi sehat/total kopoerasi)x100%	29
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (%)	(Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya/ Total UMKM)x100%	22
Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian (%)	Jumlah koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian/jumlah koperasi x 100%	77
Persentase UMKM yang meningkat volume usahanya (%)	Jumlah UMKM yang meningkat volume usahanya/ Jumlah UMKMx100%	0,7
Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya/total koperasi x 100%	66
Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya (%)	Jumlah pengelola koperasi bersertifikat / Total pengelola koperasi x100%	62
Persentase pengelola UMKM yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya (%)	Jumlah pengelola UMKM bersertifikat / Total UMKM x100%	12
Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	Jumlah UMKM yang memiliki izin usaha/Jumlah UMKM X 100%	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
Persentase Kenaikan nilai realisasi investasi (%)	(Jumlah investasi tahun njumlah investasi tahun n-1) di kota sawahlunto/jumlah investasi tahun n-1 di kota sawahluntox100%	9,03
Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah realisasi investasi (PMDN dan PMA)	56
Persentase Peningkatan Jumlah Investor (%)	(Jumlah investor tahun n - jumlah investor tahun n-1) / Jumlah investor tahun n-1 x 100%	31
Persentase Penerbitan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP (%)	Jumlah Penerbitan Dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP/jumlah penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan x 100%	100
Persentase Peluang Investasi yang telah divalidasi (%)	Jumlah Peluang investasi yang telah divalidasi/jumlah peluang investasi x 100%	60
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terakses Publik (%)	Jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terakses publik/jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan x 100%	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Nilai SAKIP Dinas Parpora	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Persentase partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri (%)	(Jumlah pemuda yang berwirausaha/jumlah pemuda) x 100%	16,20
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kota sawahlunto/jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota sawahlunto x 100%	4,27
Jumlah pemuda berprestasi (orang)	Jumlah pemuda yang berprestasi	18
Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	Jumlah pemuda berprestasi ditingkat provinsi dan Nasional	18
Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	Jumlah organisasi kepramukaan yang berprestasi ditingkat provinsi dan nasional/jumlah organisasi kepramukaan x 100%	79
Jumlah atlit yang berprestasi	Jumlah atlit yang berprestasi	160
Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	190
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	Jumlah OPD yang yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah OPD x 100 % (Permendagri 18/2020)	100
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik	Jumlah OPD yang yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi	100

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target RPD 2026
dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	pembangunan daerah / Jumlah OPD x 100 % (Permendagri 18/2020)	
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ketersediaan Data (ada/tidak ada)	Ada
Ketersediaan Buku "Kota Sawahlunto Dalam Angka"	Ketersediaan Data (ada/tidak ada)	Ada
Ketersediaan Buku " PDRB Kota Sawahlunto "	Ketersediaan Data (ada/tidak ada)	Ada
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	Jumlah nilai per area keamanan informasi / Jumlah area penilaian x 100 % (Permendagri 18/2020)	40
Persentase titik yang diamankan dibandingkan dengan seluruh titik pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang ditetapkan (%)	Jumlah itik yang diamankan / Jumlah seluruh titik pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang ditetapkan x 100 % (Permendagri 18/2020)	70
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah / Jumlah Total Perangkat Daerah x 100 % (Permendagri 86/2017)	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Persentase pelestarian budaya tak benda (%)	(Jumlah Budaya Tak Benda Yang Lestari/ Jumlah Budaya Tak Benda) x 100%	77,20
Persentase Pemajuan Kebudayaan Yang Lestari (%)	(Jumlah pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/Total jumlah pemajuan kebudayaan) X100%	31,5
Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri (Kelompok)	Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri	13,9
Persentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah (%)	(Jumlah kelompok masyarakat yang mengetahui sejarah / Jumlah kelompok masyarakat yang ada) X 100%	70
Persentase warisan Budaya Benda yang Lestari (%)	Jumlah warisan Budaya Benda Yang Lestari / Jumlah warisan budaya benda x 100%	70,8
Persentase cagar Budaya Yang Lestari (%)	(Jumlah cagar budaya yang lestari / Total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) X 100%	67
Jumlah kunjungan museum (orang)	Jumlah kunjungan museum (orang)	34000
Persentase Pelestarian warisan Budaya (%)	(Jumlah warisan budaya yang dilestarikan/Jumlah warisan budaya) x 100%	78
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai survei terhadap 5% penduduk usia 15-69 tahun	51,4
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat	74,7
Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (%)	(Jumlah Pengunjung Tahun n - jumlah pengunjung tahun n-1)*100%/Jumlah Pengunjung Tahun n-1	2
Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat (%)	Hasil survey terhadap 5% penduduk usia 15 s/d 69 tahun	52,4
Persentase perpustakaan aktif (%)	Jumlah pustaka aktif/ jumlah total pustaka x 100%	90
Naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan (naskah)	Jumlah naskah yang dinyatakan sebagai naskah kuno	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Kota (ANRI)	Nilai Pengawasan kearsipan kab/kota	B
Tingkat ketersediaan arsip sbg bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah & pertanggungjawaban nasional (pasal	T = (m+b+g+a+c+i)/6 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, m = tingkat kesesuaian	50,60

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target RPD 2026
40 & pasal 59 UU no 43/2009 ttg kearsipan) (%)	kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan & penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip PD Prov yg digabung dan/atau dibubarkan & pemekaran daerah kab/kota dg NSPK, a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis & arsip hasil alih media dengan NSPK, c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yg bersifat tertutup dg NSPK	
Tingkat keberadaan & keutuhan arsip sbg bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa & bernegara utk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik & kesejahteraan rakyat (%)	T=(a+i+s+j)/4 T = tingkat kearsipan, a = % arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip, i = % arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip, s = % arsip statis yg telah dibuatkan sarana bantu temu balik, j = % jumlah arsip	50,60
Persentase arsip yang diberi akses (Lembar)	(Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan / Jumlah Arsip Yang diakses) * 100%	300
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Produksi Ikan (ton)	Jumlah produksi perairan umum dan budidaya	204
Tingkat Konsumsi Ikan (%)	Jumlah kg ikan yang dikonsumsi masyarakat indonesia selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan segar	39
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) /Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%	5,76
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota sawahlunto	(Jumlah wisatawan tahun n –Jumlah wisatawan tahun n-1)/Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%	66
Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual/Jumlah kamar yang tersedia x 100%	17,5
Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,34
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4,35
Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (%)	Jumlah Industri Pariwisata yang berdaya saing (sudah memenuhi syarat)/ Jumlah total industri Pariwisata x 100%	5
Persentase produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI (%)	Jumlah produk ekonomi kreatif yang bersertifkat HKI/jumlah total ekonomi kreatif x 100%	3
Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang profresional/Jumlah total pelaku ekonomi kreatif x 100%	30
jumlah wisatawan (orang)	Jumlah wisatawan yang dihitung berdasarkan tiket masuk objek wisata	160000
Tingkat kepuasan pengunjung (%)	Jumlah pengunjung yang mengatakan puas/jumlah seluruh pengunjung x 100%	80
Persentase Objek Wisata Unggul (%)	Jumlah Objek wisata unggul/jumlah objek total jumlah wisata x 100%	60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
Jumlah Produksi Padi (Ton)	Produktivitas x luas panen	15.900
Jumlah Produksi Karet (Ton)	Produktivitas x luas panen TM	1.740
Jumlah Produksi Kakao (Ton)	Produktivitas x luas panen TM	571
Produksi Daging Sapi (Ton)	Pemotongan tercatat + 5% (pemotongan tercatat) x 173,5	321
Produksi Daging Ayam (Ton)	150% x populasi x 0,715 daging ayam ras pedaging	900,26
Produksi Telur (Ton)	150% x populasi x 0,715 daging ayam ras pedaging	135,86
Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	Luas serangan OPT/ Luas tanaman	01:10
Jumlah Ketenagaan Penyuluh yang berprestasi (orang)	Jumlah penyuluh yang memperoleh prestasi di tingkat prov/nasional	1

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target RPD 2026
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)/ Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Persentase peningkatan usaha perdagangan (%)	Jml pasar yang beroperasi setiap hari/ Total x 100 %	100
Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	Jumlah pasar rakyat dengan minmal tipe C / jumlah pasar x 100%	14
Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional (%)	Jumlah bahan pokok yang stabil/Total kebutuhan bahan pokok x 100%	247506
Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	Jumlah produk unggulan yang diekspor/Jumlah Produk unggulan x 100%	50
Pesentase pasar tradisional tertib ukur (%)	Jumlah pasar tradisional tertib ukur/ jumlah pasar tradisional x 100%	42
Persentase produk dalam negeri yang dipromosikan (%)	Jumlah produk dalam negeri dipromosikan/Total Produk dalam negeri x100%	65
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan/Jumlah pelaku usaha diwilayah Kab/Kota x 100%	18
Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	Realisasi/ RDKK x 100%	83
Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan/jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang diwilayah kabupaten/kota x 100%	73
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu (IKM)	Jml produk IKM yang memiliki sertifikat halal, AKG tahun ini - tahun sebelumnya	5
Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri (IKM)	Jml IKM yang memanfaatkan teknologi industri tahun ini - tahun sebelumnya	60
Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	Jumlah IKM yang meningkat skala usahanya/ Total IKM x100%	2
Persentase Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai izin (%)	Jumlah Indsutri kecil menengah yang mempunyai izin/jumlah industri kecil dan menengah x 100%	45
Persentase IKM yang terpublis di SIINAS(%)	Jumlah IKM yang terpublis di SIINAS /jumlah IKM X 100%	45
	Jumlah data IKM yang diperbaharui dalam Sinas	200
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DAERAH		
Nilai SAKIP SETDAKO	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Rasio Hafiz Qur'an terhadap santri rumah/pondok tahfiz (%)	(jumlah hafiz alquran/jumlah santri rumah hafiz x 100%	70
Persentase Peningkatan Zakat di Kota Sawahlunto (%)	(jumlah zakat tahun n - jumlah zakat tahun n-1)/jumlah zakat tahun n-1	6,78
Persentase Bantuan Hukum Yang Difasilitasi (%)	(jumlah bantuan hukum yang difasilitasi/jumlah permohonan bantuan hukum yang masuk)x 100%	100
Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti (%)	(Jumlah kerjasama yang ditindakanjuti/jumah kerjasama ynag direncanakan) x 100%	100
Jumlah Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto (Milyar)	jumlah zakat yang terkumpu pada tahun n pada BAZNAS Kota Sawahlunto	6,58
nilai kinerja Pemerintah dalam penerapan SPM	Penilaian kinerja Pemerintah daerah oleh Kementerian dalam negeri RI	94,65
Nilai Kinerja pemerintah berdasarkan hukum dan HAM (predikat)	Penilaian kinerja pemerintah daerah oleh Kementerian Hukum dan HAM RI	Kota Peduli HAM
Laju Inflasi (%)		< 3,5
SEKRETARIAT DPRD		
Nilai SAKIP Sekretariat Dewan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Jumlah perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan (%)	Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah ranperda yang diusulkan) x 100 %	100

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target RPD 2026
PERENCANAAN		
Niai SAKIP Barenlitbangda	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A
Indeks Perencanaan Pembangunan	60% capaian sasaran pemkot + 20 % capaian sasaran PD + 20% capaian program X 100%	100
Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD ke dalam RKPD (%)	Jumlah Program pada RKPD/ Jumlah Program pada RPJMD x 100%	100
Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	Jumlah Capaian Program/ Jumlah Target Program yang ada x 100%	100
Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Mitra (%)	60% capaian sasaran pemkot + 20 % capaian sasaran PD + 20% capaian program X 100% (BIDANG MITRA)	100
KEUANGAN		
Nilai SAKIP BPKAD	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Opini Laporan Keuangan	Opini laporan keuangan	WTP
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Penilaian terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	78
Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar aset tetap?	Ada
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	Ada
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	Ada
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	Ada
Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	(Nilai PAD dibagi dengan total pendapatan)x 100%	12,43
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA/total belanja anggaran tahun sebelumnya x 100%	0,60
KEPEGAWAIAN		
Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	Ukuran Kepuasan terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian	100
Pemenuhan Penataan ASN (NSPK) Pemerintah Kota Sawahlunto	Nilai NSPK BKN	85
Indeks Merit Sistem ASN	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah (Penilaian dari KPK)	170
Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas : jumlah pegawai dg pendidikan SMA kebawah	3,00
Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yg memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,40
Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru & tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,26
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan (%)	(Jumlah Penelitian yang Ditindaklanjuti / Jumlah Seluruh Penelitian) x 100%	100
Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Kebijakan/Perencanaan Pembangunan (%)	Jumlah data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan kebijakan/perencanaan pembangunan/jumlah total data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan x 100%	100
INSPEKTORAT DAERAH		
Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 4

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target RPD 2026
Persentase PD yang mendapat Nilai SAKIP BB	Persentase PD yang mendapat Nilai SAKIP BB	100
Persentase pengawasan terlaksana sesuai PKPT (%)	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan / Jumlah Rencana Pengawasan di PKPT x 100	100
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK		
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda/ Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda x 100%	70
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda/total jumlah dokumen yang telah dirinci x 100%	90
PENGADAAN		
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	(Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif/jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif) x100%	67
Persentase jumlah total proyek kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)	(jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam tiga kuartal yang ditandatangani pada kuartal prertama tahun n/ jumlah kontrak keseluruhan tahun n) x 100%	0
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	(Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan/total belanja langsung) x 100%	0,37
UNSUR KEWILAYAHAN		
Nilai SAKIP Kecamatan Talawi	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Nilai SAKIP Kecamatan Barangin	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Nilai SAKIP Kecamatan Silungkang	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Nilai SAKIP Kecamatan Lembah Segar	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	(Jumlah LPM,PKK, RT/RW yang Aktif/Jumlah Total LPM,PKK, RT/RW) x 100 %	100
PEMERINTAHAN UMUM		
Nilai SAKIP Badan Kesbang	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Persentase potensi konflik yang dapat teredam (%)	Jumlah potensi konflik yang dapat teredam /jumlah potensi konflik x 100%	100
Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	Jumlah Peserta yang meningkat pemahamannya/jumlah peserta x 100%	70
Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (%)	Jumlah masyarakat yang memilih pada Pemilu/Jumlah DPT x 100%	86,25
Tingkat partisipasi pemilih pada pemillihan kepala daerah (%)	Jumlah masyarakat yang memilih pada Pilkada/Jumlah DPT x 100%	82,5
Tingkat partisipasi pemilih pada pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur (%)	Jumlah masyarakat yang memilih pada Pilgub/Jumlah DPT x 100%	65,8
Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif di Kota Sawahlunto (%)	Jumlah organisasi yang terdaftar dan aktif/jumlah organisasi yang terdata x 100%	100
Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (%)	Pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	100
Indeks Ketahanan Nasional	kondisi dinamis bangsa indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung	2,91

Sumber : DataOlahan Barenlitbangda 2025

BAB VII
PENUTUP

7.1 KAIDAH PELAKSANAAN

RKPD Tahun 2026 menjadi bagian dari Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun ketiga atau tahun terakhir. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2026, mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian difokuskan pada program, kegiatan dan subkegiatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2026 dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026;
2. Terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang tidak tercantum dalam Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan sepanjang merupakan program/kegiatan/subkegiatan yang bersumber dana yang bersifat peruntukan khusus atau merupakan instruksi/permintaan tertulis dari Pemerintah Pusat/Provinsi, yang peruntukannya memerlukan persetujuan/verifikasi instansi yang berwenang, merupakan dampak atas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat/Provinsi, dapat diproses dalam penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD;
3. Proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Tahun 2026 merupakan perkiraan/asumsi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun berkenaan sebagai pedoman penentuan plafon anggaran;
4. Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan/subkegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2026 merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan perkiraan/asumsi;
5. Usulan lokasi kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah merupakan perkiraan, sedangkan kepastian lokasi mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
6. Dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026, Perangkat Daerah dan seluruh pelaku pembangunan di Kota Sawahlunto wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergitas;
7. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong.

7.2 MANAJEMEN RESIKO PEMBANGUNAN

Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antarjenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi serta berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat dalam menjalankan program/kegiatan prioritas selalu melibatkan lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara sistematis dan terintegrasi

Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif. Mendukung hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan dimulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Pengendalian terhadap kemungkinan adanya risiko-risiko dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

1. Pengendalian Perencanaan
   Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya yang mencakup:

   a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan
      Konsistensi penjabaran pada dokumen perencanaan meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
   b. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan memiliki waktu.
   c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran
   d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Risiko secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga pembangunan tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan risiko yang akan terjadi, penyebab risiko, dampak dari terjadinya risiko, kategori dan sumber risiko sehingga bisa dirumuskan rencana tindak pengendalian yang bertujuan untuk menurunkan level risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

2. Pengendalian Pelaksanaan
   Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana yang mencakup:
   a. Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah
   b. Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.
   c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
   d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu didukung dengan regulasi agar pelaksanaan pengendalian berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas pengendalian yang dilakukan, regulasi pengendalian ini dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan tertinggi yang berlaku. Sehingga RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 bisa dijadikan sebagai :

1. Pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Tahun 2026;
2. Pedoman dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026
3. Pedoman dasar dalam hal penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.
4. Pedoman dasar bagi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Sawahlunto RKPD Tahun 2026 ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dijadikan pedoman perumusan dan penetapan Renja Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah;

5. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun 2026 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang hasilnya dibahas lebih lanjut bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kota Sawahlunto guna mendapatkan kesepakatan bersama pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

28 AUG 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19920411 201001 1 014

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA

PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO

RKPD | RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO - TAHUN 2026

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Jl. Soekarno - Hatta No. 3 Lubang Panjang
Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27424
(0754) 61009, Fax (0754) 62200
bappedaswl@gmail.com
barenlitbangda.sawahluntokota.go.id
barenlitbangda_sawahlunto
barenlitbangda.sawahlunto